

Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed.

DINAMIKA SOSIOLOGIS INDONESIA

Agama dan Pendidikan
dalam Perubahan Sosial

Sambutan: Prof. Dr. Jalaluddin
Epilog: Prof. Dr. Irwan Abdullah

LKIS

DINAMIKA SOSIOLOGIS INDONESIA

Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial

DINAMIKA SOSIOLOGIS INDONESIA :

Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial

Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed.

©Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed. LKIS, 2015

xi + 540 halaman, 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-602-72813-2-5

Kata Sambutan : Prof. Dr. Jalaluddin
Epilog : Prof. Dr. Irwan Abdullah
Editor : Toto Suharto, Safarina HD, Nor Huda
Rancang Sampul : Ruhtata
Setting/Layout : Ahmat

Penerbit :

PT. LKIS Pelangi Aksara

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 387194

Faks.: (0274) 379430

<http://www.lkis.co.id>

e-mail: lkis@lkis.com

Anggota IKAPI

Cetakan I: 2015

Percetakan:

PT. LKIS Printing Cemerlang

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 387194, 0822 4269 7136

e-mail: lkis.printing@yahoo.com

MENGAJI ISLAM DARI PERSPEKTIF ILMU-ILMU SOSIAL :

Catatan Editor

Catatan ini berangkat dari pemikiran bahwa studi Islam merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kualitas intelektual kaum Muslim. Studi Islam dalam maknanya yang paling luas adalah masalah intelektual. Studi Islam yang mengabaikan dimensi intelektual akan melahirkan kemandulan dan kebangkrutan intelektualisme di kalangan Muslim.¹ Oleh karena itu, menurut Syafii Maarif, untuk dapat mencapai peningkatan kualitas profesi, seorang Muslim yang melakukan studi Islam harus dapat mendalami bidang spesialisasinya dan disiplin-disiplin terkait. Akan tetapi, untuk dapat mengembangkan visi intelektual, seorang ilmuan Muslim harus menerobos batas-batas disiplin yang digelutinya. Dia harus dapat menggumuli agama, filsafat, sejarah, sastra dan wacana-wacana intelektual lainnya. Tanpa bantuan komponen ilmu-ilmu ini, visi intelektual studi Islam akan terpasung oleh spesialisasi bidang yang digelutinya.²

Era modernitas telah menyimpan dan menyisakan banyak persoalan yang begitu kompleks. Kompleksitas persoalan-persoalan ini telah sedemikian rupa merembes masuk dan menyentuh seluruh relung-relung kehidupan manusia, termasuk wilayah pemikiran keagamaan.³ Dalam konteks ini, kaum agamawan dituntut untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan itu dan sekaligus meresponsinya dengan arif dan bijaksana. Pemikiran keislaman (*Islamic thought*) oleh

¹ A. Syafii Maarif, *Islam: Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 34.

² *Ibid.*, 37.

³ Lihat M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2000), 20.

karenanya sudah tidak lagi berbicara tentang tipologi pemikiran Islam klasik antara Sunni-Syiah atau Salaf-Khalaf. Lebih dari itu, menurut Hassan Hanafi, pemikiran keislaman telah mengalami *shifting* dan wilayah pemikiran yang dulunya hanya memikirkan persoalan-persoalan "teologi" (ketuhanan) klasik, menuju paradigma pemikiran yang lebih menelaah dan mengkaji secara serius persoalan-persoalan "kemanusiaan" (antropologi).⁴ Atau dalam bahasa M.M. Sharif, setiap studi Islam harus dikombinasikan dengan kajian humaniora, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu kehidupan sehari-hari.⁵ Dengan ini, studi Islam tidak lagi berparadigma "teosentrisme", tapi lebih mengarah kepada paradigma "antroposentrisme".

Maksud dari paradigma antroposentrisme di sini adalah penggunaan pendekatan-pendekatan kontekstual, yang menurut Jacques Waardenburgh, digunakan untuk mencoba memahami agama dalam konteks sejarah, sosial, politik, budaya dan sebagainya, di mana agama itu berada. Ia bermaksud menjelaskan situasi-situasi dan perkembangan suatu agama tertentu yang muncul dari konteks-konteks itu.⁶ Jadi, paradigma antroposentrisme dalam studi Islam lebih bersifat kontekstual, lebih mengarah kepada situasi dan kondisi yang sosiologis-antropologis.

Model Pendekatan Sejarah

Paling tidak, terdapat lima model kajian yang berbicara tentang studi Islam dengan pendekatan sejarah, yang telah dilakukan oleh akademisi PTKIN (Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri). Model pertama diajukan oleh Nourouzzaman Shiddiqi (alm.) yang pernah menduduki jabatan sebagai Guru Besar Sejarah Islam IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurutnya, saham Ilmu Sejarah dalam mengkaji perilaku manusia terletak pada metodenya.

⁴ Hassan Hanafi, *Dirasat Islamiyyah* (t.tp: Maktabah al-Anglo al-Mishriyyah, t.t.), 205. Lihat juga M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 43.

⁵ M.M Sharif, *Islamic and Educational Studies* (Edisi II; Lahore: Muhammad Ashraf Dart, 1976), 15.

⁶ Jacques Waardenburgh, "Studi Agama-Agama Kontemporer" dalam Mircea Eliade dkk., *Metodologi Studi Agama*, alih bahasa Ahmad Norma Permata (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 477.

⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, "Sejarah: Pisau Bedah Ilmu Keislaman" dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (eds.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), 72.

⁶ *Ibid.*, 73.

Karakter menonjol dari pendekatan sejarah adalah tentang signifikansi waktu dan prinsip-prinsip kesejarahan. Setiap orang adalah produk masa lalu dan selalu mengalami proses perubahan dan perkembangan secara berkesinambungan dalam satu mata rantai yang tidak putus.⁷ Suatu studi dengan analisis sejarah kiranya akan menghasilkan dua unsur pokok, yaitu konsep periodisasi dan rekonstruksi historis yang meliputi genesis, perubahan dan perkembangan.⁸ Dengan ini, studi Islam dengan pendekatan sejarah harus memuat salah satu dari tiga aspek rekonstruksi sejarah ini, yaitu aspek asal-usul (*origin*), perubahan (*change*) dan perkembangan (*development*).

Model pendekatan sejarah kedua dilakukan oleh Azyumardi Azra yang merupakan Guru Besar Sejarah Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut Azra yang menulis disertasi berjudul "The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay Indonesia Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries", studi Islam dengan pendekatan sejarah di IAIN masih sangat "*political oriented*". Dengan orientasi seperti ini sejarah Islam sering digambarkan sebagai pertarungan dan perebutan kekuasaan yang tak habis-habisnya. Sejarah Islam sesungguhnya bukanlah semata-mata sejarah politik. Sejarah politik hanya merupakan sebagian kecil dari sejarah Islam secara keseluruhan. Sejarah Islam dalam pengertian yang seluas-luasnya mencakup kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan atau tradisi intelektual.⁹ Oleh karena itu, Azra menyarankan pentingnya penggunaan sejarah sosial dalam studi Islam. Azra menulis "sejarah sosial merupakan alternatif terbaik untuk lebih menjelaskan perkembangan dan perubahan-perubahan historis pada masa silam secara lebih akurat dan komprehensif. Perjalanan kita (di IAIN) ke arah pengembangan studi dan pengajaran sejarah sosial masih

⁷ Azyumardi Azra, "Penelitian Non-Normatif Tentang Islam: Pemikiran Awal Tentang Pendekatan Kajian Sejarah pada Fakultas Adab" dalam Mastuhu dan M. Deden Ridwan (Eds.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu* (Cet. I; Bandung: Nuansa-Pusjarlit, 1998), 120. Tullisan ini dimuat ulang dalam Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Cet. I; Jakarta: Logos, 1999), 217-227.

⁸ *Ibid.*, 126.

⁹ Nurcholish Madjid, "Kajian Islam di Asia Tenggara: Masalah Metodologi dan Kesenjangan Ilmiah Antarkawasan" dalam Nurcholish Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997), 151-152.

jauh".¹⁰ Apa yang disarankan Azra kiranya perlu disambut dengan baik, mengingat Ilmu Sejarah semenjak Perang Dunia II telah mulai menjadi modern. Ini dibuktikan dengan mulai dijauhinya sejarah konvensional yang *political oriented* itu. Kalau studi sejarah di PTKIN tidak mau ketinggalan jaman, maka orientasi kajiannya harus diubah, seperti yang disarankan oleh Azra di atas.

Model ketiga disampaikan oleh Nurcholish Madjid, mantan Guru Besar Sejarah Pemikiran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurutnya, Islam di Asia Tenggara masih sedang mengalami proses ke arah tingkat penyerapan agama dan peradaban Islam yang lebih tinggi dan pekat. Mustahil dapat memahami Islam dengan baik dengan mengabaikan proses sejarah yang panjang itu. Untuk itu, diperlukan model-model kajian Islam yang lebih ilmiah. Dalam kaitan ini, metodologi Ibnu Khaldun adalah suatu kemungkinan model. Ibnu Khaldun telah memperkenalkan pendekatan sejarah terhadap gejala peradaban Islam. Sudah merupakan hal yang urgen untuk menghidupkan kembali pendekatan sejarah Ibnu Khaldun ini.¹¹ Patut disayangkan, apa, bagaimana dan mengapa pendekatan sejarah Ibnu Khaldun ini perlu digunakan dalam studi Islam, tidak dibahas oleh Madjid.¹² Namun yang pasti, model ini dapat mengambil pemikiran tokoh yang hidup dalam rentang sejarah tertentu.

Model kajian sejarah berikutnya dilakukan oleh Akh. Minhaji, Guru Besar Sejarah Hukum UIN Sunan Kalijaga. Minhaji mencoba membahas beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan sejarah sebagai sebuah pendekatan dalam studi Islam, dan kemudian sekaligus menerapkan pendekatan ini dengan mengambil kajian hukum Islam sebagai contohnya. Sejarah sebagai sebuah disiplin kiranya dapat membantu menjelaskan fenomena sosial yang berguna bagi terbentuknya *the type ideal of ummah*. Model-model pendekatan sejarah di kalangan Barat kiranya dapat digunakan untuk mengkaji Islam pada umumnya. Akan tetapi, hal ini jangan sampai membuat lalai dengan terabaikannya model-model kajian sejarah warisan Is-

¹⁰ Informasi awal tentang pendekatan sejarah Ibnu Khaldun, dapat dibaca, misalnya, dalam Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun* (Cet. I; Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003).

¹¹ Akh. Minhaji, "Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam" *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, No. 8 Th. V 1999, 80-81.

¹² Syafiq A. Mughni, "Sejarah dan Historiografi Islam" Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (eds.), *Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam* (Jakarta: Dirbinperta Islam Depag RI, 2000), 316-318.

lam, semisal model kajian sejarah Ibnu Khaldun. Kombinasi antara kedua model pendekatan sejarah (Barat dan Timur) ini Justeru akan memperkaya wawasan kesejarahan Islam.¹³ Jadi, model kajian sejarah yang ditawarkan Minhaji lebih pada kombinasi antara tradisi keilmuan Barat dan Timur dalam penggunaan pendekatan sejarah, dengan mengambil tema tertentu sesuai ranah keilmuan Islam.

Berbeda dengan model-model terdahulu, Syafiq A. Mughni yang merupakan Guru Besar Sejarah Islam UIN Sunan Ampel Surabaya ini menunjukkan bahwa untuk membangun masa depan PTKIN yang memiliki bobot intelektual, studi Islam dengan pendekatan sejarah harus dikembangkan secara lebih baik. Paling tidak ada dua orientasi yang harus diperhatikan dalam studi sejarah di IAIN. *Pertama*, studi sejarah Islam sebaiknya tidak terfokus pada kawasan Timur Tengah melulu. Masih banyak kawasan Islam lainnya yang belum terjamah oleh studi sejarah di IAIN, misalnya masyarakat Islam di Afrika Hitam, Asia Tengah, Cina dan lain-lain. *Kedua*, studi sejarah seyogyanya tidak hanya mengandalkan pendekatan diakronik, tapi juga pendekatan sinkronik. Dengan pendekatan sinkronik diharapkan diperoleh wawasan yang komprehensif tentang situasi kontemporer. Pendekatan ini kiranya memerlukan kajian tentang berbagai aspek kehidupan yang menggerakkan sejarah. Inilah yang disebut dengan pendekatan multidisiplin dalam kajian sejarah.¹⁴ Dengan dua orientasi ini, bagi Mughni, arah kajian studi sejarah di PTKIN dapat mengikuti tiga model kajian, yaitu model sejarah kawasan, sejarah sejarah Islam di Indonesia dan model kamus riwayat hidup. Ketiga model ini harus dikembangkan sedemikian rupa di lingkungan PTKIN, sambil merintis dan menemukan model baru yang sangat memperhatikan dan menekankan pemanfaatan ilmu-ilmu bantu sejarah seperti sosiologi, arkeologi antropologi dan lain-lain.¹⁵

Dari kelima model pendekatan sejarah di atas kiranya dapat dikatakan bahwa apa yang dirintis oleh akademisi PTKIN dalam

¹³ *Ibid.*, 324-329.

¹⁴ Mastuhu, "Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Sosiologi" dalam Mastuhu dan M. Deden Ridwan (eds.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu* (Cet. I; Bandung: Nuansa-Pusjarlit, 1998), *ibid.*, hal. 81-106.

¹⁵ M. Atho Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi", Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 15 September 1999, 7-12. Tulisan ini dimuat dalam M. Amin Abdullah dkk., *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 27-66.

kaitannya dengan studi Islam dengan pendekatan sejarah itu masih berkaitan dengan masalah metodologis, yaitu bagaimana menulis sejarah dengan baik dan ilmiah. Masalah metodologis seperti ini kiranya merupakan hal yang perlu diperhatikan, mengingat kajian sejarah Islam di PTKIN dewasa ini masih dirasakan lemah dalam segi ini. Dalam kaitan ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pengembangan studi Islam di IAIN dengan pendekatan sejarah. *Pertama*, kajian sejarah harus mencakup salah satu dari tiga ranah penelitian sejarah, yaitu asal-usul, perubahan atau perkembangan. *Kedua*, orientasi kajian sejarah lebih mengarah kepada perspektif sosiologis atau antropologis, bukan melulu orientasi politik. *Ketiga*, penggunaan teori-teori sejarah Barat harus dikombinasikan dengan teori-teori sejarah warisan Islam. *Keempat*, model kajian sejarah bisa mengambil bentuk sejarah kawasan, sejarah Islam Indonesia atau sejarah intelektual seorang tokoh.

Model Pendekatan Sosiologi

Model pendekatan sosiologi dapat dilakukan dengan mengikuti model Mastuhu, Guru Besar Ilmu Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mastuhu mencoba menemukan sumbangan sosiologi, berupa paradigma ilmiah, bagi pengembangan studi Islam. Beberapa teori dan metodologi yang digunakan dalam studi sosiologi dapat digunakan dalam studi Islam, mulai dari paradigma studi sosiologi sampai pada model pengukuran penelitiannya.¹⁶ Di sini Mastuhu berupaya mengungkapkan bahwa studi Islam memiliki dua bidang garapan, yaitu ajaran Islam yang normatif-doktriner pada satu sisi; dan implikasi, aplikasi atau pengaruh ajaran Islam tersebut dalam kehidupan nyata, pada sisi lain. Garapan kedua ini, bagi Mastuhu, dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologi.

Model pendekatan sosiologi dalam studi Islam juga dapat mengikuti model M. Atho Mudzhar, Guru Besar Sosiologi Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini pendekatan sosiologi M. Atho Mudzhar lebih aplikatif lagi. Dia mampu menjelaskan di mana posisi pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Ada lima tema yang menjadi garapan sosiologi dalam rangka studi Islam, yaitu: (1) tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat; (2) tentang pengaruh perubahan masyarakat terhadap konsep keagamaan; (3)

¹⁶ *Ibid.*, 15-16.

tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat; (4) tentang pola interaksi masyarakat Muslim; dan (5) tentang gerakan masyarakat yang mengandung paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.¹⁷ Kelima tema kajian sosiologi ini oleh Mudzhar diaplikasikan dalam penelitian hukum Islam.¹⁸ Dengan mengambil dua contoh, yaitu masalah himbauan MUI tentang calon legislatif non-Muslim dan masalah calon presiden wanita, Mudzhar menyimpulkan bahwa aplikasi pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami gejala-gejala sosial seputar hukum Islam, yang pada gilirannya dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam yang dinamis.

Model pendekatan sosial selanjutnya dapat mengikuti model A. Qodri Azizy (alm.), mantan Guru Besar IAIN (sekarang UIN) Walisongo Semarang. Menurutnya, ada empat model pendekatan yang biasa digunakan Barat dalam rangka *Islamic Studies*. *Pertama*, penggunaan ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori *humanities*, seperti filsafat, filologi, ilmu bahasa dan sejarah. *Kedua*, penggunaan pendekatan dalam disiplin teologi, studi Bible dan sejarah gereja. *Ketiga*, penggunaan metode ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik dan psikologi. *Keempat*, penggunaan pendekatan yang dilakukan oleh depertemen-depertemen di dalam studi kawasan (*area studies*).¹⁹ Dari keempat pendekatan ini, bagaimanakah Islam dikaji dengan menggunakan disiplin ilmu-ilmu sosial? Menurut Azizy, dalam hal ini tak jarang terjadinya semacam *gap* antara pemeluk Islam yang berada dalam wilayah realita dengan sosok ajaran Islam yang ideal-normatif. Islam sering dipandang Barat sebagai apa yang tampak dari praksis sosial. Padahal, mengidentikkan Islam dengan suatu masyarakat Muslim tertentu merupakan generalisasi yang tidak dapat diterima. Temuan yang diperoleh dengan jalan generalisasi seperti ini, terutama karena penggunaan metode antropologi, tidak bisa menjadi representasi bagi kenyataan Islam yang meliputi normatif. Selain itu, ada kendala lain yang muncul apabila Islam dikaji Barat dengan ilmu-ilmu sosial, yaitu masalah

¹⁷ A. Qodri Azizy, "Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial untuk Kajian Islam: Sebuah Overview" dalam M. Amin Abdullah dkk., *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 132-134.

¹⁸ *Ibid.*, 139-143.

¹⁹ Jamhari, "Pendekatan Antropologi dalam Kajian Islam" dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (Eds.), *Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam* (Jakarta: Dirbinperta Islam Depag RI, 2000), 171-172.

tujuan atau niat. Masalah ini merupakan problem terbesar ilmu sosial dalam mengkaji Islam, seperti tampak dalam berbagai kajian Orientalisme. Oleh karena itu, ilmuan Muslim muncul memberikan reaksi dan respons dengan menolak epistemologi disiplin ilmu sosial, seperti tampak dalam gagasan *Islamization of knowledge* dari al-Faruqi, Nasr maupun al-Attas. Menanggapi problem ini, Azizy menawarkan solusi, yaitu adanya kerjasama antara ilmuan sosial dan ilmuan Muslim dalam studi Islam dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Atau solusi yang lebih ideal adalah menjadikan ilmuan sosial mempelajari ilmu-ilmu keislaman, dan pada waktu bersamaan ahli Islam mendalami ilmu-ilmu sosial.²⁰ Akan tetapi, solusi dan tawaran yang diajukan Azizy itu sesungguhnya dapat menimbulkan masalah lain, yaitu masalah dikotomi antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu sosial. Menurut penulis, justeru yang layak menjadi proyek besar dalam hal ini adalah upaya merumuskan kembali epistemologi ilmu-ilmu-keislaman secara integralistik dan komprehensif, sehingga dikotomi itu dapat dihilangkan.

Model Pendekatan Antropologi

Model pendekatan antropologi dalam studi Islam dapat mengikuti apa yang telah dilakukan Jamhari dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut Jamhari, persoalan utama dalam upaya memahami Islam adalah bagaimana memahami manusia. Pergumulan yang dialami manusia sesungguhnya adalah pergumulan keagamaan, yaitu bahwa makna hakiki dari keberagamaan manusia terletak pada interpretasi dan pengalaman agamanya. Oleh karena itu, antropologi sangat diperlukan untuk mengkaji Islam, sebagai alat untuk memahami realitas kemanusiaan dan keberagamaannya.²¹ Dengan mengutip pendapat Brian Morris, Jamhari membuat kerangka teoritis bahwa kajian agama secara antropologis dapat dikategorikan dalam empat teori, yaitu *intellectualist*, *functionalist*, *structuralist* dan *symbolist*. Keempat teori ini berupaya mengkaji agama dalam kerangka sosial empiris, dalam arti bahwa agama dipandang sebagai bagian kehidupan manusia yang secara realitas dapat dilihat dan diteliti. Oleh karena realitas keberagamaan manusia itu beragam, sebagaimana tercermin dalam aneka macam budaya,

²⁰ *Ibid.*, 178-183.

²¹ *Ibid.*, 188-192.

maka diperlukan kajian antropologi yang lintas budaya (*cross culture*) untuk melihat realitas universal agama.²²

Bagimanakah Islam dikaji secara lintas budaya? Ada tiga model yang dapat dikembangkan dalam rangka studi Islam secara *cross culture*. *Pertama*, model kajian tentang pertemuan budaya lokal dan Islam yang telah sekian lama berproses. Model ini telah dilakukan Anthony Reid dan Kuntowijoyo yang telah menjadikan Islam sebagai agama rakyat (*popular religion*). *Kedua*, model kajian tentang corak suku etnis dan bahasa masyarakat Muslim, seperti yang telah dilakukan Dale F. Eickelman. *Ketiga*, model kajian Islam lintas wilayah dan budaya, seperti penelitian Marshall G. Hodgson. Ketiga model ini telah banyak dilakukan orang. Oleh karena itu, Jamhari menawarkan model alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu model *popular Islam*. Dalam model ini, dikaji praktik keagamaan yang telah bercampur dengan tradisi lokal, untuk kemudian dicarikan mana yang *official* (resmi berdasarkan sistem kebenaran Islam tertentu) dan mana yang *popular* (praktik keagamaan yang telah bercampur dengan tradisi lokal). Model seperti ini kiranya dapat diterapkan dalam bidang tasawuf yang banyak dipraktikkan masyarakat bawah. Penonjolan ciri-ciri Islam lokal lewat model kajian seperti ini telah menjadi kecenderungan baru. Kajian seperti ini dipandang berhasil merumuskan strategi dalam rangka menggabungkan perjalanan pergumulan Islam dengan budaya maupun peradaban lokal.²³ Namun permasalahannya, apakah Islam lokal dapat menjadi identitas Islam secara universal? Atau apakah dipandang cukup melihat Islam hanya dari suatu lokalitas yang bersifat kasuistik? Masalah ini merupakan problem epistemologis yang dihadapi bagi studi Islam dengan pendekatan antropologi.

Model Pendekatan Politik

Model pendekatan politik dalam studi Islam, salah satunya dapat mengikuti olahan Bahtiar Effendy, Guru Besar Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada intinya, Effendy menawarkan pentingnya kajian pemikiran politik Islam bagi PTKIN. Bidang *fiqh al-siyasah* harus dikembangkan sedemikian rupa secara akademik,

²² Bahtiar Effendy, "Makna Ilmu-Ilmu Sosial bagi IAIN" dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (eds.), *Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam* (Jakarta: Dirbinperta Islam Depag RI, 2000), 108-111.

²³ *Ibid.*, 113.

dicarikan landasan filosofinya. Dengan ini, kajian politik Islam bukan melulu berkutat pada masalah konsep negara modern, negara-bangsa atau demokrasi dan masyarakat madani yang bersifat *fiqh oriented*, tapi lebih dari itu adalah mengkaitkan secara filosofis bagaimana pandangan Islam mengenai keadilan, musyawarah, persamaan dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta rumusan politik yang *spiritually-enggaged politics*, yaitu praktik politik yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai agama.²⁴ Dengan pemikiran seperti ini maka dapat dibedakan antara pemikiran politik Islam yang menjadi garapan Fakultas Ushuluddin dan *fiqh al-siyasah* yang menjadi garapan Fakultas Syari'ah. Lebih jauh, pemikiran politik Islam harus dikembangkan menjadi jurusan tersendiri di PTKIN, agar lembaga ini menjadi *leading institution* dalam mengembangkan wacana politik Islam.²⁵ Tawaran Effendy ini kiranya perlu disambut baik, mengingat semenjak era reformasi, isu politik di Indonesia telah mendominasi isu-isu lainnya. Celaknya, belum banyak masyarakat Indonesia yang memahami politik Islam secara filosofis. Kebanyakan mereka lebih memahami politik Islam dalam pengertiannya yang formalistik, sehingga tak jarang mereka jatuh dalam paham terorisme yang radikal.

Tentang Buku Ini

Dari beberapa model pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam studi Islam di atas kiranya dapat dikatakan bahwa studi Islam dengan paradigma antroposentrisme itu lebih kontekstual dan beragam. Ada yang cenderung pada pendekatan sejarah, sosiologi, antropologi atau politik. Kecenderungan seperti ini sangat dimungkinkan mengingat beragamnya cabang ilmu-ilmu sosial yang mengkaji kehidupan manusia. Semua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Tinggal bagaimana mengambil kelebihan-kelebihan itu untuk memahami Islam.

Buku yang berjudul *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial* ini ditulis oleh Prof. Abdullah Idi. Buku ini lebih pada penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Ada tiga terma penting yang hendak direlasikan penulis buku ini untuk konteks Indonesia, yaitu sosiologi, agama dan pendidikan. Ketiga terma ini penting dijadikan patokan untuk melihat keseluruhan isi buku ini, dengan dua pertanyaan utama, yaitu:

bagaimana sosiologi melihat agama (Islam)? Serta bagaimana sosiologi melihat pendidikan (Islam)?

Penulis buku yang merupakan Guru Besar Sosiologi UIN Raden Fatah Palembang ini kiranya telah berhasil merelasikan ketiga terma itu dalam tema-tema yang dibahas dalam buku ini. Dalam merelasikan pertanyaan pertama, Prof. Abdullah berhasil memaparkan dua relasi, yaitu adanya pengaruh dinamika kehidupan sosial masyarakat terhadap sikap keberagamaan individu/masyarakat, serta adanya pengaruh sikap keberagamaan individu/masyarakat terhadap dinamika kehidupan sosial masyarakat. Kedua relasi ini dapat dilihat dalam tema-tema yang terdapat pada Bab 1 dan Bab 2. Di dalam kedua bab ini, pembaca akan menemukan tema-tema bagaimana masyarakat Indonesia yang pluralistik membuat keberagamaan masyarakat menjadi pemeluk agama yang arif dan rukun, karena adanya dinamika sosial yang mempengaruhinya. Tema-tema seperti pluralisme, etnisitas, integrasi, dan Pemilu kiranya mencerminkan hal ini. Pada sisi lain, keberagamaan masyarakat pun turut mempengaruhi dinamika sosial masyarakat yang terjadi, seperti tampak pada tema-tema tentang etika sosial, agama dan elit. Meskipun demikian, relasi dinamika sosial dan watak keberagamaan ini bisa menjadi konflik yang mengancam integrasi bangsa apabila tidak ada intervensi dari elit agama ataupun dari elit penguasa.

Kemudian dalam merelasikan pertanyaan kedua, penulis buku berhasil menjelaskan bagaimana relasi antara dinamika sosial dengan dunia pendidikan, sebagaimana tampak di dalam tema-tema yang terdapat pada Bab 3. Pada bab ini, pembaca akan digiring pada bagaimana upaya dunia pendidikan Islam untuk mampu mencetak karakter warga masyarakat, agar memiliki wawasan multikultural. Peran dunia pendidikan Islam dalam konteks ini kiranya menjadi penentu bagi pembentukan karakter semacam ini, terutama bagi dunia PTKIN.

Oleh karena itu, buku ini menjadi sangat penting keberadaannya dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik ini. Dengan menyampingkan masih adanya keterulangan analisis dalam berbagai tempat, yang itu merupakan kelemahan buku ini, karena memang buku ini merupakan kumpulan tulisan penulisnya dalam kurun 20 tahun, buku ini layak diapresiasi karena mampu memberikan warna

baru bagi kajian studi Islam. Oleh karena itu, buku ini patut menjadi bacaan mencerahkan bagi kalangan akademisi, baik yang bergelut dalam bidang sosiologi, studi Islam ataupun praktisi pendidikan. Selamat menikmati suguhan yang mencerahkan ini!

Yogyakarta, Ramadhan 1436 H

Editor,

Toto Suharto
Safarina HD
Nor Huda

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, buku yang berjudul *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial* ini akhirnya dapat dirampungkan. Terbitnya buku ini, tidak terlepas dari keterpanggilan akademik penulis sebagai upaya menambah referensi dan pengembangan khazanah ilmu pengetahuan terkait. Penulisan buku ini juga sebagai upaya mengumpulkan dan 'menyelamatkan' dokumen-dokumen tulisan yang pernah ditulis, berupa artikel yang dipublikasikan pada beberapa media massa, *proceeding* seminar, jurnal, hasil penelitian, dan ada juga bagian buku penulis. Tulisan-tulisan tersebut mulai ditulis sejak 1990-an—sejak penulis mulai 'belajar' menulis karangan semi-ilmiah populer dan ketika menjadi 'dosen muda' di Fakultas Tarbiyah IAIN (kini UIN) Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sejumlah kelemahan selalu ada dari sebuah kumpulan karangan—apalagi suasana dan kondisinya dari masa ke masa tampak berbeda dan dinamis—yang dikumpulkan menjadi sebuah naskah buku. Kelemahan juga tampak adanya pengulangan 'alur pikiran' yang diungkapkan penulis, terutama bertalian dengan pendekatan teoritis dan ilustrasi yang digunakan dalam analisis. Di sisi lain, buku ini memiliki suatu 'keunikan' dimana terlihat pada adanya *paper/proceeding* yang tetap ditulis dalam bahasa Inggris sesuai dengan aslinya. Tata-cara dan kaedah pengutipan pun tidak terlalu kaku di mana dalam tulisan ini yang memiliki tiga versi: *intra-texts*, *footnotes*, dan *end-notes*—sekali lagi sesuai dengan 'asli'nya. Apapun bentuk kelemahan yang terdapat dalam buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Terbitnya buku ini merupakan dorongan dari teman-teman di Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang agar penulis dapat mengumpulkan artikel-artikel tulisan yang pernah diterbitkan, selanjutnya dibuat dalam bentuk sebuah buku. Karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Staf Pascasarjana yakni Imam, Takim dan Dum, yang telah mengetik kembali sebagian tulisan yang telah dikumpulkan. Terima kasih pula ditujukan kepada pimpinan redaksi media massa dan rekan wartawan yang selama ini telah membantu mengembangkan ide, gagasan dan wawasan fikiran penulis—melalui publikasi tulisan dan liputan wawancara— antara lain: *Sriwijaya Post*, *Sumatera Ekspres*, *Berita Pagi*, *Sindo*, *Kompas*, *Radar Palembang*, *Palembang Ekspres*, *Kabar Sumatera*, *TVRI Sumsel* dan *Sriwijaya TV*. Semoga Allah SWT senantiasa memberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya kepada mereka yang telah membantu dalam 'proses' hingga terbitnya buku ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya juga penulis haturkan kepada Prof. Jalaludin, Mantan Rektor IAIN (sekarang UIN) Raden Fatah, yang bersedia memberi kata sambutan untuk buku ini, dan kepada Prof. Irwan Abdullah, Guru Besar Antropologi UGM, yang telah "menutup" buku ini dengan catatan epilognya yang sangat berharga. Kepada istri tercinta, Safarina HD dan kedua puteri tersayang, Ghiena dan Najwa, terima kasih atas kebersamaannya, yang walaupun "kebersamaan" ini kadang terusik karena kesibukan penulis selaku Direktur Pascasarjana. Kepada para editor, Kang Toto dan Mas Huda, *hatur nuhun* atas kesediaannya membaca ulang naskah buku ini sehingga kini terwujud di hadapan pembaca. Ucapan terima kasih juga untuk Mas Ahmala Arifin dari penerbit LKiS yang bersedia membaca draft awal buku ini dan menerbitkannya dalam bentuk buku seperti sekarang ini.

Kehadiran buku ini, tentunya diharapkan dapat membantu dalam upaya menambah khazanah keilmuan bagi para pembaca, di mana buku ini dipandang relevan bagi segmen pembaca, seperti mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Kejuruan (FTK); mahasiswa S1 Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP); mahasiswa S1 dalam bidang ilmu-ilmu sosial (*social-sciences*) pada perguruan tinggi umum (PTU); dan mahasiswa S2/S3 yang sedang mempelajari studi-studi keislaman (*Islamic Studies*) di STAIN, IAIN dan UIN. Buku ini, karenanya, patut dibaca bagi dosen, praktisi pendidikan dan umum. Akhirnya, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif atas buku ini, sebagai *in-puts* bagi revisi ke depan.

Talang Jambe, 20 Mei 2015

Penulis,

AI

KATA SAMBUTAN

Oleh: Prof. Dr. Jalaluddin
(Guru Besar Filsafat Pendidikan, UIN Raden Fatah
Palembang)

*Ketika aku masih muda dan bebas berkhayal,
Aku bermimpi untuk mengubah dunia.
Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku,
Kudapati bahwa dunia tidak kunjung berubah.
Maka cita-cita itu kupersempit,
Lalu kuputuskan untuk mengubah negeriku.
Namun tampaknya hasrat itu tiada hasilnya.*

*Ketika usiaku telah semakin senjua,
Dengan semangatku yang masih tersisa,
Kuputuskan untuk mengubah keluargaku,
Orang-orang yang paling dekat denganku.
Tetapi celakanya, merekapun tak mau diubah.*

*Dan kini, sementara aku berbaring saat ajal menjelang,
tiba-tiba kusadari.*

*“Andaikan yang pertama-tama kuubah adalah diriku,
maka dengan menjadikan diriku sebagai panutan,
mungkin aku bisa mengubah keluargaku.
Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi,
Akupun mampu memperbaiki Negeriku;
Kemudian siapa tahu, aku bahkan bisa mengubah dunia.”*

Gubahan puisi ini mengindikasikan, bahwa segala macam perubahan, apapun bentuknya, hanya bisa berhasil bila dimulai dari diri sendiri. Termasuk mengubah masa depan seseorang. Dengan mengubah diri, potensi yang dimiliki baru dapat dikembangkan dalam bentuk karya yang berguna bagi orang banyak. Dirangkaian sumbangsih yang berharga itu pula nantinya seseorang bakal hidup "menyejarah". Manfaat dari karyanya akan jadi kenangan masyarakatnya.

Kemampuan dan keterampilan menulis secara baik dan benar, tidak terjadi secara spontan. Layaknya menggosok "Lampu Aladin". Keduanya baru akan terwujud setelah melalui proses yang cukup panjang, serta didukung oleh hasrat untuk mengubah diri. Melalui alur pemahaman seperti ini pula agaknya, kita dapat mengenal lebih jauh sosok dari Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed., penulis buku *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial*.

Bila dicermati, barang kali tidak sulit untuk menyepakati, bahwa buku ini memiliki keistimewaan tersendiri. Sesuai dengan judulnya, di dalam buku ini terkemas tiga khazanah keilmuan, yakni sosiologi, agama, dan pendidikan. Tiga serangkai yang merupakan kemas dari sekitar 330 buku sumber, serta 39 sumber pendukung lainnya (harian dan majalah). Kumpulan dari telaah keilmuan serentang 25 tahun (1990-2015). Sebuah hasil dari "pengembaraan intelektual di lintas zaman", yang tersimpul secara utuh, serta pantas untuk disimak ulang.

Buku *Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial* ini merupakan cerminan dari hasrat mengubah diri dari seorang Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed. Ternyata prosesnya sudah berlangsung sejak usia muda. Tidaklah mengherankan, bila ia tergolong penulis yang produktif. Manakala menapak usia yang ke 50 tahun, karya-karyanya sudah cukup banyak. Tak kurang dari 12 buah buku teks yang sudah dipublikasi. Tersebar ke berbagai penjuru kawasan Nusantara. Termasuk beberapa di antaranya sudah mengalami beberapa cetak ulang.

Semoga buku karya terbaru ini akan member inspirasi kepada pembaca untuk cinta berkarya. Ikut berpartisipasi aktif dalam memperkaya khazanah keilmuan di negeri tercinta ini.

Palembang, 25 Mei 2015

Penyusun,

Prof. Dr. Jalaluddin

(Guru Besar Filsafat Pendidikan, Universitas Islam Negeri Palembang)

INSPIRASI AL-QUR'AN

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya" (Q.S. At-Taubah: 122).

وَمَن يَهِجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَآغَمَا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ
مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

"Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (Q.S. an-Nisa': 100).

ENDORSEMENTS

"Buku ini merupakan kumpulan esei penulis yang tersebar diberbagai media, terkait dengan permasalahan sosial, politik, dan pendidikan Islam. Secara umum, buku ini dapat menggambarkan pengembangan intelektual penulis, sekaligus integritasnya, sebagai sosiolog, yang peduli dan peka terhadap berbagai persoalan sosial yang melanda negeri ini. Esei-esei ditulis secara kritis, tajam, dan 'serius', artinya isu, materi, dan datanya otentik dan bisa dipertanggungjawabkan" (*Dr. Idrus Alkaff, MA, Ketua Prodi S2 Sejarah Peradaban Islam, Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang*).

"Penulis merupakan sosok yang aktif menulis berbagai karya ilmiah. Beliau sangat kreatif dalam menuangkan ide dan gagasan. Teori dan konsep dikemas dalam struktur sistematis tentunya dengan bahasa tulis yang lugas dan jelas. "Stamina" untuk terus berkarya selalu terjaga sehingga banyak buku, terutama yang bertalian dengan sosiologi. Sebagai sejawat, beliau juga termasuk diskusi yang "mengasyikkan". Guyonan dan sindiran terhadap masalah sosial terkini sering terlontarkan dalam diskusi tidak formal, diskusi diruang tunggu dosen sembari menunggu pergantian jam kuliah. Buku ini merupakan buku yang 'kesekian' (maaf saya lupa ini buku beliau yang ke berapa). Saya yakin ini merupakan "buku yang saya dilawatkan" (*Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd., FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang*).

"Mendengar dan merenungi dari uraian cerita membuat saya memberikan apresiasi terhadap Prof Abdullah Idi. Sesuatu yang tidak gampang untuk dijalani dan dilewati, perjuangan anak Bangsa

Belitung yang berusaha menggapai mimpi untuk menjadi anak yang berbakti. Bakti terhadap keluarga besar diwujudkan dalam bentuk 10 tahun keprofesoran beliau saat ini. Anak 'laskar pelangi' yang sejak kecil senang bermain bola, pada awalnya bersekolah tidak sesuai dengan keinginan tapi membuat beliau mampu mewujudkan cita-citanya." (*Dr. Yetty Oktarina, S.P., M.Si, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Baturaja, Sumatera-Selatan*)

"Sebagai karya Guru Besar di bidang sosiologi, kumpulan tulisan ini benar-benar merefleksikan pemahamannya tentang realitas sosial kekinian. Buku ini adalah pembelajaran, perenungan, pengalaman, dan pengamatan serta sikap penulisnya yang dengan arif menuangkan dalam lintasan pena yang memungkinkan untuk dijadikan peninggalan pemikiran bagi pembaca. Karya ini sangat memberikan pencerahan dalam proses perbaikan masyarakat baik dari segi kritik sosial, maupun analisis pemecahan permasalahan" (*Dr. Abdur Razzaq, M.A., Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Pascasarjana UTN Raden Fatah Palembang*).

"Saya mengenal Prof. Abdullah Idi, secara pribadi, relatif belum terlalu lama. Fakta bahwa kami langsung menjadi akrab dan familiar satu sama lain, yang menunjukkan bahwa beliau bukan saja seorang Prof., tapi juga pribadi yang simpatik, hangat, dan impresif..." (*Dr. Zulfikri Suleman, M.A., Dosen Fisip Universitas Sriwijaya*).

Buku "Dinamika Sosiologis Indonesia: Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial" yang ditulis Prof. Abdullah Idi ini merupakan kumpulan artikel ilmiah disusun selama dua puluhan tahun. Buku ini berisi tentang disiplin ilmu sosial-keagamaan dan pendidikan, memberi inspirasi kepada pembaca betapa pentingnya materi dalam buku ini yang ditulis dalam kurun waktu yang berbeda dan cukup lama..." (*Dr. Asyhar Kholil, Lc., M.A., Direktur Pascasarjana Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Jawa Tengah*).

"Saya perlu memberikan apresiasi kepada Prof. Abdullah Idi dengan terbitnya buku ini. Buku ini merupakan kumpulan tulisannya yang sangat banyak bertebaran dalam berbagai media baik nasional maupun lokal. Sebagai seorang sosiolog dengan basis ilmu keislaman, maka wajar saja kalau fenomena sosial yang selalu berkembang kemudian perlu mendapat tanggapan ilmiah dengan harapan dapat

menjadi perdebatan yang pada gilirannya dapat menjadi perhatian aparat terkait seperti pemerintah. Tradisi ilmiah yang dikembangkannya secara konsisten melihat dinamika Indonesia yang sangat cepat mengalami perubahan memang perlu untuk dikawal guna memberi masukan kepada pengambil kebijakan supaya tepat sasaran, dan ini sudah dilakukan oleh penulis buku ini dengan sangat baik sekali". **(Dr. H. Muhammad Adil, M.A., Dosen UIN, Pengurus NU, FKPT, dan MUI Sumsel)**

"Sesungguhnya nilai itu tidak berubah, yang mungkin atau terjadi perubahan adalah sikap, atau anggapan, atau penilaian terhadap suatu objek yang bernilai. Disorientasi nilai dapat dipahami terjadinya perubahan sikap subjeknya. Yang semula sebagai hal biasa, kini merupakan hal terlarang. Boleh jadi semula hal terlarang, kini menjadi hal biasa dan dibiarkan karena praktik permisif, atau karena hal yang biasa itu dijadikan "ukuran normal," meskipun itu zalim. Masih banyak lagi carut-marut tatanan nilai dieksplorasi dalam buku ini, terutama karena terjadinya krisis orang-orang yang bijak, krisis emosional. Tugas pembaca menjawab pertanyaan mengapa terjadinya krisis tersebut" **(Dr. Ridwan, SH., M.Hum., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya).**

"Sebagai mitra kerja, sahabat dekat sekaligus sebagai atasan, Prof. Abdullah Idi adalah sosok orang yang gigih dan pantang menyerah dalam memperjuangkan kepentingan orang banyak dan objektif dalam bertindak. Beliau adalah orang yang tidak suka dengan sesuatu yang dianggap manipulatif, blak-blakan dalam melihat sesuatu yang dianggap janggal dan bersikap responsif terhadap ide-ide yang baru walaupun ide tersebut datangnya dari bawahan. Dalam bidang akademik sejak mahasiswa (S1) sudah memperlihatkan kecenderungannya dalam bidang akademik, sehingga gelar Prof pun didapatinya dalam usia relatif muda. Di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang saat ini beliau termasuk salah seorang yang produktif dalam menulis. Artikelnya pun sering dimuat di media massa". **(Dr. Muhamad Misdar, M.Ag., Ketua Prodi S2 Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang).**

"Pertama sekali saya kenal Prof. Abdullah Idi adalah ketika kami sama-sama terpilih jadi Timsel Panwaslu Pilkada lima Kabupaten Sumatera Selatan November-Desember 2014. Kemudian berlanjut pada April Mei 2015 untuk dua kabupaten lain. Disela-sela waktu luang

tugas tersebut kami intens mengulas masalah-masalah sosial-politik dan kebudayaan yang sedang berlangsung. Prof. Abdullah sebagaimana para intelektual lainnya kelihatannya resah terhadap perkembangan yang kurang menggembirakan terhadap masalah-masalah tersebut. Meminjam Ted Robert Gurr, ada diskrepansi (*Deprivasi Relatif, DR*) antara harapan (*Value Expectation, VE*) dan kenyataan (*Value Capabilitas, VC*). Konteks ini paling tidak terlihat ketika membaca topik-topik tulisannya tentang "Karakter building, *Social-Change*, Degradasi Elite, Otonomi Daerah, hingga masalah-masalah Etnisitas. Terlupakan atau disadari, konteks seperti itulah sesungguhnya yang menjadi akar masalah yang terabaikan dalam pembangunan (ekonomi) negeri ini. Buku ini menarik dan pantas dibaca karena ditulis Guru Besar Sosiologi yang mumpuni di bidangnya" (***Reinhard Hutapea, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi, Staf pengajar dan Direktur CEPP PPS Universitas Tamansiswa Palembang***).

"Gagasan-gagasan besar dalam pengembangan masyarakat industri, pendidikan, dan kontekstualisasi implementasi agama dalam kehidupan masyarakat modern, telah banyak digagas oleh Abdullah Idi dalam buku-buku karya tulisnya yang pernah saya baca. Tentu, sebagai intelektual Muslim terdidik, dengan gagasan-gagasan besarnya suatu saat juga akan melahirkan peradaban besar pula di negeri ini" (***Prof. Dr. H. Masykuri Bakri, M.Si, Guru Besar Pendidikan Islam/Rektor Universitas Islam Malang (Unisma), Jawa Timur***).

DAFTAR SINGKATAN

ACIS	: <i>Annual Conference on Islamic Studies</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asia Nations</i>
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BHP	: Badan Hukum Pendidikan
BOS	: Dana Bantuan Operasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
CBSA	: Cara Belajar Siswa Aktif
CORPUS	: <i>Circle of Raden Fatah Postgraduate Students</i>
CPI	: <i>Corruption Perception Index</i>
CSIS	: <i>Center of Strategic and International Studies</i>
<i>Deutro-Melayu</i>	: Melayu Muda
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FKIP	: Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama

HKBP	: Huria Kristen Batak Protestan
HAM	: Hak Asasi Manusia
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
G/30/S/PKI/1965	: Gerakan/30 September/PKI/1965.
HCS	: <i>Holland Chinese School</i>
HT	: Hizbut Tahrir
IBC	: <i>Indonesia Budget Center</i>
ICG	: <i>International Crisis Group</i>
IT	: <i>International Transparency</i>
ITB	: Institut Teknologi Bandung
ICG	: <i>International Crisis Group</i>
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
ICW	: <i>Indonesian Corruption Watch</i>
INIS	: <i>Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies</i>
IPB	: Instituts Pertanian Bogor
IPTN	: Industri Pesawat Terbang Nasional
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
JAI	: Jamaah Ahmadiyah Indonesia
KPKPN	: Komisi Penyidik Kekayaan Pejabat Negara
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KUA	: Kantor Urusan Agama
LJU	: Lembar Jawaban Ujian
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

LPIR	: Lomba Penelitian Ilmiah Remaja
MA	: Madrasah Aliyah
MAU	: Madrasah Aliyah Umum
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTs.	: Madrasah Tsanawiyah
MBN	: Madrasah Berstandar Nasional
MK	: Mahkamah Konstitusi
MNLF	: <i>Moro National Liberation Front</i>
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NII	: Negara Islam Indonesia
ORBA	: Orde Baru
ORLA	: Orde Lama
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
OTODA	: Otonomi Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PAI	: Pendidikan Agama Islam
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PBM	: Peraturan Bersama Menteri
PERC	: <i>Political and Economic Risk Consultant</i>
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
<i>Proto-Melayu</i>	: Melayu Tua
PTAI	: Perguruan Tinggi Agama Islam
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTS	: Perguruan Tinggi Swasta
PULO	: <i>Pattani United liberalization Organization</i>

Dinamika Sosiologis Indonesia

RMS	: Republik Maluku Selatan
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RRC	: Republik Rakyat Cina
RSBI	: Rintisan Sekolah Berstandar Internasional
SARA	: Suku, Agama dan Antargolongan
SBI	: Sekolah Berstandar Internasional
SDA	: Sumber Daya Alam
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMU	: Sekolah Menengah Umum
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SPAIN	: Sekolah Persiapan Institut Agama Islam
THHK	: <i>Tionghoa Hwee Koan</i>
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TKW	: Tenaga Kerja Wanita
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UI	: Universitas Indonesia
UIN	: Universitas Islam Negeri
UN	: Ujian Nasional
UU PDRE	: Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
UNESCO	: <i>United Nations Educational Scientific and Cultural Organization</i>
UNO	: <i>United Nations Organization</i>
UUD RI 1945	: Undang-Undang Dasar Republik Indone sia 1945
VOC	: <i>Vereenigde Oost Indische Compagnie</i>

WNA

: Warga Negara Asing

WTO

: *World Trade Organization*

DAFTAR ISI

Catatan Editor ❖ v

Pengantar Penulis ❖ xvii

Kata Sambutan: Prof. Dr. Jalaluddin ❖ xxi

Inspirasi Al-Qur'an ❖ xxv

Endorsements ❖ xxvii

Daftar Singkatan ❖ xxxi

Daftar Isi ❖ xxxvii

BAB 1 PLURALITAS, INTEGRASI DAN KONFLIK SOSIAL ❖ 1

Islam, Pluralisme dan Integrasi Sosial ❖ 1

Orang Melayu, Jati Diri, dan Globalisasi ❖ 15

Istilah Cina, Tionghoa, dan Politik ❖ 25

ISIS: Antara Jihad dan Radikalisme ❖ 29

Pluralisme dan Integrasi Sosial ❖ 33

Etnisitas dan Integrasi Bangsa: Analisis Sosiologis
terhadap PBM No. 9 dan No.8/2006 ❖ 38

Natural Assimilation: Etnis Cina dan Melayu-Bangka ❖ 51

Etnis Cina/Tionghoa Bangka-Belitung: Dari "Collies"
ke Politisi ❖ 66

- Menyikapi Nilai Kebangkitan Nasional ❖ 71
- Refleksi Buku: Bangka, Sejarah Sosial Cina-Melayu ❖ 75
- RUU PDRE dan Isu Mayoritas-Minoritas ❖ 92
- The Kingdom Sriwijaya and Social Integrated Values* ❖ 97
- Conflic Ethnic in Asia: Cases of Ethnic-Muslim Minorities Myanmar, Cambodia, Philippine, Thailand, China, and Indonesia* ❖ 107
- Social-Interaction: Chinese and Malay-Bangka* ❖ 114
- Pilgub Sumsel 2013, Etika Politik & Agenda Reformasi ❖ 127
- Konflik Negara: Malaysia-Indonesia ❖ 131
- Konflik SARA di Asia: Belajar dari Indonesia ❖ 135
- Primordialisme dan Pemilukada 2008 ❖ 140
- Masyarakat Pluralistik: Menumbuhkan Sikap Arif dan Rukun pada Generasi Muda ❖ 143
- Pluralisme dan Isu HAM di Indonesia ❖ 152
- Rekonstruksi Kepemimpinan Elit- '*Deutro Melayu*' dalam Demokrasi Transisi ❖ 178
- BAB 2 ETIKA SOSIAL, AGAMA, ELITE DAN ETOS KERJA ❖ 189**
- Degradasi Nilai Etika Sosial Berbangsa ❖ 189
- Life Style*, Pemuda dan Fenomena Korupsi ❖ 212
- Refleksi: Hijrah ke 2013 ❖ 221
- Aliran Sesat: Perspektif Sosiologi ❖ 225
- Primordialisme dan Pemilukada Sumsel 2008 ❖ 229
- Otonomi Daerah dan Pembangunan Terkendali ❖ 233
- Batu Akik: Antara Nilai Ekonomi dan Konflik Sosial ❖ 237
- Pendidikan Gratis, *Why Not* ❖ 240

- Peran Televisi (TV) Lokal ❖ 243
- Calon Pemimpin yang Amanah ❖ 246
- Islam dan Etika Kerja ❖ 252
- Makna Idul Fitri 1427 H ❖ 256
- Umat Islam dan Pembangunan Otonomi Daerah ❖ 261
- Antisipasi Konflik Sosial Keagamaan ❖ 269
- Aliran Sesat : Perspektif Sosial - Keagamaan ❖ 272
- Imlek, Idul Adha 2013 & Krisis Sosial ❖ 276
- Puasa dan Pemberdayaan Umat ❖ 280
- Idul Fitri 1430 H dan Ketakwaan Umat ❖ 283
- Idul Adha 1434 H dan Keteladanan Ibrahim AS ❖ 288
- Agama dan Pemimpin: Perspektif Sosiologi Agama
tentang Pemimpin dalam Islam ❖ 293
- 2014: Jalan Terjal Menuju Sejahtera ❖ 302
- Idul Fitri 1436 H dan Harkat Kemanusiaan ❖ 308

BAB 3 PENDIDIKAN DAN *NATIONAL CHARACTER-BUILDING* ❖ 317

- Membangun 'Kultur Akademik' PT: Sekelumit 'Pelajaran'
dari Gottingen Universitas, German ❖ 317
- Urgensi '*National Character-Building*' ❖ 327
- Pendidikan Islam dan Karakter Bangsa ❖ 340
- MBN dan Kebutuhan Guru Profesional ❖ 362
- Krisis Spiritualitas & "Solusi" Pendidikan Islam ❖ 373
- Prospek Profesi Guru ❖ 382
- UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen: Antara Cita
dan Fakta ❖ 393
- PTAI: Antara Mandiri dan Subsidi ❖ 406

- Sekolah Gratis dan Bermutu ❖ 417
- Minat Baca Siswa Madrasah Aliyah ❖ 421
- Upaya Meningkatkan Minat Baca Siswa ❖ 430
- Guru dan Masa Depan Bangsa ❖ 433
- UN: Problem Standar Kelulusan ❖ 437
- Pemberdayaan Pendidikan Multikultural ❖ 442
- Perubahan Sosial: Restrukturisasi 'IAIN' menjadi 'UIN' ❖ 450
- Reformasi Kurikulum: Konsep, Tujuan, dan Kurikulum UIN ❖ 466
- Good Bye* SBI-RSBI ❖ 486
- Negara dan Perguruan Tinggi ❖ 490
- Epilog: Prof. Dr. Irwan Abdullah**
(Guru Besar Antropologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta) ❖ 495
- Daftar Bacaan** ❖ 505
- Tentang Penulis** ❖ 537

Bab 1

PLURALITAS, AGAMA, INTEGRASI DAN KONFLIK SOSIAL

Konflik sosial bernuansa etnis pada era reformasi menjadi topik krusial. Dalam bahasan ini dianalisis mengenai beberapa hal yang bertalian, antara lain soal pluralitas, etnisitas, integrasi, 'potensi' konflik sosial, mayoritas-minoritas, konflik bernuansa suku, agama, dan antargolongan (SARA), konflik Malaysia-Indonesia, konflik etnis minoritas Muslim di Asia, pendidikan multikultural, dan lain-lain.

Islam, Pluralisme dan Integrasi Sosial¹

Ancaman disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa, seakan tidak lepas dari perjalanan bangsa ini. Sejak 1997, bangsa ini 'belum' mampu keluar dari berbagai masalah nasional, seperti korupsi, kelaparan, kemiskinan, premanisme, perkelahian antarkampung, pencemaran lingkungan, pembabatan hutan/*illegal logging*. Konflik etnis/agama dan separatisme. Padahal, adanya kondisi demikian akan berdampak buruk terhadap proses disintegrasi sosial dan selanjutnya bisa saja akan mengancam disintegrasi bangsa. Sekitar sebulan lalu, bangsa ini dihadapi kembali dengan fenomena menarik tentang tiga kasus yang dapat dikatakan sebagai ancaman berbangsa: Penampilan tari *Pecak Lele* yang dilakukan pemuda pendukung RMS ketika Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Ambon, Maluku; "Pembentukan" Partai Lokal Gerakan Aceh Merdeka (GAM)², dan Pengibaran Bendera *Bintang Kejora* Papua /Irian Jaya.

¹ Tulisan penulis berjudul "Islam dan Pluralisme: Analisis Sosiologis-Keagamaan terhadap Peranan Umat Islam Indonesia dalam Memperkuat Integrasi Sosial", Orasi Ilmiah disampaikan pada Acara Pengukuhan Guru Besar bidang Sosiologi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang, 9 Agustus 2007, di Academic Centre IAIN Raden Fatah Palembang.

² Tentang Pembentukan Partai GAM, dapat dilihat (*Republika*, 4 Agustus 2007)

Tiga kejadian nasional tersebut merupakan indikasi bahwa ancaman disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa menjadi "agenda" besar bagi bangsa ini kedepan. Setiap elemen bangsa harus berperan aktif sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing – masing dalam memperbaiki dan mempertahankan eksistensi bangsa ini. Umat Islam, salah satu elemen agama sebagai mayoritas dalam pluralitas, memiliki peranan signifikan sebagai "perekat" integrasi sosial dan integrasi bangsa. Tulisan ini, lebih memfokuskan pada analisis sosiologi-keagamaan terhadap hubungan Islam dan Pluralisme; dan sejauh mana umat Islam berperan terdepan dalam masyarakat pluralistik-Indonesia dalam memperkuat kembali integrasi sosial.

Di Indonesia, dikatakan Timo Kivimaki (2005: 107), hampir semua daerah yang bergejolak separatisme (Aceh, Papua, Riau, Maluku), memiliki sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah. Dari indikator provinsi ini tampak bahwa jumlah perkapita investasi asing merupakan satu dari korelasi dengan konflik atau potensi konflik sosial. Tuntutan kemerdekaan provinsi-provinsi tersebut berarti orang daerah merasakan tidak perlu lagi untuk berbagi penghasilan daerah (*revenues*) dari sumber-sumber dan investasi asing dengan pemerintah Indonesia. Jelas, hal ini merupakan ancaman disintegrasi sosial memberi legitimasi terhadap motivasi perjuangan separatisme³

Dari berbagai latar belakang terjadinya konflik sosial di tanah air, lebih berhubungan dengan ketidakpuasan terhadap perlakuan politik, ekonomi, budaya dan agama. Karena itu, pendekatan pluralisme diharapkan dapat mereduksi berbagai konflik sosial dan potensinya yang akan mengancam disinegrasi sosial dan disintegrasi bangsa. Pluralisme atau multikulturalisme dapat dikatakan sebagai berkompetisi dengan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang

³ Namun demikian, tiap daerah tampak memiliki motivasi berbeda untuk memperoleh motivasi separatisme. Di Papua, tokoh pejuang Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jacob Prai, mengatakan mereka mengantisipasi untuk memperoleh kekuasaan. Seperti Belanda tinggalkan Papua Barat. Hasan Tiro, Gerakan Aceh Merdeka, memperjuangkan Aceh Merdeka karena merasa memiliki warisan kekuasaan telah dimiliki Aceh terhadap kemerdekaan. Banyak tokoh politik asli *Republik Maluku Selatan (RMS) memperjuangkan kemerdekaan karena kelahiran dan posisi mereka di masyarakat yang merasa tertekan dan ancaman militer. Lihat : (Timo Kivimaki, *Violent Internal Conflicts in Asia Pasific : Histories, Political Economies, and Policies*, Editors : Dewi Portuna Anwar, Helene Bouvier, Glendd Smith, Roger Tol. Yayasan Obor Indonesia-LIPI-LASEMA-CNRS-KITLV-Jakarta, Jakarta 2005, hlm. 107-108).

kehidupan, baik bidang politik, hukum, ekonomi, budaya, agama, dan pendidikan (James A. Bank, 1989 :3).

Menghargai pluralitas, termasuk bidang pendidikan (Amy L. Freedman, 2001 : 411-440) akan memperkuat proses integrasi sosial (anak-anak dari etnis berbeda). Sama halnya dengan bidang agama, sebagai salah satu elemen primordialism, memiliki peran dan fungsi "perekat" terhadap integrasi sosial. Umat Islam, dalam hal ini sebagai kelompok mayoritas yang dianut sekitar 90 persen penduduk Indonesia, memiliki peranan strategis dalam membina generasi mudanya dan umat Islam dalam memperkuat integrasi sosial. Umat Islam memiliki tanggung jawab terdepan dalam membina dan memperjuangkan integrasi sosial. Secara konseptual-teoritis, ajaran Islam sangat menjunjung tinggi dan toleransi terhadap pluralitas. Sebagai wahyu yang diturunkan bagi manusia, Islam telah menjadikan doktrin menyejarah dalam pluralitas.

Pluralitas terwujud dengan hadirnya beragam aliran internal keagamaan dalam Islam serta beragam agama lain. Bertalian dengan beragam aliran keagamaan dalam Islam, firman Allah SWT dalam al-Qur'an (22:34) mengungkapkan :

"Untuk tiap-tiap umat Kami adakan cara peribadatan, supaya kamu menyebut nama Allah, atas binatang ternak yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Maha Esa, sebab itu hendaklah kamu menyerahkan diri kepada-Nya, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat".

Dalam Islam, pluralitas aliran keagamaan diterima sebagai kenyataan sosio-historis. Pluralitas seperti ini adalah gejala umum terjadi dalam kehidupan manusia, seperti pluralitas dalam berfikir, berperasaan, bertempat tinggal dan berperilaku. Sumber dari Islam itu sendiri sesungguhnya bersifat tunggal, yakni bersumber dari dan bersandar pada Allah yang satu. Namun, ketika doktrin itu menyejarah dalam masyarakat dalam realitas kehidupan masyarakat, maka pemahaman, penafsiran dan pelaksanaan sepenuhnya bersandar pada realitas tersebut. Manusia yang satu dengan manusia lain berbeda dalam pemikiran maupun kehidupan sosial-ekonomi, budaya, politik dan geografis. Penerapan Islam di daerah pesisir, misalnya, berbeda penerapannya di daerah pedalaman, demikian pula halnya pada masyarakat Islam agraris maupun masyarakat industri. Di dalam al-Qur'an (26:67) diungkapkan :

"Untuk tiap-tiap umat Kami adakan cara peribadatan tertentu yang mereka lakukan, oleh sebab itu janganlah mereka berselisih dengan engkau itu, dan panggillah ke jalan Tuhan engkau, sesungguhnya engkau ada di atas pimpinan jalan lurus".

Dalam hubungannya dengan pluralitas agama, Islam menetapkan prinsip saling menghormati dan mengakui eksistensi masing-masing. Seperti dikatakan dalam al-Qur'an (109:6) : *"untuk kamu agamamu dan untuk aku agamaku."* Islam juga menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama (al-Qur'an : 2 : 256).

"Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dengan jalan yang salah, dan siapa yang tidak percaya kepada thoghut (berhala atau syaithan) dan percaya kepada Allah, sesungguhnya dia telah berpegang pada tali yang teguh dan tidak akan putus, dan Tuhan itu mendengar dan mengetahui."

Padangan Islam tentang pluralitas di atas agaknya relevan dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi : *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadan menurut agamanya dan kepercayaan itu"*. Islam mengajak untuk mencari akar persamaan yang menjadi dasar ajaran masing-masing agama, yakni kepercayaan pada Tuhan itu sendiri sebagai pusat ajaran tiap agama. Jadi bukan pada sebutan nama Tuhan dari masing – masing agama, sebagaimana terungkap di dalam al-Qur'an :

"Katakanlah hai orang-orang ahli kitab, marilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun, dan satu yang tidak mengambil yang lain menjadi Tuhan, selain dari Allah, tetapi kalau mereka tidak menurut katakanlah, akuilah olehmu, bahwa kami adalah muslim".

Islam sebagai agama yang toleran terhadap penganut agama lain. Secara implisit Islam menyindir siapapun yang terjebak dalam pemahaman keagamaan yang sempit, eksklusif dan monolitik. Sebab, persepsi kebenaran tidak menjadi monopoli seseorang atau kelompok tertentu. Dalam hubungan antar agama, Frithjof Schuon (2003: 10-12) dan Abdullah Idi (2006:174-175) dikatakan bahwa dalam hal hakekat dan perwujudan antara agama-agama, yang dikatakan sebagai esoteris dan eksoteris. Esoteris (*esoteric*) merupakan hal-hal hanya boleh diketahui dan dilakukan beberapa orang saja dari suatu kelompok penganut suatu paham tertentu; sedangkan, eksoteris (*exo-*

teric) merupakan hal-hal boleh diketahui dan dilakukan semua kelompok penganut suatu faham tertentu. Setiap sesuatu mesti mempunyai persamaan sekaligus perbedaan dengan lain. Sama halnya dengan agama-agama, ada persamaan dan perbedaan sehingga dapat diperbandingkan. Schuon membuat suatu garis horizontal yang membagi batasan esoteris dan eksoteris. Garis pemisah itu dipandang sebagai suatu tesis bahwa semua agama pada hakekatnya sama secara esoteris dan hanya berbeda dalam bentuknya secara eksoteris (Hindu, Budha, Cina, Yahudi, Kristen dan Islam).

Untuk menuju Indonesia Baru yang ditandai dengan semakin kompleksnya kehidupan berbangsa yang tidak jarang diikuti dengan konflik sosial, perlu pemahaman pluralitas dalam makna sebenarnya. Islam perlu dikembangkan sebagai agama *rahmatan lil'alam* (mendatangkan rahmat bagi alam semesta). Melalui kehadirannya sebagai *rahmatan lil'alam*, pluralitas agama dapat dikembangkan menjadi bagian dari proses pengayaan spiritual dan penguatan moralitas universal. Tanpa kesediaan umat Islam dan umat agama lain untuk menerima pluralitas keagamaan, konflik internal maupun eksternal sangat mudah muncul. Kondisi yang demikian dapat mengarah ke perilaku kekerasan yang bertentangan dengan prinsip kehadiran Islam *rahmatan lil'alam*. Didalam al-Qur'an (21:107) diungkapkan: "*Dan Engkau tidaklah kami utus melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam*".

Pluralitas dapat dikatakan sebagai tantangan bagi agama-agama, sehingga pencarian titik temu (konvergensi) diantara agama-agama perlu dijadikan perhatian. Hal ini dimaksudkan agar perasaan bahwa ajaran yang paling benar hanyalah agama yang diperlu hendaknya dapat diposisikan dengan proporsional (Harold Coward, *Kompas* 17 Oktober 1997). Islam, sebagaimana diungkapkan dalam Surat 2 Ayat 256 dan Surat 109 Ayat 6 diatas, secara normatif mengakui hak dan keberadaan pengikut agama lain atau para ahli kitab. Pengakuan itu merupakan prinsip utama doktrin Islam terhadap pluralitas agama dan sosial budaya sebagai kehenda Sang Khalik, *sunnatullah*.

Di tengah pandangan pluralitas agama, banyak pemeluk agama tertentu yang masih memiliki pandangan dan sikap eksklusif, yang justru memonopoli kebenaran agama (*truth claim*) dan paham keselamatan (*salvation claim*). Pandangan dan sikap seperti ini tidak jarang menjadi potensi yang dapat menimbulkan konflik sosial-

politik dan membawa berbagai jenis 'perang' antar umat beragama. Munawar Rachman (*Kompas*, 17 Oktober 1997), mengatakan, anggapan bahwa suatu agama secara intrinsik lebih baik dari agama lainnya dewasa ini dipandang oleh ahli-ahli agama sebagai sikap yang sepenuhnya benar. Dengan adanya pengayaan wawasan keilmuan yang luas dan paham keagamaan yang inklusif, egaliter, dan demokratis, akan semakin disadari bahwa semua agama dalam hal tertentu cenderung *relatively absolute* – demikian diistilahkan oleh Seyyed Hosen Nasr – atau *absolutely relative*.

Pluralitas dalam Islam merupakan kehendak Sang Khalik (*sunnatullah*) maka sangat penting dilakukan konvergensi antaragama, yakni suatu usaha mencari titik temu antaragama. Dalam doktrin Islam, usaha itu memperoleh teologis melalui kitab suci al-Qur'an. Maksudnya, secara teologis al-Qur'an mengajak pengikut agama lain untuk mencari titik temu (*kalimatun sawa'*) agama-agama, sebagaimana firman Allah SWT :

"Katakanlah (Ya Muhammad) : "Hai Ahli Kitab, marilah kita semua kembali kepada keyakinan yang sama (kalimatun sawa') antara kami dan kamu bahwa kita tidak menyembah siapa pun kecuali Allah dan kita tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun...."

Usaha mencari titik temu (*kalimatun sawa'*) agama-agama perlu dibingkai dalam format Tuhan Yang Maha Esa, bahwa semua itu berasal dari satu Tuhan. Pada level transendental, kata Frithjof Schoun, semua agama akan mencapai titik temu; atau meminjam terminologi Huston Smith dalam Abdullah Idi (2006 : 117-118), bahwa landasan esoteris dinamakan kesatuan transenden agama-agama. Pada tingkat *the common vision*, kata Hustin Smith - atau pada tingkat *trancendent*, kata kaum Perennialis - semua agama memiliki kesatuan maupun kesamaan gagasan dasar. Dalam hal ini dinamakan "pesan dasar agama", yaitu sikap pasrah untuk senantiasa bertakwa, selalu menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks agama-agama, penerimaan adanya *the common vision* tersebut memiliki makna menghubungkan kembali *the many* – yang hal ini merupakan realitas eksoteris (*exoteric*) agama-agama – kepada asalnya, *The One-Tuhan*, yang oleh para pemeluknya diberi berbagai macam nama sejalan dengan perkembangan kebudayaan maupun kesadaran sosial dan spiritual manusia. Kesan empiris

tentang adanya pluralisme agama ini tidak berhenti sebagai fenomena faktual saja, tetapi juga dilanjutkan pada bahwa ada satu realitas yang menjadi pengikat yang sama diantara agama-agama, yang dalam bahasa simbolis dapat dinamakan dengan 'agama' – *the religion*.

Dari uraian di atas tampak bahwa meskipun agama bersifat plural, tapi semuanya menuju pada satu kebenaran, yakni kebenaran Tuhan. Jadi, kebenaran juga bersifat plural. Bagi kalangan pluralis, semua agama mengandung kebenaran, sebab pada prinsipnya semua agama dan ilmu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam terminologi Islam, semua Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bersikap toleran dan tidak eksklusif terhadap agama lain. Jika dirunut jauh ke belakang, sikap eksklusif seperti ini persis dengan apa yang dilakukan suku Quraisy dalam menyikapi perjuangan Muhammad SAW. Oleh karena keyakinan tentang eksistensi Tuhan dari suku Quraisy telah diperoleh dari patung-patung bernama Latta, Uzza, dan Manna, maka kemudian ketika muncul keyakinan tentang 'tuhan-tuhan' lain di luar tradisi, mereka menolak dan melarang masuknya keyakinan yang muncul kemudian itu. Dengan alasan yang sama, suku Quraisy bertindak sangat tidak simpatik terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya.

Umat Islam & Integrasi Sosial

Adalah suatu kehendak Sang Khalik, Tuhan, *sunnatullah* bahwa Indonesia ditakdirkan sebagai suatu bangsa multi-etnis, agama, ras dan budaya, yang dikatakan sebagai *plural society*. J.S Furnivall (1980:86-103) mengatakan, sebagai suatu tipe masyarakat daerah tropis dimana mereka berkuasa dan mereka dikuasai mempunyai perbedaan ras. Orang Belanda sebagai kelompok minoritas, jumlahnya semakin bertambah pada akhir abad ke-19, sekaligus merupakan penguasaan yang memerintah mayoritas orang pribumi, sebagai warga negara kelas tiga di negeri sendiri⁴. Secara totalitas, diungkapkan J.Nasikun (1995:287-302), masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda merupakan suatu masyarakat tumbuh

⁴ Orang Timur Asing memiliki kedudukan kelas dua, antara kelompok Eropa dan Pribumi. Dalam kehidupan politik, indikasi jelas dari masyarakat Indonesia yang pluralistik, yakni tidak adanya kehendak bersama (*common will*), dimana masyarakat Indonesia secara totalitas terdiri dari elemen-elemen terpisah satu sama lain dikarenakan perbedaan ras. Masing – masing merupakan kumpulan individu dari suatu totalitas organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidaklah utuh. Orang Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja tetapi mereka tidak tinggal menetap di Indonesia. Kehidupan mereka hanya berada di sekitar pekerjaan itu, dan mereka melihat permasalahan sosial, politik, ekonomi

berdasarkan sistem kasta tanpa ikatan agama. Orang Belanda, Cina dan Pribumi, melalui agama, budaya, bahasa, pola pikir, dan gaya hidup masing-masing. Sebagai tanda tidak memiliki kehendak bersama (*common will*).⁵

Bangsa Indonesia sebagai bangsa pluralistik, disatu sisi, merupakan "berkah" dan "kekayaan" patut disyukuri. Di sisi lain, pluralistik justru berakibat sebaliknya, menempatkan bangsa ini menjadi rentan terhadap ancaman disintegrasi sosial (Abdullah Idi dan Toto Suharto, 2006 : 113) dan disintegrasi bangsa, seperti diungkapkan Henk Schulte Nordholt dan Hanneman Samuel (2004 :1-2) mengatakan pula :

"After decades of authoritarian centralist government, attempts to introduce political and economic change seem doomed, in the face of bureaucratic sabotage, corrupt power politics, short-term opportunism, and the absence of a widely shared vision regions of the archipelago, regional resistance movements, the inability to corruption, pessimists are inclined to classify Indonesia in the category of "messy states". In short, they predict further disintegration, which may eventually lead to the breaking up of the nation-state".

Syafuan Rozi (2003-91-92) mengatakan bahwa konflik sosial terjadi karena buruknya kondisi bangunan struktur sosial menyebabkan orang menjadi cepat marah dengan orang lain. Franz Magnis Suseno (2003:121-122) mengatakan bahwa setidaknya ada empat faktor pendukung konflik sosial di Indonesia, *Pertama*, konflik kultural, berhubungan dengan konflik primordialisme berdasarkan agama, ras etnis, dan daerah. *Kedua*, berhubungan dengan akumulasi

terjadi di Indonesia tidak sebagai warga negara dengan tetap sebagai kapitalis atau majikan dari buruh-buruh mereka. Sama halnya dengan orang Timur Asing. Seperti orang Cina, sebagaimana orang Belanda, mereka datang ke Indonesia untuk kepentingan ekonomi. Seperti orang Belanda dan Cina, kehidupan orang pribumi (*inlander*) tidak utuh pula, yakni sebagai "pelayan" di negen sendiri.

⁵ Pada bidang ekonomi, tidak adanya *common will* itu dapat dilihat dari tidak adanya permintaan sosial (*social demand*) dalam masyarakat secara totalitas. Tapi, masyarakat melainkan bersifat transaksional dan bukan *social demand* itu belum terorganisir dengan baik masyarakat telah menjadi "sumber" yang membedakan karakter ekonomi pluralistik (*plur-ral economy*) pada masyarakat homogen. Bila proses ekonomi pada masyarakat pluralistik (plur-dengan ekonomi tunggal (*unitary economy*), pada masyarakat pluralistik oleh adanya *common will*. Maka hubungan hubungan sosial diantara elemen masyarakat pluralistik sebaliknya hanya dikendalikan oleh proses ekonomi dengan produksi barang material sebagai tujuan utama dalam kehidupan masyarakat. Karena pengelompokan tersendiri : orang Belanda di bidang perkebunan, orang Pribumi di bidang pertanian, dan orang Cina di bidang pemasaran dan sebagai *mediator* diantara keduanya.

perasaan iri dan dengki. Orang dengan mudah diprovokasi orang lain dan mereka cenderung menjadi berperilaku eksklusif berdasarkan agama dan kelompok (etnis). *Ketiga*, perilaku orang dipengaruhi budaya kekerasan di tengah masyarakat. *Keempat*, sistem politik Orde Baru yang memosisikan kekuatan militer yang cenderung memecahkan masalah dengan pendekatan tidak demokratis.

Parsudi Suparlan (2003:79) juga mengungkapkan bahwa sebagai masyarakat pluralistik, masa depan Indonesia akan menjadi sensitif dengan beragam konflik. Dikatakan Suparlan, potensi integrasi sosial dihasilkan dari kompetisi dari individu dan kelompok pada berbagai bentuk "sumber-sumber sosial" (*social resources*) yang menggunakan etnisitas untuk memperkuat kekuasaan (*power*). Saling mempengaruhi satu sama lain akan memanipulasi etnisitas sebagai cara untuk mengumpulkan kekuatan berdasarkan kelompok dan solidaritas, kemudian menggunakan etnisitas dalam konflik untuk mencapai kekuasaan tertentu. Pada kekuasaan struktur sosial lokal, seperti politik dan etnisitas sebagai potensi yang dapat merusak struktur sosial dan level komunitas.

Menyadari Indonesia sebagai bangsa pluralistik yang rentan konflik sosial, rezim-rezim pemerintah telah melaksanakan sejumlah kebijakan etnisitas untuk memperkuat integrasi sosial. R. William Liddle (1997 :282-283) mengemukakan bahwa pemerintah Orde Baru (1966-1997) telah melakukan sejumlah kebijakan etnisitas sebagai upaya solusinya.⁶ terkhusus terhadap etnis Cina (Tionghoa) misalnya, Barbari (1984:690) mengatakan, kebijakan pemerintah Orde Baru difokuskan pada sejumlah kebijakan⁷. Dibidang etnisitas, bertalian

⁶ Fase manajemen / kebijakan konflik di tanah air. Pertama, manajemen konflik etnis sebelum tahun 1965. Pada 1928, para pemuda mendeklarasikan Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) dengan tujuan untuk menumbuhkan nasionalisme dalam upaya menciptakan kesatuan nasional. Kedua fase manajemen konflik dibawah Demokrasi Perwakilan (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965), yang membolehkan keinginan etnis mengekspresikan diri mereka sendiri melalui suatu sistem politik terbuka, dimana partai-partai politik berkompetisi dalam Pemilu untuk duduk di Parlemen dan pemerintah dibentuk berdasarkan mayoritas parlemen. Dibawah Demokrasi Terpimpin, Soekarno mencoba menghadapi aspirasi etnis-etnis dan kelompok lain melalui suatu kombinasi : tekanan (*coercion*), persuasif (*persuasion*) dan ko-optasi (*co-optation*). Dua hubungan konflik etnis paling penting pada 1950-an, adalah Hubungan Islam dan Negara; dan pemberontakan daerah-daerah dan pusat. Ketiga fase manajemen konflik pada masa Orde Baru (1966-1997). Pada level yang paling umum, pemerintah Orde Baru, dalam menangani manajemen konflik sosial menggunakan strategi politik yang mengombinasikan elemen: tekanan (*coercion*); persuasif (*persuasion*); pertukaran (*exchange*) dan ko-optasi (*co-optation*).

⁷ Pertama kebijakan umum, sebagai upaya pemerintah orde baru untuk menyatukan etnis

hubungan antar etnis, telah dilakukan dengan sejumlah kebijakan. Pemerintah Reformasi B.J. Habibie (1997-1999), lebih tampak pada bidang sosial budaya dan politik. Habibie, misalnya memberi kesempatan kepada orang Cina untuk menyalurkan aspirasi politik dengan mendirikan partai etnis Cina. Mereka juga diperkenankan untuk mempraktekkan adat-istiadat dan budaya leluhur.

Pemerintahan Abdurrachman Wahid (1999-2001) mengeluarkan Keppres No. 6/2000 dan mencabut Inpres No. 14/1967 tentang pelarangan praktik adat-istiadat dan seni budaya Cina. Megawati Soekarnopoetri (2001-2004) memperkuat kembali bagi orang Cina untuk melaksanakan adat-istiadat dan seni budaya Cina (Abdullah Idi, 2006:5). Pada pemerintahan Soesilo Bambang Yoedoyono (2004-2009), kebijakan etnisitas lebih memfokuskan pada kejelasan tentang hubungan antaretnis (UU PDRE) dan kerukunan umat beragama (PBM-KUB No. 9 & No. 8/2006).⁸ Hal ini bertanda bahwa pemerintah, pada prinsipnya lebih jauh telah menyadari bahwa sebagai bangsa kepulauan, suku/etnis, agama dan ras, bangsa ini sangat rentan terhadap disintegrasi social bahkan disintegrasi bangsa.

Meskipun sejumlah Peraturan dan Undang-Undang telah dilakukan dalam kurun waktu 1997-2007, potensi konflik sosial bernuansa etnis dan agama tersebut agaknya belum dapat direduksi

berbeda ke dalam masyarakat Indonesia: menjadi satu kesatuan yang utuh atau pemaduan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi bangsa baru. Sebagai proses pembangunan bangsa (*nation-building*) bangsa Indonesia. Kedua kebijakan khusus sebagai penjabaran kebijakan pertama, dengan menerapkan strategi asimilasi dalam berbagai bidang kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan pendidikan.

⁸ Pengesahan PBM-KUB No. 9 dan No. 8/2006 ini menunjukkan respons positif pemerintah SBY terhadap berbagai konflik sosial. Hal ini, menunjukkan bahwa potensi konflik sosial, baik bernuansa etnis maupun agama, dengan beragam pemicunya masih menjadi ancaman dan tantangan dalam kehidupan berbangsa yang akan mengancam integrasi sosial dan integrasi bangsa. Oleh sebab itu, berbagai upaya perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengantisipasi kemungkinan munculnya ledakan konflik dalam internal etnis dan agama. Pada 21 Maret 2006 telah ditanda tangani Peraturan Bersama Menteri (PBM): Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Amat Beragama, Dan Pendirian Ruman Ibadah. Dengan ditandatanganinya Peraturan Bersama Menteri (PBM) tersebut, berlaku ketentuan baru yang mengatur pendirian rumah ibadah yang menggantikan ketentuan lama, seperti tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/VER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Lihat Kembali : (Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 : 27-60).

dengan baik. Terbukti, berbagai perilaku kekerasan bernuansa etnis dan agama hingga kini (2007) masih terjadi yang bertanda pula bahwa masalah etnisitas cenderung masih menjadi ancaman bagi eksistensi bangsa ke depan. Dikatakan Rozy (2003: 92) bahwa kenyataan demikian merupakan tanda bahwa siklus berulang terjadinya *oriental despotism*, pembusukan dan perilaku kekerasan dari Timur, salah satunya dikarenakan bangunan struktur sosial yang rapuh sebagai warisan masa sebelumnya. Bangunan masyarakat yang pluralistik tetapi terbatas hanya menghasilkan kuatnya budaya dan struktur kekuasaan dominan dan terpinggirnnya budaya dan struktur minoritas.

Struktur ekonomi Indonesia yang cenderung memperlihatkan etnis minoritas migran tertentu lebih dominan dari etnis mayoritas pribumi. Kondisi sosial-ekonomi yang tidak berimbang ini sering kali menjadi penyulut potensi konflik yang bernuansa etnis dan agama, seperti terjadi pada 1998. Bila tidak menjadi perhatian memadai dalam kebijakan pembangunan, ketimpangan ekonomi etnis minoritas (migran) dan mayoritas (pribumi) seperti ini dapat berdampak negatif terhadap hubungan antaretnis dan agama suatu negara ke depan dan sekaligus berdampak buruk terhadap kondisi integrasi sosial dan integrasi bangsa. Kondisi ekonomi orang pribumi yang pada umumnya buruk tersebut memerlukan adanya upaya "pembelaan" (*affirmative action*).

Dari data BPS (2007) menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk Sumatera Selatan saja terdapat 6,9 juta hingga 7 juta jiwa terdapat 11.652.000 orang (23,6 %) merupakan penduduk miskin. Bila dilihat dari latar belakang etnis dan agama, penduduk Sumatera Selatan yang miskin tersebut merupakan berlatar belakang pribumi. Jika mayoritas pribumi (yang mayoritas Islam) merasa dirugikan dalam banyak hal, potensi konflik sosial akan mudah terjadi dan memerlukan waktu lama untuk mereduksinya kembali. Beragam konflik sosial bernuansa etnis dan agama di Indonesia, antara etnis pribumi lokal dengan sesama etnis pribumi lain atau dengan etnis migran tertentu. Pada umumnya lebih disebabkan oleh ketimpangan ekonomi. Sebagai konsekuensi logis dari berbagai kejadian/konflik antaretnis terdahulu telah menyebabkan trauma dan *image* yang buruk antara etnis pribumi dan migran yang tidak mudah hilang begitu saja, karena itu, diperlukan upaya kebijakan pembangunan yang memihak semua etnis yang bersifat konkrit dan agar kejadian-kejadian yang sama tidak terulang kembali dan "luka lama" dengan

perlahan-lahan dapat disembuhkan sehingga proses penguatan integrasi sosial akan tampak dalam realitas sosial.

Bila posisi etnis mayoritas pribumi (beragama Islam) berada pada pihak yang lemah (*subordinate*) dan etnis minoritas migran berada pada posisi yang kuat (*superordinate*) akan berimplikasi pada sulitnya membangun kembali suatu hubungan mayoritas-minoritas yang harmonis dan substantif seperti dicita-citakan. Idealnya, seperti dikatakan G.E. Simpson dan J.M. Yinger (1972:12-13), etnis minoritas migran memiliki beberapa karakteristik : *Pertama* kelompok minoritas merupakan suatu bagian dari masyarakat (negara) yang lebih kompleks. *Kedua*, memiliki ciri-ciri yang melemahkan anggapan terhadap diri sendiri (*self-esteem*). *Ketiga*, kelompok minoritas merupakan kelompok yang memiliki sejumlah ciri khusus yang sama, baik ciri-ciri yang menguntungkan atau merugikan. *Keempat*, keanggotaan dalam minoritas dapat merugikan generasi selanjutnya walaupun tidak ada lagi ciri-ciri fisik atau budaya yang menonjol. *Kelima* anggota kelompok minoritas baik karena pilihan sendiri atau karena kebutuhan, memiliki kecenderungan untuk kawin dengan orang-orang dari kelompok etnis sendiri.

Dalam kenyataannya, etnis minoritas migran tertentu di Indonesia justru memperlihatkan sebaliknya, berada pada pihak *superordinate*. Pandangan Simpson dan Yinger agaknya tidak semuanya relevan dengan kenyataan etnis pribumi (mayoritas) dan etnis migran tertentu. Justru etnis minoritas migran cenderung mendominasi bidang ekonomi dan etnis pribumi cenderung menjadi sebaliknya. Sekedar ilustrasi, dari 10 orang terkaya Indonesia versi *Majalah Globe Asia* Edisi Agustus 2007 misalnya, hanya 2 orang (20 %) berlatar belakang etnis pribumi : Arifin Panigoro dan Aburizal Bakrie (*Sumatera Ekspres*, 31 Juli 2007). Keadaan hubungan antaretnis seperti ini, dikatakan Lieberman dalam M. Kurokawa : (1972: 44 mudah memunculkan potensi konflik sosial, karena masing-masing mereka berupaya mempertahankan suatu tatanan sosial tertentu, demi membela suatu kepentingan tertentu. Permasalahan utamanya akan berkembang dan bertalian dengan institusi sosial, politik dan ekonomi yang menggambarkan situasi hubungan etnis pribumi (*indigenous*) yang mayoritas disubordinasi etnis minoritas migran.

Harus diakui bahwa di era Reformasi, konflik sosial lebih tampak bernuansa etnis, agama, dan daerah. Konflik sosial selama ini terjadi

tidak hanya pada mereka berbeda etnis dan agama tetapi juga mereka sesama etnis dan agama yang dapat dipicu oleh beragam motif / alasan, baik ekonomi, politik dan daerah, tetapi alasan ekonomi lebih signifikan. Karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa ancaman disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa ke depan termasuk "agenda" nasional yang menyita banyak energi. "Agenda" tersebut menjadi kenyataan fundamental perihal keberagaman di era global, yang melatari hubungan baru antara doktrin keagamaan dan doktrin nasionalisme (*Angkatan Bersenjata*, 18 Oktober 1997). Masalah itu semakin mengkrystal ketika dikaitkan dengan fenomena terjadinya konflik sosial bernuansa etnis, agama, ras dan kelompok dalam beberapa tahun terakhir. Apapun alasannya, kasus di Situbondo, Tasikmalaya, Rengasdengklok, Poso dan Ambon, pada dasarnya menyangkut hubungan agama *vis-a-vis* negara-bangsa.

Padahal nasionalisme dipandang sebagai pemersatu pluralitas latar belakang kultural dan agama agar terbentuk satu mozaik yang indah. Keberagaman yang ada tampak sudah menjadi realitas yang tidak dapat ditolak. Salah satu cara untuk menopang kelestarian nasionalisme adalah perlunya pengembangan budaya inklusivisme dalam beragama. Melalui paham itu, disatu sisi, seseorang diharapkan dapat menyakini bahwa agama dianutnya yang paling benar ; dan disisi lain, seseorang diharapkan dapat menyakini bahwa agama dianutnya yang paham itu, dan disisi lain, secara bersamaan dapat bersikap toleran dan bersahabat dengan pemeluk agama lain (*Kompas*, 17 Oktober 1997). Melalui pemeliharaan nasionalisme bangsa yang demikian itu, integrasi sosial dan integrasi bangsa dapat dipertahankan. Integrasi bangsa, dalam hal ini menunjuk pada keutuhan bangsa dalam konteks hubungannya dengan bangsa atau negara lain; sedangkan integrasi sosial merupakan keutuhan internal masyarakat dalam suatu negara. Meskipun demikian, kedua corak integrasi tersebut saling terkait dan tidak dipisahkan. Integrasi bangsa hanya akan ada bila integrasi sosial telah lebih dahulu tercipta. Berbagai peristiwa sosial politik yang dialami bangsa Indonesia pada dekade terakhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 merupakan permasalahan keduanya, yakni masalah integrasi bangsa dan integrasi sosial.⁹

⁹ Tuntutan sejumlah daerah untuk memerdekakan diri pada waktu lalu, sebagaimana Aceh, Riau, Papua (Irian Jaya), RMS-Maluku (Ambon), dan Timor-Timur (yang sudah merdeka). Pembentukan Partai Lokal GAM (Aceh), pengibaran bendera *Bintang Kejora* (Papua) dan penampilan Tari *Kecak Lefe* (Ambon) ketika Presiden SBY berkunjung kesana merupakan

Para ahli, dengan latar belakang berbeda, mengungkapkan bahwa multi-krisis yang muncul sejak 1997 telah menyebabkan berbagai permasalahan sosial. Ketimpangan sosial, politik, ekonomi dan budaya, semuanya secara signifikan telah mengganggu ketenteraman kehidupan berbangsa sehingga kemudian mengancam integrasi sosial dan disintegrasi bangsa. Krisis ekonomi dan krisis lainnya – baik krisis sosial, politik, ekonomi dan budaya – pada prinsipnya bersumber dari krisis moral-etika dialami bangsa ini. Prilaku korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) umat Islam di tanah air ternyata menduduki kategori peringkat yang tinggi—karena memang karena posisi sebagai mayoritas. Buruknya kondisi kehidupan bangsa ini, semakin memperburuk kondisi kehidupan umat beragama dan berbangsa yang dapat berproses menuju disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa. Disinilah pentingnya peranan umat Islam, sebagai mayoritas, dan juga umat lain agar memiliki tanggung jawab terdepan terhadap pentingnya menjaga ketahanan integrasi sosial dan integrasi bangsa melalui peran dan kedudukan masing-masing.

Dalam kurun waktu 1997-2010, sejumlah kebijakan yang dilakukan pemerintah, sebagai upaya mereduksi konflik sosial, pada prinsipnya, belum menjawab persoalan substansi etnisitas, setidaknya untuk jangka panjang. Permasalahan sesungguhnya bertalian dengan ketimpangan distribusi ekonomi yang dialami beragam etnis (mayoritas) pribumi. Tuntutan etnis-etnis pribumi dalam bentuk kemerdekaan yang tidak jarang dilakukan dengan perlawanan dalam bentuk perang tersebut dapat dilakukan dengan menghargai pluralitas dalam arti luas. Pemahaman pluralitas tidak akan sempurna, seperti dianjurkan al-Qur'an bagi umat Islam, bila ketimpangan ekonomi masih melanda beragam umat beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konflik sosial bernuansa etnis dan agama, salah satunya lebih dikarenakan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang begitu tajam ditengah masyarakat pluralistik.

persoalan integrasi bangsa. Peristiwa perang saudara antara umat Islam dan Kristen di Ambon dan Poso, perang antaretnis di Sampit (Kalimantan Barat-Etnis Madura dan Dayak bersama Melayu). Perkelahian antarkampung/desa/RT di berbagai daerah merupakan sebagian fakta distintegrasi sosial yang dialami bangsa ini. Singkatnya apa yang sedang dialami bangsa ini dalam beberapa tahun terakhir adalah ancaman integrasi sosial sekaligus integrasi bangsa.

Otonomi daerah diharapkan perlu memperhatikan adanya upaya pemberdayaan etnisitas dalam berbagai bidang kehidupan. Pluralitas dalam pandangan Islam menghendaki adanya kebijakan etnisitas memberdayakan semua etnis dan umat beragama-etnis/agama mayoritas dan etnis/agama minoritas. Pemihakan proporsional terhadap semua etnis dan agama, akan memperbaiki proses penguatan integrasi sosial dan ancaman disintegrasi sosial serta disintegrasi bangsa secara otomatis akan terdeteksi dengan sendirinya. Sebagai mayoritas (90 persen) dari total penduduk Indonesia, umat Islam, memiliki peran strategis dan terdepan terhadap penguatan kembali integrasi sosial ke depan.

Posisi umat Islam yang cenderung berada pada posisi tersubordinasi dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi, akan berubah menjadi lebih baik ke depan, bila ada kesadaran diri-individu dan kolektif umat Islam atas kelemahan dimiliki menuju perbaikan dengan mengedepankan niat, ilmu pengetahuan, etos kerja, *skills* dan *fairness* dalam kompetisi. Selain itu, pluralitas dan integrasi sosial menghendaki adanya kebijakan pemerintah yang membela (*affirmative*) terhadap semua kepentingan etnis dan agama secara adil, baik etnis mayoritas dan minoritas, sehingga akan berdampak positif terhadap proses penguatan integrasi sosial dan integrasi bangsa.

Orang Melayu:

Istilah, Jati Diri dan Globalisasi¹⁰

Istilah orang Melayu menjadi perbincangan akademis yang hangat karena bervariasinya versi dan teori yang dimunculkan para sarjana. Seiring dengan itu, dalam perkembangannya, jati diri orang Melayu menjadi menarik dibicarakan, terlebih dalam konteks globalisasi. Karenanya, dalam dalam tulisan ini, penulis lebih memfokuskan tentang diskusi disekitar istilah 'orang Melayu', jati diri, dan dampak globalisasi.

Siapa orang Melayu? 'Melayu' merujuk kepada mereka yang bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat-istiadat orang Melayu. Perkataan Melayu mungkin berasal daripada nama sebuah anak sungai yang bernama Sungai Melayu di hulu Sungai Batang Hari,

¹⁰ Paper berjudul: "Orang Melayu: Istilah, Jati Diri, dan Globalisasi", pernah disampaikan penulis pada Seminar Nasional Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 23 September 2014.

Sumatera. Di sana letaknya Kerajaan Melayu sekitar 1500 tahun lalu sebelum atau pada masa Kerajaan Srivijaya. Dari segi etimologi, perkataan 'Melayu' dikatakan berasal dari kata Sansekerta: 'Malaya' yang berarti 'bukit' atau 'tanah tinggi'. Ada pula sumber sejarah yang mengatakan bahwa kata 'Melayu' berasal dari Sungai Melayu di Jambi.¹¹

Khairul A. Mastor, Putai Jin, dan Martin Cooper mengatakan bahwa 'orang Melayu' (*Malays*) adalah mereka yang merupakan penduduk asli (*indigenous*) di wilayah Malaya, suatu wilayah di Semenanjung Malaya. Orang Melayu juga bertempat tinggal di Brunei, Singapura dan Indonesia, Thailand Selatan dan Kamboja maupun diluar Asia Tenggara.¹²

Istilah 'Melayu', seperti dikeluarkan UNESCO pada 1972, merupakan suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Madagaskar. Sedangkan menurut Perlembagaan Malaysia, istilah 'Melayu' hanya merujuk kepada seseorang yang berketurunan Melayu yang menganut agama Islam. Dengan kata yang lain, bukan semua orang yang berketurunan dari pada nenek moyang Melayu adalah orang Melayu. Istilah 'Melayu' untuk merujuk kepada nama bangsa atau bahasa adalah suatu perkembangan yang agak baru dari segi sejarah, yaitu setelah adanya Kesultanan Melayu Melaka. Hingga abad ke-17 istilah 'Melayu' yang merujuk kepada bangsa digunakan secara luas; sebelumnya, istilah 'Melayu' hanya merujuk kepada keturunan raja Melayu dari Sumatera.¹³

¹¹ Harun Amirurrasyid, *Kajian Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu*, Pustaka Melayu, Singapura, 1966, hlm. 4-5 (diakses via internet, 27/9/2014).

¹² Khairul A. Mastor, Putai Jin, dan Martin Cooper, *Malay Culture and Personality*, *Journal of American Sciences*, Volume 44 No. 1 September 2000, p. 96. Lihat pula: (Abdullah Idi, *Bangka, Sejarah Sosial Cina-Melayu*, Tiara Wacana, 2011, hlm. 1-2),

¹³ Istilah 'Melayu' digunakan pertama kali sekitar tahun 100-150 M dalam karya Ptolemy, *Geographike Sintaxis*, dengan istilah '*maleu-kolon*'. G. E. Gerini menganggap istilah itu berasal dari kata Sanskrit, yakni '*malayakom*' atau '*malaikurram*', yang merujuk kepada Tanjung Kuantan di Semenanjung Malaysia; dan Roland Bradell berpendapat tempat itu merupakan Tanjung Penyabung. Istilah Malaya '*dvipa*' muncul dalam kitab Purana, sebuah kitab Hindu purba, yang ditulis sebelum zaman Gautama Buddha sehingga 500 Masehi. '*Dvipa*' bermaksud 'tanah yang dikelilingi air' dan kecenderungannya '*Malaya dvipa*' adalah Pulau Sumatera. Istilah '*Mo-lo-yu*' juga dicatat dalam buku catatan perjalanan pengembara Cina pada sekitar 644-645 Masehi semasa zaman Dinasti Tang. Para pengkaji bersependapat bahwa perkataan '*Mo-lo-yu*' yang dimaksudkan merupakan kerajaan yang terletak di Jambi dan Sriwijaya yang terletak di daerah Palembang. Dikutip dari: (Madiana dan Hasnah, *Pengkajian Malaysia*, Penerbitan Fajar Bakti, Shah Alam, Malaysia, hlm. 140 (diakses via internet, 27/9/2014).

Setidaknya, terdapat dua pandangan/perspektif tentang 'siapa orang Melayu' itu.

Pertama, dari perspektif Undang-Undang (Malaysia). Di Malaysia, orang Melayu didefinisikan sebagai : seorang yang beragama Islam; bertutur bahasa Melayu; mengamalkan adat istiadat Melayu; dan lahir (sebelum hari merdeka) di Persekutuan Tanah Melayu (Malaya) atau di Singapura.⁴ Istilah atau definisi orang Melayu dalam perspektif pertama ini agak kompleks. Definisi ini orang Melayu sebagai orang yang bertutur dalam Bahasa Melayu, yang setidaknya meliputi orang di Malaysia, Indonesia, dan sebagian Thailand dan Filipina. Tetapi, di Indonesia, orang (etnis) Melayu merupakan salah satu dari sekitar 400-an suku bangsa. Orang Indonesia memperkenalkan dirinya umumnya dengan sebutan 'orang Indonesia' dengan bahasa resmi 'bahasa Indonesia' yang akarnya berasal dari bahasa Melayu. Definisi 'orang Melayu' dalam perspektif ini, bagi Malaysia, ditetapkan lebih diakrenakan kepentingan politik (Malaysia).

Kedua, dari persektif sosial-antropologi. Menurut Syed Husin Ali yang merupakan ahli antropologi Malaysia, orang Melayu itu dari segi lahiriahnya, umumnya berkulit sawo matang, berbadan sederhana besar serta tegap dan selalu bersikap lembut serta berbudi bahasa. Dari segi etnologi, Melayu bermakna kelompok masyarakat yang mengamalkan sistem kemasyarakatan dwisisi dan kegenerasian termasuk dalam bangsa Mongoloid. Suku/etnis Melayu di Malaysia: Serawai; suku/etnis Melayu di Indonesia: Deli (Sumatera Utara), Bukit (Riau), Anak Dalam (Riau), Melayu Jambi, Melayu Palembang, Melayu Bengkulu.

Dalam konteks asal-usul orang Melayu, terdapat dua teori yang kerap dibicarakan ahli ilmu sosial-antropologis dan artefak. Dua teori itu: *Pertama*, bangsa Melayu berasal dari Yunnan (Teori Yunnan); (2) bangsa Melayu berasal dari Nusantara (Teori Nusantara). Teori ini didukung sejumlah ahli: R.H Geldern, J.H.C Kern, J.R Foster, J.R Logen, Slamet Muljana (Indonesia) dan Asmah Haji Omar (Malaysia), dengan beberapa alasan. Kapak Tua yang mirip dengan Kapak Tua di Asia Tengah terdapat di Kepulauan Melayu. Hal ini menunjukkan adanya migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Melayu; Adat resam bangsa Melayu mirip dengan suku Naga di daerah Assam (dekat perbatasan India dan Myanmar); Bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. Dengan

lebih lanjut lagi, penduduk di Kemboja mungkin berasal dari dataran Yunnan dengan menyusuri Sungai Mekong. Perhubungan bangsa Melayu dengan bangsa Kemboja sekaligus menandakan pertaliannya dengan dataran Yunan. Berdasarkan teori ini, dikatakan orang Melayu datang dari Yunnan ke Kepulauan Melayu melalui tiga gelombang yang utama, yang ditandai dengan perpindahan Orang Negrito, Melayu Proto, dan juga Melayu Deutro.¹⁵

Kedua, bangsa Melayu berasal dari Nusantara (Teori Nusantara). Teori ini didukung para ahli seperti J.Crawfurd, K.Himly, Sutan Takdir Alisjahbana dan juga Gorys Keraf. Teori ini adalah didukung dengan beberapa alasan: (1) bangsa Melayu dan bangsa Jawa memiliki peradaban (*tamadun*) yang tinggi pada abad ke-19. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Hal ini diyakini bahwa orang Melayu tidak berasal dan berkembang di Nusantara; (2) K.Himly tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahawa Bahasa Melayu serumpun dengan Bahasa Champa. Baginya, persamaan yang berlaku di kedua-dua bahasa adalah satu fenomena 'ambilan'; (3) Manusia kuno Homo Soloinensis dan Homo Wajakensis terdapat di Jawa. Penemuan manusia kuno ini di Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan dari manusia kuno, yakni berasal dari Jawa dan mewujudkan peradaban tersendiri; dan (4) Bahasa di Nusantara (Bahasa Austronesia) mempunyai perbedaan dengan bahasa di Asia Tengah (Bahasa Indo-Eropah). Tetapi, kedua ini, agaknya merupakan teori ini agaknya kurang populer.

Berbagai teori asal-usul orang Melayu yang diajukan para ahli purbakala dan sosio-antropologi memang tidak selalu sama persis, dan sering kali berbeda. Suatu hal yang lebih penting adalah sudah

¹⁵ Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu. Mereka diperkirakan ada di sini sejak 1000 SM berdasarkan penemuan arkeologi di Gua Cha, Kelantan. Daripada orang Negrito telah diperturunkan orang Semang yang mempunyai ciri-ciri fisik berkulit gelap, berambut keriting, bermata bundar, berhidung lebar, bibir penuh, serta postur badan yang pendek. Melayu Proto Perpindahan orang Melayu Proto ke Kepulauan Melayu diperkirakan berlaku pada 2.500 SM. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito, ditandai dengan kemahiran bercucuk tanam. Terdapat satu lagi persamaan antara Melayu Proto dimana dikenali sebagai Melayu Negosiddek dimana kebanyakan terdapat di sebuah pulau yang dikenali sebagai Pinang. Melayu Negosiddek ini mahir dalam bidang lautan tetapi tidak pandai berenang. Melayu Deutro, perpindahan orang Melayu Deutro merupakan gelombang perpindahan orang Melayu kuno yang kedua yang berlaku pada 1.500 SM. Mereka merupakan manusia yang hidup di pantai dan mempunyai kemahiran berlayar. Lihat: (Madiana dan Hasnah, 'Pengkajian Malaysia....', *ibid.*).

ribuan tahun orang-orang tinggal di Semenanjung Malaya. Dan orang-orang itu tidak diragukan lagi merupakan nenek moyang sesungguhnya dari orang-orang Melayu sekarang. Kelompok Neolitik ini sering dinamakan Proto-Melayu.¹⁶

Dalam kaitannya dengan definisi dari perspektif sosio-antropologi, pantas dijelaskan bahwa bangsa Melayu telah ada sejak zaman pra Hindu-Budha, selanjutnya berkembang dan menyebar ke berbagai pelosok dunia—mendefinisikan Melayu sebagai kesadaran sejarah dan budaya. Secara umum, identitas bangsa Melayu hingga kini ditopang oleh empat pilar yang terdiri dari empat fase sejarah: *fase pra-Hindu-Budha*; *fase Hindu-Budha*; *fase Islam*; dan, *fase kolonialisme*. Dalam tulisan Mahyudin Al Mudra, dikatakan bahwa karena panjangnya perjalanan sejarah, luasnya persebaran area, dan perbedaan pengalaman dengan bangsa lainnya, maka level pengaruh pilar-pilar itu terhadap suku bangsa Melayu, antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Hal itu, terletak ada dimana suku bangsa Melayu itu berada, karena lingkungannya, intensitas interaksinya dengan budaya lain. Bisa jadi, pengaruh Islam terhadap suku bangsa Melayu, pada tempat tertentu, tampak kuat, tetapi di daerah lainnya sebaliknya. Hal itu, dapat dijelaskan melalui empat pilar/fase sejarah.¹⁷

¹⁶ Husin Ali, 'Rakyat Melayu: Nasib dan Masa Depan....' dalam Abdullah Idi, 'Bangka, Sejarah Sosial Cina-Melayu....', *op. cit.*, hlm. 12.

¹⁷ *Fase Pra-Hindu-Budha*, mengutip D.G.E. Hall, Mahyudin Al Mudra menulis bahwa bangsa Melayu diperkirakan telah tiba dikawasan Nusantara sejak 3.000 SM, yang dinamakan sebagai 'Proto-Melayu'. Mereka meninggalkan benda-benda bersejarah yang sangat penting sebagai penanda kemajuan peradaban Melayu saat itu. Di berbagai wilayah Nusantara banyak ditemukan patung-patung, palungan-palungan tempat menyimpan tengkorak, menhir-menhir untuk menghormati arwah nenek moyang, dan lain-lain. Proto-Melayu merupakan pendukung kebudayaan zaman batu yang menghasilkan bahan-bahan makanan dengan cara bercocok tanam. Selanjutnya, sekitar 300 SM, telah menyusul pendatang Melayu lainnya, yakni 'Deutro-Melayu'. Kedatangan mereka mendesak sebagian 'Proto-Melayu' hingga mereka pindah ke daerah-daerah pedalaman dan berbaur dengan pendatang baru. Kebudayaan 'Deutro-Melayu' jauh lebih maju dengan mengembangkan peralatan-peralatan dari perunggu dan besi. Peninggalan-peninggalan Proto dan Deutro-Melayu dinilai oleh Hall sebagai peradaban Melayu Kuno yang telah memiliki ciri dan karakter sendiri, sebelum mereka dipengaruhi oleh kebudayaan India. Hall mencatat beberapa komunitas Proto dan Deutro Melayu hingga kini, masih ada dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di daerah pedalaman, dengan mempraktekkan kepercayaan animisme dan dinamisme.

Fase Hindu-Budha, peradaban Melayu memasuki babak baru ketika masyarakat Melayu Kuno menjalin hubungan dengan bangsa India. Interaksi masyarakat Melayu dengan India diperkirakan sudah mulai sejak abad ke-3 M melalui jalur-jalur perdagangan. Hall memperkirakan orang-orang Melayu, ketika itu, sudah banyak yang sampai hingga India, dimana mereka sebagai pelaut ulung. Tetapi, pengaruh Hindu-Budha baru berkembang

Jati Diri 'Orang Melayu'

Bernard T. Adeney (2004) menuturkan bahwa kebudayaan modern dan post-modern berdampak pada perubahan sosial dalam berbagai sendi kehidupan dengan arus kecepatan yang deras. Perubahan itu, dipicu oleh pertukaran informasi pada setiap detiknya oleh cybermedia, televisi, radio dan media lainnya. Media-media informasi itu mengaburkan batas-batas fisik dan budaya –oleh Arjun

pesat di Nusantara pada abad ke-5 M. Kerajaan Kutai di Kalimantan, patung-patung Budha gaya Amaravati ditemukan di beberapa tempat di Sulawesi, Jawa dan Sumatera memperlihatkan perkembangan kebudayaan Hindu-Budha yang pesat ketika itu. Kerajaan Hindu-Budha di Nusantara mencapai puncaknya pada abad ke-9 hingga 15 M., diantaranya: Sriwijaya (Sumatera), Kediri, dan Majapahit (Jawa). Kitab *Nagarakartagama* mencatat daerah kekuasaan Sriwijaya mencapai daerah-daerah di Sumatera; dan dalam versi lainnya, wilayah Sriwijaya menguasai sebagian besar Nusantara, termasuk Kamboja. Memasuki abad ke-13, kerajaan-kerajaan Hindu-Budha berangsur melemah, periode ini juga, kerajaan Majapahit melemah. Pada waktu yang sama, terjadi penyebaran Islam secara aktif dan meluas ke berbagai wilayah di Nusantara. Pengaruh budaya Hindu-Budha pada masyarakat Melayu hingga kini terlihat pada upacara-upacara keagamaan, arsitektur bangunan dan bahasa Melayu. Contoh, kata dalam bahasa Melayu yang berasal dari kata Sanskerta, misalnya: bulan, berasal dari 'vulan', sampan dari 'samvau', seribu dari 'sarivu', dan lainnya.

Sebagian puak Melayu yang masih memeluk agama Hindu-Budha hidup di beberapa negara, seperti Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.

Fase Islam. Abdul Hadi (2008) menulis, Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan sekitar abad ke-11 dan berkembang pesat hingga abad ke 13. Ada versi yang berbeda dari peneliti tentang dari mana Islam datang dan siapa yang membawanya ke Nusantara. Ada yang berpendapat, Islam datang dari Cina, Gujarat, India, atau Turki. Terlepas adanya perbedaan itu, agama ini telah diterima luas oleh bangsa Melayu karena sifatnya yang egaliter dan populis. Islam tidak terdapat sistem kasta, kependetaan, yang memungkinkan keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam semua bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Faktor penting lainnya yang mendorong cepatnya penyebaran agama Islam ini dikarenakan tiga kekuatan: *istana*, *pesantren*, dan *pasar* (Taufik Abdullah, 1988). *Istana* sebagai pusat kekuasaan berperan dalam memberikan legitimasi politis untuk disebarkan ke rakyat yang bernaung dibawahnya. *Pesantren* yang dikelola oleh kalangan tarekat memberikan penjelasan tentang esensi sebagai agama yang membumi dan mudah dicerna. Sifat *pesantren* yang terbuka untuk siapapun menjadikan lembaga ini menjadi tempat belajar masyarakat untuk mempelajari dan memperdalam ajaran Islam. *Pasar*, sebagai tempat daerah pemukiman saudagar, kaum terpelajar, dan kelas menengah yang berhadapan langsung dengan situasi kultural sedang berkembang. Dengan didukung tiga kekuatan tersebut, pengaruh Islam di masyarakat Melayu semakin pesat. Secara kultural, Islam disebarkan melalui *pesantren* dan *pasar*, dan secara politik dilegitimasi oleh *istana*. Adapun pengetahuan seperti *syari'ah*, *tasawuf*, *kalam*, *tafsir*, dan *hadist*, dan ilmu pengetahuan umum: *hisab*, *perkapalan*, *estetika*, *astronomi*, *logika*, *ekonomi* dan *perdagangan*, dll. pengaruh Islam berkembang pesat. Perkembangan keimanan dan keilmuan secara bersama-sama menempatkan Islam sebagai poros bagi kehidupan masyarakat Melayu yang mempengaruhi semua dimensi kehidupan mereka. Terdapat suatu ungkapan yang populer yang secara eksplisit menunjukkan kuatnya pengaruh Islam menjadi mayoritas masyarakat Melayu yang hidup di kawasan perkotaan tetapi tidak menjadi agama mayoritas di daerah pedalaman.

Appadurai disebut 'deteritorialisasi' sehingga menciptakan dunia baru dengan batas-batas wilayah dan nilai yang bersifat relatif. Irwan Abdullah (2005) mengatakan proses 'deteritorialisasi' ini merupakan suatu proses krusial dikarenakan sebagai titik balik peradaban kontemporer memiliki implikasi yang luas dalam beragam proses sosial dan budaya. Implikasi positif atau negatif dapat terjadi dalam proses sosial dan budaya itu, yang dimulai dari cara berfikir dan cara memandang dunia. Upaya-upaya menduniakan nilai-nilai luhur Melayu menjadi penting sebagai penyeimbang ide dan gagasan dari luar dunia Melayu yang cenderung destruktif.¹⁸

Seperti diketahui bahwa dari perspektif Undang-Undang, Malaysia, orang Melayu didefinisikan sebagai: 'seorang beragama Islam; bertutur bahasa Melayu; mengamalkan adat istiadat Melayu; dan lahir (sebelum hari merdeka) di Persekutuan Tanah Melayu (Malaya) atau di Singapura'. Sebetulnya, secara substantif, tidak ada permasalahan krusial tentang definisi orang Melayu ini, baik di Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand (sebagian), maupun Brunei Darussalam—sebagai puak Melayu. Penekanannya, terletak pada 'beragama Islam' dan 'menjalankan adat-istiadat Melayu'. Hal ini, sama halnya, dengan menjalankan perintah agama yang dianut orang Melayu di Malaysia

Fase Kolonialisme, dimana daerah-daerah pedalaman yang tidak disentuh oleh persebaran Islam menjadi sasaran utama bagi misionaris Kristen yang dibawa bangsa kolonial Eropa mulai abad ke-16. Pemerintah kolonial, Belanda dan Inggris, melakukan penginjilan Kristen di tengah penduduk Muslim karena sadar bahwa hal itu telah 'merongrong keamanan dan ketertiban' yang sangat penting bagi kepentingan material bangsa Eropa (Robert Hefner, 2007). Upaya menciptakan kantong-kantong Kristen di daerah pedalaman dirasa oleh pemerintah kolonial lebih aman, disamping untuk membangun keberpihakan penduduk lokal kepada pihak kolonial. Proses Kristenisasi berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga beberapa suku bangsa Melayu yang menetap di pedalaman, seperti Batak Karo di Sumatera Utara dan Toraja di pedalaman Sulawesi, mayoritas menganut agama Kristen. Perbedaan agama yang kemudian dijadikan sebagai salah satu batas identitas antara Melayu dan Non-Melayu hingga kini.

Disamping Kristenisasi, peran kolonialisme dalam mengkotak-kotak bangsa Melayu juga dilakukan melalui politik. Perjanjian Inggris dan Belanda pada 17 Maret 1824, dikenal dengan *Traktat London* secara sepihak telah membagi wilayah Melayu menjadi dua: sebelah Utara menjadi daerah kekuasaan Inggris dan sebelah Selatan menjadi daerah kekuasaan Belanda. Pembagian administratif kolonial seperti ini selanjutnya telah menjadi negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Bahasa Melayu pun telah berkembang yang dipengaruhi bahasa masing-masing bangsa kolonial itu. Bahasa Indonesia banyak dipengaruhi bahasa Belanda, sedangkan bahasa Melayu Malaysia dan Singapura banyak dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Dikutip dalam tulisan: (Mahyudin Al-Mudra, 'Redefinisi Melayu....', *ibid.*, diakses 27 September 2014).

¹⁸ Mahyudin Al Mudra, 'Redefinisi Melayu: Upaya Menjembatani Perbedaan Kemelayuan Dua Bangsa Serumpun', *Melayu Online.com* (diakses, 27/9/2014).

dan negara serumpun lainnya, yakni ajaran agama Islam. Jadi, jati diri orang Melayu yang paling penting adalah Islam dan menjalankan ajaran agamanya, dimana faktanya agama Islam menjadi dominan dianut orang Melayu (di negara-negara itu).

Jika, ada orang Melayu beragama lain, selain Islam, karena proses perjalanan sejarah yang berbeda, tetapi asal-usul nenek moyangnya sama, dari perspektif sosio-antropologis, hal itu juga merupakan identitas/jati diri yang mereka miliki, yang harus dihargai dan dihormati. Konsep Islam yang menghargai perbedaan dan toleransi sangat jelas, dan bukanlah persoalan lagi. Hal ini sama halnya, sebagai masyarakat majemuk (*plural society*) di Indonesia, apa yang termaktub dalam sila ke-1 Pancasila, dimana intinya 'setiap penganut agama patut menjalankan ajaran agamanya', apapun agamanya. Para *founding fathers* agaknya sudah memprediksi tentang 'kebutuhan' masyarakat pluralistik-Indonesia dengan perlunya merumuskan kelima sila dari Pancasila, sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ke-1 adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, meskipun keyakinan berbeda, tapi asal-usulnya sama, dalam konteks berbangsa bukanlah persoalan, 'Bhinneka Tunggal Ika'.¹⁹

Agama dan etnisitas merupakan konsekuensi adanya klaim-klaim terhadap identitas itu. Sebagai seorang Melayu, bisa saja mengatakan orang: Melayu-Bangka, Melayu-Riau, Melayu-Palembang, Melayu-Jambi, dan Melayu-Deli (Medan). Sama halnya, ketika orang menyebut identitasnya: Cina-Palembang, Cina-Medan, Cina-Solo, Cina-Bangka, Cina Jakarta, dan lain. Karena, konsep 'identitas' dan 'etnisitas' adalah konsep tentang identifikasi diri dan

¹⁹ Konsep 'Bhinneka Tunggal Ika' dilihat sebagai pemersatu bangsa yang majemuk, untuk mencapai integritas suatu bangsa, Indonesia. Dalam konsep ini, suatu negara terdiri atas kelompok-kelompok atas dasar: suku, agama, ras, dan antargolongannya yang tersegmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang antara kelompok satu dengan lainnya tidak saling melengkapi tetapi justru bersifat kompetitif. Untuk itu, bangsa Indonesia memilah-milah budaya bangsa sebagai universal yang terbagi atas beberapa sub-budaya daerah yang beragam, dimana dianggap sebagai khazanah kebudayaan. Untuk itu, diperlukan *image* masyarakat dalam satu, yang dinamakan 'Bhinneka Tunggal Ika'. Jika keragaman dalam suatu bangsa tidak berhasil dikelola dengan bijak maka disintegrasi akan meunculkan sebagai akibat dari kegagalan itu. Adapun gagal tidaknya integrasi nasional terletak dari kebijakan pemerintah dalam menciptakan ideologi nasional. Jika masyarakat merasakan manfaat dari keberagaman itu, integrasi akan tercipta. Sebaliknya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat keragaman itu, yang akan terjadi adalah ancaman disintegrasi nasional (bisa berupa keinginan pemisahan antarwilayah). Lihat: (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 90).

asal-usul sosial yang bersifat relasional. Disisi lain, dalam konteks berbangsa, orang mengatakan sebagai 'orang Indonesia'; disisi lain, sebagai 'orang Muslim' atau 'orang Kristiani'. Seperti dikatakan Fredrik Barth (1969) bahwa etnisitas dapat dikatakan eksis ketika orang mengklaim identitas tertentu bagi dirinya dan didefinisikan oleh orang lain juga dengan identitas yang diklaimnya itu. Etnisitas, dengan demikian, harus dimaknai sebagai identifikasi seseorang dalam berafiliasi dengan kelompok sosialnya. Identitas dan etnisitas merupakan hasil konstruksi (proses) sosial yang lazim disebut askripsi (*ascription*). Askripsi, proses penandaan sekelompok orang/masyarakat tertentu dengan sembarang: apa pun tandanya (sebagai ciri khas, *labelling* kelompok tertentu), umumnya berlangsung hingga berabad-abad lamanya. Dalam proses itu terjadi interaksi orang dari aneka latar belakang di berbagai bidang kehidupan. Artinya, proses askripsi tidak akan berlangsung/terjadi justru ketika seorang benar-benar menyendiri, tidak berinteraksi.

Agar jati diri orang (nilai-nilai) Melayu tidak mengalami proses kelunturan zaman, mereka seharusnya berfikir dan bertindak ke depan, *the future*, seperti telah diteladani nenek moyang mereka—mampu beradaptasi dan berinovasi—sesuai dengan zamannya. Dalam konteks globalisasi, karenanya, dalam pandangan penulis, perlu memperhatikan beberapa aspek:

Pertama, pembangunan pendidikan. Bangsa-bangsa Melayu atau rumpun Melayu perlu merespons globalisasi dengan berfikir dan bertindak semestinya melalui pemberdayaan pendidikan sebagai upaya mempersiapkan man-power yang relevan dengan nilai-nilai leluhur orang Melayu, pengamalan ajaran Islam, disamping memahami dan menguasai sains-teknologi pragmatis. Barang kali, apa yang dilakukan bangsa Jepang dan beberapa bangsa Asia lainnya, termasuk Malaysia, dengan memprioritas pembangunan pendidikan, merupakan suatu langkah yang tepat dalam memajukan peradaban Melayu di era-Global. Jepang, dalam waktu tidak terlalu lama, sejak 1945, telah menjadi negara menguasai sains-teknologi, dan *super-power*, tanpa 'menggusur' ajaran agama Shinto. Malaysia, sebagai salah satu negara rumpun Melayu, menargetkan menjadi negara maju (*developed country*) pada 2020 dengan diikuti dengan kebijakan 'Islam Hadhari' nya. Sejak 1970-an-sekarang, Malaysia mengirimkan putera-puterinya untuk belajar ke luar negeri selain dalam negeri.

Kedua, kebijakan kesehatan. Untuk kasus Indonesia, salah satu bangsa rumpun Melayu, perlunya kebijakan pemerintah yang menjamin kesehatan masyarakat dengan optimal. Seperti, dilakukan Taiwan bahwa semua warga wajib memiliki kartu kesehatan (Askes) dengan iuran beragam berdasarakan pendapatan. Hampir 95 persen Rumah Sakit dan Praktek Dokter memiliki kerjasama dengan perusahaan Askes. Semua warga telah menumbuhkan penyakit berat maupun ringan. Hal ini, telah menumbuhkan partisipasi dan loyalitas warga terhadap pemerintah.

Ketiga, kebijakan ekonomi. Karena, berdasarkan data *World Bank*, pada Setember 2014, potensi angka kemiskinan di Indonesia berkisar 68 juta orang. Belajar dari Taiwan bahwa konsep ketimpangan sosial akan berdampak pada tindakan kriminal dan konflik sosial. Upaya pembangunan ekonomi dilakukan dengan membangun infrastruktur jalan hingga ke penjuru desa. Para petani dibantu dengan "suntikan" modal yang memadai untuk pengelolaan pertaniannya. Dampaknya, kesejahteraan ekonomi petani pun semakin meningkat dan tingkat urbanisasi mengalami penurunan karena pedesaan telah menjadi "sentra" ekonomi yang handal.

Ke-empat, *Riset dan Pengembangan Sumber Daya*. Sekali lagi belajar dari Taiwan, mengingat sumber daya alam (*SDA*) yang terbatas, tidak ada pilihan lain bagi Taiwan harus menggali dan mencari potensi yang dapat meningkatkan taraf hidup. Penelitian dan Pengembangan merupakan penjabaran penelitian sesungguhnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi pun berkembang pesat dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas sumber daya. Etos kerja pun meningkat dan timbul kesadaran, dengan semboyan: "*Jangan makan kalau tidak bekerja*". Kesadaran inilah berdampak pada minimumnya kasus kejahatan konvensional, seperti pencopetan dan pencurian. Budaya malu itu berimbas terhadap kehidupan sosial lainnya, seperti rendahnya pungli, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kasus gelandangan dan pengemis juga hampir tidak ada.²⁰

Implementasi terhadap ke-empat aspek diatas, tampaknya telah mempengaruhi dalam menciptakan sistem yang mendorong bangsa Taiwan menempatkan hukum sebagai "panglima". Kepatuhan terhadap hukum tidak didasarkan pada tarik-menarik kepentingan

²⁰ Albert Barita Marulam Sihombing, "Pendidikan dan Budaya Hukum, Belajar dari Pengalaman Taiwan", *Media Indonesia*, 30 April 2012.

(*vested-interest*) tetapi lebih didasarkan pada kesadaran bagi kepentingan berbangsa. Anak-anak Taiwan sejak dini telah diajarkan dan didik untuk memahami dan menghormati supremasi hukum melalui pendidikan di sekolah. Proses pendidikan yang tidak koruptif tetap dipelihara dengan peningkatan kesejahteraan dan diperkuat dengan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai bagian dari "rekayasa sosial" ke arah kehidupan yang lebih baik. Disini, supremasi hukum sebagai "panglima" bertalian erat dengan kemajuan pembangunan sektor pendidikan. Hal ini sejalan dengan salah satu teori perubahan sosial, Teori Analitik²¹ bahwa kemajuan suatu masyarakat ditandai dengan berbagai aspek: ekonomi, politik, keluarga, mobilitas sosial dan agama yang semuanya itu bertumpu pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai negara rumpun Melayu, agaknya Malaysia lebih menonjol dalam merespon 'globalisasi' dalam proses pembangunannya mengarah kesana, dimana paradigma Melayu terlihat pula, dengan peneraan konsep 'Islam Hadhari'-nya.

Istilah Cina, Tionghoa dan Politik²²

Keputusan Presiden RI Nomor 12/2014 yang ditandatangani pada 12 Maret 2014 dipandang sebagai salah satu langkah maju terhadap penghapusan diskriminasi dan politik adu domba. Disisi lain, sebagian kalangan berpandangan bahwa Kepres ini terlalu berlebihan dan cenderung mengistimewakan etnis Cina-Tionghoa. Beragam pandangan yang ada sesungguhnya sah-sah saja karena begitu banyak persoalan etnis Cina-Tionghoa seiring dengan sejarah perjalanan bangsa sejak pra-kolonial. Banyak riset dan publikasi ilmiah yang telah dilakukan tentang relasi etnis Cina-Tionghoa dan Pribumi agaknya memang tidak mudah diselesaikan dengan cepat dan dalam tempo hitungan tahun. Dari perspektif akademik-etnisitas, izinkan penulis menggunakan istilah yang lebih netral: Cina-Tionghoa mengingat kedua istilah ini lazim digunakan dalam masyarakat meskipun dalam dialek berbeda. Kehadiran Kepres ini, terkesan tiba-tiba yang memunculkan multi-tafsir karena sebentar lagi akan dilaksanakan pesta demokrasi-Pemilihan Umum 2014.

²¹ Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, Cetakan ke-3, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 219.

²² Tulisan penulis yang berjudul: "Istilah Cina, Tionghoa dan Politik", dipublikasi di *Sriwijaya Post*, 2 April 2014.

Istilah Tjina, Cina dan Tionghoa sudah banyak dibahas dalam studi akademik, baik bertalian dengan pendekatan sosio-linguistik dan bertalian dengan interaksi sosial antaretnis yang berbeda. Istilah Tjina dan Cina sudah mendunia. Dalam konteks Indonesia, penggunaan istilah Tjina, Cina dan Tionghoa merupakan suatu hal yang lazim dan biasa pula digunakan dalam masyarakat dan tidak selalu diartikan negatif. Dalam banyak literatur ilmiah (buku, artikel jurnal) internasional juga sering menggunakan istilah Chinese ketimbang istilah Tionghoa. Para akademisi Indonesia juga tampak fleksibel dalam penggunaan kedua istilah itu, ada yang menggunakan istilah Tionghoa dan banyak pula yang menggunakan istilah Cina. Istilah Tjina, Cina dan Tionghoa, di banyak daerah selama ini tidak selalu bermakna negatif baik bagi etnis Cina-Tionghoa dan mayoritas Pribumi. Sejumlah riset konflik sosial bernuansa etnis dan rasial pada pasca 1998 menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kasus-kasus konflik tersebut cenderung dikarenakan adanya ketimpangan struktur sosial-ekonomi pada etnis berbeda. Dari perspektif sosial-ekonomi, faktanya, justru etnis mayoritas cenderung yang terdiskriminatif. Jadi, kurang jelas seberapa jauh sebetulnya dampak penggunaan istilah Tjina, Cina, dan Tionghoa terhadap terjadinya kasus-kasus konflik sosial pada 1998.

Padahal, pada awalnya, hubungan etnis mayoritas pribumi dengan etnis minoritas Cina-Tionghoa berjalan dengan hangat dan normal. Justru, relasi etnis Cina-Tionghoa dan kolonial Belanda tampak tidak harmonis ketika itu. Suatu tindakan kekerasan massal bangsa kolonial Belanda terhadap etnis Cina-Tionghoa pada 1740 di Batavia yang menelan korban sekitar seratus ribu orang Cina-Tionghoa. Akan tetapi, bangsa kolonial Belanda selanjutnya berubah pendirian erat akan membahayakan kepentingan ekonomi kolonial Belanda. Belanda selanjutnya memilih strategi menempatkan orang Cina-Tionghoa sebagai kolega dalam kegiatan ekonomi Hindia-Belanda. Tindakan ini secara politik berupaya menjauhkan mereka dari relasi sosial yang erat dengan orang pribumi.

Dalam perkembangannya, relasi sosial etnis Cina-Tionghoa dan bangsa kolonial Belanda, telah menempatkan etnis Cina-Tionghoa dalam struktur masyarakat Hindia Belanda diposisikan sebagai warga kelas dua (Timur Asing), seperti India dan Arab. Sedangkan etnis pribumi dikategorikan sebagai warga kelas tiga (*inlander*). Jadi, benih-benih kecemburuan dan prasangka memang sengaja diciptakan

bangsa kolonial dengan politik *divide et impera*. Jadi, struktur sosial-etnis yang diskriminatif yang terjadi selama ratusan tahun pada zaman Hindia-Belanda telah menempatkan posisi superior dan ter subordinasi bagi masyarakat pribumi. Struktur sosial-etnis yang berbeda berdampak pula terhadap perbedaan kesempatan dalam meraih kesejahteraan dan prestasi ekonomi di negeri Hindia-Belanda.

Wang Gungwu (1996) mengungkapkan bahwa menjelang abad ke-19 banyak pedagang Cina-Tionghoa memegang posisi penting sebagai pemimpin diberbagai perusahaan Eropa. Sebagian mereka bertindak sebagai penasihat bisnis bagi raja-raja pribumi dan gubernur provinsi di Hindia Belanda. Sebagian lainnya menjadi agen perekrut kuli-kuli dari Cina daratan, penarik pajak pertanian, atau sebagai pemimpin (*capiten*) komunitas Cina. Belanda menilai orang-orang Cina penting sebagai ahli-ahli lokal (*local experts*) dan perantara (*middlemen*), dan lebih bernilai dibandingkan dengan para pedagang Asia lainnya. Belanda dan Inggris kemudian tidak ragu lagi untuk menempatkan orang Cina dalam upaya ekspansi aktivitas perdagangan mereka di Nusantara selama abad ke-17 dan ke-18. Mereka melihat orang Cina memiliki mobilitas tinggi dan senantiasa siap ambil bagian dalam berbagai kesempatan yang mereka lakukan. Posisi-posisi orang Cina yang strategis itu jauh melebihi posisi-posisi etnis India dan Arab, kendatipun sama-sama kelas Timur Asing.

Sebagian besar etnis Cina-Tionghoa selanjutnya betul-betul memanfaatkan hubungan baik dengan Belanda yang secara ekonomi politik tentu menguntungkan. Dalam sejarah perlawanan dan peperangan dengan bangsa kolonial Belanda, memang ada keterlibatan sebagian kecil etnis Cina-Tionghoa yang masih loyal dalam membantu elit pribumi yang menentang bangsa kolonial-Belanda. Diungkapkan Mason Hoadley (1998) ketika Belanda melakukan perluasan aktivitas ekonomi, sejumlah besar etnis Cina-Tionghoa berminat untuk bermigrasi ke negeri Hindia Belanda.

Ketika nasionalisme bangsa mulai tumbuh sejak organisasi Boedi Oetomo berdiri pada 20 Mei 1908, sebagai tanda dimulainya arah pembangunan dan kesatuan bangsa, yang terjadi dikalangan etnis Cina-Tionghoa justru sebaliknya. Pada 1900, di Batavia berdiri perkumpulan Cina, yakni *Tionghoa Hwee Koan* (THHK) yang pada prinsipnya bertujuan memupuk nasionalisme dan budaya Cina melalui pendidikan umum. Sejak 1927, kegiatan politik masyarakat

kolonial bersifat komunal. Orang Cina yang sebelumnya terintegrasi dalam masyarakat Hindia Belanda, hanya berjuang demi kepentingan kelompoknya sendiri. Organisasi-organisasi politik komunal itu tetap eksis setelah Indonesia merdeka. Hal ini memperlihatkan bahwa latar belakang terjadinya kegiatan politik komunal, yakni pembagian kepentingan berdasarkan etnis, tidak berubah. Di kalangan orang Cina, usaha memperkuat kecinaannya dilakukan dengan sejumlah cara, misalnya melalui bahasa. Pada 1901, bahasa Cina dikalangan komunitas Cina-Tionghoa. Di *Holland Chinese School (HCS)* didirikan oleh Belanda, sebagai respons pemerintah kolonial. Pendidikan HCS didasarkan pada kurikulum otonomi kecinaan, seperti halnya kurikulum dan kegiatan sekolah di Cina daratan (*mainland China*).

Setelah era-kemerdekaan, sentimen terhadap etnis Cina-Tionghoa tentunya tidak mudah hilang begitu saja. Dalam kasus G/30/S/PKI/1965 misalnya, pemerintah Orde Lama mengklaim indikasi keterlibatan etnis Cina-Tionghoa, yang kemudian memunculkan ketegangan diplomatik dengan Beijing. Pemerintah Orde Lama pun membuat sejumlah peraturan yang membatasi aktivitas sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan politik etnis Cina-Tionghoa di Indonesia. Pada era Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang agak serupa dengan kebijakan Orde Lama sebagai upaya mencari solusi beragam dan dinamika persoalan etnis Cina-Tionghoa.

Seperti diungkapkan Benny G. Setiono (2002) bahwa perilaku ekonomi etnis Cina-Tionghoa periode 1986-1999, merupakan masa keemasan bisnis etnis Cina-Tionghoa di Indonesia, terlebih bagi yang terdekat dengan "Cendana". Etnis Cina-Tionghoa mengokohkan diri sebagai salah satu penyangga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberanian pengusaha dan pelaku etnis Cina-Tionghoa lainnya dalam penanaman modal, spekulasi, strategi kerjasama, dan jaringan kerja dengan pihak luar negeri menjadi *point* istimewa perilaku ekonomi etnis Cina-Tionghoa di tahun-tahun ini. Kedekatan dengan para pejabat sampai cenderung dikaitkan dengan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) juga dilakukan oleh beberapa pengusaha etnis Cina-Tionghoa. Krisis Mei 1998, telah menempatkan sentra-sentra ekonomi etnis Cina-Tionghoa telah menjadi sasaran amuk massa. Sejumlah orang Cina-Tionghoa pergi keluar negeri atau kembali ke daerah-daerah asal kelahiran dalam negeri untuk tujuan keselamatan.

Pada 2008, Presiden Soesilo Bambang Yoedoyono mengeluarkan UU RI No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik, pada Pasal 9 diatur tentang hak-hak: sipil, politik, ekonomi, dan sosial dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam era Reformasi, yang dipertegas dalam UU No. 40/2008, telah banyak perubahan dan kemajuan yang dialami etnis Cina-Tionghoa, yang telah memungkinkan mereka mencalonkan diri menjadi anggota legeslatif, eksekutif, dan lain-lainnya. Sejak UU ini dikeluarkan pada 2008, tampak bahwa sejumlah anggota legeslatif dan eksekutif di negeri ini ditempati oleh etnis Cina-Tionghoa.

Presiden SBY baru-baru ini juga mengeluarkan Kepres No. 12 Tahun 2014 tentang penggunaan istilah Cina dan Tionghoa. Jika, tujuan Kepres ini untuk menghilangkan diskriminatif dan politik adu domba terhadap etnis Cina-Tionghoa agaknya kurang akurat. Karena, dalam praktek interaksi-sosial-komunikatif antara komunitas Cina-Tionghoa dan masyarakat Pribumi, penggunaan istilah itu tidak selalu diartikan negatif oleh etnis Cina-Tionghoa, tergantung konteks sosio-linguistik dimana bahasa itu digunakan.

Akan tetapi, kehadiran Kepres No. 12 Tahun 2014 tetap dipandang suatu hal positif yang setidaknya untuk mengingatkan semua elemen masyarakat-pluralistik Indonesia tentang betapa pentingnya keharmonisan dalam keberagaman dan perbedaan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hanya saja, karena kebijakan mengeluarkan Kepres ini menjelang akan dilaksanakan pesta demokrasi pada 9 April 2014, keberadaannya dapat ditafsirkan beragam yang salah satunya sebagai upaya untuk mendongkrak suara bagi partai politik tertentu. Begitulah faktanya, sejak zaman kolonial hingga zaman reformasi keberadaan etnis minoritas Cina-Tionghoa sarat dengan *political interest* penguasa, yang terkadang solusi substantifnya justeru terabaikan, yakni tanpa adanya diskriminatif bagi semua etnis mayoritas dan minoritas dalam berbagai bidang kehidupan. Agaknya itulah solusi substantif ke depan.

ISIS:

Antara Jihad dan Radikalisme²³

Dalam beberapa pekan terakhir, isu *Iraq and Syria Islamic State* (ISIS) telah meramaikan media sosial. Hal ini dipicu oleh hilangnya

²³ Artikel tulisan penulis yang berjudul: "ISIS: Antara Jihad dan Radikalisme", pernah dimuat dalam *Sriwijaya Post*, 6 April 2015.

sejumlah warga dan mahasiswa di Sumatera Selatan yang disinyalir ikut aliran ISIS. Dikabarkan juga tidak kurang dari 500 orang yang diduga telah bergabung dengan para pejuang ISIS di Suriah. Suatu hal yang menarik, kejadian-kejadian hilangnya beberapa warga dan mahasiswa secara "misterius" tersebut telah menjadi perhatian dari berbagai kalangan, baik orang tua, kalangan sekolah, kampus, media sosial, dan pemerintah. Untuk menyelamatkan 'tunas bangsa' ini pihak aparat Kodam dan Polda Sumsel pun merencanakan akan menurunkan intel ke kampus-kampus.

Persoalan pemuda (pelajar/mahasiswa) sebetulnya sangat kompleks dan banyak sekali, sejak dari persoalan *begal*, narkoba hingga isu ISIS. Ketiganya sama bahayanya bagi masa depan mereka dan bangsa ini. Publik juga diyakini masih memiliki pemahaman tentang ISIS tampak beragam. Dari pandangan-pandangan yang berbeda dapat dikategorikan kedalam dua pandangan pokok: *pertama*, ISIS merupakan perjuangan umat Islam (*Jihad*); dan *kedua*, ISIS dipandang sebagai suatu organisasi terorganisasi yang menyimpang sehingga terlarang karena kerap menyebar teror. Untuk itu, tulisan ini terasa perlu mendiskusikan tentang ISIS dalam kaitannya dengan *Jihad* atau 'radikalisme'.

Dalam makna *Jihad* ini, patut kiranya dikutip pendapat dari seorang pemikir Islam, Jamal al-Banna, anak dari Hasan al-Banna. Dikatakan Jamal al-Banna bahwa *Jihad* secara etimologis merupakan *isim mashdar* dari kata kerja *jahada-yajhudu* , yang berarti berusaha keras, tekun bekerja, berjuang dengan sungguh-sungguh, dan mempertahankan sekuat kemampuan. Dari pendapat Jamal al-Banna itu tampak pula bahwa makna *Jihad* sangat luas. Kegiatan kebajikan dalam semua dimensi kehidupan umat meliputi banyak hal, baik secara material, intelektual, moral, dan spiritual. *Jihad* , karenanya, harus dimaknai dan dipahamai secara imparial dan komprehensif. Susana hidup dengan mengedepankan toleransi dalam masyarakat pluralistik juga kategori *Jihad* ; berupaya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT; membersihkan diri dari sifat iri hati-dengki, dan tidak takabur; tidak memfitnah dan bekerja keras agar keluar dari kesengsaraan juga *Jihad* ; belajar keras menuntut ilmu pengetahuan juga *Jihad* ; dan lain sebagainya. Kehidupan dalam kebajikan dan kemaslahatan umat, kata Jamal al-Banna, merupakan pemahaman substantif dari *Jihad* dalam Islam. Lebih jauh, semua aktivitas kebajikan dalam kontek hubungan manusia dengan sang Khalik

(*hablum-minallah*), hubungan manusia dengan manusia (*hablum-minannas*), dan hubungan manusia dengan alam ciptaannya (*hablum-minal'alam*), diartikan sebagai *jihad*. Dikatakan Jamal al-Banna, bahwa *jihad* berbeda dengan *qital*. *Qital* merupakan melakukan secara fisik. Ketika umat Islam diserang secara fisik, mengancam kebebasan keyakinan, menangkai serangan dari orang-orang tidak beriman, diperbolehkan melakukan *qital*. Jadi ketika umat Islam diserang, ditindas, dijajah secara paksa, dan akan dihancurkan keyakinannya, *qital* diperbolehkan.

Dari pemahaman ini, agaknya diperlukan analisis lebih jauh apakah fenomena ISIS bagi masyarakat Indonesia merupakan bagian dari *jihad*. Perlu penjelasan spesifik apakah indikator-indikator *jihad* relevan dikonotasikan dengan partisipan ISIS. Karena, dari media sosial, tampak bahwa saudara sesama muslim pun tidak terlepas dari korban kekerasan dari "perjuangan" ISIS. Bahkan, Ketua Umum PB NU, KH. Aqiel Siradj, pernah mengatakan bahwa ISIS lebih kejam dari Al-Qaeda. Sudah barang tentu kekejaman dan kekerasan dalam bentuk apapun tidak diperkenankan Islam. Jadi, fenomena perjuangan ISIS masih belum terlalu jelas, apakah bagian dari *jihad*, *qital*, atau bahkan lebih cenderung menekankan pada terror, setidaknya telah terjadi keresahan dari berbagai elemen masyarakat luas. Untuk kasus tertentu, barangkali, dimana umat Islam-minoritas cenderung dieksploitasi oleh mayoritas-umat non-muslim seperti di Rohingnya (Myanmar) dan etnis-muslim minoritas Mindano (Philippine), atau perjuangan etnis minoritas Pattani (Thailand) dalam berjuang mempertahankan keamanan diri dan akidah Islam, dan terjadi kontra fisik, sehingga mungkin lebih tepat dilakukan tindakan '*qital*'.

Lalu, apa motif sebagian umat Islam di tanah air yang dikatakan ikut bergabung dengan ISIS? Tentu, secara pasti belum diketahui. Tetapi, ada motif ideologis, dimana ada yang dijanjikan ibadah 'umrah gratis'; dan ada motif ekonomi dengan janji lapangan pekerjaan dengan penghasilan menggiurkan. Lewis (2002) mengungkapkan bahwa pokok persoalan bertalian dengan kemunculan ekstremisme atau radikalisme Islam—atau agama-agama lain—ada pada para pemeluknya. Effendy (2009), mengungkapkan bahwa dalam konteks teori dalam praktik, fenomena ekstremisme atau radikalisme Islam bukan tanpa sebab, dan bukan tanpa sasaran. Selalu saja kenyataan itu diarahkan kepada kelompok-kelompok tertentu yang dinilai 'merugikan' kepentingan

Islam atau pemeluknya. Memahami konteks global, dimana ekstremisme dan radikalisme Islam, seperti isu ISIS, tidak cukup hanya dipahami bersifat *religious-centred*—yang mengarah pada hal normatif dan doktriner—tetapi lebih dari itu, atau istilah Robert N. Bellah, telah menjadi sesuatu yang bersifat *"beyond belief"*.

Upaya mereduksi penyebaran dan adanya tindakan 'radikalisme' yang diklaim dilakukan ISIS di tanah air, karenanya, agaknya patut pula memperhatikan *'beyond belief'* itu. Antara lain, *pertama*, dalam konteks global, ada banyak hal tindakan negara-negara tertentu telah meninggalkan 'duka' dan menumbuhkan sentimen ideologis sesama umat Islam di belahan dunia. Ada yang merespon secara moderat dan ada pula merespon dengan cenderung bersifat 'radikalisme' atau 'terorisme'. Misalnya, kasus intervensi AS ke Irak; dan Perang Israel-Palestina.

Kedua, pertumbuhan populasi umat Islam yang terus meningkat dan menjadi terbesar dalam populasi penduduk dunia saat ini. Di beberapa negara Barat dan Eropa, meningkatnya pertumbuhan populasi muslim ini memunculkan 'kegelisahan' dan 'ancaman' tersendiri, sehingga isu-isu rasialisme anti Muslim tidak bisa dihindarkan, bahkan menjadi agenda krusial dari otoritas dalam mengantisipasi kemungkinan terburuk ke depan.

Ketiga, beberapa konflik sosial antara etnis minoritas-muslim dan non-muslim di beberapa negara di Asia (misalnya Myanmar, Thailand, Philipine, dan China) dipandang sangat 'merugikan' umat Islam. Organisasi ASEAN terkesan kurang semangat dan kurang serius melakukan upaya mereduksi dan menuntaskan persoalan internal ASEAN, yakni beragam konflik komunal minoritas muslim dan mayoritas-non muslim di negara itu. Minimnya peran ASEAN ini menimbulkan sentimen ideologis dan 'solidaritas' sesama umat Islam Asia, yang memungkinkan munculnya cara untuk membantu sesama, termasuk kemungkinan cara 'radikalisme'.

Keempat, situasi dan kondisi internal berbangsa terkini sangat mungkin bisa mendorong tumbuhnya gerakan 'radikalisme'. Misalnya, situasi 'sulit' ekonomi dalam negeri, stabilitas politik kurang terjamin, penegakan hukum belum optimal, dan kurang ketatnya pengawasan antarperbatasan negara, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan, tingginya biaya hidup, dan buruknya pelayanan kesehatan, buruknya kualitas pendidikan, situasi politik yang

cenderung gaduh, dapat memberi peluang bagi munculnya gerakan yang tidak diharapkan, seperti adanya partisipasi dalam gerakan 'radikalisme' ISIS.

Kelima, sudah *mafhum*, dunia mengakui bahwa bangsa ini merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan menampilkan sebagai muslim yang moderat dan cinta damai. Hal ini perlu dijaga dan dibina dengan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan agama kepada anak-anak, remaja, pemuda, keluarga, dan masyarakat yang tidak hanya pentingnya dimensi kognitif tetapi juga internalisasi ajaran agama itu sendiri, yang tercermin dalam perilaku sosial. Selain itu, optimalisasi dan re-vitalisasi pendidikan agama (apapun agama anak didik) yang mengedepankan nilai-nilai kemajemukan yang dapat diinternalisasikan dalam diri bangsa ini, memiliki kontribusi berarti pula dalam menuju bangsa yang damai dalam keberagam ditengah pergaulan global.

Kemajuan sains-teknologi berupa media sosial selanjutnya dapat mempercepat penyebaran informasi tentang situasi dan kondisi umat Islam di berbagai belahan dunia lainnya. Informasi itu direspon dan dipersepsikan secara berbeda oleh umat Islam, yang selanjutnya dapat memunculkan beragam pola perilaku umat Islam; yang bisa moderat atau 'radikalisme', tergantung pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman sosial-keagamaan yang dimiliki. Isu adanya partisipan ISIS dalam negeri ini karenanya merupakan persoalan adanya perbedaan persepsi dan pemahaman tentang *jihad* dan 'radikalisme' tersebut yang masih beragam dan dipandang *tumpang-tindih, overlapping*. Partisipan ISIS dalam negeri sesungguhnya saudara muslim kita juga, hanya saja mereka memerlukan pencerahan dan kearifan kebijakan.

Pluralisme dan Integrasi Sosial²⁴

Sebagian besar negara di dunia berlatar belakang sebagai masyarakat majemuk atau pluralistik. Indonesia merupakan salah satu negara pluralistik. Pengalaman sosio-historis menunjukkan bahwa keberadaan sebagai negara majemuk/pluralistik ibarat pisau "bermata dua". Di satu sisi, kemajemukan/pluralistik merupakan sebagai kekuatan; di sisi lain, sebagai kelemahan. Dengan kata lain,

²⁴ Tulisan penulis yang berjudul: "Pluralisme dan Integrasi Sosial", pernah disampaikan pada *Konvensi Keserasian Sosial: Kemajemukan dan Pluralisme sebagai Kekuatan Bangsa*, Dinas Sosial Pemerintah provinsi Sumatera Selatan, Hotel Carrissima, 22 Mei 2010.

pluralistik dapat menjadi "sumber" integrasi, dapat pula menjadi "sumber" disintegrasi atau pemecah belah. Tulisan ini memfokuskan pada analisis tentang sejauhmana kemajemukan/pluralistik dapat menjadi suatu kekuatan integrasi bangsa.

Indonesia, sebagai suatu negara pluralistik, menampakan suatu struktur masyarakat yang mempunyai dua ciri. *Pertama*, secara horizontal ditandai suatu kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan etnis, agama, adat-istiadat dan daerah. *Kedua*, secara vertikal, struktur masyarakat ditandai adanya perbedaan vertikal lapisan atas dan lapisan bawah begitu tajam. Adanya perbedaan itu, masyarakat Indonesia dinamakan oleh J.S. Furnivall²⁵, sebagai masyarakat pluralistik, suatu istilah yang pertama kali digunakan untuk menggambarkan masyarakat Hindia Belanda.

Suatu kehendak Sang Khalik, Tuhan, *sunnatullah*, bahwa Indonesia ditakdirkan sebagai suatu bangsa multi-etnis, agama, ras, dan budaya, yang dikatakan sebagai *plural-society*. Dikatakan J.S. Furnivall (1980) bahwa sebagai suatu tipe masyarakat daerah tropis dimana mereka berkuasa dan mereka yang dikuasai mempunyai perbedaan ras. Orang Belanda sebagai kelompok minoritas, jumlahnya semakin bertambah pada akhir abad ke-19, sekaligus merupakan sebagai penguasa yang memerintah orang pribumi, sebagai warga negara kelas tiga di negeri sendiri.²⁶ Secara totalitas, diungkapkan J. Nasikun (1995)²⁷, masyarakat Indonesia pada masa

²⁵ J.S. Furnivall, "Plural Societies", *Sociology as Southeast Asia: Readings on Social Change and Development*, Edited by Hans-Dieter Evers, Oxford University Press, Oxford, New York, Melbourne, 1980, hlm. 86-103.

²⁶ Orang Timur Asing memiliki kedudukan kelas dua, antara kelompok Eropa dan Pribumi. Dalam kehidupan politik, indikasi jelas dari masyarakat Indonesia yang pluralistik, yakni tidak adanya kehendak bersama (*common will*), dimana masyarakat Indonesia secara totalitas terdiri dari elemen-elemen terpisah satu sama lain dikarenakan perbedaan ras, masing-masing merupakan kumpulan individu dari suatu totalitas organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidaklah utuh. Orang Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja tetapi mereka tidak menetap di Indonesia. Kehidupan mereka hanya berada di sekitar pekerjaan itu, dan mereka melihat permasalahan sosial, politik, ekonomi terjadi di Indonesia tidak sebagai warga negara dengan tetap sebagai kapitalis atau majikan dari buruh-buruh mereka. Sama halnya dengan orang Timur Asing, seperti etnis Cina ekonomi. Seperti orang Belanda dan Cina, kehidupan orang Pribumi (*inlander*) tidak utuh Agama dan Integrasi Bangsa: Analisis Sosiologis terhadap PBM No. 9 & No. 8/2006", *Makalah Orasi Ilmiah dalam rangka Wisuda Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang*, 29 Nopember 2006, hlm. 3).

²⁷ Lihat: (Abdullah Idi, "Islam dan Pluralisme: Analisis Sosiologis-Keagamaan terhadap

Hindia Belanda merupakan suatu masyarakat tumbuh berdasarkan sistem kasta tanpa ikatan agama. Orang Belanda, Cina, dan Pribumi, melalui agama, budaya, bahasa, pola pikir, dan gaya hidup masing-masing, sebagai tanda tidak memiliki kehendak bersama (*common will*)²⁸.

Dalam perkembangannya, kehidupan di alam merdeka, dikenal dengan semboyan bangsa Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika" mencerminkan realitas aktual masyarakat Indonesia. Dikatakan oleh Parsudi Suparlan (2003)²⁹, bahwa Indonesia, yang dikenal sebagai masyarakat majemuk atau pluralistik, terdiri dari sekitar 500 kelompok etnis, dimana setiap kelompok etnis tetap mempertahankan identitas etnis dan budayanya, dan mengklaim wilayah teritorial etnisnya sendiri. Para anggota dari masing-masing etnis hidup dalam komunitas etnis yang homogen, dengan identitas kultur dan batas-batas teritorialnya sendiri, yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia.

Jadi, jelas sekali bahwa Indonesia merupakan salah satu negara majemuk atau pluralistik di dunia. Hampir semua wilayah Indonesia secara geografis, etnis, budaya, kultur, dan agama tampak heterogen. Dari aspek etnis, seiring kedatangan para migran dari kelompok etnis yang berbeda dan hidup berdampingan dengan komunitas etnis lokal, tidak hanya di kota-kota atau pusat-pusat urban saja, melainkan juga di desa-desa dan daerah-daerah pedalaman. Interaksi sosial antaretnis lebih interaktif dibanding sebelumnya.

Peranan Umat Islam Indonesia dalam Memperkuat Integrasi Sosial", Makalah disampaikan pada Acara Pengukuhan Guru Besar bidang Sosiologi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang, 9 Agustus 2007, di Academic Centre IAIN Raden Fatah Palembang.

²⁸ Pada bidang ekonomi, tidak adanya *common will* itu dapat dilihat dari tidak adanya perminataan sosial (*social common*) dalam masyarakat secara totalitas. Tapi, masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda, *social demand* itu belum terorganisir dengan baik melainkan bersifat sektional dan bukan *social demand* yang dihayati bersama oleh elemen masyarakat telah menjadi "sumber3" yang membedakan karakter ekonomi pluralistik (*plural economy*) pada masyarakat pluralistik dengan ekonomi tunggal (*unitary economy*) pada masyarakat homogen. Bila proses ekonomi pada masyarakat homogen dikendalikan oleh adanya *common will* maka hubungan-hubungan sosial diantara elemen masyarakat pluralistik sebaliknya hanya dikendalikan oleh proses ekonomi dengan produksi barang material sebagai perbedaan ras yang mana tipe ras mempunyai fungsi produksi tersendiri; Orang Belanda di bidang perkebunan; orang Pribumi di bidang pertanian; dan orang Cina (Tionghoa) di bidang pemasaran dan sebagai *mediator* diantara keduanya.

²⁹ Parsudi Suparlan, "Etnisitas dan Potensinya Terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia", *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, Diterbitkan atas kerjasama *Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS)* Universiteit Leiden dan The Centre for Languages dan Cultures, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, hlm.79-90.

Tidak jarang juga hal ini berdampak pada adanya permasalahan atau potensi konflik sosial antaretnis migran dan lokal karena etnis migran sering secara ekonomi lebih mapan dibandingkan komunitas lokal. Perbedaan etnis dan kultur-budaya dapat dilihat berdasarkan tingkat perkembangan ekonominya.²¹

Mengingat begitu kompleksnya struktur sosial masyarakat majemuk atau pluralistik, maka pluralistik itu sendiri dapat dipandang sebagai "sumber kekuatan-integrasi" atau "sumber kelemahan-disintegrasi" atau sebagai sumber pengucuan atau pemecah belah. Sebagai sumber kekuatan-integrasi, pluralisme budaya di sejumlah negara tampak menjadi suatu kekuatan. Untuk skala internasional, seperti India, Malaysia dan Singapura, dapat dikatakan pluralistik merupakan suatu kekuatan, kendatipun tidaklah berarti konflik etnis tidak pernah terjadi tapi dibandingkan Indonesia jauh lebih rendah intensitasnya.

Kasus dinamika sosial-politik bertalian dengan pluralisme budaya telah berujung pada berbagai konflik sosial bernuansa etnis, agama, politik, dan budaya di berbagai wilayah Indonesia. Sebenarnya, di Indonesia, konflik dan separatisme lebih menonjol terjadi, seperti kasus Ambon-Maluku (Tim Universitas Indonesia, 1999); kasus Poso di Sulawesi Tengah, Samalantan, Sanggau Lada dan kasus Sambas di Kalimantan Barat (Tim Penelitian Universitas Indonesia, 1999); kasus Sampit di Kalimantan Tengah (Edi Petebang, 2001); dan kasus-kasus separatisme (gerakan pemisahan diri dari NKRI) seperti di Aceh, Riau, RMS-Maluku, Irian Jaya (Papua), dan Timor-Timur (sudah merdeka); kasus bernuansa hubungan agama-penguasa (Koja, Perioek 2010); dan kasus konflik lokal antarsuku di Timika (2010).

Tidak bisa dipungkiri pula bahwa pada Mei 1998, kasus kerusuhan bernuansa etnis di sejumlah daerah atau kota-kota besar (tetapi banyak kota-kota besar tampak aman), konflik sosial antara etnis pribumi dan etnis keturunan Cina (Tionghoa). Tetapi, sesungguhnya yang melatarbelakangi kerusuhan etnis ini lebih dikarenakan terjadinya krisis moneter dan ekonomi yang tanpa terkendali, dan kebetulan etnis minoritas migran Cina (Tionghoa) secara ekonomi lebih mendominasi ekonomi nasional, yang terlihat secara fisik di kota-kota besar dan kecil.

²¹ Lihat: (Parsudi Suparlan, *ibid.*, hlm. 80).

Sehingga, perlu dicatat disini bahwa, yang melatar belakangi kerusuhan etnis itu bukan pluralisme sesungguhnya tetapi ketimpangan sosial ekonomi dan politik antara mayoritas pribumi dan non-pribumi (keturunan Cina/Tionghoa) yang tidak berimbang. Sama halnya, adanya kasus separatisme (ingin berpisah dari NKRI) di sejumlah daerah sebetulnya tidak terlepas dari ketimpangan "kue" kekuasaan/pembangunan antara "pusat" dan "daerah-daerah". Orang daerah berpandangan bahwa kekayaan daerah telah dibawa ke Jakarta secara tidak adil. Sebagai konsekuensi dan bentuk perlawanan maka mereka mengancam untuk berpisah dari NKRI.

Meletusnya demonstrasi besar-besaran pada 1998 yang meruntuhkan kekuasaan Orde Baru sebetulnya bertalian pula dengan tuntutan keadilan kue-ekonomi yang sebagian berputar di Jakarta, yang tidak seimbang dengan yang ada di daerah. Maka, era Reformasi, antara lain, telah menguatkan peran Kebijakan Otonomi Daerah dan keinginan suatu birokrasi pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean government*), yang menginginkan jauh dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Walaupun, harus diakui bahwa ternyata realitas kinerja birokrasi pemerintahan belum memperlihatkan apa yang sesungguhnya diinginkan, yakni era Reformasi belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan Reformasi 1998. Terbukti, untuk level Asean, salah satu Survei Internasional (2010) menunjukkan Indonesia masih menempati urutan 1 untuk negara terkorup.

Jadi, penulis berkeyakinan bahwa pluralisme budaya merupakan "sumber" kekuatan untuk memperkuat integrasi bangsa. Bila terjadi kasus konflik bernuansa etnis dan agama yang dapat memperlemah kekuatan/integrasi bangsa selama ini, berbagai hasil penelitian menunjukkan hal itu lebih disebabkan faktor sosial ekonomi dan politik. Faktor pluralisme atau kemajemukan bukan permasalahan sesungguhnya tapi sebagai "faktor pemicu". Disinilah, urgensi dan peran *kebijakan pembangunan* pemerintah baik pada level nasional maupun daerah diharapkan selalu dapat "memihak" kepada rakyat kebanyakan dan mengedepankan kemajemukan/dimensi pluralisme budaya.

**Etnisitas & Integrasi Bangsa:
Analisis Sosiologi terhadap PBM No. 9 & No. 8/2006³¹**

J.S Furnivall (1980: 86-103) mengungkapkan bahwa Indonesia, sebagai salah satu negara pluralistik, menampilkan suatu struktur yang mempunyai dua cirri. *Pertama*, secara horizontal ditandai suatu kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan etnis, agama, adat-istiadat dan daerah. *Kedua*, secara vertical, struktur masyarakat ditandai adanya perbedaan vertical lapisan atas dan lapisan bawah begitu tajam. Karena adanya perbedaan itu, masyarakat Indonesia dinamakan masyarakat Pluralistik (*plural society*), suatu istilah yang pertama kali digunakan Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Hindia Belanda, yakni suatu masyarakat yang memiliki dua atau lebih elemen yang hidup terpisah satu sama lain dalam suatu kehidupan politik.

Sebagai masyarakat pluralistik (*plural society*), diaktakan Furnivall, masyarakat Indonesia merupakan suatu tipe masyarakat daerah tropis dimana mereka berkuasa dan mereka dikuasai mempunyai perbedaan ras. Orang Belanda sebagai kelompok minoritas, jumlahnya semakin bertambah pada akhir ke-19, sekaligus merupakan penguasa yang memerintah mayoritas orang pribumi, sebagai warganegara kelas tiga di negerinya sendiri. Orang Timur Asing memiliki kedudukan kelas dua, antara kelompok Eropa dan Pribumi. Dalam kehidupan politik, indikasi jelas dari masyarakat Indonesia yang pluralistic, yakni tidak adanya kehendak bersama (*common will*), dimana masyarakat Indonesia secara totalitas terdiri dari elemen-elemen terpisah satu sama lain dikarenakan perbedaan ras, masing-masing merupakan kumpulan individu dari suatu totalitas organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidaklah utuh. Orang Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja tetapi mereka tidak tinggal menetap di Indonesia. Kehidupan mereka hanya berada di sekitar pekerjaan itu, dan mereka melihat permasalahan sosial, politik, ekonomi terjadi di Indoneasia tidak sebagai warga negara tetapi sebagai kapitalis atau majikan dari buruh-buruh mereka. Sama halnya dengan orang Timur Asing, seperti Cina, sebagai mana orang Belanda, mereka datang ke Indonesia hanya untuk kepentingan

³¹ Tulisan penulis yang berjudul "Etnisitas, Agama dan Integrasi Bangsa: Analisis Sosiologis Terhadap PBM No.9 Tahun 2006 dan No.8 Tahun 2006". Makalah Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang, tanggal 29 November 2006.

ekonomi. Seperti orang Belanda dan Cina, kehidupan orang Pribumi (*indender*) tidak utuh pula, yakni sebagai "pelayan" di negeri sendiri.

Secara totalitas, dikatakan J. Nasikun (1995: 287-302), masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda tersebut merupakan suatu masyarakat tumbuh berdasarkan sistem kasta tanpa ikatan agama. Orang Belanda, Cina, dan Pribumi, melalui agama, budaya, bahasa, pola pikir, dan gaya hidup masing-masing, sebagai tanda tidak memiliki kehendak bersama. Pada bidang ekonomi, tidak adanya kehendak bersama itu dapat dilihat dari tidak adanya permintaan sosial (*social demand*) dalam masyarakat secara totalitas. Tapi, masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda, *social demand* itu belum terorganisir dengan baik melainkan bersifat sektional dan bukan *social demand* dihayati bersama oleh elemen masyarakat telah menjadi "sumber" yang membebedakan karakter ekonomi pluralistic (*plural economy*) pada masyarakat pluralistic dengan ekonomi tunggal (*unitary economy*) pada masyarakat homogen. Bila proses ekonomi pada masyarakat homogeny dikendalikan oleh adanya *common will* maka hubungan-hubungan sosial diantara elemen-elemen masyarakat pluralistic sebaliknya hanya dikendalikan oleh proses ekonomi dengan produksi barang-barang material sebagai tujuan utama dalam kehidupan masyarakat. Karena pengelompokan masyarakat berdasarkan perbedaan ras yang mana tipe ras mempunyai fungsi produksi sendiri: Orang Belanda di bidang perkebunan; orang Pribumi di bidang pertanian; dan orang Cina di bidang pemasaran dan sebagai mediator diantara keduanya.

Dalam perkembangannya, masalah konflik etnis tetap merupakan salah satu permasalahan masyarakat Indonesia pada pasca kemerdekaan. Untuk itu, pemerintah Orde Baru (1966-1997), melakukan sejumlah kebijakan etnisitas sebagai upaya solusinya. R. William Liddle (1997: 282-283) menuturkan, setidaknya ada tiga fase manajemen/ kebijakan konflik di tanah air. *Pertama*, manajemen konflik etnis sebelum 1965. Pada 1928, para pemuda mendeklarasikan Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) dengan tujuan untuk menumbuhkan nasionalisme dalam upaya menciptakan kesatuan nasional. *Kedua*, fase manajemen konflik etnis dibawah Demokrasi Perwakilan (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada rezim Demokrasi Perwakilan, membolehkan keinginan etnis mengekspresikan diri mereka sendiri melalui suatu sistem politik terbuka, dimana partai-partai politik berkompetisi dalam pemilu

untuk duduk di parlemen dan pemerintahan dibentuk berdasarkan mayoritas parlemen. Dibawah Demokrasi Terpimpin, Soekarno mencoba menghadapi aspirasi etnis-etnis dan kelompok lain melalui suatu kombinasi tekanan (*coercion*), persuasif (*persuasion*), dan ko-optasi (*co-optation*). Dua hubungan konflik etnis paling penting pada 1950-an, adalah: Hubungan Islam dan Negara; dan pemberontakan daerah-daerah dan pusat. Ketiga, fase manajemen konflik pada masa Orde Baru (1966-1997). Pada level yang paling umum, pemerintah Orde Baru, dalam menangani manajemen konflik sosial menggunakan strategi politik yang mengkombinasikan elemen tekanan (*coercion*); persuasif (*persuasion*); pertukaran (*exchange*), dan ko-optasi (*co-optation*).

Barbari (1984: 690) mengatakan, kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap orang Cina, dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, kebijakan umum, sebagai pemerintah Orde Baru untuk menyatukan etnis berbeda kedalam masyarakat Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh atau pemaduan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi bangsa baru, sebagai proses pembangunan bangsa (*nation-building*), bangsa Indonesia. Kedua, kebijakan khusus, sebagai penjabaran kebijakan pertama, dengan menerapkan strategi asimilasi dalam berbagai bidang, seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Sementara itu, kebijakan etnisitas pada pemerintah Reformasi B. J. Habibie (1997-1999), lebih tampak bidang sosial budaya dan politik. Habibie, misalnya, memberikan kesempatan kepada orang Cina untuk menyalurkan aspirasi politik dengan mendirikan partai etnis Cina. Mereka juga diperkenankan untuk mempraktekkan adat-istiadat dan budaya leluhur. Pemerintah Abdurrachman Wahid (1999-2001) mengeluarkan Keppres No. 6/2000 dan mencabut Inpres No. 14/1967 tentang pelarangan praktek adat-istiadat dan seni budaya Cina. Megawati Soekarnopoetri (2001-2004) memperkuat kembali bagi orang Cina untuk melaksanakan adat-istiadat dan seni budaya Cina. Kendatipun begitu, K. Sindhunata dan Junus Jahja menuturkan rada pesimis terhadap kebijakan-kebijakan itu, sebagaimana mereka tuturkan (*Republika*, 22/03/2003):

*... dilihat dari identitas etnik, perayaan Imlek dirasakan sebagai peluang baru bagi ekspresi dan budaya etnik yang selama Orde Baru telah terpasung. Tapi, dilihat dari sudut pandang identitas nasional, perayaan Imlek ini memunculkan kekhawatiran tersendiri yang dapat

mendorong ke arah proses resnifikasi (peng-Tionghoa-an) kembali warga keturunan Tionghoa (Cina) di tanah air".

Uraian diatas menunjukkan bahwa permasalahan etnisitas dan agama agaknya tampak dinamis dan kompleks untuk dipecahkan. Seperti adanya kekhawatiran Sindhunata dan Jahja, berbagai langkah strategis telah dilakukan pemerintah Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi tampak sangat bernilai dan patut diperhatikan. Kendatipun demikian, langkah-langkah tersebut belum dapat menjadi solusi sepenuhnya terhadap berbagai masalah etnisitas di tanah air. Hal ini terbukti, beragam bentuk kekerasan bernuansa etnis dan agama dalam kurun waktu 1998-2003, menjadi tanda siklus serulang terjadinya oriental despotism, pembusukan dan perilaku kekerasan dari Timur, salah satunya dikarenakan bangunan struktur sosial yang rapuh pada sebelumnya. Bangunan masyarakat yang pluralistic tapi terbatas hanya menghasilkan kuatnya budaya dan struktur kekuasaan dominan dan terpinggirnnya budaya dan struktur minoritas (Syafuan Rozi, 2003: 92). Sementara itu, struktur ekonomi memperlihatkan didominasi kalangan etnis minoritas tertentu juga dapat menyulutkan potensi konflik yang bernuansa etnis dan agama itu.

Indonesia termasuk negara yang memiliki intensitas frekuensi relatif tinggi terhadap konflik bernuansa etnis dan agama. Dalam hal ini, konflik antar etnis dan agama kadang-kadang agak sulit dipisahkan satu sama lain. Oleh sebab itu, setiap negara memiliki masalah etnis dan agama yang berbeda, selanjutnya memilih pendekatan tertentu sebagai upaya solusi. Sebagai ilustrasi, dalam sejarah bangsa Amerika Serikat, dalam upaya memecahkan permasalahan etnisitas dengan pendekatan asimilasi. Kebijakan asimilasi dalam sejarah AS, terhadap tiga tipe tahapan teori asimilasi. *Pertama*, teori *Anglo-Conformity* yang menghendaki adanya peleburan budaya leluhur para imigran ke dalam perilaku dan nilai-nilai kelompok primer Anglo-Saxon. *Kedua*, teori *the Melting Pot* yang menghendaki suatu peleburan biologis dari orang Anglo-Saxon dengan kelompok imigran. Teori ini juga menginginkan adanya suatu penyatuan budaya leluhur para imigran ke dalam suatu budaya asli Amerika. *Ketiga*, teori *Cultural Pluralism* yang membenarkan suatu suatu kondisi yang tidak berubah dari kehidupan komunal dan porsi yang signifikan dari budaya kelompok imigran yang datang kemudian ke dalam konteks kewarganegaraan Amerika. Teori ini juga menghendaki adanya integrasi politik dan ekonomi kedalam masyarakat Amerika (Milton M Gordon, 1964: 84-1140).

Tiga perkembangan teori asimilasi Gordon di AS tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang mendasarinya. Teori Anglo-Saxon didasarkan pada kesadaran imigran Inggris (Anglo-Saxon) untuk mempertahankan institusi-institusi (yang dimodifikasi oleh Revolusi Amerika), dan mempertahankan bahasa Inggris dan pola orientasi mereka sebagai kelompok dominan dan standar dalam kehidupan masyarakat Amerika. Tetapi, asumsi ini mendapat tantangan dari kelompok imigran Jerman (Aria dan Nordik sebagai kelompok yang memiliki superioritas ras. Kelompok imigran Jerman ini memandang dirinya sebagai kelompok yang secara politis mendapat dukungan melalui program politik pribumi. Teori *The Melting Pot* didasarkan pada asumsi bahwa imigran non-Inggris, seperti Jerman, Swedia dan Prancis adalah mereka yang memiliki peluang yang sama dalam pembentukan budaya Amerika. Tidak mungkin membentuk masyarakat Amerika secara sederhana dengan hanya memodifikasi imigrasi Inggris saja. Menurut teori ini, diperlukan penyatuan total, baik budaya maupun biologis, dari berbagai suku bangsa imigran ke dalam pengaruh Amerika dan interaksinya ke dalam tipe kebudayaan Amerika yang baru. Sedangkan teori *Cultural Pluralism* mendasarkan dirinya pada asumsi bahwa kedua teori terdahulu telah menyebabkan hilangnya identitas kelompok imigran, dan terserapnya identitas tersebut ke dalam struktur budaya Amerika. Teori ini memang perlu mempertahankan identitas kelompok imigran dengan jalan mengadopsi prinsip-prinsip pluralism budaya dalam konteks masyarakat Amerika.

Mengingat suatu masyarakat selalu berkembang dinamis, kebijakan asimilasi di Indonesia, pada masa Orde Baru, menerapkan tipe yang kedua, teori *the Melting Pot*. Dalam perkembangannya, kebijakan asimilasi pemerintah Orde Baru dengan menggunakan tipe teori kedua ini tampak mendapat kritik dari sebagian pengamat sosial, karena dianggap dapat menghilangkan hak-hak minoritas. Di sisi lain, pemerintah Orde Baru berpandangan bahwa masalah kesatuan dan persatuan bangsa dalam menjaga nation building lebih tepat menggunakan pendekatan asimilasi dalam perspektif teori kedua itu. Dalam perkembangannya dan sebagai respons alamiah dari proses reformasi, sejak 1998, kebijakan etnisitas agaknya lebih diarahkan pada pendekatan pluralism budaya, seperti tipe teori ketiga itu. Hal ini tampak bahwa kebijakan etnisitas di sejak 1998 lebih dinamis dengan mengikuti perkembangan masyarakat era Reformasi. Beda halnya dengan RRC, hingga kini dalam upaya mencari solusi masalah

etnisitas, terutama terhadap minoritas Cina-Muslim, negara ini menggunakan pendekatan asimilasi-represif.

Kendatipun pada masa Orde Baru, kebijakan etnisitas lebih menekankan pada asimilasi, dalam faktanya, hal itu bukanlah sepenuhnya telah membatasi aspirasi dan perkembangan agama yang dianut oleh umat beragama etnis minoritas. Hal ini, terlihat bahwa persentase rumah ibadah umat beragama pada masa Orde Baru mengalami peningkatan signifikan. Misalnya, dalam kurun waktu 1997-2004, rumah ibadah umat Islam mengalami peningkatan dari 392.044 menjadi 643.834 (peningkatan 64%); umat Kristen bertambah dari 18.977 menjadi 43.909 (peningkatan 131%); umat Katholik bertambah dari 4.934 menjadi 12.473 (peningkatan 153%); dan umat Buddha bertambah dari 1.523 menjadi 7.129 (peningkatan 368%) (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, 2006:3). Bila dilihat dari persentase rumah ibadah yang dianut etnis minoritas di Indonesia, sejak masa Orde Baru hingga kini, mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru sekalipun, pada dasarnya, etnis minoritas tidak dapat dikatakan sepenuhnya telah didiskriminasikan oleh pemerintah Orde Baru, kendatipun pemerintah memilih pendekatan asimilasi sebagai solusi permasalahan etnisitas.

Bila dilihat dari aspek ekonomi, etnis minoritas migran tertentu justru lebih mendominasi dari etnis mayoritas pribumi. Ketimpangan ekonomi etnis minoritas dan mayoritas ini dapat mengganggu hubungan antar etnis dan agama pada suatu negara. Dalam kenyataannya, berbagai kasus konflik sosial antaretnis, baik pada pra dan pascakemerdekaan, terutama kasus kerusuhan 1998, dipicu oleh ketimpangan sosial dan ekonomi ini. Oleh karena itu, pemerintah Reformasi perlu mencari solusi umum, *grand-strategy*, dalam upayaantisipasi kemungkinan munculnya konflik antaretnis yang tidak diharapkan. Mengingat suatu masyarakat itu dinamis, maka tidak salah bila upaya preventif yang lebih mengedepan prinsip pluralism budaya menjadi perhatian dan kebijakan. Grand strategy yang menjadi pilihan kebijakan makro pemerintah itu, hendaklah pula dapat diterjemahkan oleh pemerintah daerah, karena jika tidak bisa saja pemerintah daerah hanya mengedepankan penafsiran otonom daerah dalam konteks Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal masalah sosial, hubungan antar etnis ini juga tidak terlepas dari prinsip otonomi daerah itu.

Pemerintah Reformasi memang belum memiliki suatu pendekatan jelas dalam upaya memecahkan masalah etnisitas itu. Untuk itu, perlu dilakukan, adanya suatu evaluasi komprehensif terhadap kebijakan Orde baru tentang kebijakan etnisitas/asimilasi, sejauh mana efektivitasnya.

Hubungan antaretnis dan agama di tanah air, agaknya masih mengandung potensi konflik yang beragam sebab. Misalnya, kasus Aceh, antara RI-GAM bertalian dengan kebijakan politik yang menjerus kepada ketidakadilan ekonomi, yang berefek munculnya prasangka etnis Aceh dan pribumi pendatang, terutama etnis Jawa. Kasus Poso-Palu, lebih tampak bertalian dengan permasalahan agama. Kasus konflik etnis dan agama di Ambon, lebih tampak karena adanya ketimpangan ekonomi dan politik. Beragam kasus konflik sosial bernuansa etnis, terutama terhadap etnis Cina pada tahun 1998, dikarenakan ketimpangan ekonomi (krisis ekonomi) sebagai faktor pemicunya. Kasus konflik antarsuku di Papua-Irian Jaya, dikarenakan ketimpangan distribusi akses sumber daya alam (SDA) yang tidak adil bagi masyarakat pribumi lokal.

Hal di atas menunjukkan bahwa potensi konflik, baik bernuansa etnis maupun agama, dengan beragam pemicunya masih menjadi ancaman dan tantangan dalam kehidupan berbangsa yang akan mengancam integrasi sosial dan integrasi bangsa. Oleh sebab itu, berbagai upaya perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengantisipasi kemungkinan munculnya ledakan konflik dalam internal etnis dan agama. Pada 21 Maret 2006 lalu, telah ditanda tangani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006/Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006/Nomor : 8 Tahun 2006 27-60). Dengan ditanda tangannya Peraturan Bersama Menteri (PBM) ini, berlaku ketentuan baru yang mengatur pendirian rumah ibadah menggantikan ketentuan lama seperti tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Kertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.

Di Indonesia, kualitas kerukunan antar umat beragama, bertalian erat dengan sejauh mana kebutuhan individu atau umat beragama yang berbeda dapat terpenuhi. Kualitas (kehidupan) umat beragama, perlu dipahami secara proporsional dan komprehensif. Di Indonesia, upaya pembinaan kehidupan umat beragama telah dimulai sejak dikeluarkannya SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (KH Ahmad Dahlan dan Amir Machmud), No/01 BER/MDN-MAG/1969. SKB ini, berkenaan dengan pengaturan beribadah para pemeluk agama. Meskipun SKB ini dipandang positif oleh kalangan umat Islam umumnya, tetapi, untuk sebagian penganut Nasrani, terutama Protestan yang memiliki banyak sekte, dapat dipandang negative. Karena itu, pro dan kontra tentang SKB ini dalam proses pembentukan PBM yang lalu tetap ada, tentunya mereka memiliki perspektif atau argument berbeda.

Kita masih ingat, pada beberapa waktu lalu, Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP)-yang mengklaim disokong 27 organisasi massa Islam, antara lain: Front Pembela Islam, Barisan Pemuda Persis, Jama'ah Tabligh, dan Hizbut Tahrir- menutup 23 gereja di Jawa Barat (*Tempo*, 11/9/2005). Sudah barang tentu, pihak nasrani, terutama Protestan, merasa terancam dan meminta SKB dua menteri itu dicabut. Akan tetapi, ketika itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa SKB dua menteri itu bertujuan baik hingga tanpa harus buru-buru mencabutnya, dan perlu melihat kembali kandungan atau persyaratan dalam SKB itu (*Republika*, 5/9/2005). Hal ini menandakan, SKB yang disepurnakan menjadi PBM itu tetap menjadi pedoman dalam mendorong atau membangun kualitas umat beragama ditanah air.

Bertolak dari kenyataan demikian, perlu kiranya menelaah kualitas kerukunan antarumat beragama selama ini sebagai respons terhadap PBM. Menurut hemat penulis, setidaknya, dalam upaya aplikasi PBM itu, ada tiga dimensi penting yang perlu diperhatikan dalam upaya membangun kualitas umat beragama, yakni: *faktor intrinsik* (hubungan internal umat beragama), *faktor ekstrinsik* (hubungan antarumat beragama), dan *faktor pemerintah* dalam implementasi PBM tersebut (Hasil Musyawarah Antarumat Beragama, 1981-1982:99).

Faktor intrinsik, bertalian dengan sejauh kalangan mana intern umat beragama mengupayakan para penganutnya memiliki

pengetahuan dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Setiap agama memiliki kekhasan tersendiri, terutama berkaitan dengan doktrin-doktrin ajarannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengalaman terhadap ajaran agama tertentu, semakin tinggi pula kemungkinan meningkatnya frekuensi kualitas keagamaan umat beragama. Faktor internal umat beragama ini diarahkan pada pemberdayaan individu-individu pengikut umat beragama agar lebih memahami, mengetahui, dan mempraktekkan ajaran agamanya. Kesalehan atau ketaatan individu umat beragama akan tercermin dalam perilaku sosial.

Untuk mewujudkan pembangunan dan peningkatan kualitas umat beragama pada penganut agama, dibutuhkan orang-orang (penganut agama) yang kompeten dibidang keagamaan. Dalam membangun kualitas umat beragama sejumlah pihak memiliki peranan penting dalam member basis dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan bagi generasi umat beragama. Misalnya, ulama/kyai/, ustada/guru-guru pendidikan agama, pendeta, biksu, orang tua muslim/non-muslim, dan berbagai jenis organisasi keagamaan. Mereka memiliki tanggung jawab umat beragama masing-masing terhadap kualitas intrisik umat beragama pada penganut agama masing-masing. Umat Islam selanjutnya, sebagai kelompok agama mayoritas di tanah air, memiliki tanggung jawab signifikan terhadap pembinaan generasi muslim pada masa depan. Berbagai isu dan permasalahan sosial dan keagamaan: narkoba, minuman keras, pergaulan bebas/seks bebas, dan pindah agama dapat direduksi sedemikian rupa apabila pembinaan kualitas umat beragama telah dilakukan dan dikembangkan dengan baik. Pembinaan keagamaan intern umat beragama ini merupakan langkah awal untuk (*guidance*) dalam kehidupan umat beragama.

Upaya peningkatan kualitas intrisik kehidupan umat beragama ini adalah suatu yang mutlak dilakukan oleh segenap umat beragama (Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Kontusianisme). Hal ini diakibatkan dengan pembinaan (pemberian) pengetahuan, pemahaman dan pengalaman ajaran agama yang benar, berbagai permasalahan sosial-keagamaan atau potensi konflik yang dialami individu dan kelompok umat beragama dapat ditekan secara alamiah. Sehingga permasalahan keluarga (umat beragama) dapat berkeseluruhan secara alamiah pula. Pembinaan aspek intrisik umat beragama ini merupakan tanggung jawab semua pihak umat beragama. Pembinaan/

pembangunan kualitas negara ini harus dimulai dari keluarga (muslim/non-muslim), lembaga-lembaga formal, ormas Islam/non-Islam, organisasi keagamaan Islam/non-Islam, pendidikan (Islam/non-Islam), dan lingkungan masyarakat pluralistic yang kondusif. Suatu sosok individu dan komunitas umat beragama diharapkan tercermin dalam perilaku sosial-keagamaan berdasarkan ajaran agama masing-masing.

Individu dan komunitas umat beragama yang berpengetahuan agama yang benar dan sholeh atau taat menjalankan ajaran agamanya merupakan kontribusi penting terhadap kualitas umat beragama. Hal ini tercermin dalam berbagai perilaku dan aktivitas kehidupannya dalam masyarakat pluralistic. Setiap agama, pada prinsipnya, mengajarkan untuk menghargai perbedaan pada umat beragama. Kenyataan adanya penyerbuan sekelompok umat Islam terhadap pengikut Ahmadiyah (Bogor) pada beberapa waktu lalu, mengadakan amsih lemahnya pembinaan intern umat Islam. Sama halnya, kasus penyerbuan dan penutupan gereja-gereja (rumah dijadikan gereja) oleh AGAB, merupakan dampak dari banyaknya sekte baru pada agama Kristen-Protestan yang memerlukan gereja baru. Hal ini bertanda pula pembinaan internal umat Nasrani belum optimal pula. Karena itu, pembinaan internal umat beragama secara benar (menurut ajaran agama masing-masing) harus dilakukan oleh umat beragam agama.

Faktor ekstrinsik, bertalian dengan hubungan antar umat beragama. Bila bagian pertama menekankan pentingnya meningkatkan pengajaran dan pengetahuan sebagai proses menuju keshalehan atau ketaatan individe umat beragama, pada bagian kedua, faktor ekstrinsik, lebih menekankan pada pentingnya instraksi sosial dan keshalehan sosial, dalam konteks hubungan antarumat beragama. Kualitas keshalehan sosial antarumat beragama itu tentu banyak bergantung pada keshalehan individu umat beragama masing-masing. Upaya pembinaan atau pembangunan kualitas umat beragama memiliki basis (*grass-roots*) pada keshalehan individu umat beragama tadi. Karena itu, antara keduanya merupakan suatu hubungan saling membutuhkan (*mutual-symbiosis*) yang tak terpisahkan.

Kualitas pengetahuan, pemahaman dan pengalaman nilai-nilai kegamaan umat beragama tertentu berpengaruh terhadap kualitas hubungan antarumat beragama. Kualitas umat beragama tercermin

dalam perilaku sosial umat beragama dalam berbagai peran dan status. Ketika keberadaan bangsa kita sedang mengalami berbagai permasalahan berbangsa, seperti: Masih maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, kerusuhan bernuansa etnis/agama, pembakaran rumah ibadah, *money politics* dalam pilkada, pembunuhan, penjarahan, separatism, kerusakan lingkungan, secara tidak langsung atau langsung sebagai dampak dari belum berfungsinya nilai-nilai agama, baik secara individu dan kolektif.

Kualitas hubungan antarumat beragama, kadangkala, dapat dipengaruhi oleh sejauh mana keseimbangan hubungan kelompok mayoritas penganut agama dan kelompok minoritas penganut agama lain. Sebagai mayoritas penganut agama dan kelompok minoritas penganut agama lain. Sebagai mayoritas, misalnya umat Islam di Indonesia, idealnya memang harus memberi keteladanan dalam berbagai bidang kehidupan: Sosial, ekonomi, politik, agama dan budaya. Suatu "bencana" yang mengancam bila mayoritas umat Islam di Indonesia kurang berperan optimal dalam berbagai aspek kehidupan tadi. Suatu kewajaran dan proporsional bila mayoritas umat Islam lebih berperan dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika, bangsa migran atau umat minoritas agama tertentu lebih berperan dibanding bangsa pribumi (umat Islam) yang mayoritas, terutama dalam bidang ekonomi dan politik, maka ketidak seimbangan dan kegoncangan dalam kehidupan masyarakat pluralistic-keagamaan lebih mungkin terjadi. Idealnya, aspirasi agama mayoritas masih tetap relevan diperhatikan. Karena, di banyak negara di dunia ini, mayoritas (agama) kenyataannya lebih berperan. Dalam konteks ini, solusi tentang pro dan kontra SKB yang lalu, dan upaya mewujudkan PBM itu memang perlu mendapat legitimasi dari umat Islam.

Persoalan antar umat beragama, pada dasarnya, tidak terpisahkan dari kenyataan kondisi kehidupan berbangsa. Pada masa lalu, disinyalir bahwa kalangan konglomerat (etnis/agama tertentu) telah berkonspirasi dengan penguasa/pemerintah (yang juga banyak beragama Islam), sehingga kekayaan menumpuk pada kelompok "konglomerat" dan "penguasa" ini. Dampaknya, intensitas korupsi, kolusi dan nepotisme tidak dapat dihindari, sehingga memunculkan Era Reformasi (sejak 1998). Hingga kini, permasalahan korupsi belum juga tuntas-tuntas, bahkan sejumlah negara di dunia, yakni nomor 1 di Asia dan nomor 5 didunia. Hal ini, sekaligus, menunjukkan bahwa kualitas umat-umat beragama di Indonesia belum berfungsi seperti

seharusnya, yang diajarkan agama masing-masing. Berbagai permasalahan berbangsa (kualitas kehidupan umat beragama) itu bersifat komprehensif dan tidak parsial. Individu-individu umat beragama paling menentukan kualitas umat beragama dan berbangsa. Karena itu, persoalan kualitas hubungan antara umat beragama tidak hanya ditentukan oleh antarumat beragama itu, tetapi juga ditentukan oleh variabel lain, seperti sosial, hukum, ekonomi dan politik.

Karena itu, pemerintah sebagai "pelayan", mediator dan fasilitator merupakan salah satu elemen yang dapat menentukan kualitas umat beragama. Umat beragama, pada prinsipnya, perlu dibina melalui pelayanan aparat pemerintah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam menentukan kualitas kehidupan umat beragama, melalui kebijakan diambilnya. Adanya pemerintah dikarenakan adanya masyarakat (umat beragama) yang memiliki tanggung jawab pembinaan agar masyarakat menjadi sejahtera dalam kehidupannya, kurang arief kiranya jika substansi SKB dua menteri itu, yang selama ini menjadi penyebab berbagai permasalahan antarumat beragama, tetapi bagaimana upaya pemerintah bersama umat-umatnya untuk melaksanakannya dengan baik, sehingga memuaskan semua pihak (umat beragama). Hal ini harus disadari dan menjadi kebutuhan bersama dari umat beragama, sehingga aplikasi PBM nantinya akan lebih bermakna dan berkualitas bagi mereka.

Tetapi, dalam kenyataannya, memang harus diakui bahwa seringkali bertolak belakang antara harapan dengan kenyataan kehidupan umat beragama. Kendatipun umat beragama seharusnya pihak yang harus diurus dan dilayani, kenyataannya, umat beragama belum dilayani dengan optimal. Buruknya kualitas pendidikan, tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pengrusakan tanah rakyat, tingginya biaya pendidikan, tingginya angka pengangguran, meluasnya korupsi, dan tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya rasa keadilan hukum dan keamanan, merupakan bentuk-bentuk pelayanan pemerintah yang berimbas pada belum memuaskan masyarakat/umat beragama. Hal-hal demikian dapat diperbaiki hanya dengan kebijakan pemerintah yang membela masyarakat/umat beragama.

Jadi, persoalan kualitas kehidupan umat beragama merupakan persoalan internal dan eksternal umat Beragama itu sendiri.

Pemerintah, sebagai "pelayan", mediator dan fasilitator, dalam mengatur kehidupan umat beragama sangat diperlukan dalam mengambil kebijakan yang memihak aspirasi semua umat beragama secara proporsional. Tanggung jawab dan kesadaran kolektif antar umat beragama dengan pemerintah sangat diperlukan. Karena itu, mungkin tidak ada yang salah dengan SKB selama ini, tetapi implementasinya belum memuaskan semua pihak. Hal inilah yang penting diambil sebagai *entry-points* bagi implementasi PBM Nomor: 9/2006 dan Nomor: 8/2006, sehingga keberadaannya lebih dirasakan positif dalam meningkatkan kualitas umat beragama, yang pada akhir nantinya akan memperkuat integrasi bangsa. Baik umat beragama maupun pemerintah, menurut PBM itu, memiliki peran strategis dan perlu pro-aktif dalam implementasi PBM sebagai mana diharapkan.

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan etnisitas dan agama ditempatkan sebagai upaya menjaga keseimbangan dan peningkatan integrasi sosial dan integrasi bangsa. Berbagai kasus konflik sosial bernuansa etnis dan agama akhir-akhir ini harus dilihat sebagai indikasi bahwa interaksi sosial antaretnis dan agama mengalami proses kerapuhan. Apapun kebijakan etnisitas dan agama hendaklah memperhatikan hak-hak mayoritas dan minoritas secara proporsional, sehingga tidak ada satu pihakpun merasa dirugikan, sehingga akan memudahkan proses peningkatan kohesi sosial dan integrasi sosial menuju integrasi bangsa.

Adanya PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 merupakan kebijakan pemerintah yang bernilai dalam upaya memecahkan kemungkinan beragam permasalahan etnis dan agama kedepan. Disinilah sesungguhnya urgensi PBM sebagai upaya menjaga integrasi sosial dan integrasi bangsa. Akan tetapi, PBM hanyalah salah satu elemen penting yang dapat menentukan kerukunan itu; selain itu, aktualisasi rasa keadilan hukum, politik, ekonomi dan budaya bagi beragam etnis dan agama, baik mayoritas maupun minoritas, tidak dapat diabaikan.

**'Natural' Asimilation:
Etnis Cina dan Melayu-Bangka³²**

Sejumlah negara di dunia umumnya berlatar belakang masyarakat pluralistic, yakni keberadaan segmentasi kelompok sosiologis dapat terbentuk efektif dalam hal cultural dan kohesi politik dalam masyarakat, pada basis identitas kelompok. Seringkali kohesi itu bersifat langsung dan primordial, kadang-kadang diciptakan di luar lawan konflik (Bell, 1996: 138-146). Indonesia, sebagai salah satu negara pluralistic, menampakkan suatu struktur masyarakat mempunyai dua ciri. *Pertama*, secara horizontal ditandai suatu kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan etnis, agama, adat-istiadat dan daerah. *Kedua*, secara vertikal, struktur masyarakat ditandai adanya perbedaan vertikal lapisan atas dan lapisan bawah yang begitu tajam. Karena adanya perbedaan itu, masyarakat Indonesia dinamakan masyarakat pluralistik, suatu istilah pertama kali digunakan oleh Furnivall dalam menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda (Furnivall, 1980: 86-103), yakni suatu masyarakat terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup terpisah tanpa ada asimilasi satu sama lainnya di dalam satu kehidupan politik.

Setelah Indonesia merdeka, kehidupan masyarakat pluralistik terpisah tanpa asimilasi itu tetap tergambarkan dalam realitas kehidupan berbangsa. Seperti digambarkan Furnivall, orang Cina (dulu dikelompokkan ke dalam kelompok Timur Asing), cenderung menampakkan kehidupan sehari-harinya tanpa asimilatif. Faktor historis telah membekas terhadap kelambanan proses asimilasi orang Cina dan bangsa pribumi kemudian hari.

Kedatangan orang Cina ke Indonesia (Nusantara) telah terjadi sejak ratusan tahun lalu, dalam perkembangan selanjutnya, mereka terserap dalam arus dinamika perjalanan bangsa Indonesia (Dahana, 1999:87). Sejak kedatangan mereka pertama kali dan diikuti pula kedatangan mereka gelombang kedua, telah menimbulkan beragam permasalahan. Ketika Indonesia memasuki era kemerdekaan misalnya, permasalahan orang Cina bertalian erat dengan identitas sebagai migran dari luar kelompok etnis Indonesia atau sebagai bangsa asing.

³² Tulisan artikel penulis yang berjudul: *"'Natural' Asimilation: Cina dan Melayu-Bangka"* yang pernah dimuat dalam *Jurnal Intizar* Vol. 10/No.1/Juni 2004.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia pada masa kemerdekaan bahwa keturunan asing, termasuk orang Cina, diharapkan berasimilasi dengan orang pribumi dan perlu menganut kebudayaan nasional Indonesia. Tetapi, dalam kenyataannya, harus diakui bahwa asimilasi orang Cina dan orang pribumi belum berlangsung mulus seperti diharapkan. Meskipun dalam pemandangan sehari-hari orang Cina telah bergaul luas dan intensif dengan bangsa pribumi, misalnya di sekolah, lingkungan pekerjaan, kegiatan olah raga dan bisnis perdagangan, hal itu dalam tahap penyesuaian (Hidayah, 1996: 72-73), sehingga masih terdapat garis pemisah dalam kehidupan mereka (Koentjaraningrat, 1993: 15; Reksohadiprojo, 1976: 55-56). Hal ini berbeda halnya pada masa pra-kemerdekaan, orang Cina di Indonesia masih sedikit jumlahnya dan mereka lebih mudah diserap dan berasimilasi dengan orang pribumi, kendatipun pemerintah Indonesia telah melakukan beragam kebijakan sebagai upaya solusi permasalahan etnisitas, termasuk permasalahan orang Cina.

Dalam kenyataannya, berbagai kebijakan pemerintah (Orde Lama, Orde Baru), belum dapat dijadikan sebagai suatu solusi terhadap permasalahan orang Cina di tanah air. Hal ini sejalan dengan pendapat Malory (1956) bahwa orang Cina cenderung hidup dalam komunitas segregatif dalam wilayahnya sendiri (Pelly, 1994: 55-63), sehingga dapat menyulitkan proses asimilasi. Sejumlah hasil penelitian, katakanlah dilakukan oleh Siahaan (1989), Poerwanto (1990), Muhadar (1993), Handayani (1992), dan Susiatiningsih (1995), menunjukkan suatu keadaan hubungan sosial orang Cina dan orang pribumi tanpa asimilatif.

Asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka¹ ini dapat dikatakan bersifat mendasar dan fenomena. Kenyataannya, dalam beberapa tahun terakhir, memperlihatkan kasus kerusuhan sosial bernuansa etnis semakin meningkat frekuensinya yang semakin mengukuhkan pula bahwa permasalahan etnisitas dan cenderung rasialis serta anarkis perlu menjadi perhatian dan prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional pada masa depan. Pembangunan nasional diperlukan dalam upaya menuju suatu bangsa ber peradaban, tapi proses pembangunan itu tidak dapat berjalan normal apabila berbagai permasalahan etnisitas, termasuk permasalahan orang Cina tidak ditemukan solusi yang tepat.

¹ Orang Melayu-Bangka identik dengan mereka yang beragama Islam.

Dalam kenyataannya, asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka menunjukkan suatu keadaan asimilasi yang unik dan terkesan natural. Hal ini merupakan pendorong dan menjadi alasan penting mengapa permasalahan asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka diangkat dalam tulisan ini.

Park, seorang ahli sosiologi Amerika, mengemukakan bahwa kontak antarkelompok dengan teratur melalui langkah-langkah "lingkaran hubungan ras" mempunyai bentuk kontak, persaingan atau kompetisi, akomodasi dan pada akhirnya asimilasi. Langkah-langkah ini dikenal dengan bentuk-bentuk interaksi sosial. Sejak Park mengawali analisis asimilasi pada tahun 1920-an banyak penganut teori hubungan etnis dan ras serta para penulis buku terkemuka mengadopsi kerangka kerja Park dalam sejumlah hal tertentu (Feagin & Feagin, 1993:27-28). Gordon merupakan salah seorang ahli sosiologi terkemuka Amerika yang banyak dipengaruhi pemikiran Park.

Para ahli sosiologi Amerika mempelajari dengan luas tentang asimilasi dan akulturasi pada beragam kelompok minoritas migran di Amerika. Studi-studi awal memosisikan suatu transisi normatif dimana kelompok-kelompok migran tertentu terserap oleh suatu superior nilai-nilai dan budaya Amerika (Freedman, 2001: 413) dipandang sebagai suatu mitos klasik dari *melting pot* Amerika. Menurut konsep *melting pot*, kelompok-kelompok migran datang ke Amerika secara gradual akan kehilangan identitas asli mereka, seperti mereka belajar bahasa Inggris, pergi ke sekolah dan mengadopsi nilai-nilai Anglo-Amerika.

Interaksi sosial bersifat positif dapat menciptakan terjadinya kerjasama pada akhirnya mempermudah terjadinya asimilasi. Istilah asimilasi berasal dari kata Latin *assimilare* berarti "menjadi sama". Dari kata itu diturunkan *assimilation* berarti "asimilasi" dengan sinonimnya "pembauran". Proses sosial adalah aspek dinamis dari kehidupan masyarakat, didalamnya terdapat suatu proses hubungan antara manusia satu dengan lainnya. Proses hubungan tersebut berupa antara aksi sosial terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara terus menerus. Interaksi sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara dengan individu atau kelompok lainnya dalam upaya mencapai suatu tujuan. Proses sosial merupakan siklus perkembangan struktur sosial yang menunjukkan bagaimana *prejudice* dan *discrimination*

dapat *dicheliminir* sedemikian rupa dan konflik nilai (*value conflict*) dapat menjaga dalam perbatasan yang dapat dikerjakan dalam suatu masyarakat dimana keberadaan dari bagian-bagian masyarakat (*subsocieties*) menjaga hubungan-hubungan kelompok primer diantara individu-individu dengan beragam latar belakangnya.

Asimilasi dipandang sebagai proses sosial tingkat lanjut, yang ditandai dengan adanya upaya-upaya mengurangi perbedaan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, meliputi upaya mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Bila individu melakukan asimilasi dalam suatu kelompok masyarakat, berarti individu-individu kelompok itu melebur kebudayaannya, kemudian melahirkan suatu kebudayaan baru. Biasanya terjadi pertukaran unsur-unsur budaya, namun hal itu terjadi apabila suatu kelompok menyerap kebudayaan kelompok lainnya. Kelompok minoritas Cina Bangka tampak menyerap pula sebagian kebudayaan Melayu Bangka atau sebaliknya, misalnya berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu-Bangka oleh orang Cina Bangka, verifikasi makanan khas dan mode pakaian (pemah dikenakan para pendahulu mereka) dapat dipandang sebagai indikasi penting terhadap penyerapan kebudayaan itu.

Hornsey dan Hogg (2000: 948) membedakan asimilasi dan multikulturalisme terletak pada perbedaan asumsi berkaitan dengan konsekuensi persamaan dan perbedaan hubungan antarkelompok. Dikatakan lebih lanjut, bahwa asimilasi menjaga dan menguatkan kembali Batas-batas etnis yang tampak terpisah dengan mengedepankan hubungan antarkelompok etnis yang harmonis. Lain halnya dengan multikulturalisme berhipotesa bahwa hanya ketika individu merasa aman dalam identitas budaya mereka dapat merasakan damai dan toleran terhadap budaya lain. Pandangan Hornsey dan Hogg tentang hubungan antarkelompok, dalam hal ini asimilasi, sejalan dengan hipotesis Byrne (1971) tentang *similarity-attraction* yang sering diasumsikan dan digeneralisasikan terhadap konteks antarkelompok. Multikulturalist berpandangan bahwa persepsi tentang perbedaan antarkelompok merupakan suatu prakondisi sehat terhadap hubungan antarkelompok yang positif.

Feagin (1993: 27-28) mengungkapkan bahwa asimilasi merupakan proses interpenetrasi dan fusi dimana individu atau

kelompok, dengan persamaan pengalaman dan sejarah, berinkorporasi bersama mereka dalam suatu kehidupan budaya mereka. Sementara itu, Macionis (1989: 291-292) mengungkapkan bahwa asimilasi merupakan adanya indikasi atas pengembangan sikap yang sama, meskipun kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai kesatuan atau paling tidak untuk mencapai integrasi dalam suatu organisasi, pikiran dan tindakan. Pada umumnya, anggota kelompok minoritas, secara gradual, memodifikasi gaya hidup mereka untuk menyesuaikan terhadap budaya dominan.

Koentjaraningrat (1990: 255-256) mengungkapkan bahwa asimilasi dapat terjadi apabila memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, adanya kelompok manusia berbeda kebudayaannya. Kedua, secara individu per individu sebagai anggota kelompok tadi saling bergaul dan intensif dalam waktu relatif lama. Ketiga, kebudayaan kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Asimilasi, menurut ahli sosiologi terutama ahli sosiologi Amerika Serikat, dimana muncul dari beragam permasalahan bertalian dengan individu dan kelompok imigran berasal dari berbagai suku bangsa dan negara di Eropa, memiliki kebudayaan beragam. Pada umumnya kelompok terlibat dalam proses asimilasi adalah kelompok mayoritas dan sejumlah kelompok minoritas. Horowitz (1981: 115) mengungkapkan bahwa asimilasi merupakan suatu proses perubahan identitas etnis. Perubahan identitas etnis terjadi apabila dua atau lebih kelompok etnis saling berinteraksi berupa "penyempitan" dan "pelebaran" batasan etnis. Proses pelebaran batasan-batasan (boundaries) identitas etnis itu menandai masing-masing kelompok etnis mungkin mengalami perubahan, yang dikatakan sebagai *process of ethnic fusion and fission*.

Diungkapkan oleh Horowitz selanjutnya bahwa dalam proses perubahan identitas kelompok etnis-perubahan batasan kelompok etnis-dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, kontak dengan orang baru dari suatu etnis memiliki beragam kesukaan dan perbedaan. Kedua, ukuran dan kepentingan unit politik didalamnya dimana kelompok-kelompok asimilasi, sebagaimana dimaksudkan Horowitz, terjadi apabila adanya interaksi antarkelompok berbeda dan adanya kesadaran dari kelompok masing-masing yang memungkinkan terjadinya proses sosial lebih lanjut, hingga memungkinkan terjadinya asimilasi.

Dalam konteks asimilasi ini, Gordon mengkalifikasikan asimilasi antara minoritas migran dengan mayoritas Amerika. Gordon (1964: 71) mengkalifikasikan ke dalam tujuh pola atau tingkatan. *Pertama*, asimilasi kebudayaan, yakni perilaku berhubungan dengan perubahan pola kebudayaan dalam upaya menyesuaikan diri dengan mayoritas. *Kedua*, asimilasi struktural, yakni bertalian dengan masuknya minoritas secara besar-besaran ke dalam klik, perkumpulan dan pranata pada tingkat kelompok primer dari mayoritas. *Ketiga*, asimilasi perkawinan atau nuzumasi, yakni bertalian dengan perkawinan antarkelompok dalam k-theritas besar-besaran. *Keempat*, asimilasi identifikasi, yakni bertalian dengan kemajuan rasa kebangsaan secara eksklusif berdasarkan kelompok mayoritas. *Kelima*, asimilasi perilaku, yakni bertalian tidak adanya prasangka. *Keenam*, asimilasi perilaku, yakni bertalian dengan tidak adanya diskriminasi. *Ketujuh*, asimilasi kewarganegaraan (*civic*), yakni bertalian dengan tidak adanya konflik dengan sistem nilai dan pertalian kekuasaan.

Sementara Park meyakini asimilasi struktural termasuk pertalian-pertalian kelompok primer, misalnya persahabatan antara kelompok insal dari asimilasi kultural, Gordon lebih menekankan bahwa terdapat keterpisahan langkah-langkah dari asimilasi kemungkinan untuk menempatkan pada perbedaan tingkatan pula (Feagin dan Feagin, 1989: 3-29). Gordon mengkonseptualisasikan asimilasi struktural bertalian dengan klik (golongan kecil, kelompok) dan hubungan-hubungan. Secara signifikan, Gordon tidak menyoroti semacam pola asimilasi struktural secara terpisah mengenai perubahan dari pada suatu kelompok imigran baru ke dalam kelompok-kelompok sekunder (*secondary groups*) daripada masyarakat asli, yakni ke dalam organisasi-organisasi pekerjaan, antara lain perusahaan-perusahaan negara atau birokrasi-birokrasi publik, institusi-institusi kritik pendidikan dan politik. Tentang asimilasi struktural sekunder tersebut kadang kala dipandang sejumlah kalangan ilmuan sosial sebagai suatu "kerusakan" atau "cacat utama" dalam teori Gordon. Dimensi Gordon dengan nngatakan asimilasi warganegara (*civic*) mengundang kritik pula, dikarenakan memasukkan "nilai" di dalamnya yang sungguh merupakan suatu aspek sentral dari asimilasi struktural pada level kelompok kedua.

Kendatipun konsep asimilasi Gordon mendapat kritik, pengaruhnya sangat luas yang dapat mempengaruhi setidaknya pada suatu generasi Para peneliti, katakanlah seperti Silvia Pedrasa, J. Allan Williams dan Suzanne Ortega. Berdasarkan pengalaman penelitian mereka, dapat diungkapkan bahwa tujuh variabel konsep Gordon tentang asimilasi dapat dikelompokkan menjadi tiga variabel saja yakni asimilasi struktural, asimilasi kultural, dan asimilasi resepsi atau penerimaan yang hangat (Feagin dan Feagin, 1989: 29) dimana penyederhanaan konsep asimilasi Gordon sangat terletak pada penyederhanaan tanpa menghilangkan substansi berdasarkan kebutuhan penelitian mereka. Dalam hubungannya dengan proses asimilasi, terdapat beberapa kondisi penting yang perlu dikemukakan. Pertama, diterimanya pola-pola kultur dan perilaku penduduk asli oleh individu kelompok minoritas, dalam hal berbicara (bahasa), berpakaian menunjukkan kesamaan, perangai lainnya sebagaimana dimiliki penduduk asli. Kedua, perkembangan perasaan kebangsaan yang hanya berdasarkan pada penduduk asli tersebut, dalam hal ini individu-individu tidak lagi mempetta-lAtattan. 'azatitas ets tetpisaia, konsepsi individu teteadapt &-ck mereka sendiri adalah sama, yakni sebagai anggota kultur dari penduduk asli selamanya. Ketiga, masuknya secara besar-besaran individuk kelompok minoritas ke dalam klub, institusi, klik atau kelompok penduduk ash pada tingkat primer, yang dinamakan asimilasi struktural. Apabila terjadi asimilasi struktural dengan sendirinya diikuti oleh asimilasi kultural (perilaku) dan selanjutnya dapat teriadi pada semua tingkatan asimilasi (Feagin dan Feagin, 1989: 29).

Asimilasi kultural atau akulturasi ditandai dengan perubahan pada pola-pola budaya kelompok minoritas seperti bahasa, pakaian dan makanan. Akulturasi dipandang lengkap jika memperoleh pola-pola budaya pribumi. Ketika asimilasi berlangsung penuh, hubungan-hubungan akrab pada tingkat dasar dalam lingkungan tetangga, klub-klub, tempat kerja dan bahkan antara anggota keluarga perkawinan lazim terjadi. Gordon (Gordon, 1964: 80) mengungkapkan, diskriminasi dan prasangka bukan lagi menjadi persoalan, karena keturunan-keturunan kelompok minoritas asli tidak lagi dapat dibedakan, dan karena hubungan-hubungan kelompok yang primer cenderung menumbuhkan perasaan in-group yang menyertakan semua anggota kelompok.

Hal ini dapat dikemukakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara akulturasi dan asimilasi. Akulturasi merupakan sub-proses dari asimilasi, mengindikasikan penggantian ciri-ciri budaya masyarakat minoritas oleh ciri-ciri budaya penduduk asli (pribumi). Akulturasi menunjukkan pula bahwa anggota kelompok minoritas boleh jadi tetap memiliki sebagian ciri asli mereka dan membuang ciri-ciri lainnya, kemudian, mereka mungkin menerima sebagian ciri budaya mayoritas dan menolak ciri lainnya. Koentjaraningrat (1990: 91) mengungkapkan, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila manusia pada suatu masyarakat dengan kebudayaan asing yang sedemikian berbeda sifatnya, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tali perlahan-lahan diakomodasi dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri.

Asimilasi mungkin terjadi tanpa menimbulkan tahap-tahap asimilasi lainnya. Kelompok etnis minoritas boleh jadi tetap eksis dalam masyarakat mayoritas selama-lamanya tanpa asimilasi berarti. Model multidimensional Gordon beranggapan bahwa sangat mungkin adanya pola-pola budaya baru di antara kelompok-kelompok etnis tumbuh dari kontak mereka dengan penduduk asli. Pandangan ini memungkinkan untuk merumuskan model-model identitas etnis yang tidak hanya berdasarkan perbedaan kelompok etnis tetapi juga perbedaan antara individu dalam suatu kelompok etnis. Fokus kajiannya adalah penelitian atas internalisasi kualitas-kualitas budaya asalnya. Namun, seperti dikutip oleh Mulyana (1998:151-173) bahwa kebanyakan studi asimilasi bersifat kuantitatif, seperti penelitian yang dilakukan oleh Taft (1965), Barry (1976), Padilla (1980) dan Kim dan Gudykuntst (1988) pada umumnya meneliti respons-respons psikologis para pendatang dan integrasi sosial mereka dengan masyarakat baru serta derajat adaptasi mereka terhadap sistem budaya lokal (Brislin, 1981; Bochner, 1982; Torbian, 1982; dan Kim, 1988).

Kritik terhadap Gordon, pertama, sepintas lalu tampak adanya tumpang tindih antara akulturasi dan asimilasi dimana kedua konsep itu saling bertalian, lebih khusus lagi asimilasi mensyaratkan akulturasi, dan hal ini merupakan bentuk pertama asimilasi. Tapi, akulturasi tidak otomatis menimbulkan asimilasi, walaupun secara teoretis asimilasi sempurna mungkin terjadi. Menurut Gordon asimilasi struktural memunculkan asimilasi sempurna. Sekali asimilasi struktural terjadi, baik secara serempak dengan atau sesudah

akulturasi, semua bentuk asimilasi lainnya terjadi secara natural atau suka rela. Bila keadaan ini benar terjadi, menimbulkan asimilasi psikologis, berindikasi hilangnya identitas etnis kelompok (Gordon, 1964: 81). Dalam pandangan beberapa peneliti sosial lainnya, konsep asimilasi Gordon dipandang terlalu menyederhanakan proses asimilasi sempurna.

Kedua, pendekatan asimilasi Gordon sering mendapat kritik, karena mengandalkan pendekatan deterministik (Mulyana, 1999: 164) terlalu simplistik, mengenai proses perubahan identitas etnis pada kelompok-kelompok etnis, bersifat sirkuler, interaksional dan dinamis serta melibatkan konflik-konflik dalam kelompok-kelompok etnis itu. Ketiga, kritik terhadap konsep asimilasi Gordon cenderung mengandalkan epistemologi naturalistik-positivistik dan belum memperhatikan epistemologi humanistik-kulturalistik dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, permasalahan metodologis yang pincang merupakan suatu faktor lainnya yang menyebabkan penelitian asimilasi, terutama yang menggunakan konsep Gordon, menjadi lemah. Armstrong mengkritisi konsep Gordon yang hanya mengandalkan metode kuantitatif semata dan menganjurikan agar metode kualitatif dapat menjadi perhatian dalam penelitian asimilasi atau setidaknya dikombinasikan.

Sebagaimana diungkapkan terdahulu bahwa proses terjadinya asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka dipengaruhi kuat oleh perkembangan industri tambang atau ekonomi timah Bangka. Perkembangan industri timah Bangka begitu pesat memerlukan tenaga kerja atau kuli yang besar jumlahnya, terutama ketika Bangka dibawah kekuasaan Sultan Palembang, kolonial Belanda, Inggris dan Jepang. Mengingat proses terjadinya asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka berhubungan kuat dengan keberadaan penguasa Sultan Palembang maupun bangsa kolonial, proses asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka yang dapat diungkapkan dalam bentuk priodesasi, sebagai berikut:

Pertama, pertumbuhan industri/ekonomi timah pada zaman Kesultanan Palembang (awal abad ke-18 s.d awal abad ke-19). Pada zaman Kesultanan Palembang atau pada zaman prakolonial, bangsa asing, misalnya bangsa Arab dan Cina lebih mudah beradaptasi dan berasimilasi, sebagaimana halnya asimilasi keturunan Cina dan Melayu-Bangka.

Asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka pada zaman prakolonial atau zaman Kesultanan Palembang ini dalam derajat asimilasi Gordon, yakni terjadi pada asimilasi struktural, asimilasi kultural dan asimilasi perkawinan. Asimilasi sempurna itu telah berlangsung tidak kurang satu abad lamanya, yakni sejak awal pembukaan tambang timah pada abad ke 16 hingga awal kedatangan kuli-kuli Cina ke Bangka, kedatangan secara sebelum abad ke 20, yakni ketika Belanda melakukan intervensi tialarn pengelolaan tambang timah. Heidhues (1996:177) mengungkapkan bahwa karena para wanita Cina tidak diizinkan meninggalkan Cina (daratan) mengikuti para laki-laki Cina berimigrasi ke luar negeri, para laki-laki Cina seringkali mengambil wanita lokal sebagai isteri dan untuk bekerja di tambang timah terutama umiak mendulang.

Pada zaman Kesultanan Palembang ini, terdapat sejumlah kuli-kuli Cina melakukan perkawinan atau asimilasi perkawinan disamping asimilasi struktural dan kultural. Hasil perkawinan antaretnis ini melahirkan suatu keturunan Baru yang beragama Islam atau "masuk Melayu". Dengan demikian, pada zaman Kesultanan Palembang ini, kehadiran orang-orang (kuli-kuli) Cina yang semakin bertambah jumlahnya disebabkan oleh tingginya kebutuhan tenaga kuli dalam meningkatkan ekonomi timah bagi Sultan Palembang. Ketika itu, sumber perekonomian terpenting menjadi primadona yakni komoditas timah dan lada. Sultan Palembang memerlukan tenaga kuli Cina untuk pengembangan usaha pertambangan timah di berbagai wilayah Bangka.

Sejalan dengan kedatangan kuli-kuli Cina dalam jumlah relatif besar ke Bangka maka interaksi sosial mereka dengan pribumi lokal tidak dapat dihindari dan asimilasi cenderung memperlihatkan suatu asimilasi yang relatif sempurna (*relatively full-assimilation*) dalam derajat tertentu.

Kedua, asimilasi pada zaman Belanda (1816 s/d 1945). Kedatangan Belanda ke Indonesia berpengaruh negatif terhadap proses asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka yang telah terjadi sebelumnya. Keterpisahan identitas orang Cina dipengaruhi kuat oleh kehadiran bangsa Belanda. Belanda, misalnya menjadikan perbedaan etnis, dengan urusan kantor berbeda, pakaian, struktur administrasi berbeda, serta mengatur agama bagi tiap kelompok. Ketika itu.

Bangka dibawah kontrol Sultan Palembang, meskipun sesungguhnya Belanda telah melakukan intervensi terhadap Sultan Palembang jauh sebelumnya, terutama dalam kaitannya dengan komoditas timah dan lada.

Paradoksnya, asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka tetap berlangsung meskipun derajatnya mengalami penurunan signifikan dibandingkan asimilasi yang terjadi pada prakolonial atau zaman Sultan Palembang. Masih berlangsungnya proses asimilasi itu, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: *Pertama*, pada zaman prakolonial asimilasi orang Cina (kuli-kuli Cina) dan orang Melayu-Bangka telah terjadi relative sempurna sehingga dipandang memiliki basis asimilasi yang kuat. *Kedua*, kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Bangka lebih difokuskan pada kepentingan komoditas timah dan lada, yang hampir tidak memprioritaskan pada kebijakan-kebijakan lainnya. Hal ini, dikarenakan Belanda begitu memerlukan tenaga kuli Cina untuk dipekerjakan di sektor pertambangan timah. Untuk peningkatan produksi timah, Belanda memerlukan stabilitas atau bebas dari ancaman dan gangguan orang pribumi lokal atau Melayu-Bangka, meskipun dalam kenyataannya, karena Belanda melakukan kecurangan-kecurangan maka serangan-serangan tak dapat dihindari (Abdullah, 1993:45). *Ketiga*, meskipun pada awal abad ke 20 terdapat banyak kuli-kuli Cina kembali ke negeri asalnya (Cina daratan), tetapi mereka yang kelahiran lokal (peranakan) banyak pula memilih tinggal di Bangka. *Keempat*, mayoritas orang Cina yang datang ke Bangka bekerja sebagai kuli timah, yakni sebagai suatu symbol profesi pekerjaan "kasar" dan kurang berprestise (X/illmott dalam Sudja'i, 1986:1-3), yang dapat menciptakan "rasa senasib sepenanggungan" antara kuli-kuli Cina dan orang Melayu-Bangka, dan pada akhirnya telah memungkinkan berlanjutnya proses asimilasi. *Kelima*, konsentrasi orang Cina di Bangka sungguh berbeda dengan mereka di Jawa. Kebanyakan orang Cina di Bangka, sebagaimana halnya di Belitung dan Kalimantan Barat merupakan asal suku Hakka, sementara itu, suku Hokkien hanyalah minoritas. Orang Cina Hakka lebih mudah berasosiasi dan beradaptasi dengan pribumi lokal dimana mereka berada, seperti dengan orang Melayu-Bangka, dan mereka cepat menyesuaikan diri dengan suasana pertanian tropis meskipun mereka tetap menggunakan bahasa dan budaya Cina. Skinner dalam Heidhues (1992:145) mengungkapkan bahwa meskipun mereka tampak totok, mereka lebih mengakar

dengan orang pribumi lokal (*locally rooted*) yang membandukannya dengan peranakan.

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada zaman kolonial Belanda di Bangka, industri timah tetap menjadi prioritas penting sebagai penghasil devisa. Untuk meningkatkan produksi timah, Belanda memerlukan banyak tenaga kuli, baik tenaga kuli yang berasal pribumi lokal maupun pribumi pendatang lainnya, misalnya dari Jawa, Minang, Batak dan Palembang. Keterlibatan orang Melayu-Bangka dalam sektor pertambangan timah telah memungkinkan tetap berlangsungnya proses asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka yang tumbuh dan berakar kuat jauh sebelumnya. Ketika itu, tampak mulai tumbuhnya kembali nasionalisme orang Cina di tanah air sejalan dengan berdirinya organisasi ke-cina-an, yang berpengaruh positif terhadap penurunan derajat asimilasi. Meskipun demikian, mengingat asimilasi telah memiliki basis yang kuat jauh sebelumnya sejak zaman prakolonial, asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka pada zaman Belanda masih tetap dapat berlanjut dalam beberapa pola dan derajat berbeda.

Ketiga, asimilasi pada zaman Inggris (1812 s/d 1816). Ketika Bangka di bawah kekuasaan kolonial Inggris, pengaruh kebijakannya terhadap pertumbuhan industri timah tetap dirasakan. Dalam upaya menjalankan pemerintahannya, penguasa Inggris mengangkat seorang Residen yang bertindak sebagai pimpinan perusahaan timah. Residen dibantu beberapa orang stafnya yang bertugas megawasi distrik-distrik tambang.

Pada prinsipnya, asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka pada zaman kolonial Inggris tidak jauh berbeda kondisinya dengan asimilasi pada zaman kolonial Belanda. Sama halnya dengan Belanda, Inggris di Bangka memiliki tujuan pokok, yakni melakukan eksploitasi terhadap komoditas timah di Bangka. Inggris memerlukan tenaga kuli Cina dan Melayu-Bangka serta para kuli pendatang lainnya untuk menggali timah di berbagai wilayah Bangka. Selain itu, mengingat Inggris berada di Bangka tidak terlalu lama (1812 s/d 1816), pengaruh kebijakannya tidak terlalu menonjol di bidang sosial-keagamaan dan kemasyarakatan.

Dengan demikian, dapat diungkapkan bahwa proses asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka pada zaman pemerintahan Inggris tampak berlangsung sebagaimana halnya pada zaman pemerintahan

kolonial Belanda. Masih berlangsungnya asimilasi tersebut, pada dasarnya, tidak terlepas dari kepentingan penguasa Inggris yang hanya mementingkan ekonomi timah dan lada sebagai tujuan devisa. Inggris, bagaimanapun halnya Belanda, tetap memberi kesempatan dan otonomi kepada masyarakat Bangka dalam urusan sosial-keagamaan dan kemasayarakatan, sehingga berbagai tata aturan kemasayarakatan yang telah dirintis Sultan Palembang masih diterapkan oleh bangsa kolonial Inggris, meskipun telah melalui modifikasi seperlunya. Hal ini menandakan bahwa bagi Inggris, upaya menjaga stabilitas masyarakat Bangka mesti dilakukan dan bahkan prioritas utama dalam upaya meningkatkan produksi timah.

Keempat, asimilasi pada zaman Jepang (15-2-1942 s/d 30-11 1945). Ketika semangat nasionalisme sudah berkobar di hampir seluruh Nusantara, datanglah bangsa Jepang. Pada 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Jawa dan membutuhkan waktu sekitar satu minggu untuk memaksa Belanda menyerah. Setelah berhasil menaklukkan Inggris di Singapura pada 15 Februari 1945, Jepang secepatnya menduduki Singkep, Bangka dan Belitung, dengan target eksploitasi timah di tersebut. Dalam tempo yang singkat Jepang pun mampu menyebarkan kekuasaannya ke seluruh kepulauan Nusantara dengan cara-cara yang sangat brutal (Daulay, 2003: 14).

Pada zaman Jepang ini, asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka tampak semakin memburuk. Ketika nasionalisme bangsa Indonesia telah bangkit pada zaman kolonial Jepang, orang Cina tidak ambil bagian dalam perkembangan nasionalisme itu. Tidak ikut sertanya orang Cina itu, antara lain, dapat disebabkan beberapa kebijakan Jepang dan sebagian sebab lainnya dikarenakan adanya perasaan terancam bila kedaulatan Indonesia benar-benar terwujud. Akibat kolonial Jepang, hingga tahun 1949, keadaan asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka memperlihatkan suatu keadaan buruk (Stannia, Edisi Maret 2001; Engelen, 1997:4; dan Kwartanada, 1996:28) dibandingkan zaman kolonial Belanda dan Inggris sebelumnya.

Sama halnya dengan sistem pemerintahan kolonial Belanda, sistem pemerintahan kolonial Jepang tidak kalah ulung atau liciknya. Sebagai anti terhadap kolonial Belanda dan hebatnya perang psikologis Jepang, rakyat Indonesia menerima Jepang sebagai "saudara tua" yang diandalkan dapat mengantarkan kesejahteraan dan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa

Jepang hanya berupaya menzantikan kekuasaan Belanda dan menerapkan pendekatan pemerintahan totaliter. Kolonial Jepang sebenarnya tidak lebih dari upaya Jepang memperoleh dukungan dari bangsa Indonesia, termasuk dukungan material dari hasil kekayaan Indonesia menghadapi perang Dai Tao dan mewujudkan "daerah kemakmuran beraama Asia Timur" (Nasution, 1997:99-100). Namun, baik pada zaman kolonial Belanda maupun zaman kolonial Jepang orang Cina (kuli-kuli Cina) Bangka begitu dibutuhkan dalam upaya membantu eksploitasi timah di Bangka, Belitung dan Singkep. Bedanya, kolonial Jepang lebih memperhatikan dan memihak kepada orang Cina dibandingkan kolonial Belanda. Pada zaman kolonial Jepang misalnya, keistimewaan terhadap orang Cina semakin tampak ditandai dengan kebijakan-kebijakan pembelaan oleh Jepang, terutama dalam bidang sosial budaya, pendidikan dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Yang (2000:38-40) mengungkapkan bahwa mayoritas orang Cina beraktivitas dalam bisnis perdagangan pada zaman Belanda dan Jepang berlatar belakang Cina totok dan mereka memiliki hubungan erat dengan bangsa pribumi lokal.

Jadi, asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka pada zaman Jepang, memperlihatkan suatu proses asimilasi berkelanjutan meskipun frekuensinya mengalami penurunan drastis akibat kebijakan dilakukan Jepang. Sebagaimana halnya dengan pemerintah kolonial Belanda, tujuan utama Jepang menduduki Bangka dan Belitung bertujuan mengeksploitasi ekonomi timah dengan tidak terlalu banyak intervensi pada urusan sosial keagamaan dan masyarakat. Mengingat pemerintah Jepang menduduki Bangka dan Belitung hanya sekitar sembilan bulan, tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap proses asimilasi orang Cina di Bangka sebagaimana terjadi sebelumnya. "Fondasi" asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka yang telah terbentuk kuat sejak lama itu, bahkan sejak zaman Sultan Palembang, tampak terus berlanjut hingga zaman Jepang meskipun nasionalisme sebagian orang Cina di Bangka mulai berkembang kuat.

Kelima, asimilasi pada zaman Kemerdekaan (sejak 1945-sekarang). Asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka pada zaman kemerdekaan masih tampak berlanjut dalam pola dan derajat tertentu. Agaknya, aplikasi PP no.10/1959, bertujuan agar Warga Negara Asing (WNA) bertempat tinggal di pedesaan dilarang untuk melakukan praktek bisnis eceran sebagai upaya pemberdayaan

bangsa pribumi. Sehingga, kota-kota merupakan sebagai tempat bermukim bagi orang Cina. Tetapi, aplikasi PP. No. 10/1950 di Bangka banyak tidak efektif dihindangkannya aplikasinya diberbagai daerah karena di antara lain. Ketika PP ini diterapkan, masih banyak orang Cina bermukim di berbagai wilayah Bangka, baik di kota-kota maupun di berbagai pedesaan, merupakan salah satu faktor menyebabkan bahwa asimilasi orang Cina pada zaman kemerdekaan masih berjalan, sebagaimana ditunjukkan Heifhues, 1992:180, dan kenyataannya kini sebagian besar orang Cina-Bangka bermukim di wilayah pedesaan atau kota-kota kecil di berbagai wilayah Bangka.

Perlu ditunjukkan bahwa setelah manajemen perusahaan timah diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada 1960-an, perubahan signifikan pada struktur personalia perusahaan timah tidak dapat dihindari. Jika posisi-posisi penting pada perusahaan timah sebelumnya dipegang orang Belanda dan mayoritas karyawannya orang Cina, maka sejak awal 1960-an posisi-posisi itu mulai diisi orang pribumi lokal, pribumi Bangka dan Belitung dan pribumi pendatang lainnya. Sejak awal 1960-an, banyak karyawan timah di Bangka berhenti bekerja etnis Cina diberhentikan dari perusahaan timah Bangka, akibatnya sebagian mereka memilih pulang ke negeri asal Cina, atau ke negeri lainnya, tetapi, sebagian mereka, terutama mereka kelahiran Bangka, yakni keturunan Cina umumnya memilih bertempat tinggal di Bangka dan Belitung, dengan menekuni profesi pekerjaan barunya, yakni sebagai pedagang, petani dan nelayan/pemancing ikan. Mereka yang memilih tinggal di Bangka ini lebih berasimilasi dengan pribumi lokal, yang hingga kini asimilasi orang Cina dan pribumi lokal tetap terjadi dalam pola dan derajat berbeda.

Dari berbagai uraian diatas menunjukkan bahwa dinamika kehidupan sosial-historis orang Cina dan pribumi lokal di Bangka, dalam kurun waktu begitu panjang, telah menciptakan suatu masyarakat Bangka pluralistik-terasimilatif. Proses terjadinya asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka itu telah berlangsung sejak awal abad ke 18, yakni ketika sumber timah ditemukan di Bangka, yakni ketika Bangka memiliki penduduk masih sedikit jumlahnya dan dibawah kontrol Sultan Palembang.

Asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka pada zaman Sultan Palembang dapat dipandang sebagai suatu asimilasi relatif sempurna (*relatively full-assimilation*). Asimilasi orang Cina dan Melayu-

bangsa pribumi. Sehingga, kota-kota merupakan sebagai tempat alternatif bagi orang Cina. Tetapi, aplikasi PP. No. 10/1959 di Bangka tampak tidak efektif dibandingkan aplikasinya diberbagai daerah lainnya di tanah air. Ketika PP ini diterapkan, masih banyak orang Cina bermukim di berbagai wilayah Bangka, baik di kota-kota kecamatan maupun pedesaan, merupakan salah satu faktor meyakinkan bahwa asimilasi orang Cina pada zaman kemerdekaan ini masih berlanjut, sebagaimana diungkapkan Heidhues, 1992:180, dan kenyataannya kini sebagian besar orang Cina-Bangka bermukim di wilayah pedesaan atau kota-kota kecil di berbagai wilayah Bangka.

Perlu diungkapkan bahwa setelah manajemen perusahaan timah diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada 1960-an, perubahan signifikan pada struktur personalia perusahaan timah tidak dapat dihindari. Jika posisi-posisi penting pada perusahaan timah sebelumnya ditempati orang Belanda dan mayoritas karyawannya orang Cina, maka sejak awal 1960-an posisi-posisi itu mulai diisi orang pribumi lokal, pribumi Bangka dan Belitung dan pribumi pendatang lainnya. Sejak awal 1960-an, banyak karyawan timah di Bangka berlatar belakang etnis Cina diberhentikan dari perusahaan timah Bangka, akibatnya sebagian mereka memilih pulang ke negeri asal Cina, atau ke negeri lainnya, tetapi, sebagian mereka, terutama mereka kelahiran Bangka, yakni *keturunan Cina* umumnya memilih bertempat tinggal di Bangka dan Belitung, dengan menekuni profesi pekerjaan barunya, yakni sebagai pedagang, petani dan nelayan/pemancing ikan. Mereka yang memilih tinggal di Bangka ini lebih berasimilasi dengan pribumi lokal, yang hingga kini asimilasi orang Cina dan pribumi lokal tetap terjadi dalam pola dan derajat berbeda.

Dari berbagai uraian diatas menunjukkan bahwa dinamika kehidupan sosial-historis orang Cina dan pribumi lokal di Bangka, dalam kurun waktu begitu panjang, telah menciptakan suatu masyarakat Bangka pluralistik-terasimilatif. Proses terjadinya asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka itu telah berlangsung sejak awal abad ke 18, yakni ketika sumber timah ditemukan di Bangka, yakni ketika Bangka memiliki penduduk masih sedikit jumlahnya dan dibawah kontrol Sultan Palembang.

Asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka pada zaman Sultan Palembang dapat dipandang sebagai suatu asimilasi relatif sempurna (*relatively full-assimilation*). Asimilasi orang Cina dan Melayu-

Bangka ini memiliki "basis" asimilasi yang kuat terhadap keberlangsungan proses orang Cina dan Melayu-Bangka periode/ zaman selanjutnya, baik pada zaman kolonial, pasca-kolonial maupun zaman kemerdekaan, yang terjadi dalam sejumlah pola dan derajat berbeda.

Etnis Cina/Tionghoa Bangka-Belitung: Dari 'Collies' ke Politisi?³³

Berakhirnya era Orde Baru, selama 31 tahun berkuasa, dan dimulainya era Reformasi berdampak terhadap munculnya iklim baru bagi etnis Cina. Empat Presiden pada era Reformasi (BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnopoetri, dan Soesilo Bambang Yudoyono) dengan bijaksana berupaya menghapuskan bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami etnis Cina, termasuk bertalian dengan penampilan citra budaya. Pemerintah Reformasi dan DPR RI mengesahkan Undang-Undang Anti Diskriminasi, yang menjamin setiap WNI dengan latar belakang etnis, ras, dan agama. Dengan demikian, bagi etnis Cina keharusan membawa dan memperlihatkan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia ketika berurusan dengan birokrasi dihapuskan.

Dalam UU RI No. 40/ 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, pada Pasal 9 diatur tentang: hak-hak sipil, hak-hak politik, hak-hak ekonomi, dan hak-hak sosial dan budaya. Hak-hak politik, antara lain:

"a) mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum, lembaga peradilan dan badan-badan administrasi publik lainnya; b) mendapat rasa aman dan perlindungan dari negara terhadap kekerasan ras dan etnis baik kekerasan fisik maupun psikis baik disebabkan oleh aparat pemerintah atau oleh perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi tertentu; c) berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana dalam kegiatan publik pada tingkat apapun; dan d) berpartisipasi dalam bela negara".³⁴

³³ Tulisan penulis yang berjudul "Dari 'Collies' ke Politisi: Pergeseran Peran Ekonomi ke Politik Etnis Cina/Tionghoa Bangka Belitung pada PascaReformasi" pernah dimuat dalam *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 05 No. 01 Januari 2010, Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Pascasarjana STISIPOL Candradimuka Palembang, Sumatera Selatan, hlm. 1-10.

³⁴ Lihat: (Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Penerbit Asa Mandiri, Jakarta, 2008, hlm. 17).

Sementara itu, yang dimaksud dengan 3 hak-hak ekonomi, antara lain:

"a) hak untuk berusaha mencari penghidupan yang layak di seluruh wilayah Negara Indonesia; b) bekerja, memilih pekerjaan, memiliki kondisi kerja yang adil dan diinginkan; c) mendapat gaji yang pantas sesuai dengan pekerjaan dan sistem penggajian; d) membentuk dan menjadi anggota dari serikat pekerja; e) memperoleh perlindungan terhadap pengangguran; dan f) memiliki perumahan".¹⁵

Hal ini tampak bahwa selama era Reformasi, yang dipertegas dengan UU No. 40/2008, telah banyak perubahan dan kemajuan yang dialami etnis Cina, yang memungkinkan mereka dapat mencalonkan diri anggota legeslatif, eksekutif, menjadi aktivis LSM, pengacara, aktivis HAM, dan lain-lain.

Dari perspektif sosio-historis, politik dan ekonomi, peran ekonomi etnis Cina di Bangka Belitung telah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu, yakni, sejak zaman prakolonial, kolonial, dan kemerdekaan. Hingga 1960-an etnis Cina, kuli-kuli Cina, telah mendominasi ekonomi timah. Pada era kolonial Belanda, Jepang, dan Inggris, mengontrol dan menguasai timah Bangka Belitung, mereka telah menjadi tenaga kuli timah profesional. Di tataran manajemen perusahaan timah, mereka diposisikan pada level kedua, setelah orang Hindia-Belanda.

Peranan orang Cina pada ekonomi timah berlangsung sampai dengan manajemen timah diambil alih pemerintah Indonesia, pada 1960-an. Ketika itu perubahan signifikan pada struktur personalia pada perusahaan timah tidak dapat dihindari. Posisi orang Cina mulai diganti oleh orang pribumi, termasuk pribumi Melayu asal Bangka dan Belitung. Sejak awal 1960, banyak kuli Cina diberhentikan dari perusahaan timah sehingga sebagian mereka pulang ke negeri asal, atau ke negara lain. Sebagian mereka, terutama mereka kelahiran Bangka, *Cina keturunan*, memilih bertempat tinggal di pulau Bangka dan Belitung, dengan menekuni profesi pekerjaan baru, antara lain, sebagai pedagang, petani, nelayan/pemancing ikan.

Dengan demikian, dalam sejarah kehadiran orang Cina di Bangka dan Belitung, sebenarnya mereka hampir tidak pernah mengalami diskriminasi. Sejak kedatangan kuli-kuli Cina (sekitar

¹⁵ Lihat: (3 Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi...), *ibid.*, hlm. 18).

1709) sampai dengan pertengahan abad ke-20 (1960-an), orang Cina di kedua pulau ini dapat dikatakan tidak mengalami perlakuan diskriminatif baik dari pihak Kesultanan Palembang maupun dari pihak kolonial Belanda, Inggris dan Jepang. Hal ini disebabkan keberadaan kuli-kuli Cina di Bangka dan Belitung memang sangat diperlukan para penguasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan tenaga kuli guna meningkatkan produksi timah sebagai komoditas dunia yang mahal. Baru sejak 1960-an mereka mulai dikurangi perannya pada manajemen ekonomi timah, sebagai *follow-up* nasionalisasi perusahaan tambang dari bangsa kolonial Belanda. Dikatakan oleh Heidlues³⁶, penurunan jumlah kuli-kuli Cina di Bangka dan Belitung disebabkan oleh adanya pergantian posisi-posisi penting di sector pertambangan timah. Sebagian kuli-kuli Cina mulai diganti oleh kuli pribumi, termasuk kuli-kuli berasal dari pulau Bangka, Belitung, dan Singkep.

Pada era kemerdekaan, era Orde Lama, adanya Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 10/1959 telah mendorong sebagian orang Cina di tanah air melakukan eksodus ke luar negeri atau kembali ke negeri asal. Peraturan ini diberlakukan untuk seluruh warga Negara asing (WNA), dengan tujuan melarang semua WNA, terutama orang Cina, melakukan praktek bisnis di desa-desa, kecuali hanya di kota-kota administrative atau Daerah Tingkat II³⁷ untuk memberdayakan ekonomi orang pribumi. Paradokanya, aplikasi peraturan tersebut, untuk kasus Bangka, tampak berjalan kurang efektif. Kenyataannya, masih banyak orang Cina WNA bermukim di kota-kota kecamatan dan desa-desa di berbagai wilayah pulau Bangka. Artinya, peraturan yang dipandang diskriminatif oleh kebanyakan orang Cina di tanah air dan efektif dalam aplikasinya, untuk konteks mikro di Bangka dan Belitung justru sebaliknya. Sebagian mereka memang eksodus ke luar Bangka, ke luar negeri atau ke kota besar lain di tanah air, tetapi sebagian mereka tetap tinggal menetap di Bangka dan Belitung, bahkan sebagian besar mereka tinggal di wilayah kecamatan dan pedesaan.

Sama halnya, ketika terjadi kerusuhan etnis pada 1998, terdapat banyak etnis Cina asal pulau Bangka dan Belitung yang sebelumnya

³⁶ Lihat: (Mary F. Somers Heidlues, *Bangka Tin and Mentok Pepper: Chinese on an Indonesian Island*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1992, terutama hlm. 6).

³⁷ Di Bangka, yakni Kota Sungailiat (sebagai Ibukota Kabupaten Bangkal dan Pangkal Pinang) (sebagai Kotamadya).

tinggal di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Palembang, kembali ke pulau ini yang diduga untuk mencari perlindungan. Sama halnya, ketika terjadi proses pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tahun 2000³⁸, terdapat banyak pula etnis Cina asal daerah ini yang memilih pulang ke pulau ini sebagai tempat masa depan. Lebih dari itu, nenek moyang dan leluhur orang Cina asal Bangka dan Belitung memang berasal dan berada di kedua pulau ini. Oleh sebab itu, dapat dimaklumi bahwa jika setiap tahun orang Cina asal Bangka dan Belitung yang berada di luar Bangka, baik di kota-kota besar dalam negeri maupun di luar negeri, sering pulang mengunjungi leluhurnya di pulau ini. Hal ini bertanda bahwa ke dua pulau timah ini merupakan tempat yang aman, tentram, sebagai tempat tinggal masa depan, serta jauh dari diskriminasi, seperti yang dibayangkan dalam perlakuan diskriminasi terhadap etnis Cina pada sejumlah kota-kota dan daerah lainnya di tanah air.

Oleh sebab itu, kehadiran Undang-Undang No.20/2008 itu, bukanlah suatu hal yang berlebihan untuk mengatakan bahwa perilaku diskriminasi terhadap etnis Cina di Bangka dan Belitung tidaklah lazim. Bahkan, dalam penelitian Disertasi dalam Ilmu Sosiologi di UGM, yang dilakukan Abdullah Idi (2006)³⁹ menunjukkan bahwa pada level tertentu telah terjadi asimilasi etnis Cina dan Melayu di Bangka. Sudah barang tentu rendahnya derajat diskriminasi yang menunjukkan kondisi hubungan yang cenderung asimilatif, dapat disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain: kondisi ekonomi yang relatif seimbang; budaya etnis Melayu yang umumnya akomodatif, toleran, dan egaliter, yang positif sebagai dasar kerjasama; pemukiman yang menyebar secara etnis; struktur agama Islam sebagai agama orang Melayu yang mayoritas, dan juga pendidikan.

Kenyataan hubungan yang integratif dan cenderung asimilatif tentang relasi etnis Cina dan Melayu di Bangka ini agak berbeda jauh apa yang dikatakan G.E. Simpson dan J.M. Yinger⁴⁰ bahwa

³⁸ Sejak 1956, sebagai respon atas Undang-Undang Darurat No.4/1956 (Daerah Bangka-Belitung ditetapkan menjadi Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung), masyarakat Bangka telah mengusulkan untuk menjadi Provinsi Bangka Belitung. Cita-cita itu terwujud pada 2000 yang tertuang dalam UU No.27/2000.

³⁹ Lihat: (Abdullah Idi, *Asimilasi Cina dan Melayu di Bangka*, Editor: Norhuda, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009).

⁴⁰ Lihat: (G.E. Simpson dan J.M. Yinger, *Racial and Cultural Minorities: An Analysis of Prejudice and Discrimination*, Harper and Row Publication, New York, 1972, hlm. 12-13).

karakteristik-karakteristik kelompok minoritas, bahwa 1) kelompok minoritas merupakan suatu bagian dari masyarakat (negara) yang lebih kompleks; 2) memiliki ciri-ciri yang melemahkan anggapan terhadap diri sendiri (*self-esteem*); 3) kelompok minoritas merupakan kelompok yang memiliki kesadaran kelompok yang tinggi, yang tumbuh karena masing-masing anggota memiliki sejumlah ciri khusus yang sama, baik ciri-ciri yang menguntungkan atau merugikan; 4) keanggotaan dalam minoritas dapat merugikan generasi selanjutnya walaupun tidak ada lagi ciri-ciri fisik atau budaya yang menonjol; 5) anggota kelompok minoritas baik karena pilihan sendiri atau karena kebutuhan memiliki kecenderungan untuk kawin dengan orang-orang dari kelompok sendiri.

Bertalian dengan kenyataan sejauhmana adanya pergeseran peran ekonomi ke politik etnis Cina di Bangka Belitung sudah barang tentu sangat memungkinkan. Kenyataan menunjukkan bahwa sejak tidak kurang dari tiga abad yang lalu hingga 1960-an, etnis Cina telah mendominasi perannya pada sektor ekonomi timah. Setelah mereka tidak terlibat jauh secara formal di perusahaan mereka juga tetap eksis dalam berbagai sektor perkebunan, buruh kasar, sopir, pedagang, dan lain-lain. Bila sebelumnya, sebelum era Reformasi keterlibatan mereka dalam partai politik lebih bersifat netral atau "diam-diam" karena situasi politik yang tidak selalu menguntungkan.

Tetapi, setelah memasuki era Reformasi, sejak era Presiden B.J. Habibie, Gus Dur, Mega, dan SBY, secara konstitusional sangat memungkinkan mereka terjun ke dunia politik. Terkhusus etnis Cina asal Bangka dan Belitung, pada pesta Pemilukada dan Pemilu Legislatif 2009, menunjukkan bahwa putera terbaik etnis Cina asal Bangka Belitung bisa menjadi anggota anggota eksekutif dan anggota legeslatif dalam berbagai jenjangnya. Jika diamati seksama, pola perilaku pemilih Pilkada di Bangka Belitung tampak sentimen etnis sangat kecil. Kemungkinan pemilih memilih kandidat dari etnis yang berbeda sangat tinggi.⁴¹

⁴¹ Sekedar ilustrasi, Kandidat Gubernur T. Basuki Purnama (etnis Cina/Tionghoa) mendapat dukungan kuat dari pemilih dengan latar belakang etnis Cina. Yang menarik, kandidat ini juga mendapat dukungan cukup besar dari etnis Melayu, yang menempatkan Basuki T. Purnama pada urutan kedua. Jika akhirnya Basuki T. Purnama kalah, ini lebih dikarenakan persiapan kandidat ini yang kurang dibandingkan dengan kandidat lain. Seperti ditulis dalam: (Hasil Survei LSI, *Faktor Etnis dalam Pilkada*, PT. Lingkaran Survei Indonesia, 2008, hlm. 19).

Sudah barang tentu dengan adanya UU RI No. 20/2008, semakin memperkuat basis legal formal bagi semua etnis di Bangka dan Belitung, termasuk etnis Cina untuk berperan pada jalur politik. Akan tetapi, dalam aplikasinya sangat ditentukan oleh dua hal penting, yakni lebih penting jauh lagi, *pertama*, adanya konsistensi implementasi Undang-Undang Anti Diskriminasi itu oleh aparat pemerintah yang didukung beragam elemen masyarakat; dan *kedua*, sebagai kesempatan bagi kalangan etnis Cina dapat membuktikan bahwa semua label negatif dan miring pada diri mereka selama ini tidak benar dengan menunjukkan perilaku positif, melalui kiprah dan peran berpolitik.

Peran dan kiprah etnis Cina/Tionghoa di Bangka dan Belitung telah mendominasi sektor ekonomi timah sejak tiga abad yang lalu. Peran kolektif mereka pada sektor ekonomi timah ini mengalami kemunduran sejak adanya peralihan kekuasaan manajemen timah, dari Belanda ke Indonesia (1960-an). Dalam perkembangannya, etnis Cina yang tetap memilih menetap di Bangka dan Belitung, memilih beragam sektor kehidupan yang digelutinya. Tidak ada tindakan diskriminasi berarti dari kalangan etnis mayoritas, pribumi Melayu, terhadap etnis Cina. Hal ini dikarenakan karaktersitik etnis Melayu yang cenderung toleran dan egaliter, yang dapat menerima etnis berbeda lainnya, termasuk etnis Cina. Sejak era Reformasi sekitar sepuluh tahun lalu, dan munculnya UU No. 20/2008, semakin memberi peluang kepada putera-puteri terbaik etnis Cina asal Bangka dan Belitung untuk berperan dan berkiprah di bidang politik.⁴² Boleh juga dikatakan bahwa terjunnya mereka ke dunia politik agaknya bukan berarti terjadi pergeseran dari kiprah ekonomi ke politik, dengan politik justru akan menguatkan peran ekonomi yang telah digeluti mereka sejak lama.

Menyikapi Nilai Kebangkitan Nasional⁴³

Nasionalisme merupakan refleksi perjuangan dari segenap komponen bangsa dengan latarbelakang suku, bahasa, budaya dan

⁴² Bupati Belitung Timur (2010-2014), Basuki Cahaya Purnama, merupakan salah satu contoh lain bahwa putera terbaik asal etnis Cina Bangka Belitung yang terpilih menjadi Bupati melalui pemilihan langsung. Basuki adalah juga adik kandung T. Basuki Purnama dimana sekarang menjadi anggota DPR RI (periode 2009-2013) untuk Fraksi Golkar asal Bangka Belitung.

⁴³ Tulisan penulis 'Menyikapi Nilai Kebangkitan Nasional' disampaikan dalam Dialog Interaktif Dalam Rangka Memperingati Hari Kebangkitan Nasional, di TVRI Palembang, 20 Mei 2009.

agama yang berbeda, semuanya bersatu dalam wadah kebangsaan. Nasionalisme memiliki dua elemen yang berwujud ide/gerakan dan aksi. Sebagai ideal, sentimen nasional menjelma menjadi realitas melalui perantara sebuah aksi/gerakan tertentu dari kalangan nasionalis.

Aksi para nasionalis dapat dibedakan menjadi, yaitu *statis* dan *etnisis*. Para *statis* berjuang atas nama negara yang diyakini sebagai tumpuan dari segala harapan aspirasi politiknya. Para *etnisis* berusaha mempertahankan independensi kelompok etniknya dari supremasi kekuasaan kelompok lain. Ternyata dari dua kategori ini, nasionalisme Indonesia memiliki sifat yang tidak sejalan terhadap fakta multi-etnik, multi-kultur, multi-agama, dan multi-bahasa. Ironi dan falasah negara Pancasila serta semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dapat berubah nasionalisme Indonesia menjadi *fasisme Indonesia*.

Globalisasi yang dihadapi saat ini merupakan tahapan berikutnya dari dua tahapan globalisasi sebelumnya. Globalisasi pertama, yang berlangsung dari abad ke-15 sampai abad ke-18, sering diistilahkan dengan jargon *the globe is round*. Pada era globalisasi pertama itu, manusia berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Sebelumnya, para rohaniawan Eropa masih percaya bahwa bumi itu datar seperti meja dan diujung lautan ada neraka. Faktor pendayaguna utama (*the key agent of changes*) pada globalisasi pertama itu memiliki ada empat kekuatan yakni kekuatan otot (*muscle power*), kekuatan angin (*wind power*), kekuatan daya kuda (*horse power*), dan kekuatan mesin uap (*steam power*). Era globalisasi pertama itu didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa yang umumnya menguasai keempat *the agent of changes* itu.

Pada abad ke-21, negara-negara berkembang harus mewaspada adanya tren globalisasi di segala bidang dengan kemajuan teknologi dan perkembangan dunia yang seolah-olah membuat batas-batas negara dan kedaulatan negara menjadi kabur, bahkan dalam bidang ekonomi dinyatakan kini menjadi tanpa batas. Negara-negara berkembang, seperti Indonesia perlu mewaspada globalisasi karena ketidakmampuan dalam menghadapi persaingan dengan negara maju. Negara maju menguasai dunia dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didukung oleh sumber daya manusia (*human-resources*) yang handal, sementara itu, kebanyakan negara berkembang masih mengandalkan luas wilayah, jumlah

penduduk, dan kekayaan alam. Memang, antara negara maju (*developed countries*) dan negara berkembang (*developing countries*) bisa saling bekerjasama (*co-operation*), tetapi tanpa disadari, karena adanya perbedaan-perbedaan itu, negara berkembang dan negara terbelakang (*under-developing countries*) sering tereksploitasi oleh negara maju.

Dimasa yang akan datang, di era global ini, kalau suatu bangsa hanya mengandalkan luas wilayah, sumberdaya alam dan jumlah penduduk yang besar tanpa pengembangan sumber daya manusia yang optimal, negara berkembang secara 'alamiah' hanya menjadi 'mangsa' oleh negara maju dalam berbagai bidang kehidupan. Memang bangsa kita masih menghadapi kenyataan bahwa peringkat Human-Development Index (HDI) dimana Indonesia pada tahun 2006 masih berada pada urutan ke-108 dari 177 negara di dunia. Oleh sebab itu, kita menghadapi tantangan ke depan yang tidak ringan. Ke depan, karenanya, kiat harus membangun dan mengembangkan kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menerapkan dan melaksanakan dan standarisasi yang diterapkan secara global. Kualitas para elite nasional dan lokal dalam memahami tren globalisasi dan kecerdasan dalam pemilahan kebijakan program yang berpihak kepada kemandirian bangsa sangat diperlukan.

Disisi lain, agaknya sampai kapan pun di dunia ini senantiasa akan terdapat berbagai bangsa dan negara dengan cita-cita khas dan kepentingannya yang berbeda. Globalisasi tidaklah menyebabkan lenyapnya bangsa-bangsa dan mengecilnya peran negara. Dunia kita sekarang, semakin mengarah kepada kemitraan dan kerjasama. Masing-masing bangsa dan negara semakin menyadari bahwa mereka tidak mungkin hidup sendiri tanpa berhubungan dan saling membutuhkan serta bergantung (*mutual-symbiosis*) satu sama lainnya. Kerjasama antarbangsa dan antarnegara memang perlu penguatan ke dalam, sehingga posisi tawar dan kerjasama itu, dapat ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kepentingan dan ketidakadilan.

Karena itu, semangat kebangsaan dalam sebuah bangsa tetap relevan dan dinegara manapun dengan dunia saat ini. Bagi Indonesia, rumusan faham kebangsaan telah dirumuskan dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945. Membangun sebuah negara kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Membina persahabatan

dalam pergaulan antarbangsa. Menciptakan perdamaian dunia yang berlandaskan keadilan. Menolak penjajahan dan segala bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Upaya mengembangkan faham kebangsaan itu, dengan sendirinya akan menyesuaikan diri dengan tantangan perubahan zaman, kendatipun esensinya sama sekali tidak berubah. Nasionalisme harus memperkuat posisi kedalam, dengan memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. Esensinya adalah berjuang membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, menegakkan hukum, dan membangun ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Esensi ini tidak akan berubah untuk selama-lamanya.

Globalisasi harus dimaknai dengan kepiawaian untuk tidak menelan bulat-bulat aturan main negara maju. Diperlukan ketepatan strategi dan kerjasama negara-negara yang juga terancam 'penjajahan' gaya baru. Pemerintah negara berkembang, tentunya dapat bersikap ramah terhadap investor asing tanpa kehilangan keberanian menegur pemerintah neagar yang berinvestasi jika kiprahnya merugikan. Kasus nasionalisasi seluruh asset pemerintah di Bolivia merupakan contoh nasionalisme baru dengan berani menunjukkan kekuatan dari dalam negeri sendiri.

Dalam kondisi globalisasi seperti yang diuraikan tadi, maka pengertian dari kemandirian suatu bangsa itu, perlu disesuaikan. Kemandirian suatu bangsa mengandung arti bahwa bangsa itu *omnipotent*—atau benar-benar mandiri sepenuhnya—sekarang tidak relevan lagi. Tidak ada satupun negara didunia ini yang benar-benar mandiri secara sepenuhnya dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, kemandirian bangsa kita di era globalisasi sekarang ini, harus dimaknai sebagai kemampuan dimiliki untuk tetap ikut berpartisipasi dalam kompetisi global. Partisipasi kita dalam kompetisi global itu tentu saja dalam kondisi interdependensi atau saling ketergantungan dengan bangsa lain, namun sanggup memegang peran dominan.

Jika kita ikut serta berpartisipasi dalam kompetisi global, dalam kondisi saling ketergantungan, tetapi hanya sanggup memegang peran marginal, akan menjadi bangsa yang tertinggal. Oleh karena itu, untuk menjadi bangsa yang mandiri di era globalisasi diperlukan

dua syarat utama. Syarat pertama bangsa itu harus memiliki daya saing yang tinggi dan syarat kedua bangsa itu harus sanggup untuk terus menumbuhkembangkan akses ke globalisasi (*global access*).

Daya saing sangat bergantung pada daya kreativitas dan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Keduanya, merupakan variabel utama dalam proses transformasi sosial yang menentukan semangat, corak, sifat, struktur dan perubahan tatanan ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat. Kreativitas dan inovasi telah menjadi esensi fundamental dalam meningkatkan daya saing bangsa. Sebuah konsepsi yang lazim dikenal dengan *fourth wave of civilization* atau 'perdaban gelombang ke-4' yang dicirikan adanya tiga pilar: budaya, teknologi, dan inovasi.

Strategi pembangunan saat ini tidak mungkin lagi dilakukan melalui pendekatan tradisional, seperti buruh murah dan sumber daya alam sebagai basis keunggulan komperatif. Akan tetapi, harus merupakan kombinasi produktif antara keunggulan komperatif dengan keunggulan kompetitif, terutama peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Pendekatan itu sangat penting, diperlukan, dan harus menjadi tema sentral dalam upaya peningkatan daya saing bangsa.

Refleksi Buku:

BANGKA, Sejarah Sosial Cina-Melayu⁴⁴

Era Reformasi sesungguhnya seperti pedang 'bermata dua' bagi perjalanan Indonesia sebagai negara bangsa. Disatu sisi, reformasi mendorong semangat demokratisasi sebagai basis legitimasi bagi tetap berdirinya negara Indonesia. Disisi lain, dengan semangat tranparansi telah membuka tabir-tabir disharmoni sosial atau konflik sosial yang semula tersembunyikan. Konflik sosial dalam beragam bentuknya lebih sering terjadi dalam nuansa pluralitas etnis, agama dan budaya. Konflik sosial juga terjadi antara sesama etnis dan sesama pemeluk satu agama, dengan motif yang beragam. Pada ranah yang paling ekstrim, konflik sosial selanjutnya lebih banyak dimaknai sebagai benih-benih disintegrasi bangsa.

⁴⁴ Tulisan penulis yang berjudul: 'Refleksi Buku: BANGKA, Sejarah Sosial Cina-Melayu', yang disampaikan pada *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)*, Novotel Hotel, Pangkalpinang, Bangka Belitung, 10-13 Oktober 2011.

Sejalan dengan tantangan itu, Indonesia sesungguhnya memiliki khazanah harmoni sosial yang hingga kini masih mampu menopang kehidupan bangsa. Salah satunya adalah harmoni yang bersumber dari pluralitas etnis, agama, dan budaya. Tulisan ini memaparkan salah satu sumber dari harmoni sosial, berupa interaksi sosial lintas etnis, agama, dan budaya, yang berlangsung antara etnis Cina dan Melayu di Bangka. Interaksi sosial antara dua etnis berbeda ini, dalam tulisan ini, berupaya memahami konstruksi realitas sosio-historis yang meng-indonesia, suatu konstruksi pemikiran yang menghormati perbedaan dan meneguhkan persamaan.

Tambang Timah dan Kuli-Kuli Cina

Kedatangan orang Cina daratan ke pulau Bangka memiliki sejarah panjang, yang diperkirakan sama dengan sejarah kedatangan mereka ke Nusantara.⁴⁵ Mereka sudah hadir di Nusantara sejak ratusan tahun yang lalu.⁴⁶ Orang Cina di Bangka diperkirakan telah hadir jauh sebelumnya, ketika Bangka dibawah kekuasaan Sriwijaya. Akan tetapi, kedatangan mereka dalam konteks formal dalam jumlah lebih besar tercatat pada awal abad ke-18, yakni ketika ditemukan dan dibukanya tambang timah di Bangka. Pada masa Sulthan ini, kuli-kuli Cina terus berdatangan ke Bangka untuk bekerja ditambang-tambang timah.⁴⁷

Koneksi-koneksi khusus antara Cina Selatan dan Asia Tenggara telah membantu proses pengadaan emigran. Petani-petani Cina memerlukan suatu dukungan sistem agar dapat bermigrasi ke Asia Tenggara. Mereka melakukan kegiatan tambang atau agrikultur dengan

⁴⁵ D. Kwartanada, "Minoritas Cina dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942-1945", dalam LEKNAS-LUPI-YOI, *Penguasa Ekonomi dan Sosial Pengusaha Tionghoa*, (Jakarta: Gramedia, 1996, hlm. 24. Lihat pula: Abdullah Idi, *Sejarah Sosial Cina-Melayu*, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 2011), hlm.29.

⁴⁶ Denny Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Bagian II Jaringan Asia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 12.

⁴⁷ Pada awal abad ke-18, penduduk Bangka sudah menggali timah, dengan cara membuat sumuran, yang dikenal dengan sebutan Sumr Palembang. Pasir timah yang diperoleh kemudian dilebur dengan cara dibakar, mirip dengan cara melebur besi. Cara yang sudah dikenal baik oleh penduduk asli sebelumnya. Sebelum Bangka mengenal timah, telah dihasilkan peralatan-peralatan terbuat dari besi sebagai hasil bijih besi di Bukit Paku, di daerah Payang, Bangka Selatan Sejauh ini, belum ada data resmi yang menunjukkan befitung sudah menghasilkan timah, walaupun kuat dugaan bahwa timah terdapat di Palembang dan Lingga. Seperti halnya di Bangka, penduduk asli Belitung sudah mengenal kerajinan besi yang bahannya didapat dari pulau Karimata dan Gunung Selumar. Lihat: (Presidium Pembentukan Provinsi Bangka Belitung, 2000, hlm. 13).

suatu pandangan profits agar dapat mengatur perpindahannya. Pada abad ke-18, timah merupakan salah satu komoditas penting di Asia Tenggara. Penguasa-penguasa lokal, dalam kontak resmi dengan lingkungan istana mereka atau di pusat-pusat sekitarnya, telah mendorong migrasi. Di Kesultanan Palembang, sebagai contoh, telah menggunakan utusan-utusan resmi (*tiko*) dari Cina untuk saudara tua (*dage*). Itu merupakan suatu titel umum bagi kepala masyarakat rahasia (*secret society*). Mereka adalah Muslim. Mereka banyak melakukan ke Cina Selatan, mungkin melalui saudara mereka atau suatu masyarakat rahasia. Mereka merupakan para utusan resmi istana yang berbakat. Hal ini tampak dari kemampuan mereka memindahkan para migran ke lingkungan istana, agar dapat berimigrasi penuh sebagai buruh untuk bekerja di tambang-tambang.⁴⁸

Karena kebutuhan meningkatkan produksi timah, maka kehadiran kuli-kuli Cina seakan terus didatangkan ke Bangka. Tentu saja, dalam proses kedatangannya, emigran (kuli-kuli) jarang dalam posisi untuk membayar ongkos perjalanan mereka, terutama pada abad ke-18 ketimbang abad ke-19, ketika Eropa membayar impor kuli-kuli yang dipekerjakannya. Kuli-kuli tambang atau perkebunan dibawa ke kapal-kapal laut (*junks*) dari Cina Selatan ke pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara. M.N.J. Court⁴⁹ mengungkapkan bahwa setiap tahun, suatu agen konfiden dan kompeten dibawa oleh kapal kembali dari Palembang ke Cina, untuk menjemput mereka yang terpilih menjadi peserta emigrasi. Ongkos pelayaran dibiayai oleh administrator atau pemberi pinjaman uang (*money lender*), yang dikembalikan setelah para emigran memperoleh keuntungan dari kegiatan penambangan timah.

Jika merujuk pendapat Horton dan Hunt, terjadinya migrasi individu dan kelompok dipengaruhi faktor pendorong, penarik, dan sarana, maka kedatangan/migrasi orang Cina dapat dijelaskan pula dengan analisa ini:

Pertama, faktor pendorongnya adalah kemiskinan. Kemiskinan yang dialami, dapat dilihat dari jenis pekerjaan dalam kategori kasar,

⁴⁸ Merry F. Sommers Heidhues, "Chinese Settlements in Rural South-East Asia: Unwritten Histories" dalam Anthony Reid (Ed.), *Sojourners and Settlers, Histories of South-East Asia and the Chinese*, South-Asia Publications Series, Australia, 1996, hlm. 172.

⁴⁹ M.N.J. Court, *An Exposition of the Relations of the British Government with the Sultan and State of Palembang and the Design of the Netherlands Government upon that Country*, Prabury & Allen, London, 1821, hlm. 218-219.

seperti sebagai kuli dan pedagang kecil.⁵⁰ Selanjutnya, krisis politik dan ekonomi. Krisis politik dan dalam negeri Cina, seperti terjadi Perang Candu (1839), pemberontakan Taiping (1851), dan krisis ekonomi yang terjadi berulang kali sehingga mengakibatkan wabah kelaparan setelah gagal panen. Krisis-krisis itu telah mendorong ribuan migran Cina bagian Selatan untuk mencari pekerjaan di luar negeri, termasuk ke Nusantara. Suku/etnis Hokkian merupakan migran pertama yang bermukim di Hindia Belanda dalam jumlah yang besar. Sifat kuat dalam berdagang melekat kuat pada suku ini.⁵¹

Kedua, faktor penariknya adalah eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi oleh orang Barat di Asia Tenggara, telah menimbulkan arus masuk migran Cina secara besar-besaran di kawasan ini. Migran Cina yang datang lebih belakangan yang membentuk suatu komunitas "baru" (*xin keh*), sering terpisah dari mereka yang telah mapan dan terbentuk lebih dahulu. Jumlah *xin keh* lebih besar dan lebih dinamis dari pada migran sebelumnya. Tetapi karena kelompok baru, mereka kurang berintegrasi dengan masyarakat lokal. Mereka masih berbicara dalam bahasa Cina (dialek Cina atau Mandarin) dan masih menganggap diri mereka sebagai Warga Negara Cina. Mereka masih tetap berhubungan dengan Cina dan berorientasi kepada Cina, baik secara kultural maupun secara politis. Mereka juga disebut *zhongguo qiaomin* (Warga Negara Cina yang tinggal di luar negeri) atau *Huaqiao* (Warga Negara Cina yang bermukim di negara asing) oleh pemerintah Cina.⁵²

Ketiga, faktor sarana transportasi. Sarana transportasi bagi migran Cina yang datang ke Nusantara, bukanlah suatu hambatan, mengingat Cina daratan (*Mainland China*), ketika itu, telah memiliki kapal-kapal laut berteknologi tinggi.

Dalam perkembangannya, jumlah kuli Cina lebih banyak dibandingkan dengan kuli pribumi lokal (orang Melayu). Kuli pribumi lokal tidak memiliki andil yang memadai dalam sektor penambangan timah di Bangka, meskipun mereka sebagai perintisnya. Hal ini,

⁵⁰ J.A.C. Mackie, "Peran Ekonomi dan Identitas Etnis Cina Indonesia dan Muanghai", dalam Jennifer Cushman dan Wang Gung Wu (Eds.), *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1991, hlm. 291.

⁵¹ G. William Skinner, "Golongan Minoritas Tionghoa", dalam Melly G. Tan (Ed.), *Colongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Gramedia, Jakarta, 1979, hlm. 7.

⁵² Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, LPJES, Jakarta, 1999, hlm. 12-13.

disebabkan, *pertama*, pribumi lokal atau orang Melayu terbiasa hidup dengan kemuraha alam tanpa tantangan. *Kedua*, pada masa itu, hasil hutan diperkirakan lebih menarik ketimbang timah. Hasil hutan, seperti kayu, damar, madu, dll., pasarannya lebih mudah dan luas. Sedangkan penggunaan timah masih terbatas, dan pasarannya baru sebatas India dan Cina, dan dengan harga rendah sehingga tidak seimbang dengan kesulitan penambangannya. *Ketiga*, menggali timah merupakan pekerjaan yang berat dengan resiko yang tinggi, lagi pula dituntut keahlian memilih lokasi cadangan. Hal ini agaknya, kurang merangsang minat orang pribumi Melayu-Bangka karena mereka cenderung memandang masalah tersebut dari segi supranatural atas petunjuk dukun untuk memperoleh hasil pertambangan timah lbih banyak. Hal yang sama terjadi pula di Malaysia dan Thailand.⁵³ Peran kuli timah dari pribumi Melayu-Bangka mulai tergeser, diganti oleh para kuli 'impor' Cina yang diimpor Sulthan Palembang, dimana Bangka ketika itu dibawah kekuasaan Sultan Palembang.

Setelah perubahan kepemilikan asset timah, dari pihak Belanda ke pihak Indonesia yang disetujui pada 1953, telah berkonsekuensi terhadap perubahan populasi orang Cina di Bangka. Setelah adanya persetujuan pengambilan asset timah yang selesai pada 1960, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan terhadap manajemen perusahaan timah. Sejumlah posisi pnting dalam perusahaan timah mulai ditempatkan oleh tenaga karyawan pribumi Indonesia, termasuk pribumi Bangka dan Belitung. Setelah pemerintah Indonesia mengizinkan masuknya modal asing sejak 1967, terdapat tiga perusahaan asing yang menanamkan modalnya di industri penambangan timah, yakni PT. Koba Tin (di Bangka), PT. Broken Hill Prop. Indonesia (di Belitung)—kemudian dijual ke perusahaan Jerman PT. Preusag dan selanjutnya dijual ke perusahaan nasional PT. Gunung Kikara Mining—dan PT. Riau Tin (diperairan kepulauan Riau) yang selanjutnya mengundurkan diri karena jatuhnya harga timah pada awal 1980-an.⁵⁴

⁵³ Jika raja-raja dan sultan-sulthan di Thailand dan Malaysia memerlukan jumlah produksi timah lebih banyak untuk diekspor, mereka selalu mempercayakan upaya penambangan timah pada orang-orang Cina yang memiliki sifat kerja keras dan ulet. Hal yang sama pula terjadi pada masa sulthan Palembang, yakni pada sekitar awal abad ke-18, Sultan mendatangkan kuli-kuli Cina dari Batavia dan Malaka untuk menggali timah di Bangka. Lihat: (Soetjipto Soejitno, *Sejarah Timah Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 59).

⁵⁴ Departemen Pertambangan Indonesia, *Buku Tahunan Pertambangan Indonesia*, 1989, hlm. 145.

Penurunan jumlah populasi orang Cina di Bangka dalam kurun waktu 1971-1983, dari 27% menjadi 21,3 %, terutama sebagai dampak dari adanya proses pergantian posisi di perusahaan timah di Bangka.⁵⁶ Sejumlah posisi penting di perusahaan timah yang semula diduduki oleh karyawan etnis Cina mulai diganti oleh karyawan pribumi Indonesia, termasuk pribumi Bangka dan Belitung. Misalnya, sejumlah kapten kapal keruk (*hoating dredgers*) antara 1983-1986, lebih dari 50% sudah ditempati oleh orang pribumi Indonesia kelahiran di luar Bangka, Belitung, dan Singkep.⁵⁶ Meskipun para peneliti Belanda memikirkan bahwa lada mungkin cocok ditanam di Bangka, dalam kenyataannya, orang Cina telah menanamkan lada di Bangka setelah 1869. Penanaman lada di Bangka yang dibawah manajemen Cina ini telah berkembang hingga abad ke-19. Di Bangka, suatu yang mudah mengintegrasikan perkebunan lada dan penambangan timah dengan menggunakan tanah adalah bagian dari konsesi pertambangan yang mempekerjakan kuli-kuli Cina pengangguran.⁵⁷

"Natural" & Relatively Full-Assimilation

G. William Skinner (1996) mengatakan, sejarah migrasi Cina di Asia Tenggara memperlihatkan fenomena adaptasi, akulturasi, dan asimilasi. Hingga akhir abad ke-19, wanita Cina tidak diperkenankan meninggalkan Cina sehingga banyak migran Cina (berjenis kelamin laki-laki) di berbagai negara Asia Tenggara, misalnya Philipina, Jawa (Indonesia), dan Malaya (Malaysia), meperisteri wanita pribumi lokal. Ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Apalagi, bila pemukiman migran berlokasi jauh dari pusat kota dan terisolasi dari keluarga-keluarga Cina lainnya. Namun, ada pula pekawinan dengan komunitas sendiri (Cina) yang menghasilkan Chinese Mestizos di

⁵⁶ Berdasarkan Peraturan No. 3 Tahun 1976 dan Akte Notaris tanggal 2 Agustus 1976. Kedudukan Perusahaan Negara Tambang Timah diubah menjadi Perusahaan Terbatas Tambang Timah (Persero). Lalu terakhir menjadi PT. Timah, Tbk.

⁵⁶ Merry F. Sommers Heidhues, *Chinese Settlements in Rural Southeast Asia: Unwritten Histories....*, *loc. cit.*, hlm. 2.

⁵⁷ Kuli-kuli Cina ini mengalami gagal dalam pemeriksaan kesehatan untuk dapat dipekerjakan dibidang perkebunan lada. Selain itu, suatu alasan lain terjadinya perubahan pekerjaan (dari tambang menjadi petani lada), adalah karena pekerjaan di tambang ketika itu merupakan pekerjaan sangat melelahkan dan kurang dihargai, sementara memelihara sebidang tanah perkebunan lada sedikit membosankan, dan lagi pula dapat memberikan dukungan untuk suatu keluarga. Dengan mengikuti kuli-kuli Cina yang berkebun lada, masyarakat lokal melakan hal yang sama, menanam lada. Sehingga, tidak mengherankan bila sebelum Perang dunia II, Bangka mampu mengekspor 80% lada putih, lebih besar dari Lampung dan Sumatera Selatan, sebagai penghasil lada di negeri Hindia Belanda. Lihat: (Merry F. Sommers Hiedhues, "Chinese Settlement....", *op.cit.*, hlm. 149.

Philippina, Chinese Peranakan di Jawa (Indonesia), dan Chinese Babas di Malaka (Malaysia).⁵⁸

Interaksi sosial-asimilatif Cina dengan pribumi lokal di Hindia Belanda, dikatakan Skinner⁵⁹, tampak terjadi pula dalam kategori lainnya. *Pertama*, terdapat sejumlah laki-laki Cina kelahiran lokal yang merasa tidak cocok berkompetisi dengan dan bekerja di lingkungan komunitas Cina. Karena itu, mereka pergi meninggalkan komunitasnya, dan menikah dengan wanita pribumi, sekaligus mengadopsi pola hidup masyarakat asli/pribumi lokal. *Kedua*, kelahiran anak laki-laki Cina dipandang lebih penting dan berharga dibandingkan anak perempuan. Tidak jarang anak (bayi) perempuan diberikan kepada keluarga pribumi (adopsi). Anak perempuan adopsi itu tidak mengalami hambatan apapun dalam berakulturasi maupun berasimilasi, karena sejak bayi sudah dianggap dan hidup di lingkungan orang pribumi. *Ketiga*, sejumlah laki-laki Cina kelahiran lokal menikah dengan wanita pribumi lokal. Anak laki-laki dari hasil perkawinan itu diyakini sebagai Cina, dan suatu ketika harus siap kembali ke Cina Daratan (*Mainland China*). Sedangkan anak perempuan dapat tinggal bersama ibunya yang pribumi, sehingga pada akhirnya akan menjadi pribumi lokal pula. *Keempat*, ketika keutuhan keluarga (keluarga perkawinan laki-laki Cina dan wanita pribumi) tidak dapat dipertahankan karena laki-lakinya pergi kembali ke Cina atau karena perceraian, maka anak laki-laki biasanya ikut ayahnya (ke Cina). Sedangkan, anak perempuan ikut ibunya yang pribumi, selanjutnya menjadi identitas pribumi.

Interaksi sosial-asimilatif kuli Cina dan pribumi Melayu-Bangka telah terjadi dalam proses waktu yang panjang. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, kuli-kuli Cina datang ke Bangka, pada masa prakolonial, telah melakukan asimilasi perkawinan, dengan mengikrarkan diri masuk Islam atau "masuk Melayu".⁶⁰ Asimilasi kuli Cina dan pribumi Melayu-Bangka tersebut telah terjadi relatif

⁵⁸ G. William Skinner, "Creolized Chinese Societies in Southeast Asia", dalam Anthony Reid (Ed.), *Soyjourners and Settlers, Histories of South East Asia and Chinese*, South East Asia Publication Series, Australia, 1996, hlm. 53.

⁵⁹ G. William Skinner, *ibid.*, hlm. 53.

⁶⁰ Bagi orang Melayu, Islam merupakan suatu elemen kunci sebagai identitas etnis Melayu. Hampir semua orang Melayu adalah Muslim, dan seorang Melayu yang menolak Islam secara legal, dipandang sebagai bukan orang Melayu lagi. Lihat: (Khairul A. Mastro, Putaji dan Martin Cooper, "Malay Culture and Personality", *Journal of American Behavioral Science*, Vol. 44, No. 1, September 2000, p. 96).

sempurna yang pada hampir semua level, baik level asimilasi kultural, dan marital/perawinan.⁶¹ Interaksi sosial asimilatif ini masih berlangsung hingga kini yang terjadi pada level dan derajat yang berbeda.

Amran Harun (1967) mengungkapkan bahwa (asimilasi) perkawinan (*marital*), dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis. *Pertama*, perkawinan laki-laki Melayu-Bangka dan wanita Cina, dengan melakukan pengislaman wanita Cina terlebih dahulu. Selanjutnya, pasangan dinikahkan didepan penghulu atau Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, berdasarkan syari'at Islam, dengan penghulu sebagai wali hakim bagi wanita Cinanya. Wanita Cina yang sudah diislamkan tersebut, oleh masyarakat Melayu dan masyarakat Cina, dikatakan masuk golongan Melayu atau "masuk Melayu". Hubungan hukum antara wanita Cina tersebut dengan orang tuanya dianggap putus, baik dalam bidang hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris. Perkawinan jenis ini lazim terjadi di Bangka. *Kedua*, perkawinan antara laki-laki Cina dan wanita Melayu-Bangka. Perkawinan bentuk ini dimulai dengan pengislaman lalu penghitanan laki-laki Cina. Kemudian, pernikahan dilakukan dengan ijab kabul dari wali Melayu-Bangka.⁶² *Ketiga*, perkawinan laki-laki Melayu dan wanita Cina yang berstatus anak angka (adopsi). Wanita Cina tersebut, sejak kecil sudah masuk Islam atau "masuk Melayu". Sehingga proses perkawinan dapat langsung dilaksanakan. Asimilasi seperti ini merupakan asimilasi sempurna karena mencakup asimilasi mental dan biologis.⁶³

⁶¹ Asimilasi sempurna itu telah berlangsung kurang lebih dua abad, yakni sejak awal pembukaan tambang timah pada awal abad ke-18 hingga kedatangan migan Cina ke Bangka secara formal sebelum abad ke-20. Sebutan formal dimaksudkan ketika Belanda mulai intervensi dalam pengelolaan produksi timah dan mengontrol Bangka.

⁶² Di Bangka tidak diterapkan aturan hukum perkawinan campuran, karena biasanya perkawinan dilangsungkan menurut cara orang Melayu Islam, bukan menurut perkawinan Cina. Begitu pula akibat hukumnya. Laki-laki Cina dianggap oleh masyarakat telah masuk ke dalam golongan orang Melayu sepanjang yang bersangkutan mengganti namanya dengan nama-nama orang Islam, dan tidak *murtad* (kembali menjadi orang Cina). Perkawinan bentuk ini tidak sebanyak terjadi sebagaimana halnya perkawinan jenis pertama. Laki-laki Cina yang telah masuk Melayu atau masuk Islam tersebut di Bangka dinamakan "muhalab" (*mu'allaf*).

⁶³ Wanita Melayu tadi sebenarnya (menurut anggapan masyarakat), dari aspek biologisnya adalah asli berdarah Cina. Maka perkawinannya dengan laki-laki Melayu mengakibatkan terjadinya asimilasi biologis. Ini dikatakan sebagai suatu bentuk asimilasi lebih sempurna, karena asimilasi yang dicita-citakan adalah asimilasi mental dan biologis. Dengan melalui pengangkatan anak, menjadi Islam, dididik dalam keluarga dan masyarakat Melayu, dan setelah dewasa, wanita Cina tersebut sudah bermental Melayu. Pengangkatan ana

Hasil penelitian disertasi Abdullah Idi (2006) memperlihatkan bahwa Interaksi sosial orang Cina dan Melayu-Bangka tersebut telah terjadi terjadi pada sejumlah level asimilasi (*multi-stages of assimilation*, yakni asimilasi struktural, asimilasi kultural, asimilasi marital/perkawinan, asimilasi identifikasi, dan asimilasi tanpa prasangka/diskriminasi. Hasil penelitian ini mendukung dan sekaligus merevisi teori asimilasi Milton M. Gordon (1964) tentang multi-tingkatan asimilasi (*multi-stages assimilation*). Dari tujuh tingkatan asimilasi dalam teori Gordon, terdapat lima tingkatan asimilasi orang Cina dan Melayu di Bangka. Teori asimilasi Gordon tetap relevan digunakan dalam penelitian asimilasi, meskipun sulit diaplikasikan dengan utuh, karena setiap masyarakat cenderung memiliki keadaan struktur sosial dan ekonomi berbeda.⁶⁴

Interaksi sosial yang asimilatif itu terjadi secara natural dan relatif sempurna (*natural and relatively full-assimilation*) dipengaruhi oleh keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Bangka. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Bangka sebenarnya merupakan respons terhadap adanya perubahan sosial dalam suatu masyarakat yang karenanya dapat berdampak positif maupun negatif terhadap asimilasi. Dalam penelitian ini, perubahan sosial itulah yang menyebabkan terjadinya *natural and relatively full-assimilation*. Perubahan sosial yang menjadi pendorong terjadinya asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka adalah: keadaan ekonomi masyarakat Bangka yang relatif berimbang; etnis Melayu sebagai mayoritas dan etnis Cina minoritas dalam *size*; karakteristik etnis Melayu yang akomodatif, toleran, egaliter, terbuka (*extrovert*); status *elite* pada etnis Melayu; pemukiman relatif menyebar secara etnis; sistem pendidikan yang demokratis dan tanpa diskriminatif; agama Islam sebagai mayoritas dalam *size*; dan sistem politik yang demokratis.⁶⁵

Sementara itu, perubahan sosial yang cenderung menjadi kendala bagi asimilasi orang Cina dan Melayu-Bangka, adalah:

Cina merupakan suatu cara asimilasi mental. Artinya, peleburan diri dan mental menjadi orang pribumi Melayu-Bangka, sehingga mental Cinanya tidak tampak lagi, meskipun ciri-ciri biologis kecinaannya masih tampak. Lihat: (Amran Harun, "Pengaruh Agama Islam dalam Hukum Adat di Bangka", *Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 1967, hlm. 115).

⁶⁴ Abdullah Idi, *Asimilasi Cina dan Melayu di Bangka*, Penerbit Tiara Wacana, Jogjakarta, 2009, hlm. 270.

⁶⁵ Abdullah Idi, "Asimilasi Cina dan Melayu di Bangka", *ibid.*, hlm. 270-271.

perubahan ekonomi, yakni berkurang peranan ekonomi timah dan mpenyempitan lahan perkebunan rakyat; perubahan pendidikan, yakni semakin majunya anak-anak Cina dan Melayu yang berpengaruh terhadap pola fikir, pergaulan, dan wawasan mereka, termasuk dalam hal persepsi dan prilau sosial sesama mereka maupun dengan anak-anak berlainan etnis; dan perubahan kehidupan keagamaan, yakni adanya peningkatan pengetahuan agama anak-anak Cina dan Melayu yang memperkuat keyakinan teradap ajaran agama mereka masing-masing berpengaruh terhadap pola fikir, pergaulan, dan wawasan mereka, serta pola prilaku sosial mereka dengan anak-anak berlainan etnis.⁶⁶

Suatu keadaan interaksi sosial Cina dan Melayu-Bangka yang terasimilatif dan terjadi "natural" dan relatif sempurna (*natural and relatively full-assimilation*), terjadi karena adanya respons simbolik terhadap keadaan struktur sosial dan ekonomi masyarakat yang relatif berimbang (*equalibrium*), dengan parameter-parameter sosial yang terinterseksi (*intersecting social parameters*). Dilihat dari pendekatan interaksionisme simbolik Blumerian, tampak bahwa asimilasi orang Cina dan Melayu itu muncul sebagai makna simbolik (makna laten) dari interaksi individu atau kelompok etnis minoritas Cina dengan individu atau kelompok etnis mayoritas Melayu, sebagai fenomena sosial yang tampak. Pemahaman makna dari simbol-simbol itu digunakan untuk memahami makna laten dibalik interaksi sosial orang Cina dan Melayu yang berasimilasi.⁶⁷

Karena itu, hasil penelitian ini telah membantah (*counter-attack*) terhadap tesis G.E. Simpson dan J.M. Yinger (1972). Dikatakan Simpson dan Yinger mengatakan bahwa karakteristik-karakteristik kelompok minoritas: (1) kelompok minoritas merupakan suatu bagian dari masyarakat (negara) yang lebih kompleks; (2) memiliki ciri-ciri yang melemahkan terhadap diri sendiri (*self-esteem*); (3) kelompok minoritas merupakan kelompok yang memiliki kesadaran kelompok yang tinggi, yang tumbuh karena masing-masing anggota memiliki sejumlah ciri khusus yang sama, baik ciri-ciri yang menguntungkan

⁶⁶ Dari aspek ini, penelitian ini dapat dipandang berhasil merevisi teori asimilasi Gordon yang tidak menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses asimilasi pada suatu masyarakat. Penelitian ini dengan menggunakan teori sosial dapat dinilai memiliki relevansi yang kuat dengan masalah asimilasi, telah mampu membuktikan bahwa asimilasi terjadi karena faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lihat: (Abdullah Idi, Asimilasi Cina dan Melayu di Bangka", *ibid.*, hlm. 271).

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 271.

atau merugikan; (4) keanggotaan dalam minoritas dapat merugikan generasi selanjutnya walaupun tidak ada lagi ciri-ciri fisik atau budaya yang menonjol; dan (5) anggota kelompok minoritas baik karena pilihan sendiri atau karena kebutuhan memiliki kecenderungan untuk kawin dengan orang-orang dari kelompok sendiri.

Pada level mikro, kasus etnisitas, tentang interaksi sosial etnis Cina dan Melayu-Bangka merupakan suatu hal "unik", dimana hubungan etnis migran Cina ini dan pribumi Melayu-Bangka tampak asimilatif dan "natural". Hal ini, diharapkan dapat memberikan suatu refleksi penting bagi bangsa ini secara makro, dimana masyarakatnya tampak pluralistik. Populasi Bangka setidaknya memiliki sekitar 80% penduduknya etnis Melayu yang mayoritas beragama Islam. Dalam sejarah asimilasi Cina dan Melayu-Bangka, agama Islam ternyata bukanlah suatu kendala bagi terjadinya asimilasi antara orang Cina dan Melayu-Bangka. Fakta sosial-historis ini, tentang asimilasi Cina dan Melayu yang cenderung terjadi secara "natural". Hal ini, menunjukkan sebagai *counter-attack* pula terhadap tesis G. William Skinner yang menyatakan agama Islam sebagai kendala asimilasi orang Cina dengan pribumi Indonesia.⁶⁸

Refleksi: dari Bangka untuk Indonesia

Adalah suatu kehendak Sang Khalik, *sunnatullah*, Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa pluralistik, seperti diungkapkan J.S. Furnivall.⁶⁹ Secara totalitas, J. Nasikun mengungkapkan bahwa

⁶⁸ Abdullah Idi, *Bangka, Sejarah Sosial Cina-Melayu*, Tiara Wacana, Jogjakarta, 2011, hlm. 201.

⁶⁹ J.S. Furnivall mengatakan, sebagai suatu tipe masyarakat daerah tropis dimana mereka berkuasa dan mereka dikuasai mempunyai perbedaan ras. Orang Belanda sebagai kelompok minoritas jumlahnya semakin bertambah pada akhir abad ke-19, sekaligus merupakan penguasa yang memerintah mayoritas orang pribumi, sebagai warga negara kelas tiga di negeri sendiri. Orang Timur Asing memiliki kedudukan kelas dua, antara kelompok Erpa dan Pribumi. Dalam kehidupan politik, Indikasi jelas dari masyarakat Indonesia yang pluralistik, yakni tidak adanya kehendak bersama (*common-will*), dimana masyarakat Indonesia secara totalitas terdiri dari elemen-elemen terpisah satu sama lain dikarenakan perbedaan ras. Masing-masing merupakan kumpulan individu dari suatu totalitas organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidaklah utuh. Orang Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja tetapi mereka tidak tinggal menetap di Indonesia. Kehidupan mereka hanya berada di sekitar pekerjaannya, dan mereka melihat permasalahan sosial, politik, ekonomi terjadi di Indonesia tidak sebagai warga negara, tetapi sebagai kapitalis atau majikan dari buruh-buruh mereka. Sama halnya dengan orang Timur Asing. Seperti orang Cina sebagaimana orang Belanda, mereka datang ke Indonesia untuk kepentingan ekonomi. Seperti orang Belanda dan Cina, kehidupan orang pribumi (*inlander*) tidak utuh pula, yakni sebagai "pelayan" di negeri sendiri. Lihat: J.S. Furnivall, "Plural Societies", dalam *Sociology of Southeast Asia: Readings on Social Change and Development*, Edited

masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda merupakan suatu masyarakat tumbuh berdasarkan sistem kasta tanpa ikatan agama.⁷⁰ Orang Belanda, Cina, dan Pribumi, melalui agama, budaya, bahasa, pola pikir, dan gaya hidup masing-masing, sebagai tanda tidak memiliki ehendak bersama (*common will*).⁷¹

Dalam masyarakat pluralistik Indonesia, Islam merupakan agama mayoritas dianut penduduk Indonesia (sekitar 85-90%), yang juga sekaligus negara yang penduduknya beragama Islam terbesar di dunia. Umat Islam Indonesia, karenanya, memiliki peranan terdepan dan strategis dalam memperkuat integrasi sosial dan integrasi bangsa. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru pada 1998, konflik sosial bernuansa suku/etnis, agama, ras, dan antargolongan (SARA), seakan terus terjadi. Kapan dan dimana akan terjadi seakan sulit pula terdeteksi. Faktanya, dipenghujung 2010, terdapat empat konflik sosial bernuansa 'SARA'.⁷² Terjadi pula kasus bom bunuh diri di sebuah masjid Markas Brimob-Cirebon (2011); dan bom bunuh diri sebuah gereja di Solo, Jawa Tengah (September 2011). Sejumlah orang telah meninggal dunia dan luka-luka pun tidak dapat dihindari dalam kasus SARA ini. Kerugian harta benda juga tidak sedikit jumlahnya, yang pada akhirnya akan mempersulit kehidupan warga

by Hans-Dieter Evers, Oxford University Press, New York, 1980, pp. 86-103; dan Abdullah Idi, "Etnisitas, Agama, dan Integrasi bangsa: Analisis Sosiologis Terhadap PBM No.9 & No.8/2006", *Orasi Ilmiah*, dalam rangka Wisuda Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang, 29 Nopember 2006, hlm. 3).

⁷⁰ J.S. Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 287-302.

⁷¹ Pada bidang ekonomi, tidak adanya *common-will* itu dapat dilihat dari tidak adanya permintaan sosial (*social demand*) dalam masyarakat secara total. Tapi, masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda, *social demand* itu belum terorganisir dengan baik melainkan bersifat sektional dan bukan *social demand* yang dihayati bersama oleh elemen-elemen masyarakat. Hal itu telah menjadi "sumber" yang membedakan karakter ekonomi pluralistik (*plural economy*) pada masyarakat homogen. Proses ekonomi pada masyarakat pluralistik dengan ekonomi tunggal (*unitary economy*), sedangkan pada masyarakat homogen dikendalikan oleh adanya *common will*. Hubungan-hubungan sosial diantara elemen masyarakat pluralistik hanya dikendalikan oleh proses ekonomi dengan produksi barang material sebagai tujuan utama dalam kehidupan masyarakat. Itu karena pengelompokan masyarakat berdasarkan perbedaan ras yang mana tipe ras mempunyai fungsi produksi tersendiri: Orang Belanda di bidang perkebunan, orang Pribumi di bidang pertanian, dan orang Cina di bidang pemasaran yang sekaligus sebagai mediator diantara keduanya. Seperti dikutip dari: (Abdullah Idi, *Bangka, Sejarah Sosial Cina-Melayu*, Tiara Watana, Jogjakarta, 2011, hlm. 213,

⁷² Kasus-kasus yang dimaksudkan adalah kasus HKBP (Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bekasi (agama); Tarakan-Kalimantan Timur (etnis), Jakarta Selatan (geng preman/golongan); dan Cisarada/Ciampea-Bogor (intern agama).

yang bertikai.⁷³ Keadaan ini tentunya tidak dikehendaki semua pihak, karenanya perlu diwaspadai dan dicari akar permasalahan konflik sosial tersebut guna menghindari korban jiwa dan harta benda yang lebih besar lagi. Jika terus terjadi, hal ini bertanda bangsa ini dipandang kurang menghargai hak hidup dan martabat manusia yang sesungguhnya memerlukan perlindungan negara.

Kasus HKBP-Bekasi terjadi, salah satu faktor penyebabnya, lebih dikarenakan lemahnya peran dan komitmen pemerintah tentang implementasi peraturan kerukunan antarumat beragama. Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang diketuai kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) belum sepenuhnya dilaksanakan. Kepala daerah umumnya kurang menyadari tentang pentingnya peran pemerintah dalam implementasi peraturan pemerintah tentang kerukunan umat beragama. Pemerintah dapat berupa pengawasan dan bahkan pemberian sanksi tentang setuju atau tidak setuju terhadap usulan pendirian rumah ibadah. Karena lemahnya peran pemerintah ini, terutama Kantor Kementerian Agama setempat, sangat mungkin diantara pengurus dan elit umat beragama mencoba dan berspekulasi mengabaikan aturan berlaku. Tentu saja, namanya spekulasi, ada yang berhasil dan tidak berhasil dalam mendirikan rumah ibadah. Karenanya, proses penanganan hukum terhadap konflik sosial bernuansa agama memerlukan kehati-hatian dan konsistensi, jangan sampai ada pihak umat beragama manapun merasa dirugikan. Peraturan Pemerintah tentang kerukunan umat beragama itu hendaknya tetap menjadi rujukan dalam mendirikan rumah ibadah.

Kasus kerusuhan antara etnis pendatang (Bugis) dan etnis lokal (Kaltimantan Timur) pada 2010, merupakan salah satu bentuk pengulangan kerusuhan etnis yang pernah terjadi sebelumnya, seperti di Sampit (Kalimantan Barat). Dapat diduga bahwa faktor "kecemburuan" sosial-ekonomi dan budaya (*stereotype* etnis) menjadi penyebab konflik itu. Etnis pendatang biasanya lebih agresif dalam mencari peluang ekonomi demi penghasilan dan martabat yang lebih baik bagi keluarganya yang sering kali menjadi "sumber" potensi konflik sosial yang pernah terjadi sebelumnya. Aspek sosial budaya, terutama *stereotype* etnis juga tidak jarang menjadi "sumber" potensi

⁷³ Ribuan pengungsi, terutama pengungsi etnis pendatang pada kasus Tarakan, telah menyedot dana Pemda Tarakan dalam jumlah cukup besar.

bagi kedua belah pihak etnis pendatang dan etnis lokal. Klaim-klaim dan label-label, baik yang positif yang diberikan kepada etnis sendiri maupun label-label negatif terhadap etnis lain, merupakan suatu hal sensitif terhadap munculnya "sumber" dan potensi konflik. Setidaknya, bila dilihat kasus Sampit.

Keterkaitan kerusuhan antargeng di Jakarta Selatan (2010), antara geng Flores dan Ambon (sama-sama dari Indonesia Timur), diperkirakan tidak terlepas dari perebutan "gengsi" dan "sumber-sumber" ekonomi. Kerusuhan ini telah menelan korban setidaknya lima orang pemuda dan puluhan luka parah dari etnis berbeda. Meskipun sama-sama dari Indonesia Timur dan mungkin juga dengan identitas agama yang sama, mereka rela saling melukai dan bahkan saling membunuh hanya karena harkat dan martabat berupa "gengsi" dan perebutan "sumber" ekonomi. Mereka merantau jauh-jauh dari daerah asalnya dengan tujuan mencari nafkah dan perbaikan ekonomi keluarga. Karena harus diakui pula bahwa dengan gemerlapnya Jakarta dan penuh sesak dengan beragam manusia, telah menjadi faktor pendorong atau daya tarik dan menjadi harapan masa depan bagi sebagian orang.⁷⁴

Adapun kasus kerusuhan dan pembakaran terhadap rumah ibadah dan rumah para jemaah Ahmadiyah di Cisalada, Ciampea, Bogor, lebih tampak sebagai konflik sosial bernuansa agama, konflik intern umat beragama. Konflik aliran Ahmadiyah di Indonesia lebih dikarenakan perbedaan mendasar antara umat Islam umumnya dengan Ahmadiyah. Konflik ini seakan tidak pernah terselesaikan meskipun sudah ada peraturan yang melarang tentang keberadaan Ahmadiyah.⁷⁵

Jauh sebelumnya, terutama sejak 1997, ancaman disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa tersebut seakan tidak terlepas dari perjalanan bangsa ini. Hingga kini (2011), bangsa ini seolah-olah belum mampu keluar dari berbagai masalah nasional. Masalah nasional itu, antara lain: korupsi, rawan pangan/kemiskinan, pengangguran,

⁷⁴ Iklim kehidupan yang cenderung kasar dan penuh dengan suasana kekerasan, suatu hal biasa bagi mereka bila ingin eksis. Bidang pekerjaan yang dipilih, biasanya terutama bertalian dengan petugas keamanan (*security*) pada kantor, perusahaan, tempat hiburan, pasar, dan parkir. Dengan latar belakang pendidikan yang pada umumnya rendah dan itu adalah pilihan terbaik. Perkelahian dan seakan menjadi korban suatu resiko yang harus

⁷⁵ Kompas, 3/10/2010.

premanisme, pencemaran lingkungan, konflik etnis/agama, terorisme, eksploitasi kekayaan alam, separatisme, dan lain-lain. Padahal, kondisi demikian, akan berdampak buruk terhadap proses melemahnya toleransi-kebersamaan, proses disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa.

Sejumlah kasus diatas merupakan ancaman internal berbangsa yang mengindikasikan bahwa ancaman disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa masih menjadi "agenda" penting ke depan. Setiap elemen bangsa harus berperan aktif sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam memperbaiki dan mempertahankan eksistensi bangsa ini. Umat Islam, salah satu elemen penting dari penganut agama mayoritas dalam bangsa pluralitas ini, memiliki peran dan fungsi signifikan dan strategis sebagai "perekat" integrasi sosial dan integrasi bangsa.⁷⁶ Ancaman disintegrasi bangsa bisa pula bersifat ancaman eksternal yang berasal dari luar atau ancaman stabilitas terhadap kedaulatan bangsa yang bisa bersumber dari negara lain, seperti beberapa kasus bertalian dengan konflik perbatasan Malaysia-Indonesia.⁷⁷

Timo Kivimaki (2005) mengatakan, hampir semua daerah yang bergejolak isu separatisme (misalnya Aceh, Papua, Riau, Maluku), memiliki sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah. Dari indikator provinsi ini tampak bahwa jumlah perkapita investasi asing merupakan satu dari korelasi dengan konflik atau potensi konflik sosial. Tuntutan kemerdekaan provinsi tersebut berarti orang daerah merasakan tidak perlu lagi untuk berbagi penghasilan daerah (*revenues*) dari sumber-sumber dan investasi asing dengan pemerintah Indonesia. Jelas, hal ini merupakan ancaman disintegrasi sosial yang memberi legitimasi terhadap motivasi perjuangan separatisme.⁷⁸

⁷⁶ Abdullah Idi, "Islam dan Pluralisme: Analisis Sosiologis-Keagamaan terhadap Peran Umat Islam Indonesia dalam Memperkuat Integrasi Sosial", dalam *Wajah Islam Indonesia: Perspektif Sosial, Kultural, Hukum, dan Pendidikan*, Idea Press dan Corpus Jogjakarta, Jogjakarta, 2010, hlm. 1-21.

⁷⁷ Perlu menjadi catatan bersama, bahwa setiap terjadi kasus konflik dengan negara jiran, antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia sering berada pada posisi lemah. Sebetulnya, sebanyak sepuluh (10) kali Indonesia melayangkan nota protes kepada Malaysia, namun tidak satu pun ditanggapi serius. Kasus Ligitan-Sipadan, tindakan provokatif kapal perang tentara Diraja Malaysia di Teluk Ambalat, dan Penangkapan tiga (3) petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI oleh tentara Diraja Malaysia, menandakan diplomasi Indonesia berada pada posisi lemah. Lihat: (Abdullah Idi, "Mereduksi Konflik Negara: Malaysia-Indonesia", *Berita Pagi*, 2/9/2010).

⁷⁸ Namun demikian, tiap daerah tampak memiliki motivasi berbeda untuk memperoleh motivasi separatisme. Di Papua, tokoh pejuang Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jacob

Sebagai bangsa pluralistik, Indonesia, di satu sisi, merupakan "berkah" dan "kekayaan" yang pantas disyukuri. Di sisi lain, pluralistik justeru berakibat sebaliknya, menempatkan bangsa ini menjadi rentan terhadap ancaman disintegrasi sosial⁷⁹ dan disintegrasi bangsa, seperti diungkapkan Henk Schulte Nordholt dan Hanneman Samuel berikut:

"After decades of authoritarian centralist government, attempts to introduce political and economic change seem doomed, in the face of bureaucratic sabotage, corrupt power politics, short-term opportunism, and the absence of a widely shared vision regions of the archipelago, regional resistance movements, the inability to corruption, pessimists are inclined to classify Indonesia in the category of "messy stages". In short, they predict further disintegration, which may eventually lead to the breaking up of the nation-state".⁸⁰

Syafuan Rozi⁸¹ mengatakan bahwa konflik sosial terjadi karena buruknya kondisi bangunan struktur sosial menyebabkan orang menjadi cepat marah dengan orang lain. Frans Magnis Suseno⁸² mengatakan bahwa setidaknya ada empat faktor pendukung konflik sosial di Indonesia. *Pertama*, konflik kultural, berhubungan dengan konflik primordialisme berdasarkan agama, ras, etnik, dan daerah. *Kedua*, berhubungan dengan akumulasi perasaan diri dan dengki. Orang dengan mudah diprovokasi orang lain dan mereka cenderung menjadi berperilaku eksklusif berdasarkan agama dan kelompok (etnis). *Ketiga*, perilaku seorang dipengaruhi budaya kekerasan di

Prai, mengatakan mereka mengantisipasi untuk memperoleh kekuasaan. Seperti Belanda tinggalkan Papua Barat. Hasan Tiro (alm.), mengatakan bahwa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memperjuangkan Aceh Merdeka karena merasa memiliki warisan kekuasaan telah dimiliki Aceh terhadap kemerdekaan. Banyak tokoh politik asli Republik Maluku Selatan (RMS) memperjuangkan kemerdekaan karena kelahiran dan posisi mereka di masyarakat yang merasa tertekan dan ancaman militer. Lihat: (Timo Kivimaki, *Violent Internal Conflicts in Asia Pacific: Histories, Political Economies, and Policies*, Editors: Dewi Fortuna Anwar, Helene Bouvie, Glendd Smith, Roger Tol, yayasan Obor Indonesia (YOB)-LIP-LASEMA-CNRS-KITLV-Jakarta, Jakarta, 2005, pp. 107-108).

⁷⁹ Abdullah Idi & Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Tiara Wacana, Jogjakarta 2006, hlm. 113.

⁸⁰ Henk Schulte Nordholt dan Hanneman Samuel (Eds.), "Introduction: Indonesia After Soeharto: Rethinking Analytical Categories", *Indonesia in transition: Rethinking Civil Society, Region, and Crisis*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2004, pp. 1-2.

⁸¹ Safuan Rozi, "Mendorong Laju Gerakan Multikultural di Indonesia", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Jilid XXIX No. 1/2003, hlm. 91-92.

⁸² Frans magniz Suseeno, "Faktor-Faktor Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia: Pencegahan dan Pemecahan", dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) and The Center for Languages and Cultures, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2003, hlm. 121-122.

tengah masyarakat. Keempat, sistem politik Orde Baru yang memposisikan kekuatan militer yang cenderung memecahkan masalah dengan pendekatan tidak demokratis.

Supardi Suparlan⁸³ mengungkapkan bahwa masa depan Indonesia masih rentan terhadap potensi konflik. Potensi disintegrasi sosial dihasilkan dari kompetisi dari individu dan kelompok pada berbagai bentuk "sumber-sumber sosial" (*social resources*) yang menggunakan etnisitas untuk memperkuat kekuasaan (*power*). Saling mempengaruhi satu sama lain akan mempengaruhi etnisitas sebagai cara untuk mengumpulkan kekuatan berdasarkan kelompok dan solidaritas, kemudian menggunakan etnisitas dalam konflik untuk mencapai kekuasaan tertentu. Pada kekuasaan struktur sosial lokal, seperti politik dan etnisitas sebagai potensi yang dapat merusak struktur sosial dan level komunitas.

Menyadari Indonesia sebagai bangsa pluralistik yang rentan terhadap potensi konflik sosial, pemerintah telah melaksanakan kebijakan-kebijakan etnisitas. R. William Liddle mengatakan bahwa pemerintah Orde Baru misalnya telah melakukan sejumlah kebijakan etnisitas sebagai upaya solusinya.⁸⁴ Pemerintah reformasi B.J. Habibie (1997-1999), kebijakan etnisitas lebih tampak pada bidang sosial budaya dan politik. Habibie memberi kesempatan etnis Cina untuk menyalurkan aspirasi politik dengan mendirikan partai politik dan diperkenankan untuk mempraktekkan adat-istiadat dan budaya leluhur. Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) mengeluarkan Keppres No. 6/2000, dan mencabut Inpres No. 14/1967 tentang pelarangan praktik adat-istiadat dan seni budaya Cina. Megawati Soekarnopoetri (2001-2004) memperkuat kembali legalitas praktik adat-istiadat dan seni budaya Cina. Rezim Soesilo Bambang Yodoyono (2004-2009 dan 2009-2014) lebih memfokuskan pada kejelasan tentang hubungan antaretnis (UU PDRE) dan kerukunan umat beragama (PBM-KUB No.9 dan No. 8/2006).⁸⁵

⁸³ Parsudi Suparlan, "Etnisitas dan Potensinya Terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia", dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat ini*, Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) dan The Center for Languages and Cultures, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, hlm. 70.

⁸⁴ R. William Liddle, "Coercion, Co-optation, and the Management of Ethnic Relations in Indonesia", *Government Policies and Ethnic Relations in Asia and the Pacific*, Editor: Michael E. Brown and Sumit Ganguly, CSIA Studies in International Security, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1997, hlm. 282-283.

⁸⁵ Lihat: (Abdullah Idi, "Bangka, Sejarah Sosial Cina dan Melayu....", *op.cit.*, hlm. 216-217).

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Bangka hanyalah bagian terkecil dari Indonesia. Akan tetapi, model etnisitas dan interaksi sosial antara etnis Cina dan Melayu yang terasimilatif pada level relatif sempurna meminjam istilah Molten M. Gordon, dan cenderung "natural", memiliki arti dan makna tersendiri bagi upaya pembinaan etnisitas dalam masyarakat pluralistik Indonesia. Implementasi sejumlah kebijakan etnisitas sebagai respons terhadap pluralitas-Indonesia, sebagai *sunnatullah*, tidak akan sempurna dan membawa hasil optimal, jika masih terjadi ketimpangan tajam terhadap struktur kehidupan sosial ekonomi, politik, budaya, dan agama. Kebijakan otonomi daerah hendaknya memiliki komitmen dan strategi dalam pemberdayaan etnisitas dalam berbagai bidang kehidupan tersebut. Dari kasus etnisitas di Bangka, setidaknya memberi suatu pelajaran penting bagi Indonesia bahwa integrasi sosial dan harmoni sosial akan mungkin terjadi apabila struktur sosial ekonomi, politik, budaya, dan agama menunjukkan keseimbangan (*equilibrium*) ditengah kehidupan masyarakat pluralistik Indonesia. Selain itu, pluralitas dan integrasi sosial menghendaki adanya kebijakan pemerintah ("pusat" dan "daerah") yang mampu "membela" (*affirmative*) terhadap berbagai kebutuhan beragam etnis dan agama dengan mengedepankan rasa keadilan. Hal ini, secara alamiah, pada akhirnya, diharapkan akan berdampak positif terhadap penguatan integrasi sosial dan integrasi bangsa yang akhir-akhir ini cenderung mengalami proses pelemahan.

RUU PDRE dan Isu Mayoritas-Minoritas⁸⁶

Masalah etnis mayoritas (pribumi) dan etnis minoritas asing (khususnya etnis Cina), seakan tak henti-hentinya. Untuk etnis minoritas asing lainnya, (Arab dan India), hubungan mereka dengan etnis pribumi agaknya bukan masalah lagi. Bagi etnis minoritas Cina fakta sosial-historis menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kendala dalam hubungannya dengan menimbulkan masalah, yang ditandai dengan munculnya sejumlah kerusuhan etnis mayoritas. Terakhir, misalnya pada Mei 1998 telah terjadi kerusuhan rasial dan etnis yang mengorbankan harta benda dan jiwa, terutama pada pihak etnis Cina ini.

⁸⁶ Tulisan penulis yang berjudul: "RUU PDRE & Isu Mayoritas-Minoritas", yang pernah dimuat di *Sumatera Ekspres*, 12/3/2006.

Sekarang ini, DPR-RI sedang menggodok RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (PDRE). Munculnya RUU PDRE ini dipandang skeptis oleh sebagian pihak dari kalangan mayoritas pribumi. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, RUU PDRE itu sangat berbahaya karena menekankan kebebasan tanpa terbatas (Republika, 27/2/2006).

Hubungan etnis mayoritas pribumi maupun etnis minoritas Cina, sesungguhnya tidak sederhana. Permasalahannya, bukan hanya terletak pada permasalahan sepele, misalnya masalah pembastan KTP atau masih perlu tidak Surat Keterangan Berwarganegara Republik Indonesia (SKBRI), tetapi juga perlu melihat berbagai masalah substansial, yang menjadi akar masalah utamanya. Sejumlah hasil penelitian dan referensi-referensi tertulis menunjukkan bahwa permasalahan etnis Cina dan pribumi sesungguhnya bersifat kompleks, yang keterkaitan erat dengan aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Perlu menjadi catatan bahwa setiap oran Cina di daerah-daerah memiliki permasalahan yang berbeda dan tidak heterogen, sebagian mereka cenderung akomodatif dan asimilatif dan sebagian lainnya segregatif.

Berpijak dari kondisi demikian, maka adanya keinginan pihak legislatif untuk menata kehidupan berbangsa dari perspektif etnisitas perlu disambut positif. Tetapi, agaknya pihak legislatif tidak perlu tergesa-gesa dalam memutuskan RUU menjadi UU PDRE ini, karena masalah etnis Cina dan pribumi di Indonesia sangat kompleks. Para wakil rakyat ini perlu memiliki banya informasi atau data tentang sejarah sosial hubungan orang Cina dan pribumi, dimana kita berharap para wakil rakyat ini tidak hanya melihat dari perspektif politik semata tetapi juga perlu melihat akar permasalahan sesungguhnya.

Pada abad ke 17, ketika modernisasi yang diikuti dengan industrialisasi di Eropa Barat para migran Cina yang memenuhi kebutuhan komoditas yang di ekspor ke Eropa, para kuli Cina ini dipekerjakan di berbagai sektor, misalnya sektor tambang dan perkebunan. Di Bangka-Belitung, mereka umumnya bekerja sebagai kuli-kuli tambang timah (*tin miners*), di Kalimantan mereka bekerja sebagai kuli tambang emas (*gold miners*). Di Sumatera Timur, mereka umumnya bekerja sebagai kuli-kuli perkebunan sawit. Di Jawa, mereka umumnya sebagai pedagang antara (*intermediary*) atau

menjadi kuli-kuli di perkebunan tebu. Pada awalnya, motivasi bermigrasi dari Cina Daratan ke Nusantara, termasuk ke Indonesia, lebih dikarenakan faktor kemiskinan akibat Perang Candu atau karena memang kondisi alam yang tandus dan tidak menguntungkan.

Dalam perkembangannya, hubungan orang Cina dan pribumi selalu mulai mengalami kendala karena kepentingan politik-ekonomi bangsa kolonial sering kali merugikan mereka. Keterpilihkan bangsa Belanda terhadap orang Cina, karena sangat menguntungkan secara ekonomi misalnya, berdampak pada kerenggangan hubungan antaretnis ini yang telah terjalin secara alamiah jauh sebelumnya. Dalam sejarah, perlawanan bangsa pribumi terhadap bangsa kolonial Belanda terjadi dimana-mana, karena banyak perilaku diskriminasi terhadap mereka. Mereka merupakan orang pribumi tetapi tidak punya harga diri lagi. Karena itu, satu-satunya strategi yang harus dilakukan adalah perlawanan. Dalam sejarah peperangan ini, tidak jarang adanya keterlibatan sebagian kecil orang Cina yang masih loyal terhadap elite pribumi yang menentang bangsa kolonial. Tindakan rasialisme anti-Cina pertama kali dalam sejarah terjadi pada tahun 1740 di Batavia yang menelan korban seratus ribu orang Cina.

Dalam perkembangannya, terutama ketika mulai khawatirnya bangsa Belanda terhadap eratnya hubungan bangsa Pribumi dan Cina, maka politik etnis perlu dilakukan. Jika tadinya, orang Cina masih boleh melakukan asimilasi perkawinan ataupun masuk agama Islam, maka selanjutnya tidak diperbolehkan lagi. Maka kolonial Belanda mengutus Snouck Hurgronje, seorang akademisi (Islamist) Belanda yang berpura-pura masuk Islam tetapi tugasnya memata-matai ulama Islam (Islam politik) hingga ke Mekkah dan melarang orang Cina untuk berasimilasi (melalui perkawinan) dengan orang pribumi. Dari perspektif kolonialisme Belanda, strategi politik ini merupakan suatu hal yang penting dalam mengantisipasi ancaman terhadap kekuasaannya.

Dampak dari kebijakannya diskriminasi bangsa kolonial ratusan tahun itu, maka frekuensi asimilasi orang pribumi dan Cina perlahan-lahan mengalami degradasi. Terlebih, ketika terjadinya migrasi orang Cina gelombang kedua, pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada masa ini, migran Cina mulai membawa anak-anak dan para istri, sehingga memungkinkan mereka tidak berinteraksi sepenuhnya dengan orang pribumi, dan asimilasi

perkawinan sudah sulit terjadi pada mereka pendatang baru (Cina Totok, xin-xeh) ini. Hanya orang Cina keturunan (yang datang sebelum gelombang ke 1) yang tampak berasimilasi.

Selanjutnya, hubungan orang Cina dan pribumi semakin mengalami penurunan frekuensinya ketika mulai nasionalisme orang Cina perantauan mulai tumbuh akibat pengaruh kebijakan politik Cina Daratan. Sama halnya, nasionalisme bangsa pribumi mulai dan terus tumbuh dan berjuang keras untuk memperoleh kemerdekaan dari bangsa kolonial. Loyalitas orang Cina terpolo menjadi tiga, yakni pro-Indonesia, pro-Belanda, dan pro-Beijing. Tetapi, agaknya orang Cina yang sudah merasakan manfaat dari kekuasaan kolonial merupakan kelompok yang paling kuat. Sampai-sampai, adanya keinginan bangsa kolonial untuk memperbaiki nasib orang pribumi melalui politik etis dapat dibatalkan karena ketidak-setujuan orang Cina Pro-Belanda ini.

Setelah Indonesia merdeka, realita sosial-hubungan etnisitas tetap belum berubah berarti. Rezim Orde Lama merasa perlu menata masalah etnisitas (etnis asing) ini untuk memperkuat integrasi bangsa. Ide asimilasi, sesungguhnya, sudah dimulai pada rezim Orde Lama, dimana ketika itu Presiden Soeharto menggagasnya. Tetapi realisasi strategis asimilasi baru dimulai pada zama Orde Baru, setelah pertemuan Angkatan Darat pada tahun 1966 di Bandung. Penerapan kebijakan asimilasi ini, tidak terlepas dari kecurigaan pemerintah Orde Baru ketika itu terhadap keterpihakan sebagian orang Cina dalam kasus G/30/S/PKI. Sejak ini pula, istilah Cina diberlakukan kembali yang sebelumnya sejak 1950-an mulai digunakan istilah Tionghoa.

Selama Orde Baru (32 tahun), sesungguhnya agak sulit mengatakan bahwa orang Cina sudah terdiskriminasi. Sebagai rezim berkuasa, sudah barang tentu pemerintah Orde Baru perlu memiliki visi dan misi yang jelas kemana Orde Baru memilih pendekatan asimilasi dalam memecahkan masalah etnisitas di tanah air. Fakta menunjukkan bahwa terdapat banyak konglomerat ternama yang dilahirkan selama 32 tahun itu. Sebagian pengamat mengatakan bahwa hingga kini tidak kurang 70 persen sesungguhnya aset ekonomi Indonesia berada di kelompok konglomerat ini, ditambah dengan sebagian kecil konglomerat pribumi. Jadi, permasalahan etnisitas sesungguhnya pada masa Orde Baru, terletak pada ketimpangan

ekonomi antara konglomerat yang didukung penguasa dengan massa kebanyakan/rakyat (termasuk etnis terasing yang miskin dan apalah orang pribumi).

Kondisi sosial ekonomi demikian, sesungguhnya belum banyak mengalami perubahan, dimana aset ekonomi tetap berada pada pihak yang mempunya (konglomerat). Sejumlah konglomerat yang melarikan diri ke luar negeri dengan jumlah uang millaran hingga trillunan rupiah merupakan bukti bahwa kalangan konglomerat memang punya peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sementara itu, pada bidang sosial, politik, dan budaya, selama rezim reformasi (sejak 1998), tampak sudah banyak mengalami kemajuan signifikan. Misalnya, pada pemerintahan BJ Habibie, etnis Cina diperbolehkan memiliki partai politik. Pada pemerintahan Abdurrahman Wahid, telah diberlakukan kembali adat-istiadat dan budaya orang Cina. Pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri, hari raya Imlek menjadi Libur Nasional. Selanjutnya, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, berupaya menegakkan supremasi hukum, termasuk mengembalikan uang rakyat yang dibawa para konglomerat ke luar negeri.

Berpijak dari kenyataan demikian, diharapkan dalam proses pembuatan RUU PDRE, pihak legislatif tidak mengabaikan konteks sosial-historis hubungan etnis mayoritas pribumi dan etnis terasing (terutama etnis Cina). Masa depan bangsa ini bukan terletak pada bangsa lain, tetapi terletak pada bangsanya sendiri, karena itu proses pembuatan RUU PDRE tidak mengabaikan identitas nasional, sebagai bangsa yang menghargai pluralistik. Era globalisasi bukan berarti menghilangkan identitas suatu bangsa bahkan dapat memperkuat identitas itu, karena ketika identitas tidak ada lagi, berarti hilanglah bangsa atau negara itu. Oleh karena itu, baik etnis mayoritas pribumi maupun etnis minoritas asing perlu saling menghargai. Setiap orang boleh berpendapat berbeda, tetapi masyarakat kebanyakan yang paling memahami permasalahan dan masa depan bangsanya. Sebagai ilustrasi, bandingkan dengan pemerintah Cina Daratan (RRC) yang menerapkan strategi asimilasi-represif untuk memecahkan masalah.

The Kingdom of Sriwijaya and Social Integrated Values⁸⁷

The Kingdom of Sriwijaya was known as sturdy maritime Kingdom. In its development, the Kingdom of Sriwijaya had grown, expanded and become integrated in variety (*integrated in heterogeneity*). Therefore, this article describes about social integration values of the Kingdom of Sriwijaya? What are the implications of social integration values to Indonesia?

Gabriel Ferrand tells that the Kingdom of Sriwijaya established since 392 M. This opinion is based on Chinese cronies who claimed that the country of *She-Yeh (Cho-Ye)*-means *Jaya* or *Wijaya* or *Sriwijaya*. Then, *I-Tsing* called *Sriwijaya* as *Shih-Li-Fo-Shih*. In Arabic note, which is different from Chinese cronies, *Sriwijaya* was called as *Syarbazah*. The Kingdom of Sriwijaya was the big Kingdom in archipelago besides the Kingdom of Majapahit of Mataram. The regional power of the Kingdom of Sriwijaya spread out from most of Java Island and Sumatra Island until the Malay Peninsula, which was recognized by *Swarnadwipa*. The Kingdom of Sriwijaya was recognized by world society (Stannia, 199: 1-27).

The Kingdom of Sriwijaya, was known as maritime Kingdom, the central activity of international trade, the central activity of religious research and education (Buddhism), and as the meeting center of various nations (*melting-pots*). As the maritime Kingdom, the Kingdom of Sriwijaya had the strong force. The technology of ship constructing and advanced navigation, even more than China, as told by *Piere Yves Manguin* (Stannia, 1998: 1) as follows:

"Sriwijaya used the big ships on sea transportation of trade route at Indies Ocean and the South of Chinese Sea. Its Weight was about 250 till 1.000 ton and the length was 60 meters. Those ships were able to carry about 1.000 people, it is not including merchandise".

As the trade center, the Kingdom of Sriwijaya did the commercial contact with the foreign countries, such as *Mainland*, Chinese (Tiongkok), Middle East, Persian, India, and Western nations. *Jacob Cornellis* of van Leur noted the exporting commodity of the Kingdom of Sriwijaya to those nations, for example, to Arabic countries, such as *aloe-wood*, *camphor*, *sandalwood*, *ivory*, *tin*, *ebony wood*, *sawn*

⁸⁷ This paper entitled: 'The Kingdom of Sriwijaya and Social Integrated Values' was presented by author in the *International Seminar on Sriwijaya Civilisation*, LIPI-Balai Arkelologi Sumatera Selatan, Novotel Hotel, Palembang, 16-19 July, 2008.

timber, mace, and incense. Meanwhile, to Chinese, exported ivory, freshwater, incense, fruits, white-sugar, crystal ring, glass, camphor, reef, cotton clothes, horn of rhinoceros, perfume, cooking flavor, and medicines (Stannia, 1998: 26).

The Kingdom Sriwijaya was also recognized as the center of religious research and education. According to Tarmizi Taher (1997: 35-40), the information about socio-histories can be seen in note of I Tsing journey (a voyager and Chinese student who learned the society) came to Palembang in 671 M after sailing for 20 days with *Possu* from Canton. I-Tsing lived in Sriwijaya for six months to learn the Sanskrit language before living to India. In India, he lived for ten years to gain knowledge in the College of Nalanda, and got back again to Sriwijaya to live for four years. During in Sriwijaya, I-Tsing succeed to copy the text of Buddhism in Sanskrit language into Chinese.

Next, I-Tsing came home for a while to Canton, and came back again to Sriwijaya with a number of his friends to rewrite the book. According to I-Tsing, Sriwijaya at that time was the center of Buddhism, so that for him, Sriwijaya was the ideal place to obtain the knowledge before entering the College of Nalanda in India. The famous researcher was Fa Hsien, a figure of religion in Buddhism who tried gather the Buddhism scripts, at the early decade of the fifth century. Beside that, after one and a half century, there was also a noted researcher, namely Wang Ming who did the research to Buddhism in 675 M in Central Java, and I-Tsing checked Buddhism in the Kingdom of Sriwijaya at about 675 M. Slamet Mulyana (2000: 131) also wrote that on November, 671 M, I-Tsing left Canton to get along with the coast to southern. After almost 20 days on sailing, the ship arrived at the harbor of Sriwijaya and remained for six months to learn the *Sabdavidya*, the Sanskrit structure.

The Kingdom of Sriwijaya was also known as the center of nations meeting (*melting-pots*). Burhanudin Daya (2000: 1) stated that the meeting or contact of the tribes, through international trade transaction. In contrast, the contact between the archipelago with Chinese Mainland (*Tiongkok*) was not certainly known when had been started. An information could be believed was before the existence of the Kingdom of Majapahit and Sriwijaya, Java Island was often visited by all sailors from the continent of China (*Tiongkok*), that was since early century. The history note of sailing the ocean was con-

The Kingdom of Sriwijaya and Social Integrated Values⁴⁷

The Kingdom of Sriwijaya was known as sturdy maritime Kingdom. In its development, the Kingdom of Sriwijaya had grown, expanded and become integrated in variety (*integrated in heterogeneity*). Therefore, this article describes about social integration values of the Kingdom of Sriwijaya? What are the implications of social integration values to Indonesia?

Gabriel Ferrand tells that the Kingdom of Sriwijaya established since 392 M. This opinion is based on Chinese cronies who claimed that the country of *She-Yeh (Cho-Ye)*-means Jaya or Wijaya or Sriwijaya. Then, *I-Tsing* called Sriwijaya as *Shih-Li-Fo-Shih*. In Arabic note, which is different from Chinese cronies, Sriwijaya was called as *Syarbazah*. The Kingdom of Sriwijaya was the big Kingdom in archipelago besides the Kingdom of Majapahit of Mataram. The regional power of the Kingdom of Sriwijaya spread out from most of Java Island and Sumatra Island until the Malay Peninsula, which was recognized by *Suarnadwipa*. The Kingdom of Sriwijaya was recognized by world society (Stannia, 199: 1-27).

The Kingdom of Sriwijaya, was known as maritime Kingdom, the central activity of international trade, the central activity of religious research and education (Buddhism), and as the meeting center of various nations (*melting-pots*). As the maritime Kingdom, the Kingdom of Sriwijaya had the strong force. The technology of ship constructing and advanced navigation, even more than China, as told by *Piere Yves Manguin* (Stannia, 1998: 1) as follows:

"Sriwijaya used the big ships on sea transportation of trade route at Indies Ocean and the South of Chinese Sea. Its Weight was about 250 till 1.000 ton and the length was 60 meters. Those ships were able to carry about 1.000 people, it is not including merchandise".

As the trade center, the Kingdom of Sriwijaya did the commercial contact with the foreign countries, such as Mainland, Chinese (Tiongkok), Middle East, Persian, India, and Western nations. *Jacob Cornelis of van Leur* noted the exporting commodity of the Kingdom of Sriwijaya to those nations, for example, to Arabic countries, such as aloe-wood, camphor, sandalwood, ivory, tin, ebony wood, sawn

⁴⁷ This paper entitled: "The Kingdom of Sriwijaya and Social Integrated Values" was presented by author in the International Seminar on Sriwijaya Civilization, LIPI-Salat Arkelologi Sumatera Selatan, Novotel Hotel, Palembang, 16-19 July, 2008.

timber, mace, and incense. Meanwhile, to Chinese, exported ivory, freshwater, incense, fruits, white-sugar, crystal ring, glass, camphor, reef, cotton clothes, horn of rhinoceros, perfume, cooking flavor, and medicines (Stannia, 1998: 26).

The Kingdom Sriwijaya was also recognized as the center of religious research and education. According to Tarmizi Taher (1997: 35-40), the information about socio-histories can be seen in note of I-Tsing journey (a voyager and Chinese student who learned the society) came to Palembang in 671 M after sailing for 20 days with *Posu* from Canton. I-Tsing lived in Sriwijaya for six months to learn the Sanskrit language before living to India. In India, he lived for ten years to gain knowledge in the College of Nalanda, and got back again to Sriwijaya to live for four years. During in Sriwijaya, I-Tsing succeed to copy the text of Buddhism in Sanskrit language into Chinese.

Next, I-Tsing came home for a while to Canton, and came back again to Sriwijaya with a number of his friends to rewrite the book. According to I-Tsing, Sriwijaya at that time was the center of Buddhism, so that for him, Sriwijaya was the ideal place to obtain the knowledge before entering the College of Nalanda in India. The famous researcher was Fa Hsien, a figure of religion in Buddhism who tried gather the Buddhism scripts, at the early decade of the fifth century. Beside that, after one and a half century, there was also a noted researcher, namely Wang Ming who did the research to Buddhism in 675 M in Central Java, and I-Tsing checked Buddhism in the Kingdom of Sriwijaya at about 675 M. Slamet Mulyana (2000: 131) also wrote that on November, 671 M, I-Tsing left Canton to get along with the coast to southern. After almost 20 days on sailing, the ship arrived at the harbor of Sriwijaya and remained for six months to learn the *Sabdavidya*, the Sanskrit structure.

The Kingdom of Sriwijaya was also known as the center of nations meeting (*melting-pots*). Burhanudin Daya (2000: 1) stated that the meeting or contact of the tribes, through international trade transaction. In contrast, the contact between the archipelago with Chinese Mainland (*Tiongkok*) was not certainly known when had been started. An information could be believed was before the existence of the Kingdom of Majapahit and Sriwijaya, Java Island was often visited by all sailors from the continent of China (*Tiongkok*), that was since early century. The history note of sailing the ocean was con-

ducted by Chien Han Shue at a period of Han Dynasty (202 SM-220 M), informed that since that century had been contacted with Chinese Mainland (*Tiongkok*) with the investigation objectives, friendship and trades.

Usman Effendy (2000: 1), stated that priest's voyage history and Chinese student, I-Tsing, who terminated in Sribusa port (Sriwijaya) in 671 M have noted the presence of Arabic men and Persian there. The history of adventurer of Chau Ju-Kua also informed about the existence of 'Arabic colony' in western coast of Sumatra, likeliest in Barus (Middle Tapanuli). The source from *Tiongkok* is very important but there is a difficulty in identifying names a recognized in the history of our archipelago. This matter illustrates that the Kingdom of Sriwijaya can be said that as "starting points" from contact of archipelago and others. As the biggest Kingdom in Archipelago at that time, Sriwijaya had become the strongest Kingdom in terms of force and ship constructing technology, the central activity of international trades, the central activity of religious research and education (Buddhism), and as the meeting center of various nations (*melting-pots*) in order to create an integrated Kingdom (*unity in heterogeneity*). Even, there had been Chinese Islamic community, which was "starting points" in spreading out Islamic religion to various remote areas in the archipelago.

The existence of Islamic community in Sriwijaya was a logical matter. This is because Islamic in fact is not a new religion for society of Mainland China (*Tiongkok*). In Chinese Mainland or *Cung-Guo* (*Tiongkok*), Islam was believed to have expanded since the first of Hijriyah (the seventh century), brought first time by the friend of Rasullulah (Prophet of Muhammad SAW) namely Sa'ad Ibnu Lubaid, who is identically with Lubaid al-Habsyi himself is not clearly known. Out of the difficulty in identifying about Sa'ad, the contact between Islamic world, for example Arabian country with *Tiongkok* had continually taken place. For about 90 years in the period of Ummayyah Dynasty, it was not less than 17 Moslem Ambassadors had come to *Tiongkok*, the followed also by about 18 ambassadors delegated from the chairman of Abbasiyah Dynasty in the period of 750-798 M.

The existence of contact between Islamic world and Chinese Mainland or *Cung-Guo* (*Tiongkok*) had supported the growth of Islam, so that the colony of Ta Shih was formed in Guangdong. Beside

that, there was a big enough Moslem community since mid of the eight century in Hainan Island and Zhung-Ciu. On the mainland, there was also the expansion of Moslem community and colony which was big enough in Middle Asia region, which covered Uighurs and Tribe Hui in the area of Xin Jiang (East Turkistan). They until now in the biggest Moslem community in Republic of Chinese People (RRC), especially Beijing there were about 300.000 moslems (Usman Effendy, 2000: 1). The total of Chinese moslem in Chinese Continent is nowadays estimated between 60 million till 100 million people, an amount over there (Budisetyagraha, 2000: 3). Burhanudin Daya (2001) stated that the relationship occurred at that time was between family of Wang Ming from Han Dynasty with the ruler of Aceh, Hanuza and those who stopped in Java hold a friendship with the Java ruler, Yehtiao, in about 132s (M). The historical data which is by Hamka called Chinese Note became one of references for historian who wished to dig the information about archipelago in the early century.

A number of adventurer which was have Islamic identity, such as General of Cheng Ho (Zheng He) or recognized by Haji Sam Po Kong who performed as sea journey at about 1405-1433 M. Zeng He by temporary observer claimed as clan of the 37th of Prophet of Muhammad SAW had left the heritage *mushallah*, which is known as *Klenteng Sam Po Kong* in area of Gunung Batu (Semarang, Central Java, Indonesia). Besides Zeng He, there were also adventurers, sailormen and Chinese Islamic settlement but unfortunately their history were difficult to verify accurately. For example, Haji Mah Hwang and Haji Feh Tsin, the members of Tiongkok navy who often did praying in *Mosque Semarang*; Haji Boh Tak Keng from Champa; Haji Gan Eng Cu in Tuban; Jin Bun who called Raden Fatah (Demak); and Tung Ka Lo who called as Sultan Trenggana (Usman Effendy, 2000: 1).

H.J. de Graaf and G. Th. Pigeaud in Bambang M. Pranowo (1998: 90) wrote that in Ming Dynasty (1386-1645 M) there was a number of Islamic Chinese clan from Yunan who relied on Hanafi functioned in government. The Tiongkok force the leadership of Haji Sam Pobo (Cheng Ho) mastered water territorial and the coasts of Nan Yang (South-East-Asia). In 1407 M, the Chinese force grabbed *Kukang* (Palembang) which at that time colonized by Chinese on Moslem. There, they formed the first Islamic Chinese community in archi-

pelago. Little by little, they then established the community of Islam Chinese in Sambas-West Kalimantan, Paninsula-Malaka, Java such as in Ancol (Jakarta) and Cangki (Mojokerto).

During the Kingdom of Sriwijaya, was also knowon Islamic Chinese community in Bangka. M.F.S. Heidhues (1992: 178) wrote that at 1823 M in Bangka, there were about 4.000 Islamic Chinese who worked as labors (*collies*) tin (including the small number of women and children). Their amount was totally about 9.000 people, and from the amount there were about 754 clans⁶⁸ (28 among them were Moslems). It is true since opening of tin mine in 1709 M, there had been many Chinese Continent (Mainland China) who migrated to Bangka to work as tin collies. Because they generally did not bring their wives and children, many of them got married indigenous women of local Malay who generally believed in Islam.

For all reasons, the Kingdom of Sriwijaya which had Buddhism Kingdom background in archipelago owned the 'integrated values' which were very meaniungful, which came to cross religion and cultural for the shake of common interest "sincere". The common interest was the importance of multi-lateral-international trades, religious research and education (Buddhism), starting points of Islamic growth in archipelago. The Kingdom of Sriwijaya owned the local values namely "social integrated values" through natural process. Darwis Hidayat (2001) stated that on the history way, Buddhism from its old country was India succeed to disseminate to various remote area in the world, in the reality did not generate the opposition, quarrel, moreover war, because of religion difference, sect and also culture. In archipelago, Buddhism had ever experienced a bright period when Sriwijaya, Syailendra, and Majapahit existed.

The social integrated values of Kingdom of Sriwijaya experienced of the drastic change, when Europe nations started to come to archipelago in the fifteenth sentury. In 1854 M for example the Dutch stated the indigenous nation as class (inlender) after Europe nation as the first class and Foreign East and (Chinese, Arabic, and India) as the second class. The classification of the Dutch Indies Society was believed a sthe main cause of the existence of cart relation between Chinese and indigenous people which had been formed before, in line

⁶⁸ *Clain* is a Chinese man which was born in Indonesia. These clains can believe in the Islam, Christian, Kong HU Chu, Taoism, and others.

with the existence of the Kingdom of Sriwijaya. The form of discriminative action, told by Bambang M. Pranowo (1998: 85-96), the Dutch which has existed in Indonesia about 365 years, creating social system, politics, law, education, and economics which were discriminative, which later had complicated the process of reinforcement of nation integration. The goal of the Dutch came to Indonesia was to exploit the indigenous nation in immeasurable of life area through strategy of *divide et Impera*.

As the effect of repressive action, exploitative and discriminative nation the Dutch, some Chinese people who at the first came to earn their lives to archipelago and had a normal interaction with local indigenous people, started to feel different from the indigenous nation because they had got the new social status. It is worse, the native man looked at the Chinese ethnic as a group owned degree of social, economic, better law and politics from them, although in reality the assumption was always accurate. The integrated values at the period of Dutch Indies was more based on repressive approach to society; at the period of the Kingdom of Sriwijaya, integrated values focused on the inclusively and plurality approach. The crucial integrated values of the Kingdom of Sriwijaya should be expressed in the effort of strengthening to return the degree of social integration and integration of Indonesian country in this last ten years (since 1998-2008) almost experienced fluctuation.

Indonesia: in Reality

It is the creator's desire that Indonesia is defined as a plural society. J.S. Furnivall (1980: 86-103) stated that as a type of tropical society where they ruled and they were colonized to have the different tribes. The Dutchmen as a minor group, its amount progressively increased by the end of the 19th century, at the same time, as the ruler of indigenous majority. In totally, stated by J. Nasikun (1995: 287-302), Indonesian society at a period of Dutch Indies was a society, which grew based on caste system without religious relationship. Dutchman, Chinese, and Indigenous, through religion, cultural, language, way of thinking, and life style each other, as the signal for not possessing common will.

As a plural society, Indonesian nation is really sensitive to have social conflict and threat of nation disintegration. Henk Schulte Nordhot and Hanneman Samuel (2004: 1-2) stated:

"After decades of authoritarian centralist government, attempts to introduce political and economic change seem doomed, in the face of bureaucratic sabotage, corrupt power politics, short-term opportunism, and the absence of a widely shared vision of the future. In the light of recent outburst of ethnics and religious violence in various regions of the archipelago, religious resistance movements, the inability to corruption, pessimist are inclined to classify Indonesia in the category of 'messy states'. In short, the predict further disintegration, which may eventually lead to the breaking up of the nation-state".

The same thing stated by Syafuan Rozy (2003: 121-122) that social conflict happened because of the end condition in social structure which cause people are easy to get angry to others. Franz Magnis Suseno (2003: 12) said that at least there are four supplementary factors in social conflict in Indonesia. *First*, cultural conflict, related to the conflict primordialism based on religion, race, ethnic, and area. *Second*, related to the catty feeling accumulation and grudge. People easily to be provoked by others and they tend to have exclusive manner based on religion and ethnic group. *Third*, political system of newera positioning military strength which tend to solve problem with the under-democratic approach.

Therefor, social reality of national life nowadays has tight relation with the previous reality social-history. This analysis, from the aspect of social science look like directing us to the importance of understanding and knowledge about nationality problem nowadays comprehensively and protected from partial and subjective analysis which will only distort substantive problem. Hence, this study needs the existence of dialectical process between local values or Kingdom social integration values of Sriwijaya with the social reality the running of this nation's life nowadays (as the continuation from reality of social in the past).

Although, Indonesian nation has gained the independence since 63 years ago, generally, social, cultural, economic, educational and political gaps still happened. Moreover, there is someone who claimed that social and economic gap of identically with the dominant action of Chinese men in the field of economics. Certainly, the view and claim in that way can persue the social integration reinforcement process and national integration. The social turbulence case which had ethnical nuance and religion on May 1998 related to social and economic gap in society. Social circumstance, cultural, economic, edu-

cation, and politics of development policy which oriented to all parties in society of multicultural in Indonesia.

In the last ten years (1997-2007), showed the intensity and social extensity conflict in society is truly happened. Social conflict can be in the form of the horizontal and vertical social conflicts.²⁰ Horizontal social conflict is the conflict expanded among society members, like fighting between villages, ethnic, and the follower of religion. Ethnical and religion nuance conflict cases happened, a sin Pontianak, Poso, Ketapang, Kupang, Sambas, and Ambon-Maluku. Potency of conflicts have nuance to tribe, religion, race, and social-group (SARA) can not be looked into inconsequential because as the same as "fire bin chaff" which at any times can burn more awful. Social conflict has vertical dimension, namely conflict between society and country. Between horizontal and vertical conflicts can be related and supported each other.

Most of all area in Indonesia have separatism, in vertical conflict dimension, like cases in Aceh, Papua, and Maluku, has abundance "natural resource". From occurrence indicator at the province level, the sum up of the foreign number investment have positive correlation with the potency and the province is the disappointment form to the division from development of resource management result. This matter is a social disintegration threat and national disintegration gave the legitimating to motivation of separatism struggle. However, various social and religion conflicts in Indonesia almost out of the religious ideology problem, but rather caused by other aspects, such as the unfairness of natural product distribution.

When our nation experienced various problems social conflict which endanger social and national disintegration, local values roles, integrated values of the Kingdom of Sriwijaya very positive in reconstructing and strengthening social and national integration later. Therefore, the degree of disintegration threat nation, like stated by a number of social scientists, are expected to be minimized. Though, the pluralistic nation is very risky to social conflict, it doesn't mean can not be minimized. Louwis A. Coser (1985: 47-48), said that con-

²⁰ The vertical conflict impeller factor, for example cause of government unfair policy/state in many aspects of society life. The most of demonstration of student and society in May 1998 representing vertical conflict Reform regime as the same as student demonstration of government policy about the price of BBM (June, 2008), other aspect of vertical conflict.

Conflict is the dysfunctional for a group of but nor always dysfunctional. Conflict as social process is the mechanism which the groups and its boundaries are formed and defended. Conflict can unite all group members through the re-inauguration to the group identity. Conflict possibility as the source of cohesion or group dissolution really posted in the origin of stress, issue about conflict, the way of how stress handled, and the important of structure type where that conflict expanded.

The progress of the Kingdom of Sriwijaya in reality at least has been determined by technological progress of maritime, education/religious research (ethics/morality), world trade (economic), and sturdy bureaucracy and support the society, which in this article is told by writer as 'the social integrated values' in the Kingdom of Sriwijaya. The important implication from integrated values of the Kingdom of Sriwijaya, namely:

First, as sturdy maritime Kingdom, the Kingdom of Sriwijaya had focused on the oceanic potency as source of life and Kingdom continuity. Most of region of Kingdom have the background to territorial water, so oceanic technology/shipping become the first priority. The technology of ship constructing maritime, in the case, as a means of transportation among archipelago and intercontinental. Water territory is not only viewed as an economic resources, transportation and appliance of defender and Kingdom security. The attention on the development priority toward maritime technology, in a special case, ought to be the attention for archipelago nations, like Indonesia, which is very risky to regional security threat/boundary territory, propertiestheft went out to sea, illegal fishing, etc.

Second, educational development, knowledge, and research of Buddhism. The Kingdom of Sriwijaya was the Buddhism Kingdom had strong emotional tying by Tiongkok, because Chinese men who came to Sriwijaya generally believed in Buddhism. The existence of the Buddhism Kingdom through research activity conducted before continuing higher study to College Nalanda, India. This matter illustrated that even though the Kingdom of Sriwijaya had experienced of a period of feather in one's cap and the technological progress in maritime and its rapid international trade, educational problem, knowledge, research of Buddhism were not disregarded, so that religion in this case was placed as 'stabilisator' and control to Kingdom.

Inclusivism and life tolerance in religion is also very visible. As its proof, besides Buddhism in Sriwijaya, at the time there was also the Chinese Islamic community—which is developed by Islamic Chinese men who came from Mainland Tiongkok. This matter has implicated that religion problem, ethics and morality became the important element for a Kingdom.

Third, trading and economic activities in the Kingdom of Sriwijaya at that time had been internationally scaled. The Kingdom of Sriwijaya holds its trade partner. The Kingdom of Sriwijaya placed the trading activity became the important priority in developing the Kingdom. The Kingdom relationship was not only among archipelago which became its Kingdom region, but also holding the trade partner with them from other continents, like India, Arabia, and Persian. This matter indicates that the progree of a Kingdom or state must have a wide network and can work along with other countries as long as it is profitable each other in the identity, in the case of religion, ethnic, tradition and culture. It means that the progress of the Kingdom of Sriwijaya nor out of other nations share in the world.

Last, fourth, that the Kingdom of Sriwijaya had applied the "Area Autonomy" that though Sriwijaya formally under the wings of Mainland Chinese, they still enjoy very wide autonomy. So that, this period can be said as the early intensive relationship between society of archipelago and Chinese nation, like written by Taher (1997: 40). Rights as majority and minority among tribes when it was not the problem in other nations, like Persian, India, and Arabic were the international trading partners. Therefore, majority and minority relation at one particular pluralistic state can be placed as relation which respect each other and require or mutual-symbiosis, as conducted by the Kingdom of Sriwijaya and Chinese Mainland, focused on democratic values, justice, potency, and plurality.

The application of area autonomy in Indonesia in the real meaning is expected to be able to reduce the intensity of various social conflict potency. The weakness in the implementation of area autonomy (2001-2008) expected to be repairable as the effort to do the commendation and reform demand 1998, as the effort to improve the society prosperity. This existence of the law for area autonomy is more relied on the democratic principle, social participation, generalization and fairness, and also pay attention to the potency and area vari-

ety (UU Otonomi Daerah No. 22/1999), as the implementation from decentralized system. It seems, autonomous policy application of area precisely, efficient, and effective, is the important fortress in strengthening to return to the degree of national integration in Indonesia.

Closing

The Kingdom of Sriwijaya owned the high social integrated value, which has made the Kingdom became the integrated and sturdy Kingdom in variety (integration in heterogeneity). The social integrated values of the Kingdom of Sriwijaya, for example: focused on science progress and maritime technology; open international trade with other nations; placing the progress of spiritual education (Buddhism); the importance of life tolerance; area autonomy (Kingdom); and respect to the plurality.

The high social integrated value of the Kingdom of Sriwijaya implicated the running of the nations. Like Indonesian nation, focusing on democratic values and Human Right, respecting the variety and plurality, the importance of focusing on the science and technology in supporting the progress and continuity of national life. The importance of the open relation with other nations in context profitable to each other. The importance of developing material and spiritual so that human can be prestigious, and the importance of improving and respecting attitude to others in running its religion belief. These are some of values of social integration owned by the Kingdom of Sriwijaya which are expected to be able to become the inspiration in completing the better development in Indonesia later.

Conflict Ethnic in Asia:

Cases of Ethnic-Muslim Minorities Myanmar, Cambodia, Philipina, Thailand, China, and Indonesia⁹⁰

In the socio-historical context, the presence of Asian nations were destined rich in race, ethnicity, religion, and 'skin color'. On the one hand, it is as a 'property', a destiny, the laws, therefore Southeast Asia, in general, be categorized as a pluralistic society. On the other hand, the existence of a pluralistic nation often has the potential as 'resources' for social conflicts that affect the interaction of socio-ethnic

⁹⁰ *Proceeding 'International Seminar on Malay Islamic Civilization: Tradition and Contribution to The Development of Islam at Southeast Asia', Academic Centre, Islamic State University (UIN) Raden Fatah Palembang, South Sumatra, Indonesia, 10-11 November 2014.*

majority and minority religious followers. Every Asian country seems to have its own experience in dealing with religious nuances of ethnic conflict that happened in those countries.

In this paper, I would like to talk about the religious nuances of ethnic conflict in a number of countries in Asia, since centuries, involving ethnic-minority Moslem. Like, the Rohingya Muslim minority (Cambodia), Uyghur (China), Malay-Fattani (Thailand), Moro (Philippine), Myanmar, and (once) in Aceh (Indonesia). All ethnic minorities is 'Moslem minorities' in those countries. Therefore, some questions that deserve further asked: how to 'process' socio-historical ethnic conflict nuanced religion (Moslem minorities) in Asian countries? To what extent of the effectiveness of the government's response and efforts of these countries to the effort 'solution' in the future? How far indeed religious factors (Moslem minority) influence the religious nuances of ethnic conflict?

As we know that many nations of the world is a pluralistic society. Pluralistic society in question is the existence of segmentation sociological groups that can be formed effectively in terms of cultural and political cohesion within the community, on the basis of group identity. Sometimes cohesion-cohesion that is direct and primordial, sometimes (cohesion-cohesion) was created out of political opponents. For the case of Indonesia, for example, as a country where people pluralistic society has a structure that has at least two characteristics. *First*, horizontally, characterized by the fact of social units based on differences of race, religion, customs and regionalism. *Second*, vertically, community structure is characterized by the difference in vertical layers above the bottom layer so sharp. Because of such differences, the people of Indonesia called 'plural society', where the term was first used by Furnivall (1967) to describe the people of Indonesia during the Dutch East Indies, a society composed of two or more elements that live in without a separate integrated with each other in a political life. Definition of 'compound' has been developed by MG Smith, in his studies, in the Caribbean, where different ethnic groups 'mixed but not dissolved' (mix but do not combine). Political domination by one tribe where the different groups involved in a common economic system, in which each occupy a certain position in the division of labor (division of labor) is the thing that maintains a pluralistic society in the balance.

Presumably, in a pluralistic country that looked very 'vulnerable' and the potential for ethnic conflict and (nuanced) religion. Triggers ethnic and religious conflicts often relate to 'pressure' the military, but the fundamental trigger is any dispute inter-ideology/absolute ideology, lack of compromise, and the insistence of state nationalism against ethnic nationalism. In Asia, therefore, the intensity of inter-ethnic conflict (religious nuances) and a majority (which often backed rulers) are more prevalent than inter-ethnic conflict resulting in the movement of 'separatism'. In many cases, the government, the country, often giving 'labels' to the Muslim ethnic minorities as 'rebels', 'terrorists', and 'separatism'. The claims of this one-sided, of course, is not only detrimental to the ethnic minorities (Muslims) but also, further complicate efforts to solution 'substantive' government in finding a 'solution' to the conflict ethnic majority and ethnic minorities.

To explain certain ethnic groups that exist in Asia or Southeast Asia, is considered too complex related to the movement of 'separatism' and even the label 'terrorism' in the form of: ethnic Cham-Rohingya (Myanmar), Uighur (China), etnis 'Malay'-Fattani (Thailand), and 'ethnic' Front (Philippines). Here, described, of diverse religious nuances of ethnic conflict situations, in this case the Muslim ethnic minorities in Asia:

In Burma (Myanmar), for instances, where there is insurgency by ethnic group against ethnic Karen and Shan ethnic Burmese who constitute the majority in Burma. Earlier, at the time of British colonialism in Burma, ethnic minorities such as the Karen and Shan obtain protection through the regulation of Burmese domination in the period. However, the Burmese nationalist movement succeeded in ousting the British colonization and won independence, but on behalf of the Burmese as the identity of the ethnic character of the country Burma. It is seen by the government policy that requires use Burmese language, embraced Buddhism or application of culture related to Burmese character. This then makes the Karen and Shan ethnic groups and separatist rebellion. This rebellion emerged as a form of consciousness as a minority who feel threatened by the ethnic majority. The thing that made the government of Burma itself is using the military as an instrument to overcome the insurgency. But, apparently, the military is not the best solution to resolve the ethnic conflict related to socio-cultural character. The military as an instrument

of government vulnerable to human rights violations that may have occurred and experienced by minorities.

In Cambodia, as said Ajid Thohir, have experienced a history of the progress of the Muslims, concerned with politics and economics. The dominance of Muslims in trade and the efforts of Islamic broadcasting very intensively conducted in this area has raised the prestige of the Muslims in the Kingdom of Cambodia. In Cambodia, the role and influence of the Muslims even greater because some of the previous century in Champa which later merged with the Kingdom of Cambodia there ever Muslim sultanate. At the time of the Pol Pot regime, Muslims, known as the Khmer Muslims also experienced a murder. Approximately 70% of Muslims had suffered massacres. Furthermore, with the full protection of the king, starting from King Norodom Sihanouk's return from exile, just a lot of things that obtained with the blessing of the king. In the Pol Pot era, many Muslims were expelled from the big city. Pagodas, mosques, banks and business places are destroyed. Intellectuals were slaughtered. The Khmer Rouge have destroyed the entire infrastructure of Kampuchea, since the educated, intellectual and buildings destroyed. Muslims are the most affected.

Now, the state of Cambodian Muslims began to continue to proceed to improve, they coexist with Buddhist community without significant tension. Besides, because the culture of Islam which is entirely derived from the past Champa Kingdom who participated in the formation of Cambodia, as well as the absence of multi-ethnic identity, ethnicity entirely homogeneous with the Cambodian national society. As for the choice of different beliefs never became an issue, even in *Kampong Cham* Muslims of Cambodia remain with tradition, adapted from the various cultures of the Islamic world.

In Myanmar, the Rohingya look deep into trouble, in the form of acts of violence and acts that tend to be civilized, which is a crime against humanity. KH. Ma'ruf Amin, Chief Executive of the Indonesia Islamic Council or we called MUI who read his statement in the office of the MUI, in Jakarta on crime in the Rohingya is that a deliberate attempt to seize land rights, the denial of citizenship, mass slaughter, expulsion, banning the burning of worship implementation, closure of supply lines food, and a number of other brutal acts very contrary to the values of humanity and Human Rights (HAM). According to MUI, discriminatory measures affecting Rohingya rel

gious background was done by military means to civilians must stop immediately. Whole nations of the world must take responsibility for the fate and future of ethnic Rohingya in Myanmar. MUI deny all forms of slaughter, expulsion, oppression, torture, rape, robbery, arrest, and a number of other inhumane acts committed against the Rohingya Muslims. The actions undertaken by the Myanmar army can not be tolerated in the name of anything. In fact, these measures indicate the occurrence of a scenario genocide against the Rohingya Muslims. It urged the Myanmar military junta to immediately halt all forms of slaughter and savagery Myanmar soldiers and to provide protection for the rights of religious life and the Rohingya Muslims.

In Thailand, where the Thai national identity is illustrated by the Thai ethnic group's culture as the ethnic majority. Though there are other ethnic minorities in Thailand with the socio-cultural background, religion and language are different. Among them, Tibeto-Burman ethnic group, Mon-Khmer and Lao who live in the northern part of Thailand while the Malay-Muslim ethnic groups living in the southern part of Thailand. However, ethnic minorities were ignored by the government related to government policies that focus on development in the central part of Thailand. So it is very clear that there is inequality in terms of social, economic, political and educational center of Thailand which was inhabited by ethnic Thai to Southern Thailand inhabited by ethnic Malay.

The imbalance that has led to the 'separatism' of Pattani, Pattani United liberalization Organization (PULO) in southern Thailand which was inhabited by the ethnic Malay-Muslim groups. Additionally, these revolts also triggered by the Thai government policies that do the 'centralization' of education and language policies to integrate Muslims into Thai society. Coupled with the support of other Muslim ethnic in Kelantan Malaysia. While every effort has been made by the government but this conflict can not be resolved completely. In this context, it seems, the government is too 'careful' with a system that unites Thailand. Thailand heterogeneity only through existing ethnic majority. And, in fact even though there may be a threat when the Thai government allowed and equate ethnic minorities but in essence, the state has the right to stop the threat.

In the Southern Philippines, which is motivated by the problem of religion and region. Western colonialism in the Philippines man-

aged to form a Philippine society where the majority is Christian but the Filipino people who do not want to accept the religious beliefs fled to Moro and formed the Moro people are mostly Muslim. Prior to Philippine independence, under the United States colonialism, Moro finally mastered and incorporated into the unity of the Moro people of the Philippines despite themselves are not willing to put in the Philippines. However, after independence the Philippines Moro people do not want to unite with the Philippines. This is further fueled by the Philippine government's policy to apply "Christian Philippines states system", the use of English as the national language as a form of colonial assimilation process that once colonized the Philippines. Thus there is inequality in the social, economic, political against the Moro people are pressured by the Christian majority of the Philippines (ethnic Tagalogs, Ilocanos, Cebuanos and Ilongo), so there was a rebellion by the Moro National Liberation Front (MNLF).

Until this, the Philippine government has not been able to resolve the conflict despite the application of various agreements with the Moro people. Regarding the ethnic conflict in the Philippines is complex associated socio-historical resolved Moro people who do not want to be part of the Philippines. Presumably, the Philippine government more appropriately serve as a 'mediator' in this case, but this can not be done related to Philippine policy favoring the majority of the characters, so it takes a 'mediator' of other countries.

In China, ethnic conflicts experienced by the Muslim Uighur religious nuances. China since the 6th century AD have felt and experienced the enormity of the power of the *Islamic Aqeedah*. At the time of Caliph Walid bin Abdul Malik sent a commander named Kutaibah bin Muslim to conquer Central Asia including Kasgar city, one town in the province of Xin Jiang. Kutaibah Muslim bin doing a lot of strategies to conquer China one of which is to convert the Chinese population. Mass Islamization process occurs in which the population of China in droves to Islam because Islamic Aqeedah and captivated with the intellectual process carried out by Muslim ibn Kutaibah to finally have a tremendous impact for China. Moslem ibn Kutaibah not only conquered the city but also the city of Samarkand Kasgar and Bukhoro to succeed politically to control trade along the silk route in Southeast Asia where the line was very important for China at the time. It is never to be forgotten from the minds of the Chinese nation. Etched in

their long history, so they are well aware of how powerful the power of Islam.

Presumably, a sense of fear of 'Islamic awakening' make the Chinese government repression against Uighurs in Xin Jiang. Plus the legacy of Communism ideology that Islam forbids ever since the 60s and spreading understand atheism in the midst of the Muslims. Although communism has collapsed turns on Uighur Moslem continue to experience oppression; Muslim women should not use the hijab and Moslem clothing, men should not lengthen the beard, should not be fasting for Ramadan, gathered in the mosque, they should not be doing a lot of things even related activities *mahdhoh* worship for Moslem. Chinese Muslims are prohibited from fasting by the regime of China. And China's rulers have always strict monitoring annually. In fact, 'advocate' of the Moslem in Xin Jiang to eat during the day and break their fast on the grounds of health and performance. To that end, the military conduct inspections with menyatroni every Moslem family house in order to have lunch in the month of Ramadan. China considers Muslims in Xin Jiang, the Uighurs, as 'terrorism' even called 'extremists'.

In Indonesia, in the past, anyway ethnic conflict-Muslim minority happened, which the New Order government tends to use the military instrument of 'separatism' Acehese through the Free Aceh Movement (GAM) since 1976. This is motivated by cultural factors Acehese are very thick with Islam is also a factor 'inequality' profit distribution of resources owned by the Acehese. Similarly, what happened in Papua, where there they have a very abundant resource but they are even less benefit from the resources they have. The difference is, in the majority of Papua background population of non-Muslims. Related to the issue of 'separatism' in Aceh and Papua, Indonesia has gained support in the form of co-operation to overcome the rebellion, from other countries.

So, based on empirical data and information available, inter-ethnic and religious conflicts are not purely due to different religious teachings embraced the community. But, more due to the dominance of other factors, especially socio-economic structures and political imbalance. As disclosed in Kurokawa Liberson that, in the context of the majority ethnic relations 'natives' and ethnic minorities 'migrants', in M. Kurokawa Lieberon, let express need to understand the prob-

lems of political, economic, and socio-cultural-but it is not enough. Because in reality, different ethnic contact, each of them seeks to maintain and improve a particular social order since the contact for the sake of defending a particular interest anyway. The main problems are related to political institutions, social and economic, which describes a public relations or 'natives' subordinated minority group 'migrants', which describes the relationship the situation subordinated groups by the majority 'natives' or indigenous.

As conclusion, that conflict ethnic-minority religious nuance is something that is prevalent in the Asian community amid diversity. Ethnic-religious conflict with a Muslim minority ethnic majority (the support ruler) often have a different religion. Differences in religious beliefs and socio-hitoris experience-colonialism seems to influence the nation strong as the 'root causes of conflict' religious nuances in Asia. In addition, differences in social structure, ethnicity, religion, economics, politics and culture, is another factor, which has contributed significantly to the 'process' of ethnic and religious conflict, the Moslem minority in various countries in Asia. Often, the effort 'solution' to the conflict of ethnic minority and the majority Muslim-non-Moslem (support 'ruler'), requires the presence of an internal policy states that without discriminating against them in various areas of life.

Social Interaction:

Chinese and Malay-Bangka⁹¹

The Reformation era (since 1998-currently), has influenced at least two effects for Indonesia as a nation state. *On one hand*, Reformation motivated the willingness of democratization as a foundation of the Indonesian existency legitimacy for in the future. *On the other hand*, the motivation for transparency and toward accountability has influenced the social disharmony or various internal social conflicts in this country. Those social conflicts occurred in the pluralitas frequently attributes, such as inter-ethnies, religious followers, and cultures. Event, the social conflict has been occurred in the internal religious Similar followers by different motivations. Currently, in 2012, one of these examples is the social-conflicts between the Shia-Sunny-

⁹¹ Paper entitled: "Social Interaction: Chinese and Malay-Bangka", was presented in Annual Conference on Islamic Scholars (ACIS), Pangkal Pinang, Bangka-Belitung Province, Indonesia, 2012.

Moslems and Moslems in Madura, East Java, Indonesia. In an extremed context, the various social-conflicts with various motives, the social-religious-conflict also as an indication toward the negative at the next national integration. Regarding to this situation, Indonesia actually has rich of local-wisdom as social harmony to support and Strengthen the sustainability of this country.

One of the local-social harmony originated from the plurality of religious, ethnics, and cultures. This article tends to point out about the social harmony in terms of social interaction at cross religious, ethnics, and cultures, that occurred between the Chinese and Malays in Bangka. This social interaction occurred "naturally-assimilatif" and "without by design". This social interaction of inter-ethnics tends to protect the socio-historical reality, as a construction of thinking that support the differencies and similarities. It could be valuable for managing Indonesia as a plularistic society. This article focused on an analysis of a socio-cultural perspective, by using the literary technique of collecting data.

Tin Mining and "China's Collies"

The arrival of the 'collies' of Chinese mainland to the island of Bangka has a long history, which is estimated with the history of their arrival to the archipelago. They are already present in the archipelago since hundreds of years ago. The Chinese in the Pacific is estimated to have been present much earlier, when Bangka under the authority of Srivijaya. However, their arrival in the formal context of the larger amounts recorded at the beginning of the 18th century, when it was discovered and opened the tin mines of Bangka. During this Sulthan authority, Chinese coolies kept coming to Bangka-mined to work the tin mines.

Specific conections between South China and Southeast Asia has helped the process of procuring emigrants. Chinese farmers need a support system to be migrated to Southeast Asia. They do mining or agricultural activities with a view to organize their profits movements. In the 18th century, tin is one of the important commodities in Southeast Asia. Local authorities, the official contact with the court or in their surrounding centers, has encouraged migration. In Palembang Sultanate, for example, has used official messengers (*tiko*) from China for elderly relatives (*dage*). It is a common title for the head of 'a secret society'. They are Muslims. They do a lot to South China, prob-

ably through their relatives or 'a secret society'. They are the official delegation of the palace of the gifted. This is evident from their ability to move the migrants to the court, in order to fully immigrated as laborers to work in the tin mines.

Because of the need to increase production of tin, the presence of Chinese coolies were brought to Bangka continued. Of course, the arrival process, emigrants (*coolies*) are rarely in a position to pay for their travel costs, especially in the 18th century than the 19th century, when Europe was paying import coolies he employs. Coolies brought to the mine or plantation ships (*junks*) from South China to Southeast Asian ports. M.N.J. Court revealed that every year, a confident and competent agent carried by ships returning from Palembang to China, to pick their elected emigration participants. Shipping costs financed by the administrator or lenders (*money lenders*), who returned after the emigrants benefited from tin mining.

When referring to the opinion Horton and Hunt, the migration of individuals and groups influenced driving, towing, and facilities, the arrival /Chinese migration to Bangka can also be explained by this analysis:

First, the push factor is poverty. Poverty is experienced, it can be seen from the type of work in rough categories, such as coolies and small traders. Furthermore, political and economic crises. Political crisis inside China, as occurs Opium War (1839), Taiping rebellion (1851), and the economic crisis repeatedly causing starvation after failed harvest. Crisis that has pushed thousands of migrants southern China to seek employment abroad, including to the archipelago. Tribal / ethnic Hokkien is the first migrants who lived in the Dutch East Indies in large numbers. Robust nature of the trade is strongly attached to this tribe.

Second, the pull factor is economic exploitation. Economic exploitation by the West in Southeast Asia, has led to the inflow of Chinese migrants on a large scale in the region. Chinese migrants who came more recently forming a community of "new" (*xin keh*), often separate from those who have established and formed first. Number *xin keh* bigger and more dynamic than previous migrants. But because of the new group, they are less integrated into the local community. They still speak in Chinese (or Mandarin Chinese dialect) and still think of themselves as citizens of China. They still keep in

touch with the Chinese and Chinese-oriented, both culturally and politically. They also called *qiaomin Zhongguo* (Chinese citizen living abroad) or *Huaqiao* (Chinese citizen living in a foreign country) by the Chinese government.

Third, the transportation factor. Means of transport for Chinese migrants who came to the archipelago, is not an obstacle, since mainland China (Mainland China), when it has had a ship high-tech.

In its development, the number of Chinese coolie porters more than the local natives (the Malays). Local native porters did not have an adequate share in the tin mining sector in the Pacific, despite their pioneering. This is, because, *first*, local or indigenous Malay people accustomed to living on the charity of nature without its challenges. *Second*, at that time, the forest is estimated at more attractive than tin. Forest products, such as wood, resin, honey, etc., market for easier and wider. While the use of lead is still limited, and only limited market for India and China, and at a low price so that is not balanced by the difficulty of mining. *Third*, dig tin is a tough job with a high level of risk, and besides, the expertise required to choose a backup location. It is likely, less stimulating interest in the indigenous Malay-Bangka because they tend to view the issue in terms of the supernatural shaman to obtain instructions from many tin mining. The same is true in Malaysia and Thailand. The role of indigenous Malay coolies tin-Bangka began shifting, replaced by the coolies 'imported' China imported Sulthan Palembang, where Bangka when it was under the rule of the Sultan of Palembang.

After the change of ownership of assets lead, from the Dutch to the Indonesian side agreed in 1953, has been consequential to changes in the Chinese population in the Pacific. Following the approval of a completed collection tin assets in 1960, the Indonesian government adopted a policy to lead the company's management. A number of positions within the important company placed tin from Indonesia by skilled native workers, including indigenous Bangka and Billiton. After the Indonesian government to allow the entry of foreign capital since 1967, there are three foreign companies who invest in the tin mining industry, namely PT. Koba Tin (in the Pacific), PT. Broken Hill Proprietary, Indonesia (in the Pacific Islands)-and then sold to the German company PT. Preusag and subsequently sold to a national company PT. Mount Kikara Mining-and PT. Tin Riau (Riau Islands

waters) which then resigned because of the collapse of tin prices in the early 1980s.

Decline in the number of Chinese population in the Pacific in the period 1971-1983, from 27% to 21.3%, mainly as a result of the process of change in the company's position in the Bangka tin. A number of important positions in the company's tin originally occupied by employees of ethnic Chinese from Indonesia replaced by indigenous employees, including indigenous Bangka and Billiton. For example, a captain of the dredger (*floating dredgers*) between 1983-1986, more than 50% is occupied by indigenous Indonesian people born outside of Bangka, Billiton, and Singkep. Although the Dutch researchers think that may be suitable pepper grown in the Pacific, in fact, the Chinese had invested pepper in Bangka after 1869. Planting pepper in Bangka are under management of China has grown to the 19th century. In Bangka, an easy to integrate pepper plantations and tin mining using land is part of the mining concessions that employ Chinese coolies unemployment.

G. William Skinner (1996) said, the history of Chinese migration in Southeast Asia showed the phenomenon of adaptation, acculturation, and assimilation. By the end of the 19th century, Chinese women are not allowed to leave China and many Chinese migrants (male sex) in various countries of Southeast Asia, such as Philippines, Java (Indonesia) and Malaya (Malaysia), married the local indigenous woman. This is something that can not be avoided. Moreover, if the migrant settlements are located far from the city center and isolated from other Chinese families. However, there are also married with its own community (China) that produces Chinese Mestizos in the Philippines, Chinese-born in Java (Indonesia), and the Chinese Babas of Malacca (Malaysia).

Social interaction with ethnic Chinese assimilative local natives in the Netherlands Indies, Skinner said, it appears there is also the other categories. *First*, there are a number of Chinese-born men who did not fit the local competition with and bekerja in the Chinese community. Therefore, they left the community, and married native women, as well as adopting the lifestyle of indigenous / local natives. *Second*, the birth of boys China seen as more important and valuable than girls. Not infrequently children (babies) are given to the families of indigenous women (adoption). Child women-adoption did not

experience any barriers in acculturated and assimilated, because since the baby was considered and the indigenous people living in the environment. *Third*, a number of Chinese-born man to marry a local woman the local natives. Boys of the marriage was believed to be Chinese, and at one time had prepared to return to Mainland China (Mainland China). While girls can stay with his mother natives, so that ultimately will be local natives anyway. *Fourth*, when the family unit (family wedding Chinese men and indigenous women) can not be maintained because the brothers went back to China or because of divorce, the boys are usually joined his father (to China). Meanwhile, the mother took her daughter natives, next to indigenous identity.

Social interaction-assimilative Chinese coolies and native Malay-Bangka have occurred in the process of time. As mentioned earlier, Chinese coolies came to Bangka, in the pre-colonial, have marital assimilation, by pledging himself to Islam or "entry Malay". Assimilation of Chinese coolies and native Malay-Bangka has occurred relatively perfect on almost all levels, both cultural assimilation level, and marital. Social interaction-assimilative is still ongoing to this day happens to different levels and degrees.

Amran Harun (1967) revealed that (assimilation) marriage (marital), can be classified into three types. First, the marriage of men and women Bangka Malay-Chinese, by Chinese women pengislaman first. *Furthermore*, the couple were married in front of the prince or the Religious Affairs Office (KUA) local, based on Islamic law, the powers of the trustee judge his Chinese women. Chinese woman who had entered to be moslems, by the Malays and the Chinese community, said incoming class of Malay or "entry Malay". The legal relationship between Chinese women with the parents broke up, both in the areas of family law, marriage, and inheritance law. This type of marriage prevalent in the Pacific. *Second*, the marriage between Chinese men and Malay women-Bangka. Marriage begins with the shape and entry to be moslems (*muallaf*) of the coolies of Chinese men. Then, with the consent granted marriages of Malay-Bangka guardian. *Third*, marriage Malay men and China women who is a foster child (adoption). The Chinese woman, since childhood had converted to Islam or "entry Malay". So that the marriage can be directly implemented. Such assimilation is a perfect assimilation as it includes mental and biological assimilation.

Abdullah Idi wrote in his dissertation results (2006) that the social interactions Chinese and Malay-Bangka has occurred on a number of levels of assimilation (multi-stages of assimilation, namely structural assimilation, cultural assimilation, assimilation marital, identification assimilation, and assimilation without prejudice / discrimination. Results of this study support the theory of assimilation and simultaneously revising Milton M. Gordon (1964) on multi-levels of assimilation (multi-stages assimilation) from seven levels of assimilation in Gordon theory, there are five levels of assimilation of the Chinese and Malays in the Pacific assimilation Gordon remains relevant theory used in the study of assimilation, though difficult to be applied to intact, because each state societies tend to have different social and economic structures.

Assimilative social interaction that occurs naturally and relatively perfect (natural and relatively full-assimilation) are influenced by social and economic circumstances of Bangka. Social and economic conditions of Bangka is actually a response to social change in a society which therefore can have positive or negative towards assimilation. In this study, social prubahan that causes the natural and relatively full-assimilation. Social changes that pushed the assimilation of Chinese and Malay-Bangka are: the state of the local economy Bangka a relatively balanced; ethnic Malay majority and the ethnic Chinese minority in size; characteristics Malays are accommodating, tolerant, egalitarian, open (extrovert); state the elite Malays; settlements relative spread ethnic groups and democratic education system and without discrimination; Islam as the majority religion in size, and a democratic political system.

Meanwhile, the social changes that are likely to be obstacles to the assimilation of the Chinese and Malay-Bangka, are: changes in the economy, the economy began to decline the role of lead and narrowing of plantation land; educational change, the more advanced children Chinese and Malay influence patterns of thought, association, and their insights, including in terms of perception and social behavior among themselves and with children of different ethnic groups and changes in religious life, which is an increase of religious knowledge in Chinese children and reinforces the belief that Malay teradap their religion respective influence on the pattern of thought, association, and their insights, as well as their patterns of social behavior with children of different ethnicities.

A state social interaction of ethnic Chinese and ethnic Malay-Bangka assimilatively and going "natural" and relatively perfect (natural and relatively full-assimilation), is due to the symbolic response to the state of social and economic structure of a relatively balanced and equilibrium, with intersecting social parameters. Judging from the symbolic interactionism approach Blumerian, it appears that the assimilation of the Chinese and Malays came as a symbolic meaning (meanings latent) of the interaction of individuals or groups with individual ethnic Chinese minority or majority ethnic Malays, as a social phenomenon that appears. Understanding the meaning of the symbols that are used to understand the latent meaning behind the social interaction of Chinese and Malay are assimilated.

Therefore, the results of this study has been denied or counter-attack against the thesis GE Simpson and J.M. Yinger (1972). Simpson and Yinger said to say that the characteristics of minority-characteristic: (1) the minority group is a part of society (the state) are more complex, (2) have characteristics that undermine the self (self-esteem), (3) minority groups are groups that have a high awareness of the group, which grows as each member has the same number of special characteristics, both traits that benefit or harm, (4) membership in a minority can harm the next generation even though no longer distinctive physical or cultural characteristics that stand out, and (5) members of minority groups either by choice or because of the situation that has a tendency to marry people from their own group

At the micro level, the case of ethnicity, social interactions of ethnic Chinese and Malay-Bangka is something "unique", which ties migrant ethnic Chinese and indigenous Malay-Bangka looks assimilative and "natural". It is expected to provide an important reflection for the nation at the macro level, which looked pluralistic society. Population's Bangka least about 80% of the population having an ethnic Malay-Muslim majority. In the history of assimilation of Chinese and Malay-Bangka, Islam turns out not a constraint for the assimilation between the Chinese and Malay-Bangka. Socio-historical fact, about an assimilation of Chinese and Malays tend to occur in a "natural". This, suggests a counter-attack against the thesis also G. William Skinner who declared Islam as an obstacle to the assimilation of the indigenous Indonesian Chinese.

In the functionalist theory perspective, such as Merton and Parson, society is a stable system of groups that work together, in which there is consensus. As a body, they saw society as a system consisting of the parts are interconnected and gave birth to a pattern of relationships which is in equilibrium. Despite the condition of the turf interconnected sometimes tense and conflict, however, as a system, there is always a need to establish and keep co-operation turf requires adjustments and adaptation in order to maintain the balance of relationships within the community.

Reflections: from Bangka to Indonesia

It is a desire of the Creator, *sunnatullah*, Indonesia destined for a pluralistic nation, as expressed JS Furnivall. In totality, J. Nasikun revealed that the people of Indonesia in the Dutch East Indies is a growing community on the basis of religion caste no ties. The Dutch, Chinese, and Native, through religion, culture, language, patterns of thought, and their lifestyle, as a sign of not having common will.

In a pluralistic society of Indonesia, Islam is the religion of the majority of the population professed Indonesia (approximately 85-90 %), which is also well populated Muslim country in the world. Indonesian Muslims, therefore, has a leading and strategic role in strengthening social integration and national integration. After the end of the New Order regime in 1998, social conflicts nuanced tribal/ethnic, racial, religious, and intergroup, intervillagers, as called SARA, if continued. When and where will be difficult as well as detected. In fact, in 2010, there are four social conflict nuanced SARA. There were also cases of suicide bombing at a mosque in Cirebon-Mobile Brigade Headquarters (2011), and a suicide bombing of a church in Solo, Central Java (2011), and also social-religious conflict between Syiah and Sunny ideology in Madura, East Java (2012). A number of people have died and injured were unavoidable in this case SARA. Loss of property is also not a few, which in turn will make people's lives in the conflict. This situation is certainly not desired by all parties, therefore need to be aware and look for the root causes of social conflict in order to prevent loss of lives and property yag greater. If it keeps happening, it is considered the nation marked lack of respect for the rights and dignity of human life that actually require state protection.

Case-Bekasi HKBP occurs, one factor, more due to a weak role and commitment of the government on the implementation of the

rules of harmony among religious believers. Existence Forum for Religious Harmony (FKUB) chaired by the regional head (governor / regen / mayor) has not been fully implemented. Head area generally less aware of the importance of the role of government in the implementation of government regulation of religious harmony. The government may be monitoring and even sanctions of approval or disapproval of the proposed building houses of worship. Because of the weakness of the role of government, particularly the Ministry of Religious locals, quite possibly among officials and religious elite to try and speculate ignore rules apply. Of course, the name of speculation, there are successful and unsuccessful in establishing a house of worship. Therefore, the legal handling of the religious nuances of social conflict requires prudence and consistency, do not let any religious party feels aggrieved. Government Regulation on religious harmony that should remain a reference in setting up a house of worship.

Cases of violence between ethnic migrants-Bugis and local ethnic, Eastern-Borneo, in 2010, is one form of repetition of ethnic violence that never happened before, as in Sampit, West Borneo. Can be presumed that the factor of "jealousy" socio-economic and cultural or ethnic streotipe the cause of the conflict. Ethnic immigrants typically more aggressive in seeking economic opportunity and dignity for the sake of earning a better place for families who are often the "source" of potential social conflict that has ever happened before. Socio-cultural aspects, especially ethnic streotip also not uncommon to "source" the potential for both parties and local ethnic ethnic migrants. Claims and labellings, both positive given to ethnic self and negative labels against other ethnicities, it is a sensitive matter to the emergence of the "sources" and the potential for conflict. At least, if we look at the case of Sampit.

Linkage of gang violence in Jakarta (2010), the gang Flores and Ambon (both from East Indonesia), is not expected regardless of the seizure "prestige" and "sources" of the economy. This unrest has killed at least five people injured and dozens of young men from different ethnic groups. Although both of East Indonesia, and possibly also with the same religious identity, they are willing to hurt each other and even kill each other just because of the dignity of "prestige" and the seizure of the "source" of the economy. They wander away from their home areas with the goal of earning a living and family economic improvement. Because it must be admitted, too, that the glit-

ter of Jakarta and crowded with a variety of people, has been the driving factor or the charm and looks to the future for some people.

As for the riots and the burning of the houses of worship and the homes of the congregation Ahmadiyya in Cisalada, Ciampea, Boyja, more nuanced social conflict appears to be religious, internal religious conflict. Conflict in Indonesia Ahmadiyah flow more due to the fundamental differences between the Ahmadiyya Muslim community in general. This conflict was never resolved even though the existing regulations that prohibit the existence of Ahmadiyya.

Much earlier, especially since 1997, the threat of social disintegration and the disintegration of the nation as inseparable from the way this nation. Until now (2012), as if the nation has not been able to get out of the various national issues. National problems, such as: corruption, food insecurity/poverty, unemployment, thuggery, environmental pollution, ethnic conflict/ religion, terrorism, exploitation of natural resources, separatism, and others. In fact, condition, would adversely affect the process of weakening tolerance-together, the process of social disintegration and the disintegration of the nation.

A number of cases over a nation of internal threats that indicate that the threat of social disintegration and the disintegration of the nation is still the important "agenda" in the future. Each element of the nation should take an active role in accordance with the functions and responsibilities of each in improving and maintaining the nation's existence. Muslims, one of the important elements of the majority of religious plurality in the nation, has a significant role and functions and strategic as the "glue" of social integration and national integration. The threat of disintegration can also be an external threat from outside or threat to the sovereignty of the nation whose stability can be sourced from other countries, such as some cases related to the Malaysia-Indonesia border conflict.

Timo Kivimaki (2005) said, almost all the volatile region separatism (for example Aceh, Papua, Riau, Maluku), natural resources (*natural resources*) are abundant. Indicator of this province appears that the number of foreign investments per capita is one of the correlation with social conflict or potential conflict. Demands that province's independence means the area feel no longer need to share local income or revenues from sources and foreign investment with

the government of Indonesia. Obviously, this is a threat of social disintegration that gave legitimacy to the separatist struggle motivation.

As a pluralistic nation, Indonesia, on the one hand, a "blessing" and "wealth" fair grateful. On the other hand, pluralistic precisely the opposite effect, putting the nation vulnerable to the threat of social disintegration and the disintegration of the nation, as expressed Henk Schulte Nordholt and Hannemn Samuel, the following: After decades of authoritarian centralist government, Attempts to introduce political and economic change seem domed, in the face of bureaucratic sabotage, corrupt power politics, short-term opportunism, and the absence of a shared vision Widely regions of the archipelago, regional Resistance movements, The inabilityy to corruption, pessimists are inclined to classify Indonesia in the category of "messy stages". In short, they predics further disintegration, roomates may eventually lead to the breaking up of the nation-state.

Syafuan Rozi said that social conflicts occur because of the poor condition of the building of social structures cause people to be irritable with others. Frans Magnis Suseno said that at least four factors supporting social conflict in Indonesia. *First*, cultural conflicts, dealing with conflict primordial basis of religion, race, ethnicity, and region. *Second*, dealing with feelings of self-accumulation and envy. People easily provoked others and they tend to act exclusively by religious groups (ethnicity). *Third*, a behavior influenced the culture of violence in the community. *Fourth*, the New Order political system that puts military forces that tend to solve problems with mendekatan undemocratic.

Supardi Suparlan revealed that the future of Indonesia is still vulnerable to potential conflicts. Potential social disintegration resulting from the competition of individuals and groups on a variety of forms of "social resources" that uses ethnicity to strengthen the power. Influence each other will affect ethnicity as a way to gather strength and solidarity based on group, then use ethnicity in conflict to achieve a certain power. On the authority of local social structures, such as politics and ethnicity as potential damage to the social fabric and community level.

Aware of Indonesia as a pluralistic nation vulnerable to potential social conflict, the government has implemented policies ethnicity.

R. William Liddle said that the New Order government has made a number of policies such as ethnicity as the solution effort. Government reforms B.J. Habibie (1997-1999), the policy was more noticeable in the field of ethnicity, socio-cultural and political. Habibie gave the Chinese the opportunity to channel their political aspirations to establish political parties and allowed to practice the customs and culture of their ancestors. Abdurrahman Wahid (1999-2001) issued a Presidential Decree Number 6/2000 and Presidential Decree revoked Number 14/1967 on the prohibition of the practice of the customs and culture of Chinese art. Megawati Soekarnopoetri (2001-2004) reinforced the legality of the practice of the customs and culture of Chinese art. Susilo Bambang Yoedoyono regime (2004-2009 and 2009-2014) then focusing more on clarity about interethnic relations (Act PDRE) and religious harmony (PBM-KUB 9 and No. 8/2006).

As conclusion, that Bangka is just one small and also only the smallest part of Indonesia. However, models of ethnicity and social interaction between ethnic Chinese and Malays which relatively assimilative perfect level to borrow a phrase Molten M. Gordon, and tend to be "natural", has meaning and significance for the construction effort of ethnicity in a pluralistic society in Indonesia. Implementation of policies in response to the plurality ethnicity-Indonesia, as *sunnatullah*, will not be perfect and bring optimal results, if it still happens inequality sharply against the structure of socio-economic, political, cultural, and religious. Decentralization policy should have a strategic commitment and empowerment of ethnicities in the various fields of life.

Of cases ethnicity in the Pacific, at least give an important lesson for Indonesia that social integration and social harmony will be possible only when the socio-economic, political, cultural, and religious shows the balance or equilibrium in the middle of a pluralistic society in Indonesia. In addition, the plurality and social integration requires government policies that can "defend" the affirmative responses to the needs of diverse ethnicities and religions by promoting a sense of justice. This, in turn, is expected to have a positive impact on the strengthening of social integration and the integration of the nation's recently undergone a process of attenuation.

Pilgub Sumsel 2013, Etika Politik & Agenda Reformasi⁹²

Pesta demokrasi di Sumsel sebentar lagi akan dilaksanakan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah menjunjung etika politik. Karena, banyak kasus Pemilukada di berbagai daerah sering kali mengabaikan etika politik dan berakhir dengan konflik dan sengketa yang berpengaruh terhadap kualitas dan legitimasi pilkada. Karenanya, isu-isu yang tidak edukatif dan kurang 'cerdas' dalam masa kampanye selayaknya patut dihindari. Calon kepala daerah yang baik dan berkualitas sesungguhnya adalah calon yang justeru berupaya keras menjauhi dari isu-isu negatif atau 'kampanye hitam' (*black campaign*). Rakyat akan berpartisipasi dalam setiap even pemilukada karena menginginkan terpilihnya seorang pemimpin yang berkualitas agar memberi perubahan positif bagi kehidupan mereka. Yang diinginkan rakyat sebenarnya hanyalah program-program aktual dan berkualitas yang akan diimplementasikan dengan baik bila calon gubernur/wakil gubernur jika terpilih. Tidak sekedar 'janji-janji'.

Etika politik berjalan dengan sempurna apabila tata-tertib dan peraturan yang sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat berjalan dengan baik. Begitu juga peran Badan Pengawas Pemilukada (Bawaslu), dan juga berbagai elemen masyarakat, sangat menentukan dalam memperoleh kualitas Pemilukada Sumsel 2013 yang berkualitas. Sikap profesional dan independen dari kedua insitusi ini diperlukan guna kelancaran proses pelaksanaan Pemilukada Sumsel seperti diharapkan. Rakyat karenanya tidak memerlukan 'kampanye hitam' tetapi membutuhkan program-program aktual yang akan diimplementasikan. Upaya 'pembunuhan karakter' dipandang sebagai upaya 'jalan pintas' agar bisa menang dalam 'pesta' demokrasi ini. Upaya 'pembunuhan karakter' dalam perkembangannya sering kali menggunakan media teknologi, seperti *tweeter*, *facebook*, *sms* via *hand phone* tanpa identitas; selain menggunakan media lainnya, seperti sepanduk, selebaran, dan lain-lain. Mengingat tindakan-tindakan seperti ini identik dengan fitnah, dalam agama pelakunya termasuk dosa besar, maka sedapat mungkin dihindarkan. Secara sosial-politik, kampanye dengan nuansa fitnah, hanya akan menyesatkan, tidak mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat. Karenanya, calon yang baik dan cerdas tidak akan menggunakan cara-cara negatif atau fitnah, karena hal itu justeru

⁹² Tulisan penulis yang berjudul: "Pilgub Sumsel: Antara Etika Politik & Agenda Reformasi", pernah dimuat dalam *Sriwijaya Post*, 27 Mei 2013.

dapat menjadi bumerang. Menang dan kalah tetap menjadi beban. Yang diperlukan rakyat adalah solusi atas berbagai persoalan yang dipundak yang semakin berat seiring dengan perubahan sosial, melalui program-program 'jitu'.

Disadari, cara-cara 'pembunuhan karakter' dengan fitnah sering kali menjadi teknik dan strategi dari para calon pemimpin dan tim sukses pada Pemilu pada dimanapun di negeri ini. Dalam teori motif, seorang melakukan sesuatu tindakan sering kali dilatarbelakangi oleh adanya sejumlah dorongan atau motif tertentu. Motif itu sendiri itu bisa beragam tergantung persoalan dan kasus yang sedang menjadi perhatian publik. Motif bisa bersifat pribadi, gairah kelompok terhadap kekuasaan, dan lainnya. Jadi, motif yang beragam itu akan menghasilkan perilaku 'instant' atau 'jalan pintas', dan sering kadang kala dengan teknik pembunuhan karakter dan fitnah yang berupa tuduhan yang tidak mendasar. Terlepas tuduhan itu bisa benar atau salah, karena yang menuduh biasanya tidak tampak secara fisik dan tanpa identitas, fitnah itu bisa juga difahami sebagai provokatif terhadap calon lainnya. Dalam agama, karenanya, fitnah merupakan dosa besar: 'fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan'. Hal ini logis dan wajar, karena dampak fitnah itu tidak hanya merugikan nama baik seorang, tetapi juga meresahkan masyarakat, dan tidak jarang mengakibatkan korban jiwa. Secara sosial, seorang yang difitnah harus memerlukan waktu lama, bahkan bisa bertahun-tahun, untuk mengembalikan nama baiknya. Dalam agama juga, andaikan suatu yang dituduhkan memang suatu fakta dan benar, tidak boleh disampaikan berlebihan (*ghibah*).

Anehnya, dalam kenyataannya, hampir setiap 'pesta' Pemilu di negeri ini, fitnah seakan menjadi biasa dan permisif. Masyarakat pun terkesan cuek, tidak merespons, dan mungkin karena tidak berdaya. Pihak yang terkena fitnah tidak semuanya mampu membendung 'gempuran' fitnah. Sering juga calon kepala daerah justru saling fitnah untuk saling menjatuhkan. Calon yang relatif bagus dan 'bersih' pun tidak terlepas dari fitnah. Jadi, etika politik yang mengedepankan kompetisi *fair* sering kali kontradiksi dalam kontes realitas. Dampaknya, hasil Pemilu sering bermasalah dan berakhir dengan sengketa dan diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Siapapun yang dinyatakan dan diputuskan sebagai pemenang akhirnya telah dicerai oleh proses demokrasi yang sarat dengan fitnah. Hasil Pemilu karena penuh fitnah dan kecurangan

banya menghasilkan demokrasi 'semu' sebagai ekses dari adanya sejumlah pihak yang kurang *legowo* dan ikhlas menerima hasilnya. Lebih lanjut, hasil pemilukada dapat memunculkan sikap apatis bagi masyarakat terhadap even Pemilukada. Artinya, siapapun yang menang dipandang sebagai bukanlah yang terbaik karena melalui cara yang jauh dari etika politik, akhlak mulia, karena tidak 'siap kalah' dan hanya 'siap menang'. Kenyataan seperti ini, tentunya, bisa terjadi adanya proses re-konstruksi sosial-politik di negeri ini, dimana sistem dan prilaku elit politik belum sepenuhnya memberi pencerahan dan pencerdasan. Karenanya, mengharapkan iklim dan nuansa politik yang beretika dan demokratis, rasanya memang masih perlu waktu panjang.

Disadari, proses demokratisasi di negeri masih terlalu muda, sejak 15 tahun lalu, sejak 1998. Walaupun, alibi dan alasan usia demokrasi masih terlalu muda, agaknya tidak terlalu relevan, mengingat *founding fathers*, sejak awal sudah meletakkan dasar filosofis berbangsa yang termaktub dalam sila-sila Pancasila, dan pentingnya demokrasi sesungguhnya. Sila pertama, meletakkan landasan demokrasi yang mengedepankan nilai ketuhanan, Sang Khalik, Allah SWT. Nilai-nilai ketuhanan dalam masyarakat pluralistik-Indonesia telah mengajarkan semua agar mengedepankan sifat-sifat Sang Khalik yang penuh kasih-sayang dan cinta keberagaman. Sifat dan prilaku kasih-sayang dalam berbangsa dan bernegara terlihat dari sejauhmana kualitas kepedulian sesama dalam berbangsa dan bernegara. Sila kedua, mengajarkan setiap elemen bangsa agar berprilaku adil dan menghargai sesama dan tanpa diskriminatif terhadap siapapun.

Sila ketiga, pentingnya mengedepankan persatuan. Dapat dimaknai bahwa segala tindakan individu, kelompok, masyarakat, hendaklah mengedepankan kepentingan NKRI. Prilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, sangat mementingkan individu dan kelompok, karenanya sangat kontradiksi dengan nilai persatuan. Sila keempat, musyawarah, dimana dalam setiap perbedaan pandangan, mengedepankan musyawarah, tidak bertindak 'menghakimi sendiri'. Banyak kasus di negeri ini, terutama pada era-Reformasi ini, justeru memunculkan *chaos*, konflik sosial, karena merosotnya humanisme, disisi lain, adanya peran negara yang minimal. Sila kelima, keadilan sosial bagi masyarakat dalam menikmati proses dan hasil pembangunan tanpa terkecuali. Faktanya, terdapat banyak kasus

bertalian ketidakadilan ini, yang masih dirasakan masyarakat, seperti kasus 'perbudakan' buruh, kasus 'perbudakan' TKI, yang patut menjadi renungan.

Realitas kehidupan masyarakat membutuhkan keberpihakan dari semua pihak, terlebih para elit pemimpin yang memperoleh legitimasi dari rakyat. Disinilah, sesungguhnya esensi pentingnya program-program aktual yang harus dimunculkan dan diakualisasikan dalam prioritas program kebijakan dari para elit yang diamanahkan sebagai 'penguasa'. Mutu dan kualitas program para calon Gubernur/Wakil Gubernur Sumsel terletak pada sejauhmana isu-isu aktual dapat diramu dan dijadikan program pembangunan lima tahun mendatang. Hasil Survei *Kompas* (2013), baru-baru ini, tentang implementasi Agenda Reformasi 1998 menunjukkan bahwa dimana hanya dua dari sembilan item tuntutan Reformasi belum terimplementasi dengan baik dan belum sepenuhnya memuaskan rakyat. Jika, hasil survei ini merupakan juga gambaran tentang implementasi agenda Reformasi di daerah, sejogyanya para kepala daerah atau calon kepala daerah menempatkan agenda Reformasi sebagai rujukan program kerja yang patut dipertimbangkan untuk dilaksanakan jika terpilih nantinya. Jika merujuk hasil survei tentang implementasi tuntutan agenda Reformasi 1998, ternyata secara nasional belum terimplementasi masih banyak item yang belum memuaskan alias 'gagal'.

Antara Pemilukada dan Agenda Reformasi karenanya tidak dapat dipisahkan. Sukses tidaknya pembangunan di daerah salah satu tolak ukurnya terletak pada sejauhmana para pemimpinnya *concern* terhadap isu-isu Reformasi pada level lokal yang belum terealisasi. Boleh jadi, suatu daerah sudah maju dalam item-item tuntutan tertentu dari agenda Reformasi, akan tetapi bisa saja belum optimal pada sejumlah tuntutan Reformasi lainnya. Karenanya, para calon elit pemimpin di daerah, termasuk menjelang Pilgub di Sumsel terasa urgen bila merujuk pada sejumlah item tuntutan Reformasi di daerah yang telah maupun belum dilaksanakan. Program Reformasi merupakan aspirasi rakyat totalitas yang menjadi 'ruh' munculnya era-Reformasi itu sendiri. Memprioritaskan tuntutan Reformasi dalam agenda dan program calon pemimpin pada Pilgub Sumsel 2013 sama halnya dengan membela kepentingan dan aspirasi rakyat. Jalan menuju masyarakat Sumsel unggul, aman, dan sejahtera, dalam lindungan-Nya pun semakin terbentang. Akhirnya, kita semua

percaya bahwa siapapun yang terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Sumsel 2013-2018 nantinya merupakan pengembalian amanah dalam menjalankan program dan 'janji-janji' yang disampaikan selama dalam kampanye.

Konflik Negara: Malaysia-Indonesia⁹³

Setiap kasus konflik dengan negara *jiran*, antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia sering berada pada posisi lemah. Sebelumnya, sebanyak 10 kali Indonesia melayangkan nota protes terhadap Malaysia, tidak satu pun ditanggapi dengan serius. Kasus *Ligitan-Sipadan*, tindakan provokatif kapal perang tentara Diraja Malaysia di *Ambalat*, dan ditangkapnya tiga petugas KKP oleh tentara Diraja Malaysia, diplomasi Indonesia tetap pada posisi lemah. Menyikapi kasus petugas KKP ini, Indonesia pun mengirim nota protes terhadap pemerintah Malaysia, tetapi kurang ditanggapi dengan memuaskan pula. Dua hari setelah kejadian, tiga petugas KKP dibebaskan bersamaan dengan tujuh nelayan Malaysia. Proses pembebasan itu telah menimbulkan protes dari sejumlah kalangan dalam negeri karena dipandang sebagai "barter" dengan 7 nelayan Malaysia yang dapat melecehkan martabat bangsa Indonesia. Menlu RI, Marthy Legawa, membantah proses pembebasan tersebut sebagai "barter". Akankah kasus konflik bilateral Indonesia-Malaysia ini dapat direduksi ke depan?

Fakta sosial-politik menunjukkan bahwa setiap kasus yang terjadi bertalian dengan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, Indonesia selalu pada pihak yang paling reaktif dan kurang pro-aktif mengupayakan solusi substantif. Dalam banyak kasus hubungan bilateral itu selalu berakhir dengan kekecewaan Indonesia. Sejumlah ormas dan demonstran pun melakukan unjuk rasa di depan Kedutaan Malaysia dan di sejumlah daerah. Di sisi lain, pemerintah terkesan kurang bertindak akurat dan cepat. Untuk kasus penangkapan petugas KKP, politisi Senayan pun terkesan hanya bisa menggertak dengan merencanakan untuk melakukan interplasi terhadap pemerintah. Tindakan emosional dan terkesan reaktif dari sejumlah elemen bangsa ini agaknya bukanlah sebagai solusi yang substantif dan prospektif. Beda halnya, bagi pemerintah dan warga Malaysia, dalam sejumlah kasus itu, memperlihatkan tidak terlalu reaktif,

⁹³ Tulisan penulis yang berjudul "Mereduksi Konflik Negara: Malaysia-Indonesia" pernah dimuat dalam *Berita Pagi*, 2 September 2010.

Adapun mengapa banyak yang tidak mengetahui jika ada suatu konflik
tersebut dengan hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia.

Tapi untuk kasus kali ini, yakni kasus penangkapan perompak
KPK oleh tentara Angkatan Laut Malaysia, telah menimbulkan reaksi balik dari
Malaysia yang disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia bahwa
dikatakan "Malaysia sudah kehilangan keabadian". Meskipun
dikatakan, bahwa Malaysia sudah menunjukkan kepriawayan dalam
kegiatan, dimana yang siap berunding tentang batas laut kedua
negara. Menyatakan bahwa Malaysia yang pernah dan tetap itu, sebagai
tanda adanya reaksi sukai Malaysia terhadap Indonesia, terutama
karena adanya pembunuhan beberapa Malaysia dan perompakan
karena terhadap kedutaan Malaysia di Jakarta. Aksi serangan balik
dan sikap yang pemerintah Malaysia terhadap Indonesia pun terlihat
pada sejumlah komentar yang ada di Twitter, dimana lagi ini
demonstrasi juga pun diarahkan bahwa yang harusnya melakukan. Merasa
juga berwujud rasa di kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur.
Hal ini dapat menimbulkan pengetahuan bahwa konflik yang dapat
mempertahankan hubungan diplomatik kedua negara serumpun ini ke
depan.

Jika konflik ini terus berlanjut dan sudah konflik hubungan
bilateral Indonesia-Malaysia terus memuncak, tidak mustahil akan
berlangsung terus selanjutnya terhadap kedua negara dalam berbagai
konteks dan dimensi kehidupan. Tetapi, dalam kalkulasi kasar, ke-
dua Indonesia akan lebih dirugikan. Misalnya, pada bidang sosial-
ekonomi, Indonesia memiliki jumlah TKI sangat besar, sekitar 1,2 juta
orang, yang sangat berarti dalam mengurangi jumlah pengangguran
dan sebagai sumber devisa negara. Adanya ketegangan-tengangan Indonesia
yang lebih besar terhadap Malaysia, artinya telah meyakinkan
kemahnya posisi tawar-diplomasi. Tidak mengherankan jika sejumlah
netas protes Indonesia terkesan selalu tidak dijawab Malaysia. Di lain
semananya, telah terjadi suatu hubungan yang asimetris antara kedua
negara-jiran ini, dimana Malaysia cenderung memengaruhi posisi lebih
kuat (superordinate) dan Indonesia memengaruhi posisi yang lemah
(subordinate). Hubungan asimetris ini akan menyulitkan posisi
diplomasi Indonesia dan Malaysia.

Selama era Reformasi (1998-sekarang) posisi tawar-diplomasi
Indonesia cenderung mengalami kemunduran. Lemahnya posisi
tawar-diplomasi RI ini sebetulnya tidak selalu diformulasikan oleh adanya

bahkan warganya banyak yang tidak mengetahui jika ada suatu konflik bertalian dengan hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia.

Tapi, untuk kasus kali ini, yakni kasus penangkapan pertugas KKP oleh tentara Diraja Malaysia, telah memancing reaksi balik dari Malaysia yang disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia bahwa dikatakan "Malaysia sudah kehilangan kesabaran". Meskipun demikian, Menlu Malaysia sudah menunjukkan kepiawaian dalam berdiplomasi, dimana tetap siap berunding tentang batas laut kedua negara. Pernyataan Menlu Malaysia yang piawai dan tegas itu, sebagai tanda adanya reaksi jengkel Malaysia terhadap Indonesia, terutama karena adanya pembakaran bendera Malaysia dan pelemparan kotoran terhadap kedutaan Malaysia di Jakarta. Aksi serangan balik dan unjuk gigi pemerintah Malaysia terhadap Indonesia pun terlihat pada sejumlah komentar warganya di *facebookers*, dimana lagu Indonesia Raya pun diubah baitnya yang bernada melecehkan. Mereka juga berunjuk rasa di Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur. Hal ini dapat menimbulkan meningkatnya suhu konflik yang dapat memperburuk hubungan diplomatik kedua negara serumpun ini ke depan.

Jika kondisi ini terus dibiarkan dan suhu konflik hubungan bilateral Indonesia-Malaysia terus memuncak, tidak mustahil akan berdampak buruk selanjutnya terhadap kedua negara dalam berbagai konteks dan dimensi kehidupan. Tetapi, dalam kalkulasi kasar, bisa saja Indonesia akan lebih dirugikan. Misalnya, pada bidang sosial-ekonomi, Indonesia memiliki jumlah TKI sangat besar, sekitar 1,4 juta orang, yang sangat berarti dalam mengurangi jumlah pengangguran dan sebagai sumber devisa negara. Adanya ketergantungan Indonesia yang lebih besar terhadap Malaysia, agaknya telah menjadikan lemahnya posisi tawar-diplomasi. Tidak mengherankan bila sejumlah nota protes Indonesia terkesan selalu tidak digubris Malaysia. Di sini sebenarnya, telah terjadi suatu hubungan yang asimetris antara kedua negara jiran ini, dimana Malaysia cenderung menempatkan posisi lebih kuat (*superordinate*) dan Indonesia menempatkan posisi yang lemah (*subordinate*). Hubungan asimetris ini akan menyulitkan fungsi diplomasi Indonesia dan Malaysia.

Selama era Reformasi (1998-sekarang) posisi tawar-diplomasi Indonesia cenderung mengalami kemunduran. Lemahnya posisi tawar-diplomasi RI ini sebetulnya tidak selalu ditentukan oleh adanya

kualitas pejabat terkait (Menlu) semata, tetapi, sejumlah faktor lain ikut melemahkan patut menjadi perhatian. Ketika Malaysia terus dan konsisten mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan, Indonesia justru disibukkan dengan isu-isu sosial dan konflik dalam negeri yang tidak produktif yang melemahkan untuk mewujudkan agenda reformasi.

Berbagai konflik internal berbangsa berdampak buruk terhadap realisasi agenda reformasi itu. Berbagai bentuk konflik sosial terus terjadi, baik horizontal maupun vertikal. Konflik horizontal, seperti kerusuhan antaretnis, agama, konflik internal agama/aliran sesat, konflik batas wilayah, konflik antardesa/kampung, kriminal, dan premanisme. Konflik vertikal, seperti separatisme, perampokan bank, ancaman terorisme, tabung gas yang menewaskan banyak orang, Bank Century, pengusuran pemukiman, eksploitasi kekayaan alam oleh bangsa asing, pencurian kekayaan laut, dan pertikaian elit politik. Baik konflik horizontal maupun vertikal telah menyita banyak energi berbagai elemen bangsa. Dampaknya, agenda reformasi pun dilaksanakan kurang fokus dan tidak efektif, misalnya belum optimalnya: prestasi pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum, memperoleh pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, dan meningkatnya penduduk miskin. Malaysia memperlihatkan keadaan sebaliknya, dimana kesejahteraan ekonomi masyarakat terus meningkat, kemudahan akses pendidikan, angka korupsi dapat diminimalisasi, dan terjaganya stabilitas negara.

Buruknya kondisi internal bangsa Indonesia, berdampak buruk terhadap peran dan kualitas diplomasi. Pada era Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia dikenal memiliki diplomasi yang patut disegani di level internasional, dimana ketika itu dikenal dengan nama menteri luar negeri yang piawai berdiplomasi, antara lain Adam Malik dan Mochtar Kusumaatmadja. Tentu, kualitas diplomasi Indonesia ketika itu bukan hanya karena kualitas, integritas dan kompetensi individu mereka semata, tetapi, kondisi internal berbangsa yang patut menjadi contoh dan disegani bangsa lain. Ketika itu, Malaysia pun, dalam banyak tertentu, belajar dengan Indonesia. Kini, kondisi memperlihatkan sebaliknya, tidak berlebihan kiranya, dalam banyak hal pula, Indonesia perlu belajar dengan Malaysia.

Suatu hipotesis pun muncul mengapa Indonesia tidak berani bertindak tegas terhadap Malaysia dalam berbagai kasus bilateral.

Meskipun Indonesia dan Malaysia mengalami kemerdekaan pada tahun yang tidak terlalu jauh berbeda, (1945 dan 1957), Malaysia lebih fokus terhadap program pembangunannya, terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Suatu kebijakan yang sangat populer dilakukan mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad, yang dikenal dengan program *Affirmative Action* pada 1970-an, telah berdampak positif terhadap kemajuan Malaysia. Memang pada awalnya kebijakan itu mendapat protes dari kalangan Non-Boemi Poetra Malaysia karena dianggap diskriminatif. Akan tetapi, program itu telah mampu memperbaiki kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Malaysia, terutama mengangkat martabat orang Melayu, sehingga sentimen etnis dan agama kemudian dapat direduksi sedemikian rupa. Adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi orang Melayu dan orang Non-Melayu (Cina, India) berdampak positif terhadap proses penguatan integrasi sosial dan integrasi bangsa Malaysia, sebagai bangsa multietnis dan agama.

Kuatnya fondasi ekonomi Malaysia sejak 1970-an, menjadikan Malaysia mampu mengendalikan krisis ekonomi. Ekspansi ekonomi Malaysia juga dapat dilihat dari investor kelapa sawit asal Malaysia di Indonesia. Hal ini berdampak positif bagi Indonesia dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Dalam bidang teknologi-otomotif, Malaysia mengalami kemajuan berarti, seperti mobil jenis Proton, dimana agen penjualan, *showroom*, telah tersebar di sejumlah daerah Indonesia. Dalam bidang pendidikan, tidak sedikit mahasiswa Indonesia menuntut ilmu di Malaysia, yang diperkirakan sebanyak 4 ribuan orang. Sejak 1970-an, Malaysia tetap konsisten memberi beasiswa kepada mahasiswanya, terutama anak-anak orang Melayu untuk kuliah ke luar negeri, seperti ke Indonesia, Australia, Amerika, dan Inggris. Kini, universitas-universitas di Malaysia pun memiliki sistem, manajemen, dan fasilitas kelas dunia dan beberapa diantaranya berkualitas internasional. Dalam bidang perdagangan, Malaysia pun dikabarkan sedang membangun pelabuhan laut bertaraf internasional sebagai antisipasi kebutuhan perdagangan global.

Apa yang diungkapkan diatas, hanya sebagian pengetahuan yang dapat diketahui. Barangkali, lebih banyak lagi tentunya kelebihan positif Malaysia yang patut diperhitungkan. Contoh sederhana lainnya, dalam bidang seni budaya, film kartun anak-anak, Upin-Ipin, sangat diminati anak-anak Indonesia. Film kartun Si Unyil pun terkesan tidak mampu bersaing dan keberadaannya mulai

ditinggalkan pemirsa anak-anak karena miskin inovasi cerita dan teknologi. Ketika Malaysia memiliki batik dan seni budaya yang sama dengan budaya Indonesia, dengan alasan sebagian penduduk Malaysia memang berasal dari berbagai etnis Indonesia, telah memprovokasi bangsa Indonesia untuk bertindak reaktif terhadap Malaysia. Seharusnya, mungkin suatu pelajaran positif yang perlu diperhatikan bahwa bangsa Malaysia memang kreatif dan proaktif.

Potensi konflik antara Malaysia dan Indonesia ke depan sangat mungkin masih terjadi. Hal itu tergantung cara menyikapinya, baik melalui peran diplomasi politik kedua negara maupun melalui pendekatan persuasif-emosional sebagai bangsa serumpun. Bagi Indonesia ke depan, agar potensi konflik bilateral Indonesia dan Malaysia dapat direduksi, agaknya akan lebih baik bila berupaya memahami mendalam dan empiris tentang akar persoalan yang mungkin akan masih terjadi. Persoalannya, barang kali terlalu banyak hal yang dimiliki Malaysia yang justru tidak dimiliki Indonesia.

Konflik SARA di Asia: Belajar dari Indonesia⁹⁴

Di banyak negara Asia, etnis minoritas kerap kali mengalami “nasib” tidak beruntung, bahkan cenderung mengalami diskriminasi dan penindasan, baik secara fisik maupun mental. Bangsa Asia, sebenarnya, senang mengklaim sebagai bangsa yang, beragama, beradab, dan mengedepankan sopan-santun. Kontrasnya, dalam konteks mengelola hubungan mayoritas-minoritas (etnis dan agama) justru sering kali memperlihatkan perilaku ganda atau hipokrit, yakni bagus di permukaan tetapi buruk di dalam (negeri). Dalam praktiknya, baik tidak sengaja ataupun *by design*, perilaku hipokrit itu tampak justru tidak beradab dan tidak manusiawi, ditutup-tutupi, dengan berbagai dalih dan alibi. Bila kondisi pengelolaan konflik terhadap etnis dibiarkan, kasus terkini pada etnis Rohingya, Myanmar, semakin banyak etnis minoritas menjadi korban. Oleh karena itu, dunia mengecam perilaku biadab terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya. Indonesiapun akan mengirimkan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, sebagai mediator atau negosiator Indonesia untuk membantu mengatasi masalah internal Myanmar itu. Mengapa perlu belajar dari Indonesia?

⁹⁴ Artikel tulisan penulis yang berjudul: “Konflik SARA di Asia: Belajar dari Indonesia” pernah dimuat di *Sriwijaya Post*, 13 Nopember 2012.

Pada era globalisasi, agaknya, bangsa-bangsa Asia, yang kurang efektif dalam mengelola etnisitas, tidak bisa ditutupi lagi. Sebagai contoh, penindasan dalam kapasitas berbeda (dari pelanggaran dan kekerasan ringan hingga berat) terhadap etnis minoritas muslim di negara-negara Asia: China (Uighur), Thailand (Pattani), Filipina (Mendanao), dan Myanmar (Rohingya), dengan mudah diperlihatkan masyarakat global dengan cepat. Jadi, kalau selama ini kekerasan dan penindasan etnis minoritas di negara-negara Asia, kini, dengan saluran teknologi (internet, tv, dan media massa), dengan cepat dapat diketahui penduduk dibelahan dunia lainya.

Permasalahan konflik etnisitas di Asia faktanya tidaklah homogen tetapi heterogen. Tiap negara yang bermasalah dengan penanganan etnis minoritas memiliki latar belakang permasalahan etnisitas berbeda, sehingga memerlukan pendekatan dan metode penanganan berbeda pula. Penanganan konflik etnisitas tidak jarang memerlukan proses waktu panjang. Indonesia, misalnya, dalam menangani permasalahan etnisitas pribumi dan keturunan Cina/Tionghoa tidak cukup hanya dilakukan dalam satu era pemerintahan. Orde Lama, Orde Baru, Reformasi (sejak 1998). Pendekatan dan kebijakan beragam, terutama bertalian dengan sosio-historis, politik, ekonomi, dan budaya. Ternyata, harus diakui, sudah membawa hasil yang lebih baik, tetapi belum optimal. Bayangkan, tanpa adanya kebijakan serius dari pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi tentang etnisitas, bisa saja, keadaan hubungan minoritas-mayoritas akan lebih buruk di kemudian hari. Ke depan, suatu pendekatan komprehensif, prospektif, dan efektif dalam penanganan etnisitas—demi kepentingan etnis mayoritas dan minoritas—sangat diharapkan agar ke depan, Indonesia sebagai bangsa demokratis-pluralistik benar-benar menjadi kenyataan.

Tanpa memperhatikan beragam permasalahan etnisitas secara komprehensif, suatu kebijakan kurang berarti signifikan. Karena permasalahan etnisitas tampak sensitif, karena menyangkut hak hidup manusia dalam kelompok berbeda. Sebenarnya, Indonesia, sangat diuntungkan karena para *founding fathers* menempatkan pluralitas bangsa dalam ideologi bangsa, Pancasila, dan UUD 1945. Oleh sebab itu, begitu banyak kebijakan politik, ekonomi, dan budaya, dalam perjalanan bangsa Indonesia tetap harus merujuk pada kepentingan NKRI. Lebih dari itu, pemahaman sosio-historis hubungan etnis minoritas-mayoritas sehingga memunculkan suatu

kebijakan sangat penting. Hal itu dikarenakan, tanpa memahami konteks masa lalu, terkini, dan ke depan, dikhawatirkan suatu kebijakan tidak berarti penting kecuali hanya sebatas "arsip" dokumen undang-undang/peraturan.

Adanya undang-undang anti diskriminasi beberapa tahun lalu, misalnya, dipandang berarti karena kurang memperhatikan konteks aktual: sosio-historis, ekonomi, dan budaya. Secara politik, DPR hanya mampu membuat undang-undang tetapi tidak membawa perubahan berarti dalam konteks hubungan minoritas-mayoritas dalam makna sesungguhnya. Selagi angka kemiskinan masih tinggi, sementara sejumlah personal dari etnis minoritas tertentu misalnya sering dikaitkan dengan berbagai kasus besar di negeri ini, kecemburuan akan muncul dan berkembang dengan sendirinya. Undang-undang anti diskriminasi produk politik DPR itu tidak bermakna apa-apa, karena realitas berkata lain: kemiskinan berpihak kepada mayoritas, korupsi dimana-mana, kerusuhan sosial, dan lain-lain. Barangkali, kasus sentimen SARA dalam Pemilu 2012, sebenarnya argumen empiris bahwa permasalahan etnisitas masih sensitif di tanah air. Sejarah gelap hubungan mayoritas-minoritas selama penjajahan kolonial hingga memasuki era kemerdekaan tentunya tidak hilang begitu saja dari imajinasi sebagian masyarakat Indonesia.

Pelajaran penting dari Indonesia untuk Asia dalam penanganan SARA di Asia adalah konsisten dan komitemen. Konsisten, lebih diartikan adanya sejumlah kebijakan pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi dalam penanganan persoalan etnisitas. Dalam literatur-kepuustakaan, banyak sekali kebijakan yang telah dilakukan pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru dalam menangani permasalahan minoritas-mayoritas di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat berupa peraturan pemerintah maupun undang-undang. Hanya saja, memasuki era-Reformasi kebijakan lebih sedikit dan terkesan nuansa politiknya sangat tinggi, yang berarti tidak komprehensif dan substansial. Undang-undang anti diskriminasi misalnya tidak sepenuhnya kontekstual dan melemahkan mayoritas.

Apa ukuran diskriminasi? Simpson dan Yinger (1972), dalam bukunya *Racial dan Cultural Minorities: An Anaylisis of Prejudice and Discrimination*, mengungkapkan sejumlah karakteristik

kelompok minoritas. *Pertama*, kelompok minoritas merupakan suatu bagian dari masyarakat (negara) lebih kompleks. *Kedua*, kelompok minoritas memiliki ciri-ciri melemahkan anggapan terhadap diri sendiri (*self-esteem*). *Ketiga*, kelompok minoritas merupakan kelompok memiliki kesadaran kelompok tinggi, tumbuh karena masing-masing anggota memiliki sejumlah ciri khusus yang sama, baik ciri-ciri menguntungkan atau merugikan. *Keempat*, keanggotaan kelompok dalam minoritas dapat merugikan generasi selanjutnya walaupun tidak tampak lagi ciri-ciri fisik atau budaya yang menonjol. *Kelima*, anggota kelompok minoritas, baik karena pilihan sendiri atau karena kebutuhan memiliki kecenderungan kawin dengan orang dari kelompok sendiri.

Jika karakteristik kelompok minoritas pola Simpson dan Yinger dihubungkan dengan karakteristik minoritas keturunan (Cina/Tionghoa) di Indonesia, agaknya kurang relevan. Karena, etnis keturunan Cina/Tionghoa umumnya memiliki sejumlah kelebihan dan keistimewaan dibandingkan kelompok mayoritas pribumi. *Image* terhadap keturunan Cina memiliki kemampuan dalam bidang sosial ekonomi merupakan suatu karakteristik tambahan bagi mereka sebagai minoritas. Tetapi, untuk menganalisis pola karakteristik Simpson dan Yinger ini untuk sejumlah etnis minoritas, baik di negara maju maupun negara berkembang seperti di negara Asia lainnya, banyak relevannya.

Karakteristik etnis keturunan Cina/Tionghoa di Indonesia, dalam persepsi dan *image*, terutama dalam aspek ekonomi cenderung lebih dominan, sebetulnya tidak terlepas dari "kearifan" setiap era pemerintahan. Perhatian setiap era-pemerintahan (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi) dalam usia ke-67 kemerdekaan Indonesia patut diapresiasi. Suatu bangsa pluralistik dengan multi-etnis (pribumi-migran), multi-agama, multi-budaya, dan multi-bahasa lokal, tentunya tidaklah mudah dan merupakan kerja besar dalam mengelola etnisitas menjadi suatu kekuatan bersama dalam NKRI. Karena, setiap zaman dan era pemerintahan mengalami suasana dan nuansa berbeda serta memerlukan pendekatan dinamis dalam penanganan etnisitas. Dalam perkembangannya, masalah etnis tidak hanya sekedar identitas/asal usul dan agama/keyakinan, tetapi juga, sudah menyangkut etnisitas dan globalisasi. Misalnya, seorang koruptor kelas kakap yang kebetulan berasal dari etnis keturunan tertentu yang lari ke negara tertentu dan terkesan dilindungi di negeri

itu. Hal ini, juga menjadi "pengganggu" dalam hubungan etnis minoritas mayoritas. Oleh sebab itu, institusi penegak hukum harus lebih serius dalam menangani persoalan koruptor seperti ini karena akan berdampak pada intensitas kualitas pembinaan etnisitas di tanah air.

Agaknya, Indonesia, tidak hanya negara yang terdepan, tetapi juga suatu negara yang telah sangat teruji dan paling berkomitmen dalam mengelola manajemen etnisitas. Amerika sekalipun masih bermasalah dengan hubungan etnisitas: ras kulit putih-kulit hitam. Kanada (etnis Indian) dan Australia (etnis Aborigin) juga masih menempatkan etnis minoritas tersebut sebagai penduduk "kelas dua" seperti halnya dialami pribumi Indonesia ketika masih dibawah penjajah kolonial Belanda: migran Timur Asing (India, Arab, dan Cina) lebih tinggi status kelasnya dibandingkan pribumi, yakni sebagai *inlander*. Justeru, dengan kearifan elit bangsa ini, kebijakan dan peraturan yang dibuat pada akhirnya untuk membina dan memberdayakan masyarakat Indonesia pluralistik yang relatif tanpa membedakan latar belakang etnisitas dan primordial.

Hal ini, kontras jauh dengan realitas kehidupan kelompok etnis minoritas di banyak negara Asia. Di Thailand, Philipina, Myanmar, dan China kondisi kehidupan etnis minoritas Cina cenderung mengalami sikap represif pemerintah dan tidak jarang menagalami penindasan fisik dan mental. Bahkan, untuk kasus Rohingya, sikap represif pemerintah lebih mengarah pada malapetaka kemanusiaan, pembunuhan masal (*genocide*). Di Philipina dan Thailand pejuang etnis minoritas muslim menuntut kemerdekaan karena tidak tahan akan sikap represif pemerintah. Di Cina, etnis minoritas muslim Uighur mendapat tekanan represif dari pemerintah Cina, seperti dilarang berpuasa. Hal ini, agaknya karena belum adanya suatu kebijakan pemerintah sebagai penguasa, *superordinate*, dalam mengelola etnisitas yang dalam realitasnya berabad-abad sudah eksis, sebagai bangsa multi-etnis. Jika ingin menghindari tragedi kemanusiaan: penindasan dan bahkan *genocide* di negara-negara Asia itu, tidak ada pilihan lain, kecuali mengelola etnisitas dengan baik, tulus, konsisten, dan komitmen. Karena yang diurus merupakan atribut etnis berupa manusia, memang harus sabar dan perlu waktu lama dalam menunggu hasilnya. Untuk itu, dengan plus-minusnya, bangsa Asia bermasalah dengan etnisitas pantas "belajar" dari Indonesia dalam pengelolaan etnis.

Primordialisme dan Pemilukada 2008⁹⁵

Pemilukada Sumsel 2008 memang akan berlangsung masih sekitar satu tahun lebih, tetapi nuansa dan wacana politik tentang hal itu mulai dirasakan. Dalam rangka pelaksanaan Pemilukada Sumsel 2008, agaknya akan semakin menarik karena diperkirakan sejumlah putra terbaik bangsa terutama yang berasal dari daerah ini akan berpartisipasi dan berkompetisi untuk memperebutkan posisi-posisi penting di Sumsel, baik sebagai Walikota, Bupati, Gubernur maupun Wakil Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Gubernur. Mereka tentunya berharap sekali menjadi calon yang sukses menjadi pemimpin di daerah yang menjadi obsesi dan cita-citanya. Untuk meraih sukses itu sangat disadari bukanlah mudah, karena dari sekian banyak pasangan calon nantinya hanya satu pasangan yang akan terpilih. Sukses tidaknya seorang calon dalam kompetisi itu ditentukan oleh jumlah suara sah terbanyak yang diberikan oleh pemilih atau masyarakat.

Perjuangan dan proses memperoleh suara terbanyak itu bukanlah mudah karena setiap individu pemilih dan masyarakat memiliki persepsi, keinginan, dan pilihan tersendiri tentang calon pemimpinnya. Apalagi setiap masyarakat pada umumnya bercirikan pluralistic atau majemuk. Sama halnya dengan masyarakat Sumatera Selatan tampak heterogen berdasarkan agama, etnis, dan ras. Oleh sebab itu, pendekatan primordialisme dan etnisitas, agaknya masih menjadi salah satu pendekatan yang patut diperhitungkan pada pesta demokrasi atau pemilukada nanti. Selain itu, untuk meraih sukses, setiap calon pasangan perlu juga memiliki beberapa persyaratan-persyaratan lain yang tak tertulis. Misalnya, seorang calon perlu memiliki partai politik yang mengusungkannya sebagai calon, memiliki kemampuan keuangan/ekonomi yang memadai untuk membiayai keperluan teknis operasional menjelang dan masa kampanye, memiliki jaringan social dengan berbagai kalangan elit, seperti dengan elit agama, elit masyarakat, elit pengusaha dan elit militer. Selain itu, setiap pasangan calon perlu pula memiliki integritas moralitas, kepribadian dan intelektual, dan sehat jasmani-rohani yang menjadi standar aturan berlaku secara resmi maupun berdasarkan norma dan nilai dalam masyarakat.

⁹⁵ Tulisan penulis yang berjudul: "Primordialisme dan Pemilukada 2008", pernah dimuat di *Sumatera Ekspres*, 15 Maret 2008.

Persyaratan demikian memang terkesan terlalu ideal, tetapi bukan mustahil ada calon pasangan pemilukada yang memiliki kriteria demikian. Paling tidak, dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria demikian, seorang calon pasangan dapat menimbang-nimbang apakah akan maju berpartisipasi atau sebaliknya. Belajar dari pengetahuan dan pengalaman sehari-hari para pemilih akan semakin rasional dan selektif dalam memilih calon pemimpinnya. Mereka sudah semakin cerdas dan tidak mau lagi terlalu terbuai dengan janji-janji muluk tetapi miskin aplikasi. Hanya calon pasangan yang akan membawa harapan, perubahan dan kesejahteraan orang kecil dan lemah diperkirakan akan memiliki peluang besar meraih suara terbanyak. Karena, mayoritas masyarakat kita tinggal di desa-desa dengan standar kehidupan social-ekonomi yang rendah.

Seorang calon pasangan pemimpin selanjutnya perlu memiliki kekuatan politik dimana ada partai politik yang tertarik untuk mengusungkan dirinya menjadi calon. Sejak dini, sudah ada beberapa partai yang dengan transparan mengusungkan nama-nama calon pemimpin ke depan di Sumsel pada pemilukada 2008, baik nama calon dari internal maupun eksternal partai. Seorang calon pasangan pemimpin juga perlu memiliki kemampuan keuangan/ekonomi yang memadai, terutama untuk membiayai keperluan teknis-operasional untuk sosialisasi sebagai calon menjelang dan selama kampanye. Seorang calon pasangan pemimpin yang sudah mapan dalam keuangan/ekonominya diperkirakan akan berpeluang lebih besar menjadi calon yang *legitimate* dan dipilih masyarakat.

Masyarakat/pemilih cenderung memilih pemimpin yang telah mapan ekonominya dikarenakan yang bersangkutan akan lebih kecil peluangnya untuk melakukan penyimpangan selama bertugas. Tenaga, waktu, dan kemampuannya diharapkan lebih banyak dicurahkan untuk pengabdian pada negara dan kepentingan masyarakat dalam arti sebenarnya. Dipastikan, seorang calon pasangan yang sudah mapan ekonominya akan memiliki daya jual yang tinggi dalam pandangan pemilih. Apalagi jumlah penduduk miskin di Sumsel masih tergolong tinggi. Data BPS (2007) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Sumsel 6,9 juta hingga 7 juta jiwa dan dari jumlah tersebut terdapat 1.1.652.000 orang (23,6%) merupakan penduduk miskin.

Seorang calon pasangan pemimpin dituntut pula untuk memiliki jaringan social dengan sejumlah elit. Setiap elit formal dan informal memiliki pengikut setia yang dapat mempengaruhi kemana arah pilihan kolektif. Seorang Kiyai yang menjaga idealism dan berpengaruh misalnya, akan memiliki pengaruh langsung maupun pemimpinnya. Sama halnya dengan seorang elit militer, akan memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung pula tentang calon pemimpin bagi bawahannya, kendatipun tidak diungkapkan dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Seorang elit petani dan nelayan juga demikian, mereka memiliki persepsi dan pandangan tertentu dalam hal pilihan calon pemimpinnya. Karena itu, seorang calon pemimpin dituntut untuk lebih cerdas dalam memahami keinginan dan kebutuhan beragam masyarakat sehingga dapat meraih simpatik yang sebenarnya dari masyarakat.

Selain itu, latar belakang primordialisme dan etnisitas calon pemimpin dapat pula menentukan besar kecilnya dukungan suara dalam pemilukada. Suatu fenomena menarik di Sumsel bahwa dalam dua tahun terakhir dengan terbentuknya berbagai forum/paguyuban etnis-kedaerahan. Sebagian pengamat meyakini bahwa motivasi terbentuknya paguyuban kedaerahan dan etnis itu sebenarnya tidak hanya didasarkan motivasi kepentingan ukhuwah dan silaturahmi sesama etnis tetapi lebih dimotivasi oleh politik primordialisme. Hal ini merupakan suatu hal yang sah-sah saja, karena dukungan politik dari suatu etnis asal seorang calon merupakan suatu yang positif sebagai modal dasar suara diperoleh.

Hal itu difahami dengan baik mengingat mata pilih pada pemilukada berasal dari berbagai etnis-etnis pribumi atau etnis keturunan yang patut diperebutkan oleh calon pasangan pemilukada. Etnis Cina (Tionghoa) keturunan misalnya telah mewacanakan tentang kemungkinan adanya calon yang berasal dari etnis ini, sebagaimana diungkapkan Fauzi Tamrin, Ketua Paguyuban Masyarakat Tionghoa Sumatera Selatan (*Sumeks*, 11/6/2007). Bila dilihat dari pendekatan etnistas dan demokrasi, tidak ada salahnya memang setiap etnis atau warga negara mengajukan calon pemimpin untuk dikompetisikan dalam pemilukada, karena setiap warga negara berhak mencalonkan dan dicalonkan. Hanya saja, motivasi primordialisme dan etnisitas akan menjadi kurang positif ketika semangat primordialisme lebih dominan dibandingkan motivasi

menegakkan nilai-nilai demokrasi yang diharapkan dalam pemilukada. Apalagi misalnya, pendekatan primordialisme dilakukan dengan upaya penggiringan pemilih yang cenderung manipulative dengan memanfaatkan ikatan emosional sesama etnis bukan berdasarkan nilai-nilai rasional dalam demokrasi. Siapapun dan apapun asal etnis calon pemimpin patut didukung asalkan yang bersangkutan memiliki kompetensi tentang hal itu.

Dalam konteks inilah perlu disimak bersama bahwa bila nilai-nilai demokrasi dan pilihan pemimpin yang berkualitas dan *legitimate* yang diharapkan pada pemilukada nanti maka isu primordialisme dan etnisitas harus diposisikan dengan tepat dengan lebih memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Harus diakui bahwa isu primordialisme di negeri ini masih kuat terutama setelah memasuki era otonomi daerah, dimana ketika itu isu putra daerah (*indigenous*) sangat kental di masyarakat kita. Sehingga hampir semua pemimpin di daerah baik politis maupun non-politis harus putra daerah. Dalam perkembangannya, isu primordialisme tentang putra daerah ini mulai bergeser menjadi isu primordialisme berdasarkan etnis. Keduanya merupakan ancaman bagi demokrasi bila motivasi dan rasa memiliki etnisitas itu tidak terkendali.

Kita berharap bahwa para pemilih, apapun asal etnisnya, akan memilih calon pemimpin berkualifikasi sebagaimana diharapkan yang dapat membawa perubahan lebih baik menuju kesejahteraan. Seorang calon pemimpin dambaan masyarakat adalah yang bersangkutan memiliki wawasan luas yang mengedepankan kepentingan masyarakat pluralistik dan multikultural yang tanpa terjebak pada kepentingan sempit atas primordialisme. Karena itu, posisi primordialisme dan etnisitas hendaknya diposisikan secara wajar dengan tetap mengedepankan nilai-nilai rasional demokrasi dalam arti sebenarnya sehingga Pemilukada Sumsel 2008 menjadi milik dan aspirasi kita semua.

Masyarakat Pluralistik: Menumbuhkan Sikap Arief, Rukun, dan Berkepribadian pada Generasi Muda⁹⁶

Adalah suatu kenyataan bahwa banyak bangsa di dunia ini memiliki keberagaman kelompok masyarakat, yang dinamakan

⁹⁶ Makalah yang berjudul: "Masyarakat Pluralistik: Menumbuhkan Sikap Arief, Rukun, dan Berkepribadian pada Generasi Muda" disampaikan dalam Kegiatan Peningkatan Wawasan

masyarakat pluralistik (*plural society*). Kelompok yang beragam tersebut didasarkan atas ras, etnis, agama, dan latarbelakang sosial lainnya. Kenyataan beragam tersebut merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang tidak akan berubah atau tidak adapt dihindari. Sebuah nilai yang memandang eksistensi secara positif dinamakan *pluralisme*. Secara sosio-historis, istilah pluralism diidentifikasi dengan mazhab filsafat yang menentang konsep negara yang absolut dan berdaulat. Sedangkan pluralisme klasik adalah sebuah reaksi terhadap doktrin legal dari negara yang berdaulat. Pluralisme kontemporer yang muncul pada 1950-an, tidak dikembangkan untuk bertentangan dengan kedaulatan negara tetapi terhadap teori elit. Pendapat ini merujuk kepada definisi pluralism yang pertama yang menekankan pada pluralisme politik. Namun pada awalnya, pluralism merujuk problema masyarakat yang plural dimana penduduknya tidak homogen yang terdiri dari beragam etnis, ras, dan kelompok agama dimana kadang-kadang sebagian dari factor tersebut bergabung untuk meningkatkan kecenderungan terjadinya konflik. Keaslian ini merujuk kepada definisi pluralism kedua yang menekankan atas pluralism masyarakat.⁹⁷

Dari perspektif ilmu sosial-politik, pluralism didefinisikan: *Pertama*, sebuah teori yang menentang kekuasaan yang monolitik dan otonomi dari organisasi utama yang mewakili keterlibatan orang dalam masyarakat. Juga, keyakinan bahwa kekuasaan harus dibagi diantara sejumlah partai politik. *Kedua*, keberadaan atau kesabaran terhadap keberagaman kelompok etnis dan budaya dalam sebuah masyarakat atau Negara, dari kepercayaan atau sikap dalam suatu badan atau lembaga dan seterusnya.⁹⁸ Untuk mempertahankan pluralisme masyarakat, diperlukan adanya nilai-nilai dan perilaku toleransi, arief-bijaksana, dan kerukunan. Dalam sejarah filsafat politik, pluralism diidentifikasi berdekatan dengan nilai-nilai seperti ini, demikian juga dengan nilai-nilai kebebasan individu. Tetapi, sebenarnya toleransi bukanlah proses pengawetan liberal yang eksklusif. Sebaliknya, toleransi memiliki status istimewa dalam tradisi liberal, karena itu liberal sering didefinisikan sebagai orang-orang

Multikultural bagi Lembaga Pendidikan Plural, Litbang Kementerian Agama RI & Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan, 6 April 2011, di Hotel Jayakarta Dayra, Palembang.

⁹⁷ David A. Apter dalam Masykuri Abdillah, "Toleransi Beragam Dalam Masyarakat Demokrasi dan Multikultural", *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, INIS dan PBB, Leiden-Jakarta, 2003, hlm. 175.

⁹⁸ Masykuri Abdillah, "Toleransi Beragama...", *loc. cit.*, hlm. 174.

yang menilai kemerdekaan dan toleransi dibutuhkan untuk mempromosikan kebebasan. Toleransi bukan satu-satunya nilai liberal, karena ideology politik yang lain juga menemukan posisi untuk sistem nilai ini.⁹⁹

Adanya sikap dan perilaku, toleransi, arief-bijaksana dan rukun dalam suatu masyarakat pluralistik melalui suatu proses yang panjang karena terdapat banyak faktor mempengaruhinya. Di Indonesia, persoalan yang keterkaitan dengan toleransi berkaitan dengan agama lebih menjadi perhatian penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Perbedaan agama merupakan suatu hal yang mendasar bagi kehidupan masyarakat dimana kadang kala agama dapat mengakibatkan potensi konflik antarpemeluk agama bahkan intrapemeluk agama, seperti pembakaran terhadap masjid Ahmadiyah. Selain itu, dalam banyak kasus, agama bertransformasi menjadi identitas politik dan nasional sehingga agama dapat menjadi factor penyatu bagi kelompok atau masyarakat tertentu. Pada saat yang sama, agama dapat menjadi 'faktor pemecah belah' diantara kelompok atau masyarakat yang beragama. Sejumlah konflik sosial di tanah air, terutama sejak 1990-an hingga sekarang, sering kali bertalian dengan etnis, agama, ras dan antargolongan (SARA). Konflik bernuansa SARA yang paling menonjol terjadi di tanah air, seperti kasus Poso, Ambon, dan Sampit. Kendatipun demikian, faktor eksternal bertalian dengan sosial-ekonomi dan politik berkontribusi pula terhadap terjadinya kasus tersebut.

Seperti dikatakan Supardi Suparlan¹⁰⁰, sebagai masyarakat pluralistic, masa depan Indonesia akan sensitive dengan beragam konflik. Potensi disintegrasi sosial dihasilkan adanya kompetisi dari individu dan kelompok pada berbagai bentuk sumber-sumber sosial (*social-resources*) yang menggunakan etnisitas untuk memperkuat kekuasaan (*power*). Saling mempengaruhi satu sama lain akan mempengaruhi etnisitas sebagai cara untuk mengumpulkan kekuatan berdasarkan kemlompok dan solidaritas, kemudian menggunakan etnisitas dalam konflik untuk mencapai kekuasaan tertentu, pada

⁹⁹ Susan Mendus dalam Masykuri Abdillah, "Toleransi Beragama....", *Ibid*, hlm. 175.

¹⁰⁰ Parsudi Suparlan, "Etnisitas dan Potensinya terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia", *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini, Indonesia-Netherland Cooperation in Islamic Studies (INIS) dan The Center for Languages and Cultures, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2003, hlm. 79-90.

kekuasaan struktur sosial local, seperti politik dan etnisitas, sebagai potensi yang dapat merusak struktur sosial dan level komunitas.

Founding Fathers & Kebhinnekaan

Di Indonesia, seakan terus membutuhkan dorongan bagi masyarakat untuk senantiasa berperilaku toleran, arief-bijaksana, dan rukun. Hal ini dapat dimaklumi bahwa pengalaman perjalanan bangsa ini telah menunjukkan betapa persoalan SARA telah menjadi perhatian para *founding fathers* sejak menjelang kemerdekaan. Diskusi dan dialog terus dilakukan dalam merumuskan butir-butir Pancasila yang kita fahami sekarang. Tanpa adanya sikap dan perilaku toleransi, arief, dan rukun, agaknya mustahil rumusan Pancasila yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa itu dapat disepakati. Adanya sikap toleransi, arief, dan rukun terlihat pula oleh tokoh pejuang Islam ketika bersedia menghilangkan kata *Islam* dalam Piagam Jakarta. Belajar dari nilai-nilai luhur yang diberikan pada pendahulu bangsa tersebut, seharusnya anak didik/generasi muda sebagai 'pewaris' dan penerus bangsa dapat melestarikannya sebagai upaya mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang damai, tenteram, arief, dan berperadaban di masa datang.

Pentingnya memahami kebhinnekaan dalam *plural-society* bangsa Indonesia, seperti telah diwariskan dan dicontohkan para pendahulu bangsa, karena kenyataan bangsa ini tidak hanya sebagai bangsa besar yang letak geografis yang strategis dan kaya akan sumber daya alam (*natural-resources*). Bangsa ini akan sejahtera dan berperadaban apabila para generasi juga menyadari pentingnya mengelola potensi masyarakat pluralistik tersebut menjadi suatu kekuatan pemersatu bangsa, dengan kekuatan sumber daya manusia (*human-resources*) yang dimiliki.

Indonesia, setidaknya memiliki sebanyak 583 kelompok etnis dan bahasa atau dialek daerah dan terdapat empat agama resmi: Islam, Kristen (Protestan dan Katolik), Hindu dan Budha. Karena itu, *founding fathers* telah memformulasikan sebuah motto: "*Bhinneka Tunggal Ika*" dalam upaya mempertimbangkan kondisi dan kenyataan sosial yang ada. Orde Baru telah berusaha mempertahankan persatuan bangsa ini dengan kebijakan toleransi sosial dengan ketentuan bahwa tindakan apapun yang mengarah kepada persoalan SARA harus dihindari. Pemerintahan Orde Baru tidak memperkenankan

masyarakat untuk mendiskusikan topik apapun yang dianggap sensitive terhadap persoalan SARA.

Dalam rangka keharmonisan hidup beragama, pemerintah menerapkan kebijakan toleransi. Mantan Menteri Agama (1977-1983), Alamsyah Ratuprawiranegara, menerapkan kebijakan "Trilogi Kerukunan Beragama": (1) toleransi antarpenganut suatu agama tertentu; (2) toleransi antarpenganut agama berbeda; (3) toleransi antara penganut agama dengan pemerintah. Setiap agama memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tiap agama memiliki hari libur nasional. Negara berkewajiban memberi fasilitas terhadap kegiatan penganut agama melalui Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama). Hal ini berarti bahwa Indonesia menerapkan toleransi yang positif.¹⁰¹

Pada era Orde Baru, toleransi etnis dan agama adanya kecenderungan lebih baik dibandingkan pada era Reformasi. Hal ini dikarenakan pemerintahan Orde Baru telah menerapkan kebijakan represif terhadap tindakan yang mengarah kepada persoalan SARA. Pada era Reformasi, pemerintah mendorong demokratisasi dan kebebasan politik yang terkesan menimbulkan "euforia kebebasan". Pantas diakui bahwa justru pada era Reformasi, konflik sosial bernuansa etnis dan agama lebih menonjol dengan frekuensinya, terutama disebabkan oleh factor eksternal bertalian dengan ekonomi dan politik. Karena alasan ekonomi, terjadi kasus perkelahian antar kelompok mencari nafkah di areal terminal dan parker. Juga, sering terjadi kerusuhan antarkampung di berbagai daerah hanya karena adanya alasan kesulitan ekonomi. Jelas bahwa persoalan kearifan dan kerukunan pada era Reformasi ini, terlihat cenderung melemah. Abdullah Idi (2007) mengatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa pluralistic, disatu sisi, merupakan berkah dan kekayaan yang patut disyukuri. Disisi lain, sebagai bangsa pluralistic justru dapat berakibat sebaliknya, telah memposisikan bangsa ini rentan terhadap ancaman disintegrasi sosial.¹⁰²

¹⁰¹Maskuri Abdillah, "Toleransi Beragama...", *op. cit.*, hlm. 178.

¹⁰²Abdullah Idi, "Islam dan Pluralisme: Analisis Sosiologis-Keagamaan terhadap Peranan Umat Islam Indonesia dalam Memperkuat Integrasi Sosial", *Makalah disampaikan pada Pidato Pengukuhan Curu Besar Sosiologi pada Fakultas Trabiyah IAIN Raden Fatah Palembang, 9 Agustus 2007*, hlm. 8.

Dalam perkembangan kemasyarakata dan kebnagsaan di Indonesia, pada umumnya tampak bahwa pluralism kurang terkelola dengan baik yang mengakibatkan terganggunya katup-katup pengaman (*safety-valves*). Akibatnya, masyarakat kurang mengetahui bagaimana seharusnya menghargai realitas-objektif, yaitu kebhinnekaan yang ada, sehingga sikap politik masyarakat tidak pernah mencapai tingkat kedewasaan yang optimal untuk berdemokrasi. Dalam berbagai aspek pembangunan, baik pemerintahan, ekoniomi, sosial, pendekatan kuantitatif sering dikedepankan yang diterjemahkan sebagai demokrasi. Padahal esensi demokrasi lebih terletak pada kualitasnya, yakni bagaimana mendorong masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa, berdasarkan nilai-nilai cultural dalam masyarakat, seperti pentingnya saling menghargai.¹⁰³

Menumbuhkan Sikap Arief & Rukun Anak Didik

Pendidikan merupakan salah satu dari lima institusi pokok (*one of five basic institutions*) dalam suatu masyarakat. Kelima instusi dimaksudkan adalah (1) keluarga yang berfungsi menjaga dan membimbing generasi muda; (2) ekonomi yang berfungsi menghasilkan dan mendistribusikan barang-barang; (3) pemerintah yang berfungsi member, mengatur dan melindungi masyarakat; (4) agama yang bertugas menjawab permasalahan spiritualitas atau persoalan *unknownable*; dan (5) pendidikan yang berfungsi mendidik masyarakat.¹⁰⁴

Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibany dalam Jalaludin mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan bukanlah aktivitas dengan proses sekali jadi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 1 dikatakan:

¹⁰³Richard M. Daulay, *Mewaspada! Fanatisme Kesukuan: Ancaman Disintegrasi Bangsa*, Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2003, hlm. vii.

¹⁰⁴Abdullah Idi, "Reformasi Perguruan Tinggi Islam: Ugeni Perubahan IAIN menjadi UIN bagi Masyarakat Sumatera Selatan", *Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam*, Kerjasama Corpus dan Global Pustaka Utama Jogjakarta, 2005, hlm. 24.

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara".¹⁰⁵

Ahli pendidikan Islam dunia, 1980, melakukan kongres ke-2 tentang rumusan pendidikan Islam. Dinyatakan bahwa pendidikan Islam ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia yang secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal fikiran, kecerdasan dan pancaindera. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu mengembangkan semua aspek kehidupan manusia, baik spiritual, intelektual, imajinasi (fantasi), jasmaniah, keilmuan bahasa, baik secara individual maupun kelompok, serta mendorong aspek-aspek tersebut kearah kebaikan dan arah pencapaian kesempurnaan hidup.¹⁰⁶

Dapat dijelaskan bahwa konsep pendidikan Islam diatas mementingkan pengembangan kepribadian seorang anak didik atau siswa secara totalitas. Lebih jauh, dalam konsep pendidikan Islam dikatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan Sang Khalik, Allah SWT, hendaklah didorong perkembangan rohani dan jasmani, *qolbu*, intelektual, dan fisiknya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi pada kemudian hari. Jika elemen-elemen dari konsep pendidikan Islam ini dapat dikembangkan dengan optimal, maka peran individual dan kolektif umat manusia (Islam) akan dapat membantu kearah kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam suatu hadits dikatakan bahwa "Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda (dengan zaman kamu)".

Apa yang diharapkan secara konseptual tentang definisi pendidikan sering kali tidak selalu berjalan simetris dengan implementasi konsep tersebut kedalam dunia pendidikan. Sama halnya, sebagai upaya mewujudkan sikap dan prilaku arief-bijaksana, rukun, toleransi pada anak didik kemungkinan akan menghadapi

¹⁰⁵Lihat: (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Beserta Penjelasan, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 2).

¹⁰⁶Jalaludin, *Teologi Pendidikan....*, *op. cit.*, hlm. 76.

berbagai hambatan-hambatan. Sering kali tawaran strategi dan solusi terhadap menumbuhkan sikap arief-bijaksana dan rukun yang menjadi kepribadian anak didik tersebut bersifat parsial, sehingga dari hari kehari kita tetap selalu menyaksikan 'prilaku menyimpang' pada anak didik. Tidak sedikit dari mereka (anak didik) terlibat obat terlarang (narkoba), miras, pornografi, perkelahian, kekerasan, dan kriminal, karena permasalahan sesungguhnya sangatlah sistemik dan komprehensif dalam kehidupan masyarakat.

Sejumlah hambatan-hambatan yang membentuk prilaku arief-bijaksana, toleransi, dan rukun sebagai kepribadian anak didik/siswa, karenanya, setidaknya bertalian dengan tiga hal pokok dari kontak sosial anak didik:

Pertama, bertalian dengan sejauhmana peran institusi keluarga (orang tua) dalam mengemban tugasnya sebagai pendidik pertama dan utama. Kebiasaan menghormati sesama, sikap arief dan rukun anak didik berawal dari apa yang mereka alami ditengah keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan keluarga lainnya, masing-masing saling mempengaruhi dan membutuhkan. Seorang anak yang terbiasa mendapat kasih sayang dari anggota keluarga, saling tolong-menolong, jujur, disiplin, toleran, menjalankan ajaran agamanya, dan sederhana, diharapkan akan membantu mereka dalam pergaulan di luar rumah nantinya, terutama di sekolah. Keadaan sosial-ekonomi dan sosial-keagamaan keluarga dapat pula berpengaruh terhadap proses pertumbuhan kepribadian anak. Orang tua berupaya dalam mengembangkan fisik, mental, spiritual, dan jasmani anak dengan wajar dan seoptimal mungkin.

Kedua, bertalian dengan peran sekolah/madrasah, dimana seorang pendidik diharapkan dapat meneruskan nilai-nilai edukatif yang telah tertanam dalam keluarga dan mengembangkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlihat dalam silabus dan kurikulum yang sesuai dengan jenjang ditempuh anak didik. Sekolah terdiri dari pendidik/guru, anak didik/siswa, dan staf-administrasi saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Terlebih pentingnya kualitas seorang pendidik/guru (*ustadz/ustadzah*), yang disebut pendidik profesional, sangat dituntut dalam menumbuhkan nilai-nilai edukatif pada anak didik sebagai generasi harapan keluarga dan harapan bangsa. Dalam UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah mendorong para pendidik/guru agar menjadi seorang

professional dalam tugasnya melalui program sertifikasi. Seorang pendidik bersertifikasi juga berhak memperoleh tunjangan sertifikasi dan insentif lainnya. Kontak sosial antara murid dengan murid memperlihatkan suasana-iklim edukatif. Sesama murid saling berkawan, berolah raga, bercerita, dan saling berdisiplin agar tidak mneyinggung perasaan temannya, yang memiliki latarbelakang berbeda (agama, etnis, daerah, dll). Dari kontak sosial kedua ini, seorang guru professional diharapkan anak didik/siswa nantinya dapat memiliki "bekal" nilai-nilai dan ilmu pengetahuan yang memadai dimana mereka akan berkiprah, mandiri, dan berkompetitif dengan *fair* di masyarakat pada era global.

Ketiga, peran masyarakat. Kontak sosial ketiga ini merupakan tempat pergaulan sesama manusia dan merupakan lapangan pendidikan yang luas, yakni adanya hubungan antara dua orang atau lebih tak terbatas.¹⁰⁷ Hubungan sekolah dan masyarakat, dimana sekolah sebagai lembaga masyarakat perlu memperhatikan: relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat (*social needs*); metode yang digunakan harus mampu merangsang anak didik/siswa untuk mengenal kehidupan nyata di masyarakat; menumbuhkan sikap pada anak didik/siswa untuk belajar dan bekerja dari kehidupan sekitarnya; sekolah selalu berinteraksi dengan kehidupan masyarakat, sehingga kebutuhan kedua pihak akan terpenuhi; dan sekolah diharapkan dapat mengembangkan masyarakat dengan cara mengadakan pembaharuan tata kehidupan masyarakat.¹⁰⁸

Sebagai catatan akhir bahwa dalam membentuk prilaku arief-bijak, toleran, dan rukun seorang anak didik memerlukan suatu proses waktu yang panjang. Karenanya, dalam membentuk prilaku arief-bijak, rukun, dan toleran sering kali masih memiliki banyak hambatan, yang bertalian dengan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat itu sendiri, yang satu sama lain saling membutuhkan (*mutual-symbiosis*). Apapun bentuk prilaku anak didik, baik positif maupun negatif, sesungguhnya sebagai '*produk*' dan '*sketsa*' dari

¹⁰⁷Tonnies membedakan pergaulan dalam dua kategori: (1) *Gemeinschaft* (persekutuan) yakni hubungan yang dibentuk oleh kodrat, seperti hubungan antara seorang dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan pejabat, dengan tokoh agama, dan lain-lain; dan (2) *Gesellschaft* (perbuatan) yakni hubungan yang dibentuk oleh ikatan organisasi, seperti hubungan seorang dengan pimpinan organisasi massa, organisasi kelembagaan, organisasi politik, organisasi koperasi, dan lain-lain. Lihat: (Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan*, RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm. 106).

¹⁰⁸Abdullah Idi, "Sosiologi Pendidikan...", *ibid.*, hlm. 108.

kiprah dan peran ketiga institusi sosial tersebut. Peran pemerintah dalam membangun pendidikan berkualitas sebagai 'investasi bangsa' tidak dapat dihindari, bila mengharapkan adanya suatu generasi yang kuat bagi bangsa ke depan. Baik dan buruknya perilaku, akhlak, anak didik dan generasi muda ke depan berkorelasi kuat terhadap peran sinergis dan komitmen totalitas dari institusi keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah terhadap pentingnya sumber daya manusia (*human-resources*) dari 'ikhtiar' investasi pendidikan itu.

Pluralisme dan Isu HAM di Indonesia¹⁰⁹

Hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) adalah suatu fenomena, khususnya setelah kemunculan perjuangan warga negara terhadap hak asasi mereka terhadap penguasa. Kemunculan hak asasi manusia sebagai pelengkap teori demokrasi sebagai respons tidak optimalnya pelayanan terhadap permasalahan hak-hak warga negara. Sebelumnya, belum terdapat kesepakatan antara teoritis HAM mengenai batasan dan cakupan dari HAM, dimana masih difahami pada hak-hak sipil dan politik saja, belum mengarah pada hak lainnya, seperti hak ekonomi/kesejahteraan dan pendidikan. Para teoritis HAM berbeda pula dalam hal hak-hak yang menjadi prioritas dalam HAM, yakni mana hak utama dan mana hak dapat ditunda (Hatamar 2005: 135-136)

Miriam Budiarto mengatakan, hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di masyarakat, tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, jenis kelamin, yang bersifat asasi dan universal. Setelah Perang Dunia I dan II, hak-hak asasi diinjak-injak, selanjutnya, muncul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia dalam suatu naskah internasional. Keinginan itu terwujud pada 1948 dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, sebagai pernyataan tentang hak-hak asasi manusia oleh negara-negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations Organization (UNO)*. Definisi tentang HAM pada abad ke 17-18 hingga abad ke 20, berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman, yakni dari sekitar definisi bertalian dengan dengan

¹⁰⁹Tulisan berjudul: "Masyarakat Plural dan Isu HAM di Indonesia, *Jurnal Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* Vol. 7, Nomor 2, Desember 2007, hlm. 151-153.

ekonomi dan politik, berkembang menjadi definisi lebih luas, seperti sosial, hukum, budaya, gender, dan pendidikan.

Definisi HAM ternyata begitu luas, yang meliputi setiap kebutuhan asasi manusia, yang secara asasi atau fitrah telah dibawa sejak lahir dan selanjutnya perlu dikembangkan secara wajar berdasarkan norma, aturan, undang-undang yang berlaku pada kehidupan manusia. Secara sosiologis, karena individu dan masyarakat selalu dinamis, definisi dan kebutuhan-kebutuhan terhadap hak-hak asasi manusia terus berkembang pula sesuai dengan zaman. Definisi dan bentuk hak-hak asasi manusia berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang didasarkan atas berbagai latar belakang, seperti kemajuan sains dan teknologi, pertumbuhan penduduk terus meningkat, dan terbatasnya sumber-sumber kehidupan.

Dalam suatu masyarakat pluralistik, seperti Indonesia, penegakan demokrasi dan HAM sangat kompleks. Hal ini wajar mengingat, seperti diungkapkan Feisal Tamim (2004: 41-42), bahwa negara ini merupakan negara demokratis terbesar ketiga setelah India dan Amerika, yang hidup dalam masyarakat multikultural dalam beragam karakteristik dan memiliki lebih dari 300 kelompok etnis. Secara geografis, negara ini juga memiliki bentangan pada garis pantai 108.920 km², luas daratan lebih dari 1,9 juta km², negara terluas kedelapan setelah Australia, Kanada, Brazil, Amerika Serikat, RRC, India dan Nigeria. Luas lautan 5,8 juta km², meliputi 17.506 pulau, 11.013 pulau belum punya nama (2003), sumber daya alam melimpah, termasuk pulau-pulau kecil yang berpenghuni dan belum berpenghuni. Dikatakan J.S. Furnivall (1980: 86-103), sebagai *plural society*, masyarakat Indonesia merupakan suatu tipe masyarakat daerah tropis dimana mereka berkuasa dan mereka dikuasai mempunyai perbedaan ras. orang Belanda sebagai kelompok minoritas, jumlahnya semakin bertambah pada akhir abad ke-19, sekaligus merupakan penguasa yang memerintah mayoritas orang pribumi. sebagai warganegara kelas tiga di negerinya sendiri. Orang Timur Asing, terutama Cina, Arab dan India, memiliki kedudukan kelas dua, antara kelompok Eropa dan Pribumi. Dalam kehidupan politik, indikasi jelas dari masyarakat Indonesia yang pluralistik, yakni tidak adanya kehendak bersama (*common will*), dimana masyarakat Indonesia secara totalitas terdiri dari elemen-elemen terpisah satu sama lain dikarenakan perbedaan masing-masing merupakan

kumpulan individu dari suatu totalitas organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidaklah utuh. Orang Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja tetapi mereka tidak tinggal menetap di Indonesia. Kehidupan mereka hanya berada disekitar pekerjaan itu, dan mereka melihat permasalahan sosial, politik, ekonomi terjadi di Indonesia tidak sebagai warga negara tetapi sebagai kapitalis atau majikan dari buru-buruh mereka. Sama halnya dengan orang Timur Asing, seperti orang Cina, sebagaimana orang Belanda, mereka datang ke Indonesia hanya untuk kepentingan ekonomi. Seperti orang Belanda dan Cina, kehidupan orang Pribumi (*inlander*) tidak utuh pula, yakni sebagai "pelayan" di negeri sendiri. Selanjutnya mengungkapkan bahwa Indonesia menampakkan suatu struktur yang mempunyai dua ciri. *Pertama*, secara horizontal ditandai suatu kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan etnis, agama, adat-istiadat dan daerah. *Kedua*, secara vertikal, struktur masyarakat ditandai adanya perbedaan vertikal lapisan atas dan lapisan bawah begitu tajam. Karena adanya perbedaan itu, masyarakat Indonesia dinamakan masyarakat (*plural society*), suatu istilah yang pertama kali digunakan Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Hindia Belanda, yakni suatu masyarakat yang memiliki dua atau lebih elemen yang hidup terpisah satu sama lain dalam satu kehidupan politik.

Seorang ilmuwan sosial (antropologi, Clifford Geertz seperti dikutip oleh Yando R. Zakaria (2000: 30-31). Juga berpendapat hampir sama bahwa pada masa setelah pemerintah kolonial meninggalkan negeri ini pun sifat pluralistik/kemajemukan masyarakat Indonesia masih tersisa. Hanya saja, menurut Geertz, pluralistik tidak lagi bersifat vertikal melainkan pluralistik yang bersifat horizontal, yakni adanya pengelompokan-pengelompokan dalam masyarakat Indonesia yang didasari pada ikatan-ikatan primordial (*primordial attachments*), seperti ikatan kekerabatan, ras, bahasa, daerah asal, agama dan suku bangsa. Menurut Geertz, primordialisme inilah yang merupakan pengikat asli masyarakat Indonesia dan atas dasar itulah pengelompokan-pengelompokan masyarakat Indonesia tumbuh dan berkembang, seperti dalam organisasi sosial formal dan informal, asosiasi-asosiasi, organisasi massa, pemerintah, partai politik, dan organisasi-organisasi bertujuan ekonomi.

Pandangan Furnivall dan Geertz tersebut lebih bertalian dengan dimensi "formal" dan "normatif" dari diskursus masyarakat pluralistik.

Dikatakan Burhanuddin dan Kusnadi, secara umum, konsep masyarakat pluralistik selalu berkembang seiring dengan dinamika kehidupan umat manusia. Usman Pelly menuturkan pula bahwa kompleksitas masyarakat pluralistik tidak hanya ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan secara vertikal, yakni capaian yang diperoleh melalui prestasi (*attachment*), yang ditandai dengan adanya perbedaan pada tingkat sosial ekonomi, kedudukan politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi pemukiman. Dari perspektif pandangan ini, pluralistik vertikal dapat saja terjadi di dalam kelompok-kelompok masyarakat yang terkategori ke dalam pengelompokan secara horizontal. Dengan dimasukkan aspek capaian (aspek dinamis) dari unsur pembeda di dalam masyarakat plural/majemuk, dengan sendirinya, pada dasarnya karakter kemajemukan yang ada dalam masyarakat Indonesia sudah sejak lama dicirikan oleh pembeda-pembeda secara vertikal dan horizontal itu. Kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda secara ras, suku bangsa, bahasa, dan agama, melainkan juga dapat dibedakan berdasarkan daya adaptasinya (sebagai hasil dari suatu proses pencapaian tertentu) atas perkembangan-perkembangan aktual yang ada di sekitar mereka, baik yang terjadi di dalam kelompok-kelompok horizontal itu sendiri, dan lebih penting antar kelompok-kelompok horizontal tersebut (Yando R. Zakaria 2000: 32)

Hal ini dapat dijelaskan bahwa pluralistic Indonesia belum cukup hanya diartikan dari perspektif horizontal. Justeru, suatu dimensi yang lebih penting adalah dimensi vertikal, terutama vertikalisasi antara kelompok-kelompok yang dalam kategori horizontal. Sebab, perbedaan daya adaptasi antarkelompok-kelompok yang berbeda secara ras, suku/bangs, etnis, agama, dan bahasa itu, dapat menjadikan kelompok-kelompok yang memiliki tingkat kemajuan kebudayaan-dalam pengertian sebagai daya adaptasi-yang lebih tinggi meniadakan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang masih hidup pada tingkatan perkembangan kebudayaan yang lebih rendah. Interaksi antar kelompok dalam perbedaan vertikal antaretnis (ataupun pengelompokan secara horizontal lainnya) lebih berdimensi "kalah-menang" yang berdampak pada munculnya suatu kekuatan yang cenderung mendominasi (*superordinate*) dan didominasi (*subordinate*). Proses dan kondisi seperti itu, tentunya, sangat mungkin berdampak pula pada ketidakseimbangan dan kesenjangan yang menjurus ke arah konflik antar ras, kelompok etnis, dan kelompok

agama, yang pada masa Orde Baru, dikenal dengan isu SARA, yang dapat mengancam integritas Indonesia, sebagai *nation*.

Seperti dikutip dari Zakaria (2000: 34-44), dilihat dari tingkat perkembangan dan kemajuan sistem teknologi, sistem pengetahuan, pola-pola pengeksploitasi-an dan penguatan sumber-sumber daya ekonomi, dan jaringan hubungan dengan masyarakat yang lebih luas, Kelompok-kelompok suku bangsa atau sub suku bangsa di Indonesia setidaknya dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yang tiap kategori memiliki tingkat daya adaptasi yang berbeda.

Pertama, kelompok masyarakat dalam kategori *tribal society*. Dari segi komposisi demografi, jumlah kelompok ini relatif kecil. Masyarakat *tribal society* biasanya hidup dalam persekutuan dan masing-masing persekutuan tidak terintegrasi dalam persekutuan (politik) yang lebih luas. Pada umumnya, mereka bermata pencaharian berburu dan meramu (*hunting and food gathering*). Bertalian dengan sistem pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biasanya, pola pemukiman kelompok masyarakat ini bersifat nomadis (berpindah-pindah tempat), meskipun batas-batas wilayah pengembaraan itu tetap dapat ditentukan secara pasti. Di Indonesia, *tribal society* atau masyarakat pemburu, peramu dan berkebun (dengan teknologi sederhana) ini meliputi orang Kubu (Suku Anak Dalam) yang hidup diwilayah belantara Jambi, Sumatera Selatan, Irian Jaya, Kalimantan, dan Sulawesi Tengah. Koentjaraningrat menyebut masyarakat ini sebagai "masyarakat berkebun".

Kedua, kelompok masyarakat perladangan berputar (*rotary cultivation*). Atau lebih populer dinamakan kelompok masyarakat yang mengernbangkan sistem perladangan berpindah (*shifting cultivation*). Karena dalam sistem teknologi pertanian yang dikembangkannya ada unsur pekerjaan menebas dan membakar, teknik ini kerap pula dinamakan *slash and burn cultivation*. Demikian pula, karena kegiatan pertanian itu tidak diselenggarakan secara terus menerus pada satu bidang tanah tertentu maka kegiatan pertanian ini sering pula dikategorikan sebagai suatu cara produksi pertanian ekstensif (*extensive agriculture*). Kelompok masyarakat ini merupakan kelompok yang telah dapat bercocok tanam untuk menghasilkan bahan makanan pokoknya (*food producing*) sendiri. Sebagian besar kelompok masyarakat ini juga berada di luar Jawa, dengan sedikit pengecualian di beberapa tempat tertentu saja, seperti

pada masyarakat Badui. Komposisi demografis kelompok ini lebih besar dari kelompok pertama, mencapai angka ribuan jiwa. Keterkaitan masyarakat satu dengan yang lainnya masih menekankan pada sistem kekerabatan (*kinship system*).

Secara tradisional, kelompok ini belum sepenuhnya terintegrasi pada sistem sosial-ekonomi pasar yang lebih luas dan sistem sosial-politik yang lebih besar dan kompleks. Seperti juga kelompok pertama, differensiasi dan stratifikasi sosial-ekonomi belum begitu menonjol, masih bersifat egaliter, belum mengenal spesialisasi sebagian kerja atas dasar ketrampilan dan keahlian penguasaan teknologi. Semua anggota masyarakat masih mungkin memiliki akses dan kontrol yang sama atau sumberdaya-sumberdaya ekonomi, terutama tanah karena rasion luas tanah dan jumlah penduduk masih rendah sehingga bisa melakukan perladangan berputar (*rotary cultivation*). Tanah masih dikuasi secara kolektif-kecuai pada bidang tertentu dan setiap anggota kolektif bias membuka dan menguasainya. Karena pertanian perladangan ini memiliki indeks diversitas tanaman yang tinggi, artinya sebidang tanah dapat ditanami banyak jenis tanaman, maka-dari aspek tertentu-biasanya tidak efektif, dan hasilnya juga tidak begitu tinggi, tidak dapat menghasilkan surplus produksi yang besar, meskipun tingkat kepadatan produknya masih rendah. Karena itu, masyarakat peladang belum sepenuhnya dapat terintegrasi pada sistem ekonomi yang lebih besar.

Ketiga, kelompok masyarakat petani (*peasant society*). Kelompok masyarakat ini mengembangkan sistem pertanian menetap (*sedenter*) dengan mengembangkan cara produksi pertanian intensif (*Intensive agriculture*), yang di Indonesia dikenal dengan sistem pertanian lahan basah atau pertanian persawahan. Sistem ini dikenal oleh kelompok-kelompok masyarakat di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali dan NTB. Karena sistem pertanian ini mampu menghasilkan surplus hasil yang cukup besar, kegiatan ekonomi kelompok ini telah terintegrasi ke dalam sistem sosio-ekonomi dan sosio-politik yang lebih besar dan lebih luas. Keterkaitan antar anggotanya tidak lagi berdasarkan sistem kekerabatan, melainkan dalam ikatan-ikatan sosio-politik dan sosio-ekonomi yang lebih formalistik, seperti organisasi-organisasi dan asosiasi-asosiasi.

Secara demografis, jumlah anggota kelompoknya cukup besar dan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi, dan telah mengenal

differentiasi dan stratifikasi sosial-ekonomi dan politik. Artinya, ada diantara anggota masyarakat yang bersangkutan yang tidak atau hanya sedikit memiliki akses dan kontrol pada sumber-sumber daya ekonomi, terutama tanah. Jumlah mereka yang memiliki sedikit atau tidak sama sekali akses dan kontrol pada tanah ini lebih banyak, karena adanya ketimpangan rasio antara tanah dan tingkat kepadatan penduduk. Jumlah masyarakat petani selalu lebih besar dibandingkan luas tanah sebagai lahan pertanian yang tersedia. Cara produksi pertanian yang intensif akan mengantarkan masyarakat petani untuk terkait pada sistem ekonomi dan politik yang lebih luas dan kompleks. Ini dimungkinkan, kendatipun indeks diversitas tanaman pada lahan persawahan rendah, bahkan bersifat monokultur, karena *input* yang tinggi, baik tenaga kerja maupun sarana produksi lainnya, maka *output* juga tinggi, sehingga dapat menghasilkan surplus produksi. Surplus itu memungkinkan adanya sekelompok orang tidak harus bertani. Dalam perspektif evolusi sistem politik selanjutnya, mereka yang mampu menghasilkan surplus ini, menjadi pemegang kekuasaan mengendalikan dan mengontrol kehidupan petani melalui suatu sistem pemerintahan. Melalui sistem pertanian yang intensif ini suatu kerajaan atau negara tradisional dapat terbentuk.

Keempat, kelompok masyarakat perkotaan. Kelompok ini merupakan suatu masyarakat yang tinggal di suatu lingkungan pemukiman tertentu dimana para penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar setempat. Biasanya barang-barang itu dihasilkan oleh penduduk yang tinggal di daerah pedalaman (pedesaan), yang biasa disebut sebagai daerah yang melindungi desa. Titik awal gejala kota adalah timbulnya kelompok literasi (kelompok intelektual, pujangga, agamawan) atau berbagai kelompok spesialis yang berpendidikan dan non-agraris, sehingga pembagian kerjanya sangat kompleks.

Dilihat dari peran sosial-ekonomi dan sosial politiknya dalam suatu jaringan kehidupan yang lebih luas, masyarakat perkotaan ini juga dinamakan sebagai kelompok elit ekonomi dan politik. Dibawah kelompok elit kota ini ada suatu kelas menengah perkotaan yang jumlahnya lebih besar, yakni para pegawai pemerintahan, pegawai perusahaan swasta, kaum intelektual dan pengusaha mandiri. Dilihat dari cara hidup kelas menengah ini tidak jauh berbeda dengan kelompok elit, sehingga dapat dikategorikan ke dalam super kultur metropolitan atau telah masuk dalam peradaban global.

Perbedaan sistem, teknologi, sistem kemasyarakatan, dan kompleksitas jaringan hubungan dengan masyarakat yang lebih luas pada tiap-tiap kategori kelompok masyarakat di atas. Pada akhirnya, akan berpengaruh pada kemampuan beradaptasi atas perkembangan sosial-ekonomi, sosial-politik, dan sosial-budaya, yang dihadapi tiap kelompok masyarakat tersebut. Karena itu, adalah suatu yang muskil jika ada kebijakan negara yang menyamaratakan daya adaptasi masing-masing kelompok masyarakat itu. Menjadi tidak logis ketika ada suatu kebijakan negara disamaratakan bagi semua kelompok masyarakat tersebut dari tingkat daya adaptasi yang berbeda. Perbedaan daya adaptasi ini berakibat adanya perbedaan dalam kemampuan mengakses berbagai peluang dalam kehidupan yang lebih layak.

Merujuk kepada definisi HAM dan pluralism di atas, dapat diungkapkan bahwa ruang lingkup dan permasalahan HAM di Indonesia lebih komprehensif yang meliputi berbagai aspek kehidupan berbangsa. Karena definisi HAM yang begitu luas, maka bagi Indonesia sebagai negara berkembang (*developing country*) yang berkeinginan besar menerapkan demokrasi dan HAM sudah barang tentu tidak terlepas dari permasalahan HAM. Dalam hal ini, HAM agaknya berjalan sejajar dengan proses perjalanan peradaban suatu bangsa. Suatu hal yang terpenting diungkapkan disini adalah bagaimana sesungguhnya isu-isu pelanggaran HAM dalam berbagai bentuknya dapat direduksi sedemikian rupa, karena tanpa kenyataan demikian, demokrasi tidak dapat berjalan sempurna. Tidak ada negara di dunia ini sebetulnya terhindar dari permasalahan HAM, persoalannya sangat terletak pada cara menyikapinya. Adalah suatu hal yang wajar pulaibila proses perjalanan berbangsa ini, bangsa Indonesia yang besar wilayah dan banyak keberagaman etnis, agama, ras, geografis, kekayaan alam, tingkat peradaban, dan lain-lain, kecenderungan mengalami berbagai permasalahan atau isu-isu HAM yang terkadang dapat menghambat proses demokratisasi di Indonesia.

Seperti diungkapkan Parsudi Suparlan (2003: 2002) bahwa masyarakat pluralistik pada umumnya mempunyai ciri yang menyolok dalam hal corak pemerintahannya yakni bercirikan otoriter dan militeristik sebagaimana yang menjadi ciri dari semua pemerintahan pada masyarakat kolonial. Coraknya yang otoriter dan militeristik ini juga terdapat dalam masyarakat plural/majemuk yang bukan negara jajahan, sebelum dirombak oleh kekuatan reformasi,

seperti Uni Soviet Rusia, Yugoslavia, Afrika Selatan, dan Indonesia di masa pemerintahan Orde Baru. Ciri-ciri masyarakat plural/majemuk yang otoriter dan militeristik ini terutama berbentuk kekejaman dan kekerasan terhadap rakyat atau warga masyarakatnya sendiri. Kekejaman dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri dilakukan sebagai upaya menguasai secara absolut semua sumber-sumber daya ekonomi dan alam oleh penguasa dan oknum-oknum serta kroni-kroninya.

Masalah yang umumnya terjadi pada masyarakat plural Indonesia adalah hubungan antara sistem nasional atau pemerintah pusat dengan masyarakat-masyarakat suku bangsa yang tercakup dalam masyarakat tersebut. masyarakat-masyarakat suku bangsa telah ada sebelum adanya masyarakat plural/majemuk yang dikuasai sistem nasional. Masyarakat-masyarakat tersebut hidup di dan dari sumber-sumber daya yang ada dalam lingkungan alam dan fisik yang merupakan hak adat atau hak ulayat mereka. Permasalahan ini muncul pada waktu rezim berkuasa itu berusaha untuk menguasai sumber-sumber daya alam yang ada dalam Wilayah hak ulayat masyarakat-masyarakat suku bangsa setempat dengan menggunakan acuan hukum nasional yang menapikan hukum adat atau hak ulayat warga masyarakat lokal. Pada waktu rezim penguasa tersebut masih berkuasa tidak ada satupun warga masyarakat tersebut yang berani menentangnya, dan tidak juga kelompok-kelompok atau masyarakat-masyarakat suku bangsa yang dieksploitasi hak ulayatnya tersebut berani menghalanginya. Tetapi, ketika rezim otoriter jatuh maka berbagai bentuk perambahan dan perampokan terhadap perusahaan-perusahaan milik dari oknum-oknum pemerintah pusat dan kroni-kroninya bermunculan sebagai kerusuhan-kerusuhan sosial dan konflik antarsuku bangsa bermunculan. Pendapat umum yang mengatakan bahwa kebangkitan dari mereka yang semula tertekan oleh rezim otoriter dan militeristik tidaklah dapat disangkal. Tetapi pendapat para pakar yang ditahun-tahun 1999-2001 bermunculan di televisi yang mengatakan bahwa konflik antarsuku bangsa dikarenakan oleh adanya kesenjangan sosial-ekonomi antara kelompok suku bangsa pendatang yang makmur hidupnya dan kelompok suku bangsa setempat yang hidupnya melarat tidaklah benar.

Dimasa lampau masyarakat-masyarakat suku bangsa hidup dengan berpedoman pada kebudayaan masing-masing yang berlaku

di dalam wilayah masyarakat suku bangsanya sendiri. Anggota-anggota dari setiap masyarakat suku bangsa hidup dalam komuniti-komuniti suku bangsa yang pada dasarnya bercorak homogeny dengan masing-masing jati diri suku bangsa dan jati diri budayanya dalam batas-batas Wilayah sendiri. Di kampung halamannya sendiri, masyarakat-masyarakat suku bangsa setempat dengan kebudayaannya masing-masing adalah yang dominan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana terwujud dalam pranata-pranata sosial mereka masing-masing. Di mana lampau hanya di kota-kota atau kota pelabuhan dan pusat-pusat perkotaan terdapat masyarakat campuran dari berbagai kelompok suku bangsa. Sedangkan pada masa sekarang hampir seluruh wilayah Indonesia secara suku bangsa telah menjadi masyarakat-masyarakat yang heterogen, dimana anggota-anggota dari berbagai suku bangsa hidup secara berdampingan dalam komuniti-komuniti pedesaan dari kelompok-kelompok suku bangsa tersebut. Karena itu, pada masa sekarang, hubungan antar suku bangsa telah menjadi lebih intensif dari pada di masa lampau.

Hal ini dapat menyebabkan munculnya masalah-masalah berkenaan dengan kesukubangsaan serta batas-batas suku bangsa dan perbedaan-perbedaan budaya ekonomi antara para pendatang dengan penduduk setempat mempunyai kebudayaan ekonomi yang lebih maju dan agresif. Aturan-aturan yang mengatur hubungan antara tuan rumaha dengan tamunya tersirat dalam pepatah yang berlaku dalam kehidupan semua masyarakat suku bangsa di Indonesia, yang berbunyi "dimana bunyi dipijak di situ langit dijunjung". Artinya para pendatang yang hidup dalam komuniti suku bangsa setempat supaya menghormati dan menjunjung adat dan tradisi budaya yang berlaku setempat dengan cara mengikuti aturan-aturan adat dan tradisi-tradisi budayanya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengacu kepada pepatah ini, secara halus dan tidak langsung, para pendatang diberi peringatan untuk tidak mendominasi kehidupan mereka yang menjadi tuan rumah. Konflik-konflik antar suku bangsa yang telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia dapat dilihat sebagai pelanggaran dari prinsip yang ada dalam pepatah tersebut (Parsudi Suparlan, 2003: 204-205).

Di negara-negara beradab, perlindungan hak asasi manusia merupakan program pokok. Dalam rangka perlindungan hak asasi, negara tidak diperkenankan melakukan praktek diskriminatif, hanya melindungi individu atau kelompok masyarakat tertentu. Di Indone-

sia, sebagai negara yang terus berkeinginan menerapkan nilai-nilai demokrasi, dan bila mengacu kepada definisi HAM, pluralisme, menunjukkan bahwa dari berbagai konflik sosial di tanah air masih rawan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat plural tersebut (Patra M. Zen 2003: 326). Bidang-bidang yang sangat mungkin memberi ruang pelanggaran HAM dan memerlukan reduksi negara, antara lain politik, ekonomi, budaya, agama dan pendidikan. Karena itu, berdasarkan pemahaman definisi HAM, maka berbagai bentuk pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh siapapun, seperti negara, masyarakat, birokrasfeksekutif, Iegislatif ataupun pihak swasta.

Suatu hal yang patut pula diungkapkan bahwa berbagai pelanggaran HAM di negara Islam, termasuk di Indonesia, bukanlah serta-merta merupakan toleransi ajaran Islam. Islam, merupakan yang mencintai perdamaian, ketentraman, dan menginginkan kerukunan terhadap umat agama lain. Bila terjadi pelanggaran HAM di dunia Islam, besar kemungkinan hal itu merupakan bagian wilayah tanggung jawab individu ataupun kolektif yang sesungguhnya bertentangan dengan ajaran Islam. Realitas sosial ekonomi dan politik, agaknya lebih dominan mempengaruhi pelanggaran HAM di dunia, termasuk di dunia Islam. Bukan persoalan ajaran Islam tersebut, karena setiap ajaran agama pada prinsipnya mengajarkan tentang manfaat dan menjauhi mudharat bagi pengamgtnya. Karena itu, dalam konteks hubungan internasional, keadaannya semakin kompleks, dimanakini persoalan sesungguhnya bukanlah perooalan "Barat" dan "Timur" atau "Islam" dan "Barat". Invasi AS ke Irak misalnya lebih dimotivasi kepentingan politik ekonomi, bukan persoalan Islam dan Barat (AS) sepenuhnya. Barangkali, hanya AS atau Gedung Putih masih dominan menempatkan Islam atau dunia Islam sebagai ancaman, yang menurut versi sepihak AS, negara-negara Islam, seperti Irak, Iran, dan Indonesia.

Teori Huntington, seperti diungkapkan Dewi Fortuna Anwar (2007: 21-24) tentang *Clash Civilization*, karena itu, tidak dapat dibuktikan karena hubungan internasional tidak didikte oleh peradaban (agama), tetapi didasarkan kepentingan nasional masing-masing. Pada bidang ekonomi, regulasi ekonomi lebih tampak ketimbang globalisasi ekonomi karena ada kendala *World Trade Organization (WTO)*. Terdapat tiga regulasi ekonomi, yakni AS, Jepang, dan Jerman dan terdapat dua negara baru maju, yakni RRC

dan India. Kebangkitan RRC dan India berakibat pada krisis energi, karena permintaan kedua negara tersebut. AS dan, Jepang tampak khawatir tentang hal ini. Karena itu, isu energy (*energy*) dan keamanan (*security*) kini lebih dominan, sementara itu, isu Islam dan Barat tidak dominan (hanya AS-Gedung Putih), di mana banyak kasus yang terjadi di negara Islam justru tidak muncul.

Jadi, pemahaman tentang demokrasi dan hak asasi manusia, pada dasarnya, tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Demokrasi tidak akan terwujud bahkan tidak pernah ada dan sempurna apabila nilai-nilai demokrasi tidak diterapkan dengan baik dan optimal pada suatu negara dengan realitas masyarakat yang plural/majemuk, seperti Indonesia.

Semakin berkembangnya definisi dan makna demokrasi yang berujung pada terbentuknya *Human Right* pada pertengahan abad ke-20, maka keinginal suatu negara plural untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi dan HAM semakin memiliki tantangan tidak ringan. Karena hampir semua kebutuhan pokok dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat pluralistik itu telah menjadi wilayah HAM yang harus menjadi perhatian dan tanggung jawab negara, seperti perluasan makna pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap politik, ekonomi, budaya, agama dan pendidikan. Di sisi lain, isu-isu HAM di negara-negara Islam, atau dalam konteks hubungan Barat dan Islam, menunjukkan semakin tidak populer, kecuali AS. Karena itu, isu-isu baru, seperti regulasi ekonomi (krisis energi) dan keamanan lebih dominan dibandingkan isu agama (Islam-Barat).

Isu-isu HAM di Indonesia, lebih dikarenakan sebagai respons balik tindakan individu dan masyarakat terhadap berbagai krisis internal yang dialami bangsa ini, terutama lebih tampak terjadi sejak 1997, yang bertalian dengan terjadinya krisis sosial ekonomi dan politik. Bila merujuk kepada definisi HAM secara luas, isu-isu dan pelanggaran HAM di Indonesia tampak kompleks dan komprehensif, yang bertalian dengan pelanggaran HAM di bidang ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Karena itu, kehadiran dan respons positif pemerintah pada era Reformasi, seperti dengan membentuk Menteri HAM- Hukum, Mahkamah Konstitusi, UU Otonomi Daerah, dan UU Sisdiknas No. 14/2005 (tentang Guru dan Dosen), berdampak positif terhadap proses penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia.

Islam dan Terorisme¹¹⁰

Tertangkapnya Abu Dujana yang diklaim polisi sebagai gembong teroris nomor wahid di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Dalam dialog di SCTV (13/06/07), peneliti terorisme dari *International Crisis Group*, Sydney Jones berpandangan bahwa tertangkapnya Abu Dujana tak akan menyurutkan perjuangan Jamaah Islamiyah (JI) karena JI tidak hanya sebagai organisasi teroris, tapi juga memiliki jaringan social ekonomi yang luas dan tetap eksis kendatipun sementara waktu, kata Jones, JI akan memfokuskan pada dakwah dan membangun organisasi.

Tentu saja, pendapat Jones tersebut telah menimbulkan pro dan kontra. Sebagian kalangan berpandangan bahwa pandangan Jones hanya bertendensi menyudutkan umat Islam. Mereka, justru melihat bahwa terdapat konspirasi untuk membangun isu terorisme di dunia Islam dengan memberi citra negative terhadap umat Islam. Tulisan ini berupaya untuk menganalisis tentang asumsi-asumsi di atas, dan bagaimana kita umat Islam menyikapi isu terorisme itu.

Pada 1979, Dinas Intelijen Amerika dan Dinas Intelijen Inggris dalam sebuah seminar yang diadakan untuk membahas makna terorisme menyepakati bahwa "terorisme" adalah : "The use of violence against civil interests to achieve political objectives (Penggunaan kekerasan untuk melawan kepentingan-kepentingan sipil guna mewujudkan target-target politis)." Dari tinjauan global terhadap berbagai undang-undang dan hukum yang berkaitan dengan terorisme, tampak jelas bahwa definisi ini ternyata tidak mendalam, dan tunduk pada orientasi politik dari negara-negara yang membuatnya. Selain itu dalam aplikasinya terlihat ada standar ganda dalam memaknai terorisme karena tidak menyinggung terorisme yang dilakukan oleh negara (state terrorism), katakanlah, invasi Amerika ke Afghanistan dan Irak yang menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar. Amerika dan sekutunya sudah barang tentu tidak mau dikatakan sebagai teroris.

Bila pandangan ini kita pakai, maka Amerika tentunya paling banyak melakukan pelanggaran terhadap masyarakat sipil negara lain, sebagai indikasi standar ganda terhadap makna terorisme.

¹¹⁰Tulisan penulis yang berjudul "Islam dan Terorisme" pernah dimuat di *Sumatera Ekspres*, 25/6/2007.

Antara lain juga ketika Amerika memasukkan HAMAS-Palestina dimasukkan sebagai kelompok teroris dan Israel yang melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat Palestina tidak disebut teroris. Hal ini harus diakui bahwa keberadaan Amerika sebagai satu-satunya negara superpower seringkali dalam menangani permasalahan dunia terkesan memaksakan perspektif dan pendekatan dimilikinya dan terkesan sungguh-sungguh menjadi polisi dunia. Hal ini pula yang membuat Perdana Menteri Rusia, Putin, menjadi berang ketika George Bush merencanakan meletakkan basis pertahanan di Eropa yang menurut Putin merupakan ancaman bagi Rusia.

Ketika media massa menayangkan cuplikan penangkapan dan pengakuan tersangka teroris, orang dapat melihat gambar para pelaku sekaligus setting tempatnya. Saat menyaksikan performance para pelaku yang umumnya memakai baju koko, berkopiah/sorban, berjanggut, ada noda hitam di dahi, dan terdapat bendera hitam bertuliskan La ilaha illa Allah? Saat wartawan mewawancarai istri-istri pelaku Bom Bali I, istri Imam Samudera, Amrozi, dan istri Umar al-Faruq, pada umumnya para isteri mereka mengenakan jilbab hitam dan wajah tertutup cadar. Dikatakan pula, para pelaku terror itu diinformasikan lulusan sekolah Islam (madrasah dan pesantren) dan di antaranya pernah sebagai pejuang Muslim Afghanista. Benar tidaknya mereka melakukan tindakan pemboman merupakan otoritas pihak penyidik kepolisian, suatu yang pasti bahwa symbol-simbol pakaian muslim demikian telah mengarah kepada pencitraan negative bagi umat Islam.

Ada pihak lain berpendapat bahwa bisa saja pelaku teror hanyalah orang-orang yang sengaja direkrut untuk dikorbankan. Para pelaku 'dibina' secara singkat sehingga dia memahami bahwa aksi terror yang diperbuatnya itu merupakan bentuk amal shalih dan wujud perjuangan melawan Amerika Serikat (AS). Padahal, peledakan Bom Bali I dan II, Bom Marriot, atau Bom Kuningan AS tidak dirugikan. Kerugian justru dialami umat Muslim, dimana telah memunculkan kecurigaan terhadap umat Muslim berkepanjangan. Oleh sebab itu, umat Islam (pemimpin, elit agama, umat), dimana pun berada, hendaknya lebih cerdas dalam memahami setiap permasalahan yang bertalian dengan tidak mudah terkena propaganda yang merugikan.

Kita, umat Islam, hendaknya mulai berfikir secara mikro ke dalam diri umat Islam sendiri. Bahwa, para pelaku terorisme-Islam itu memiliki pemahaman terhadap syariat Islam yang begitu lemah. Mereka cenderung lebih mudah dipengaruhi dengan doktrin pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama Islam demi kepentingan pihak/jaringan tertentu. Akan lebih berbahaya lagi, bila pihak/jaringan tersebut menjadi bagian dari rantai jaringan global dalam upaya meruntuhkan Islam. Di sinilah urgensinya mengkampanyekan penerapan syariat secara benar yang perlu dibina agar memiliki pemahaman dan pemikiran benar yang jauh dari perilaku kezhaliman dan kekerasan. Apabila umat Islam secara perlahan dapat dibina dengan baik maka isu-isu terorisme secara perlahan pula dapat tereduksi dengan sendirinya. Memang harus diakui bahwa setiap penganut agama memiliki penganut yang berperilaku menyimpang yang tidak jarang akan merugikan dirinya, keluarga, orang/penganut agama lain.

Akibat negara Islam, termasuk Indonesia, berposisi pada pihak yang lemah (*subordinate*) dalam berbagai sisi, maka tidak sanggup melawan isu dan propaganda tentang terorisme. Singapura, suatu negara migrant dan kecil sekali pun, berani mengatakan Indonesia sebagai sarang teroris dan pendidikan pesantren sebagai basisnya. Tuduhan itu semakin menguat dengan tertangkapnya Abu Dujana. Wajar saja kalau Amerika, Australia dan sekutunya langsung memberikan pujian kepada pemerintah Indonesia atas keberhasilan Polri menangkap pelaku terorisme, Abu Dujana dll. yang membawa symbol-simbol Islam. Hal ini akan memperkuat argumentasinya kepada public dunia bahwa tuduhan dan argumen mereka ternyata benar.

Pandangan Singapura, AS, dan negara-negara Barat itu hanya dapat diperbaiki dengan berbagai cara, sehingga tidak merugikan umat Islam pada umumnya. *Pertama*, jangan sampai ada yang membenarkan aksi terorisme merupakan perintah ajaran Islam. Islam mengajarkan kedamaian. Islam anti-terorisme. Islam merupakan *rahmatan lilalamin*. Dalam Islam memang ada perintah jihad. Seperti dikatakan para ulama, untuk berjihad ada aturan yang harus dipatuhi walau dalam kondisi perang sekalipun, seperti tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, sipil yang tidak beresenjata. Jadi, kasus penghancuran gedung kembar World Trade Centre pada 11 September 2001, jelas bukan jihad, tetapi murni perilaku terorisme individu

atau kelompok (umat Islam?) yang bias saja karena ada rasa benci terhadap Amerika dalam berbagai sepak terjangnya sebagai polisi dunia.

Kedua, perlu dipahami bahwa tentang pandangan kelompok atau individu teroris itu memiliki militansi yang tinggi dan kerahasiaan jaringannya sangat dilindungi dengan taruhan nyawa. Militansi dan prinsip untuk memegang teguh kerahasiaan kelompok mereka sangat diutamakan, bahkan melebihi kelompok mafia sekalipun. Tetapi, kenyataan tentang teroris di Indonesia hari ini ditangkap besok sudah mengaku dan membeberkan jaringannya, sehingga tidak tampak militansi itu. Terlepas dari penangkapan terhadap Abu Dujana mendapat protes dari keluarganya karena dipandang tidak manusiawi, bahkan menyalahi prosedur hukum, kita pantas memberikan apresiasi kepada Polri. Satu persatu pelaku terorisme di Indonesia berhasil ditangkap. Sesungguhnya terorisme beda dengan Islam karena itu terorisme harus ditolak.

Kualitas Kehidupan Umat Beragama¹¹¹

Kualitas umat beragama, bertalian erat dengan sejauh mana kebutuhan individu atau umat beragama dapat terpenuhi. Kualitas (kehidupan) umat beragama, pada prinsipnya, perlu dipahami secara luas. Di Indonesia, upaya peminaan kehidupan umat beragama telah dimulai sejak dikeluarkannya SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (KH Ahmad Dahlan dan Amir Machmud), No 01 BER/MDN-MAG/1969. SKB ini, berkenaan dengan pengaturan beribadah pemeluk agama. Meskipun SKB ini dipandang positif oleh kalangan umat Islam umumnya, tetapi, untuk sebagian penganut Nasrani, terutama Protestan yang banyak sekte, dapat dipandang negatif. Karena itu, pro dan kontra tentang SKB ini seakan berlanjut hingga kini, tentunya masing-masing pihak memiliki dalil atau argument. Dalam pelaksanaan SKB itu tampak tidak selalu mulus.¹¹²

Baru-baru ini, Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP) yang disokong 27 organisasi massa Islam, antar lain: Front Pembela Islam, Barisan Pemuda Persis, Jama'ah Tabligh, dan Hizbut Tahrir sudah menutup 23 gereja di Jawa Barat (*Tempo*, 11 September 2005). Sudah barang tentu, pihak Nasrani, terutama Protestan, merasa

¹¹¹ Paper disampaikan pada *Workshops Peningkatan Wawasan Keagamaan Guru-Curu SMP di Palembang*, tanggal 15-17 September 2005, di Kanwil Depag Sumatera-Selatan.

terancam dan meminta SKB dua menteri itu dicabut. Akan tetapi, hingga kini, SKB itu belum dicabut, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa SKB dua menteri itu bertujuan baik hingga tanpa harus buru-buru mencabutnya, dan perlu melihat kembali kandungan atau persyaratan dalam SKB itu (*Republika*, 5/9/2005). Hal ini menandakan, SKB itu tetap menjadi pedoman dalam pembinaan atau membangun kualitas umat beragama di tanah air.

Bertolak dari kenyataan demikian, perlu kiranya menelaah lebih jauh tentang sejauhmana relevansi SKB dua menteri itu dalam membangun kualitas umat beragama di tanah air. Setidaknya, dalam SKB itu, terdapat tiga dimensi penting yang perlu diperhatikan dalam membangun kualitas umat beragama: faktor intrinsik (intern umat beragama), ekstrinsik (antarumat beragama), dan peran pemerintah.¹¹¹

Pertama, faktor intrinsik, bertalian dengan sejauh mana intern umat beragama tertentu mengupayakan para penganutnya memiliki pengetahuan dan mengamalkan ajaran agamanya dengan benar. Setiap agama memiliki kekhasan tersendiri, terutama bertalian dengan doktrin-doktrin ajarannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama tertentu, semakin tinggi pula kemungkinan meningkatnya frekuensi kualitas keagamaan umat beragama. Faktor intern umat beragama ini diarahkan pada pemberdayaan individu-individu umat beragama agar lebih memahami, mengetahui, dan mempraktekkan ajaran agamanya. Pada akhirnya, keshalehan individu akan tercermin dalam perilaku sehari-harinya.

Untuk membantu dan mewujudkan pembangunan dan peningkatan kualitas umat beragama penganut agama tertentu, dibutuhkan orang-orang (penganut) yang kompeten dibidang keagamaan. Dalam membangun kualitas umat beragama sejumlah pihak memiliki peranan penting dalam memberi basis dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan bagi generasi umat beragama. Misalnya, ulama/kiyai, ustadz/guru-guru pendidikan agama, pendeta, biksu, orang tua muslim/non-muslim, dan berbagai jenis organisasi

¹¹¹ Istilah *intrinsik*, *ekstrinsik*, dan peran pemerintah merupakan modifikasi penulis tentang tiga aspek dalam membina kerukunan umat beragama: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah. Hal ini, tidak merubah esensi kandungan SKB dua menteri itu, tetapi dalam analisisnya diharapkan lebih kontekstual. Lihat: *Hasil Musyawarah Antarumat Beragama, 1981-1982*, terutama hlm.99).

keagamaan. Mereka ini, tanggung jawab umat beragama masing-masing terhadap kualitas intrinsik umat beragama pada penganut agama masing-masing. Misalnya, umat Islam sebagai kelompok agama mayoritas di tanah air memiliki tanggung jawab signifikan terhadap pembinaan generasi muslim pada masa depan. Berbagai isu dan permasalahan social dan keagamaan: narkoba, minuman keras, pergaulan bebas/seks bebas, dan pindah agama dapat direduksi sedemikian rupa apabila pembinaan kualitas umat beragama telah dilakukan dan dikembangkan dengan baik. Pembinaan keagamaan intern umat beragama ini merupakan langkah awal untuk memberi petunjuk (*guidance*) dalam kehidupan umat beragama.

Upaya peningkatan kualitas intrinsik kehidupan umat beragama ini adalah suatu yang mutlak dilakukan oleh segenap umat beragama (Islam, Kristen, Hindu, Budha/Kontusianisme). Hal ini dikarenakan dengan pembinaan (pemberian) pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang benar, berbagai permasalahan sosial-keagamaan yang dialami individu dan kelompok umat beragama dapat ditekan secara alamiah. Sehingga permasalahan keluarga (umat beragama) dapat berkurang secara alamiah pula pembinaan dari aspek intrinsik umat beragama ini tanggung jawab semua pihak umat beragama pada prinsipnya, pembinaan/pembangunan kualitas beragama harus dimulai dari keluarga (muslim/non-muslim), lembaga-lembaga formal, ormas Islam/non-Islam, organisasi keagamaan Islam/non-Islam, pendidikan (Islam/npn-Islam), dan lingkungan masyarakat pluralistik yang kondusif. Pada akhirnya, suatu sosok individu dan komunitas umat beragama diharapkan tercermin dalam perilaku-keagamaannya berdasarkan ajaran agamanya masing-masing.

Individu dan komunitas umat beragama yang berpengetahuan agama yang benar dan shaleh menjalankan ajaran agamanya merupakan kontribusi penting terhadap kualitas umat beragama. Hal ini tercermin dalam berbagai prilaku dan aktivitas kehidupannya dalam masyarakat pluralistik. Setiap agama, pada prinsipnya, mengajarkan untuk menghargai perbedaan-perbedaan pada umat beragama. Kenyataan adanya penyerbuan sekelompok umat Islam terhadap pengikut Ahmadiyah (Bogor) baru-baru ini, menandakan masih lemahnya pembinaan intern umat Islam. Sama halnya, kasus penyerbuan dan penutupan gereja-gereja (rumah dijadikan gereja) oleh AGAB, merupakan dampak dari banyaknya sekte baru pada

agama Kristen-Protestan yang memerlukan gereja baru. Hal ini bertanda pula pembinaan intern umat Nasrani belum optimal pula. Karena itu, pembinaan intern umat beragama secara benar (menurut ajaran agama masing-masing) harus dilakukan oleh umat masing-masing.

Kedua, faktor ekstrinsik, yakni bertalian dengan hubungan antarumat beragama. Bila pada bagian pertama menekankan pentingnya meningkatkan pengajaran dan pengetahuan sebagai proses menuju keshalehan individu umat beragama, pada aspek kedua, faktor ekstrensik, lebih menekankan pada pentingnya instraksi social, keshalehan social dalam konteks hubungan antarumat beragama. Kualitas keshalehan social antarumat beragama itu tentu banyak bergantung pada keshalehan individu umat beragama masing-masing. Upaya pembinaan atau pembangunan kualitas umat beragama memiliki basis (*grass-roots*) pada keshalehan individu tadi. Karena itu, antara keduanya merupakan suatu hubungan saling membutuhkan (*mutual-symbiosis*) yang tak terpisahkan.

Kualitas pengetahuan, pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan pada umat beragama tertentu berpengaruh terhadap kualitas hubungan antarumat beragama. Kualitas umat beragama tercermin dalam perilaku social umat beragama dalam berbagai peran dan statusnya. Ketika keberadaan bangsa kita sedang mengalami berbagai permasalahan berbangsa, seperti: masih maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme, kerusuhan bernuansa etnis/agama, pembakaran rumah ibadah, *money politics* dalam pilkada, pembunuhan, penjarahan, dan separatism, secara tidak langsung atau langsung sebagai dampak dari belum berfungsinya nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa. Dalam hal ini nilai-nilai agama pada umat beragama terkait, secara individu dan kolektif, belum berfungsi optimal.

Kualitas hubungan antarumat beragama, kadangkala, dapat dipengaruhi oleh sejauhmana keseimbangan hubungan kelompok mayoritas penganut agama dan kelompok minoritas penganut agama lainnya. Sebagai mayoritas, misalnya umat Islam di Indonesia, idealnya memang harus member keteladanan dalam berbagai bidang kehidupan: social, ekonomi, politik, budaya, dll. Suatu "bencana" yang mengancam bila mayoritas umat Islam di Indonesia bila kurang berperan optimal dalam beberapa aspek kehidupan tadi. Suatu

keadilan bila mayoritas umat Islam lebih berperan dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiak, bangsa migrant atau umat minoritas agama tertentu lebih berperan dibandingkan bangsa pribumi (umat Islam) yang mayoritas, terutama dalam bidang ekonomi dan politik, maka ketidakseimbangan dan kegoncangan dalam kehidupan masyarakat pluralistic-keagamaan lebih mungkin terjadi. Idealnya, aspirasi agama mayoritas masih tetap relevan diperhatikan. Karena, di banyak negara di dunia ini, mayoritas (agama) kenyataannya lebih berperan. Dalam konteks ini, solusi tentang pro dan kontra tentang SKB tadi hendaknya perlu mendapat legitimasi dari pihak mayoritas umat Islam.

Persoalan hubungan antarumat beragama, pada dasarnya, tidak terpisahkan dari kenyataan kondisi kehidupan berbangsa. Pada masa lalu, disinyalir bahwa kalangan konglomerat (etnis/agama tertentu) telah berkonspirasi dengan penguasa/pemerintah (yang juga banyak yang beragama Islam), sehingga kekayaan menumpuk pada kelompok "konglomerat" dan "penguasa" ini. Dampaknya, intensitas korupsi, kolusi dan nepotisme tidak dapat dihindar, sehingga memunculkan Era Reformasi (sejak 1998). Hingga kini, permasalahan korupsi belum juga tuntas-tuntas, bahkan bangsa ini memiliki peringkat korupsi yang dalam kategori tinggi diantara sejumlah negara di dunia. Hal ini, sekaligus, menunjukkan bahwa kualitas umat beragama di Indonesia belum berfungsi seperti seharusnya, yang diajarkan agama masing-masing. Berbagai permasalahan berbangsa (kualitas kehidupan umat beragama) itu bersifat konprehensif dan tidak parsial. Individu-individu umat beragama paling menentukann kualitas umat beragama dan berbangsa. Karena itu, persoalan kualitas hubungan antar umat beragama tidak hanya ditentukan oleh antarumat itu, tetapi, juga ada variable lain, seperti bagaimana keadaan sosial, ekonomi dan politik berbangsa.

Karena itu, pemerintah sebagai "pelayan", mediator dan fasilitator merupakan salah satu elemen yang dapat menentukan kualitas umat beragama. Umat beragama, pada prinsipnya perlu dibina melalui pelayanan aparat pemerintah yang memiliki peran dan fungsinya strategis dalam menentukan kualitas kehidupan umat beragama, melalui kebijakan diambilnya. Adanya pemerintah dikarenakan adanya masyarakat (umat beragama) sebagai rakyat. Karena itu, aparat pemerintah merupakan representative masyarakat (umat beragama) yang memiliki tanggung jawab pembinaan agar masyarakat menjadi sejahtera dalam kehidupannya. Kurang arief

kiranya jika substansi SKB dua menteri itu, yang menjadi penyebab berbagai permasalahan antarumat beragama, tetapi bagaimana upaya pemerintah bersama umat-umatnya untuk melaksanakannya dengan baik, sehingga memuaskan semua pihak (umat beragama).

Tetapi, dalam kenyataannya, memang harus diakui bahwa seringkali bertolak belakang antara harapan dengan kenyataan kehidupan umat beragama. Kendatipun umat beragama (masyarakat) seharusnya pihak yang harus diurus dan dilayani, kenyataannya, umat beragama belum dilayani dengan optimal. Buruknya kualitas pendidikan, meningkatnya harga BBM, pengusuran tanah dan rumah penduduk, mahalnya biaya pendidikan, meningkatnya pengangguran, masih meluasnya korupsi, dan tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya rasa keadilan (hukum) dan keamanan, merupakan bentuk-bentuk pelayanan pemerintah yang berimbas pada belum memuaskan masyarakat atau umat beragama. Hal-hal demikian dapat diperbaiki hanya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang membela masyarakat atau umat beragama.

Jadi, persoalan kualitas kehidupan umat beragama merupakan persoalan intern dan ekstern umat beragama itu sendiri. Pemerintah, sebagai "pelayan", mediator dan fasilitator, dalam mengatur kehidupan umat beragama sangat diperlukan yang terlihat dalam kebijakan yang memihak aspirasi semua umat beragama secara proporsional. Tanggung jawab dan kesadaran kolektif antara umat beragama dengan pemerintah sangat diperlukan. Karena itu, mungkin tidak ada yang salah dengan SKB itu, tetapi implementasinya belum memuaskan semua pihak.

Re-Konstruksi Kepemimpinan Elite - 'Deutro Melayu' dalam Demokrasi Transisi¹¹⁴

Sebagian kalangan berpendapat bahwa, kendatipun, bangsa ini, telah memasuki era Reformasi dalam usia sekitar 16 tahun, sejak 1998, tidak berlebihan bila bangsa ini belum sepenuhnya keluar dari 'krisis'—krisis multi-dimensi dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kini, dalam bidang tertentu, justeru telah memunculkan persoalan baru yang sebelumnya tidak diprediksikan.¹¹⁵ Agenda

¹¹⁴Paper disampaikan dalam *Seminar Internasional* tentang "Budaya Melayu dan Akar Tradisi Nusantara" diselenggarakan Yayasan Malaya, LKI FIB Universitas Indonesia, Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, dan AIFIS, Kuto Besak Theater, Jl. Sekanak, Palembang, 8 Juni 2015.

¹¹⁵Dalam kurun waktu 16 tahun itu, setidaknya ada empat presiden yang diberi amanah

reformasi 1998, sebagai *'common-will'* dalam upaya pembenahan berbagai sendi kehidupan berbangsa, tampak belum terlalu dirasakan masyarakat luas, pluralistik, misalnya, angka korupsi belum banyak perubahan, pengangguran masih tinggi, harga BBM cenderung terus naik, nilai rupiah tembus di atas Rp 13.000,-, konflik sosial, kriminal beragam modus, *begal*, narkoba, rasa aman, pelayanan publik, dan lain-lain. Semua itu, sesungguhnya banyak tertumpu pada kompeten dan kualitas kepemimpinan nasional dan daerah.

Adanya tuntutan *reshuffle* para menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, yang bekerja baru bekerja sekitar delapan bulan, merupakan respons masyarakat terhadap pentingnya pembenahan berbangsa, agar menjadi lebih baik. Ke depan, agaknya masyarakat berharap Presiden Jokowi lebih memilih menteri yang tepat, bukan sekedar titipan partai yang terkadang tak kompeten dan orang baru yang tak punya pengalaman birokrasi.¹¹⁶ Disadari, persoalan berbangsa merupakan persoalan sistemik, ditentukan banyak faktor, salah satu faktor yang paling menentukan, yakni faktor 'kompetensi' elite, baik nasional dan lokal. Sejak 1999, dengan lahirnya era Otonomi Daerah, sebagian dari kekuasaan 'pusat' telah didistribusikan ke daerah.

Kenyataannya, pembangunan yang berlangsung di daerah memang tidak serta-merta menghasilkan pemerataan. Justeru, banyak menghasilkan pembangunan berwatak kekerasan. Pembangunan fisik dan infrastruktur di beberapa daerah, misalnya, terutama di kota-kota besar sering kali memperlihatkan adanya unsur kekerasan dalam menyelesaikan masalah yang bertalian dengan rakyat miskin, kendatipun atas nama ketertiban.¹¹⁷ Tulisan ini, karenanya, lebih memfokuskan diskusi tentang: "Re-konstruksi" Kepemimpinan Elite-*Deutro Melayu* dalam Demokrasi Transisi".

memimpin negeri ini, sejak dari B.J. Habibie (1998-1999), KH. Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati Soekarnoputri (2001-2004), hingga Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009; 2009-2014).

¹¹⁶Sejak era Presiden Suharto, susunan kabinet selalu memadukan birokrat baru dan lama, teknokrat dan politikus. Ciri khas utama Suharto, menurut seorang Indonesianis, adalah mempertahankan sekurangnya 15 persen muka lama yang menguasai birokrasi. Maka kebijakan-kebijakannya tidak putus (*Tempo*, 18-24 Mei 2015).

¹¹⁷Siti Aminah, *Kuasa Negara pada ranah Politik Lokal*, Frenadamedia Group, Jakarta, 2014, 115.

'Deutro-Melayu', Elite, dan 'Jati Diri'

Siapa orang Melayu? 'Melayu' merujuk kepada mereka yang bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat-istiadat orang Melayu. Perkataan Melayu mungkin berasal daripada nama sebuah anak sungai yang bernama Sungai Melayu di hulu Sungai Batang Hari, Sumatera. Di sana letaknya Kerajaan Melayu sekitar 1500 tahun lalu sebelum atau pada masa Kerajaan Srivijaya. Dari segi etimologi, perkataan 'Melayu' dikatakan berasal dari kata Sanskerta: 'Malaya' yang berarti 'bukit' atau 'tanah tinggi'. Ada pula sumber sejarah yang mengatakan bahwa kata 'Melayu' berasal dari Sungai Melayu di Jambi.¹¹⁸ Khairul A. Mastor, Putai Jin, dan Martin Cooper mengatakan bahwa 'orang Melayu' (*Malays*) adalah mereka yang merupakan penduduk asli (*indigenous*) di wilayah Malaya, suatu wilayah di Semenanjung Malaya. Orang Melayu juga bertempat tinggal di Brunei, Singapura dan Indonesia, Thailand Selatan dan Kamboja maupun diluar Asia Tenggara.¹¹⁹

Istilah 'Melayu', seperti dikeluarkan UNESCO pada 1972, merupakan suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Madagaskar. Sedangkan menurut Perlembagaan Malaysia, istilah 'Melayu' hanya merujuk kepada seseorang yang berketurunan Melayu yang menganut agama Islam. Dengan kata yang lain, bukan semua orang yang berketurunan dari pada nenek moyang Melayu adalah orang Melayu. Istilah 'Melayu' untuk merujuk kepada nama bangsa atau bahasa adalah suatu perkembangan yang agak baru dari segi sejarah, yaitu setelah adanya Kesultanan Melayu Melaka. Hingga abad ke-17 istilah 'Melayu' yang merujuk kepada bangsa digunakan secara luas; sebelumnya, istilah 'Melayu' hanya merujuk kepada keturunan raja Melayu dari Sumatera.

Setidaknya, terdapat dua pandangan/perspektif tentang 'siapa orang Melayu' itu, yakni:

Pertama, dari perspektif Undang-Undang (Malaysia). Di Malaysia, orang Melayu didefinisikan sebagai "seorang yang beragama

¹¹⁸Harun Amirurasyid, *Kajian Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu*, Pustaka Melayu, Singapura, 1966, hlm. 4-5 (diakses via internet, 27/9/2014).

¹¹⁹Khairul A. Mastor, Putai Jin, dan Martin Cooper, 'Malay Culture and Personality', *Journal of American Sciencies*, Volume 44 No. 1 September 2000, p. 96. Lihat pula: (Abdullah Idi, *Bangka, Sejarah Sosial Cina-Melayu*, Tiara Wacana, 2011, hlm. 1-2),

Islam; bertutur bahasa Melayu; mengamalkan adat istiadat Melayu; dan lahir (sebelum hari merdeka) di Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia) atau di Singapura.¹²⁰ Istilah atau definisi orang Melayu dalam perspektif pertama ini agak kompleks. Definisi ini orang Melayu sebagai orang yang bertutur dalam Bahasa Melayu, yang setidaknya meliputi orang di Malaysia, Indonesia, dan (sebagian) Thailand dan Filipina. Tetapi, di Indonesia, orang (etnis) Melayu merupakan salah satu dari sekitar 400-an suku bangsa. Orang Indonesia memperkenalkan dirinya umumnya dengan sebutan 'orang Indonesia' dengan bahasa resmi 'bahasa Indonesia' yang akarnya berasal dari bahasa Melayu. Definisi 'orang Melayu' dalam perspektif ini, bagi Malaysia, ditetapkan lebih dikarenakan kepentingan politik (Malaysia).

Kedua, dari persektif sosial-antropologi. Menurut Syed Husin Ali yang merupakan ahli antropologi Malaysia, orang Melayu itu dari segi lahiriahnya, umumnya berkulit sawo matang, berbadan sederhana besar serta tegap dan selalu bersikap lembut serta berbudi bahasa. Dari segi etnologi, Melayu bermakna kelompok masyarakat yang mengamalkan sistem kemasyarakatan dwisisi dan kegenerasian termasuk dalam bangsa Mongoloid. Suku/etnis Melayu di Malaysia adalah Serawai; suku/etnis Melayu di Indonesia adalah Deli (Sumatera Utara), Bukit (Riau), Anak Dalam (Riau), Melayu Jambi, Melayu Palembang, Melayu Bengkulu.

Dalam konteks asal-usul orang Melayu, terdapat dua teori yang kerap dibicarakan ahli ilmu sosial-antropologis. Dua teori itu: *Pertama*, bangsa Melayu berasal dari Yunnan (Teori Yunnan); (2) bangsa Melayu berasal dari Nusantara (Teori Nusantara). Teori ini didukung sejumlah ahli: R.H Geldern, J.H.C Kern, J.R Foster, J.R Logen, Slamet Muljana (Indonesia) dan Asmah Haji Omar (Malaysia), dengan beberapa alasan.¹²¹

Kedua, bangsa Melayu berasal dari Nusantara (Teori Nusantara). Teori ini didukung para ahli seperti J.Crawford, K.Himly, Sutan Takdir Alisjahbana dan juga Gorys Keraf. Teori ini adalah didukung dengan beberapa argumen: (1) bangsa Melayu dan bangsa Jawa memiliki peradaban (*tamadun*) yang tinggi pada abad ke-19. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Hal ini diyakini bahwa orang Melayu tidak berasal dan berkembang

¹²¹ Lihat: (Madiana dan Hasnah, 'Pengkajian Malaysia....', *ibid.*).

di Nusantara; (2) K.Himly tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa Bahasa Melayu serumpun dengan Bahasa Champa. Baginya, persamaan yang berlaku di kedua-dua bahasa adalah satu fenomena 'ambilan'; (3) Manusia kuno Homo Soloinensis dan Homo Wajakensis terdapat di Jawa. Penemuan manusia kuno ini di Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan dari manusia kuno, yakni berasal dari Jawa dan mewujudkan peradaban tersendiri; dan (4) Bahasa di Nusantara (Bahasa Austronesia) mempunyai perbedaan dengan bahasa di Asia Tengah (Bahasa Indo-Eropah). Tetapi, kedua ini, teori ini agaknya kurang populer.

Berbagai teori asal-usul orang Melayu yang diajukan para ahli purbakala dan sosio-antropologi memang tidak selalu sama persis, dan sering berbeda. Suatu hal yang lebih penting adalah sudah ribuan tahun orang-orang tinggal di Semenanjung Malaya. Dan orang-orang itu tidak diragukan lagi merupakan nenek moyang orang Melayu sekarang. Kelompok Neolitik ini sering dinamakan Proto-Melayu.¹²²

Dalam kaitannya dengan definisi dari perspektif sosio-antropologis, pantas dijelaskan bahwa bangsa Melayu telah ada sejak zaman pra-Hindu-Budha, selanjutnya berkembang dan menyebar ke berbagai pelosok dunia—mendefinisikan Melayu sebagai kesadaran sejarah dan budaya. Secara umum, identitas bangsa Melayu hingga kini ditopang oleh empat pilar yang terdiri dari empat fase sejarah: *fase pra-Hindu-Budha*; *fase Hindu-Budha*; *fase Islam*; dan *fase kolonialisme*. Dalam tulisan Mahyudin Al Mudra, dikatakan bahwa karena panjangnya perjalanan sejarah, luasnya persebaran area, dan perbedaan pengalaman dengan bangsa lainnya, maka level pengaruh pilar-pilar itu terhadap suku bangsa Melayu, antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Hal itu, terletak ada dimana suku bangsa Melayu itu berada, karena lingkungannya, intensitas interaksinya dengan budaya lain. Bisa jadi, pengaruh Islam terhadap suku bangsa Melayu, pada tempat tertentu, tampak kuat, tetapi di daerah lainnya sebaliknya. Hal itu, dapat dijelaskan melalui empat pilar/fase sejarah.¹²³

¹²²Husin Ali, 'Rakyat Melayu: Nasib dan Masa Depan...,' dalam Abdullah Idris, 'Bangsa Sejarah Sosial Cina-Melayu...', *op. cit.*, hlm. 12.

¹²³Lebih lanjut, lihat kembali tulisan: (Mahyudin Al Mudra, 'Redefinisi Melayu: Upaya Menjembatani Perbedaan Kemelayuan Dua Bangsa Serumpun', *Melayu Online.com* (diakses, 27/9/2014).

Apakah jati diri orang Melayu itu? Dari perspektif Undang-Undang, di Malaysia, orang Melayu didefinisikan sebagai: "seorang yang beragama Islam; bertutur bahasa Melayu; mengamalkan adat istiadat Melayu; dan lahir (sebelum hari merdeka) di Persekutuan Tanah Melayu (Malaya) atau di Singapura". Sebetulnya, tidak ada permasalahan krusial tentang definisi orang Melayu di Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand (sebagian), dan Brunei Darussalam—sebagai puak Melayu. Penekanannya, terletak pada 'beragama Islam' dan 'menjalankan adat-istiadat Melayu'. Hal ini, sama halnya, dengan menjalankan perintah agama yang dianut orang Melayu di Malaysia dan negara serumpun lainnya, yakni beragama Islam. Jadi, jati diri orang Melayu yang paling penting adalah menjalankan ajaran agamanya, dimana faktanya agama Islam menjadi dominan dianut orang Melayu (di negara-negara itu).

Jika, ada orang Melayu beragama lain, selain Islam, tetapi asal-usul nenek moyangnya sama, dari perspektif sosio-antropologis, hal itu juga merupakan identitas/jati diri yang dimiliki, yang harus dihargai dan dihormati. Konsep Islam yang menghargai perbedaan dan toleransi sangat jelas, dan bukanlah persoalan lagi. Hal ini sama halnya, sebagai masyarakat plural, Indonesia, apa yang termaktub dalam sila ke-1 Pancasila, dimana intinya 'setiap penganut agama patut menjalankan ajaran agamanya'. Para *founding fathers* agaknya sudah memprediksi tentang 'kebutuhan' masyarakat pluralistik-Indonesia dengan merumuskan kelima sila dari Pancasila, sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, meskipun keyakinan berbeda, tapi asal-usulnya sama, dalam konteks berbangsa bukanlah persoalan.

Agama dan etnisitas merupakan konsekuensi adanya klaim-klaim terhadap identitas itu. Sebagai seorang Melayu, bisa saja mengatakan orang: Melayu-Bangka, Melayu-Riau, Melayu-Palembang, Melayu-Jambi, dan Melayu-Deli (Medan). Karena, konsep 'identitas' dan 'etnisitas' adalah konsep tentang identifikasi diri dan asal-usul sosial yang bersifat relasional. Disisi lain, dan konteks berbangsa, orang mengatakan sebagai 'orang Indonesia'; disisi lain, sebagai 'orang Muslim' atau 'orang Kristiani'. Seperti dikatakan Fredrik Barth (1969) bahwa etnisitas dapat dikatakan eksis ketika orang mengklaim identitas tertentu bagi dirinya dan

didefinisikan oleh orang lain juga dengan identitas yang diklaimnya itu.¹²⁴

Re-Konstruksi *Elite Deutro-Melayu*

Bernard T. Adeney (2004) menuturkan bahwa kebudayaan modern dan post-modern berdampak pada perubahan sosial dalam berbagai sendi kehidupan dengan arus kecepatan yang deras. Perubahan itu, dipicu oleh pertukaran informasi pada setiap detiknya oleh *cybermedia*, televisi, radio dan media lainnya. Media-media informasi itu mengaburkan batas-batas fisik dan budaya –oleh Arjun Appadurai disebut ‘deteritorialisasi’ sehingga menciptakan dunia baru dengan batas-batas wilayah dan nilai yang bersifat relatif. Irwan Abdullah (2005) mengatakan proses ‘deteritorialisasi’ ini merupakan suatu proses krusial dikarenakan sebagai titik balik peradaban kontemporer memiliki implikasi yang luas dalam beragam proses sosial dan budaya. Implikasi positif atau negatif dapat terjadi dalam proses sosial dan budaya itu, yang dimulai dari cara berfikir dan cara memandang dunia. Upaya-upaya menduniakan nilai-nilai luhur Melayu menjadi penting sebagai penyeimbang ide dan gagasan dari luar dunia Melayu yang cenderung destruktif.¹²⁵

Muchtar Naim mengungkapkan bahwa kecuali suku-bangsa Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan kelompok warga non-pribumi (keturunan Cina, Arab, dan India), semua penduduk Indonesia ini tergolong kedalam suku-bangsa Melayu. Bangsa Melayu yang sama dan serumpun juga menempati negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Brunai, Pattani (Thailand), dan Moro (Filipina). Belahan mereka ditemukan pula ada di Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Madagaskar, Suriname, dll. Jumlah mereka sekitar 300-an juta yang menempatkan mereka sebagai salah satu suku terbesar di dunia. Karena mayoritas terbesar dari suku bangsa Melayu adalah

¹²⁴Dengan demikian, etnisitas, harus dimaknai sebagai identifikasi seseorang dalam berafiliasi dengan kelompok sosialnya. Identitas dan etnisitas merupakan hasil konstruksi (proses) sosial yang lazim disebut *askripsi* (*ascription*). *Askripsi*, proses penandaan sekelompok orang/masyarakat tertentu: apa pun tandanya (sebagai ciri khas, *labelling* kelompok tertentu), umumnya berlangsung hingga berabad-abad lamanya. Dalam proses itu terjadi interaksi orang dari beragam latar belakang di berbagai bidang kehidupan. Artinya, proses *askripsi* tidak akan berlangsung/terjadi justru ketika seorang benar-benar menyendiri, tidak berinteraksi. Agar jati diri orang (nilai-nilai) Melayu tidak mengalami proses kelunturan zaman, mereka seharusnya berfikir dan bertindak ke depan, *the future*, seperti telah diteladani nenek moyang mereka-mampu beradaptasi dan berinovasi-sesuai dengan zamannya, lihat: (Abdullah Idi, *ibid.*)

¹²⁵Mahyudin Al Mudra, “Redefinisi Melayu...”, *op. cit.*

Muslim, mereka adalah juga kelompok penganut agama Islam terbesar di dunia.¹²⁶

Di Malaysia, konsep Deutro Melayu ('Melayu-Baru') dikemukakan pada 1990-an, oleh Mahathir Muhammad. Konsep ini dimunculkan, sebagai upaya meningkatkan keyakinan diri dikalangan orang Melayu agar terus menuju kemajuan, sejajar dengan bangsa2 yang sudah maju: "satu kumpulan etnik yang berbudaya mengikut peredaran masa, yang mampu menghadapi segala cabaran, yang sanggup bersaing tanpa keistimewaan, yang berpendidikan serta berilmu canggih, ikhlas, berdisiplin, amanah, dan cakep". Muhamammad Muhd Taib (1996) mengatakan bahwa kelemahan orang 'Melayu Lama' merupakan orang2 Melayu Islam yang masih melaksanakan tradisi primitif, animisme, Hindu lama yang bercampur-baur dengan Islam. Contoh: lenggang perut, puja pantai, mandi safar, keramat, dll. Orang 'Melayu Lama' juga memiliki perasaan rendah diri (*inferior*) sering bergantung dgn orang lain untuk mendapatkan modal, teknologi, keahlian, dan hak cipta.¹²⁷

Suku bangsa Melayu di Nusantara, dari perspektif antropologi, dapat dikelompokkan kedalam suku Melayu Tua (*Proto-Malay*) dan suku Melayu Muda (*Deutro-Malay*). Suku Melayu Tua seperti suku Batak, Nias, Mentawai, Enggano di Sumatera. Lalu, suku Dayak di Kalimantan, suku Toraja dan Minahasa di Sulawesi—formalnya masih animisme dan beragama Kristen—karena dari semula telah menjadi sasaran utama dari usaha kristenisasi penduduk pribumi di masa kolonial Belanda dan era kemerdekaan; sementara suku Melayu Muda dimanapun umumnya beragama Islam. Suku Melayu Muda yang ada di Jawa, Madura, dan Sunda diluar Jawa memiliki sikap dan sudut pandang budaya yang umumnya sinkretik-sentripetal; dan, suku Melayu Muda yang ada di luar Jawa memiliki sikap dan sudut pandang yang umumnya sintetik-sentrifugal.¹²⁸

Hal memperlihatkan bahwa karena Melayu itu identik dengan beragama Islam—dan Islam sebagai 'sumber' nilai-nilai Melayu—dan kenyataannya umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas, maka

¹²⁶Muchtar Naim dalam Abdullah Idi, 'Konstruksi Deutro Melayu: Peranan Elite Deutro Melayu Islam Menuju Indonesia Baru', *Seminar Nasional*, dilaksanakan Pusat Kajian Melayu Fakultas Sadab dan Humaniora, UIN Raden Fatah Palembang, 29 April 2015.

¹²⁷Zahari Awang dalam Abdullah Idi, 'Konstruksi Deutro Melayu....', *ibid.*

¹²⁸Abdullah Idi, 'Rekonstruksi Deutro Melayu....', *op.cit.*

peranan elite Melayu memiliki peranan strategis. Terlebih, ketika bangsa Indonesia sedang mengalami 'transisi demokrasi' yang beragam dinamikanya, peranan kepemimpinan elite Melayu memiliki tanggung jawab terdepan terhadap 'recovery' dan kemajuan bangsa ini. Maju dan mundurnya bangsa ini, tentu sangat terletak pada kompetensi dan kualitas kepemimpinan elite Melayu-Muda (Deutro-Melayu) ditengah masyarakat pluralistik dan dalam iklim 'Demokrasi Transisi' ini.

Seperti diketahui, bahwa fenomena demokrasi Indonesia pascareformasi menunjukkan kondisi demokrasi dalam proses 'belajar' atau 'demokrasi transisi'. Demokrasi dalam proses 'transisi' justeru memperlihatkan sejumlah anomali sosial dan perilaku menyimpang (*social deviance*) di masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bsuhkan dah mengarah kepada 'krisis' etika sosial. Hal ini, sesungguhnya kontras dengan cita-cita Reformasi 1998, yakni sebagai suatu era Reformasi yang menggantikan Orde Baru yang dikatakan sebagai era 'otoriter'. Karenanya, upaya 'pencerahan', *enlighten*, atau re-konstruksi kepemimpinan elite-Melayu, baik pada level nasional maupun lokal terasa urgen, sehingga, agar suatu saat bangsa ini menjadi produktif dan berkompetitif dalam identitasnya, yang 'religius' seperti tercermin dalam sila ke-1 Pancasila.

Pergantian rezim yang dikatakan 'otoriter' ke rezim demokrasi ditandai dengan perpindahan kekuasaan dari 'satu tangan' beralih kepada kekuasaan menempatkan lembaga perwakilan memiliki posisi dan porsi kekuasaan yang lebih besar. Suatu kekuasaan yang dijalankan oleh suatu institusi dimana mereka (wakil rakyat) yang duduk di dalamnya adalah pilihan rakyat. Hal ini, diharapkan aspirasi dan cita-cita masyarakat lebih mudah difahami dan dimanifestasikan dalam program pembangunan. Kehidupan politik dan budaya masyarakat juga menunjukkan perubahan signifikan, dimana kebebasan berpendapat memiliki tempat. Penguatan masyarakat sipil menjadi agenda bersama bagi semua elemen masyarakat, dan otorianisme sebagai 'masa lalu'.¹²⁹

¹²⁹Pada era Reformasi 1998, suatu iklim demokrasi yang terjadi di Indonesia merupakan gelombang besar arus demokratisasi. Demokrasi menjelaskan dan menguji proses dimana pemerintah, negara dan masyarakat mencoba beralih dari bentuk pemerintahan otoriter menjadi lebih demokratis. Dalam hal ini, memang terdapat perdebatan mengenai arti demokrasi, jenis demokrasi dan level demokrasi yang secara realistis diharapkan dapat diwujudkan, seperti dalam Jean Grugel (2002). Sebuah gelombang demokratisasi, dalam pandangan Samuel Huntington adalah sekelompok dari rezim non-demokratis ke rezim

Demokrasi yang terjadi di Indonesia sebagai bagian dari arus besar gelombang ketiga di negara-negara dunia ketiga dan negara bekas komunis. Dalam konteks gelombang demokratisasi, Huntington membagi proses peradaban manusia modern menjadi tiga gelombang, dimana tiap gelombang tersebut telah mempengaruhi sejumlah negara, dan selama tiap-tiap gelombang itu sejumlah transisi rezim terjadi kearah yang tidak demokratis. Dalam melakukan pembagian gelombang demokratisasi itu, Huntington memberikan catatan bahwa sejarah bukanlah suatu yang teratur dan perubahan politik tidak dapat dipilah-pilah agar tepat masuk ke dalam kotak sejarah yang rapi. Menspesifikasikan secara ketat kapan sebuah transisi rezim terjadi sering kali merupakan upaya yang subyektif. Bagaimana pula subyektivitas pada upaya menspesifikasi secara tepat waktu terjadinya gelombang demokratisasi dan gelombang baliknya.¹³⁰

Secara keseluruhan, gerakan menuju demokratisasi merupakan suatu gerakan yang bersifat global. Gelombang demokratisasi dan arus baliknya menggambarkan suatu pola 'dua langkah maju, satu langkah mundur'. Transisi gelombang ketiga yang terjadi di Indonesia merupakan proses politik yang kompleks yang melibatkan beragam kelompok yang berupaya memperoleh kekuasaan dan mendukung atau menentang demokrasi serta tujuan-tujuan lainnya. Dari perspektif proses demokratisasi, para peserta penting dalam proses ini terdiri dari kelompok konservatif, pembaharu liberal, pembaharu demokratis dalam koalisi pemerintah, dan kelompok moderat demokratis serta ekstremis revolusioner di pihak oposisi.¹³¹ Dalam hal ini, Huntington menggambarkan bahwa ada tiga proses transisi dalam demokrasi: *transformation*, *replacement*, dan *transplacement*.¹³²

demokratis, yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dalam jumlah signifikan dan lebih besar dari pada transisi menuju arah sebaliknya. Sebuah gelombang biasanya biasanya meliputi liberalisasi atau demokratisasi sebagian pada sistem-sistem politik yang tidak sepenuhnya menjadi demokratis. Lihat pendapat Huntington dalam: (Fahri Hamzah, *Demokrasi, Transisi, Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik*, Faham Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 5).

¹³⁰Fahri Hamzah, "Demokrasi, Transisi, Korupsi....", *ibid.*, hlm. 6.

¹³¹*Ibid.*, hlm. 6.

¹³²(1) *Transformation*, dimana pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter memelopori dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sebuah sistem. Transformasi menjadi penyebab sekitar 16 dari 35 transisi gelombang ketiga yang telah berlangsung atau mulai berlangsung menjelang akhir dasawarsa

Jika memperhatikan sifat transisi demokrasi di Indonesia, demokratisasi yang terjadi dikategorikan *replacements*. Dimana ketika itu kelompok pembaharu masih lemah dan bahkan mungkin tidak ada dalam rezim pemerintahan Orde Baru. Unsur-unsur yang dominan dalam pemerintahan adalah konservatif yang dengan gigih menentang perubahan rezim. Konservativisme ini terjadi dapat saja dikarenakan keengganan untuk berubah sehingga cenderung mempertahankan *status quo* atau bisa pula dikarenakan *pressure* dari rezim berkuasa Orde Baru. Situasi demikian tentu sulit akan terjadinya adanya isu peralihan kepemimpinan nasional dimunculkan secara formal dari dalam tubuh pemerintahan rezim Orde Baru sendiri.¹³³

Maju dan mundurnya suatu komunitas, masyarakat, dan bangsa ini ke depan sangat ditentukan sejauhmana peranan seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin. Seorang elite-Melayu menduduki posisi jabatan tertentu dalam beragam struktur birokrasi, baik nasional maupun lokal, dapat disebut pemimpin. Tetapi, secara formal, seorang diangkat menjadi pemimpin, pejabat birokrasi, pejabat politis, tetapi secara substantif, belum tentu seorang pemimpin

1980. Interaksi antara kelompok pembaharu dengan konservatif dalam pemerintah koalisi merupakan interaksi yang terpenting. Transformasi hanya terjadi jika kelompok pembaharu lebih kuat dari kelompok oposisi, dan jika kelompok moderat lebih kuat dari kelompok ekstremis. (2) *Replacement*, dimana kelompok pembaharu masih lemah atau tidak ada dalam rezim tersebut. Unsur-unsur yang dominan dalam pemerintahan adalah kelompok konservatif yang dengan gigih menentang perubahan rezim. Akibatnya, baru bisa terwujud apabila kelompok oposisi makin kuat dan pemerintah semakin lemah hingga jatuh dengan sendirinya atau digulingkan. Demokratisasi yang terjadi dalam gelombang ketiga umumnya merupakan kerjasama dengan penguasa. Hanya enam *replacement* terjadi menjelang tahun 1990. Dalam *replacement*, interaksi antara pemerintah dengan kelompok oposisi serta interaksi antara kelompok moderat dengan kelompok ekstremis berperan penting. Kelompok oposisi pada akhirnya mesti lebih kuat dari pada pemerintah, dan kelompok moderat mesti lebih kuat dari pada kelompok ekstremis. (3) *transplacements*, dimana demokrasi merupakan hasil aksi bersama pemerintah dan kelompok oposisi. Dalam pemerintahan itu, keseimbangan antara kelompok konservatif dengan kelompok pembaharu sedemikian rupa, sehingga pemerintah bersedia merundingkan, tetapi tidak bersedia memprakarsai perubahan rezim, berbeda dengan situasi dimana kelompok konservatif menimbulkan *replacements*. Sekitar 11 dari 35 kasus liberalisasi dan demokratisasi yang dimulai berlangsung pada 1970-an dan 1980-an mendekati model *transplacements*; misalnya Polandia, Cekoslovakia, Uruguay dan Korea. Dalam *transplacements*, interaksi utama adalah interaksi antara kelompok pembaharu dengan kelompok moderat yang perbedaan kekuatannya tidak begitu timpang dan masing-masing kelompok mampu mendominasi kelompok anti demokrasi yang berada pada masing-masing sisi dari garis pemisah antara pemerintah dengan pihak oposisi. Lihat Huntington dalam Fahri Hamzah: (*ibid.*, hlm. 7-9).

¹³³*Ibid.*, hlm. 9.

sesungguhnya. Nurcholish Madjid¹³⁴ mengatakan bahwa cara lain untuk menciptakan kepemimpinan yang bersih yakni dengan memperkuat orientasi-orientasi etika berdasarkan agama. Sudah tepat apabila dikatakan bahwa Indonesia—karena kenyataan bahwa Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia—diharapkan memanfaatkan sumber ajaran Islam untuk orientasi etikanya.

Istilah *elite* lazim didefinisikan sebagai anggota suatu kelompok kecil dalam masyarakat yang tergolong disegani, dihormati, kaya (materi-ekonomi) serta berkuasa. Kelompok *elite* adalah kelompok minoritas superior yang posisinya berada puncak strata, memiliki kemampuan mengendalikan kegiatan ekonomi dan politik, serta sangat dominan mempengaruhi proses pengambilan keputusan strategis dan penting. Itulah sebabnya dalam banyak hal kelompok *elite* tidak hanya diposisikan sebagai pemberi legitimasi, tetapi lebih dari itu, mereka merupakan panutan sikap dan acuan pelbagai tindakan, dan oleh masyarakat diharapkan dapat berbuat nyata untuk kepentingan bersama. Kelompok lain yang dikuasai dan didominasi kelompok *elite* dinamakan *massa*. Mereka adalah mayoritas inferior, yang posisinya dalam stratifikasi masyarakat berada dibawah, tidak memiliki kemampuan kuat untuk mengendalikan kegiatan ekonomi dan politik serta dalam proses pengambilan keputusan penting.¹³⁵

Agama diartikan sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal. Dalam arti, bahwa semua masyarakat memiliki cara berfikir dan pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut agama (*religious*). Sejumlah hal yang berhubungan dengan 'judul' agama, termasuk dalam superstruktur: agama terdiri atas tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan, dan nilai-nilai spesifik dimana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka. Karena agama juga mengandung komponen ritual, maka sebagian agama tergolong juga dalam struktur sosial.¹³⁶

¹³⁴Nurcholish Madjid, "Peranan Islam dalam Proses Politik di Indonesia", *Islam Kemodernan dan keindonesiaan*, Pengantar: Anies Baswedan dan Dawam Raharjo, Penerbit Mizan, 2013, hlm. 111.

¹³⁵Sunyoto Usman, 'Elite dan Masyarakat', *Materi Kuliah Sosiologi Program Doktor Sosiologi, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 2005*, hlm. 1.

¹³⁶Para ilmuwan sosial menghadapi banyak kesulitan dalam merumuskan agama dengan tepat. Masalah pokok dalam mencapai suatu definisi yang baik ialah dalam menentukan dimana batasan gejala itu harus ditempatkan. Roland Robertson (1970) membagi dua jenis utama definisi agama yang diusulkan ilmuwan sosial: *inklusif* dan *eksklusif*. Definisi *inklusif* merumuskan agama dalam arti seluas mungkin yang memandangnya sebagai setiap sistem

Dalam setiap komunitas, kehadiran seorang *elite* merupakan sebuah kebutuhan, karena setiap warga masyarakat, *massa*, membutuhkan seorang *elite*. Kebutuhan seorang *elite* itu, sebagai panutan dan tauladan bagi mereka dalam proses penciptaan keteraturan dan pola interaksi dalam komunitasnya. Suzanne Keller mengatakan bahwa kepemimpinan sosial merupakan salah satu kekuatan yang menyangga masyarakat yang teratur.¹³⁷ Kehadiran seorang *elite* diharapkan dapat mempertahankan kehidupan sosial, politik, agama, ekonomi dan budaya. Kehadiran *elite* juga diharapkan dapat mencegah ekspansi pihak luar dalam komunitas itu, yang dapat mengancam keutuhan kelompok.

Pada suatu komunitas sosial, terkadang mereka, *elite*, yang menduduki suatu jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan lainnya, sebagian kalangan memandangnya sebagai pemimpin. Padahal, terkadang kualitas kepemimpinan, pribadi, integritas, tipologi kepemimpinan dan seleksi sejarah atas label pemimpin terkadang belum teruji. Bahkan, suatu hal yang lazim, tindakan dan perilaku pemimpin justru belum terlalu mendorong orang lain untuk maju dan berkembang, mendorong optimisme, dan kurang memberi ketauladanan. *Elite* seperti ini, selanjutnya, terkadang pula bukannya 'melayani' tapi selalu minta 'dilayani'.

Elite Deutro-Melayu, jika dilihat dari identitas dan jati dirinya, merupakan *elite*, idealnya lebih berorientasi kekuasaan yang bersifat hakiki dan autentik. Dari makna autentik teks Islam (al-Qur'an dan al-Sunnah), setiap manusia tidak ada perbedaan, karena perbedaan dalam

kepercayaan dan ritual yang diresapi dengan 'kesucian' atau diorientasikan kepada 'penderitaan manusia yang abadi'. Mereka yang menyukai pandangan inklusif, memandang agama sebagai bukan saja sistem-sistem yang seistik yang diorganisasi sekitar konsep kekuatan supernatural, tetapi juga berbagai sistem kepercayaan nonseistik, seperti komunisme, nasionalisme, dan humanisme. Sementara itu, definisi eksklusif, membatasi istilah agama itu pada sistem-sistem kepercayaan yang mempostulatkan eksistensi makhluk, kekuasaan, atau kekuatan supernatural. Sistem-sistem kepercayaan seperti komunisme atau humanisme, karena tidak mencakup suatu dunia supernatural, secara otomatis dikeluarkan, meskipun mungkin diterima bahwa sistem-sistem kepercayaan nonteistik demikian itu memiliki elemen-elemen yang sama dengan sistem-sistem keagamaan. Salah satu contoh definisi inklusif, seperti diungkapkan Durkheim bahwa 'agama ialah suatu sistem kepercayaan yang disatukan oleh praktek yang bertalian dengan hal-hal suci, yakni hal-hal yang dibolehkan dan dilarang-kepercayaan dan praktek-praktek yang memersatukan suatu komunitas moral yang dinamakan gereja, semua mereka yang terpaut satu sama lain. Lihat: (Ishomudin, *Pengantar Sosiologi Agama*, Kerjasama Penerbit Ghalia Indonesia dan UMM Press, 2002, 29-30).

¹³⁷Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, Rajawali Press, 1995, hlm. 4.

konteks sosial dan status sosial akan membawa pada bentuk stratifikasi sosial bersifat duniawiyah. *Elite* tidak dilihat dalam konteks itu, karena seorang *elite* hendaknya menjadi sumber 'inspirasi' dan 'kebaikan' bagi umat/rakyat yang dipimpin. Dalam makna doktrin, belum tentu seorang *elite* lebih baik dan mulia dihadapan Allah SWT, dibanding dengan umat yang dipimpinnya.¹³⁸

Konsekuensi dari pentingnya elite Melayu dalam menjalankan tradisi, budaya, dan adat-istiadat (bersumber dari ajaran Islam), secara substantive ajaran Islam tidak mengajarkan tentang stratifikasi manusia, baik dari segi keturunan, ras, warna kulit, posisi kekuasaan, struktur jabatan politik atau kepemilikan harta benda. Islam hanya mengenal manusia dalam derajat yang sama. Allah SWT hanya membedakan umat-Nya dalam derajat ketaatannya. *Elite* 'Deutro-Melayu' dan umat/rakyat sama-sama mengabdikan untuk kebaikan dunia dan ukhrawi.

Secara substantif, dalam masyarakat Islam, sering kali, dikatakan sebagai kategori kelompok *elite* adalah ulama, guru ngaji, *ustadz/mubaligh*, yang dikatakan Abdul Munir Mul Khan sebagai elite sosial dan sekaligus sumber utama sosialisasi Islam.¹³⁹ Mereka merupakan kelompok elite dalam Islam yang berdasarkan keahlian. Terdapat juga elite pemimpin Islam yang menjadi pimpinan organisasi Islam dan partai politik Islam, yang lazim disebut elite Islam, karena mereka memimpin ormas ataupun partai politik Islam yang memiliki massa, padahal secara moral dan etika Islam masih harus diuji keberpihakan mereka kepada perjuangan Islam yang sebenarnya, bukan hanya kepentingan pragmatis dan pamrih kekuasaan. Dalam ajaran Islam, apapun jenis pekerjaan umat-Nya, memiliki kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan *al-amar bil-ma'ruf wan-nahyu anil-munkar*, sebagai tanggung jawab bersama antara pemimpin (*elite*) dan dipimpin (*massa*).

Sebagai 'jati diri' elite Melayu, bahwa idealnya elite 'Deutro-Melayu', prilakunya tidak menyimpang dari 'garis' kebenaran yang diwahyukan agama, dengan menjunjung tinggi *akhlakul karimah*, adil, memberi rasa aman, dan menyejukkan umat. Pemimpin ideal,

¹³⁸ Syarifudin Jurdi, *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Aksi Sosial*, Kencana, Frenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 53-54.

¹³⁹ Abdul Munir Mul Khan, *Perubahan Pola Perilaku dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987*, Rajawali Press, 1989, hlm. 17.

menurut Taufik Abdullah, yakni pemimpin yang dipandang paling autentik, seperti ulama', cendekiawan, ustadz, mubaligh, dan da'i. Ulama' yang dikatakan Taufik Abdullah, sebagai penjaga keutuhan 'tali Allah' yang mengikat manusia dengan Sang Khalik dan antara sesama manusia.¹⁴⁰ Agaknya, siapapun yang dipandang berilmu dan berakhlak dan berkepribadian mulia dapat dirartikan dalam kategori cendekiawan dan ulama', karenanya, jika ulama' melanggar ketentuan moral, akan menjadi penderitaan umat, sebagai pengikutnya, sama halnya, jika terjadi pada elite Melayu.

Model kepemimpinan elite 'Deutro-Melayu' kedepan dapat mengimbangi perubahan sosial, sehingga seorang elite 'Deutro-Melayu' mesti menyadari bahwa bila ingin menjadi elite politik, kedepan, tidak selalu berasal dari 'sumber' yang dilembagakan, tetapi lebih dikarenakan kompetensi dan kualitas individu. Hal ini sejalan dengan pandangan Kuntowijoyo bahwa kepemimpinan dikalangan umat terdapat tiga kecenderungan: (1) *diversifikasi kepemimpinan*, dimana sebelumnya diperlukan kepemimpinan agama dan politik dalam arti sempit, kini perlu memperluas horizon pemikiran dibidang ilmu, teknologi, ekonomi, budaya, dan lainnya; (2) *desentralisasi*, perluasan makna kepemimpinan dimana kepemimpinan tidak hanya kepemimpinan nasional tetapi menyebar kemana-mana; dan (3) *proliferasi*, kepemimpinan yang tidak hanya dibidang politik, tetapi menyebar kemana-mana.¹⁴¹

Rahmat Suprpto¹⁴², mengungkapkan bahwa partai Islam dan politisi Islam melorot pada Pemilu 2014, diprediksi, ikatan ideologi konstituen dengan partai agama semakin luntur dan kinerja elite politik Islam, elite 'Deutro-Melayu', banyak yang mengecewakan. Ada tiga faktor yang membuat Partai Islam melorot: *Pertama*, banyak perilaku dan moralitas politikus dari partai Islam, elite 'Deutro-Melayu', tidak mencerminkan keluhuran nilai-nilai Islam, seperti korupsi dan berbohong. *Kedua*, para politikus Islam, elite 'Deutro-Melayu' ketika menjadi anggota parlemen merasa tidak sedang mendapat 'amanah' dari konstituen pemilihnya karena mereka

¹⁴⁰Taufik Abdullah, "Apakah Muncul Pola Kepemimpinan Baru Umat?", *Mencari Pemimpin Umat: Polemik tentang Kepemimpinan Islam di Tenga Pluralitas Masyarakat*, Mizan, Bandung, 1999, hlm. 47.

¹⁴¹Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hlm. 99.

¹⁴²Kabar Sumatera, 18 Juli 2012.

beranggap dukungan diperoleh dari 'transaksi jual-beli' suara. Ketiga, masyarakat kian terbuka dan pragmatis, bukan lagi jenis pemilih yang mau dibohongi karena adanya kesamaan ideologi atau agama dengan partai.

Idealnya, elite 'Deutro-Melayu' menyadari bahwa setiap kepemimpinan ada pertanggungjawabannya atas kapasitas dan kepemimpinannya, karena kehidupan duniawiyah bersifat *fana'* dan kehidupan ukhrawi bersifat abadi. Keberadaan elite-Melayu, apapun tugas, peran, dan jabatannya, hendaknya berimplikasi positif dan berpihak kepada umat atau rakyatnya. Karenanya, lambat-laun dan dipastikan akan diminta pertanggung jawabannya dihadapan Allah SWT.

Manusia diciptakan tidak sia-sia tetapi, sebagai 'pemakmur dunia' bukannya pembawa kerusakan. Hanya manusialah yang diharapkan menjadikan dunia, lingkungan dan masyarakatnya, menjadi indah, aman, damai, harmonis, dan sejahtera, sebagai konsekuensi manusia sebagai *khalifah*. Negara ini akan terbebas dari banyak masalah dan 'penderitaan' ke depan, apabila para elite-Melayu, yakni elite politik, elite birokrasi, elite agama, elite ekonomi, dan lainnya, yang menjalankan kepemimpinannya dengan 'amanah', yang sejak dini menyadari bahwa kemajuan dan kemakmuran bangsa kedpan terletak pada kiprahnya kini.

Elite Melayu yang diharapkan dapat memperbaiki bangsa ini ke depan, adalah mereka yang memiliki keragaman kompetensi dan menjalankan nilai-nilai Melayu -bersumber dari ajaran Islam—yang mengedepankan pentingnya *akhlakul karimah*, sebagai 'pemandu' akhlak dalam kepemimpinannya. Karenanya, dalam 'transisi demokrasi' dengan penuh dinamika sosial, para elite-Deutro Melayu, dalam status dan peran berbeda agaknya diperlukan suatu pencerahan, 'rekonstruksi', dengan menyadari perubahan paradigma kepemimpinan elite Melayu, dimana pentingnya optimalisasi 'prestasi', 'kompetensi' dan 'reputasi'—yang tidak terlepas dari nilai-nilai dan akar budaya Deutro-Melayu' yang cenderung mengedepankan nilai-nilai 'religius' tersebut.

Bab 2

ETIKA SOSIAL, AGAMA, ELITE, DAN ETOS KERJA

Sejak memasuki era Reformasi pada 1998, bangsa Indonesia memasuki proses kehidupan demokrasi atau demokratisasi dengan 'plus-minus'nya. Dalam bab ini diungkapkan bahwa salah satu permasalahan mendasar yang dialami kehidupan berbangsa di era demokrasi ini, adalah kecenderungan terjadinya proses degradasi 'etika sosial' atau terjadi kecenderungan 'krisis akhlak' di tengah masyarakat, sehingga telah memunculkan terjadinya beragam bentuk anomali sosial di masyarakat.

Dari banyak persoalan berbangsa, sejak dari persoalan perilaku: korupsi, narkoba, minuman keras dan oplosan, eksploitasi sumber daya alam, pergaulan bebas, rendahnya sopan-santun, dan rasa hormat antara muda dan lebih tua, malas-malasan, kebut-kebutan di jalan raya, melanggar rambu lintas, meningkatnya perilaku kriminal, konflik sosial, dan lain-lain, yang sekaligus merupakan indikator-indikator krusial yang menunjukkan telah terjadinya degradasi akhlak, moral dan etika sosial. Jika kondisi ini terus berlanjut, sangatlah mungkin akan memunculkan terjadinya ancaman krisis sosial yang semakin parah dan mengarah pada 'proses' disintegrasi sosial, bahkan tidak berlebihan bila mengarah pada proses disintegrasi bangsa. Selain itu, bangsa ini juga akan sulit menjadi bangsa yang maju dan berkompetitif.

Degradasi Etika Sosial Berbangsa¹

Secara etimologi, *etika* berasal dari bahasa Yunani, yakni *ethos*. Dalam bentuk tunggal, *ethos* bermakna tempat tinggal yang biasa,

¹ Tulisan ini dikutip dan revisi seperlunya dari tulisan penulis dalam buku *Etika Pendidikan*, Edisi ke-1, Penerbit Noer Fikri, Palembang, 2014, hlm 1-21.

padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, *akhlak*, perasaan, dan cara berfikir. Dalam istilah filsafat, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. *Etika* dibedakan dalam tiga pengertian utama, yakni: ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkembang dengan *akhlak*, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.²

Antara *etika* dan *etiket* memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah etika dan etiket bertalian dengan tindakan dan prilaku manusia. Etika dan etiket mengatur prilaku manusia secara normatif. Perbedaan antara etika dan etiket, seperti dikatakan Darmodiharjo dan Shidarta adalah *pertama*, etika berkaitan dengan cara perbuatan yang harus dilakukan seorang atau kelompok tertentu. Etiket memberikan dan menunjukkan cara yang tepat dalam bertindak. Etika memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika bertalian dengan apakah suatu perbuatan dapat dilakukan antara *ya* dan *tidak*. *Kedua*, etiket hanya berlaku dalam pergaulan sosial. Jadi, etiket selalu berlaku ketika ada orang lain. Beda halnya, etika tidak memperhatikan orang lain atau tidak. *Ketiga*, etiket bersifat relatif, dimana terjadi keragaman dalam menafsirkan prilaku yang sesuai dengan etiket tertentu. Etika lebih bersifat mutlak, dan prinsip etika sangat universal dan tidak bisa ada proses tawar-menawar. *Ketiga*, etiket hanya bertalian dengan lahiriah saja, dan etika bertalian dengan dimensi internal manusia. Dalam kaitannya dengan etiket seorang bisa berbeda, tetapi dalam kaitannya dengan prilaku etis, seorang tidak bisa bersifat kontradiktif.³

K. Berten menulis bahwa kerap kali dua istilah ini dicampur-adukkan. Padahal, perbedaan diantara keduanya sangat hakiki. *Etika* berarti "moral" dan *etiket* berarti "sopan santun". Dilihat dari bentuk kata, sebetulnya, tidak ada hubungan antara keduanya. Dalam bahasa Inggris, "etika" berasal dari kata *ethics* dan "etiket" berasal dari kata *etiquette*. Akan tetapi, dilihat dari arti atau maknanya, kedua kata ini, juga memiliki persamaan. Yakni, *pertama*, etika dan etiket bertalian dengan perilaku manusia. *Kedua*, baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya, memberi norma

² Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 173.

³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 257.

bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak harus dilakukan. Justeru karena sifat normatif ini kedua istilah tersebut mudah dicampuradukkan.⁴

Disamping adanya persamaan, terdapat sejumlah perbedaan antara etika dan etiket. *Pertama*, etiket bertalian dengan cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Diantara sekian banyak cara, etiket memperlihatkan cara yang tepat, maksudnya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Misalnya, bila seorang karyawan memberikan suatu kepada pimpinan sebagai atasannya, yang bersangkutan harus memberikannya dengan menggunakan tangan kanan. Seorang dipandang melanggar etiket, bila seorang memberikan suatu barang tersebut dengan tangan kiri. Tetapi, etika tidak terbatas pada cara dilakukan seorang pada suatu perbuatan, etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika bertalian dengan apakah suatu perbuatan boleh dilakukan 'ya' atau 'tidak'. Suatu ilustrasi: Mengambil barang orang lain tanpa izin dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya. Disini, cara melakukan perbuatan tidak perlu dipertimbangkan untuk menilai kualitas perbuatan etisnya. "Jangan mencuri" merupakan norma etika. Apakah orang mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri, disini, sama sekali tidak relevan. Norma etis tidak sebatas cara perbuatan dilakukan, melainkan bertalian dengan perbuatan dilakukan, melainkan menyangkut perbuatan itu sendiri.⁵

Kedua, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Jika tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, etiket tidak berlaku. Sekedar ilustrasi, seorang dipandang melanggar etiket bila makan sambil berbunyi atau dengan meletakkan kaki diatas meja, dan sejenisnya. Tapi, jika dia makan sendiri, dia tidak akan melanggar etiket, karena tidak ada saksi mata. Sebaliknya, etika tidak berlaku atas hadir tidaknya orang lain. Bila sesudah makan di restoran, seorang kabur tanpa bayar, dia telah berlaku tidak etis, juga tidak diketahui oleh pemilik. "Larangan mencuri" selalu berlaku, apakah ada orang lain hadir atau tidak. Barang yang dipinjam selalu harus dikembalikan, juga jika pemiliknya sudah lupa.⁶

⁴ K. Berten, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 9.

⁵ K. Berten, "Etika...", *ibid.*, hlm. 10.

⁶ K. Berten, "Etika...", *ibid.*, hlm. 10.

Ketiga, etiket bersifat relatif. Suatu yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sebagai ilustrasi, makan dengan tangan atau bersendawa waktu makan. Beda halnya dengan etika. Etika jauh lebih absolut. 'Jangan berbohong', 'jangan mencuri', 'jangan berbohong', 'jangan membunuh' merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar atau mudah diberi 'dispensasi'. Jadi, relativitas etiket jauh lebih jelas dan jauh lebih mudah terjadi. *Keempat*, bila berbicara tentang etiket, berarti memandang manusia dari segi lahiriah saja. Etiket memandang manusia dari segi dalam. Bisa saja orang tampil sebagai 'musang berbulu ayam': 'dari luar sangat sopan dan halus tetapi dari dalam kebusukan'. Banyak penipu berhasil dengan maksud jahat mereka, justeru karena penampilannya begitu halus dan menawan hati, sehingga mudah meyakinkan orang lain. Tidak merupakan suatu kontradiksi, bila seorang selalu berpegang pada etiket dan sekaligus bersikap munafik. Tapi, orang yang etis sifatnya tidak mungkin bersikap munafik, sebab, seandainya dia munafik, hal itu dengan sendirinya berarti dia tidak bersikap etis. Disini, memang terdapat kontradiksi. Orang yang bersikap etis merupakan orang yang sungguh-sungguh baik. Jadi, jelaslah bahwa perbedaan terakhir ini paling penting diantara empat perbedaan yang dibahas tadi.⁷

Dari perbedaan antara *etis* dan *etiket* ini akan berimplikasi lebih luas bila mencampuradukkan kedua istilah ini. Bisa sampai fatal—dari segi etis—, bila orang menganggap etiket saja apa yang sebenarnya termasuk ranah moral. Sebuah ilustrasi dari Berten⁸ yang diambil dari lingkungan perguruan tinggi. Dikatakan Berten bahwa dibanyak kampus di Indonesia, diperoleh larangan memakai sandal. Jika larangan ini dilanggar, sering ada sanksi cukup berat. Disisi lain, dalam hal kejujuran, perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya tidak terlalu ketat. Mencontek pada waktu ujian banyak dilakukan, dengan beragam variasi. Plagiarisme dalam menyusun *paper*, skripsi atau tesis tidak begitu dipedulikan. Banyak tulisan mahasiswa sebageian besar diambil dari internet atau dikerjakan orang lain dengan pembayaran. Jika dikritisi lebih jauh, dilarang memakai sandal di kampus sebenarnya hanya suatu etiket saja, sedangkan ketidakjujuran yang jauh lebih penting karena merupakan masalah etika. Dari segi pendidikan, soal sandal, kata Berten, bukanlah terlalu

⁷ K. Berten, "Etika....", *ibid.*, hlm. 11.

⁸ K. Berten, "Etika....", *ibid.*, hlm. 12.

penting, karena ditempat kerja nanti si mahasiswa dengan mudah akan menyesuaikan diri dengan aturan tentang cara berpakaian yang berlaku diperusahaan. Namun, jika sejak pendidikan profesionalnya dia sudah akrab dengan praktik-praktik tidak jujur otomatis dia akan ikut juga dalam praktik-praktik kotor di perusahaan.

Antara *etika* dan *estetika* mempunyai sejumlah perbedaan: (1) pembahasan etika lebih menitikberatkan pada baik-buruknya atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban tanggung jawab manusia. (2) etika berhubungan dengan dasar pertimbangan tentang baik-buruk, salah-benar tindakan manusia. (3) etika terapan menjadi fokus perhatian, misalnya adanya etika profesi, kode etik, rambu-rambu etis, etika politik, etika lingkungan, dan lain-lain. *Estetika* itu sendiri memiliki sejumlah karakter: (1) mempersoalkan seni atau keindahan yang dihasilkan manusia, dan persoalan apresiasi yang harus dilakukan dalam proses kreatif manusia. (2) estetika: estetika deskriptif (menjelaskan dan melukiskan fenomena pengalaman keindahan) dan estetika normatif (menyelidiki hakikat, dasar, dan ukuran pengalaman keindahan). (3) estetika berhubungan dengan imitasi atau reproduksi realitas. Seni sebagai ekspresi sosial atau ekspresi personal atau suatu realitas.⁹

Muhammad Mufid menulis, *sifat dasar etika* adalah sifat kritis, dikarenakan etika bertugas: *Pertama*, untuk mempermasalahkan norma yang dipandang berlaku. Diselidikinya apakah dasar suatu norma itu dan apakah dasar itu membenarkan kenyataan yang dituntut oleh norma itu terhadap norma yang dapat berlaku. *Kedua*, etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya, artinya norma yang tidak dapat mempertahankan diri dari pertanyaan kritis dengan sendirinya akan kehilangan haknya. *Ketiga*, etika mempermasalahkan juga hak setiap institusi, seperti orang tua, sekolah, negara, dan agama, untuk memberikan perintah atau larangan yang mesti ditaati. *Keempat*, etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma. *Kelima*, etika menjadi alat pemikiran rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau dibingungkan oleh norma yang ada. *Etika* sering dinamakan *filsafat moral*. Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia dalam kaitannya

⁹ Muhammad Mufid, "Etika dan Filsafat", *op. cit.*, hlm. 178.

dengan tujuan utama hidupnya. Etika mengkaji baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia, dan sekaligus menyoroiti kewajiban-kewajiban manusia. Etika mempermasalahkan bagaimana manusia semestinya berbuat dan bertindak. Tindakan manusia itu sendiri ditentukan beragam norma. Etika membantu manusia untuk menentukan sikap terhadap semua norma dari luar dan dari dalam, supaya manusia mencapai kesadaran moral yang otonom. Etika menyelidiki dasar semua norma moral. Dalam etika biasanya dibedakan antara *etika deskriptif* dan *etika normatif*. *Etika deskriptif* memberi gambaran dari gejala kesadaran moral, dari norma dan konsep etis. *Etika normatif* tidak berbicara lagi tentang gejala, melainkan tentang apa yang sebenarnya harus merupakan tindakan manusia. Dalam etika normatif, norma dinilai dan setiap manusia ditentukan.¹⁰

Hubungan antara *filsafat* dan *etika*. Seperti diketahui bahwa filsafat adalah sejumlah keyakinan, sikap, cita-cita, aspirasi, dan tujuan, nilai, norma, aturan, dan prinsip etis. Filsafat juga mencari kebenaran, suatu persoalan nilai-nilai dan pertimbangan nilai untuk melakukan hubungan kemanusiaan secara benar dan beragam pengetahuan apa yang buruk atau baik untuk menentukan bagaimana seorang mesti memilih atau bertindak dalam kehidupannya. Florence Kluckhohn¹¹ mengidentifikasi sejumlah orientasi nilai bertalian dengan masalah kehidupan dasar: *Pertama*, manusia berhubungan dengan alam atau lingkungan fisik, dalam arti mendominasi, hidup dengan atau ditaklukan alam. *Kedua*, manusia menilai sifat/hakekat manusia sebagai yang baik, atau campuran antara baik dan buruk. *Ketiga*, manusia manusia hendaknya bercermin pada masa lalu, masa kini, dan masa datang. *Keempat*, manusia lebih menyukai aktivitas yang sedang dilakukan, akan dilakukan, atau telah dilakukan. *Kelima*, manusia menilai hubungan dengan orang lain, dalam kedudukan langsung, individualistis, atau posisi yang sejajar. Orientasi nilai itu tampak berbeda diantara berbagai kebudayaan dan sub-kebudayaan dalam masyarakat. Orientasi nilai budaya itu dinyatakan dalam konsep, sikap, harapan orang, yang bertalian dengan diri mereka atau orang lain, khususnya sebagai bagian dari beragam peranan sosial mereka miliki dalam masyarakat.

¹⁰ Muhammad Mufid, "Etika dan Filsafat Komunikasi....", *loc. cit.*, hlm. 173-174.

¹¹ Muhammad Mufid, "Etika dan Filsafat....", *ibid.*, hlm. 175-176.

Nilai-nilai sekurangnya mempunyai empat tingkatan. *Pertama*, nilai-nilai akhir atau abstrak, seperti: demokrasi, keadilan, persamaan, kebebasan, kedamaian dan kemajuan sosial, serta perwujudan diri dan penentuan diri. *Kedua*, nilai-nilai tingkat menengah, seperti: kualitas keberfungsian manusia/pribadi, keluarga yang baik, pertumbuhan, peningkatan kelompok, dan masyarakat yang baik. *Ketiga*, nilai-nilai instrumental atau operasional yang mengacu kepada ciri-ciri perilaku dari lembaga sosial yang baik, pemerintah yang baik, dan orang profesional yang baik. Seperti dapat dipercaya, jujur, dan memiliki disiplin diri. *Keempat*, nilai-nilai dan norma-norma yang telah diinternalisasikan ke dalam diri individu, akan menjadi kerangka referensi individu tersebut sebagai prinsip etik. Prinsip-prinsip etik itu menjadi dasar orientasi dan petunjuk bagi manusia dalam mengatasi beragam permasalahan kehidupan bertalian hubungan sosial dengan orang lain. Prinsip etik itu membantu pula dalam mengatur dan memberikan makna dan kesatuan yang bulat terhadap kepribadian manusia; motivasi manusia dalam memilih suatu perilaku, tujuan-tujuan, gaya hidup, serta memungkinkan manusia memiliki landasan pembenaran dan pengambilan keputusan terhadap tindakan yang dilakukan manusia.¹²

Haryatmoko mengungkapkan bahwa konsep etika sering digunakan sebagai persamaan dengan moral. Dibalik kedua istilah ini, terkandung nuansa dua tradisi pemikiran filsafat moral berbeda. Aristoteles, dalam buku *Ethique a'Nicomaque*, menulis selain kata *'ethos*, yang bermakna 'kualitas suatu sifat' digunakan juga istilah *'ethos*, yang bermakna kebiasaan. Arti *'ethos* adalah suatu cara berfikir dan merasakan, cara bertindak dan bertingkah laku yang memberi ciri khas cara kepemilikan seorang terhadap kelompok. Istilah yang kedua ini relevan dengan terjemahan kata *'moralis* (*mos, moris*= adat, kebiasaan) dalam bahasa Latin. Istilah *moralis* selanjutnya menjadi istilah teknis yang tidak lagi berarti kebiasaan, tetapi mengandung arti moral sebagaimana digunakan dalam definisi terkini.¹³

¹² Muhammad Mufid, "Etika dan Filsafat...", *ibid.*, hlm. 176-177).

¹³ Moral dihubungkan dengan kewajiban khusus, dihubungkan dengan norma sebagai cara bertindak yang berupa tuntutan yang relatif atau mutlak. Jadi "moral" merupakan wacana normatif dan imperatif yang diungkapkan dalam konteks baik/buruk, benar/salah yang dipandang sebagai nilai mutlak atau transenden. Isinya berupa kewajiban-kewajiban. Konsep "moral" merujuk kepada semua aturan dan norma yang berlaku, yang diterima oleh masyarakat tertentu sebagai pegangan dalam bertindak, dan diungkapkan dalam konteks baik dan buruk, benar dan salah.

Diungkapkan Mufid¹⁴, etika lebih cenderung kearah ilmu tentang baik atau buruk. Etika lebih dikenal dengan kode etik. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan atau nilai yang berkenaan dengan baik-buruk. Ada dua kaidah dasar moral: *Pertama*, kaidah sikap baik, dimana seorang seharusnya bersikap baik terhadap apa saja. Bagaimana sikap baik itu harus dinyatakan dalam bentuk yang konkrit, tergantung dari apa yang baik dalam situasi konkrit itu. *Kedua*, kaidah keadilan, dimana sebagai prinsip kesamaan yang masih tetap mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Kesamaan beban yang terpakai harus dipikulkan harus sama, yang tentunya disesuaikan dengan kadar anggota masing-masing.

Antara *moral* dan *hukum* terdapat suatu hubungan yang erat. Antara satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dan membutuhkan. Kualitas hukum ditentukan oleh moral, karenanya, hukum harus dinilai atau dapat diukur dengan norma moral. Undang-undang moral tidak dapat diganti jika dalam suatu masyarakat kesadaran moralnya telah menempatkan tahap cukup matang. Moral pun membutuhkan hukum, moral akan mengambang jika tidak dikukuhkan, diungkapkan, dan dilembagakan dalam masyarakat. Sehingga, hukum dapat meningkatkan dampak sosial moralitas. Meskipun terdapat hubungan erat, antara moral dan hukum juga memiliki sejumlah perbedaan. Yakni, *pertama*, hukum bersifat objektif karena hukum dituliskan dan disusun dalam kitab undang-undang. Maka, hukum lebih mempunyai kepastian yang lebih besar. *Kedua*, norma bersifat subjektif dan dampaknya menimbulkan

Etika dilihat sebagai suatu refleksi filosofis tentang moral. *Etika* merupakan wacana normatif (tidak selalu harus berupa perintah yang mewajibkan, karena dapat pula kemungkinan bertindak) yang membicarakan tentang baik dan buruk. *Etika* lebih dilihat sebagai seni hidup yang mengarahkan ke kebahagiaan dan kebijaksanaan. Paul Ricoeur (1990) mengatakan istilah "moral" dan "etika" dihubungkan pada dua tradisi pemikiran filsafat yang berbeda. Istilah "moral" dihubungkan dengan tradisi pemikiran filosofis Immanuel Kant (sudut pandang deontologi). *Moral* merujuk ke kewajiban, norma, prinsip bertindak, imperatif ("kategoris" – aturan atau norma yang berasal dari akal budi yang merujuk ke dirinya sendiri sebagai keharusan). *Etika* dihubungkan dengan tradisi pemikiran Aristoteles yang bersifat "teleologis" (*telos* – finalitas atau tujuan). Paul Ricoeur mendefinisikan "etika" sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Biasanya etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. *Moral* merujuk pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Tekanan etika diletakkan pada dimensi reflektif dalam upaya mencari bagaimana bertindak (bukan hanya pada masalah kepatuhan pada norma). Lihat: (Haryatmoko, 'Etika Publik, untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi', *loc. cit.*, hlm. 2-3).

¹⁴ Muhammad Mufid, "Etika dan Filsafat....", *op. cit.*, hlm. 180.

pertanyaan terhadap pentingnya kejelasan tentang etis dan tidaknya. *Ketiga*, hukum hanya membatasi ruang lingkupnya pada tingkah laku lahiriah manusia saja. *Keempat*, sedangkan moralitas menyangkut perilaku batin seorang. *Kelima*, sanksi hukum biasanya dapat dipaksakan. *Keenam*, sanksi moral satu-satunya adalah pada kenyataan bahwa hati nuraninya akan merasa tidak tenang. *Ketujuh*, sanksi hukum pada dasarnya didasarkan pada kehendak masyarakat. *Kedelapan*, moralitas tidak akan dapat diubah oleh masyarakat.¹⁵

Adanya perbedaan antara *etika* dan *agama*. *Etika* mendukung keberadaan agama, dimana etika dapat membantu manusia dalam menggunakan akal pikiran dalam memecahkan masalah. Perbedaan antara etika dan ajaran agama, yakni etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional. *Agama* menuntut seorang untuk mendasarkan diri pada wahyu Tuhan dan ajaran agama. Dalam agama terdapat etika, dan agama merupakan salah satu norma dalam etika. Keduanya bertalian satu sama lain, tetapi terpisahkan secara teoritis. Dalam konteks praktis, akan sulit mengenyampingkan salah satu diantaranya. Seorang tidak bisa berbuat hanya atas dasar agama saja tanpa memperhatikan etika atau sebaliknya. Keberagaman agama pada prinsipnya memperhatikan etika yang berlaku, sebaliknya, seorang dikatakan memiliki etika, jika kemudian memperhatikan agama yang ada.¹⁶

Mufid selanjutnya mengungkapkan bahwa wacana etika melibatkan perilaku dan sistem nilai etis yang dimiliki individu atau kolektif. Wacana etika memiliki sejumlah unsur utama: *kebebasan*, *tanggung jawab*, *hati nurani*, dan *prinsip moral dasar*. *Kebebasan* merupakan unsur pokok dan utama dalam wacana etika. Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu menandaikan kebebasan. *Kebebasan* adalah unsur hakiki etika. Kebebasan eksistensial merupakan kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Ini bermakna bahwa kebebasan ini bersifat positif. Tentu saja, kebebasan dalam praktek hidup sehari-hari memiliki banyak jenis: kebebasan jasmani-rohani, kebebasan sosial, kebebasan psikologi, dan kebebasan moral. *Tanggung jawab* merupakan kemampuan untuk menjawab semua pertanyaan yang mungkin muncul dari tindakan. *Tanggung jawab* mengandaikan penyebab. Orang

¹⁵ Muhammad Mufid, "Etika dan Filsafat", *ibid.*, hlm. 179.

¹⁶ Muhammad Mufid, "Etika dan Filsafat....", *op. cit.*, hlm. 180.

bertanggung jawab atas segala sesuatu yang disebabkan olehnya. Pertanggung jawaban adalah situasi dimana orang menjadi penyebab bebas. Kebebasan merupakan syarat utama dan mutlak untuk bertanggung jawab. Ragam tanggung jawab terdiri dari tanggung jawab retrospektif dan tanggung jawab prospektif. *Hati nurani* merupakan penghayatan tentang nilai baik atau buruk bertalian dengan situasi konkrit. *Hati nurani* memerintahkan atau melarang suatu tindakan menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Jadi, *hati nurani* berhubungan dengan kesadaran.¹⁷

Dalam studi ilmu sosial dan politik modern, *demokratisasi* merupakan salah satu konsep penting. Demokrasi dapat didefinisikan sebagai proses implementasi sistem pemerintahan demokrasi dalam suatu negara, dimana negara itu sebelumnya menganut sistem politik non-demokrasi. Suatu negara dipandang melaksanakan sistem politik demokrasi apabila negara itu memiliki proses penetapan presiden melalui pemilihan umum. Para calon presiden berkompetisi dengan jujur, adil, terbuka, dan taat aturannya. Ada pula pandangan mengatakan suatu negara demokrasi harus mempunyai masyarakat sipil atau masyarakat madani dan kultur demokrasi. Demokratisasi sebagai suatu proses dimana suatu negara mengangkat dan menetapkan pemerintahan. Selain indikator jujur, adil, dan terbuka, terdapat indikator lain dari demokrasi, yakni adanya perpindahan kekuasaan pemerintahan secara periodik dan damai, dari pemerintah sebelumnya ke pemerintahan baru.¹⁸ Transfer kekuasaan yang terjadi secara lancar dan damai sangat penting bagi suatu proses demokrasi, karena pengakuan atas kekalahan dan kemenangan ketika bisa kembali berkompetisi untuk merebut kekuasaan. Memilih "posisi"

¹⁷ Kesadaran merupakan kesanggupan manusia mengenal dirinya sendiri dan karena itu berefleksi tentang dirinya. *Hati nurani* sangat bersifat retrospektif dan prospektif. *Hati nurani* juga bersifat personal. *Hati nurani* juga merupakan suatu ungkapan atau norma yang bersifat subjektif. Prinsip kesadaran moral merupakan beberapa tataran yang perlu diketahui untuk memosisikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Etika selalu memuat unsur hakiki bagi semua program tindakan moral. Prinsip kesadaran moral mengandaikan pemahaman totalitas individu atas semua tindakan dilakukan sebagai seorang manusia. Setidaknya ada tiga prinsip dasar dalam kesadaran moral: prinsip sikap baik, keadilan dan hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Prinsip keadilan dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik. Prinsip sikap baik menjadi dasar seorang untuk bersikap adil dan hormat. Lihat: Muhammad Mufid, "Etika dan Filsafat...", *ibid.*, hlm. 181).

¹⁸ Zamroni, *Pendidikan Demokrasi dalam Masyarakat Multikultural*, Gavin Kalam Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 97.

diluar pemerintahan atau oposisi dengan melakukan kontrol dan kritik konstruktif merupakan suatu hal wajar dalam demokrasi.

Pada 1980-an, sejarah menunjukkan bahwa meskipun Anglo-Saxon telah menempatkan sebagai kelompok yang paling besar (*the largest group*), penduduk Amerika Serikat selalu memasukkan beragam latar belakang bangsa, ras, dan agama. Hubungan antarkelompok (*groups*) di Amerika Serikat sering kali tampak antagonis, tetapi, secara historis, ekspresi ideal dari banyak orang Amerika telah diantisipasi dan reduksi dukungan dari kelompok melalui beragam bentuk aktivitas umum dalam suatu kerangka masyarakat demokratis. Sehingga, suatu hal lazim untuk mengatakan Amerika Serikat sebagai "*a melting pot*". Dalam perkembangan tahun-tahun selanjutnya, sikap terhadap eksistensi sub-kelompok dan sub-budaya telah menjadi lebih disetujui dan diapresiasi. Sistem-sistem pendidikan pun diharapkan dapat membantu beragam kelompok untuk mempertahankan beragam perbedaan budaya mereka dan *Commisioner of Education*, mencapai tujuan-tujuan budaya mereka dalam suatu kerangka kerja ko-operatif. Sehingga, James E. Allen, Jr., mantan *United States Commisioner of Education*, merekomendasikan dukungan terhadap ASPIRA, suatu organisasi masyarakat Puerto Reco, menulis:

*The day the melting pot is over. No longer is the ideal of each minority to become an indistinguishable part of the majority. Today, each strives to maintain its identity while seeking its rightful share of the social, economic, and political fruits of our system. Self-help and self-determination have become the rallying cries of all minorities.*¹⁹

Pluralitas sosial (*plural-society*) atau multikultural dan tradisi yang terpisah dan berbeda itu, selanjutnya, merupakan suatu hal yang "menyehatkan" dalam suatu masyarakat demokratis yang kompleks. Pada waktu yang sama, masyarakat terbuka untuk menerima anggota baru dan menawarkan sejumlah penghargaan terhadap anggota masyarakat kelompok minoritas yang ikut dalam masyarakat utama (*mainstream society*), dan konsekuensinya, adalah telah mengurangi partisipasi dan ikatan terhadap suatu kelompok minoritas mereka. Hal ini merupakan suatu keadaan yang berhubungan antara kekuatan sosial (*social forces*) yang menekan suatu "kultural pluralisme-

¹⁹ Daniel U. Livine and Robert J. Havighurst, *Society and Education*, Seven Edition, Allyn and Bacon, Boston, London, Sydney, and Toronto, 1989, hlm. 360.

demokratik" (*a democratic cultural pluralism*) dan mereka yang bekerja terhadap suatu "integrasi sosial-demokratik" (*a democratic social integration*).

Pada periode 1965, slogan-slogan pluralisme atau multi-kulturalisme telah menjadi populer, tetapi integrasi terus menjadi suatu tujuan sosial terpenting (*an important social goal*). Dengan *social integration*, dimaksudkan bercampurnya kelompok rasial dan kelompok budaya melalui asosiasi dalam bisnis, pendidikan, pemerintah dan budaya, dan beberapa level perkawinan antarkelompok atau etnis dengan tujuan menjadi kultur utama (*common culture*). Dengan *democratic cultural pluralism* diartikan sebagai koeksistensi damai dari pada suatu keberagaman ras, etnis, agama, dan kelompok ekonomi, dan setiap kelompok menjaga sub-kultur masing-masing secara lengkap.

Jika kesamaan penghargaan, peluang, dan hak-hak istimewa diberlakukan pada semua kelompok (*groups*), kemudian suatu kondisi pluralistik-demokratik (*democratic pluralism*) mungkin dikatakan untuk eksis, seperti dilakukan di Switzerland, dengan wilayahnya French, German, dan Italia, dan di Holland, dimana sejumlah sub-kultur agama menempatkan diri mereka sendiri sebagai bagian dari politik dan negara, sebagaimana halnya urusan sosial dan agama. Hal itu telah menunjukkan adanya suatu kondisi dinamika dari perkembangan pluralisme dan diversitas karakteristik dari masyarakat kontemporer dan pendidikan di Amerika Serikat.

Pada abad ke-19, Amerika Serikat merupakan suatu masyarakat pluralistik. Dari awal, Amerika Serikat memiliki sekitar 30 koloni representatif dari suatu beragam dari nasionalitas Eropa dan terdiri dari berbagai kelompok agama, dengan Indian yang "dikeluarkan" dari tanah airnya, dan dengan Afrikan yang dijual sebagai budak (*slaves*). Pluralisme ini sulit dapat dikatakan sebagai demokratis. Bagi banyak imigran Eropa yang datang ke negara ini pada abad ke-19, disana terdapat menonjolnya diskriminasi. Sebagai contoh, imigran Irlandia yang datang pada sekitar tahun 1840 and 1860, sebagai akibat dari kelaparan di Irlandia, telah menghasilkan suatu kelas rendah (*a lower class*) Irlandia di Amerika Serikat yang hanya diberikan pekerjaan kasar.

Apa yang menyelamatkan situasi bagi pendatang baru (*new comers*) dan menarik mereka ke mobilitas adalah adanya permintaan

konstan terhadap tenaga kerja tidak terampil dan semi-terampil (*unskilled labor and semi-skilled labor*) dalam pengembangan ekonomi. *Free schools* juga telah menempatkan anak-anak kelompok imigran berbeda memiliki kesempatan memperoleh sejumlah jenis pekerjaan yang sebelumnya dilakukan para orang kulit putih (*white-collar jobs*), kebebasan tanah yang terbatas, ekspansi pemerintah lokal dan bisnis, yang telah menciptakan sejumlah peranan para imigran yang memiliki pendidikan formal yang rendah. Suatu campuran integrasi sosial dan pluralisme budaya terletak pada lingkungan pekerjaan. Tiap gelombang imigran Eropa yang awalnya tiba tanpa memiliki uang dan posisi, selanjutnya berkembang statusnya secara cepat, walaupun kehidupan tertinggal dalam kenaikan statusnya. Setelah satu atau dua generasi, masih terdapat sejumlah anggota imigran yang tidak bernasib baik.²⁰

Tetapi, pada abad ke-19, sejumlah kelompok tidak bersama-sama ikut serta dalam suatu masyarakat pluralistik-demokratis dan integrasi sosial: Indian Amerika yang terpinggirkan ke tanah pinggiran (*inferior lands*) dan dibinasakan oleh tentara Amerika jika mereka memilih untuk melawan; dan persoalan pembebasan budak-budak Afrika. Periode sejarah sosial Amerika hingga 1900 telah didominasi oleh suatu kebijakan yang dikatakan seorang ahli sosiologi Amerika, Milton Gordon, sebagai *Anglo-conformity*. Kebijakan ini berasumsi bahwa kesadaran mempertahankan institusi-institusi sosial Inggris, bahasa Inggris, orientasi pola-pola kultural Inggris yang dominan di kehidupan orang Amerika. Masyarakat juga lebih dominan pengikut Protestan, dimana terdapat banyak prasangka terhadap Katolik dan imigran baru Katolik. Imigran Jerman, Irlandia, dan Skandinavia merupakan paling dominan selama periode 1840 hingga 1890 yang diterima dengan perasaan tidak aman atau "waswas". Hampir semua imigran Irlandia dan Jerman berlatar belakang Katolik. Imigran Skandinavia dikenal sebagai suka menyatu dalam satu kelompok dan mereka mempertahankan bahasa mereka sendiri. Masih, suatu negara yang luas, dan pertumbuhan industri memerlukan tenaga kerja, dan perbatasan telah dibuka. Dampaknya, masyarakat menunjukkan lebih pluralistik dari sebelumnya.²¹

²⁰ Daniel U. Livine and Robert J. Havighurts, "Soecity and Edication....", *Ibid.*, hlm.362.

²¹ Daniel U. Livine and Robert J. Havighurts, "Soecity and Edication....", *Ibid.*, hlm.362.

Pada awal abad ke-20, terjadi perkembangan suatu konsep baru, dimana komposisi kebangsaan melalui agen dari perbatasan kehidupan yang menyebar menyilang ke tengah dan menuju ke Barat. Seorang ahli sejarah, Fredrick Jakson Turner dalam bukunya, *The Frontier in American History*, menulis perbatasan bagian Barat dan bertindak sebagai "suatu pelarut bagi warisan nasional dan kecenderungan separatisme". Sekitar pertengahan abad ke-19, bebas pendidikan bagi masyarakat (*free public education*) semakin meluas, untuk memberi bantuan pada setiap orang dengan mengajar bahasa Inggris dan konsep sosial Amerika yang ideal. Meskipun sistem pendidikan publik paling berpengaruh, tetapi tidak seefektif dalam kenyataannya, pada periode 1880-1920. Banyak anak dari keluarga imigran miskin mengalami putus sekolah dan selanjutnya bekerja pada pekerjaan yang tanpa memerlukan keterampilan (*unskilled jobs*). Sekolah-sekolah bagi pengikut Roman Katolik didirikan yang tidak hanya mengajar agama Katolik tetapi juga mengajar budaya etnis Eropa bagi khusus umat Katolik.²²

Sejak lahirnya, Indonesia sebagai suatu negara yang bebas dan mendapat pengakuan dari berbagai negara di dunia, telah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan negara lainnya. Karakteristik ini terlihat dari kondisi wilayah Indonesia yang terdapat setidaknya 17.058 buah pulau, dan dihuni sekitar 450 suku bangsa yang memiliki bahasa, hukum dan adat berbeda. Sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, selebihnya memeluk agama Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Dalam hal alat komunikasi yang digunakan, hingga saat ini baru sekitar 10-15% yang dapat berbahasa Indonesia yang terutama mereka yang tinggal di perkotaan dengan taraf pendidikan lebih baik.²³ Disatu sisi, setelah mengalami kemerdekaan pada 1945, sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam proses pembangunan dilakukan.

Disisi lain, dalam usianya yang masih 'belia' itu, bangsa Indonesia juga masih memiliki dan mengalami masalah sebagai bentuk 'krisis' atau degradasi etika sosial yang menghambat proses pembangunan itu. Salah satunya, terutama justeru ketika memasuki dalam era reformasi dan demokrasi (sejak 1998), perilaku korupsi di

²² Daniel U. Livine and Robert J. Havighurts, "Society and Education...", *Ibid.*, hlm. 362.

²³ Lembaga Administrasi Negara, "Kepemimpinan dalam Keragaman Budaya", *Model Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III*, Edisi Tahun 2008, Jakarta, hlm. 1.

negeri ini tampak sangat kompleks, akut, dan bersifat sistemik. Sebagian kalangan, mengatakan bahwa korupsi itu telah terjadi pada level yang parah dan akut. Mengharapkan korupsi agar dapat terkikis sama sekali berarti mengharapkan adanya tertib sosial yang sempurna. Padahal, dalam suasana perubahan pesat karena pembangunan, tertib sosial itu jauh ketinggalan. Gerakan antikorupsi apapun yang direncanakan membutuhkan strategi dan taktik yang pesannya lebih mudah difahami masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan korupsi di negeri ini sudah semakin kompleks dan tidak mudah menemukan solusinya. Prilaku korupsi juga semakin menarik di negeri ini karena pelakunya tidak melihat rentang usia, bisa usia, bisa usia muda, bisa aparat pemerintah bisa pihak sawata. Ada benar kiranya, bahwa korupsi di negeri ini cenderung 'menggurita'.

Suatu kenyataan karenanya bahwa fenomena demokrasi Indonesia pascareformasi menunjukkan kondisi demokrasi dalam proses 'belajar' atau 'miniatur' atau juga dapat disebut sebagai demokrasi 'transisi'. Demokrasi Indonesia dalam proses 'transisi' justeru memperlihatkan anomali sosial dan sejumlah prilaku menyimpang (*social deviance*) di tengah masyarakat pascareformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengarah kepada 'krisis' etika sosial. Hal ini, sesungguhnya kontras dengan cita-cita Reformasi 1998, yakni sebagai suatu era Reformasi yang menggantikan era Orde Baru yang dikatakan sebagai era 'otoriter'.

Pergantian rezim yang dikatakan 'otoriter' ke rezim demokrasi ditandai dengan perpindahan kekuasaan dari 'satu tangan' beralih kepada kekuasaan menempatkan lembaga perwakilan memiliki posisi dan porsi kekuasaan yang lebih besar. Suatu kekuasaan yang dijalankan oleh suatu institusi dimana mereka (wakil rakyat) yang duduk di dalamnya adalah dipilih rakyat. Hal ini, diharapkan aspirasi dan cita-cita masyarakat lebih mudah difahami dan dimanifestasikan dalam program pembangunan. Kehidupan politik dan budaya masyarakat juga menunjukkan perubahan signifikan, dimana kebebasan berpendapat memiliki tempat. Penguatan masyarakat sipil menjadi agenda bersama bagi seluruh komponen masyarakat. Otorianisme merupakan masa lalu.²⁴

²⁴ Pada era Reformasi 1998, suatu iklim demokrasi yang terjadi di Indonesia merupakan gelombang besar arus demokratisasi. Demokrasi menjelaskan dan menguji proses dimana pemerintah, negara dan masyarakat mencoba beralih dari bentuk pemerintahan otoriter

Demokrasi yang terjadi di Indonesia sebagai bagian dari arus besar gelombang ketiga di negara-negara dunia ketiga dan negara bekas komunis. Dalam konteks gelombang demokratisasi, Huntington membagi proses peradaban manusia modern menjadi tiga gelombang, dimana tiap gelombang tersebut telah mempengaruhi sejumlah negara, dan selama tiap-tiap gelombang itu sejumlah transisi rezim terjadi kearah yang tidak demokratis. Dalam melakukan pembagian gelombang demokratisasi itu, Huntington memberikan catatan bahwa sejarah bukanlah suatu yang teratur dan perubahan politik tidak dapat dipilah-pilah agar tepat masuk ke dalam kotak sejarah yang rapi. Menspesifikasikan secara ketat kapan sebuah transisi rezim terjadi sering kali merupakan upaya yang subyektif. Bagaimana pula subyektivitas pada upaya menspesifikasi secara tepat waktu terjadinya gelombang demokratisasi dan gelombang baliknya.²⁵

Secara keseluruhan, gerakan menuju demokratisasi merupakan suatu gerakan yang bersifat global. Gelombang demokratisasi dan arus baliknya menggambarkan suatu pola 'dua langkah maju, satu langkah mundur'. Transisi gelombang ketiga yang terjadi di Indonesia merupakan proses politik yang kompleks yang melibatkan beragam kelompok yang berupaya memperoleh kekuasaan dan mendukung atau menentang demokrasi serta tujuan-tujuan lainnya. Dari perspektif proses demokratisasi, para peserta penting dalam proses ini terdiri dari kelompok konservatif, pembaharu liberal, pembaharu demokratis dalam koalisi pemerintah, dan kelompok moderat demokratis serta ekstremis revolusioner di pihak oposisi.²⁶ Dalam hal ini, Huntington menggambarkan bahwa ada tiga proses transisi dalam demokrasi: *transformation*, *replacement*, dan *transplacement*.²⁷

menjadi lebih demokratis. Dalam hal ini, memang terdapat perdebatan mengenai arti demokrasi, jenis demokrasi dan level demokrasi yang secara realistis diharapkan dapat diwujudkan, seperti dalam Jean Grugel (2002). Sebuah gelombang demokratisasi, dalam pandangan Samuel Huntington adalah sekelompok dari rezim nondemokratis ke rezim demokratis, yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dalam jumlah signifikan dan lebih besar dari pada transisi menuju arah sebaliknya. Sebuah gelombang biasanya biasanya meliputi iberalisasi atau demokratisasi sebagian pada sistem-sistem politik yang tidak sepenuhnya menjadi demokratis. Lihat pendapat Huntngton dalam kutipan: (Fahri Hamzah, *Demokrasi, Transisi, Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik*, Faham Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 5).

²⁵ Fahri Hamzah, "Demokrasi, Transisi, Korupsi....", *ibid.*, hlm. 6.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

²⁷ Yakni: (1) *Transformation*, dimana pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter memelopori dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan

Jika memperhatikan sifat transisi di Indonesia, demokratisasi yang terjadi dikategorikan *replacements*. Dimana ketika itu kelompok pembaharu masih lemah dan bahkan mungkin tidak ada dalam rezim pemerintahan Orde Baru. Unsur-unsur yang dominan dalam pemerintahan adalah konservatif yang dengan gigih menentang perubahan rezim. Konservativisme ini terjadi dapat saja dikarenakan keengganan untuk berubah sehingga cenderung memperhatikan *status quo* atau bisa pula dikarenakan *pressure* dari rezim berkuasa Orde Baru. Situasi demikian tentu akan sulit akan terjadinya adanya isu peralihan kepemimpinan nasional dimunculkan secara formal dari dalam tubuh pemerintahan rezim Orde Baru sendiri.

Etika Sosial dan Etika Pendidikan

Seperti diketahui bahwa secara mendasar, etika merupakan cabang falsafah dan sekaligus suatu cabang dari ilmu-ilmu kemanusiaan (*humaniora*). Dilihat dari cabang falsafah, etika membahas sistem-sistem pemikiran yang mendasar mengenai ajaran dan pandangan moral. Sebagai cabang ilmu, etika membahas bagaimana dan mengapa seorang mengikuti suatu ajaran tertentu.

ngubahnya menjadi sebuah sistem. Transformasi menjadi penyebab ekitar 16 dari 35 transisi gelombang ketiga yang telah berlangsung atau mulai berlangsung menjelang akhir dasawarsa 1980. Interaksi antara kelompok pembaharu dengan konservatif dalam pemerintah koalisi merupakan interaksi yang terpenting. Transformasi hanya terjadi jika kelompok pembaharu lebih kuat dari kelompok oposisi, dan jika kelompok moderat lebih kuat dari kelompok ekstremis. (2) *Replacement*, dimana kelompok pembaharu masih lemah atau tidak ada dalam rezim tersebut. Unsur-unsur yang dominan dalam pemerintahan adalah kelompok konservatif yang dengan gigih menentang perubahan rezim. Akibatnya, baru bisa terwujud apabila kelompok oposisi makin kuat dan pemerintah semakin lemah hingga jatuh dengan sendirinya atau digulingkan. Demokratisasi yang terjadi dalam gelombang ketiga umumnya merupakan kerjasama dengan penguasa. Hanya enam *replacement* terjadi menjelang tahun 1990. Dalam *replacement*, interaksi antara pemerintah dengan kelompok oposisi serta interaksi antara kelompok moderat dengan kelompok ekstremis berperan penting. Kelompok oposisi pada akhirnya mesti lebih kuat dari pada pemerintah, dan kelompok moderat mesti lebih kuat dari pada kelompok ekstremis. (3) *transplacements*, dimana demokrasi merupakan hasil aksi bersama pemerintah dan kelompok oposisi. Dalam pemerintah itu, keseimbangan antara kelompok konservatif dengan kelompok pembaharu sedemikian rupa, sehingga pemerintah bersedia merundingkan, tetapi tidak bersedia memprakarsai perubahan rezim, berbeda dengan situasi dimana kelompok konservatif menimbulkan *replacements*. Sekitar 11 dari 35 kasus liberalisasi dan demokratisasi yang dimulai berangsur pada 1970-an dan 1980-an mendekati model *transplacements*, misalnya Polandia, Cekoslovakia, Uruguay dan Korea. Dalam *transplacements*, interaksi utama adalah interaksi antara kelompok pembaharu dengan kelompok moderat yang perbedaan kekuatannya tidak begitu timpang dan masing-masing kelompok mampu mendominasi kelompok anti demokrasi yang berada pada masing-masing sisi dari garis pemisah antara pemerintah dengan pihak oposisi. Lihat Huntington dalam Fahri Hamzah: (*ibid.*, hlm. 7-9).

Sebagai ilmu, etika dikategorikan menjadi dua jenis: *etika umum* dan *etika khusus*. Etika umum mengkaji prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Dalam falsafah Barat dan Timur, seperti di Cina dan dalam Islam, aliran-aliran pemikiran etika tampak beragam. Tetapi, pada dasarnya falsafah tersebut mempelajari asas-asas tindakan dan perbuatan manusia, serta sistem nilai yang terkandung di dalamnya. Etika khusus dibagi menjadi dua jenis yakni etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercayaan agama dianutnya serta panggilan nurani, kewajiban, dan tanggungjawab terhadap Tuhannya. Sedangkan, etika sosial mengkaji tentang kewajiban serta norma-norma sosial yang sepatutnya ditaati dalam konteks interaksi antarindividu atau antarmanusia, masyarakat, bangsa dan negara. Etika sosial meliputi beberapa cabang secara khusus lagi, seperti etika keluarga, etika profesi, etika bisnis, etika lingkungan, etika pendidikan, etika kedokteran, etika jurnalistik, dan etika politik.²⁸ Jadi, etika pendidikan sebagai cabang dari etika sosial lebih fokus mengkaji kewajiban dan norma-norma dalam proses pendidikan, yakni terutama seorang dalam suatu masyarakat negara (memiliki sistem pendidikan tertentu) berinteraksi secara edukatif dengan individu (terlibat dalam proses pendidikan) dan kelompok lain (seperti orang tua dan masyarakat).

Sekedar mengingatkan kembali disini pentingnya memahami mengenai arti moral dan etika. Moral merupakan aturan-aturan normatif (dalam Islam dinamakan *akhlak*) yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu yang terbatas oleh ruang dan waktu. Penerapan tata nilai moral dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat tertentu merupakan biddang kajian antropologi, sedangkan etika meruakan bidang kajian filsafat. Realitas moral dalam masyarakat dijelaskan melalui studi kritis (*critical studies*) yang dibidangi oleh etika. Jadi, studi kritis terhadap moralitas merupakan bidang etika, sehingga moral adalah obyek material dari etika.²⁹ Jadi, akhlak atau moralitas merupakan seperangkat tata nilai yang 'sudah jadi' dan 'siap pakai' tanpa dibarengi dan bahkan terkesan menjauhi kritis. Sedangkan etika, sebaliknya, bertugas untuk mempertanyakan secara

²⁸ Herman Khaeron, *Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2013, hlm. 15.

²⁹ Clyde Kluckhohn, 'Ethical Relativity' dalam 'Ethical Relativism', John Ladd (ed.) dalam Herman Khaeron, 'Etika Politik...', *ibid.*, hlm. 25.

kritis rumusan-rumusan masa lalu yang sudah 'baku' dalam masyarakat.

Zakiah Darajdat berpandangan bahwa dalam merespon degradasi moral remaja dan pelajar sebagai produk pendidikan, pentingnya sebuah institusi pendidikan yang secara serius dan terorganisir membina akhlak atau moral anak didiknya. Pembinaan moral meliputi dua hal penting, yakni tindak moral (*moral behavior*) dan pengertian tentang moral (*moral concept*). Tindak moral adalah pembinaan akhlak sejak dini untuk mengarah keada moral yang baik. Sebab moral tumbuh bersamaan dengan pengalaman langsung dari lingkungan dimana anak-anak hidup, berkembang menjadi kebiasaan, baik dimengerti ataupun tidak. Kelakuan atau perilaku adalah hasil dari pembinaan yang terjadi secara langsung atau tidak langsung, formil atau tidak formil. Pembinaan moral fokus kepada keteladanan pendidik atau orang tua. Sedangkan *moral concept* adalah pengajaran mengenai konsep-konsep akhlak kepada anak didik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat keada mereka mengenai berbagai akhlak yang baik dalam bergaul dalam masyarakat.³⁰

Seorang tokoh sosiologi pendidikan, Emile Durkheim, dalam pemikiran pendidikan yang dikembangkannya menulis tentang pendidikan moral yang dituangkan dalam bukunya *L'Education Morale; Cours de Sociologie Dispens' a'la Sorbone en 1902-1903*. Menurut Durkheim, moralitas terdiri dari seperangkat aturan dan prinsip-prinsip, karakteristik yang sangat khusus yang membedakan mereka dari aturan dan standar lainnya. Dikatakan bahwa dalam konsep moral terdapat 'hukum' moralitas. Menurut Durkheim dimensi hukum moralitas hanya sebagian kecil dari pada apa yang dinamakan fenomena moral. Moralitas dibangun atas tiga elemen yakni disiplin, keterikatan sosial, dan otonomi. Disiplin memiliki fungsi penting dalam membentuk karakter dan keperibadian secara umum.³¹

³⁰ Darajdat, Zakiah, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*, Bulan-Bintang, Jakarta, 1971, hlm. 119.

³¹ Disiplin dan kolektivitas ideal dalam pandangan Durkheim adalah dua karakter dari fakta moral dalam masyarakat. Elemen pertama moralitas adalah disiplin yang memberikan kebebasan dari keinginan yang tak terbatas. Kehidupan kolektif difahami sebagai sumber dari keseluruhan kehidupan moral yang diraktikkan dan difahami dalam masyarakat modern yang sangat kompleks dengan permintaan untuk memahami keseimbangan moral ideal dengan perbedaan lingkungan serta abstraksi ekspresi ideal dalam kehidupan kolektif

Memasuki era demokratisasi di Indonesia sejak 1998, menunjukkan situasi berbangsa yang mengalami 'krisis etika sosial' berbangsa dimana tidak selalu simetris dengan spirit reformasi itu. Mantan Presiden RI, B. J. Habibie, mengungkapkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia (*man-power*) bangsa Indonesia pada era Orde Baru, dalam hal sains dan teknologi, tidak kalah dibanding Amerika Serikat. Hal itu terlihat dari prestasi yang pernah diperoleh Indonesia, terutama ketika berhasil memproduksi pesawat terbang N-250 yang dikatakan Habibie sebagai pesawat tercanggih di kelasnya pada waktu itu. B.J. Habibie mengungkapkan pula bahwa N-250 menjadi tonggak penting sejarah Kedirgantaraan Indonesia. Sejak pertama kali diluncurkan pada 1995, dan telah tercatat dalam sejarah perkembangan teknologi di Indonesia. Tetapi, karena kebijakan politis pada era Reformasi kemudian yang 'melenceng', pengembangan industri pesawat terbang yang merupakan bagian dari program 'Indonesia Tinggal Landas' itu telah terabaikan dan terhenti. Dampaknya, antara lain terdapa ribuan putra-putri terbaik Indonesia yang bekerja di Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) di Bandung 'hengkang' ke luar negeri. Dikatakan B.J. Habibie bahwa Indonesia justeru kembali terjerumus ke dalam 'penjajahan' ala VOC gaya baru, dimana kekayaan Indonesia dialihkan pengolahannya ke negara lain, kemudian setelah menjadi produk bernilai tinggi dijual kembali dijual ke Indonesia. B. J Habibie mengatakan jangan sampai karena euforia reformasi atau pertimbangan politis sesaat membuat bangsa ini tega 'menghabisi' karya nyata anak bangsa yang tekun dan memiliki spirit patriotisme tinggi, seperti terjadi dengan Pesawat N-250 Gatotkoco. B.J. Habibie mengharapkan ke depan 'jangan sampai pengalaman pahit industri kedirgantaraan terulang lagi, hanya karena kebijakan politik sesaat'.³² Agaknya, iklim demokratisasi Indonesia

secara keseluruhan. *Elemen kedua moralitas* mengacu pada isi dari moralitas dan Durkheim menyebutnya "Keterikatan pada kelompok-kelompok sosial". Ini berarti bahwa untuk bertindak atas cahaya dari suatu kepentingan kolektif. *Elemen yang ketiga moralitas* adalah otonomi yang bersangkutan dengan keadaan pikiran agen moral. Ini berarti bahwa pelaku moral harus memahami semua alasan dari tindakannya, benar-benar dan sepenuhnya. Dengan kata lain, elemen ketiga dari moralitas pemahaman. Durkheim melihat otonomi pokok yang membedakan unsur karakteristik moralitas sekuler. Elemen ini merubah konsep aturan yang merupakan inti dari disiplin moral dan perubahan makna dari keterikatan kelompok sosial. Lihat: (Rahmad Hidayat, *Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*, PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 114-117).

³² Seperti pesan pidato disampaikan B.J. Habibie pada acara peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional di Lapangan Gedung Sate, Bandung pada 10/8/2012 (diakses pada 25 Oktober 2012).

terkini mesti diakui sebagai demokrasi 'transisi' yang memperlihatkan 'krisis' etika sosial dalam realitas kehidupan berbangsa.

Dalam bidang ekonomi, fakta memperlihatkan bahwa bangsa besar ini masih cenderung mengandalkan sumber daya alam (*natural resources*). Di era desentralisasi dalam wujud era Otonomi Daerah, justeru proses pembangunan terkesan tanpa kendali. Kekayaan alam, terutama dalam bidang pertambangan dan perkebunan lebih diandalkan pada investor asing. Seharusnya, seperti disinyalir berbagai kalangan, bahwa Indonesia tidak seharusnya terlalu mengandalkan investor asing karena berdasarkan sejumlah penelitian akademis yang kompeten memperlihatkan bahwa eksistensi perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan kurang berpihak dalam hal mensejahterakan rakyat. Untuk posisi-posisi penting tertentu di struktur organisasi perusahaan swasta milik investor asingpun agak sulit diduduki putera-puteri terbaik di negeri ini. Pejabat atau *elite* formal di era otonomi daerah agaknya terlalu mudah memberi izin dan memberi 'kekuasaan' ekonomi kepada investor asing. Padahal, tentunya dapat difahami bahwa kebijakan Presiden Soekarno, pentingnya mengambillalih kekuasaan ekonomi dari pihak swasta Belanda, dengan menasionalisasi sejumlah perusahaan milik swasta itu menjadi perusahaan nasional.

Sebagian *elite* daerah sering 'terjebak' pada prilaku korupsi. Banyak yang bercita-cita menjadi 'raja-raja kecil' di daerah dari pada mengabdikan dengan ikhlas dalam memperbaiki harkat dan martabat masyarakat. Jika pada era Orde Baru korupsi dilakukan pada level 'pusat', tersentralistik, dan sistemik; pada era Otonomi Daerah, korupsi justeru sering kali memperlihatkan terdesentralistik dan sistemik. Jika, tujuan paradigma pembangunan otonomi daerah untuk menghapuskan korupsi di Jakarta, justeru prilaku korupsi terjadi pada banyak daerah. Karenanya, tidak hanya aspek kuantitas, kualitas pelaku korupsi pun meningkat. Suatu yang patut disayangkan, dari *Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) 2013* memperlihatkan bahwa kasus korupsi di sektor pendidikan meningkat pesat dalam kurun dasawarsa (2003-2013). Selama satu dasawarsa telah diungkap 296 kasus korupsi yang menyeret 479 tersangka dengan total nilai kerugian mencapai Rp 619 miliar. Angka kerugian negara meningkat empat kali lipat pada 2013 menjadi 99,2 miliar jika dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu. Puncak kasus

korupsi terjadi paad 2007 dengan 84 kasus dan kerugian negara mencapai Rp 151 miliar.³³

Berbagai fenomena sosial tersebut sudah mengarah pada suatu kondisi 'kerapuhan' atau 'krisis' etika sosial dalam berbangsa dan bernegara yang jika terus terjadi dan tanpa terkendali cenderung terjadinya disharmoni sosial dan intoleransi antarsesama. Karenanya, sangat diperlukan upaya penguatan etika sosial dari berbagai elemen terkait dalam proses pembangunan yang berpihak kepada masyarakat Indonesia keseluruhan yang heterogen dan pluralistik. Memang iklim demokrasi dalam makna sesungguhnya tidak dapat diraih dalam waktu singkat, sehingga Indonesia pun mesti menempuh proses 'transisi' dalam berdemokrasi. Untuk memperbaiki itu semua, diperlukan suatu komitmen yang tulus dalam melaksanakan program pembangunan nasional dan otonomi daerah yang telah direncanakan denagn mengedepankan penegakan *cleant government* dan *good governance*. Mendambakan Indonesia Maju harus dimulai pentingnya membangun etika sosial berbangsa pada era 'transisi' demokrasi dengan sungguh-sungguh, yakni, harus dimulai dari kesadaran kolektif berbagai elemen bangsa dengan kebijakan aktual pembangunan nasional dan daerah yang senantiasa berpihak kepada masyarakat keseluruhan tanpa terkecuali. Suatu bangsa tidak pernah akan mengalami kemajuan dan berperadaban apabila anomali sosial mengarah pada 'krisis' etika sosial yang akut terjadi pada negara itu.

Selanjutnya, di era demokrasi transisi ini, kecenderungan terjadinya proses degradasi, krisis, atau kerapuhan etika sosial dalam bentuk lainnya, berupa kecenderungan kurang intoleransi. Dari hasil survei yang dilakukan lembaga studi *Center of Strategic and International Studies (CSIS)* yang menunjukkan bahwa toleransi beragama orang Indonesia masih rendah. Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Philips Vermote mengungkapkan kurangnya toleransi bisa dilihat dari penolakan pembangunan tempat ibadah. Mayoritas orang Indonesia bisa menerima tetangga yang beda agama, namun tidak bisa menerima jika ada pembangunan tempat ibadah agama lain di sekitar lingkungannya. Lembaga studi CSIS sudah melakukan survei pada Februari 2012 di 23 provinsi Indonesia. Dari 23 provinsi tersebut ada 2.213 responden yang disurvei.

³³ 'Jajak Pendapat Kompas: Miskinkan Koruptor Paling Dikehendaki', Kompas, 2 Desember 2013.

Survei dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang ada hubungannya dengan toleransi beragama. Hasilnya, sebanyak 59,5 persen responden tidak keberatan bertetangga dengan orang yang beda agama. Sedangkan 33,7 persen lainnya memilih menolak tetangga yang beda agama dengan mereka. Kemudian survei beralih ke pertanyaan soal pembangunan rumah ibadah agama lain di sekitar lingkungan mereka. Sebanyak 68,2 persen responden memilih menolak pembangunan tersebut. Sementara 22,1 persen lainnya mengaku tidak keberatan.

Dengan hasil survei di atas, Philips mengatakan bahwa tingkat toleransi beragama masyarakat Indonesia masih rendah. Tak terkecuali mereka yang berada di tingkat pendidikan yang dikategorikan sudah tinggi. Philips menyimpulkan faktor pendidikan tidak akan menjamin tingginya tingkat toleransi dari orang tersebut. Terbukti dari hasil survei, mereka yang berpendidikan di atas SMA ternyata justru tidak toleran terhadap orang yang beragama lain. Mereka cenderung menolak dan tidak menerima orang beda agama tinggal di lingkungan hidup mereka. Menurut Philips ini sangat berbeda dengan pandangan negara Indonesia yang demokratis. Padahal toleransi adalah salah satu nilai-nilai demokrasi dalam menghargai perbedaan. Ini masih batu sandungan bagi Indonesia kedepan.³⁴

Suatu hal menarik karena jarang terjadi sebelumnya, yakni perilaku korupsi di negeri yang mayoritas sudah mengalami pergeseran paradigma, dimana para pegawai negeri sipil berusia relatif muda justru melakukan korupsi dalam jumlah prestisius. Melalui berita media massa cetak dan elektronik serta internet, telah diramaikan dengan isu korupsi kalangan 'belia' itu yang terutama di lakukan mereka yang berkecimpung didunia politik atau 'rekening gendut' mereka yang berlatar belakang birorasi, sebagai pegawai negeri sipil. Terlepas nanti fakta hukum menunjukkan ada yang mengandung kebenaran atau sebaliknya, tetapi paling tidak isu ini layak menjadi perhatian semua elemen bangsa. Karena, adalah suatu yang *mafhum* bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan generasi mudanya. Banyak bangsa di dunia ini menempatkan kebijakan investasi sumber daya manusia (*man-power*) pada urutan terdepan dalam pembangunan bangsa.

³⁴ <http://civicara.com/penelitian-toleransi-antar-agama-di-indonesia-rendah/> (diakses, 4/4/2013).

Para *founding fathers* pun telah menempatkan generasi muda menjadi harapan penting dalam melanjutkan estafeta kepemimpinan bangsa ini. Tidak sedikit tokoh-tokoh penting di negeri ini, pada awalnya, berasal dari pelajar/mahasiswa/generasi muda yang memiliki talenta, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kerja keras, jujur, disiplin, dan pantang menyerah. Tetapi, di era Reformasi ini, khalayak dikejutkan dengan 'musibah' dimana justeru sebagian kalangan generasi muda terindikasi rawan terhadap perilaku korupsi yang diperlihatkan sejumlah kasus korupsi dalam jumlah miliaran dan triliunan rupiah. Sudah barang tentu adaya slogan: 'pemuda adalah harapan bangsa' menjadi kontradiktif ketika sejumlah kasus korupsi besar di negeri ini justeru didalamnya melibatkan sebagian kalangan muda.

Sebagai upaya menyelamatkan anak didik, remaja, dan generasi muda dari 'ancaman' berbagai bentuk perilaku menyimpang (*social deviances*) dalam kehidupan berbangsa yang akan datang, pendidikan memiliki peranan strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia (*man-power*) yang diharapkan. Proses pendidikan yang mengedepan pengembangan potensi anak didik dapat dikembangkan secara optimal, baik aspek kognitif, afektif dan psikomotor—Taxonomi Benyamin Bloom; atau pengembangan 'aql, qolbu, dan jasmani, seperti dalam konsep pendidikan Islam. Proses pendidikan dan pembelajaran di keluarga, sekolah, dan masyarakat, karenanya, sedapat mungkin dikembangkan sedemikian rupa yang secara hirarkis berkseimbangan. Selanjutnya, proses pembelajaran edukatif pada lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal; atau di sekolah dan luar sekolah, sesuai dengan falsafah berbangsa—menciptakan anak didik yang menguasai ilmu pengetahuan (iptek) dan teknologi serta menguasai pengetahuan agama (imtaq) yang berakhlak, berkeribadian dan berkarakter—merupakan substansi dari proses pendidikan, yang menggambarkan etika pendidikan.

Life Style, Pemuda, dan Fenomena Korupsi³⁵

Ternyata setelah dua belas tahun era Reformasi berlalu, perilaku korupsi semakin memburuk. Berdasarkan hasil salah survei memperlihatkan bahwa Indonesia menempatkan peringkat nomor 1 terkorup dari 10 negara Asean yang disurvei. Buruknya peringkat

³⁵ Tulisan penulis yang berjudul: "Life Style, Pemuda & Fenomena Korupsi", pernah dimuat dalam *Sumatera Ekspres*, 7 September 2010.

korupsi ini berkorelasi pula terhadap peringkat nomor 2 negara terburuk kinerja birokrasi dari 10 negara yang di survei. Beberapa fenomena lainnya menarik pula diperhatikan, dimana kasus-kasus bertalian dengan kuatnya indikasi korupsi belum terselesaikan, antara lain, kasus Bank Century (6,7 triliun), dan indikasi korupsi Gayus uang pajak dimana Susno Duadji bertindak sebagai *whistle blower*, yang diperkirakan melibatkan banyak pihak. Tentu, sejumlah pendekatan telah digunakan untuk menganalisis perilaku korupsi dan penyebabnya, baik dari perspektif sosial-politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Tulisan ini ingin memfokuskan analisis pada perspektif sosial-budaya, dimana terjadinya perilaku korupsi diasumsikan bertalian dengan *life style* atau gaya hidup individu pelakunya.

Diungkapkan Syed Hussein Alatas dan Michael Johnston, korupsi terungkap dalam sejumlah perilaku, antara lain penyuaipan, pemerasan, penggelapan, manipulasi, persekongkolan atau kolusi, dan nepotisme. Dalam prakteknya, bentuk perilaku korupsi tersebut memiliki sebutan tersendiri. Dalam kajian sosiologi korupsi, suatu perilaku korupsi memiliki sejumlah unsur. Unsur-unsur dimaksudkan, antara lain: *pertama*, perilaku itu terjadi dalam bidang penggunaan kekuasaan yang pelaksanaannya menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan bagi kekuasaan tersebut. *Kedua*, perilaku yang menyimpang dalam menggunakan kekuasaan itu dilakukan dalam penuh kerahasiaan—ketika melakukan korupsi tidak diketahui orang lain dan tidak ada bukti-buktinya. *Ketiga*, penyimpangan penggunaan kekuasaan itu bersifat mendua. Dari luar, penggunaan kekuasaan terlihat wajar, tetapi pada saat bersamaan justru memperlihatkan sebaliknya, dalam hubungan antara pemegang kekuasaan dengan anggota (masyarakat, staf/karyawan). *Keempat*, mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan itu mendapat keuntungan, terutama prestasi berupa uang di satu sisi; disisi lain, tampak terjadi kontraprestasi dimana kecenderungan buruknya kinerja dan pelayanan. *Kelima*, mereka yang terlibat berusaha saling memengaruhi sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan. *Keenam*, sebagai akibat dari perilaku korupsi itu masyarakat/negara/instansi mengalami kerugian tertentu, baik berbentuk polisis, ekonomis, dan psikologis.

Persepsi selama ini staf/karyawan pada lapisan bawah melakukan korupsi paling berbahaya dan serius. Tindakan korupsi pun banyak ditujukan terhadap mereka yang berada pada lapisan ini.

Seringkali, mereka yang berada pada lapisan menengah ke atas atau lapisan elit sangat sedikit tersentuh oleh tindakan hukum atas korupsi. Mereka yang berada pada lapisan menengah ke bawah kadang kala dianggap pada "pembanggang", mereka dianggap melakukan perilaku korupsi tanpa persetujuan atau pengetahuan elit-atasan (pimpinan, manajer). Karenanya, kelompok lapisan kedua ini paling banyak menjadi "korban". Sebagai pihak yang bersalah dalam suatu kasus korupsi, kelompok lapisan kedua ini cenderung memiliki kultur dan sikap *ewuh pakeuw* terhadap elit-atasan. Mungkin dikarenakan sudah banyak menerima bantuan jasa atas kebaikan karier dan materi dari atasan, atau bisa juga karena merasa takut kalau adanya ancaman dan sanksi tertentu dari atasan yang memiliki jaringan birokrasi dan politik yang luas. Disini, elit-atasan berposisi sebagai *superordinate* dan lapisan bawahan sebagai *subordinate*, yang sering tak berdaya dalam banyak hal, meskipun harus siap sebagai "korban" kasus korupsi.

Bila jauh sebelumnya mereka yang berada pada lapisan bawah, *subordinate*, sering dinyatakan bersalah dan harus dihukum karena korupsi. Dalam perkembangannya, terutama setelah memasuki era reformasi (sejak 1998) sejumlah kasus korupsi di tanah air justru menunjukkan sebaiknya, yakni adanya keterlibatan secara kolektif, *berjemaah*. Sejumlah elit-lapisan atas, *superordinate*, elit politik dan kepala daerah, dan lain-lain, telah memperoleh sanksi hukuman penjara. Era Reformasi, dengan plus-minusnya, telah berdampak positif terhadap penegakan hukum di negeri ini. Hal ini sekaligus telah merubah "paradigma lama" bahwa pelaku korupsi cenderung dilakukan mereka yang berada pada posisi lapisan bawah berubah ke arah "paradigma baru", yakni terungkap bahwa korupsi dilakukan secara kolektif. Sanksi hukuman pun bisa terjadi terhadap siapa pun, baik kelompok elit maupun non-elit. Disini, supremasi hukum tampak mulai ditegakkan, terutama ketika KPK dibawah kendali Antasari Azhar. Terbukti bahwa pada era Antasari Azhar, peringkat korupsi Indonesia pernah berada level yang lebih baik, pernah menempati peringkat ke-7 di Asean. Sekarang melorot kembali menjadi peringkat ke 1 terkorup dari 10 negara yang disurvei di Asean.

Kompleksnya penanganan perilaku korupsi di negeri ini dikarenakan melibatkan multi-dimensi, dan lebih dari itu keterkaitan erat dengan *life style* seseorang. Dari dimensi sosial-ekonomi, misalnya adanya tuntutan dari keluarga untuk menaikkan kebutuhan.

Adanya keinginan besar agar anak-anak menempuh pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya. Impian ini, bisa saja dapat mendorong kepala keluarga (suami) untuk memperoleh pendapatan lebih. Tentu ini merupakan suatu fikiran cerdas dan mulia, asalkan tidak berbenturan terhadap norma, etika dan aturan berlaku pada masyarakat dan negara. Tetapi, sayangnya dalam hidup ini, selalu dihadapi dua pilihan, yakni "baik" dan "buruk". Walaupun dapat dipastikan, tidak seorang pun di dunia ini menghendaki hal buruk, tetapi menghendaki hal yang baik.

Sebagai ilustrasi, seorang kepala keluarga, suami, bisa saja menambah pendapatan, "seseran", dengan "jalan pintas" atau dengan berusaha dan kerja keras. *Angel-man* dan *devil-man* dapat mempengaruhi pilihan, dan perang batin pun terjadi. Dengan jalan *angel-man*, seorang kepala keluarga dapat mencari uang lembur, atau seorang pegawai negeri sipil bisa meminjam uang di bank untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Pilihan ini tetap mulia, karena tidak ada pihak (seseorang, instansi, negara) yang dirugikan. Tetapi, ketika fikiran terganggu dan tidak jernih, seseorang bisa melakukan "jalan pintas", termasuk memperoleh uang yang tidak sah atau korupsi. Pilihan baik dan buruk ini dapat terjadi pada siapa pun, baik elit maupun non-elit-lapisan bawah, yang dilakukan dengan sengaja dan kolektif. Ketika *devil-man*, yang dipilih, sesungguhnya telah terjadi *life style* yang tidak proporsional, "besar pasak dari pada tiang" atau *un realistic*, terjadilah perilaku korupsi dalam berbagai bentuknya.

Karenanya, *life style* seseorang yang mengarah ke perilaku individu, dapat berawal dari motif-dorongan internal dan eksternal. Motif-dorongan memenuhi kebutuhan keluarga secara berlebihan, *unrealistic*, dan tidak seimbang dengan pendapatan dapat berdampak pada perilaku korupsi. Akan berbahaya lagi bila *life style* yang cenderung *hedonisme-materialistic*, ingin lebih unggul dari orang lain, tidak menyukai bila ada orang yang lebih (kaya), juga akan lebih mempermudah perilaku korupsi. Para ahli psikologi-sosial, menyebut seorang berperilaku demikian itu dengan istilah *melinging*, yakni suatu gejala gangguan mental atau fisik untuk memalsukan atau melebih-lebihkan untuk memperoleh keuntungan sekunder, seperti keuntungan uang (diambil dari uang instansi/perusahaan) dengan cara ilegal untuk kepentingan pribadi. Dikatakan, seorang yang

pengalaman masa kecilnya kurang tercukupi secara materi, melakukan korupsi untuk mengangkat status sosial.

Mengingat setiap individu memiliki karakteristik *life style* yang berbeda dengan individu lainnya, pandangan tentang korupsi pun bisa berbeda pula. Ada pandangan positif terhadap korupsi. Korupsi, dalam hal ini, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi atau pelayanan yang lebih cepat karena tindakan suap. Korupsi juga dapat mendatangkan keuntungan materi (uang) yang dapat mensejahterakan pribadi keluarga. Dalam bidang politik, korupsi dapat menurunkan resistensi oposisi dengan tindakan suap. Sementara itu, pandangan negatif, *moralis*, memandang korupsi sebagai parasit, dapat dalam bidang ekonomi dapat menimbulkan biaya yang tinggi karena *mark-up*; langkanya barang kebutuhan masyarakat; rendahnya kualitas barang; diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan dan proyek pembangunan; dan menguatnya sikap primordialisme kelompok. Secara sosial, korupsi dapat menjangkit ke masyarakat luas; muncul sikap apatis; kesenjangan sosial; munculnya potensi konflik; dan tindakan kriminal.

Bertitik tolak dari itu semua, perilaku korupsi sesungguhnya sangat tergantung cara pandang seseorang tentang korupsi, bisa positif dan negatif. Cara pandang tentang korupsi itu akan membentuk *life style* seseorang dan kelompok yang akan menentukan sejauhmana perilaku akan mungkin terjadi. Semakin seseorang memandang korupsi suatu hal yang negatif, akan kecil kemungkinan melakukan korupsi. Semakin seseorang memandang korupsi sebagai suatu hal yang biasa dan positif, perilaku korupsi akan semakin meningkat dan menjadi budaya. Seharusnya *life style* yang mengedepankan realistik, kesederhaan, sesuai dengan kemampuan, dan jauh dari sikap hidup hedonisme, mengambil uang negara berdosa, dan mengedepankan disiplin dan kejujuran.

Untuk menciptakan seseorang memandang negatif terhadap korupsi memang memerlukan suatu proses panjang, terutama perlunya keteladanan dari orang tua, pendidik, elit birokrasi, elit politik, elit agama, elit hukum, dan elit masyarakat. Siapapun yang dianggap bersalah harus diberi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya, "tanpa pandang bulu". Dengan cara inilah yang dilakukan negara-negara yang berhasil memberantas korupsi.

Akhir-akhir ini, melalui media massa cetak dan elektronik serta internet, telah diramaikan dengan isu korupsi yang diduga lakukan

sejumlah generasi muda yang berkecimpung didunia politik atau 'rekening gendut' beberapa generasi muda yang berlatar belakang PNS. Terlepas nanti fakta hukum menunjukkan kebenaran atau sebaliknya, tetapi paling tidak isu ini layak menjadi perhatian semua elemen bangsa. Karena, adalah suatu yang *maflum* bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan generasi mudanya. Banyak bangsa di dunia ini menempatkan kebijakan investasi sumber daya manusia (*man-power*) pada urutan terdepan dalam pembangunan bangsa. Para *founding fathers* pun telah menempatkan generasi muda menjadi harapan penting dalam melanjutkan estafeta kepemimpinan bangsa ini. Tidak sedikit tokoh-tokoh penting di negeri ini, pada awalnya, berasal dari pelajar/mahasiswa/ generasi muda yang memiliki talenta, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kerja keras, jujur, disiplin, dan pantang menyerah. Tetapi, di era Reformasi ini, kita dikejutkan dengan 'musibah' dimana justeru sebagian kalangan generasi muda terindikasi rawan terhadap perilaku korupsi yang diperlihatkan dalam sejumlah kasus korupsi dalam jumlah miliaran dan triliunan rupiah. Sudah barang tentu adaya slogan: "pemuda adalah harapan bangsa" menjadi kontradiktif ketika sejumlah kasus korupsi besar di negeri ini justeru didalamnya melibatkan kalangan muda.

Ternyata setelah dua belas tahun era Reformasi berlalu, perilaku korupsi semakin memburuk. Berdasarkan hasil salah survei pada 2010 memperlihatkan bahwa Indonesia menempatkan peringkat nomor 1 terkorup dari 10 negara Asean yang disurvei. Buruknya peringkat korupsi ini berkorelasi pula terhadap peringkat nomor 2 negara terburuk kinerja birokrasi dari 10 negara yang di survei. Beberapa fenomena menarik yang masih hangat diperbincangkan, dimana kasus-kasus tersebut disinyalir kuat dengan indikasi korupsi, yang melibatkan sejumlah nama politisi muda dan pejabat sekelas menteri (berasal dari kalangan generasi muda).

Diungkapkan Syed Hussein Alatas dan Michael Johnston, korupsi terungkap dalam sejumlah perilaku, antara lain penyuapan, pemerasan, penggelapan, manipulasi, persekongkolan atau kolusi, dan nepotisme. Dalam prakteknya, bentuk perilaku korupsi tersebut memiliki sebutan tersendiri. Dalam kajian sosiologi korupsi, suatu perilaku korupsi memiliki sejumlah unsur. Unsur-unsur dimaksudkan, antara lain: *pertama*, perilaku itu terjadi dalam bidang penggunaan kekuasaan yang pelaksanaannya menyimpang dari tujuan yang telah

ditetapkan bagi kekuasaan tersebut. *Kedua*, perilaku yang menyimpang dalam menggunakan kekuasaan itu dilakukan dalam penuh kerahasiaan—ketika melakukan korupsi tidak diketahui orang lain dan tidak ada bukti-buktinya. *Ketiga*, penyimpangan penggunaan kekuasaan itu bersifat mendua. Dari luar, penggunaan kekuasaan terlihat wajar, tetapi pada saat bersamaan justru memperlihatkan sebaliknya, dalam hubungan antara pemegang kekuasaan dengan anggota (masyarakat, staf/karyawan). *Keempat*, mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan itu mendapat keuntungan, terutama prestasi berupa uang di satu sisi; disisi lain, tampak terjadi kontraprestasi dimana kecenderungan buruknya kinerja dan pelayanan. *Kelima*, mereka yang terlibat berusaha saling memengaruhi sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan. *Keenam*, sebagai akibat dari perilaku korupsi itu masyarakat/negara/instansi mengalami kerugian tertentu, baik berbentuk politis, ekonomis, dan psikologis.

Persepsi selama ini staf/karyawan pada lapisan bawah melakukan korupsi paling berbahaya dan serius. Tindakan korupsi pun banyak ditujukan terhadap mereka yang berada pada lapisan ini. Seringkali, mereka yang berada pada lapisan menengah ke atas atau lapisan elit sangat sedikit tersentuh oleh tindakan hukum atas korupsi. Mereka yang berada pada lapisan menengah ke bawah kadang kala dianggap pada "pembanggang", mereka dianggap melakukan perilaku korupsi tanpa persetujuan atau pengetahuan elit-atasan (pimpinan, manajer). Karenanya, kelompok lapisan kedua ini paling banyak menjadi "korban". Sebagai pihak yang bersalah dalam suatu kasus korupsi, kelompok lapisan kedua ini cenderung memiliki kultur dan sikap *ewuh pakewuh* terhadap elit-atasan. Mungkin dikarenakan sudah banyak menerima bantuan jasa atas kebaikan karier dan materi dari atasan, atau bisa juga karena merasa takut kalau adanya ancaman dan sanksi tertentu dari atasan yang memiliki jaringan birokrasi dan politik yang luas. Disini, elit-atasan berposisi sebagai *superordinate* dan lapisan bawahan sebagai *subordinate*, yang sering tak berdaya dalam banyak hal, meskipun harus siap sebagai "korban" kasus korupsi.

Bila jauh sebelumnya mereka yang berada pada lapisan bawah, *subordinate*, sering dinyatakan bersalah dan harus dihukum karena korupsi. Dalam perkembangannya, terutama setelah memasuki era reformasi (sejak 1998) sejumlah kasus korupsi di tanah air justru

menunjukkan sebaiknya, yakni adanya keterlibatan secara kolektif, *berjamaah*. Beberapa elit eksekutif, legeslatif dan pengusaha telah memperoleh sanksi hukuman penjara. Era Reformasi, dengan plus-minusnya, telah berdampak positif terhadap penegakan hukum di negeri ini. Hal ini sekaligus telah merubah "paradigma lama" bahwa pelaku korupsi cenderung dilakukan mereka yang berada pada posisi lapisan bawah berubah ke arah "paradigma baru", yakni bahwa korupsi dilakukan secara kolektif.

Kompleksnya penanganan perilaku korupsi di negeri ini dikarenakan melibatkan multi-dimensi, dan lebih dari itu keterkaitan erat dengan *life style* seseorang. Dari dimensi sosial-ekonomi, misalnya adanya tuntutan dari keluarga untuk menaikkan kebutuhan. Adanya keinginan besar untuk memperoleh sesuatu dengan cepat dan tanpa kerja keras. Impian ini, bisa saja dapat mendorong seseorang memperoleh sesuatu dengan 'jalan pintas', yang tidak jarang sebagian dari mereka tampak berbenturan dengan norma, etika dan aturan berlaku pada suatu negara, yang akhirnya dikategorikan perilaku korupsi.

Perilaku korupsi yang dilakukan seorang dapat saja dimotivasi oleh gaya hidup (*life style*) yang mengarah ke perilaku individu, yang dapat berawal dari motif internal maupun eksternal. Motif memenuhi kebutuhan pribadi secara berlebihan, *unrealistic*, dan tidak seimbang dengan pendapatan dapat berdampak pada perilaku negatif, termasuk perilaku 'jalan pintas' sebagai cikal-bakal perilaku korupsi. Akan berbahaya lagi bila *gaya hidup* yang cenderung *hedonisme-materialistic*, ingin lebih unggul dari orang lain, tidak menyukai bila ada orang yang lebih dalam hal tertentu, juga akan lebih mempermudah berperilaku negatif dan jalan pintas. Para ahli psikologi-sosial, menyebut seorang berperilaku demikian itu dengan istilah *melinging*, yakni suatu gejala gangguan mental atau fisik untuk memalsukan atau melebih-lebihkan untuk memperoleh keuntungan sekunder, seperti keuntungan uang (diambil dari uang instansi/perusahaan) dengan cara ilegal untuk kepentingan pribadi. Dikatakan, seorang yang pengalamannya masa kecilnya kurang tercukupi secara materi, melakukan korupsi untuk mengangkat status sosial.

Akan tetapi, suatu hal negatif dilakukan berulang-ulang demi keuntungan tertentu (materi misalnya), maka korupsi dapat dipandang pandangan positif. Korupsi juga dapat mendatangkan

keuntungan materi (uang) yang dapat mensejahterakan pribadi keluarga. Dalam bidang politik, korupsi dapat menurunkan resisitensi oposisi dengan tindakan suap. Seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi (PT) juga dapat melakukan 'jalan pintas' dengan *ngepek*, yang dilakukan berulang-ulang dimana sebagai cikal-bakal tumbuhnya perilaku korupsi pada bersangkutan agar lulus ujian dengan nilai memuaskan. Ketika perilaku-perilaku demikian secara berulang dilakukan tanpa dibatasi oleh aturan dan sangsi yang ditegakkan, maka cikal-bakal dan *akar budaya korupsi* akan tumbuh. Disini, korupsi dipandang sebagai hal yang biasa dan positif bagi kehidupan.

Sementara itu, kalangan *moralis*, memandang korupsi sebagai *parasit*, dapat dalam bidang ekonomi dapat menimbulkan biaya yang tinggi karena *mark-up*; langkanya barang kebutuhan masyarakat; rendahnya kualitas barang; diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan dan proyek pembangunan; dan menguatnya sikap primordialisme kelompok. Secara sosial, korupsi dapat menjangkit ke masyarakat luas; muncul sikap apatis; kesenjangan sosial; munculnya potensi konflik; dan tindakan kriminal.

Perilaku korupsi sesungguhnya sangat tergantung cara pandang seseorang tentang korupsi, bisa positif dan negatif. Cara pandang tentang korupsi itu akan membentuk *gaya hidup* seseorang dan kelompok yang akan menentukan sejauhmana perilaku akan mungkin terjadi. Semakin seseorang memandang korupsi suatu hal yang negatif, akan kecil kemungkinan melakukan korupsi. Semakin seseorang memandang korupsi sebagai suatu hal yang biasa dan positif, perilaku korupsi akan semakin meningkat dan menjadi budaya. Akar budaya korupsi pada generasi muda akan dapat diminimalisir apabila mereka mengedepankan *gaya hidup* yang realistik, kesederhaan, menjauhi hedonisme, menjunjung disiplin dan kejujuran.

Sebagai upaya preventif agar generasi muda dan anak didik tidak terlibat jauh dalam iklim dan perilaku korupsi demi menuju kemajuan bangsa Indonesia yang gemilang, setidaknya ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian: *Pertama*, perlunya kesadaran orang tua, sekolah/institusi pendidikan dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter yang sedang didengungkan pemerintah. sebagai cikal-bakal pembentukan keperibadian anak didik yang menjunjung

tinggi kejujuran, disiplin, kerja keras dan moral. Bangsa ini membutuhkan anak didik yang tidak hanya memiliki talenta-intelektual tetapi membutuhkan moralitas atau *akhlakul karimah* (baik dalam niat, fikiran, lisan, dan tindakan).

Kedua, pelaksanaan pendidikan nasional tidak sepenuhnya sudah sempurna, karena itu, perlu pembenahan seiring dengan dinamika masyarakat ditengah perubahan sosial. Ujian Nasional (UN) yang sarat dengan *target-target* tanpa memperhatikan *proses* perlu dibenahi, karena dalam plaksananya tampak 'misterius' yang cenderung mengorbankan etika profesional pendidik. Anak didik juga terkondisi jauh dari jujur, disiplin, kerja keras, tapi cenderung santai, sebagai cikal bakal tumbuhnya mentalitas dan perilaku korupsi.

Ketiga, persoalan-persoalan korupsi perlu menjadi perhatian serius dan prioritas pemerintah. Tidak mungkin kasus korupsi akan dapat direduksi apabila pemerintah lemah dan tidak berdaya dalam memberantas korupsi. Kemajuan bangsa ke depan sangat tergantung dengan sejauh mana keberanian pemerintah dalam memberantas korupsi demi menuju masa depan Indonesia yang gemilang.

Repleksi: Hijrah ke-2013³⁶

Menyambut pergantian tahun, disambut dengan meriah dan bahkan spektakuler oleh masyarakat seantero dunia. Di tanah air pun, masyarakat di berbagai kota besar merayakan tahun baru dengan melakukan berbagai kegiatan seremonial, seperti pesta kembang api, ramainya suara percon, berbagai perlombaan dan pawai kendaraan bermotor mengelingi kota. Cukup besar tentunya biaya untuk memperingati perayaan tahun baru ini. Ada pula sebagian masyarakat muslim di tanah air yang melakukan kegiatan spiritual-keagamaan, dengan melakukan tadarusan dan pengajian. Suatu yang pasti bahwa tahun baru ini telah menjadikan sebagai momen universal bagi seluruh umat manusia di dunia. Semua umat manusia berharap bisa 'hijrah' pada tahun baru ini, 'hijrah' dari 2012 ke 2013, yang diharapkan akan memberi makna lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan.

Konsep 'hijrah' dapat dimaknai dengan perpindahan dari sesuatu situasi ke situasi yang lebih baik dan berpengharapan. Sebagai umat

³⁶ Tulisan penulis yang berjudul: "Hijrah: Dari 2012 ke 2013", pernah dimuat di Sumatera Ekspres, 17 Januari 2013.

manusia merupakan alamiah dan lumrah saja bila ingin memiliki kemajuan kehidupan dari tahun ke tahun berikutnya dalam menjalani usia yang diberikan Sang Khalik. Usia yang diberikan Yang Maha Kuasa yang terbatas, sedapat mungkin dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Sangat disayangkan andaikan dana yang dikeluarkan yang begitu besar kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan seremonial keduniawian yang jauh dari nilai hakiki dalam kehidupan kehadiran manusia dimuka bumi sebagai *khalifatul fil ardh*, utusan Sang Khalik. Sudah barang tentu pilihan jatuh kepada manusia sebagai wakil Allah SWT dimuka bumi ini, agar manusia dapat 'memakmurkan' dunia. Karena itu, dalam memperingati pergantian tahun ini, setidaknya beberapa hal penting yang menjadi fokus perhatian, agar setiap pergantian akhir tahun akan bermakna hakiki bagi kehidupan manusia.

Sebagai makhluk Allah SWT yang dipercayakan sebagai wakil-Nya dimuka bumi, umat manusia hendaknya senantiasa dapat menjaga kepercayaan 'amanah' yang telah dipercayakan kepadanya sebagai representatif (*khalifah*) dimuka bumi. Untuk itu, umat manusia idealnya senantiasa 'dekat' dengan Sang Khalik, dengan menjalankan segala perintah dan mengabaikan segala larangan-Nya. Semua agama agaknya memiliki ajaran berbeda tetapi sering universal agar pengikutnya senantiasa dekat dengan Sang Khalik. Sudah dipastikan tidak satupun agama didunia ini yang menginginkan pengikutnya tersesat dan jauh dari ajaran agamanya. Setiap agama tidak menginginkan bila memperingati perayaan tahun baru yang berlebihan, boros, dan jauh dari hemat tentunya bukanlah diajarkan ajaran agamanya. Yang diinginkan ajaran agama adalah lebih mendorong pengikutnya agar terus meningkatkan kualitas spiritualnya selain kualitas kemanusiaan lainnya. Terlebih dalam memperingati tahun baru ajaran agama apapun tentu tidak berharap adanya perilaku yang melanggar norma-norma agama dan sosial, misalnya minuman keras, narkoba, dan perkelahian.

Memperingati pergantian tahun baru hendaknya semakin mendekatkan umat manusia dengan Sang Khalik, karena semakin berkurang pula umur disandangnya. Setelah ajalnya tiba, setiap umat manusia akan dipersoalkan tentang amal kebajikannya, karenanya dari tahun ke tahun pergantian tahun hendaknya terjadi peningkatan tentang amal kebajikan. Harus ada 'hijrah' yang nyata, dengan ditunjukkan tinggi kesadaran manusia sebagai makhluk yang lemah

dan terbatas dalam banyak hal, dengan meningkatkan kedekatannya terhadap Sang Khalik, karena satu detikpun tidak luput dari 'pengawasan'-Nya. Suatu saat pasti amal baik dan buruk yang diperbuat pasti memerlukan pertanggung jawaban dihadapan Sang Khalik. Adalah benar, bila para tokoh agama menganjurkan para pengikutnya untuk memperingati pergantian tahun dengan melakukan amal dan perbuatan kebajikan, dengan bermunajat, tadarus, dan beribadah menurut agama berbeda. Tujuan utamanya adalah mendorong umatnya agar semakin 'tunduk' dan patuh terhadap perintah-Nya. Jadi, disini, momen pergantian tahun dijadikan sebagai bentuk 'syukur' terhadap Sang Khalik atas bertambahnya umur yang telah diberikan guna menjalankan fungsi kemanusiaannya dimuka bumi.

Selain itu, momentum pergantian tahun dapat dipandang pula sebagai upaya interopeksi diri atas kiprah kemanusiaan, *khalifatul fil ardh*. Sudah barang tentu diciptakannya manusia dimuka bumi bukanlah tidak punya nilai apa-apa, melainkan terhormat, sebagai representatif Sang Khalik. Dari sekian banyak makhluk ciptaan-Nya, manusialah yang dipilih Allah SWT sebagai representatif atau wakil Allah SWT dimuka bumi. Namun, harapan Allah SWT yang begitu percaya kepada manusia untuk mengurus dan 'memakmurkan' dunia ini, sangat tergantung kiprah dan kualitas kemanusiaan yang ditentukan oleh level amal kebaikan, *akhlakul karimah* yang dimilikinya. Disatu sisi, manusia memiliki 'amanah', yang diberikan kepadanya; disisi lain, manusia juga membawa potensi tidak amanah, yang membawa kerusakan dimuka bumi.

Dalam sejarah peradaban manusia karenanya, selalu ditemui 'putih' dan 'hitam'. Yang 'putih' diibaratkan manusia yang memiliki niat, iman, takwa, dan amal kebajikan. Yang 'hitam' sebaliknya manusia memperlihatkan sebaliknya, yang menunjukkan selalu jauh dari amal kebajikan. Tidak heran agaknya bila ada saja sekelompok umat yang ingin perdamaian dan sebagian lainnya ingin peperangan. Predikat sempurna dan akal yang diberikan kepada manusia digunakan terkadang dalam tataran empiris peradaban manusia dibumi jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Memang sejak zaman para nabi selalu ada kelompok 'putih' dan 'hitam' ini. Agaknya, Sang Khalik, Allah SWT, memberikan kesempurnaan kepada manusia dengan akalnya. Pilihan baik dan buruk, 'hitam', dan 'putih', merupakan otonomi manusia yang sangat tergantung kepada kualitas akal dan

pengetahuan manusia. Para nabi merupakan manusia-manusia terpilih sebagai representatif yang sejalan seperti yang diinginkan Allah SWT, sebagai Sang Khalik, agar menjadi pelajaran, *hujjah*, bagi manusia sesudahnya agar memiliki petunjuk yang benar.

Realitas sosial kehidupan berbangsa agaknya sering kali memperlihatkan kontradiktif, yang menandakan fungsi kekhalifahan kemanusiaan ini belum atau bahkan mungkin jauh dari sempurna. Tingkat korupsi yang terlalu tinggi di negeri ini sangat merugikan sebagian besar masyarakat, karena sebagian hak mereka sebagai warga negara tidak dapat dinikmatinya. Prilaku kekerasan, kriminal, konflik sosial antarkelompok dan bernuansa etnis dan agama yang terus berlanjut, memperlihatkan pula rasa aman masyarakat masih rendah dan belum terjamin. Angka kemiskinan yang masih tinggi memperlihatkan kinerja penyelenggaraan negara belum optimal. Masih rendahnya tingkat sumber daya manusia (*man-power*) menandakan kesempatan memperoleh pendidikan belum mengembirakan. Pergaulan sebagian pelajar dan generasi muda sebagai harapan bangsa yang terkadang jauh dari norma-norma agama dan Pancasila menunjukkan masih lemahnya 'intervensi' negara dalam mempersiapkan generasi mudanya agar memiliki perdaban bangsa yang kuat dan disegani nantinya. Persolan ekologi (laut, darat) yang terus dieksploitasi dan dikeruk tanpa kendali hanya akan berpihak kepada sekelompok orang dan tidak memihak sekelompok masyarakat umumnya. Tentu, dari kasus-kasus yang ada, hal ini sering kali sebagai faktor penyebab akhirnya akan memicu konflik sosial baik bersifat horizontal dan vertikal. Lagi-lagi, masyarakat lemah sering berada pada pihak yang tersubordinasi. Kasus perusahaan pertambangan dan perkebunan misalnya sering kali memang kurang berpihak kepada masyarakat kebanyakan. Masih banyak tentunya persoalan berbangsa dan bernegara yang membutuhkan renungan kembali dan menjadi 'pekerjaan rumah' pada tahun 2013.

Dari itu semua, kiranya dengan memasuki tahun baru 2013, sebagai hambaNya sudah sepatutnya kita bersyukur atas nikmat, karunia dan umur panjang diberikan Sang Khalik. Sebagai warga negara, sepatutnya pula kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk menjalankan fungsi kemanusiaan, berdasarkan kiprah dan fungsi masing-masing ditengah masyarakat. Karenanya, memasuki tahun 2013 ini, merupakan suatu momen introspeksi

untuk melangkah 'hijrah' ke arah kehidupan yang lebih baik dan berpengharapan.

Aliran Sesat: Perspektif Sosiologi³⁷

Tulisan ini memfokuskan pada kajian tentang Aliran Sesat dalam perspektif sosiologis. Mengapa suatu aliran/faham dikatakan sesat? Apa dampak Aliran Sesat terhadap kehidupan beragama?

Di Indonesia, Aliran-aliran Sesat, dikenal relatif banyak, antara lain: Ingkar Sunnah, Lembaga Pembaru NII KW IX, Lembaga Kerasulan, Darul Arqam, Salamullah (Lia Aminuddin), Hiper Metafisik, dan Kejawen.³⁸ Sejumlah aliran sesat ini, berdampak pada keresahan umat beragama, terutama umat Islam. Pemerintah juga merasa resah karena berpotensi menimbulkan ekses negatif dalam kehidupan beragama dan berbangsa serta telah berdampak pada adanya ketegangan bagi masyarakat. Menariknya lagi, dalam setiap kurun waktu tertentu aliran sesat ini selalu muncul. Adanya pemahaman Aliran Sesat dan Aliran Tidak Sesat, paling tidak dikarenakan adanya alasan tertentu, antara lain:

Pertama, secara teologis, telah terjadi penyimpangan mendasar yang dilakukan para pengikut aliran-aliran tersebut. Aliran Ingkar Sunnah misalnya dikatakan menyimpang atau sesat dikarenakan: Meletakkan dasar hukum dalam Islam hanya al-Qur'an, tidak percaya pada semua hadist Nabi Muhammad SAW karena merupakan hasil karya Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam; Syahadat mereka adalah *isyhafhadu biannana muslimin* (saksikanlah bahwasanya kami orang-orang Islam); Shalat hanya dua rakaat atau cukup dengan *eling* saja, tidak perlu *adzan* dan *iqomat*; Puasa hanya diwajibkan bagi mereka yang hanya melihat bulan; Pergi haji boleh dilakukan selama empat bulan haram, yakni Muharam, Rajab, Dzulkaidah, dan Dzulhijjah. Selama berhaji boleh mengenakan pakaian sebagaimana biasanya karena kain ihram adalah pakaian orang Arab saja; Rasul tetap diutus sampai hari kiamat; Nabi Muhammad SAW tidak berhak menjelaskan ajaran atau kandungan isi al-Qur'an; dan Orang yang meninggal dunia tidak wajib dishalatai karena tidak ada perintahnya dalam al-Qur'an.

³⁷ Tulisan penulis yang berjudul: "Aliran Sesat: Perspektif Sosiologis", merupakan Makalah, untuk diskusi pada Badan Eksekutif Mahasiswa, IAIN Raden Fatah Palembang, 25 Nopember 2011.

³⁸ Ahmad Riznanto, *Mereka Menodai Islam, Menyibak Peran Celap Yahudi di Balik Aliran Sesat dalam Islam*, Mihrab, Jakarta, 2008, hlm. 45.

Sama halnya, Aliran Salamullah (Lia Aminuddin) telah mengklaim banyak hal. Antara lain, mengaku sebagai Nabi dan Rasul, juru bicara malaikat Jibril, dan sebagai Imam Mahdi. Lia juga mengaku menerima wahyu, mendapatkan mukjizat dan malaikat Jibril bersemayam dalam dirinya. Puteranya Ahmad Mukti dianggap sebagai Nabi Isa AS dan suaminya Abdul Rahman diyakini sebagai wakil atau imam besar ajaran Salamullah. Jika diperhatikan, ajarannya merupakan agama *Perennialisme* yang menghimpun semua agama. Menurut keyakinan mereka, mencukur semua jenis rambut yang ada di sekujur tubuh lalu membakarnya adalah suatu bentuk ibadah yang diperintahkan Jibril melalui Lia Aminuddin. Barang siapa yang melakukan itu sama dengan bayi yang baru lahir. Mereka juga yakin air sumur Salamullah berkhasiat menyembuhkan beragam penyakit.

Kedua, secara sosiologis, dimana munculnya berbagai aliran sesat sering kali menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan kekerasan. Kita masih ingat kasus kekerasan atas nama agama terhadap Jaringan Ahmadiyah Indonesia (JAI), suatu kelompok yang mengajarkan aliran sesat. Penyerbuan dan aksi perusakan oleh massa terhadap Kampus Al-Mubarak, Parung, Bogor pada beberapa waktu lalu kembali meninggalkan noda, dimana massa menyerbu markas JAI.

Kasus Aliran Sesat: JAI

Dalam perspektif sosiologis tentang kasus JAI, menimbulkan banyak pihak pro dan kontra. Perberdaan pandangan ini, terutama bertalian dengan kasus penyerbuan dan kekerasan dalam menyelesaikan kasus perbedaan keyakinan ini. Pihak yang pro berargumen bahwa ajaran Islam mengajarkan agar umatnya menyelesaikan suatu permasalahan keyakinan berbeda dengan cinta dan damai. Adanya kekerasan terhadap JAI dipandang sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jika memandang Islam sebagai *Ar-Rahman* dan *Ar-Rahim*, dan memandang sisi hikmah dan pelajaran yang baik (*bil hikmah wal mau'izhah hasanah*), maupun dari segi ajaran atau teologisnya, maka tindakan kekerasan terhadap JAI tidak tepat dan tidak dibenarkan.

Aliran Sesat JAI, ternyata tidak hanya berdampak terhadap penyimpangan pemahaman teologis yang berbeda tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap proses gejala disintegrasi sosial-

keagamaan intern dan ekstern umat beragama (Islam). Bagi massa yang menyerbu dan menyerang JAI sudah menjadi keharusan. Antara lain, dikarenakan adanya fatwa MUI yang mengatakan Ahmadiyah aliran sesat dan tidak diakui sebagai ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, maka yang bersangkutan menjadi *murtad* atau pemberontak (*bughah*). Dalam Perspektif fikih, jika tidak bertobat dalam tiga hari, orang murtad tadi harus dihukum bunuh atau diperangi.

Massa juga menuntut Ahmadiyah di Parung dibubarkan. Pembubaran aktivitas Ahmadiyah, menurut mereka, adalah tuntutan yang islami. Apalagi dari segi fikih klasik dan struktur masyarakat Islam sendiri, pandangan dan tindakan itu dinilai tidak ada salahnya. Maka, mereka mendesak pemerintah agar dapat bertindak tegas terhadap Ahmadiyah karena MUI sudah menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Jika tidak, massa akan mengambil tindakan sendiri.

Dari pihak yang kontra, sebaliknya memandang dan berpendapat bahwa sesungguhnya ada kekeliruan terhadap tindakan massa dengan cara kekerasan. Kekerasan terhadap Ahmadiyah dipandang sebagai kontroversial dan *blunder*. Fatwa MUI juga tidak lagi berwibawa dan tidak sakral. Ketika, fatwa MUI kurang berwibawa maka pihak otoritas-pemerintah pun akan "netral" karena tidak mendapat tekanan dari fatwa MUI itu, dan masyarakat pun kurang cenderung mengabaikan fatwa tersebut. Apalagi, dalam perkembangan era Reformasi, seringkali berbagai masalah individu, masyarakat dan bangsa diselesaikan melalui peran institusi HAM. Fatwa MUI semakin kurang *greget*. Akan tetapi, kemudian kasus Ahmadiyah telah bergulir ke kalangan anggota DPR die Senayan; dan direspons oleh pemerintah dengan turunnya Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6.2008, dan Nomor 199 Tahun 2008, yang pada dasarnya melarang keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).³⁹

Meskipun sebagian pihak ada saja yang belum puas terhadap keputusan pemerintah tersebut karena dipandang belum menjadi larangan permanen, tetapi, setidaknya telah dapat mereduksi peran

³⁹ Balitbang Dilat Departemen Agama RI, *Buku Sosialisasi Surat Keputusan Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat*, Departemen Agama RI, 2008, hlm. 3-16.

Ahmadiyah. Bagi mererka, secara total Ahmadiyah memang belum berakhir. Lagi pula, masih ada begitu banyak aliran sesat yang berpotensi akan muncul, termasuk aliran *kejawen*/aliran keyakinan.

Munculnya aliran sesat dan berbagai implikasi kekerasan sebagai solusi masalah sosial, menunjukkan adanya gap antara cita-cita (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*). Kekerasan atas nama Tuhan juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara agama teologis dan agama sosiologis-antropologis. Akan tetapi, kesenjangan antara *das-sollen* dan *das sein* suatu hal yang wajar. Hegel, misalnya mengatakan, Hukum Dialektika: Tesis-Antitesis-Sentesis. Dalam perpektif sosiologis-antropologi agama berangkat dari kesadaran mencoloknya *gap* antara harapan dan kenyataan ini. Sosiologi dan antropologi tumbuh dan berkembang karena adanya "keanehan" dalam kehidupan beragama. Kedua cabang ilmu ini berkembang karena banyaknya keanehan dalam kehidupan beragama. Perhatiannya juga tertuju pada keadaan yang dianggap tidak logis, tidak produktif, serta hal-hal aneh lainnya, seperti kepercayaan kepada spiritual being, sakralitas dan ritualisme lainnya.

Dalam pandangan umum, dikatakan Bustanuddin Agus (2005:1-3) bahwa agama berangkat dari keyakinan sedangkan ilmu filsafat berangkat dari keragu-raguan terhadap sesuatu. Tapi, dalam perkembangan terakhir, dikotomi agama-ilmu ini dapat dipertanyakan. Orang bahkan telah berfikir tentang integrasi ilmu dan agama. Tetapi, berawal dari sesuatu keyakinan juga tidak ada salahnya, asalkan tidak ada pihak lain yang dituding salah atau sesat.

Augus, Comte (1798-1858), bapak Sosiologi, membedakan dua jenis perspektif. Menurut Comte, cara berfikir religius hendak menemukan jawaban yang absolut. Ini berbeda tentunya dengan cara berfikir positif-ilmiah yang menyadari kerealatitan kemampuan manusia. Orang modern tidak berfikir absolut. Melihat perkembangan peradaban umat manusia dewasa ini, dikotomi ilmu-agama, modern-religius, relatif-absolut, relatif-absolut seperti ini agaknya tidak relevan lagi menjawab tantangan zaman.

Realitas sosiologis lain menunjukkan, dimanapun agama dipegang orang banyak, jamaah, bahkan massa yang fanatik. Setiap penganut agama meyakini agamanyalah yang paling benar. Jadi aspek-aspek fanatisme agama selalu ada. Dalam konteks fenomena sosial, agama yang dimaksud disini bukan saja agama-agama yang

resmi dikenal publik. Tetapi, ciri-ciri fanatik terhadap sesuatu keyakinan tidak hanya dalam konteks agama resmi, tetapi juga sekte, aliran, mazhab, dan bahkan partai dan organisasi keagamaan, bahkan ideologi-ideologi sekuler. Makin rendah tingkat berfikir dan pemahaman keagamaan seseorang, makin sempit dan konkrit sesuatu yang difanatikannya dalam kehidupan beragama.

Jadi, adanya Aliran Sesat berawal dari cara berfikir dan pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama yang tidak relevan dan berpotensi menimbulkan keresahan dikalangan umat beragama dan pemerintah. Agaknya Aliran Sesat sulit untuk dihindari karena tafsiran dan pemahaman umat beragama yang berbeda. Disini, perlu adanya peran MUI dan Pemerintah yang tegas dan konsisten dalam upaya membina, memberi pemahaman dan pengetahuan ajaran-ajaran agama dengan benar, sehingga pada akhirnya dapat mereduksi jumlah dan peran aliran sesat tersebut.

Primordialisme dan Pemilukada Sumsel 2008⁴⁰

Pemilukada Sumsel 2008 memang akan berlangsung masih sekitar satu tahun lebih, tetapi nuansa dan wacana politik tentang hal itu mulai dirasakan. Dalam rangka pelaksanaan Pemilukada Sumsel 2008, agaknya akan semakin menarik karena diperkirakan sejumlah putera terbaik bangsa terutama yang berasal dari daerah ini akan berpartisipasi dan berkompetisi untuk memperebutkan posisi-posisi penting di Sumsel, baik sebagai Walikota, Bupati, Gubernur maupun Wakil Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Gubernur. Mereka tentunya berharap sekali menjadi calon yang sukses menjadi pemimpin di daerah yang menjadi obsesi dan cita-citanya. Untuk meraih sukses itu sangat disadari bukanlah mudah, karena dari sekian banyak pasangan calon nantinya hanya satu pasangan yang akan terpilih. Sukses tidaknya seorang calon dalam kompetisi itu ditentukan oleh jumlah suara sah terbanyak yang diberikan oleh pemilih atau masyarakat.

Perjuangan dan proses memperoleh suara terbanyak itu bukanlah mudah karena setiap individu pemilih dan masyarakat memiliki persepsi, keinginan, dan pilihan tersendiri tentang calon pemimpinnya. Apalagi setiap masyarakat pada umumnya bercirikan pluralistic atau

⁴⁰ Tulisan penulis berjudul "Primordialisme dan Pemilukada Sumsel 2008" pernah dimuat dalam *Sumatera Ekspres*, 17 Maret 2008.

majemuk. Sama halnya dengan masyarakat Sumatera Selatan tampak heterogen berdasarkan agama, etnis, dan ras. Oleh sebab itu, pendekatan primordialisme dan etnisitas, agaknya masih menjadi salah satu pendekatan yang patut diperhitungkan pada pesta demokrasi atau pemilukada nanti. Selain itu, untuk meraih sukses, setiap calon pasangan perlu juga memiliki beberapa persyaratan-persyaratan lain yang tak tertulis. Misalnya, seorang calon perlu memiliki partai politik yang mengusungkannya sebagai calon, memiliki kemampuan keuangan/ekonomi yang memadai untuk membiayai keperluan teknis operasional menjelang dan masa kampanye, memiliki jaringan social dengan berbagai kalangan elit, seperti dengan elit agama, elit masyarakat, elit pengusaha dan elit militer. Selain itu, setiap pasangan calon perlu pula memiliki integritas moralitas, kepribadian dan intelektual, dan sehat jasmani-rohani yang menjadi standar aturan berlaku secara resmi maupun berdasarkan norma dan nilai dalam masyarakat.

Persyaratan demikian memang terkesan terlalu ideal, tetapi bukan mustahil ada calon pasangan pemilukada yang memiliki kriteria demikian. Paling tidak, dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria demikian, seorang calon pasangan dapat menimbang-nimbang apakah akan maju berpartisipasi atau sebaliknya. Belajar dari pengetahuan dan pengalaman sehari-hari para pemilih akan semakin rasional dan selektif dalam memilih calon pemimpinnya. Mereka sudah semakin cerdas dan tidak mau lagi terlalu terbuai dengan janji-janji muluk tetapi miskin aplikasi. Hanya calon pasangan yang akan membawa harapan, perubahan dan kesejahteraan orang kecil dan lemah diperkirakan akan memiliki peluang besar meraih suara terbanyak. Karena, mayoritas masyarakat kita tinggal di desa-desa dengan standar kehidupan social-ekonomi yang rendah.

Seorang calon pasangan pemimpin selanjutnya perlu memiliki kekuatan politik dimana ada partai politik yang tertarik untuk mengusungkan dirinya menjadi calon. Sejak dini, sudah ada beberapa partai yang dengan transparan mengusungkan nama-nama calon pemimpin ke depan di Sumsel pada pemilukada 2008, baik nama calon dari internal maupun eksternal partai. Seorang calon pasangan pemimpin juga perlu memiliki kemampuan keuangan/ekonomi yang memadai, terutama untuk membiayai keperluan teknis-operasional untuk sosialisasi sebagai calon menjelang dan selama kampanye. Seorang calon pasangan pemimpin yang sudah mapan dalam

keuangan/ekonominya diperkirakan akan berpeluang lebih besar menjadi calon yang *legitimate* dan dipilih masyarakat.

Masyarakat/pemilih cenderung memilih pemimpin yang telah mapan ekonominya dikarenakan yang bersangkutan akan lebih kecil peluangnya untuk melakukan penyimpangan selama bertugas. Tenaga, waktu, dan kemampuannya diharapkan lebih banyak dicurahkan untuk pengabdian pada negara dan kepentingan masyarakat dalam arti sebenarnya. Dipastikan, seorang calon pasangan yang sudah mapan ekonominya akan memiliki daya jual yang tinggi dalam pandangan pemilih. Apalagi jumlah penduduk miskin di Sumsel masih tergolong tinggi. Data BPS (2007) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Sumsel 6,9 juta hingga 7 juta jiwa dan dari jumlah tersebut terdapat 1.1.652.000 orang (23,6%) merupakan penduduk miskin.

Seorang calon pasangan pemimpin dituntut pula untuk memiliki jaringan social dengan sejumlah elit. Setiap elit formal dan informal memiliki pengikut setia yang dapat mempengaruhi kemana arah pilihan kolektif. Seorang Kiyai yang menjaga idealism dan berpengaruh misalnya, akan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung para santri dan masyarakat tentang pilihan calon pemimpinnya. Sama halnya dengan seorang elit militer, akan memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung pula tentang calon pemimpin bagi bawahannya, kendatipun tidak diungkapkan dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Seorang elit petani dan nelayan juga demikian, mereka memiliki persepsi dan pandangan tertentu dalam hal pilihan calon pimpinannya. Karena itu, seorang calon pemimpin dituntut untuk lebih cerdas dalam memahami keinginan dan kebutuhan beragam masyarakat sehingga dapat meraih simpatik yang sebenarnya dari masyarakat.

Selain itu, latar belakang primordialisme dan etnisitas calon pemimpin dapat pula menentukan besar kecilnya dukungan suara dalam pemilukada. Suatu fenomena menarik di Sumsel bahwa dalam dua tahun terakhir dengan terbentuknya berbagai forum/paguyuban etnis-kedaerahan. Sebagian pengamat meyakini bahwa motivasi terbentuknya paguyuban kedaerahan dan etnis itu sebenarnya tidak hanya didasarkan motivasi kepentingan ukhuwah dan silaturahmi sesama etnis tetapi lebih dimotivasi oleh politik primordialisme. Hal ini merupakan suatu hal yang sah-sah saja, karena dukungan politik

dari suatu etnis asal seorang calon merupakan suatu yang positif sebagai modal dasar suara diperoleh.

Hal itu difahami dengan baik mengingat mata pilih pada pemilukada berasal dari berbagai etnis-etnis pribumi atau etnis keturunan yang patut diperebutkan oleh calon pasangan pemilukada. Etnis Cina (Tionghoa) keturunan misalnya telah mewacanakan tentang kemungkinan adanya calon yang berasal dari etnis ini, sebagaimana diungkapkan Fauzi Tamrin, Ketua Paguyuban Masyarakat Tionghoa Sumatera Selatan (Sumeks, 11/6/2007). Bila dilihat dari pendekatan etnistas dan demokrasi, tidak ada salahnya memang setiap etnis atau warga negara mengajukan calon pemimpin untuk dikompetisikan dalam pemilukada, karena setiap warga negara berhak mencalonkan dan dicalonkan. Hanya saja, motivasi primordialisme dan etnisitas akan menjadi kurang positif ketika semangat primordialisme lebih dominan dibandingkan motivasi menegakkan nilai-nilai demokrasi yang diharapkan dalam pemilukada. Apalagi misalnya, pendekatan primordialisme dilakukan dengan upaya penggiringan pemilih yang cenderung manipulative dengan memanfaatkan ikatan emosional sesama etnis bukan berdasarkan nilai-nilai rasional dalam demokrasi. Siapapun dan apapun asal etnis calon pemimpin patut didukung asalkan yang bersangkutan memiliki kompetensi tentang hal itu.

Dalam konteks inilah perlu disimak bersama bahwa bila nilai-nilai demokrasi dan pilihan pemimpin yang berkualitas dan *legitimate* yang diharapkan pada pemilukada nanti maka isu primordialisme dan etnisitas harus diposisikan dengan tepat dengan lebih memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Harus diakui bahwa isu primordialisme di negeri ini masih kuat terutama setelah memasuki era otonomi daerah, dimana ketika itu isu putra daerah (*indigenous*) sangat kental di masyarakat kita. Sehingga hamper semua pemimpin di daerah baik politis maupun non-politis harus putra daerah. Dalam perkembangannya, isu primordialisme tentang putra daerah ini mulai bergeser menjadi isu primordialisme berdasarkan etnis. Keduanya merupakan ancaman bagi demokrasi bila motivasi dan rasa memiliki etnisitas itu tidak terkendali.

Kita berharap bahwa para pemilih, apapun asal etnisnya, akan memilih calon pemimpin berkualifikasi sebagaimana diharapkan yang dapat membawa perubahan lebih baik menuju kesejahteraan. Seorang calon pemimpin dambaan masyarakat adalah yang

bersangkutan memiliki wawasan luas yang mengedepankan kepentingan masyarakat pluralistik dan multikultural yang tanpa terjebak pada kepentingan sempit atas primordialisme. Karena itu, posisi primordialisme dan etnisitas hendaknya diposisikan secara wajar dengan tetap mengedepankan nilai-nilai rasional demokrasi dalam arti sebenarnya sehingga Pemilu pada Sumsel 2008 menjadi milik dan aspirasi kita semua.

Otonomi Daerah dan Pembangunan Terkendali.⁴¹

Tujuan pembangunan nasional Indonesia, secara garis besar, adalah untuk menciptakan manusia seutuhnya, dengan harapan dapat terpenuhinya kebutuhan material (berilmu pengetahuan dan berteknologi dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat maupun immaterial, sekaligus menjadi manusia yang beriman dan bertakwa (menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing). Kedua tujuan pembangunan nasional akan bermakna apabila kedua aspek tujuan tersebut diletakkan dalam prioritas kebijakan pembangunan secara tepat dan proporsional. Pembangunan yang mementingkan aspek *material* yang kuantitatif sebagaimana yang terjadi selama ini, dan terkesan kurang memperhatikan aspek *immaterial* (yang kualitatif) telah menimbulkan ketimpangan sosial (*social-gap*) yang cukup tinggi.

Sejumlah kerusuhan, tuntutan akan keadilan dalam sejumlah hal, perselisihan antaretnis/suku, agama, dan antargolongan (SARA) pada dasarnya tidak terlepas dari dampak yang muncul dari kebijakan tersebut. Sebagai upaya mengeliminir keadaan yang demikian, maka peletakan suatu desain pembangunan yang terkontrol atau terkendali sangat perlu menjadi perhatian seksama. Meskipun keberadaan Undang-Undang No. 22/1999 atau Undang-Undang No. 25/1999 kini hanya sekedar 'macan kertas' belaka, karena masih belum dilengkapi peraturan pelaksanaannya (*Republika*, 31/7/2000). Ada sejumlah harapan agar keberadaannya dapat memberdayakan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam mewujudkan pembangunan yang memberdayakan masyarakat luas, salah satu unsur penting adalah perlunya pengendalian/terkendali. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengung-

⁴¹ Tulisan penulis berjudul 'Otonomi Daerah dan Pembangunan Terkendali', pernah dimuat dalam *Sumatera Ekspres*, 12 Agustus 2000.

kapkan pentingnya kebijakan pembangunan yang terkendali pada kebijakan pembangunan otonomi daerah nantinya. Suatu yang membedakan antara kebijakan pembangunan otonomi daerah dengan kebijakan pembangunan era sebelumnya, dimana pada masa Orde Baru lebih menekankan sentralistik (*centralized*). Sementara itu, kebijakan pembangunan pada otonomi daerah lebih menekankan pada desentralistik (*de-centralized*), dimana lebih pentingnya adanya keterlibatan (*participation*) masyarakat dalam pembangunan. Pada masa Orde Baru, masyarakat cenderung hanya sebagai 'saksi' alias 'penonton' dalam proses pembangunan. Bahkan, mereka tidak jarang harus menghadapi kesulitan memperoleh kesempatan-kesempatan ekonomi dari seharusnya mereka miliki. Karenanya, mereka sering dinamakan kelompok yang marginal atau segregatif.

Dampak-dampak yang menempatkan posisi masyarakat sebagai pihak yang 'lemah' itu, sesungguhnya, bersumber dari ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan—sebagai dampak dari kebijakan *centralized*. Tetapi, ketidakadilan yang paling menonjol sebenarnya adalah ketidakadilan dalam aspek ekonomi. Implikasinya bisa berdampak luas dalam beragam dimensi kehidupan. Dapat dibayangkan bahwa masyarakat pribumi hanya mengenyam segelintir dari 'kue' pembangunan, yang diperkirakan tidak lebih dari 30 persen (dari total aset nasional). Sehingga masyarakat kebanyakan (*majority*) tersebut merupakan pihak yang tersubordinasi (*subordination*) secara ekonomi; sementara itu, kalangan minoritas (*minority*) justru merupakan pihak yang superordinasi (*superordinate*) dimana diperkirakan menguasai 70 persen dari aset ekonomi nasional. Ketidakadilan sdah dipasosial dan ekonomi yang begitu tajam dapat dipastikan sangat 'rawan' akan munculnya berbagai potensi konflik sosial di masyarakat yang sangat mempengaruhi stabilitas integrasi sosial.

Sejumlah konflik sosial diberbagai tempat di tanah air adalah sebagai realitas sosial yang diakibatkan adanya ketidakadilan tersebut. Katakanlah, misalnya, Timor-Timur (telah merdeka), Irian Jaya, Aceh, Riau (minta merdeka), kerusuhan Ambon, Sambas, dan Poso, dan lain-lainnya, pada dasarnya tidak terlepas dari ketidakadilan sosial-ekonomi yang mereka rasakan setiap harinya. Jadi, faktor ras, etnis, dan agama agaknya hanyalah sebagai 'pelengkap' dan respons lanjut dari rasa ketidakadilan ekonomi itu, terutama yang dialami bangsa pribumi alias penduduk asli (*indigenous*).

Sama halnya, ketidakadilan dalam bidang politik yang dialami masyarakat (etnis minoritas) tertentu, sebenarnya bukanlah suatu persoalan pokok. Karena mereka telah memiliki kekuatan (yang diperoleh melalui kerja keras, kemudahan-kemudahan yang diperoleh, serta sering melalui kolaborasi dengan pihak penguasa sebelumnya). Persoalan ketidakadilan sosial-ekonomi menjadi wacana penting ketika kesenjangan sosial (*social-gap*) masih tampak tajam. Oleh sebab itu, Malaysia sejak 1970-an, telah menyadari akan arti pentingnya 'kebijakan pembelaan' (*affirmative-action*) guna memberdayakan masyarakat penduduk asli alias Boemi Poetra. Agar taraf hidupnya menjadi lebih baik guna mereduksi kerusuhan antar etnis yang pernah terjadi pada 1960-an. Kemudian tindak kudeta yang dilakukan George Speigt di Fiji merupakan sebagai 'protes' penduduk asli Fiji atas ketimpangan sosial-ekonomi dan politik dimana minoritas migran di negara itu telah menjadi superordinate secara sosial, ekonomi dan politik.

Sehingga, dalam konteks ini persoalan realitas sosial yang bertalian dengan suku, ras, agama dan antargolongan (SARA) bukanlah suatu yang 'tabu' untuk diangkat ke permukaan, agar dapat dicari jalan solusinya. Sedikit berbeda dengan kesenjangan yang terjadi di Indonesia, yakni masyarakat minoritas tertentu telah mendominasi aspek sosial-ekonomi yang mereka miliki. Keadaan realitas sosial seperti ini, agaknya, sangat butuh waktu dan kemungkinan akan sulit mengatasi dan membatasi munculnya gejolak-gejolak bernuansa primordial ini. Bahkan, sasaran dan korbannya bisa terjadi terhadap siapa saja sebagai pelampiasannya, terutama terhadap kalangan etnis tertentu sebagai simbol kekuasaan sosial-ekonomi.

Karenanya, sejumlah kasus konflik sosial dan kerusuhan ditengah air harus dilihat secara seksama, mengingat persoalan pokok bukan terletak pada suku dan agama, tetapi lebih terletak pada distribusi kebijakan dan hasil pembangunan selama ini. Kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat kebanyakan diharapkan dapat mereduksi persoalan konflik sosial dan kerusuhan yang sedang mendera bangsa ini. Karena orientasi pembangunan yang kurang berpihak kepada masyarakat kebanyakan, seperti tersentralistik (*centralized*) selama ini ternyata tidak jarang telah membawa dampak buruk bagi masyarakat dan kerugian sosial (*social-cost*) yang berarti.

Sejumlah kerusuhan yang terjadi sejak 1998 bahkan hingga sekarang masih sangat mungkin terjadi tiba-tiba, telah membawa kerugian yang begitu besar. Kerugian itu, dapat berupa fisik-material, nyawa manusia, harta benda dan ancaman disintegrasi sosial. Sehingga, yang dikatakan sebagai salah satu bangsa berbudaya justeru kini dipertanyakan karena terdapat banyak nyawa manusia melayang tiap harinya. Sebagai ilustrasi, budaya Pela Gandong pada masyarakat Maluku (Ambon) kini terkesan mengalami kesulitan mengatasi perselisihan antarsuku dan agama (Islam dan Kristen) yang sedang berseteru. Begitu pula halnya, dengan agama, yang tadinya memiliki nilai 'perekat' bangsa seakan kurang fungsional (*disfungsional*) lagi. Padahal agama mengandung nilai-nilai luhur kemanusiaan yang luar biasa.

Begitu pula halnya, makna dari sila ke-1 dari Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa belum dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Suasana di tanah air memperlihatkan bahwa perselisihan dan kerusuhan telah banyak menelan nyawa tanpa dosa dan korban harta benda lainnya. Karena atas nama agama pula 'peperangan' antara suku yang terjadi seperti di Poso dan Ambon. Selain itu, konsekuensi kerusakan fisik material tak dapat dihindari, sehingga banyak bangunan mewah mengalami kerusakan, usaha dagang, rumah ibadah (masjid, gereja, dan lainnya) telah musnah seketika. Lalu, apa arti pembangunan?

Setelah pembangunan yang dilaksanakan dengan susah payah selama ini, ternyata mudah sekali hilang, terkesan tanpa arti apapun. Tampaknya, dengan tidak saling menyalahkan, agaknya ada *something wrong* dalam proses pembangunan ini. Hal ini telah sangat disadari oleh berbagai elemen masyarakat sebelumnya (pemerintah, politisi, dan tokoh masyarakat). Oleh sebab itu, melakukan koreksi yang memadai atas kebijaksanaan pembangunan sebelumnya guna menuju masa depan yang berpengharapan dan demokratis mesti dilakukan.

Kebijakan otonomi daerah diharapkan mampu mewujudkan semua cita-cita Indonesia Baru tersebut. Salah satu koreksi penting terhadap pelaksanaan otonomi daerah bahwa orientasi pembangunan otonomi daerah yang berorientasi kuantitatif semata (*economic growth*), diharapkan dapat memperhatikan aspek kualitatif, seperti keberagaman budaya, adat-istiadat, ibadah, tanah ulayat, dan

kesempatan berusaha-ekonomi. Sehingga tujuan mulia dan hakiki dari konsep pembangunan otonomi daerah relevan dengan UUD 1945 dan Pancasila dapat tercapai. Indikasi pemula akan tercapainya tujuan pembangunan yang dimaksudkan adalah apabila masyarakat kebanyakan merasa dilibatkan berpartisipasi (*participation*) dalam aktivitas pembangunan, menjadi subyek, dan bukan dominan menjadi 'kuli' pembangunan.

Oleh sebab itu, perlu adanya perencanaan (desain) pembangunan daerah secara terkendali. Disatu sisi, keberadaan UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan) sangat memberi 'kebebasan' pada daerah (kabupaten/kotamadya) untuk mengembangkan potensi dan sumber daya kekayaannya untuk mensejahterakan masyarakat; disisi lain, persoalan realitas masyarakat harus pula menjadi *concern*. Bila, keduanya menjadi *concern* serisu dari pengambil kebijakan, elit di daerah, maka diharapkan keberadaan pembangunan di era otonomi daerah nantinya akan bermakna sesungguhnya bagi masyarakat. Yakni, dapat memperbaiki taraf hidup dan menjadi manusia yang bermartabat secara berkesinambungan yang memiliki orientasi kedepan.

Dalam mewujudkan kebijakan pembangunan otonomi daerah yang bermakna sesungguhnya, bermisi ke depan, serta berkesinambungan, maka kebijakan pembangunan yang terkendali merupakan prioritas pilihan. Karena itu, peranan dan kinerja para elemen pemerintah (eksekutif), anggota dewan (legeslatif), dan penegakan supremasi hukum (yudikatif), dan masyarakat (subyek dan obyek pembangunan) yang memiliki fungsi kontrol atau pengendali terhadap setiap kebijakan dan keputusan yang berpihak kepada masyarakat yang beragam (pluralistik) sangatlah diharapkan.

Batu Akik:

Antara Nilai Ekonomi dan Konflik Sosial⁴²

Fenomena popularitas batu akik mencapai puncaknya. Batu akik digemari kalangan masyarakat berlatar belakang sosial-ekonomi beragam, dari kelas sosial-ekonomi 'bawah', 'menengah' hingga 'atas'. Batu akik tidak hanya dipandang memiliki nilai estetika bagi penggemarnya tetapi jauh dari itu memiliki nilai ekonomi luar biasa.

⁴² Tulisan penulis "Batu Akik: Antara Nilai Ekonomi dan Konflik Sosial" pernah dimuat dalam *Sriwijaya Post*, 8 Maret 2015.

Oleh karena itu, kini, di berbagai sentral-bisnis seakan ramai dan terfokus dengan aktivitas bisnis transaksi batu akik. Fenomena batu akik pun seakan mengalahi isu-isu politik nasional. Bahkan, untuk memperkenalkan batu akik sebagai produk dan sumber pendapatan asli daerah (PAD), beberapa kepala daerah telah menghimbau aparatnya agar mengenakan batu akik ketika masuk kerja. Tulisan ini lebih fokus pada sejauhmana dampak sosial-ekonomi dan kemungkinan potensi konflik sosial bertalian dengan *booming* bisnis batu akik.

Pada 1970-an, ternyata batu akik pernah mengalami *booming*. Di setiap sudut kampung orang ketika itu banyak orang berkumpul mengerumuni pedagang batu bernilai ekonomi tinggi itu. Majalah *Tempo* edisi 24 Juli 1971, bahkan, menyajikan laporan tentang kekayaan Indonesia atas batu-batu berharga (*Tempo*, edisi 16-22 Februari 2015). Kini, batu Akik mendadak menjadi primadona. Pemicunya, antara lain, cendera mata batu bacan dari Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Amerika Serikat, Barack Obama.

Mempelajari fenomena batu akik di tanah air akhir-akhir ini menarik menjadi perhatian. Ternyata, anugerah alam, ciptaan Sang Khalik, terhadap bangsa ini, sangat berlimpah, salah satunya terdapat beragam jenis batu yang bernilai ekonomis tinggi. Bahkan, batu akik seakan lebih tinggi nilai ekonomisnya dibandingkan barang galian tambang lainnya, seperti timah, emas, dan tembaga. Nilai batu akik pun terutama jenis batu bacan ('ratu akik') meningkat hingga 50 kali lipat per kilonya. Di kawasan Pasar Rawabening, Jatinegara, Jakarta, sebagai pusat penjualan batu akik terbesar di Asia Tenggara, batu bacan menjadi termahal. Jika pada 1990 an, harganya sekitar Rp4 juta; kini harganya mencapai Rp200 juta per kilonya. Sudah barang tentu di tengah kondisi masyarakat yang pengguran yang tinggi, dimana World Bank (2014) merilis sekitar 68 juta sudah barang tentu kehadiran batu akik akan meringankan beban ekonomi sebagian masyarakat. Bahkan, tidak sedikit yang beruntung dan memperoleh rizki yang berlipat. Memang batu akik telah menjanjikan perbaikan nasib karena adanya perbaikan kesejahteraan ekonomi.

Di sisi lain, agaknya mengharapkan nasib dan perbaikan ekonomi masyarakat dengan mengandalkan bisnis batu akik, sebagai anugerah Sang Khalik ini, bukanlah cara yang selalu tepat, setidaknya untuk jangka panjang. Alasan dan argumen yang patut diungkapkan, antara lain:

Pertama, upaya memperoleh dan menemukan batu akik bukanlah mudah, tetapi melelahkan dan beresiko. Misalnya, untuk memperoleh batu akik jenis batu bacan, perlu waktu berjam-jam menelusuri perbukitan. Penambangan batu bacan tampak sangat tradisional, misalnya menggunakan cangkul, linggis, betel, palu, sekop, dan senter kepala, sehingga sangat melelahkan dan tidak mekanis. Lubang galian berdiameter sekitar 3 meter dengan rata-rata kedalaman sekitar 30–40 meter. Satu lubang penambangan batu bacan dikerjakan oleh satu kelompok yang berjumlah 3–7 orang. Setiap orang memperoleh jatah 1–2 jam. Setelah memperoleh urat batu bacan, baru dikerjakan bersama-sama. Pekerjaan penggalian batu akik ini sangat menguras tenaga dan tidak menentu akan perolehannya.

Kedua, pemburuan batu akik yang tanpa terkendali akan merusak lingkungan. Pelanggaran etika lingkungan sangat mungkin terjadi massif karena pemerintah daerah hampir belum ada yang membuat Peraturan Daerah (Perda) bertalian dengan bagaimana mekanisme penggalian batu akik padahal dalam jangka panjang akan merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat itu sendiri. Belajar dari upaya penambangan sejenisnya (seperti tambang emas dan timah) terutama yang dilaksanakan masyarakat sangat merusak lingkungan, sehingga pemerintah pun sangat selektif dalam memberi izin penambangan. Orientasi ekonomi dan alasan peningkatan PAD memang tidak selalu berbanding lurus dengan dampak lingkungan dan kerugian masyarakat dalam dekade mendatang. Di negara maju, berbagai usaha penambangan juga ada akan tetapi biasanya lokasinya jauh dari pemukiman penduduk dan perkotaan. Hal ini dikarenakan intervensi negara dalam bentuk kebijakan memang berpihak kepada masyarakatnya. Di era otonomi daerah ini dirasakan keberpihakan kebijakan pertambangan belum menguntungkan masyarakat, dan bahkan dirasakan kurang teratur dan lebih buruk dibandingkan pada masa orde baru.

Ketiga, dalam perkembangan terakhir akibat *booming* batu akik ini dapat memunculkan berbagai potensi perilaku kriminalitas, seperti pencurian. Nilai ekonomi batu akik berkorelasi dengan potensi perilaku kejahatan di tengah masyarakat. Selain itu, di beberapa daerah telah terjadi ketegangan antara masyarakat karena berebut klaim terhadap sumber kepemilikan batu akik, sehingga memunculkan potensi konflik sosial, terutama di beberapa wilayah pedesaan dimana

terdapat sumber bungkalan batu akik. Jika spirit perburuan batu akik ini dibiarkan berlanjut tanpa aturan dan mekanisme yang tepat bukan tidak mungkin konflik sosial, baik horizontal maupun vertikal akan secara perlahan dan pasti akan menjadi kenyataan.

Keempat, sejumlah ahli geologi berpendapat bahwa Indonesia banyak memiliki gunung berapi yang menyebabkan hampir banyak provinsi kaya batu mulia. Indonesia, karenanya, sangat beruntung dianugerahkan oleh Sang Khalik dengan kekayaan sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah. Akan tetapi, merujuk teori pembangunan, mengandal sumber daya alam sebagai tumpuan pembangunan bukanlah pilihan yang dapat diandalkan. Pengalaman negara-negara maju (*developed countries*) bahwa sumber daya manusia (*human resources*) menjadi tumpuan terdepan dalam proses dan orientasi pembangunannya sehingga menjadi maju. Sumber daya alam ditempatkan sebagai *supporting* dalam proses pembangunan bangsa itu. Ketika, biasanya, banyak anak-anak dan usia muda ikut dalam usaha penambangan rakyat, termasuk usaha penggalian batu akik di berbagai daerah, tentu sangat merugikan masa depan mereka dan masa depan bangsa. Mereka seharusnya diberi kesempatan luas untuk menimba ilmu pengetahuan demi masa depan bangsa.

Oleh karena itu, sebelum terlambat kemungkinan terjadinya berbagai dampak negatif dari popularitas dan massifnya penggalian batu akik, ada baiknya persoalan ini menjadi renungan bersama. Tidaklah salah tentunya masyarakat dan daerah-daerah mengoptimalkan batu akik sebagai potensi sumber ekonomi masyarakat dan PAD asalkan dikelola dengan benar dan proporsional. Mengingat fenomena bisnis batu akik menjadi isu nasional dan disisi lain cenderung berpotensi terhadap terjadinya konflik sosial, agaknya sudah saatnya pemerintah memikirkan dan mengambil kebijakan atas kemungkinan dampak negatif yang pada saatnya justeru dapat merugikan bangsa ini.

Pendidikan Gratis, *Why Not*⁴³

Isu pendidikan gratis di Sumatera-Selatan menjadi menarik ketika dihubungkan dengan proses PemiluKada Sumsel 2008. Terlepas dari adanya kepentingan politik dari para kandidat/calon

⁴³ Tulisan penulis berjudul 'Pendidikan Gratis, *Why Not*', pernah dipublikasi dalam *Berita Pagi*, 18 Desember 2007.

yang akan berkompetisi pada masa demokrasi tersebut, faktanya, sebagian masyarakat memang masih menginginkan penjelasan lebih jauh tentang makna dan substansi pendidikan gratis. Tulisan ini memfokuskan pada urgensi pendidikan gratis bagi public Sumsel dari perspektif wacana, makna, dan harapan publik.

Wacana tersebut sesungguhnya relevan semangat dan keinginan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (man-power) seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, dimana aspek pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Lahirnya UU Sisdiknas No. 14/2005 dipandang sebagai bukti adanya kerseriusan pemerintah terhadap pembenahan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Sehingga generasi ke depan nantinya dapat bersaing dengan bangsa maju lainnya (*developed countries*).

Karena UU itu barangkali memang masih baru dan minimnya anggaran yang dialokasikan, maka dalam aplikasinya UU tersebut tampak belum optimal. Dimana anggaran pendidikan nasional pada 2008 belum mencapai 20 persen, yaitu hanya sekitar 12 persen. Sama halnya anggaran pendidikan dialokasikan disetiap daerah pada umumnya masih sekitar 8-12 persen daerah-daerah yang telah menganggarkan pendidikan diatas 20 persen. Anggaran pendidikan yang minim tentunya akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan pendidikan nasional, seperti diharapkan UU sisdiknas. Untuk sertifikasi guru saja, pelaksanaannya tidak terlalu mulus. Terbukti hanya sekitar 30 persen guru yang dipanggil ikut sertifikasi pada 2007 dan dinyatakan lulus.

Sebelumnya, pada 2006, mereka yang lulus hanya sekitar 40 persen. Angka tersebut tidak terlalu jauh berbeda dengan tingkat kelulusan sertifikais guru di provinsi lain. Apakah ketidaklulusan ini berkorelasi dengan minimnya kesiapan anggaran? Bukankah pola sertifikasi sebetulnya berbeda dengan pola tes? Dengan kata lain, masih terjadi kontradiksi antara amanat UU dengan realitas pelaksanaan di lapangan secara nasional yang dibuktikan dengan minimnya alokasi anggaran pendidikan tersebut. Dan, memang pantas diapresiasi bahwa ada beberapa kepala daerah yang memiliki perhatian serius terhadap kemajuan pendidikan di daerahnya masing-masing.

Setidaknya terdapat tiga gubernur (DKI Jakarta, Riau, dan Gorontalo) serta beberapa bupati/walikota yang memiliki perhatian dan perlakuan khusus terhadap pendidikan. Karena itu, mereka menerima penghargaan pendidikan dari Presiden RI ketika memperingati Hari Ulang Tahun PGRI di Riau, Pekanbaru. Dari Sumsel yang menerima penghargaan Presiden SBY adalah Bupati Muba, H. Alex Noerdin (*Berita Pagi*, 30/11/2007) yang telah menggratiskan pendidikan sejak 2002. Hanya sedikit dari total pemimpin (gubernur/bupati/walikota) se-Indonesia memiliki perhatian terhadap pendidikan. Tidak lebih dari 10 persen. Hal ini memperihatinkan bagi masa depan generasi muda dan generasi bangsa.

Patut diapresiasi bila ada kandidat kepala daerah di Sumsel yang akan berkompetisi pada Pemilu 2008 mengusungkan wacana pendidikan gratis dalam programnya. Hal ini terlihat dari semaraknya tulisan pendidikan gratis, seperti spanduk, stiker, dan iklan. Terlepas apakah pendidikan gratis masih bersifat wacana atau sudah dilakukan hal itu merupakan substansi program yang dibutuhkan masyarakat dan patut diangkat ke permukaan. Memang sebagian masyarakat masih menyangsikan kemampuan kandidat untuk menggratiskan sekolah di Sumsel. Dikatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin bila menggratiskan anak didik dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. Dalam hal ini, sesungguhnya wacana pendidikan gratis tersebut diperlukan upaya sosialisasi, terutama berkaitan dengan konsep, sumber dana, dan langkah-langkah strategis proses pencapaiannya.

Pentingnya sekolah gratis di Sumatera Selatan, setidaknya dilatarbelakangi beberapa pertimbangan. *Pertama*, kualitas pendidikan nasional yang masih rendah dalam hal kualitas bila dibandingkan kualitas pendidikan di negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. *Kedua*, sejarah kemajuan bangsa maju, kualitas pendidikan berkorelasi positif dengan kemajuan bangsa tersebut. *Ketiga*, data BPS (1997) menunjukkan masih terdapat 1,3 juta penduduk miskin di Sumatera Selatan. Dalam hal ini, kemiskinan selalu berkorelasi dengan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. *Keempat*, perlunya menciptakan sumber daya manusia (*man-power*) Sumsel yang mampu berkompetisi di era global dalam konteks pentingnya menjaga keutuhan dan identitas bangsa. Karena itu, suatu hal yang wajar dan perlu diapresiasi bila ada para

kandidat kepala daerah di Sumsel yang berani mewacanakan pendidikan gratis.

Spirit otonomi daerah berdampak pada otonomi pendidikan, dimana seorang kepala daerah sangat mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih memadai, seperti diamanatkan UU Sisdiknas. Bila peran pemerintah pusat dan daerah berjalan dalam mitra yang sejajar dalam mengemban tugas dan tanggungjawab pendidikan, pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human-resources*) nasional yang akan menentukan kemajuan daerah dan kemajuan bangsa.

Inggris yang notabene Negara maju (*developed country*) tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Ratu Elizabeth II dalam pidatonya di depan parlemen Inggris, 14 Mei 1977, mengatakan 'prioritas utama pemerintah Inggris berusaha keras meningkatkan standar pendidikan disekolah dan perguruan tinggi dan menggalakkan program belajar terus-menerus ditempat kerja. Dalam kampanye Perdana Menteri Inggris, Toni Blair, dengan tegas mengampanyekan program politiknya dalam bidang pendidikan. Negara *super-power* Amerika Serikat juga tetap mengedepankan pembangunan pendidikan.

Ketika berkuasa, pemerintahan Bill Clinton memfokuskan program politik pada bidang pendidikan yang detersukan oleh pemerintahan George W Bush, seperti tertuang dalam *blue-print* program pendidikan dalam pemerintahannya. Begitupun Perdana Menteri Australia, Rudd, juga menempatkan pendidikan sebagai prioritas kampanye yang akan dilaksanakan dalam periode kepemimpinannya. Mengingat wacana pendidikan gratis masih merupakan konsep relatif baru bagi masyarakat Sumsel, sementara itu masyarakat sangat mengharapkan sekali agar para kandidat dapat menjelaskan apa makna dan substansi serta langkah strategis mencapainya. Maka, dibutuhkan sosialisasi secara luas.

Peran Televisi (TV) Lokal**

Tantangan program penyiaran di era globalisasi bertalian dengan upaya mewujudkan masyarakat yang sadar informasi. Masyarakat

** Makalah penulis yang disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) terhadap Lembaga Penyiaran Lokal (Palembang TV dan Sriwijaya TV), 3 November 2008, di Sekretariat KPI Sumatera Selatan.

sadar informasi menghendaki terpenuhinya kebutuhan atas informasi yang diterima secara terbuka dan bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran warga negara atas hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam UU No. 32/2002 dikatakan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan bertanggung jawab (Bab II, Pasal 2, UU No.32/2002). Tujuan penyiaran itu adalah untuk memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia (Pasal 3).

Untuk mewujudkan tujuan penyiaran tersebut, penyiaran diarahkan pada: (1) menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UU 1945; (2) menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; (3) meningkatkan SDM; (4) menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan (6) menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup; (7) mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat dibidang penyiaran; (8) mendorong kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa pada era global; (9) memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab; (10) memajukan kebudayaan nasional (Pasal 5). KPI, dalam hal ini, memiliki wewenang menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran dan mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran untuk standar program siaran, memberi sanksi, dan melakukan koordinasi baik dengan pihak pemerintah, lembaga penyiaran maupun masyarakat.

Dalam Peraturan KPI No. 2/2007 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Bab III, Pasal 5) dan dalam Peraturan KPI No.3/2007 tentang Standar Program Siaran, diungkapkan bahwa Standar Isi Siaran bertalian dengan: (1) penghormatan terhadap nilai-nilai agama; (2) norma kemiskinan dan kesusilaan; (3) perlindungan anak-anak, remaja dan perempuan; (4) pelarangan dan pembatasan adegan

seks, kekerasan, dan sadisme; (5) penggolongan program menurut usia khalayak; (6) rasa hormat terhadap hal pribadi; penyiaran program dalam bahasa asing; (7) ketepatan dan kenetralan program berita; (8) siaran langsung; dan (9) siaran iklan.

Sudah tentu kualitas penyiaran TV Lokal sangat tergantung pada sejauhmana aktualisasi UU No. 32/2002 dan Peraturan KPI No. 2/2007 dan Peraturan KPI No. 3/2007. Aktualisasi program penyiaran yang diharapkan tersebut adalah program penyiaran yang mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat menuju masyarakat yang maju, kompetitif dan mandiri. Karena itu, bila yang terjadi suatu kesenjangan tinggi antara konsep-ideal dan realitas-pelaksanaan berdampak terhadap rendahnya kualitas penyiaran TV lokal. Bila tingkat kesenjangan antara keduanya rendah menunjukkan kualitas penyiaran TV lokal lebih baik.

Fenomena sosial tentang perkembangan media komunikasi di Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Selatan, lebih banyak tertarik pada media televisi (video) dibandingkan media radio (audio). Masyarakat mulai memandang media radio kurang menarik, yakni hanya menawarkan suara (audio), berbeda dengan media televisi. Media televisi dipandang lebih lengkap karena selain menawarkan suara juga menawarkan gambar (video), baik berupa gerak maupun non-gerak (slide foto). Disini, dapat dijelaskan bahwa telah terjadi transformasi budaya pada masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Sumatera Selatan, yakni masyarakat Indonesia dari tradisi lisan tahap I (audio) melompat ke lisan tahap II (audio visual). Masyarakat Indonesia tidak melewati tradisi membaca (merenungkan), seperti terjadi di negara maju.

Dari pengamatan sepintas penulis terhadap siaran TV lokal, *Sriwijaya TV* dan *Palembang TV*, dapat diungkapkan bahwa siaran yang ditawarkan TV lokal tersebut masih banyak bersifat hiburan dan informasi dibandingkan bersifat edukatif. Memang setiap media memiliki karakteristik tertentu, memiliki kelemahan, kelebihan, fungsi dan peran masing-masing. Akan tetapi, apapun jenis media TV lokal memiliki fungsi dan peran dalam mencerdaskan masyarakat lokal. Agaknya TV lokal atau TV komunitas di Sumatera Selatan akan terus bertambah jumlahnya.

Pemerintah lokal, Pemprov/Kota/Kabupaten, karena itu, diharapkan lebih respons terhadap yang disiarkan oleh lembaga

penyiaran lokal atau TV lokal. Pemerintah perlu menghimbau kepada semua lembaga penyiaran TV lokal untuk lebih menyiarkan program yang seimbang, dan akan lebih baik bila tidak hanya mengandung porsi infotainment, info-bisnis, tetapi juga porsi siaran lebih mengandung nilai edukatif. Tanpa nilai edukatif yang wajar dan proporsional program TV lokal maka upaya mencerdaskan masyarakat lokal sulit dicapai. Justeru, yang tidak mustahil bisa terjadi sebaliknya, secara sadar atau tidak masyarakat terbiasa dengan sikap hidup yang bernuansa hedonisme, konsumerisme, kekerasan, kekerasan, dan intoleran terhadap keberagaman dalam masyarakat pluralistik.

TV lokal, merupakan media penyiaran publik-lokal, karena memiliki ruang akses yang nyaris tanpa batas pada kehidupan publik dan menggunakan ranah milik publik berupa spektrum frekuensi yang sistem alokasinya terbatas. Pada prinsipnya, semua bentuk lembaga penyiaran berhak mengisi ruang frekuensi, sejauh memenuhi tiga komponen, yakni pemenuhan kesenangan publik (*public convenience*), pemenuhan kepentingan (*public interest*), dan pemenuhan kebutuhan hak publik (*public necessity*). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi lembaga penyiaran, TV Lokal, dalam menentukan program siarannya yang lebih bermutu dan lebih bermakna dalam mencerdaskan masyarakat lokal.

Sebagai catatan penutup, bahwa hidup di era demokratisasi seperti terjadi di Indonesia terkini, bukanlah berarti setiap lembaga penyiaran, TV lokal, boleh menyiarkan program siaran tanpa terkendali dan kontrol. Meskipun setiap warga negara juga memiliki hak, tugas dan kewajiban, yang perlu menjadi perhatian bersama, mereka juga terikat dengan aturan program penyiaran, TV lokal, seperti UU No. 32/2002 dan Peraturan KPI No.3/2007. Bila hal demikian menjadi perhatian semua pihak terkait, maka peran dan fungsi TV Lokal tidak hanya akan mampu mencerdaskan masyarakat tetapi juga memajukan masyarakat Sumatera Selatan.

Calon Pemimpin yang Amanah⁴⁵

Meskipun Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan anggota Legeslatif akan berlangsung 2014, pemanasan pertarungan

⁴⁵ Tulisan penulis yang berjudul: "Mencari Calon Presiden yang Amanah", pernah dimuat di Sumatera Ekspres, 27 September 2013.

antarelit politik agaknya seakan sudah dimulai. Sejumlah media massa telah menulis tentang sejumlah hasil survei calon presiden dengan berbagai perspektif, visi, misi, indikator, dan hasilnya pun berbeda-beda. Tergantung siapa yang melakukan survei. Setidaknya, terdapat sejumlah nama telah meramaikan bakal calon Presiden 2014-2018, antara lain: Jokowi, Aburizal Bakrie, Megawati, Wiranto, Hatta Rajasa, Jusuf Kalla. Abu Rizal Bakrie dan Wiranto mungkin sudah mantap menjadi calon Presiden. Partai Demokrat sedang proses pelaksanaan konvensi pertama kalinya dalam upaya memilih calon presidennya. Sejumlah Partai Islam pun mulai menjajaki kemungkinan adanya koalisi dalam upaya memenangkan Pemilihan Umum 2014. Disisi lain, 'polemik' tentang calon presiden mulai memanasi pula, di mana munculnya pernyataan Amien Rais terhadap Jokowi yang didorong sejumlah kalangan untuk menjadi presiden karena tinggi populeritasnya. Amien justeru berpandangan bahwa Jokowi belum layak jadi presiden yang diibaratkannya seperti Josef Estrada, mantan Presiden Filipina yang terguling karena hanya mengandalkan populeritasnya. Tidak sedikit tentunya, yang tidak sefaham dengan pandangan Amien Rais, tokoh Reformasi 1998 ini.

Terlepas dari itu semua, setiap warga negara yang memenuhi syarat tentunya berhak untuk mencalon dan dipilih menjadi Presiden. Mengingat umat Islam merupakan elemen terpenting dalam perjalanan sejarah bangsa ini, dimana sejak Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, untuk posisi Presiden dan Wakil Presiden selalu berlatar belakang muslim. Lagi pula, maju dan mundurnya bangsa ini karenanya sangat ditentukan oleh kiprah dan prilaku politik umat Islam itu sendiri. Tulisan ini, karenanya, lebih tertarik mendiskusikan perspektif Islam tentang calon presiden.

Dalam ilmu sosial, istilah pemimpin diidentikan dengan *elite*, yang lazim didefinisikan sebagai anggota suatu kelompok kecil dalam masyarakat yang tergolong disegani, dihormati, kaya serta berkuasa. Kelompok elit adalah kelompok minoritas superior yang posisinya berada puncak strata, memiliki kemampuan mengendalikan kegiatan ekonomi dan politik, serta sangat dominan mempengaruhi proses pengambilan sejumlah keputusan krusial. Itulah sebabnya dalam banyak hal kelompok elit tidak hanya diposisikan sebagai pemberi legitimasi akan tetapi lebih dari itu mereka merupakan panutan sikap dan acuan pelbagai tindakan, dan oleh masyarakat diharapkan dapat berbuat nyata untuk kepentingan bersama. Sementara itu, kelompok

lain yang dikuasai dan didominasi oleh kelompok elit dinamakan *massa* atau rakyat Mereka adalah mayoritas inferior, yang posisinya dalam stratifikasi masyarakat berada dibawah, tidak memiliki kemampuan kuat untuk mengendalikan kegiatan ekonomi dan politik serta dalam proses pengambilan keputusan krusial.

Agama diartikan sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal. Dalam arti, bahwa semua masyarakat memiliki cara-cara berfikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut agama (*religious*). Sejumlah hal yang berhubungan dengan 'judul' agama, termasuk dalam superstruktur: agama terdiri atas tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan, dan nilai-nilai spesifik dimana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka. Akan tetapi, karena agama juga mengandung komponen ritual, maka sebagian agama tergolong juga dalam struktur sosial.

Studi tentang kepemimpinan (*elite*), tentunya telah banyak dilakukan dalam berbagai perspektif disiplin ilmu. *Elite* pada dasarnya merupakan fenomena yang lahir dari konstruksi sosial-budaya yang dapat membedakan antarindividu dan antarkomunitas berbeda. Pembicaraan mengenai pemimpin, karenanya, bertalian dengan banyak kalangan, karena berhubungan persoalan kekuasaan dan jabatan, dimana pemimpin sering muncul dan berkembang dari masyarakat sendiri. Mills, sosiolog, mengungkapkan bahwa elit merupakan mereka yang menduduki posisi atas dalam institusi ekonomi, militer dan politik yang membentuk elit kekuasaan yang terintegrasi dimana keputusan-keputusan pentingnya menentukan struktur dasar dan arah masyarakat. Mills selanjutnya mengungkapkan bahwa elite kekuasaan bukanlah suatu klik yang tertutup dan statis dengan seperangkat kebijaksanaan yang benar-benar terpadu.

Dalam setiap komunitas, kehadiran seorang elit merupakan sebuah kebutuhan, karena setiap warga masyarakat, *massa*, membutuhkan seorang elit. Kebutuhan seorang *elite* itu, sebagai panutan dan tauladan bagi mereka dalam proses penciptaan keteraturan dan pola interaksi dalam komunitasnya. Suzanne Killer mengatakan bahwa kepemimpinan sosial merupakan salah satu kekuatan yang menyangga masyarakat yang teratur. Kehadiran seorang *elite* diharapkan dapat mempertahankan kehidupan sosial, politik, agama, ekonomi dan budaya. Kehadiran *elite* juga diharapkan dapat mencegah ekspansi pihak luar dalam komunitas itu, yang dapat mengancam keutuhan dan soliditas kelompok.

Studi korelasi yang dilakukan para ahli sosiologi terhadap makna kepemimpinan telah melahirkan berbagai tesis. Max Weber misalnya, memandang adanya hubungan antara tingkat ketaatan dengan penguasaan ekonomi. Pemikiran Weber tentang birokrasi sangat penting untuk menjelaskan makna kepemimpinan dalam struktur birokrasi. Weber berpendapat bahwa pemimpin dalam dirinya melekat kuat komitmen moral dan intelektual, pemimpin tidak memperlihatkan sikap yang memihak terhadap salah satu kelompok—diskriminasi, yang satu dipentingkan dan yang lainnya diabaikan. Kata Weber, pemimpin yang baik adalah memberikan motivasi, semangat, optimisme, dan janji bagi perbaikan yang totalitas dan komprehensif.

Sementara itu, pada suatu komunitas sosial, terkadang mereka yang menduduki suatu jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan lainnya, seringkali dikatakan sebagai pemimpin. Padahal, terkadang kualitas kepemimpinan, kualitas pribadi, tipologi kepemimpinan dan seleksi sejarah atas label pemimpin sering kali belum teruji. Bahkan, suatu hal yang lazim, tindakan dan prilaku pemimpin justru belum terlalu mendorong bawahan untuk maju dan berkembang, mendorong optimisme, dan kurang memberi ketauladanan bagi bawahan dan masyarakat. Pemimpin, selanjutnya, sering kali bukannya 'melayani' tapi terkesan minta 'dilayani'. Fenomena kehidupan berbangsa di era Reformasi, disatu sisi, memberi peluang adanya iklim demokrasi, disisi lain, justru kehadiran pemimpin semakin jauh dari 'hati' masyarakat. Banyak sekali skandal yang melibatkan elit, baik bertalian dengan korupsi dan moralitas pribadi dan sosial justru menurunkan kepercayaan (*trust*) dan kewibawaan mereka ditengah masyarakat yang dipimpinnya. Jangan heran, paradigma baru pemimpin mengalami pergeseran, dimana rakyat mulai jenuh dengan pemimpin formalitas yang penuh janji-janji tapi miskin karya yang bermakna bagi masyarakat. Mereka justru butuh pemimpin bersama mereka dalam suka dan duka, yang justru ditampilkan oleh seorang Jokowi, dengan pola *blusukan*-nya.

Hal ini, menunjukkan bahwa seakan membenaran dan tampak bahwa *elite* lebih berorientasi kekuasaan dan status sosial, dibandingkan dengan makna *elite* yang bersifat hakiki dan autentik. Dari makna utentik teks Islam (al-Qur'an dan al-Sunnah), setiap manusia tidak ada perbedaan, karena perbedaan dalam konteks sosial dan status sosial akan membawa pada bentuk stratifikasi sosial yang

bersifat duniawiyah. *Elite* tidak dilihat dalam konteks itu, karena ia menjadi sumber 'inspirasi' dan 'kebaikan' bagi umat yang dipimpin; kendatipun, dalam makna doktrin, belum tentu seorang pemimpin lebih baik dan mulia dihadapan Allah SWT, dibanding dengan umat yang dipimpinnya.

Secara substantif Islam tidak mengajarkan tentang stratifikasi manusia, baik dari segi keturunan, ras, warna kulit, posisi kekuasaan, struktur jabatan politik atau kepemilikan harta benda. Islam hanya mengenal manusia dalam derajat yang sama. Dengan kata lain, bahwa Allah SWT hanya membedakan umat-Nya dalam derajat ketaatannya. *Elite* dan mereka yang umat/rakyat sama-sama mengabdikan untuk kebaikan dunia dan ukhrawi. Dihadapan Allah SWT tidak ada perbedaan, kecuali derajat ketakwaan. Seperti tertuang dalam al-Quran, dikatakan: "... sesungguhnya yang paling mulia disisi Allah SWT adalah yang paling baik takwanya....".

Klasifikasi *elite* dan *massa* berkembang setelah adanya kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Klasifikasi dilakukan untuk membedakan secara sederhana antara mereka yang mengendalikan wilayah kekuasaan dengan *massa* yang jumlahnya banyak. Semestinya, klasifikasi itu dalam makna Islam (teks) dipisahkan dalam rangka menunjuk kepada sejumlah individu terpilih yang memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya, seperti memiliki kelebihan ilmu pengetahuan, memiliki akhlak atau moral yang baik, berbudi pekerti luhur, dapat diteladani, dapat menjadi sumber sosialisasi nilai-nilai Islam, antara ucapan dan tutur kata serta perbuatannya sejalan. Dalam pandangan Islam semua orang berpeluang menjadi pemimpin, tetapi tidak semua orang berpeluang menjadi pejabat. Secara sederhana, Allah SWT menciptakan manusia dimuka bumi sebagai *khalifatu fil ardh* (representatif Allah SWT dimuka bumi), sehingga, pemimpin dalam konteks Islam memiliki makna yang luas, seperti pemimpin keluarga sendiri, RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, dan lain-lain.

Dalam masyarakat Islam, sering kali, dikatakan sebagai kategori kelompok elit-pemimpin adalah ulama, guru ngaji, ustadz/mubaligh, yang dikatakan Abdul Munir Mulkhan (1989) menulis bahwa sebagai elit sosial dan sekaligus sumber utama sosialisasi Islam. Mereka merupakan kelompok elit dalam Islam yang berdasarkan keahlian. Terdapat juga elit Islam yang menjadi pimpinan organisasi Islam dan

partai politik Islam, yang lazim disebut elit Islam, karena mereka memimpin ormas ataupun partai politik Islam yang memiliki massa, padahal secara moral dan etika Islam masih harus diuji keberpihakan mereka kepada perjuangan Islam yang sebenarnya, bukan hanya kepentingan pragmatis dan pamrih kekuasaan. Dalam teks Islam, apapun jenis pekerjaan umat-Nya, memiliki kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan *al-amar bil-ma'ruf wan-nahyu anil-munkar*, merupakan tanggung jawab bersama antara elit dan umat.

Kenyataannya, justeru menggamarkan bentuk yang tidak seimbang dan terjadi distorsi dalam menjelaskan fungsi elit yang semestinya menjadi tauladan. Suatu kenyataan terkini, misalnya, yang dilakukan sebagian elit politik Islam cenderung memanipulasi kebenaran atas motivasi ekonomi politik yang menguntungkan diri sendiri dan golongannya. Agaknya, pergeseran politik dikalangan umat Islam belum optimal mendewasakan mereka dalam merealisasikan misi-misi agama yang diklaim selama ini termarginal secara politik. Terkesan pula, orientasi kepentingan material-duniawiyah lebih dominan ketimbang orientasi immateri-ukhrawi. Sebagian elit politik berlatar belakang dari partai religius-Islami justeru terlibat skandal korupsi dan mempertontonkan kemewahan.

Terlepas dari bagaimana 'proses' seorang pemimpin muncul dan berkembang, Islam tampaknya lebih menekankan kepada pemimpin itu sendiri. Suatu hal yang menjadi *stressing* Islam adalah pentingnya konsistensi antara niat, perkataan, dan perilaku. Pemimpin yang difahami dalam Islam adalah pemimpin yang esensi kepemimpinannya bersifat integratif. Sehingga, berkembangnya suatu paradigma dalam pandangan Islam, bahwa suatu kepemimpinan harus bersifat ideologis, artinya kepemimpinan itu didasarkan pada ketentuan yang bersifat definitif oleh kesatuan pandangan mengenai agama, kehidupan sosial, kehidupan politik kenegaraan, ekonomi, hukum, dan budaya. Itulah sebabnya bahwa pemimpin agama juga merupakan pemimpin bagi rakyat, bahkan agaknya dapat dipandang sebagai pemimpin ideal bagi komunitas, masyarakat, bangsa dan negara.

Para calon presiden ideal, karenanya, dalam perspektif Islam, merupakan mereka yang prilakunya tidak menyimpang dari 'garis' kebenaran yang diwahyukan agama, dengan menjunjung tinggi *akhlakul karimah*, adil, memberi rasa aman, dan menyejukkan bagi

umat. sebagai penjaga keutuhan 'tali Allah' yang mengikat manusia dengan Sang Khalik dan antara sesama manusia. Agaknya, siapapun yang dipandang berilmu dan berakhlak dan berkepribadian mulia dapat dirartikan dalam kategori cendekiawan dan ulama', karenanya, jika ulama' misalnya melanggar ketentuan moral, akan menjadi penderitaan umat, sebagai pengikutnya.

Karenanya, calon presiden yang ideal merupakan mereka yang memiliki fungsi dan tanggung jawab terhadap umat yang harus dipertanggung jawaban dihadapan Sang Khalik. Inilah esensi kepemimpinan Islam yang hakiki dan ideal. Andaikan ada kesenjangan antara konsep dan realitas perilaku umat dalam fungsi dan peranannya dalam kehidupan berbangsa, merupakan perlunya introspeksi dan koreksi atas tergelincirnya dari 'garis' patokan dan pemahaman ajaran agama Islam itu sendiri. Apapun yang terjadi dalam kehidupan umat, lebih terletak pada dampak dari 'kapasitas' umat-Nya, terutama kalangan yang diamanahkan sebagai *elite* yang dilihat dari parameter fungsi manusia sebagai *khalifatul fil ardh* yang mengutamakan keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Jika demikian halnya, menjadi presiden tidak harus diperebutkan berlebihan dengan mengorbankan moral, akhlak, dan etika; karena jabatan itu amanah, dan Tuhan hanya akan memberi amanah kepada orang layak dan pantas menjalankannya.

Islam dan Etika Kerja⁴⁶

Agaknya ada korelasi yang kuat antara buruknya moralitas dan kinerja bangsa, sehingga berdampak terhadap munculnya berbagai permasalahan dialami bangsa akhir-akhir ini. Dengan kata lain, belum meredanya krisis multi-dimensi yang mendera bangsa ini, pada prinsipny merupakan uatu konsekuensi logis dari buruknya moralitas dan kinerja para pengelola bangsa ini. Buruknya moralitas dan kinerja tersebut telah menyebabkan terjadinya berbagai krisis (*multi-crisis*), seperti krisis sosial, ekonomi, politik, dan budaya—sejak 1997 dn hingga kini belum dapat diatasi secara tuntas. Bahkan ada kecenderungan semakin parah. Yang lebih tragis lagi, akibat buruknya dari moralitas kerja dari pengelola bangsa tersebut adalah meningkatnya posisi bangsa Indonesia pada peringkat salah satu negara terkorup di dunia. Degradasi moralitas dan kinerja ini dapat

⁴⁶ Tulisan penulis bersama Muhammad Fauzi yang dimuat dalam *Sumatera Ekspres*, 13 Juni 2003.

disaksikan baik pada level 'pusat' maupun 'daerah', baik instansi milik perusahaan maupun pemerintah atau swasta. Sekedar contoh, berdasarkan laporan media massa dan hasil penelitian, tidak sedikit perusahaan pemerintah atau swasta yang mengalami kehancuran (*collaps*) disebabkan buruknya moralitas kerja pimpinan dan karyawannya, seperti melakukan perselingkuhan, mengkonsumsi narkoba, korupsi, kolusi, dan lain sebagainya.

Dua bentuk moralitas kerja yang buruk tersebut, yang dampaknya sangat dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, kebangkrutan Negara ini diantaranya disebabkan oleh dua bentuk kinerja buruk tersebut. *Pertama*, apa yang dikatakan sebagai manajemen tertutup (*closed manajemen*) atau manajemen subjektif (*management by subjective*). Perilaku seperti ini sering kali terjadi dalam lingkungan kerja, baik pada instansi pemerintah maupun swasta. Bentuk manajemen subjektif ini, misalnya, kinerja seorang pemimpin yang bersifat otoriter, kesewenangan, dan mengeksploitasi para karyawan atau bawahan untuk mencapai tujuannya, baik tujuan kekuasaan maupun tujuan kekayaan pribadi.

Untuk mencapai tujuan dan ambisi pribadi tersebut, tidak jarang pula suatu sanksi harus diberikan kepada mereka yang berani berseberangan dengan kebijakannya. Sanksi itu dapat berupa kesulitan naik pangkat atau karier, tidak diberikan jabatan atau posisi strategis, pembentukan kesan buruk (*bad image*) atau dikenal sebagai pembunuhan karakter (*character assassination*), bahkan hingga tindakan marginalisasi terhadap mereka yang berani berbeda pandangan. Dalam kondisi seperti ini, hubungan antara pimpinan dan bawahan dikondisikan sebagai hubungan yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang berkuasa, kuat dan harus dipatuhi (*superordinate*). Sementara itu, para bawahan sebagai pihak yang lemah (*subordinate*), tidak berdaya dan harus tunduk terhadap kehendak pimpinan atau atasan. Secara sengaja atau tidak, perilaku seorang pimpinan suatu perusahaan atau instansi pemerintah atau swasta seperti ini dapat merugikan berbagai pihak lain, baik individu, sejawat, perusahaan maupun negara.

Terhadap moralitas dan kinerja yang demikian, ajaran Islam sangat melarang perilaku dan kinerja seperti itu. Sebab moralitas dan kinerja demikian merupakan bentuk kesewenangan dan eksploitasi terhadap orang lain, dan hal itu dipandang sebagai bentuk kezaliman

(zulm). Kehancuran umat terdahulu dikarenakan mereka berbuat zalim (Q.S. 10: 13). Dalam sebuah hadist Qudsi juga ditegaskan:

"Hai hambaKu, sesungguhnya Aku mengharamkan terhadap diriku berbuat zalim dan demikian juga berlaku pula diantara kamu. Maka janganlah kamu saling berbuat kezaliman. Kehancuran umat-umat terdahulu adalah karena mereka berbuat zalim dan sewenang-wenang".

Dalam hadist lain, Rasulullah SAW bersabda:

"Jauhilah perbuatan zalim, sesungguhnya kezaliman akan membawa kegelapan (malapetaka) di hari kiamat. (HR. Muslim)"

Kedua, bentuk kinerja buruk yang sedang marak dialami bangsa ini, dan santer diberitakan di media massa, berupa perilaku pembengkakan anggaran (*mark-up*). Praktek *mark-up* dapat terjadi dimana saja baik instansi swasta maupun pemerintah maupun organisasi sosial-kemasyarakatan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada lembaga sosial-pendidikan dan keagamaan. *Mark up* adalah suatu kegiatan melipatganadakan biaya secara fiktif dari pengeluaran seharusnya. Perilaku *mark-up* dapat merugikan berbagai pihak, baik individu, perusahaan, instansi pemerintah/swasta maupun negara. Jika dilihat dari perspektif agama dan ekonomi, perbuatan *mark-up* merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama Islam karena didalamnya mengandung penipuan dan manipulasi dengan tujuan mencari keuntungan pribadi dan kolektif. Praktek *mark-up* dapat merugikan instansi, organisasi, perusahaan, dan umat keseluruhan.

Karena perilaku *mark up* merupakan bentuk kezaliman yang hanya menguntungkan sebagian orang dan merugikan banyak pihak, sekaligus merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum dan nilai-nilai moral dan sosial, maka al-Qur'an menegaskan dan mengingatkan umat manusia untuk tidak melakukannya (Q.S. 2: 188). Karenanya, apapun bentuk perilaku penyimpangan dan penyelewengan dalam bekerja yang dapat merugikan banyak pihak merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan sosial, terlebih norma agama dan hukum. Hal ini tidak pernah dibenarkan oleh ajaran agama manapun, termasuk ajaran Islam, kendatipun agama terkadang digunakan untuk mendukung kepentingan politik dan legitimasi.

Keterkaitan antara etika dan etos kerja, ajaran Islam mengajarkan bahwa sebagai umat beragama, apapun harta yang

diusahakan umatnya diharapkan dapat membawa kebarokahan bagi diri, keluarga, dan orang lain. Untuk memperoleh kebarokahan itu, sangatlah tergantung pada bagaimana 'proses' memperoleh rezeki atau harta itu. Cara memperoleh harta secara ilegal, dengan tujuan memperoleh pretise dan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tanpa kerja keras, tentu tidak dibenarkan atau diharamkan oleh ajaran Islam. Sebab prestasi dan prestise seorang tidak hanya semata-mata diukur dari berapa besar jumlah harta yang dimiliki tetapi juga mesti dilihat dari 'cara' memperoleh harta itu. Harta dan tahta bagi seorang muslim haruslah dijadikan sebagai alat untuk berbuat kebajikan dan pengabdian guna menuju kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan diakhirat yang kekal dan abadi.

Islam, pada prinsipnya, sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras dan tetap memperhatikan proses dan cara mendapatkan harta yang diperoleh dari hasil kerja keras tersebut. Sebab, pada dasarnya, kualitas kinerja sangat ditentukan oleh proses yang dilaksanakan dalam suatu pekerjaan. Untuk memperoleh kualitas kinerja yang lebih baik seperti yang diharapkan, ajaran Islam memperlihatkan dan menganjurkan umatnya untuk memperhatikan hal berikut. *Pertama*, perlulah niat yang ikhlas semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT. Nilai pekerjaan dapat menjadi ibadah atau tidak tergantung pada niat yang dimiliki seorang. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Sesungguhnya segala perbuatan bergantung pada niatnya. Dan, sesungguhnya seseorang akan memperoleh pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan..." (HR. Bukhari dan Muslim).

Bekerja dengan niat mencari ridha Allah SWT akan menyadarkan kita bahwa Allah SWT sedang dan selalu memonitor aktivitas dalam pekerjaan yang dilakukan. Segala pekerjaan yang dilakukan seorang pasti akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT, baik pekerjaan kecil maupun besar. Islam memandang bahwa dalam melaksanakan suatu aktivitas pekerjaan, Allah SWT merupakan tujuan utama.

Kedua, perlunya kerja keras (*al-jiddu fi al-amal*). Bekerja keras maksudnya bekerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, jujur untuk memperoleh rezeki yang halal dan tentunya dengan cara-cara yang legal dan hala pula. Membuat skenario atau mengatur siasat manipulatif misalnya, melakukan manajemen subjektif, melakukan

prilaku *mark-up*, mengeksploitasi atau memeras orang lain dengan modal 'dengkul' bukanlah dikatakan kerja keras. Orang yang bekerja keras dalam makna sesungguhnya dikategorikan sebagai perbuatan ibadah (*jihad*), dan orangnya dipandang sebagai *mujahid*. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja dan terampil. Barang siapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan mujahid di jalan Allah" (HR. Akhmad)⁴⁷.

Ketiga, memiliki cita-cita yang tinggi (*al-himmah al-aliyah*). Dalam bekerja, Islam mengajarkan agar umatnya memiliki cita-cita yang lebih tinggi di masa depan. Dalam bekerja, ajaran Islam sangat mendorong untuk memiliki cita-cita kerja yang besar, seperti ingin menjadi atasan (pimpinan, pejabat, pengusaha, dan lainnya). Ajaran Islam senantiasa mengingatkan umatnya agar selalu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari sebelumnya. Jadi, ajaran Islam menganjurkan umatnya agar dalam melaksanakan suatu pekerjaan hendaklah senantiasa dilandasi dengan iman dan takwa, serta niat yang ikhlas hanya kepada Allah SWT.

Hal ini hanya karena adanya keinginan dan harapan agar rezeki yang diperoleh memiliki kebarokahan dan rahmat-Nya. Jadi, kehati-hatian dalam bekerja dengan niat yang tulus, kerja keras, dan do'a diharapkan dapat menghindari umat-Nya dari prilaku kezhaliman, baik sengaja maupu tidak sengaja.

Makna Idul Fitri 1427 H⁴⁷

Menyambut Lebaran Idulfitri 1 Syawal 1427 H yang Insya Allah jatuh tepat pada tanggal 24 Oktober 2006 M. Suasana berlebaran yang dimulai sejak satu malam sebelumnya yakni seluruh umat Islam, baik di kota-kota, desa-desa, pegunungan dan di lereng bukit, serta di mana saja berada, senantiasa mengumandangkan kalimat takbir, tahlil, dan tahmid.

Dengan takbir (*Allahu Akbar*) seakan menyadarkan kita selaku umat Islam bahwa kekuasaan Allah SWT sangat besar dan tidak dapat

⁴⁷ Tulisan penulis tentang Idul Fitri ini pernah dimuat dalam *Sumatera Ekspres*, 21 Oktober 2006

ditandingi oleh umat-Nya. Dengan tahlil (*La ilaha Illa Allah*) dapat dipahami bahwa hanya Allah SWT yang patut disembah, patut dimintai pertolongan. Dengan tahmid (*Wa Lillah Alhamd*) menunjukkan bahwa hanya kepada Allah SWT, kita umat Islam memanjatkan puji dan puja.

Merayakan Idul Fitri menandakan selesai sudah umat Islam menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan tahun 1427 H (2006 M). Ibadah puasa Ramadhan itu sendiri merupakan suatu ibadah yang bertujuan agar umat Islam dapat menjadi umat yang bertakwa (*muttaqien*) menuju umat yang sempurna (*al insan al kamil*). Apabila seorang muslim menunaikan ibadah puasa yang didasarkan pada niat yang tulus dan ikhlas dan dengan mematuhi peraturan-peraturan berpuasa yang ada tentang pelaksanaannya, maka yang bersangkutan, insya Allah, akan memperoleh predikat sebagai seorang muslim yang bertakwa itu. Allah SWT berfirman dalam Alquran pada surat Al-Baqarah ayat 183 : *"Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa."*

Pada pagi hari yang bahagia tersebut, kita umat Islam senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, karena kita (umat Islam) di seantero pelosol dunia telah dianugerahi kekuatan, nikmat, berupa kegembiraan. Kegembiraan itu disebabkan paling tidak oleh dua hal penting. *Pertama*, gembira kita umat Islam telah menyelesaikan ibadah puasa selama sebulan penuh. *Kedua*, gembira karena umat Islam memiliki harapan besar akan adanya ampunan dosa-dosa dari Allah SWT, karena kita telah melaksanakan ibadah puasa atas dasar iman dan takwa pada bulan Ramadhan tahun ini.

Bagi kita, umat Islam, merayakan Lebaran Idulfitri yang diperingati secara rutin setiap tahunnya mengandung dua dimensi pokok. *Pertama*, dimensi kesalehan spritual-spiritual. Dimensi ini bertalian dengan aktivitas pribadi muslim dalam meningkatkan hubungan dengan Sang Khalik, Allah SWT (*hablum minallah*). Pada bulan puasa Ramadhan kita umat Islam sangat dianjurkan melakukan aktivitas spritual-keagamaan, seperti memperbanyak shalat, dzikir, tadarrus al-Qur'an, zakat, sadaqah ataupun infak.

Dengan demikian, hakekat puasa pada dasarnya merupakan merupakan pendakian spritual agar seorang muslim menjadi dekat dengan Allah SWT, yakni menjadi seorang muslim yang memiliki

tingkat spiritual yang memadai (*spritual man*), yang dalam khazanah keislaman menjadi seorang umat yang sempurna (*al-insan al-kamil*). Proses menuju *al-insan al-kamil* ini merupakan suatu proses pendakian atau kenaikan spritual yang dialami seorang muslim dari eksistensi biasa menuju eksistensi spiritual.

Seorang muslim yang menunaikan ibadah puasa diharapkan dapat meningkatkan harkat kemanusiaannya dari tingkatan biasa (*aesthetic stage*) ke tingkatan religiusitas (*religious stage*) atau tingkatan nafsul muthma'innah, yakni suatu jiwa yang damai dan tenang sesuai dengan khazanah al-Qur'an. Itulah sebabnya, dari aspek kebahasaan, puasa bermakna menahan diri dari nafsu makan dan minum, nafsu seks, nafsu kuasa, nafsu jahat, fitnah, menggunjing dan nafsu amarah lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa berpuasa merupakan perjuangan melawan nafsu yang kadarnya lebih berat dari perang di medan peperangan yang sejati.

Setelah menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan diikuti dengan kewajiban menunaikan zakat fitrah, kemudian dengan merayakan Idulfitri, umat Islam diharapkan akan kembali menjadi suci (*fitriah*). Harapan akan kesucian tersebut dikarenakan selama sebulan penuh pada bulan Ramadhan, umat Islam telah berlatih untuk menahan nafsu-nafsu negatif dan destruktif untuk tujuan pendakian spiritualnya. Aturan-aturan berpuasa yang dipatuhinya diharapkan dapat memahami mana yang benar (*haq*) dan mana yang salah (*bathil*) sebagai proses menuju *muttaqien*. Derajat *muttaqien* itu hanya dapat dicapai bila proses pelaksanaan puasa mengikuti aturan-aturan berpuasa yang sudah ada, yang dimulai dengan niat ikhlas dan berupaya keras mematuhi aturan-aturan berpuasa tadi. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Siapa saja yang berpuasa dalam bulan Ramadhan dengan keimanan dan keikhlasan (kesadaran) yang penuh akan diampuni segala dosanya yang lalu (*Al-Hadits*)."

Urgensi niat dan konsistensi kepatuhan terhadap aturan-aturan berpuasa pada bulan Ramadhan merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Kita, umat Islam, didorong untuk terus menumpuk dan mengedepankan niat dalam setiap tindakan terlebih ketika dalam masa menunaikan ibadah puasa itu, dan diharapkan adanya tindak lanjut (*follow-up*) setelah Idulfitri, sebelas bulan menuju bulan Ramadhan di tahun berikutnya. Dalam hal ini, apapun yang akan dilakukan umat Islam senantiasa dianjurkan mengedepankan niat yang

tulus, sehingga kualitas dari kegiatan yang dilakukannya menjadi bermakna dan lebih baik dari masa sebelumnya.

Kesenjangan (*gap*) akan terjadi pada diri umat Islam ketika antara niat dan aplikasi aturan-aturan berpuasa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga, ibadah puasa seharusnya dapat menjadikan seorang muslim menjadi *muttaqien* dan diharapkan mampu memelihara ke-*muttaqien*-an itu di tengah dinamika dan perubahan sosial.

Peran seorang muslim yang saleh begitu dibutuhkan dalam proses peningkatan kehidupan berbangsa. Kualitas individu seorang muslim itu dapat diraih melalui proses belajar, yakni salah satunya dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadhan. Dalam kegiatan spritual puasa yang diperkuat dengan aktivitas spritual lainnya, seperti wirid, sadaqoh, infaq, tadarrus dan tilawah Alquran, i'tikaf, dan lain-lain, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup bagi seorang muslim.

Pada masanya nanti, ibadah puasa akan memberi efek positif dalam proses perbaikan terhadap kehidupan seorang muslim, terutama tercemin dalam berperilaku sosial. Karena itu, puasa diharapkan dapat merubah perilaku seorang dari perilaku yang cenderung negatif ke arah yang lebih positif; misalnya dari kurang jujur menjadi jujur; dari malas menjadi kerja keras; dari kurang menghargai waktu menjadi menghargai waktu, dari sombong menjadi lebih ramah. Disinilah sesungguhnya eksistensi makna puasa terhadap peningkatan kualitas kehidupan individu muslim.

Kedua, dimensi kesalehan sosial, yakni suatu dimensi yang berhubungan dengan tindak lanjut (*follow-up*) dalam perilaku aktual seorang muslim. Kalau dimensi pertama bermakna intrinsik-personal seorang muslim, dimensi kedua bertalian dengan keragaman interaksi sosial seorang muslim dengan sesama muslim dan non muslim dalam beragam bentuk kehidupan. Pesan moral puasa sebenarnya adalah agar seorang muslim menjadi lebih peka terhadap realitas sosial. Karena itu, antara dimensi pertama dan kedua, tidak dapat dipisahkan, karena dimensi pertama akan bermakna bila didukung dimensi kedua; sebaliknya, dimensi kedua sebagai penyempurna bagi dimensi pertama. Seorang muslim yang *muttaqien* terus berupaya menguatkan kedua dimensi itu melalui latihan-latihan selama berpuasa dari tahun ke tahun. Selain itu, melaksanakan puasa-puasa

sunat di luar bulan Ramadhan juga dapat melatih peningkatan kedua dimensi itu. Oleh karena itu, kesalehan sosial bertalian erat dengan perilaku sosial seorang muslim dengan sesama muslim dan non muslim. Seperti diungkapkan oleh Allah SWT dalam Surat al-Maidah Ayat 2 :

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksaan-Nya."

Dengan demikian betapa dalam makna ibadah puasa di dalam menciptakan kecerdasan spritual dan kecerdasan sosial seorang muslim. Jika ibadah puasa Ramadhan dilaksanakan dengan ikhlas karena niat kepada Allah SWT semata, dan dilaksanakan dengan baik dan benar, didukung dengan beragam amalan positif yang dianjurkan, diikuti dengan kewajiban menunaikan zakat fitrah dan zakat mal, dan selanjutnya menunaikan shalat Idulfitri, seorang muslim akan mengalami hakekat dan makna puasa itu. Makna dan manfaat yang dapat diuji secara empiris, terutama bermanfaat bagi kesehatan, penguatan derajat spritual dan sosial, sehingga keberadaan puasa Ramadhan semakin bermakna bagi seorang muslim sebagai tanda ketaatan terhadap perintah sang Khalik, seperti diteladani oleh para orang terdahulu, nabi-nabi, sahabat-sahabat, dan tabi'-tabi'an. Penguatan derajat spritual dan sosial (ketakwaannya) seorang muslim pascapuasa Ramadhan yang diharapkan itu merupakan indikasi menuju semakin akan diraih predikat muttaqien itu.

Predikat muttaqien itu bukanlah berbentuk sertifikat atau piagam tetapi lebih bersifat perasaan internal-religiusitas pribadi seorang muslim yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Seorang muslim bertakwa dipastikan akan bermanfaat bagi orang lain (keluarga, masyarakat, dan negara). Dia dapat dijadikan inspirator, motivator, dan fasilitator bagi perbaikan kehidupan orang lain tadi.

Seorang muslim yang muttaqien itu memberi kontribusi besar terhadap perbaikan kualitas berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Dengan modal ketakwaan itu ia berupaya memperbaiki beragam permasalahan kehidupan dalam berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa tadi. Sama halnya, setumpuk penyakit sosial dalam berbangsa suatu ketika akan dapat direduksi bahkan dipecahkan apabila mereka yang diberi amanah sebagai penguasa di negeri ini,

dari level pusat hingga lokal, merupakan mayoritas orang beriman dan bertakwa.

Ketakwaan sesungguhnya tidak hanya diukur dari nilai-nilai simbolik tetapi lebih dari itu bagaimana memaknainya, yakni adanya relevansi dan konsistensi antara nilai-nilai simbolik dengan aktualisasi perilaku umat. Memakai kopiah, serban, kerudung dan jilbab merupakan bagian dari item-item simbol yang dianggap religius itu, dalam hal ini akan lebih bermakna lagi apabila tercermin dalam amal saleh, baik dalam amal personal-individu maupun amal sosial. Pengertian amal sosial disini sangat luas, dari hal yang kecil hingga besar, seperti: membuang duri di jalan, bekerja keras, jujur, disiplin, menghargai perbedaan keyakinan dengan identitas lain, semampunya membantu orang lain, dan tidak menyerah terhadap kesulitan.

Umat Islam, sebagai agama mayoritas di negeri ini, idealnya berperan terdepan dalam memajukan bangsa ini sehingga sejajar dengan bangsa lain yang telah lebih maju. Melalui puasa Ramadhan dan Idulfitri 1427 H ini kita berharap tidak hanya kembali suci (fitrah) tetapi juga adanya reformasi pada internal-pribadi dan perilaku sosial umat Islam ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai puasa Ramadhan dapat dikatakan berfungsi dengan baik, itu terlihat dalam perilaku aktual dari umat Islam dalam masyarakat sebagai warga negara suatu bangsa dalam berbagai status dan kedudukan.

Umat Islam dan Pembangunan Otonomi Daerah⁴⁸

Dalam tulisan ini, penulis berupaya mengungkapkan tentang kesiapan umat Islam dalam menghadapi kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu kesempatan (*opportunity*) dan sekaligus suatu tuntutan (*challenges*) bagi masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam, dalam menentukan masa depan yang lebih baik. Agar umat Islam dapat memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya, maka sumber daya manusia (*man-power*) umat Islam harus menjadi prioritas. Analisis dalam tulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi masyarakat, umat Islam khususnya, bagi pemahaman terhadap masalah serius yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Sehingga, strategi untuk membenahi kehidupan bangsa ke depan akan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

⁴⁸ Tulisan penulis yang berjudul 'Umat Islam, Otonomi Daerah dan Pendidikan', dimuat di Sumatera Ekspres, 22 September 2000.

Kenyataan penduduk umat Islam sebagai mayoritas telah memiliki implikasi yang luas terhadap kelangsungan hidup bangsa ini. Nurcholish Madjid (1995) mengatakan bahwa karena jumlah penduduk umat Islam begitu besar (90 persen) maka umat Islam Indonesia dengan absah dapat disebutkan sebagai bangsa muslim, walaupun bukan negara Islam (*Islamic State*). Lebih lanjut, Madjid mengatakan bahwa kemampuan bangsa Indonesia akan berdampak positif bagi umat Islam Indonesia (yang akan berpengaruh positif kepada situasi dakwah yang lebih luas). Sebaliknya, kemunduran bangsa Indonesia akan berdampak negatif terhadap umat Islam Indonesia (yang juga akan berdampak negatif terhadap situasi dakwah yang lebih luas).

Kenyataan menunjukkan bahwa walaupun bangsa ini telah mengalami kemerdekaan tidak kurang dari 55 tahun, tetapi realitas sosial atas kondisi umat Islam relatif masih memprihatinkan. Atas kenyataan demikian, maka umat Islam akan lebih tepat dikatakan sebagai kelompok marginal atau terpinggirkan dalam banyak hal. Lagi pula, apa saja yang terjadi pada bangsa ini, seperti dikatakan Madjid, selalu berimplikasi luas terhadap umat Islam itu sendiri. Sebagai ilustrasi, ketika kerusuhan atau konflik sosial pada Mei 1998, umat Islamlah yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat internasional.

Padahal, sejumlah ilmuwan, terutama kalangan ilmuwan sosial, hampir sepakat bahwa persoalan pokok terjadinya kerusuhan atau konflik sosial di tanah air bukan terletak pada persoalan SARA. Tetapi, lebih dikarenakan pada ketimpangan atau ketidakadilan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat pluralistik, terutama antara mayoritas pribumi dan minoritas non-pribumi. Rahardjo (1993) menulis umat Islam itu identik dengan pribumi (*indigenous*) karena kiprah sosial-sosial historis perjalanan bangsa di masa lalu. Atas dalih stabilitas nasional, persoalan SARA pada masa Orde Baru adalah suatu yang tabu untuk dijadikan wacana perbincangan dalam dinamika kehidupan berbangsa. Sehingga, persoalan ketimpangan sosial-ekonomi yang menonjol ditengah masyarakat belum tampak tersentuh (*untouchable*). Nugroho (1999) mengatakan bahwa nampaknya reproduksi SARA sebagai instrumen manipulasi kepentingan kekuasaan hampir mengalami transformasi di level masyarakat, bahkan setelah kekuasaan kelembagaan (*institutionalization*) bahwa SARA merupakan yang 'haram' dipercincangan.

Tetapi, setelah meletusnya sejumlah kerusuhan sosial (*social-violences*) sejak 1998, dan semakin sulitnya menemukan alternatif pemecahannya, baik melalui pendekatan sosial-budaya maupun sosial-kegamaan. Maka semakin yakin bahwa persoalan SARA sebenarnya tidak lebih dari sekedar pelengkap (*complementary*) atas respon lebih lanjut dari ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik. Meskipun zaman sudah berubah, dari Orde Baru ke Reformasi, keadaan sosial-ekonomi masyarakat, umat Islam, belum menunjukkan suatu pergeseran ke arah yang positif. Belum bergesernya paradigma itu disebabkan oleh sejumlah faktor pokok, antara lain, yakni faktor 'warisan' historis kolonial, Orde Lama dan Orde Baru, yang relatif belum memihak masyarakat (rakyat) akibat dari *centralized system*.

Faktor sosial-historis menunjukkan bahwa sikap kolonial yang diskriminatif terhadap bangsa pribumi. Belanda yang menjajah sekitar 365 tahun telah menciptakan suatu sistem politik dan ekonomi yang diskriminatif. Sebagaimana diketahui bahwa bangsa pribumi telah diperlakukan sebagai kelompok kelas bawah (*inlender*) setelah kedua kelompok lainnya, akibat dari situasi demikian telah menciptakan posisi marginal (Pranowo, 1998). Keadaan ini, kemudian, telah menyulitkan proses integrasi sosial selanjutnya. Memang, pada umumnya, watak dan tindakan kolonial selalu memiliki tujuan yang sama yakni mengeksploitasi atas bangsa pribumi agar dapat mengambil keuntungan materi sebanyak-banyaknya, dengan strategi politik 'adu-domba' (*divide et impera*).

Selanjutnya, yakni belum adanya perubahan paradigma ke arah yang lebih positif tadi disebabkan pula oleh tidak adanya aksi pembelaan (*affirmative action*) oleh rezim pemerintahan sebelumnya, baik Orde Lama maupun Orde Baru, terhadap bangsa pribumi. Memang terdapat sejumlah kebijakan pemberdayaan bangsa pribumi dalam bidang ekonomi, tetapi lemah dalam implementasi. Padahal, tindakan demikian diyakini akan membantu mencegah kerusuhan sosial bernuansa primordialisme etnis dan agama sebagaimana diterapkan Malaysia (akibat kurang berdayanya Boemi Poetra dalam bidang sosial dan ekonomi), untuk mencegah konflik sosial antaretnis lebih lanjut setelah terjadi pada tahun 1960-an. Atas 'beban' sosial-historis, meskipun bangsa Indonesia telah merdeka sejak 1945; keadaan sosial-ekonomi dan politik yang lebih demokratis dan memberdayakan bagi rakyat, terutama umat Islam, baru dirasakan sejak 1990-an, tetapi belum mengarah kepada perubahan yang mendasar.

Sejak 1999, bangsa ini memasuki era Otonomi Daerah. Otonomi daerah dipandang sebagai peluang dan tantangan. Hadirnya seorang sosok cendekiawan muslim, B.J. Habibie, yang memiliki keahlian dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki concern yang tinggi terhadap 'nasib' rakyat, seorang Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pada waktu itu bagaikan inspirator dan motivator bagi bangsa Indonesia. Tampilnya B.J. Habibie sebagai mantan Menristek (1970-1980) dan Presiden RI (1997-1999), harus diakui telah memberikan dasar penting pula dalam kehidupan rakyat, terutama umat Islam, dalam menemukan 'jati dirinya' sebagai elemen terpenting dan terdepan bagi bangsa ini.

Undang-Undang Otonomi Daerah: Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 22/1999), perimbangan keuangan pusat dan daerah (UU No. 25/1999), dan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme KKN (UU No. 28/1999), diharapkan dapat memberikan ekspektasi yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat, umat Islam, dan bangsa Indonesia keseluruhan. Karena umat Islam merupakan kelompok mayoritas (90 persen) dan kebanyakan tinggal di daerah-daerah (kabupaten-kabupaten), maka bila kebijakan Otonomi Daerah mengalami keberhasilan, maka umat Islamlah yang paling diuntungkan. Sebaliknya, bila kebijakan Otonomi daerah mengalami kegagalan maka umat Islam pula yang mengalami kerugian. Konsekuensinya adalah bangsa ini akan sulit mengalami kemajuan. Disinilah letak urgenis dari perlunya pembangunan berbasis masyarakat.

Atas itu semua, kebijakan Otonomi Daerah disamping memiliki suatu peluang dapat pula dikatakan sebagai tantangan (*challenges*) bagi umat Islam Indonesia untuk menemukan masa depan 'anak cucu'. Dikatakan sebagai peluang, karena dengan Otonomi Daerah, umat Islam diharapkan akan dapat memperoleh peluang-peluang dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dampaknya terhadap perbaikan sosial-ekonomi. Undang-Undang tentang Otonomi Daerah itu telah menempatkan suatu daerah memilik kewenangan yang lebih besar, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, dan kewenangan dalam bidang lainnya, seperti perimbangan keuangan, kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional.

Andi Alfian Mallarangeng mengungkapkan bahwa 'dalam rangka menyambut dan mempersiapkan Otonomi Daerah Januari 2001 nanti, DPRD dan Pemerintahan Kota/Kabupaten mesti kreatif dalam menyusun berbagai kebijakan serta kewenangan daerah' (*Sumatera Ekspres*, 10/9/2000). Namun, walaupun ada kewenangan yang lebih besar pada Pemerintahan Kota/Kabupaten menuntut kehati-hatian dari seorang kepala daerah (Bupati/Walikota) dalam menentukan suatu kebijakan pembangunan Otonomi Daerah. Jika 'proyek' tumbuh atas kebutuhan masyarakat (bottom-up) bukan didasarkan atas kepentingan kelompok penguasa dan pengusaha semata maka rasa keikhlasan masyarakat akan tampak. Tetapi, jika sebaliknya yang terjadi, maka keberadaan suatu proyek itu cenderung hanya menguntungkan sepihak (penguasa) dan masyarakat hanya sebagai 'penonton' dan 'saksi' atas kebijakan itu, yang lazim terjadi pada masa Orde Baru. Akibatnya kesalahan pada suatu kebijakan akan merugikan generasi berikutnya dan bangsa ini ke depan. Lebih dari itu, kemungkinan konflik sosial akan terus terjadi terutama di daerah-daerah, yang kebanyakan umat Islam.

Karenaya, agar umat Islam tidak kehilangan kesempatan (*opportunity*) dalam kebijakan Otonomi Daerah, maka persoalan Sumber Daya Manusia (*human-resources*) umat Islam perlu menjadi *concern* serius⁴⁹. Suatu *grand strategy* yang perlu memilah masyarakat, umat Islam, dan elemen masyarakat keseluruhan, harus menjadi keharusan, karena demokrasi tidak akan sungguh terjadi bila ketidakadilan dan ketimpangan sosial-ekonomi dalam masyarakat masih tajam. Jangan pula terjadi kiranya, karena alasan demokrasi, seorang pimpinan takut bertindak memihak suatu masyarakat yang mengalami ketidakadilan, karena demokrasi bukanlah persamaan (*sameness, homogeneous*) semata, tetapi juga menghadapi perbedaan (*heterogeneous*).

Karenanya, ketika kita membicarakan ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat dan berupaya mencari solusinya, pada hakekatnya adalah esensi dari demokrasi itu sendiri. Sedangkan kebijakan Otonomi Daerah dalam sistem pemerintahan yang *decentralized* adalah suatu strategi untuk menuju masyarakat dalam keberagamannya memiliki kesamaan derajat dalam

⁴⁹ Tulisan berjudul 'Umat Islam, Otonomi Daerah, dan Pendidikan', bagian terakhir dari dua tulisan, di muat dalam *Sumatera Ekspres*, 29 September 2000.

realitas sosial. Implikasinya adalah dengan realitas sosial umat Islam, sebagai mayoritas dalam jumlah, pewaris bangsa, tapi masih marginal dalam sosial-ekonomi) maka kebijakan (pemerintah) Otonomi Daerah harus pula memperhatikan kelompok ini secara seksama. Suatu persyaratan penting agar umat Islam dapat terangkat dari status kemarginalannya adalah dengan memberi peluang-peluang itu dapat diperoleh, maka otonomi daerah akan mengindikasikan sukses, kalau sebaliknya yang terjadi akan mengalami indikasi kegagalan. Karena hakekat pembangunan otonomi daerah adalah adanya keberpihakan kepada masyarakat yang lemah (*dhu'afa*).

Agar dapat berpartisipasi untuk meraih peluang tersebut, maka SDM umat Islam harus segera disempurnakan. Karena persoalan SDM bagi bangsa ini, terutama umat Islam, adalah persoalan yang mendasar saat ini yang mana pembenahannya harus melalui strategi yang mesti akurat, berdasarkan visi dan misi kedepan yang akurat dan prospektif serta menghindari strategi 'setengah hati' tanpa kesinambungan dan menyentuh persoalan substansial. Kemajuan suatu bangsa memiliki korelasi yang positif dengan SDM yang diciptakan melalui institusi pendidikan yang bermutu (*qualified*).

Konsep pendidikan Islam sangat mendorong adanya SDM yang berkualitas bagi umatnya yang mementingkan kualitas kehidupan duniawi dan ukhrawi yang integral. Al-Abrasyi (197) merumuskan tujuan umum pendidikan Islam adalah: *Pertama*, jiwa pendidikan Islam adalah budi pekerti. *Kedua*, memperhatikan agama dan dunia. *Ketiga*, memperhatikan segi-segi manfaat, pendidikan Islam tidak semuanya bersifat keagamaan, akhlak dan kerohanian. *Keempat*, mempelajari ilmu semata-mata untuk ilmu saja. Dalam hal ini, pendidikan Islam adalah ideal dimana ilmu diajarkan karena ilmu itu mengandung kelezatan-kelezatan rohani untuk dapat sampai kepada hakekat ilmiah dan akhlak terpuji. *Kelima*, pendidikan kejujuran dan pertukangan dalam upaya memperoleh rezeki.

Pendapat Al-Abrasyi diatas sangat relevan dengan konsep tujuan pendidikan nasional (Undang-Undang No. 2 Tahun 1989). Yakni, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, keberibadian yang mantap dan mandiri serta memiliki

rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Suatu arti penting dari pandangan Al-Abrasyi dalam relevansinya dengan UU No. 2 Tahun 1989 adalah bahwa baik sains agama maupun sains pengetahuan (berdasarkan bakat dan minat) dalam menjunjung tinggi kemaslahatan umat sebaik-baiknya, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an (Q.S. al-Mujadalah: 11): "Niscaya Allah SWT akan meninggalkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah SWT maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Kontrasnya, dalam tataran aplikasi pendidikan ditanah air, akibat krisis ekonomi dan krisis politik yang berkepanjangan. Darmaningtyas (1999) menulis bahwa telah berdampak pada penurunan pendapatan rumah tangga rata-rata antara 30-70 %, atau bahkan kehilangan pendapatan sama sekali disatu pihak dan dipihak lain, telah memicu kenaikan harga alat sekolah (buku, pensil, ballpoint, penggaris, kertas, dan lain-lain), dan perlengkapan sekolah (sepatu, pakaian seragam, tas, topi, dan lain-lain), maka telah memperlemah kemampuan bersekolah. Keadaan demikian sudah barang tentu telah memperlemah kemampuan bersekolah masyarakat, terutama bagi kalangan masyarakat kelas bawah alias miskin yang kebanyakan umat Islam. Sebagai ilustrasi, banyak tamatan SLTA yang lulus UMPTN maupun melalui PMDK di universitas-universitas negeri pada tahun 2000/2001, terpaksa harus dibatalkan karena mahalanya biaya kuliah.

Adanya penurunan tingkat partisipasi pendidikan masyarakat, terutama umat Islam, itu maka akan merugikan bangsa ini ke depan. Seperti diungkapkan Nurcholish Madjid sebelumnya bahwa kalau bangsa ini mundur, maka umat Islam pulalah paling merasakan kepahitannya. Karena itu, tidak ada pilihan lain, kecuali umat Islam harus berpartisipasi penuh dalam mengisi pembangunan bangsa, tanpa mengabaikan kelompok agama lainnya, dengan mempersiapkan SDM yang handal (berpengetahuan, beriman, bertakwa, dan berketrampilan). Karenanya, upaya perbaikan dan pemberdayaan umat Islam masa depan harus melalui pendekatan pemberdayaan SDM yang strategis, antara lain:

Pertama, perlunya pemberian peluang pendidikan dan memperbanyak sekolah bermutu atau berkualitas (*qualified*). Kalau sekarang pemerintah telah mendorong mendirikan sekolah-sekolah unggulan (*competitive education*) pada sekolah menengah umum

(SMU) unggulan disetiap kabupaten, seharusnya perlu difikirkan pula agar Madrasah Aliyah Umum (MAU) Unggulan dapat diadakan. Karena semakin banyak sekolah-sekolah yang berkualitas di suatu daerah maka sudah barang tentu akan menguntungkan umat Islam. Untuk mencapai sekolah yang berkualitas, pengembangan sarana dan prasarana institusi pendidikan (kurikulum, kualitas pendidik, proses pembelajaran yang lebih demokratis, penumbuhan daya kritis anak didik, dan lain-lain) dimasa depan adalah suatu kemestian. Selanjutnya, peningkatan anggaran pendidikan yang wajar dan memadai serta memperbanyak beasiswa bagi masyarakat, tidak terkecuali umat Islam, yang tidak mampu tapi berprestasi sangat perlu dalam mempercepat pertumbuhan SDM Indonesia di masa depan.

Kedua, segenap komponen masyarakat hendaknya menyadari akan pentingnya pembangunan yang berbasis masyarakat. Akibat dari kebijakan pembangunan Orde Baru yang *centralized* dengan *trickle-down economy*-nya maka hanya cenderung sebagai 'saksi' pembangunan, maka kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat berpihak kepada semua masyarakat yang berkeadilan. Selanjutnya, dengan dalih apapun perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang hanya menguntungkan sebagian kalangan dan merugikan masyarakat kebanyakan seharusnya cepat dibatasi. Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan RI, pada Kabinet Pemabangunan VII, mengungkapkan bahwa sekitar 50% dari pinjaman luar negeri yang sampai ke Indonesia mengalami kebocoran. Padahal, sebagian besar hutang luar negeri itu dibuat bukan karena kebutuhan yang mendesak, tapi karena ada diajak patungan oleh perusahaan asing untuk mendapatkan pinjaman, lalu uangnya dibagi-bagikan (*Gamma*, 18 April 1999).

Konsekuensinya, diperkirakan 70% dari aset nasional dikuasai oleh 4% saja dari penduduk Indonesia. Bahkan menjelang ambruknya kelompok ini diperkirakan telah mendominasi 80% aset nasional (Sjafrie Sairin, 1999). Gambaran ini menunjukkan bagaimana KKN merupakan persoalan serius. Perilaku KKN merupakan 'benalu' atau musuh besar kemajuan suatu bangsa yang telah merusak rasa saling percaya (*mutual-trust*), menumbuhkan prasangka, dan telah merusak kepercayaan kepada para pejabat. Keberadaan komisi penyidik kekayaan pejabat negara (KPKPN) tentu memiliki tanggung jawab besar dalam memperbaiki kembali kepercayaan (*trustworthy*) masyarakat yang sedang menurun drastis itu.

Uraian diatas menunjukkan pula bahwa agaknya ada korelasi yang positif antara rendahnya SDM bangsa Indonesia dengan menyemaraknya KKN pada masa Orde Baru. Ada suatu ekspektasi yang tinggi bagi masyarakat terhadap kebijakan otonomi daerah, yakni agar memperbaiki nasib masyarakat yang kurang mampu ke arah yang lebih baik. Karenanya, krisis politik dan ekonomi yang telah memperburuk keadaan kehidupan masyarakat seharusnya dapat diambil sebagai hikmah untuk menetapkan langkah perencanaan masa depan yang lebih baik.

Seorang futurist Prancis, Pierelouis Manpertius (1984) mengatakan "cara utama untuk meramalkan masa depan adalah dengan jalan mengambil manfaat dari keadaan sekarang untuk mengetahui konsekuensi yang paling mungkin untuk masa depan'. Karenanya, segenap anak bangsa, sedapatnya dapat berbuat suatu yang terbaik buat bangsa ini agar tidak terpuruk dalam ketidakpastian yang akhirnya tidak mustahil akan mengancam distabilitas sosial dan disintegrasi bangsa.

Antisipasi Konflik Sosial-Keagamaan⁵⁰

Kemajuan sains dan teknologi—terutama teknologi informasi dan transportasi—telah membuat dunia ini sebagai 'kampung besar', yang oleh sebagian ilmuan sosial dikatakan sebagai *global village*. Karena itu, penduduk di negara-negara di dunia umumnya telah menjadi pluralistik, dari segi ekonomi, budaya, etnis, ras dan agama. Disatu sisi, hal ini dapat mendorong proses interaksi, kooperasi, akomodasi, dan akulturasi/asimilasi, antara berbagai kelompok masyarakat pluralistik itu. Disisi lain, pluralistik dapat menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik sosial karena tiap kelompok berusaha mempertahankan identitas masing-masing, termasuk pandangan ideologis tentang agama.

Meskipun Forum Kerukunan Antarumat Beragama (FKUB) telah terbentuk sekitar satu tahun yang lalu, ternyata potensi-potensi konflik sosial-keagamaan masih tetap rawan, ibarat api dalam sekam. Hal ini terungkap dalam diskusi penulis, sebagai narasumber, para da'i, dan para ulama NU se Sumatera Bagian Selatan, dalam pelatihan dan pembekalan, oleh Ormas Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera

* Tulisan penulis yang berjudul 'Antisipasi Konflik Sosial Bermuansa Agama', dimuat dalam Berita Pagi, 13 Maret 2008.

Selatan pada 20 Februari 2008 di Palembang. Karena itu, topik konflik sosial bernuansa agama ini tampak menarik dan *up to date* didiskusikan.

Dalam sejarah perjalanan bangsa, telah menempatkan Indonesia sangat rentan dengan social-keagamaan, Konflik sosial, dapat mengancam harmoni sosial, bahkan berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. Potensi konflik sosial-keagamaan, dapat dihasilkan dari kompetisi dari individu dan kelompok pada berbagai bentuk sumber-sumber social (*social-resources*) yang menggunakan etnisitas untuk memperkuat kekuasaan (*power*). Saling mempengaruhi satu sama lain akan memanipulasi etnisitas sebagai cara untuk mengumpulkan kekuatan berdasarkan kelompok dan solidaritas. Kemudian menggunakan etnisitas dalam konflik untuk mencapai kekuasaan tertentu pada kekuasaan struktur sosial lokal, seperti politik dan etnisitas sebagai potensi yang dapat merusak struktur sosial pada level komunitas.

Dalam sepuluh tahun terakhir (1997-2007), menunjukkan intensitas dan ekstensitas konflik sosial ditengah masyarakat masih tampak dan berpotensi terus terjadi. Konflik sosial tersebut dapat berupa konflik sosial bersifat horizontal maupun vertikal. Konflik sosial horizontal adalah konflik yang berkembang diantara anggota masyarakat, seperti perkelahian antarkampung, dan ada juga bernuansa antarumatberagama.

Kasus konflik sosial bernuansa etnis dan agama telah terjadi, seperti di Pontianak, Poso, Ketapang, Kupang, Sambas, dan Ambon-Maluku. Dalam diskusi dalam pelatihan da'i, ulama, dan ustadz NU, ada pula yang mengungkapkan potensi konflik antarumat beragama juga tampak pada level lokal pada daerah tertentu. Karena kelompok agama tertentu melakukan misi agamanya dengan berbagai cara yang meresahkan umat beragama lainnya. Potensi konflik bernuansa SARA (agama) tersebut tidak bisa dianggap remeh dan ditutupi. Karena dapat diibaratkan seperti api dalam sekam, dimana suatu ketika dapat saja membakar lebih dahsyat. Maka, setiap kasus harus segera diatasi dengan serius dan proporsional sebagai upaya menghindari potensi konflik lebih besar. Konflik sosial juga dapat berdimensi vertikal, yakni antara masyarakat dan negara. Beberapa konflik berdimensi vertikal, seperti keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari NKRI, seperti Aceh, Papua, Ambon, dan Timor-Timur (berpisah dari NKRI).

Faktor pendorong konflik vertikal biasanya bertalian dengan ketidakadilan terhadap kebijakan pemerintah/negara, seperti dibidang politik, budaya, ekonomi, dan hukum. Bahkan, maraknya demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada Mei 1998, merupakan juga bentuk konflik vertikal yang melahirkan rezim Reformasi. Kendatipun begitu, antara konflik horizontal dan vertikal dapat saling berkaitan dan saling mendukung. Sehingga hampir semua daerah yang bergejolak separatisme, dalam dimensi konflik vertikal, seperti Aceh, Papua, dan Maluku memiliki sumber daya alam (*natural-resources*) yang melimpah.

Dari indikator kejadian pada level provinsi ini, jumlah perkapitas investasi asing merupakan satu dari korelasi dengan konflik atau potensi konflik sosial. Tuntutan kemerdekaan oleh sebagian rakyat pada provinsi tersebut berarti orang/rakyat daerah itu merasakan tidak perlu lagi untuk berbagi penghasilan daerah (*revenue*) dari sumber-sumber investasi asing dengan pemerintah (Indonesia). Hal ini merupakan suatu ancaman disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa yang telah memberi legitimasi terhadap motivasi perjuangan separatisme. Hal ini dapat dijelaskan pula berbagai konflik sosial dan agama di tanah air selama ini hampir terlepas dari persoalan ideologi agama. Tetapi lebih disebabkan faktor pemicu lainnya.

Suatu konflik sosial (agama), sekurang-kurangnya dapat dikarenakan bertemunya empat elemen utama dalam waktu yang bersamaan. Keempat elemen tersebut, yakni *facilitating context*, *core or roots of conflict*, *fuse factor*, dan *triggering factors*. Suatu konflik sosial bernuansa agama, *facilitating contexts* (konteks pendukung), dapat berupa, antara lain, pola pekerjaan atau pemukiman yang terpisah berdasarkan garis keagamaan antara berbagai kelompok yang akan terlibat konflik, atau kompetisi perkembangan demografi keagamaan atau urbanisasi yang menggeser penduduk asli-lokal (*indigenous*).

Core of conflict (akar konflik), biasanya adalah suatu tingkat sosial deprivation (penderitaan sosial) atau marginalisasi sosial yang tidak dapat ditolerir lagi dalam perebutan sumber-sumberdaya (*resources*) maupun kekuasaan (*power*), baik berupa sumber-sumber ekonomi maupun jabatan-jabatan yang didominasi oleh kelompok tertentu. Bila kelompok yang mendominasi dan terdeprivasi berasal dari kelompok agama berbeda, maka konflik yang terjadi dapat saja

bergerak menjadi bernuansa agama. Sudah barang tentu dimensi proporsionalitas antara mayoritas dan minoritas agama menjadi pertimbangan pula. *Fuse factor* (sumbu), biasanya juga sudah ada disana. Tetapi tidak dengan sendirinya menyala menjadi konflik jika tidak tersulut atau disulut. Sumbu konflik dapat berupa, antara lain, sentimen suku, ras, keagamaan, dan latar belakang organisasi. *Triggering factors* (pemicu) adalah peristiwa atau momentum dimana semua elemen diatas diakumulasikan untuk melahirkan konflik sosial.

Aliran Sesat

Perspektif Sosial-Keagamaan⁵¹

Tulisan ini memfokuskan pada kajian tentang Aliran Sesat dalam perspektif sosial-Keagamaan. Mengapa suatu aliran/faham dikatakan sesat? Apa dampak Aliran Sesat terhadap kehidupan beragama? Di Indonesia, Aliran-aliran Sesat, dikenal relatif banyak, antara lain: Ingkar Sunnah, Lembaga Pembaru NII KW IX, Lembaga Kerasulan, Darul Arqam, Salamullah (Lia Aminuddin), Hiper Metafisik, dan Kejawen.⁵² Sejumlah aliran sesat ini, berdampak pada keresahan umat beragama, terutama umat Islam. Pemerintah juga merasa resah karena berpotensi menimbulkan ekses negatif dalam kehidupan beragama dan berbangsa serta telah berdampak pada adanya ketegangan bagi masyarakat. Menariknya lagi, dalam setiap kurun waktu tertentu aliran sesat ini selalu muncul. Adanya pemahaman Aliran Sesat dan Aliran Tidak Sesat, paling tidak dikarenakan adanya alasan tertentu, antara lain:

Pertama, secara teologis, telah terjadi penyimpangan mendasar yang dilakukan para pengikut aliran-aliran tersebut. Aliran Ingkar Sunnah misalnya dikatakan menyimpang atau sesat dikarenakan: Meletakkan dasar hukum dalam Islam hanya al-Qur'an, tidak percaya pada semua hadist Nabi Muhammad SAW karena merupakan hasil karya Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam; Syahadat mereka adalah isyha^hshadu biannana muslimin (saksikanlah bahwasanya kami orang-orang Islam); Shalat hanya dua rakaat atau cukup dengan eling saja, tidak perlu adzan dan iqomat; Puasa hanya diwajibkan bagi mereka yang hanya melihat bulan; Pergi haji boleh dilakukan selama empat bulan haram, yakni Muharaam, Rajab,

⁵¹ Makalah berjudul "Aliran Sesat: Perspektif Sosiologis", disampaikan pada Diskusi Litbang Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang, 17 Oktober 2010.

⁵² Ahmad Riznanto, *Mereka Menodal Islam, Menyibak Peran Gelap Yahudi di Balik Aliran Sesat dalam Islam*, Mihrab, Jakarta, 2008, hlm. 45.

Dzulkaidah, dan Dzulhijjah. Selama berhaji boleh mengenakan pakaian sebagaimana biasanya karena kain ihram adalah pakaian orang Arab saja; Rasul tetap diutus sampai hari kiamat; Nabi Muhammad SAW tidak berhak menjelaskan ajaran atau kandungan isi al-Qur'an; dan Orang yang meninggal dunia tidak wajib dishalatai karena tidak ada perintahnya dalam al-Qur'an.

Sama halnya, Aliran Salamullah (Lia Aminuddin) telah mengklaim banyak hal. Antara lain, mengaku sebagai Nabi dan Rasul, juru bicara malaikat Jibril, dan sebagai Imam Mahdi. Lia juga mengaku menerima wahyu, mendapatkan mukjizat dan malaikat Jibril bersemayam dalam dirinya. Puteranya Ahmad Mukti dianggap sebagai Nabi Isa AS dan suaminya Abdul Rahman diyakini sebagai wakil atau imam besar ajaran Salamullah. Jika diperhatikan, ajarannya merupakan agama *Perennialisme* yang menghimpun semua agama. Menurut keyakinan mereka, mencukur semua jenis rambut yang ada di sekujur tubuh lalu membakarnya adalah suatu bentuk ibadah yang diperintahkan Jibril melalui Lia Aminuddin. Barang siapa yang melakukan itu sama dengan bayi yang baru lahir. Mereka juga yakin air sumur Salamullah berkhasiat menyembuhkan beragam penyakit.

Kedua, secara sosiologis, dimana munculnya berbagai aliran sesat sering kali menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan kekerasan. Kita masih ingat kasus kekerasan atas nama agama terhadap Jaringan Ahmadiyah Indonesia (JAI), suatu kelompok yang mengajarkan aliran sesat. Penyerbuan dan aksi perusakan oleh massa terhadap Kampus Al-Mubarak, Parung, Bogor pada beberapa waktu lalu kembali meninggalkan noda, dimana massa menyerbu markas JAI.

Dalam perspektif sosiologis tentang kasus JAI, menimbulkan banyak pihak pro dan kontra. Perberdaan pandangan ini, terutama bertalian dengan kasus penyerbuan dan kekerasan dalam menyelesaikan kasus perbedaan keyakinan ini. Pihak yang pro berargumen bahwa ajaran Islam mengajarkan agar umatnya menyelesaikan suatu permasalahan keyakinan berbeda dengan cinta dan damai. Adanya kekerasan terhadap JAI dipandang sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jika memandang Islam sebagai *Ar-Rahman* dan *Ar-Rahim*, dan memandang sisi hikmah dan pelajaran yang baik (*bil hikmah wal*

mau'izhah hasanah), maupun dari segi ajaran atau teologisnya, maka tindakan kekerasan terhadap JAI tidak tepat dan tidak dibenarkan.

Aliran Sesat JAI, ternyata tidak hanya berdampak terhadap penyimpangan pemahaman teologis yang berbeda tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap proses gejala disintegrasi sosial-keagamaan intern dan ekstern umat beragama (Islam). Bagi massa yang menyerbu dan menyerang JAI sudah menjadi keharusan. Antara lain, dikarenakan adanya fatwa MUI yang mengatakan Ahmadiyah aliran sesat dan tidak diakui sebagai ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, maka yang bersangkutan menjadi *murtad* atau pemberontak (*bughah*). Dalam Perspektif fikih, jika tidak bertobat dalam tiga hari, orang murtad tadi harus dihukum bunuh atau diperangi.

Massa juga menuntut Ahmadiyah di Parung dibubarkan. Pembubaran aktivitas Ahmadiyah, menurut mereka, adalah tuntutan yang islami. Apalagi dari segi fikih klasik dan struktur masyarakat Islam sendiri, pandangan dan tindakan itu dinilai tidak ada salahnya. Maka, mereka mendesak pemerintah agar dapat bertindak tegas terhadap Ahmadiyah karena MUI sudah menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Jika tidak, massa akan mengambil tindakan sendiri.

Dari pihak yang kontra, sebaliknya memandang dan berpendapat bahwa sesungguhnya ada kekeliruan terhadap tindakan massa dengan cara kekerasan. Kekerasan terhadap Ahmadiyah dipandang sebagai kontroversial dan *blunder*. Fatwa MUI juga tidak lagi berwibawa dan tidak sakral. Ketika, fatwa MUI kurang berwibawa maka pihak otoritas-pemerintah pun akan "netral" karena tidak mendapat tekanan dari fatwa MUI itu, dan masyarakat pun kurang cenderung mengabaikan fatwa tersebut. Apalagi, dalam perkembangan era Reformasi, seringkali berbagai masalah individu, masyarakat dan bangsa diselesaikan melalui peran institusi HAM. Fatwa MUI semakin kurang *greget*. Akan tetapi, kemudian kasus Ahmadiyah telah bergulir ke kalangan anggota DPR di Senayan; dan direspons oleh pemerintah dengan turunya Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6.2008, dan Nomor 199 Tahun 2008, yang pada dasarnya melarang keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).⁵³

⁵³ Balitbang Dilat Departemen Agama RI, *Buku Sosialisasi Surat Keputusan Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008*,

Meskipun sebagian pihak ada saja yang belum puas terhadap keputusan pemerintah tersebut karena dipandang belum menjadi larangan permanen, tetapi, setidaknya telah dapat mereduksi peran Ahmadiyah. Bagi mererka, secara total Ahmadiyah memang belum berakhir. Lagi pula, masih ada begitu banyak aliran sesat yang berpotensi akan muncul, termasuk aliran *kejawen*/aliran keyakinan.

Munculnya aliran sesat dan berbagai implikasi kekerasan sebagai solusi masalah sosial, menunjukkan adanya gap antara cita-cita (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*). Kekerasan atas nama Tuhan juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara agama teologis dan agama sosiologis-antropologis. Akan tetapi, kesenjangan antara *das-sollen* dan *das sein* suatu hal yang wajar. Hegel, misalnya mengatakan, Hukum Dialektika: Tesis-Antitesis-Sentesis. Dalam perpektif sosiologis-antropologi agama berangkat dari kesadaran mencoloknya gap antara harapan dan kenyataan ini. Sosiologi dan antropologi tumbuh dan berkembang karena adanya "keanehan" dalam kehidupan beragama. Kedua cabang ilmu ini berkembang karena banyaknya keanehan dalam kehidupan beragama. Perhatiannya juga tertuju pada keadaan yang dianggap tidak logis, tidak produktif, serta hal-hal aneh lainnya, seperti kepercayaan kepada spiritual being, sakralitas dan ritualisme lainnya.

Dalam pandangan umum, dikatakan Bustanuddin Agus (2005:1-3) bahwa agama berangkat dari keyakinan sedangkan ilmu filsafat berangkat dari keragu-raguan terhadap sesuatu. Tapi, dalam perkembangan terakhir, dikotomi agama-ilmu ini dapat dipertanyakan. Orang bahkan telah berfikir tentang integrasi ilmu dan agama. Tetapi, berawal dari sesuatu keyakinan juga tidak ada salahnya, asalkan tidak ada pihak lain yang dituding salah atau sesat.

Agus, Comte (1798-1858), bapak Sosiologi, membedakan dua jenis perspektif. Menurut Comte, cara berfikir religius hendak menemukan jawaban yang absolut. Ini berbeda tentunya dengan cara berfikir positif-ilmiah yang menyadari kerealatitan kemampuan manusia. Orang modern tidak berfikir absolut. Melihat perkembangan peradaban umat manusia dewasa ini, dikotomi ilmu-agama, modern-religius, reaktif-absolut, relatif-absolut seperti ini agaknya tidak relevan lagi menjawab tantangan zaman.

Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JA) dan Warga Masyarakat, Departemen Agama RI, 2008, hlm. 3-16.

Dinamika Sosiologis Indonesia

Realitas sosiologis lain menunjukkan, dimanapun agama dipegang orang banyak, jamaah, bahkan massa yang fanatik. Setiap penganut agama meyakini agamanyalah yang paling benar. Jadi aspek-aspek fanatisme agama selalu ada. Dalam konteks fenomena sosial, agama yang dimaksud disini bukan saja agama-agama yang resmi dikenal publik. Tetapi, ciri-ciri fanatik terhadap sesuatu keyakinan tidak hanya dalam konteks agama resmi, tetapi juga sekte, aliran, mazhab, dan bahkan partai dan organisasi keagamaan, bahkan ideologi-ideologi sekuler. Makin rendah tingkat berfikir dan pemahaman keagamaan seseorang, makin sempit dan konkrit sesuatu yang difanatiknya dalam kehidupan beragama.

Karenanya, adanya Aliran Sesat berawal dari cara berfikir dan pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama yang tidak relevan dan berpotensi menimbulkan keresahan dikalangan umat beragama dan pemerintah. Agaknya Aliran Sesat sulit untuk dihindari karena tafsiran dan pemahaman umat beragama yang berbeda. Disini, perlu adanya peran MUI dan Pemerintah yang tegas dan konsisten dalam upaya membina, memberi pemahaman dan pengetahuan ajaran-ajaran agama dengan benar, sehingga pada akhirnya dapat mereduksi jumlah dan peran aliran sesat tersebut.

Imlek, Idul Adha 2013 dan Krisis Sosial⁵⁴

Pada Februari 2003, masyarakat di tanah air dan di berabagai belahan dunia akan merayakan dua hari besar keagamaan. *Pertama*, masyarakat keturunan Cina merayakan Imlek (*gong xi fa cai*) pada 1 Februari 2003 (2554 Tahun Cina). *Kedua*, masyarakat Islam merayakan Idul Adha pada 12 Februari 2003 (10 Dzulhijjah 1423 H). Bagi bangsa kita, momentum merayakan Imlek dan Idul Adha bersamaan waktu dengan keadaan krisis bangsa yang belum reda. Ada suatu harapan umat beragama, kiranya dengan merayakan Imlek dan Idul Adha diharapkan dapat member kontribusi positif terhadap perbaikan keadaan kehidupan berbangsa yang sedang mengalami krisis akut.

Diungkapkan Merton (Nottingham, 1996), bahwa agama berperanan penting sebagai pemersatu, pemelihara, dan menstabilkan masyarakat, dan juga dapat berpotensi menceraiberaikan. Ketika

⁵⁴ Tulisan penulis berjudul 'Imlek, Idul Adha, dan Krisis', yang pernah dipublikasi di Sumatera Ekspres, 1 Februari 2003.

terjadi perubahan besar dalam bidang sosial dan ekonomi misalnya, agama berperan bersifat kreatif, inovatif, dan bahkan revolusioner. Akan tetapi, sejauhmana agama berperan mempersatukan dan memelihara, atau seberapa besar peranan agama dapat berkontribusi terhadap munculnya perpecahan atau inovasi-kreatif sangat berbeda sepanjang sejarah dan tergantung pada keragaman masyarakatnya. Merayakan hari besar keagamaan merupakan symbol ketaatan umat beragama dalam menjalankan perintah-Nya, sehingga agama diharapkan memiliki peranan positif dalam upaya mempersatukan, memelihara dan menstabilkan kehidupan masyarakat keseluruhan.

Agama dipandang berperan positif bagi masyarakatnya, dapat dilihat dari parameter perilaku keagamaan individu sehari-harinya. Bagi seorang individu, agama diharapkan dapat berperan dalam memberikan petunjuk dalam meningkatkan tingkat kualitas keberagamaannya (*spiritual stages*). Bagi kolektif-masyarakat, agama diharapkan berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (*social-stages*). Jika agama telah berperan positif bagi penganutnya dan bagi masyarakat, agama dipandang telah berperan positif dalam mencapai kesempurnaan dalam kehidupan penganutnya, umatnya, sehari-hari, dalam Islam dikatakan sebagai *al-insan al-kamil*. Merayakan Imlek dan Idul Adha, pada dasarnya, memiliki makna penting dalam meningkatkan tingkat keberagamaan-spiritualitas dan tingkat kepedulian-kolektif masyarakat. Sebenarnya, semua agama mempunyai perhatian penting terhadap kualitas keberagamaan atau keshalehan individual penganutnya, dan juga kualitas keragaman kolektif-bermasyarakat.

Imlek, dalam kalender Tradisi Cina, atas perhitungan perputaran bulan berarti sebuah tahun baru dalam satu siklus tahun Cina. Bagi penganut Kong Hu Chu, merayakan Imlek tidak lebih dari sekedar mengucapkan selamat jalan tahun lama dan selamat datang tahun baru. Pada malam hari, tanggal 30 pada bulan di dua belas, dalam suatu keluarga Cina, seluruh anggota keluarga tidak tidur. Mereka duduk bersama menyambut datangnya tahun baru, diikuti makan malam bersama dan saling mengucapkan selamat. Anak-anak melakukan sujud terhadap orangtuanya dan yang muda mengucapkan selamat kepada yang lebih tua. Mereka yang lebih tua memberikan Ang Pao (Hong Bao) yang dikemas dalam amplop putih bergaris merah. Ang Pao bermakna keselamatan, kesejahteraan dan melimpahkan rezeki bagi penerimanya. Mereka juga membakar daun

wajen dan fir di halaman rumah dan melakukan sembahyang didepan altar keluarga. Esok harinya, mereka membakar petasan, dalam tradisi Cina dimaksudkan untuk mengusir pengaruh jahat dalam keluarga. Antarkeluarga satu keluarga dengan keluarga juga saling mengunjungi satu sama lainnya, untuk bersilaturahmi.

Sehingga, dalam merayakan Imlek, masyarakat keturunan Cina, penganut Kong Hu Chu, diharapkan dapat senantiasa terus meningkatkan tingkat spiritualitas keberagamaan individual dan keberagamaan-kolektif. Pentingnya kepedulian antarsesama diindikasikan dari kebiasaan mereka memberikan Ang Pao dan bersilaturahmi satu keluarga dengan keluarga lainnya, ketika merayakan Imlek. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan tingkat spiritualitas keberagamaan individual dapat dilihat pula dari praktek kegiatan ritual keagamaan dengan membakar wajen dan fir serta membakar petasan sebagai upaya menjauhi pengaruh jahat yang dapat menimpa keluarga Cina-Kong Hu Chu.

Bagi umat Islam, merayakan Idul Adha dapat difahami sebagai upaya meningkatkan tingkat keberagamaan (*spiritual-stages*) dan tingkat keberagamaan kolektif atau tingkat kepedulian sosial (*social stages*). Tingkat ketakwaan individual dan kolektif bertalian erat atas kewajiban umat Islam (yang mampu) untuk menaunahkan haji ke Mekkah Mukarromah. Setelah melaksanakan shalat Idul Adha, umat Islam melaksanakan kurban, ditandai dengan memotong binatang kurban, seperti sapi dan kambing. Kurban dapat dipandang sebagai refleksi dari symbol ketaatan, ketakwaan, dan kepatuhan umat Islam kepada Allah SWT—sebagaimana diteladani Nabi Ibrahim AS—yang sekaligus pula mengandung pengertian pentingnya meningkatkan tingkat spiritualitas-ketakwaan dan kepedulian sosial antarumat seagama dan umat agama lainnya. Setelah binatang kurban dan menjadi potongan daging, selanjutnya potongan daging tersebut dibagikan kepada pihak yang berhak menerimanya, terutama para fakir-miskin, janda-janda, dan jumbo-jumbo. Rangkaian kegiatan keagamaan, sejak dari menaunahkan haji, shalat Idul Adha, pemotongan binatang kurban, merupakan symbol kepatuhan umat Islam terhadap perintah-Nya, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas spiritualitas-ketakwaan umat Islam keseluruhan.

Imlek dan Idul Adha sama-sama memperhatikan pentingnya meningkatkan kualitas keberagamaan atau ketakwaan umatnya, baik

dalam pengertian kerberagamaan individual maupun kolektif, dalam upaya menuju tingkat kesempurnaan. Individu umat beragama yang menjalankan perintah ajaran agamanya dan dapat mencerna pesan-pesan ajaran agamanya dengan baik, diyakini dapat mencapai tingkat kesempurnaan tersebut. Dalam keadaan ini pula, agama dapat dipandang telah berperanan dan berfungsi dengan baik, yang dikatakan Merton, agama berperanan sebagai pengintegrasikan, pemelihara dan menstabilkan.

Tetapi, dalam tataran aktualitas-aplikatif mesti diakui pula, agama kerap kali berperanan optimal. Kenyataan kehidupan bermasyarakat menunjukkan bahwa terjadinya kesenjangan antara konsep-normatif ajaran agama dan aplikasinya. Ajaran agama-agama secara normatif, dipastikan tidak pernah menganjurkan umatnya untuk berkelahi, membunuh, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mengeksploitasi dan membenci misalnya, tetapi, dalam kenyataan kehidupan tidak jarang memperlihatkan sebaliknya. Katakanlah misalnya, konflik antaragama di Irlandia (Katolik-Protestan), Palestina (Yahudi-Islam), atau Maluku (Islam-Kristen), Kasmir (Hindu-Islam), Sambas (Madura/Islam-Dayak), merupakan sekelumit umpama dari sekian banyak kasus kehidupan beragama yang menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normative ajaran agama-agama dan aktualisasinya. Ironisnya, kenyataan memperlihatkan pula, kepentingan politik dan ekonomi sering kali menyeretkan etnis dan agama ke arena konflik, meskipun setiap ajaran normatif agama-agama tidak pernah merestuinnya.

Ketika umat beragama memperlihatkan suatu keadaan konflik—prilaku kontraproduktif anjuran agama-agama—agama belum berperanan fungsional. Umat beragama memang masih rajin ke tempat ibadah (masjid, gereja, wihara, dan kelenteng), tetapi paralel dengan pula dengan itu kekerasan dan berbagai prilaku amoral dalam berbagai bentuknya masih terus terjadi ditengah masyarakat. Ketika demikian yang tampak, meminjam istilah Merton, agama-agama dipandang belum berperanan fungsional dan bahkan dapat berpotensi menceraikan, yang ditandai dengan adanya kecenderungan rentannya terhadap potensi konflik. Lebih rentan lagi terjadinya konflik, jika suatu umat beragama dari etnis tertentu secara factual dipandang kelompok yang mendominasi sektor ekonomi (*superordinate*) dan umat agama lainnya berada pada pihak yang lemah (*subordinate*) pada sektor bekonomi tersebut.

Kendatipun pandangan demikian klasik sifatnya, perhatian terhadap ketimpangan sosial-ekonomi ditengah masyarakat bukanlah tidak penting. Berbagai kasus kerusuhan sosial bernuansa etnsi di tanah air, antara masyarakat pribumi dan keturunan Cina misalnya, baik sebelum maupun pasca kemerdekaan, merupakan kenyataan yang tak terbantahkan bahwa eratny hubungan antara ketimpangan sosial dan ekonomi dalam perspektif etnis dan agama dianut anggotanya, yang ditabukan pada masa rezim masa lalu tetap menjadi permasalahan penting terhadap terjaganya hubungan antaretnis atau antaragama di tanah air.

Kenyataan kehidupan berbangsa yang riskan akan konflik akibat adanya ketimpangan sosial dan ekonomi, semakin kuatnya relevansi nilai-nilai Imlek dan Idul Adha sebagai upaya masyarakat beragama untuk mengatasi berbagai krisis. Jika nilai-nilai Imlek dan Idul Adha dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari umat beragama, apapun kedudukan dan peranannya, agama dapat berperanan positif terhadap membantu memecahkan berbagai permasalahan di masyarakat.

Puasa dan Pemberdayaan Umat⁵⁵

Perintah berpuasa merupakan kewajiban bagi setiap muslim beriman, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 183. Dalam ayat ini, dapat diambil makna penting bahwa berpuasa itu wajib bagi setiap muslim beriman dalam upaya menuju ketakwaan (*muttaqien*). Hal ini berarti bahwa hidup ini harus dimulai dengan iman dan diakhiri dengan ketakwaan. Seorang yang bertakwa bertanda bahwa dalam kehidupan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjauhi segala larangannya.

Semakin tinggi kesadaran umat Islam atas pentingnya menjalankan ibadah puasa dengan benar dan ikhlas karena ibadah, diharapkan berdampak positif terhadap perbaikan tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Disini, puasa idealnya dapat membawa dampak positif terhadap intrinsik dan ekstrinsik pribadi pelakuknya dan pada akhirnya diharapkan dapat berdampak positif pula terhadap perbaikan tatanan kehidupan berbangsa.

⁵⁵ Tulisan penulis yang berjudul 'Hikmah Ramadhan: Puasa dan Pemberdayaan Umat' dipublikasi dalam *Media Sumatera*, 30 Oktober 2003.

Ketika bangsa kita menghadapi krisis berkepanjangan sejak 1998 seakan mendorong kita (umat Islam) untuk berfikir kembali terhadap makna dan implikasi puasa yang telah kita lakukan selama ini. Secara konseptual tidak perlu diragukan tentang manfaat puasa bagi kehidupan, karena dengan berpuasa yang benar akan membimbing umat (Islam) yang mampu untuk melakukan introspeksi diri atas kesalahan dan dosa dilakukan pada masa lalu ataupun upaya untuk membendung nafsu keserakahan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Hal ini sejalan dengan tujuan puasa yakni agar dapat membimbing umatnya mencegah perbuatan tercela (*munkar*) dan mendekatkan diri dengan perbuatan kebajikan (*ma'ruf*).

Seorang muslim beriman dan bertakwa berindikasi dengan kuatnya konsistensi hubungan antara niat (*hati nurani*, *qalbu*), pikiran (*rasio*, *aql*) dan tindakan (*'amal*) seorang individu muslim. Semakin tinggi tingkat kesenjangan (*gap*) antara ketiga pilar itu semakin bertanda semakin tidak fungsionalnya ibadah puasa itu bagi seorang muslim. Tetapi, harus diakui bahwa hubungan antara cita-cita (konseptual) dengan kenyataan tidak selalu sejalan, bahkan sering pula terjadi saling kesenjangan. Kasus berbangsa yang dialami negara Islam seperti di Palestina (konflik dengan Israel), Irak (invasi AS), dan Indonesia (krisis berkepanjangan telah mengancam proses disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa) semakin mengingatkan kita (umat Islam) bahwa antara konseptual dan realitas itu sering pula bertolak belakang.

Bagi bangsa Indonesia, keterpurukan berkepanjangan sejak 1998, telah berakibat buruk terhadap kehidupan umat Islam dan umat beragama lainnya. Kita menyadari bahwa mayoritas penduduk bangsa ini beragama Islam, bahkan bangsa ini didirikan sebagian besar atas perjuangan dan peran umat Islam yang melawan dan mengusir bangsa kolonial. Tetapi harus diakui bahwa selama 38 tahun mengisi kemerdekaan bangsa ini belum mengalami kemerdekaan dalam makna sebenarnya, misalnya masih banyak penduduk miskin (sekitar 40 juta), ancaman keamanan, banjir, kekeringan, asap, konflik sosial-komunal dan agama, serta indikasi ancaman disintegrasi sosial.

Era reformasi juga ternyata belum mampu membawa bangsa ini keluar dari berbagai krisis bahkan cenderung memburuk. Belum lama ini, bangsa ini memperoleh predikat bangsa terkorup ketiga di

dunia. Hal ini tidak hanya mengusik harga diri bangsa mayoritas muslim di dunia ini yang dipandang kurang bermartabat tetapi juga lebih dari itu, hal ini umat Islam di negeri ini, belum menunjukkan kiprah dan perannya seperti seharusnya. Keterpurukan bangsa ini keterkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia umat Islam negeri ini yang cenderung masih marginal akibat belum optimalnya pengelolaan bangsa ini yang kaya akan sumber daya alam (*natural-resources*) tetapi sumber daya manusianya (*human-resources*) yang belum produktif-berkualitas. Karena itu, agaknya bangsa ini belum siap belum siap memasuki suatu bangsa modern dengan tetap menjaga identitas religiusnya, seperti bangsa Jepang—maju teknologi tetapi nilai-nilai agama Shinto tetap penting dalam perilaku bangsa Jepang umumnya.

Hal ini dapat dilihat semakin tampaknya degradasi dan disorientasi moralitas umat beragama di negeri ini. Sudah tidak asing lagi bahwa melalui media massa umat beragama sering menjadi umat yang tidak toleran, terjebak fitnah dan tidak adil dalam mencapai tujuan kehidupannya. Padahal, ditengah bangsa yang sedang terpuruk ini dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya pintar dan cerdas tetapi juga mengedepankan moralitas dan akhlak yang akhir-akhir ini dirasakan terus melemah.

Di Bali, baru-baru ini, pengikut partai tertentu berhantaman dengan pengikut partai lainnya yang menyebabkan dua orang tewas. Sama halnya, berbagai konflik di daerah, seperti Maluku dan Poso, baru-baru ini semakin menunjukkan bahwa bangsa ini yang mayoritas penduduk muslim terkesan belum mengurus bangsa dan masyarakatnya dengan baik. Berbagai media massa mengungkapkan bahwa tingkat kriminalitas di negeri ini berada diatas taraf kewajaran.

Kenyataan internal bangsa yang demikian sudah barang tentu dapat melemahkan posisi tawar bangsa ini terhadap dunia luar. Isu terorisme misalnya, yang terkesan ditujukan kepada umat Islam sekaligus telah merugikan umat Islam di tanah air. Banyak tafsiran npolitik terhadap isu terorisme bahwa hal itu hanya dominasi negara maju terhadap Negara Islam yang sebenarnya bertalian erat dengan kepentingan kapitalisme dunia. Karena banyaknya permasalahan berbangsa dan lemahnya kiprah elit politik (eksekutif dan legeslatif), isu terorisme memang hanya akan merugikan umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Misalnya, bagaimana AS

menawarkan bantuan US\$ 1 triliun untuk pembenahan pesantren yang dikatakan sebagai sarang teroris yang telah menimbulkan reaksi beragam dari berbagai pihak dalam negeri.

Segelintir permasalahan berbangsa itu sebetulnya bertanda bahwa pemberdayaan umat beragama terutama umat Islam yang mayoritas di tanah air belum optimal. Maka, seharusnya, hal itu agak perlu dipandang sebagai agenda terpenting dalam proses pembangunan ke depan—sebagaimana diinginkan dari tujuan pembangunan nasional yang mengedepan sains-teknologi dan sains-agama yang termaktub dalam UUD 1945 dan Pancasila. Nilai ibadah puasa berdampak fungsional apabila dalam diri pribadi muslim tidak hanya memahami secara konseptual tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi, apabila antara niat, ucapan, dan perilaku tampak konsisten. Jika hal ini terus menjadi kebutuhan tidak mustahil akan menjadi kenyataan dalam kehidupan umat Islam dan pemberdayaan umat Islam dan umat lainnya yang tidak hanya sekedar seremonial dan rutinitas-praktis keagamaan.

Idul Fitri 1430 H dan Ketakwaan Umat⁵⁶

Menyambut Lebaran Idul Fitri 1430 H, sejak tadi malam seluruh umat Islam (di lereng-lereng gunung, di desa-desa, di kota-kota, dan dimana saja) mengumandangkan *takbir*, *tahlil*, dan *tahmid*. Dengan *tahlil* (*La Ilaha Illa Allah*) mempunyai pemahaman bahwa hanya Allah SWT yang patut disembah. Dengan *tahmid* (*Walillah Al Hamid*) menunjukkan suatu pemahaman pula bahwa hanya kepada Allah SWT umat Islam Menganjakan puji dan puja.

Merayakan Idul Fitri menandakan selesai sudah umat Islam menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan 2009 M /1430 H suatu ibadah yang bertujuan agar umat Islam menjadi unta yang bertakwa (*Muttaqien*) menuju ummat yang sempurna (*al insane al kamil*). Apabila seorang muslim menunaikan ibadah puasa yang didasarkan niat *ikhlas* dan dengan mematuhi aturan-aturan pelaksanaannya, maka yang bersangkutan, *Insyaa Allah*, akan memperoleh “predikat” sebagai seorang muslim yang bertakwa (*Muttaqien*). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 183

⁵⁶ Materi Khotbah berjudul: “Idul Fitri dan Ketakwaan Umat” disampaikan penulis di Masjid Darul Aqabah, PT. Pupuk Sriwijaya, pada Idul Fitri 1430H/2009 M.

"Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar menjadi orang yang bertaqwa".

Pada pagi hari yang bahagia ini, umat Islam senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, karena kita (umat Islam) seantero dunia telah dianugerahi nikmat, yakni berupa kegembiraan. Kegembiraan itu disebabkan paling tidak oleh dua hal penting. *Pertama*, gembira karena umat Islam telah menyelesaikan ibadah puasa selama sebulan. *Kedua*, gembira karena umat Islam memiliki harapan besar akan adanya ampunan dosa-dosa dari Allah SWT – karena mereka telah melaksanakan ibadah puasa atas dasar iman dan takwa selama sebulan penuh.

Selanjutnya bagi umat Islam, merayakan lebaran Idul Fitri mengandung dua dimensi pokok, *Pertama*, dimensi kesalehan spiritual-personal. Dimensi ini bertalian dengan aktivitas pribadi muslim dalam meningkatkan hubungan dengan Allah SWT (*hablumminallah*). Pada bulan puasa sangat dianjurkan untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan peningkatan spiritual-keagamaan, antara lain: *Shalat Sunnat, Dzikir, Tadarus Al-Qur'an, Zakat, dan Sadaqah, dll.* Selama bulan puasa. Dengan demikian, hakikat puasa pada dasarnya adalah "pendakian spiritual" agar seorang muslim menjadi dekat dengan Allah SWT, menjadi seorang muslim yang memiliki tingkat spiritual yang memadai (*spiritual man*), yang dalam khazanah ke-Islaman menjadi umat yang sempurna (*al-insan al-kamil*). Proses menuju *al-insan al-kamil* adalah proses pendakian atau kenaikan spiritual yang alami seorang muslim dari eksistensi "biasa" menuju eksistensi "spiritual".

Umat muslim yang menunaikan ibadah puasa, harus selalu meningkatkan harkat kemanusiaannya dari tingkatan biasa (*aesthetic stage*) sampai tingkat religious (*religious stage*) atau tingkat nafsul mumainnah, yakni jiwa yang damai dan tenang sesuai *khazanah Al-Qur'an*. Itulah sebabnya, dari aspek kebahasaan, puasa bermakna menahan diri dari: Nafsu makan, nafsu seks, nafsu jahat, nafsu kuasa, memfitnah, menggunjing, dan sejenis amarah nafsu lainnya. Nabi SAW pernah bersabda bahwa berpuasa merupakan perjuangan melawan nafsu yang keadaanya lebih berat dari perang di medan lapangan.

Setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadhan diikuti dengan menunaikan zakat fitrah, kemudian dengan merayakan Idul Fitri, kita umat muslim diharapkan akan kembali menjadi suci (*fitriah*). Harapan akan kesucian (*fitriah*) tersebut dikarenakan, selama sebulan penuh pada bulan Ramadhan telah dilatih untuk menahan nafsu-nafsu yang destruktif dan berupaya meningkatkan "pendakian" spiritual. Aturan-aturan (tata cara) berpuasa yang dipatuhinya (selama berpuasa) diharapkan dapat memahami perbedaan mana yang benar (*haq*) dan mana yang salah (*bathil*); apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan selama menunaikan ibadah puasa agar menjadi umat yang *muttaqien*. Akan tetapi derajat *muttaqien* hanya akan dapat dicapai bila "proses" pencapaiannya mengikuti aturan-aturan (puasa) yang sudah ada, yakni dimulai dengan niat dan diikuti dengan kepatuhan akan aturan-aturan mengenai anjuran dan larangan selama berpuasa yang tertuang dalam ajaran Islam (Al-Qur'an dan Al Hadist).

Nabi SAW bersabda :

"Siapa saja yang berpuasa dalam bulan Ramadhan dengan keimanan dan keikhlasan (kesadaran) yang penuh, akan diampuni segala dosanya yang lalu (Al-Hadist).

Urgensinya niat dan kepatuhan akan aturan-aturan dalam menunaikan ibadah puasa Ramadhan tidak dapat diabaikan. Ummat Islam senantiasa didorong untuk terus memupuk dan mengedepankan niat dalam setiap tindakan terlebih ketika menunaikan ibadah puasa, dan diharapkan adanya tindak lanjut (*follow up*) setelah Idul Fitri, sebelas bulan tahun berikutnya. Artinya, apapun kegiatan yang akan dilakukan oleh umat Islam kiranya senantiasa mengedepankan niat (suara hati nurani) yang tulus sehingga kualitas dari suatu kegiatan (pekerjaan) tadi menjadi lebih baik dan memiliki nilai fungsional. Kesenjangan (*gap*) akan terjadi bila terjadi inkonsistensi hubungan niat dan aplikasi aturan-aturan yang ada selama menunaikan ibadah puasa. Sehingga, ibadah puasa seharusnya dapat menjadikan umat Islam *muttaqien* dari senantiasa mampu memelihara ke-*muttaqien-an* itu ditengah dinamika kehidupan dan perubahan sosial, apapun keadaanya.

Kedua, dimensi kesalehan sosial, yakni suatu dimensi yang berhubungan dengan perlunya tindak lanjut (*follow up*) dalam dimensi kedua ini bernuansa aplikatif-praktis. Pesan moral puasa

sebenarnya adalah agar seorang muslim menjadi respons terhadap realitas sosial. Bila dimensi pertama memfokuskan perlunya peningkatan akan pengalaman spiritual-keagamaan individu umat Islam, maka dimensi yang kedua perlunya tindak lanjut (follow up) dari dimensi teoritis dalam bentuk aksi positif. Peningkatan spiritualitas-keagamaan seorang muslim (misalnya melalui aktivitas peningkatan frekuensi shalat, infaq, sedaqah, wirid, tadarus Al-Qur'an, dll) pada prinsipnya memotivasi agar lebih respons terhadap apa yang terjadi pada realitas sosial kehidupannya.

Bagi seorang muslim melaksanakan ibadah puasa, menunaikan zakat fitrah, dan merayakan Idul Fitri merupakan upaya *intropeksi diri* guna menuju umat yang bertakwa. Kita umat Islam senantiasa diajak untuk *intropeksi diri* akan amal yang telah kita lakukan pada setahun sebelumnya. Karena "proses" menjadi seorang muslim yang *muttaqien* memerlukan adanya peningkatan ketaqwaan setahun sebelumnya. Dimensi sosial ini berhubungan erat dengan perilaku sosial umat Islam dengan umat Islam (maupun non-Islam) lainnya dengan "keragaman warnanya" – atas referensi ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadist). Allah SWT berfirman dalam surat al Maidah 2:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya".

Ketika bangsa kita dalam tahun-tahun terakhir ini masih dalam keadaan tidak stabil-sosial, budaya, ekonomi, dan politik, maka semakin hari masih tetap banyak umat (terutama umat Islam) menjadi kelompok yang membutuhkan (*the needy*), kalangan miskin. Sejumlah permasalahan sosial, konflik etnis, separatism, pengangguran, kemiskinan, perilaku amoral, dll, akhir-akhir ini tetap membebankan bangsa ini, dan sekaligus semakin menuntut kepedulian sosial kita umat Islam, terutama dari mereka yang mampu. Tanpa ada kepedulian sosial maka "amal ibadah kita umat Islam, semacam puasa, dipandang kurang *afdhol*, dan jauh dari adanya peningkatan ketaqwaan sesungguhnya.

Indikasi adanya peningkatan ketakwaan umat Islam sangat ditentukan oleh kolerasi antara kesalehan (*amalan*) spiritual dan kesalehan (*amalan*) sosial tersebut. Seorang muslim yang mengklaim dirinya bertakwa akan berupaya atas kesadaran dirinya (rasa

menyesal) untuk tidak melakukan kembali suatu kesalahan pada masa lalu baik dilakukan dengan sadar (*conscious*) maupun tidak sadar (*unconscious*); baik kesalahan terhadap Allah SWT (*habluminallah*), terhadap sesama manusia (*hablumminannas*), dan terhadap makhluk ciptaan lainnya di alam semesta ini (*hablumminal'alam*). Uraian diatas menunjukkan bahwa umat Islam yang bertakwa (*muttaqien*) mengisyaratkan pentingnya pemahaman makna kesalahan spiritual-personal dan kesalahan sosial dalam ruang lingkup tiga dimensi tersebut secara integral. Umat Islam diharapkan senantiasa dapat meningkatkan ketiga dimensi itu selama hayatnya.

Berbagai permasalahan, *krisis*, berbangsa, pada prinsipnya sangat erat hubungannya dengan perilaku umatnya. *Krisis* dapat bermakna suatu keadaan dapat bermakna suatu keadaan sulit yang dialami bangsa. Gejala krisis ekonomi, politik dan budaya pada suatu bangsa dapat berdampak dan melebar pada krisis berbangsa. Bahkan, dapat saja terjadi pada proses disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa.

Kita umat Islam, sebagai umat mayoritas di negeri tercinta ini, memiliki tanggung jawab besar dalam membawa bangsa ini agar menjadi bangsa yang terhindar dari multi-krisis, menuju suatu bangsa bermartabat dikemudian hari. Masa depan bangsa yang lebih cerah hanya akan terjadi apabila pelaku pembangunan dimandatkan kepada mereka (umat Islam) yang bertakwa.

Seorang muslim yang bertakwa (*muttaqien*) akan memiliki kekuatan iman sebagai control dari dalam (*innercontrol*) dalam menghadapi keberagaman tugas kekhilafahan di muka bumi apapun peran dan posisinya. Sejumlah kalangan berkeyakinan bahwa apapun bentuk kesulitan yang dialami bangsa akan "sembuh" bila para pelaku (*actor*) pembangunan merupakan mereka yang *muttaqien*. Seorang muslim yang *muttaqien*, insya Allah, tidak akan melakukan kepentingan diatas kepentingan orang banyak, apalagi melalui jalan yang tidak sah (*haram, illegal*) dalam pandangan ajaran agama.

Adanya keinginan pemerintah untuk terus menegakkan *good governance* dan *clean goverment* adalah suatu harapan yang didambakan semua pihak. Bangsa ini akan maju jika ulama, umara dan umat/masyarakat memiliki kesadaran tinggi akan arti pentingnya masa depan bangsa ini. Masa depan bangsa hanya akan terwujud jika kesalahan individual dan sosial umat memang tampak dalam

kehidupan nyata. Jika terjadi kesenjangan (*gab*) dan inkonsisten yang tajam antara kesalahan individual dan kesalahan sosial, agaknya hal itu menunjukkan bahwa kadar dan tingkat kesalahan itu masih memerlukan pembenahan dan re-koreksi. Dari Idul Fitri ke Idul Fitri, kita umat Islam telah terus melakukan re-koreksi diri agar kita menjadi hamba yang *muttaqien*.

Sebagai catatan akhir, bahwa puasa memiliki implikasi yang luas bagi kehidupan umat. Puasa yang dilakukan karena iman dan ikhlas akan meningkatkan tingkat (*stage*) spiritualitas-keagamaan kita umat muslim. Indikasinya, seorang muslim akan semakin membutuhkan petunjuk dan bimbingan-Nya dengan dasar niat karena iman dan cita-cita akan takwa sebagaimana tujuan final dari puasa Ramadhan.

Proses menuju *muttaqien* atau *al insan al kamil*- yang menjadi cita-cita umat Islam yang beriman – hanya akan dapat dicapai apabila kesalahan spiritual dan kesalahan sosial dikembangkan secara maksimal pada diri kita umat Islam. Puncak dari ibadah puasa merupakan suatu momentum yang tepat untuk re-koreksi tingkat ketakwaan kita umat Islam menuju masa depan yang lebih baik. Dengan modal iman dan takwa, kita umat Islam hendaknya seoptimal mungkin dapat menjalankan fungsi kekhalifahannya sebagaimana diharapkan Sang Khalik, Allah SWT.

Idul Adha 1434 H dan Keteladanan Ibrahim AS⁵⁷

Ungkapan *takbir* bergema di seluruh penjuru dunia, seiring dengan terbenamnya matahari kemarin petang, menandai berakhirnya hari Arafah, 9 zulhijjah. Seluruh umat Islam seantero dunia pun kembali serentak mengagungkan kebesaran Sang Khalik sebagai pertanda pengakuan atas kelemahan dihadapkan Allah SWT.

Pada Pagi hari ini, Selasa, 15 Oktober 2013 bertepatan dengan 10 zulhijjah 1434H, seluruh umat Islam mengumandangkan *takbir*, *tahlil*, dan *tahmid*. Dengan *takbir* (*Allahu Akbar*), seakan menyadarkan kita sebagai umat Islam bahwa kekuasaan Allah SWT sangat besar dan tidak dapat ditandingi oleh hamba-Nya. Dengan *tahlil*, (*La ilaha Illha Allah*), bermakna bahwa hanya Allah SWT yang pantas disembah. Dengan *tahmid* (*Walillah Al Hamdu*) menunjukkan

⁵⁷ Materi Khutbah disampaikan pada Idul Adha 1434 H di Lapangan Rumah Dinas Bupati Banyu Asin, Sekayu, 15 Oktober 2013.

suatu pemahaman pula bahwa hanya kepada Allah SWT umat Islam memanjatkan puji dan puja.

Pada Khotbah Idul Adha ini, kita umat Islam berharap kiranya dapat menyempurnakan ibadah shalat Idul Adha 1434 H kita dengan senantiasa mengingatkan kembali nilai-nilai historis-religius atas peristiwa bersejarah sebagai tauladan Nabi Ibrahim AS dan keluarganya, sebagai perbaikan kehidupankita yang lebih baik pada masa kini dan akan datang.

Idul Adha dikenal juga sebagai Hari Raya Haji. Ini berkaitan dengan masa lalu, pada zaman Nabi Ibrahim AS, yang mendapat perintah dari Allah SWT untuk mengumandangkan kewajiban haji bagi umat Islam jika memiliki kemampuan.

Kemudian umat Islam menyambut seruan itu dengan ungkapan *labbaikalla humma labaik* (kami sambut panggilanmu ya Allah). Saat ini jutaan jama'ah haji sedang berkumpul di Mina untuk melontar jumrah. Sehari sebelumnya mereka telah melaksanakan wukuf di Arafah, yang merupakan puncak ibadah haji.

Islam menjadikan haji sebagai salah satu rukunnya setelah mengucapkan syahadat, menunaikan shalat, puasa, dan zakat. Dalam manasik haji banyak hikmah yang bisa direnungkan oleh para jama'ah haji yang berada di tanah suci, calon jama'ah haji yang ada di tanah air, serta semua yang hadir saat ini. Pakaian ihram yang serba putih adalah simbol kesetaraan manusia di hadapan Allah SWT, setinggi apapun status sosial yang disandanginya serta sebesar apapun kekuasaan dan harta kekayaan yang diakui sebagai miliknya.

Untuk itu, patut kiranya diungkapkan tentang beberapa hal yang harus diketahui tentang haji:

Pertama, thawaf (mengelilingi ka'bah) adalah simbol kesinambungan gerakan makhluk dalam mengarungi kehidupan di dunia yang bersifat sementara, serta kehidupan akhir yang abadi.

Kedua, sa'i (berlari kecil dari Marwah ke bukit Shafa) adalah simbol perbedaan antara usaha manusia di satu pihak diperankan oleh Siti Hajar dalam mencari air untuk Ismail AS, dengan perkenan dan kekuasaan Allah SWT telah memperlihatkan adanya sumber Air Zam-Zam di dekat kaki Ismail, anak Nabi Ibrahim AS.

Ketiga, wukuf di Arafah memberikan pelajaran penting bagi kita umat Islam, bahwa kelak seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, dikumpulkan ke padang mahsyar, suatu padang yang luas dimana umat-Nya menunggu pengadilan Allah SWT sang hakim yang utama.

Keempat, melontar Jumrah adalah pelajaran penting dari perlawanan keluarga Nabi Ibrahim AS dan Siti Hajar serta Ismail terhadap godaan iblis untuk menggagalkan kewajiban melaksanakan penyembelihan kurban.

Idul Adha juga dikenal dengan Hari Raya Kurban. Sepulangnya kita dari masjid ini nanti, insyaallah, kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban berupa kambing dan sapi. Kemudian sebagian besar dari daging dan tulangnya di bagikan kepada faqir miskin dan yang memerlukan. Pelaksanaan kurban ini merupakan kewajiban seluruh umat islam yang mampu, termasuk jamaah haji.

Kewajiban kurban juga tidak terlepas dari peristiwa zaman Nabi Ibrahim AS, yang menerima perintah untuk menyembelih anaknya yang baru beranjak dewasa yaitu Ismail. Sebelum melaksanakan perintah tersebut Ibrahim AS meminta pendapat sang anak terlebih dahulu. Ismail pun menampilkan ketaatan sejati kepada orang tuanya dengan menerima dan menudukung ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Dalam al-Qur'an disebutkan Surat Syaffat Ayat 102 sebagai berikut:

"Maka tatkala anak itu sampai pada umurnya dan berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: hai anakku se sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu! Ia menjawab: hai bapakku, kerjakanlah apa yang di perintahkan kepadamu, insyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. (Q.S. As-Syaffat : 102)

Kunci keberhasilan Ibrahim AS adalah pada keyakinannya yang total pada nilai-nilai tauhid dan ketegaran. Kesabaran serta kemauan kerasnya untuk memahami dan menghayati serta mengamalkan dan menyebarluaskan nilai-nilai ketauhidan tersebut. Demi mempertahankan kalimat *lailaha illa Allah*, Nabi Ibrahim AS rela dibakar hidup-hidup, bersedia diusir dari tanah airnya, rela dipindahkan ke tanah gersang yang tak memberikan kehidupan, dan rela dan ikhlas menyembelih putranya semata wayang Ismail AS.

Karena maksud dari penyembelihan Ismail hanyalah untuk menguji keimanan Ibrahim AS dan keluarganya, maka setelah perintah tersebut dilaksanakannya dengan sepenuh hati oleh ayah dan anak Allah SWT dengan kekuasaannya menghalangi penyembelihan tersebut dan menggantikannya dengan domba. Inilah peristiwa yang kemudian disimbolkan dengan ibadah tahunan kaum muslimin dalam bentuk penyembelihan hewan kurban yang dikenal dengan Hari Raya Idul Adha.

Dari peristiwa tersebut agaknya semakin jarang dilakukan oleh sebagian orang tua zaman modern ini untuk mendengarkan pendapat anaknya, akibat urusan duniawi sering kali menyibukkan mereka. Sehingga, bukannya suatu gambaran hubungan anak dan ayah sebaik itu yang kita saksikan, tapi terkadang terjadinya justru kekerasan antarkeduanya. Dari berita media massa, kita juga menyaksikan betapa teganya seorang anak membunuh orang tuanya. Ada pula berita, seorang ibu membuang anaknya yang masih bayi. Selain itu, diberitakan seorang ayah dengan tega telah memperkosa anak perempuan kandungnya, serta banyak lagi berbagai bentuk kebiadaban lainnya.

Disisi lain, media masa terkesan senang sekali mengeksposnya berbagai kasus tersebut secara vulgar, lantaran berita macam itu sangat diminati oleh pasar dan memiliki motif ekonomis. Dikatakan juga, pemimpin baik eksekutif maupun legislatif terkesan kurang peduli dan kurang bersemangat mendengarkan aspirasi rakyat. Persaudaraan, persatuan dan kasih sayanglah yang menjadikan bangsa kita Indonesia damai dan perekat tanpa terhalang perbedaan suku, bahasa, bangsa, apalagi bagi yang bertalian darah dan aqidah maka kasih sayang akan menjadi pengikat yang teguh bagi persaudaraan. Karenanya, kita patut belajar dan memulai memupuk jalinan kasih sayang dari dalam rumah tangga dan keluarga kita.

Penyembelihan hewan kurban, merupakan ibadah, saat ini kewajiban baru dapat terlaksana jika terkumpul uang dalam jumlah jutaan untuk seekor kambing dan seekor sapi. Dengan uang sejumlah itu di butuhkan tekad yang kuat dan niat yang luas untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban.

Dalam memaknai kurban seperti juga haji bisa beragam dan akan terus berkembang, bahkan tidak mustahil akan bergeser hingga

menjauhkannya dari makna positif, jika haji pada masa lalu, menjadi ajang saling mengenal antar bangsa saling berinteraksi dan belajar. Kini haji menjadi eksklusif dan menjadi status sosial yang dijadikan kebanggaan. Pelaksanaan kurban pun kerap menjadi konflik kepentingan, baik di dalam kepanitiaan maupun di antara penerima sebagai lembaga maupun pribadi, yang terkadang agak jauh dari tujuan yang sebenarnya.

Inilah hikmah terbesar dari peringatan hari besar Idul Qurban yang sedang diperingati hari ini, bukan hanya untuk memperingati peristiwa sejarah kemanusiaan itu saja, namun juga untuk membangkitkan semangat dan kesadaran dalam jiwa kita, dimana setiap pribadi Muslim harus siap berkorban untuk kebahagiaannya sendiri. Setiap kita harus siap menyongsong keberhasilan dan peningkatan hidup dengan perjuangan dan pengorbanan. Dimulai dari diri sendiri untuk tidak berpangku tangan saja dan bermalas-malasan. Suatu tindakan tidak meningkat dengan mengkambinghitamkan nasib dan takdir. Padahal nasib dan takdir itu harus dimulai dari diri sendiri, "siapa *beramal sholeh maka itu untuk dirinya sendiri*". Maksudnya, barangsiapa menanam kebaikan maka akan menuai kebajikan dan barangsiapa menanam kemalasan akan menuai kehancuran, itu berlaku untuk diri sendiri bukan untuk orang lain. Itulah *sunnahtullah* yang tidak ada perubahan untuk selama-lamanya. Yang dimaksud menanam itu adalah siap melaksanakan perjuangan dan pengorbanan terlebih dahulu setelah itu baru orang boleh bersenang-senang. "*Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian*".

Alangkah indahnyanya kehidupan jika dihiasi sifat dan sikap kasih sayang alangkah mesranya pergaulan bila dirangkai dengan tali kasih sayang. Damainya umat ini jika disiram dengan curahan hati penuh kasih sayang. Kiranya kita dapat memelihara benih kasih sayang antarsesama, kita tabur bibit kasih sayang dalam kehidupan dan pergaulan.

Semoga kita termasuk orang yang beruntung, orang yang mampu mengambil pelajaran dari setiap kejadian, sehingga menjadi orang yang selalu mendapat hidayah dan pertolongan dari-Nya, sejak di dunia, di alam barzah dan hari akhirat, dalam keadaan husnul khotimah dan ridho Allah SWT di surga. *Amiin Allhumma Amiin.*

Agama dan Pemimpin:

Perspektif Sosiologi Agama tentang Pemimpin dalam Islam⁵⁹

Dalam suatu masyarakat, selalu ada pemisahan antara kalangan yang berlatar belakang status sosial yang tinggi dengan status sosial rendah/bawah. Demikian halnya dengan pengelompokan antara rakyat (*massa*, umat) dengan *elite* (pemimpin). Dalam masyarakat primitif, mereka yang disebut pemimpin dengan analogi dengan sejumlah kelebihan lainnya. Kelebihan itu dapat saja terletak pada kemampuan pribadinya dalam mengorganisir umat atau keberanian dalam berhadapan dengan 'musuh-musuh' dari luar komunitasnya. Jadi, setiap masyarakat, ukuran atau parameter yang digunakan dapat beragam. Untuk suatu masyarakat perkotaan umpamanya, pemimpin lebih dinilai dalam parameter-parameter rasional, seperti kemampuan mengorganisir umat, mengarahkan, dan membimbing umatnya.

Tetapi, jika ditelusuri lebih jauh, dalam fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan berbangsa saat ini, peranan elite-pemimpin sangat strategis dalam proses pembangunan. Maju dan mundurnya suatu komunitas, masyarakat, dan bangsa ini ke depan sangat ditentukan sejauhmana peranan *elite*/kepemimpinan seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin. Dari perspektif sosiologis, seorang menduduki posisi jabatan tertentu dalam beragam struktur birokrasi sering kali disebut pemimpin. Agaknya hal itu, terlalu menyederhanakan. Secara formal, bisa saja seorang diangkat menjadi pemimpin, pejabat birokrasi, pejabat politis, tetapi secara substantif, belum tentu sesungguhnya merupakan pemimpin. Karenanya, dalam tulisan ini, akan diungkapkan tentang perspektif sosiologi agama tentang *elite*/pemimpin dalam Islam?

Makna Elite-Pemimpin

Dalam sosiologi, istilah *elite* lazim didefinisikan sebagai anggota suatu kelompok kecil dalam masyarakat yang tergolong disegani, dihormati, kaya (materi-ekonomi) serta berkuasa. Kelompok *elite* adalah kelompok minoritas superior yang posisinya berada puncak strata, memiliki kemampuan mengendalikan kegiatan ekonomi dan politik, serta sangat dominan mempengaruhi proses pengambilan keputusan-keputusan strategis dan penting. Itulah sebabnya dalam

⁵⁹ Paper sebagai revisi makalah yang dipresentasikan pada Wisuda Sarjana S1 dan S2 (MAP) STISIPOL Candradimuka Palembang, Hotel Arya Duta, Palembang, 8 Juli 2013.

banyak hal kelompok *elite* tidak hanya diposisikan sebagai pemberi legitimasi, akan tetapi lebih dari itu, mereka merupakan panutan sikap dan acuan pelbagai tindakan, dan oleh masyarakat diharapkan dapat berbuat nyata untuk kepentingan bersama. Sementara itu, kelompok lain yang dikuasai dan didominasi oleh kelompok *elite* dinamakan *massa*. Mereka adalah mayoritas inferior, yang posisinya dalam stratifikasi masyarakat berada dibawah, tidak memiliki kemampuan kuat untuk mengendalikan kegiatan ekonomi dan politik serta dalam proses pengambilan keputusan penting.⁵⁹

Dari perspektif sosiologi, agama diartikan sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal. Dalam arti, bahwa semua masyarakat memiliki cara-cara berfikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut agama (*religious*). Sejumlah hal yang berhubungan dengan 'judul' agama, termasuk dalam superstruktur: agama terdiri atas tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan, dan nilai-nilai spesifik dimana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka. Akan tetapi, karena agama juga mengandung komponen ritual, maka sebagian agama tergolong juga dalam struktur sosial.⁶⁰

Studi tentang kepemimpinan (*elite*), telah dilakukan dalam beragam perspektif disiplin ilmu. Dari perspektif sosiologi, *elite* (pemimpin) pada dasarnya merupakan fenomena yang lahir dari

⁵⁹ Sunyoto Usman, 'Elite dan Masyarakat', *Bahan Kuliah Sosiologi Program Doktor Sosiologi, FISIPOL, Universitas Gdjah Mada, Jogjakarta, 2005, hlm. 1.*

⁶⁰ Para ilmuwan sosial menghadapi banyak kesulitan dalam merumuskan agama dengan tepat. Masalah pokok dalam mencapai suatu definisi yang baik ialah dalam menentukan dimana batasan gejala itu harus ditempatkan. Roland Robertson (1970) membagi dua jenis utama definisi agama yang diusulkan ilmuwan sosial: *inklusif* dan *eksklusif*. Definisi *inklusif* merumuskan agama dalam arti seluas mungkin yang memandangnya sebagai setiap sistem kepercayaan dan ritual yang diresapi dengan 'kesucian' atau diorientasikan kepada 'penderitaan manusia yang abadi'. Mereka yang menyukai pandangan *inklusif*, memandang agama sebagai bukan saja sistem-sistem yang seistik yang diorganisasi sekitar konsep kekuatan supernatural, tetapi juga berbagai sistem kepercayaan nonseistik, seperti komunisme, nasionalisme, dan humanisme. Sementara itu, definisi *eksklusif*, membatasi istilah agama itu pada sistem-sistem kepercayaan yang mempostulatkan eksistensi makhluk, kekuasaan, atau kekuatan supernatural. Sistem-sistem kepercayaan seperti komunisme atau humanisme, karena tidak mencakup suatu dunia supernatural, secara otomatis dikeluarkan, meskipun mungkin diterima bahwa sistem-sistem kepercayaan nonteistik demikian itu memiliki elemen-elemen yang sama dengan sistem-sistem keagamaan. Salah satu contoh definisi *inklusif*, seperti diungkapkan Durkheim bahwa 'agama ialah suatu sistem kepercayaan yang disatukan oleh praktek yang bertalian dengan hal-hal suci, yakni hal-hal yang dibolehkan dan dilarang-kepercayaan dan praktek-praktek yang memersatukan suatu komunitas moral yang dinamakan gereja, semua mereka yang terpaut satu sama lain. Lihat: (Ishornudin, *Pengantar Sosiologi Agama*, Kerjasama Penerbit Ghalia Indonesia dan UMM Press, 2002, 29-30).

konstruksi sosial-budaya yang dapat membedakan antarindividu dan antarkomunitas berbeda. Pembicaraan mengenai pemimpin, karenanya, bertalian dengan banyak kalangan, karena berhubungan persoalan kekuasaan dan jabatan, dimana pemimpin sering muncul dan berkembang dari masyarakat sendiri. Mills, sosiolog, mengungkapkan bahwa *elite* merupakan mereka yang menduduki posisi atas dalam institusi ekonomi, militer dan politik yang membentuk *elite* kekuasaan yang terintegrasi dimana keputusan-keputusan pentingnya menentukan struktur dasar dan arah masyarakat. Mills selanjutnya mengungkapkan bahwa *elite* kekuasaan bukanlah suatu klik yang tertutup dan statis dengan seperangkat kebijaksanaan yang terpadu.⁶¹

Dalam setiap komunitas, kehadiran seorang *elite* merupakan sebuah kebutuhan, karena setiap warga masyarakat, *massa*, membutuhkan seorang *elite*. Kebutuhan seorang *elite* itu, sebagai panutan dan tauladan bagi mereka dalam proses penciptaan keteraturan dan pola interaksi dalam komunitasnya. Suzanne Killer mengatakan bahwa kepemimpinan sosial merupakan salah satu kekuatan yang menyangga masyarakat yang teratur.⁶² Kehadiran seorang *elite* diharapkan dapat mempertahankan kehidupan sosial, politik, agama, ekonomi dan budaya. Kehadiran *elite* juga diharapkan dapat mencegah ekspansi pihak luar dalam komunitas itu, yang dapat mengancam keutuhan kelompok.

Studi korelasi yang dilakukan para ahli sosiologi terhadap makna kepemimpinan telah melahirkan berbagai tesis. Max Weber misalnya, memandang adanya hubungan antara tingkat ketaatan dengan penguasaan ekonomi. Pemikiran Weber tentang birokrasi sangat penting untuk menjelaskan makna kepemimpinan dalam struktur birokrasi.⁶³ Weber berpendapat bahwa pemimpin dalam dirinya melekat kuat komitmen moral dan intelektual, pemimpin tidak memperlihatkan sikap yang memihak terhadap salah satu kelompok—diskriminasi, yang satu dipentingkan dan lainnya diabaikan. Kata Weber, pemimpin yang baik adalah memberikan motivasi, semangat, optimisme, dan janji bagi perbaikan yang totalitas dan komprehensif.

⁶¹ Doyle P. Johnson, *Teori Klasik dan Modern*, Jilid 2, 1994, hlm. 174-178.

⁶² Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, Rajawali Press, 1995, hlm. 4.

⁶³ Max Weber, *The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism*, diterjemahkan oleh Talcott Parsons, Charles Scribner's Son, New York, 1958.

Sementara itu, pada suatu komunitas sosial, terkadang mereka yang menduduki suatu jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan lainnya, sebagian kalangan memandangnya sebagai pemimpin. Padahal, terkadang kualitas kepemimpinan, pribadi, integritas, tipologi kepemimpinan dan seleksi sejarah atas label pemimpin terkadang belum teruji. Bahkan, suatu hal yang lazim, tindakan dan perilaku pemimpin justru belum terlalu mendorong orang lain untuk maju dan berkembang, mendorong optimisme, dan kurang memberi ketauladanan. Pemimpin seperti ini, selanjutnya, terkadang pula bukannya 'melayani' tapi selalu minta 'dilayani'.

Elite-Pemimpin dalam Perspektif Islam

Dari konsep pemimpin seperti dijelaskan sebelumnya, tampak bahwa *elite* lebih berorientasi kekuasaan dan status sosial, dibandingkan dengan makna *elite* yang bersifat hakiki dan autentik. Dari makna autentik teks Islam (Al-Qur'an dan Al-Sunnah), setiap manusia tidak ada perbedaan, karena perbedaan dalam konteks sosial dan status sosial akan membawa pada bentuk stratifikasi sosial bersifat duniawiyah. *Elite* atau pemimpin tidak dilihat dalam konteks itu, karena seorang pemimpin hendaknya menjadi sumber 'inspirasi' dan 'kebaikan' bagi umat/rakyat yang dipimpin. Namun, dalam makna doktrin, belum tentu seorang *elite*-pemimpin lebih baik dan mulia dihadapan Allah SWT, dibanding dengan umat yang dipimpinnya.⁶⁴

Secara substantif Islam tidak mengajarkan tentang stratifikasi manusia, baik dari segi keturunan, ras, warna kulit, posisi kekuasaan, struktur jabatan politik atau kepemilikan harta benda. Islam hanya mengenal manusia dalam derajat yang sama. Dengan kata lain, bahwa Allah SWT hanya membedakan umat-Nya dalam derajat ketaatannya. Pemimpin dan mereka yang dipimpin (umat, rakyat) sama-sama mengabdikan untuk kebaikan dunia dan ukhrawi. Dihadapan Allah SWT tidak ada perbedaan, kecuali derajat ketakwaan atau ketaatan itu. Seperti tertuang dalam Al-Quran, dikatakan bahwa: "... sesungguhnya yang paling mulia disisi Allah SWT adalah yang paling baik takwanya....".⁶⁵

Klasifikasi *elite* dan *massa* berkembang setelah adanya kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Klasifikasi tersebut

⁶⁴ Syarifudin Jurdi, *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Aksi Sosial*. Kencana, Frenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 53-54.

⁶⁵ Lihat Al-Qur'an, Surat Al-Hujurat (49), Ayat 13.

dilakukan untuk membedakan secara sederhana antara mereka yang mengendalikan wilayah kekuasaan dengan *massa* yang jumlahnya banyak. Semestinya, klasifikasi itu dalam makna Islam (teks) dipisahkan dalam rangka menunjuk kepada sejumlah individu terpilih yang memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya, seperti memiliki kelebihan ilmu pengetahuan, memiliki akhlak atau moral yang baik (berbudi pekerti luhur), dapat diteladani, dapat menjadi sumber sosialisasi nilai-nilai Islam, antara ucapan dan tutur kata serta perbuatannya sejalan. Dalam pandangan Islam semua orang berpeluang menjadi pemimpin, tetapi tidak semua orang berpeluang menjadi pejabat.⁶⁶ Allah SWT menciptakan manusia dimuka bumi sebagai *khalifatu fil ardh*, sehingga, pemimpin dalam konteks Islam memiliki spektrum luas, seperti pemimpin keluarga, pemimpin politis, pemimpin birokrasi, pemimpin agama, dan lain-lain.

Dalam masyarakat Islam, sering kali, dikatakan sebagai kategori kelompok *elite*- adalah ulama, guru ngaji, *ustadz/mubaligh*, yang dikatakan Abdul Munir Mul Khan sebagai *elite sosial* dan sekaligus sumber utama sosialisasi Islam.⁶⁷ Mereka merupakan kelompok *elite* dalam Islam yang berdasarkan keahlian. Terdapat juga *elite* pemimpin Islam yang menjadi pimpinan organisasi Islam dan partai politik Islam, yang lazim disebut *elite Islam*, karena mereka memimpin ormas ataupun partai politik Islam yang memiliki masa, padahal secara moral dan etika Islam masih harus diuji keberpihakan mereka kepada perjuangan Islam yang sebenarnya, bukan hanya kepentingan pragmatis dan pamrih kekuasaan. Dalam teks Islam, apapun jenis pekerjaan umat-Nya, memiliki kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan *al-amar bil-ma'ruf wan-nahyu anil-munkar*, merupakan tanggung jawab bersama antara *elite*- pemimpin dan yang dipimpin, *massa*.

Secara sosiologis dapat diungkapkan tentang pola relasi antara pemimpin dan umat. Relasi keduanya, awalnya diikat oleh emosi keagamaan yang kuat semakin mencair dengan terus berkembangnya masyarakat. Relasi sosial antara *elite* agama (ulama', kiai, guru ngaji, mubaligh, *ustadz*) dengan umat pengikutnya mulai bergeser dan didasarkan atas pertimbangan pragmatis dan rasional, dan cenderung

⁶⁶ Syarifudin Jurdi, 'Sosiologi Islam', *op.cit.*, hlm. 54.

⁶⁷ Abdul Munir Mul Khan, *Perubahan Pola Perilaku dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987*, Rajawali Press, 1989, hlm. 17.

tidak lagi dalam suatu relasi secara teologis semata. Kenyataannya, justru menggambarkan bentuk yang tidak seimbang dan terjadi distorsi dalam menjelaskan fungsi *elite* yang semestinya menjadi tauladan atau panutan. Suatu kenyataan terkini, misalnya, yang dilakukan sebagian *elite* politik Islam cenderung memanipulasi kebenaran atas motivasi ekonomi politik yang menguntungkan diri sendiri dan golongannya.⁶⁸ Agaknya, pergeseran politik dikalangan umat Islam belum optimal mendewasakan mereka dalam merealisasikan misi-misi agama yang diklaim selama ini termarginal secara politik. Terkesan pula, orientasi kepentingan material-duniwiayah lebih dominan ketimbang orientasi immaterial-ukhrawi.

Terlepas dari bagaimana 'proses' seorang pemimpin muncul dan berkembang, Islam tampaknya lebih menekankan kepada *elite*-pemimpin itu sendiri. Suatu hal yang menjadi *stressing* Islam yakni pentingnya konsistensi antara niat, perkataan, dan perilaku. Pemimpin yang difahami dalam Islam adalah pemimpin yang esensi kepemimpinannya bersifat integratif. Sehingga, berkembangnya suatu paradigma dalam pemimpin Islam, bahwa suatu kepemimpinan harus bersifat ideologis, artinya kepemimpinan itu didasarkan pada ketentuan yang bersifat definitif oleh kesatuan pandangan mengenai agama, kehidupan sosial, kehidupan politik kenegaraan, ekonomi, hukum, dan budaya. Itulah sebabnya bahwa pemimpin agama juga merupakan pemimpin bagi rakyat, bahkan agaknya dapat dipandang sebagai pemimpin ideal bagi komunitas, masyarakat, bangsa dan negara.

Pemimpin ideal, dalam perspektif Islam, merupakan pemimpin yang prilakunya tidak menyimpang dari 'garis' kebenaran yang diwahyukan oleh agama, dengan menjunjung tinggi *akhlakul karimah*, adil, memberi rasa aman, dan menyejukkan bagi pengikut/umat. Pemimpin ideal, menurut Taufik Abdullah, yakni pemimpin yang dipandang paling autentik, seperti ulama', cendekiawan, ustadz, mubaligh, dan da'i. Ulama' yang dikatakan Taufik Abdullah, sebagai penjaga keutuhan 'tali Allah' yang mengikat manusia dengan Sang Khalik dan antara sesama manusia.⁶⁹ Agaknya, siapapun yang dipandang berilmu dan berakhlak dan berkepribadian mulia dapat

⁶⁸ Syarifudin Jurdil, 'Sosiologi Agama...', *op. cit.*, hlm. 59.

⁶⁹ Taufik Abdullah, 'Apakah Muncul Pola Kepemimpinan Baru Umat?', *Mencari Pemimpin Umat: Polemik tentang Kepemimpinan Islam di Tenga Pluralitas Masyarakat*, Mizan, Bandung, 1999, hlm. 47.

dicartikan dalam kategori cendekiawan dan ulama', karenanya, jika ulama' misalnya melanggar ketentuan moral, akan menjadi penderitaan umat, sebagai pengikutnya.

Model kepemimpinan telah berkembang dalam kehidupan berbangsa terkini dan sekaligus telah membawa kompleksitas permasalahan kepemimpinan itu sendiri. Misalnya, banyak orang menjadi pemimpin kedepan bukan berasal dari 'sumber' yang dilembagakan. Sumbernya bukan berasal dari lembaga formal tetapi karena kualitas individu. Hal ini, relevan dengan pendapat Kuntowijoyo bahwa kepemimpinan dikalangan umat terdapat tiga kecenderungan: (1) *diversifikasi kepemimpinan*, dimana sebelumnya diperlukan kepemimpinan agama dan politik dalam arti sempit, kini perlu memperluas horizon pemikiran dibidang ilmu, teknologi, ekonomi, budaya, dan lainnya; (2) *desentralisasi*, perluasan makna kepemimpinan dimana kepemimpinan tidak hanya kepemimpinan nasional tetapi menyebar kemana-mana; dan (3) *proliferasi*, kepemimpinan yang tidak hanya dibidang politik, tetapi menyebar kemana-mana.⁷⁰ Seperti diketahui, sejak 1999, bangsa ini telah menerapkan desentralisasi pemerintahan yang dikenal dengan kebijakan otonomi daerah. Hal ini, telah memunculkan beragam level dan jenis kepemimpinan yang mengedepankan kompetensi dan kualitas individu.

Dalam praktek partai politik yang berafiliasi agama di tanah dalam kondisi terakhir, agaknya tampak bahwa antara ideal dan aktual cenderung tidak selaras. Mengutip pendapat analis sosial-politik, Rahmat Suprpto⁷¹, bahwa partai Islam dan politisi Islam dimungkinkan melorot pada Pemilu 2014. Diprediksi, ikatan ideologi konstituen dengan partai agama semakin luntur dan kinerja politius Islam banyak yang mengecewakan. Ada tiga faktor yang membuat Partai Islam melorot: *Pertama*, banyak perilaku dan moralitas politikus dari partai Islam tidak mencerminkan keluhuran nilai-nilai Islam, seperti korupsi dan berbohong. *Kedua*, para politikus ketika menjadi anggota parlemen merasa tidak sedang mendapat amanah dari konstituen pemilihnya karena mereka beranggapan dukungan diperoleh dari transaksi jual-beli suara. *Ketiga*, masyarakat kian

⁷⁰ Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hlm. 99.

⁷¹ *Kabar Sumatera*, 18 Juli 2012.

terbuka dan pragmatis, bukan lagi jenis pemilih yang mau diperbudak karena adanya kesamaan ideologi atau agama dengan partai.

Sejumlah permasalahan keterkaitan dengan 'anomali sosial' berbangsa, seperti korupsi dan pembohongan publik, tidak jarang dilakukan mereka yang berlabel seorang muslim ataupun partai Islam. Sudah barang tentu, konstituen akan semakin cerdas yang pada akhirnya akan memunculkan stereotip buruk terhadap politikus Islam dan partainya. Lebih dari itu, siapapun dia seorang muslim, dimanapun berkarya dan bekerja, ia merupakan pemimpin, seyogyanya memiliki moralitas kepemimpinan yang selaras dengan nilai-nilai yang dianjurkan ajaran Islam (tentang pemimpin).

Karenanya, semua kategori, jenjang dan jenis kepemimpinan, baik formal maupun informal, dalam perspektif Islam, telah menuntut pentingnya pemahaman umat tentang tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam bermasyarakat dan berbangsa. Semua fungsi dan tanggung jawab itu, pada akhirnya, tetap harus dipertanggung jawabkan dihadapan Sang Khalik. Inilah esensi kepemimpinan Islam yang hakiki dan ideal. Andaikan ada kesenjangan antara konsep dan realitas perilaku umat dalam fungsi dan peranannya dalam kehidupan berbangsa, merupakan perlunya interospeksi dan koreksi atas tergelincirnya dari 'garis' patokan dan pemahaman ajaran agama Islam itu sendiri. Dengan kata lain, apapun yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih terletak pada dampak dari 'kapasitas' umat-Nya, terutama kalangan yang diamanahkan sebagai *elite* -pemimpin yang dilihat dari parameter fungsi manusia sebagai *khalifatul fil ardh* yang mengutamakan keseimbangan kebutuhan duniawi dan ukhrawi.

Apa Implikasi bagi Pemimpin Birokrasi?

Jika kita memperhatikan tentang makna pemimpin dari perspektif sosiologis terhadap pemimpin dalam Islam, dapat dikatakan bahwa semua umat Islam, laki-laki dan perempuan, merupakan pemimpin. Akan tetapi, Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban atas kapasitas kepemimpinan masing-masing di hari kemudian, karena kehidupan duniawiyah bersifat *fana'* dan kehidupan ukhrawi bersifat kekal-abadi. Dari perspektif sosiologis terhadap elite-pemimpin-birokrasi, apapun tugas, peran, dan jabatannya, setidaknya, terdapat beberapa implikasi penting:

Pertama, semua umat-manusia merupakan pemimpin. Karenanya, lambat-laun dan cepat-lambat dipastikan akan diminta pertanggung jawabannya dihadapan Allah SWT, seiring berakhirnya usia manusia, karena 'setiap yang bernyawa akan mengalami kematian' (*kullu nafs in zaaikataul maut*).

Kedua, Allah SWT menciptakan manusia sia-sia tetapi sebagai pemakmur dunia bukannya pembawa kerusakan. Faktanya, terkadang menunjukkan sebaliknya, dimana berbagai musibah, bencana, dan kezholiman lainnya justru sebagai ulah manusia. Hanya manusialah yang menjadikan dunia ini, lingkungan dan masyarakatnya, menjadi indah, aman, damai, harmonis, dan sejahtera, sebagai konsekuensi manusia sebagai *khalifah*. Negara ini akan terbebas dari banyak masalah dan 'penderitaan' ke depan, apabila para *elite*, termasuk *elite* birokrasi, sejak dini menyadari bahwa kemajuan dan kemakmuran bangsa terletak pada kiprahnya kini. Jika misalnya, perilaku korupsi dalam berbagai dimensinya dapat diberantas dengan komitmen semua elemen masyarakat, masa depan bangsa dan anak cucu diharapkan akan lebih baik. Jika tidak, maka bisa saja akan terjadi sebaliknya, segala kemungkinan bisa terjadi: kemiskinan, kesengsaraan, dan ancaman disintegrasi sosial.

Ketiga, elite-pemimpin birokrasi diharapkan dapat mengedepankan kinerja didasarkan prinsip kepemimpinan Rasulullah SAW: *siddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathanah*. Berbagai teori-teori kepemimpinan dalam perkembangan sains-teknologi terkini senantiasa *up to date* dan relevan dengan prinsip kepemimpinan Nabi, sebagai '*grand theory*'. Kalau para Nabi saja sebagai 'pelayan' bagi umatnya, maka teori kepemimpinan pun telah menempatkan pentingnya para elite-birokrasi memposisikan peran dan fungsinya sebagai 'pelayan' masyarakat pula.

Keempat, elite-birokrasi yang diharapkan bagi masyarakat ke depan, ialah mereka yang memiliki sejumlah keragaman kompetensi atau prestasi kerja yang optimal dan senantiasa mengedepankan pentingnya menjaga *akhlakul karimah*, sebagai 'pemandu' etika individu dan etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dengan kata lain, elite-birokrasi yang bercita-cita meraih karier kinerja yang cemerlang, dalam perspektif kepemimpinan Islam, sangat perlu meningkatkan dua reputasi: (1) prestasi kerja/reputasi profesional, dan (2) reputasi moralitas.

2014:

Jalan Terjal Menuju Sejahtera⁷²

Dalam Undang-Undang RI No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pada Bab II Pasal 3 dikatakan bahwa RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Negara RI Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan bangsa. Dalam Bab III Pasal 7 ayat 1, dikatakan pula bahwa pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPN. Karenanya, setiap pergantian tahun, adalah sebagai evaluasi yang lazim terhadap kinerja dan program kerja yang telah dijalankan pemerintah setahun sebelumnya. Hal ini, sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan untuk setahun berikutnya, dalam upaya berproses menuju bangsa Indonesia yang makmur dan sejahtera yang diharapkan tercapai pada 2025.

Momentum pergantian 2013 ke 2014, karenanya sebagai evaluasi terhadap kinerja pemerintahan setahun sebelumnya, dimana sudah banyak tentunya prestasi program pembangunan yang telah dilakukan. Akan tetapi, masih banyak pula prestasi yang belum optimal dan masih perlu ditingkatkan pada tahun 2014. Memang, dalam proses pembangunan, dalam hal ini RPJPN, mesti dilakukan dengan proses bertahap dan berkelanjutan. Sejumlah prestasi yang belum optimal dilaksanakan selama 2013, merupakan *jalan terjal* dalam mencapai tujuan dan cita-cita dalam RPJPN, yakni mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Beberapa persoalan berbangsa terkini sebagai *jalan terjal* sebagai pijakan untuk persiapan rencana program pembangunan pada tahun 2014, antara lain:

Pertama, korupsi. Terkesan bahwa semakin gencar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan dalam banyak kasus korupsi, semakin bertambah pula kasus korupsi. *International Transparency (IT)* merilis bahwa situasi korupsi di 177 negara pada 2013, Indonesia menduduki urutan ke-64 dalam urutan negara terkorup di dunia. Skor index Indonesia, yakni 32 berdasarkan *Corruption Perception Index (CPI)* yang dirilis IT, jauh berbeda dengan

⁷² Tulisan penulis berjudul : '2014: Jalan Terjal Menuju Sejahtera', pernah dimuat dalam dua edisi di *Sumatera Ekspres*, 30/12/2014 dan 31/12/2014.

peringkat Singapura dan Malaysia. Singapura menempati urutan ke-172 negara korup, dengan skor index 86, dan berada pada posisi ke-5 negara terbersih versi IT. Malaysia menempati urutan ke-125 negara korup, dengan skor 50, yang berarti Malaysia menempati posisi ke-52 pada jajaran negara terbersih. Hal ini berarti bahwa peringkat Indonesia pada urutan pertengahan negara terkorup di dunia, sekaligus menunjukkan masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi negeri ini. Peringkat itu, lebih baik ketimbang 2012 dimana Indonesia menduduki posisi ke-60 sebagai negara terkorup di dunia.

Dari data *Global Corruption Barometer (GCB) 2013* menunjukkan bahwa tiga Lembaga Negara (Kepolisian, Parlemen (DPR/DPRD), dan Pengadilan) menjadi lembaga terkorup di regional ASEAN. Data yang sama dirilis KPK memperlihatkan Indonesia menjadi negara terkorup di ASEAN dengan indikasi tiga lembaga negara ini. Kamboja menempatkan Lembaga Pengadilan yang terkorup. Malaysia, Filipina, dan Vietnam, menempatkan Lembaga Kepolisian merupakan lembaga yang terkorup. Thailand menempatkan Partai Politik dan Kepolisian sebagai lembaga terkorup. Di internal negeri, di era Otonomi Daerah ini (1999-2013), jumlah kasus korupsi cenderung meningkat itemnya, merata dan meluas di berbagai instansi pemerintah dan swasta dengan pola dan modus yang beragam. Jika pada era Orde Baru korupsi terjadi tersentralistik, pada era otonom daerah, korupsi terjadi terdesentralistik. Indikasinya terdapat banyak kepala dan pejabat daerah yang harus berurusan dengan penegak hukum.

Kedua, kemiskinan dan potensi konflik sosial. Angka kemiskinan di Indonesia masih dikategorikan tinggi, sekaligus dapat menjadi tantangan dalam proses menuju bangsa yang sejahtera di masa depan. Disatu sisi, pantas diapresiasi bahwa angka masyarakat kelas menengah di Indonesia kini cenderung meningkat hingga 70 juta orang, karena adanya perbaikan dalam bidang ekonomi. Disisi lain, angka kemiskinan selama 2013 sebetulnya hanya turun tipis. Data Pemerintah, yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), tampak bahwa jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta. Angka ini mengalami penurunan dari September 2012 yang mencapai 28,99 juta, mengalami penurunan tipis. Data lain, dari versi non-pemerintah, angka kemiskinan bisa lebih besar dari data resmi pemerintah. Padahal, berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan dengan kucuran dana dalam triliunan rupiah, tetapi

belum menunjukkan hasil belum seperti diharapkan. Justru, tidak jarang dana untuk orang miskin terkadang disalahgunakan.

Angka kemiskinan yang tinggi disinyalir berdampak pada potensi konflik sosial, yang lebih dipicu oleh faktor sosial-ekonomi dan politik. Berdasarkan hasil beberapa riset tentang konflik sosial bernuansa etnis dan agama, sebetulnya bukanlah berdiri sendiri, tetapi lebih dikarenakan faktor sosiologis, bertalian dengan adanya kesenjangan sosial-ekonomi dan politik yang kurang berpihak kepada masyarakat kebanyakan. Selain itu, potensi konflik juga terjadi karena adanya *vested-interests* elit politik terutama menjelang pelaksanaan pemilu di daerah. Motif sosial-ekonomi dan politik tersebut karenanya salah satu menjadi faktor 'pemicu' dalam berbagai bentuk konflik sosial yang terjadi di tanah air. Konflik sosial selanjutnya berkembang, sejak konflik antarkelompok agama, antaretnis, antar-geng preman, antardesa, antarperbatasan, atau antara masyarakat, dan aparat.

Ketiga, narkoba. Data BNN menunjukkan bahwa angka korban narkoba di Indonesia mencapai sekitar 4 juta jiwa. Korbannya, tidak hanya mereka yang mengalami *broken home*, tetapi terjadi pada keluarga harmonis dan masyarakat dalam usia dan profesi berbeda. Tetapi, sebagian besar korban narkoba merupakan kalangan usia muda, sebagai usia produktif. Sekurangnya 50 orang yang tewas setiap hari akibat narkoba. Tentu, tidak sedikit pula anggaran pemerintah yang harus dikururkan dari APBN dalam upaya menangani korban narkoba. Tidak sedikit pula, potensi putera-puteri bangsa yang *mubazir* karena tidak berdaya dan justru menjadi beban negara.

Keempat, eksploitasi lingkungan. Isu eksploitasi lingkungan sumber daya alam (*natural resources*) bertalian dengan eksploitasi sumber daya alam di darat dan laut yang terbentang luas. Jika dilihat dari potensi sumber daya alam sebagai berkah Sang Khalik, bangsa ini sebetulnya diyakini banyak pihak sebagai bangsa terkaya di dunia. Faktanya, masih banyak potensi sumber daya alam di negeri ini yang belum diolah putera-puteri bangsa sendiri sepenuhnya demi kesejahteraan rakyatnya. Di era otonomi daerah, akibat eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa terkendali telah terjadi kerusakan lingkungan di berbagai wilayah pulau di Indonesia. Pemerintah pun sudah berupaya menanam jutaan pohon sebagai upaya reboisasi hutan yang telah gundul dan gersang. Hasil usaha penambangan

sumber energi dan sumber daya alam pun selanjutnya belum sepenuhnya dapat mensejahterakan masyarakat di sekitarnya selama ini. Untuk sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) agaknya bangsa ini tampak belum mandiri dan masih mengandalkan kemampuan investor asing. Sejumlah kontrak pertambangan misalnya justru diperpanjang dan berlanjut dengan perpanjangan kontrak baru, bahkan ada yang diperpanjang hingga 2035 dengan berbagai argumentasi yang logis. Ada banyak pula kasus pertambangan, sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar, justru bermasalah dengan hukum. Potensi konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar tambang juga sangat sering terjadi.

Kelima, sumber daya manusia dan tenaga kerja. Indonesia merupakan negara yang berpenduduk terbesar ke-4 di dunia dengan usia produktif sekitar 40 persen dari jumlah penduduknya. Jumlah usia produktif yang besar itu merupakan modal bagi masa depan bangsa. Jika jumlah itu tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan yang memadai, sebagai indikator kualitas sumber daya manusia, akan sulit agaknya bangsa ini menjadi bangsa yang kompetitif, dan bahkan banyak generasi muda akan menjadi 'beban' negara. Kondisi terkini, terdapat banyak tenaga pekerja dalam berbagai sektornya masih didominasi oleh mereka yang berlatar belakang pendidikan menengah ke bawah, yakni tamatan SD hingga SLTA.

Keenam, pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pengangguran (November 2013) mencapai 7,39 juta dari total angkatan bekerja 118,19 juta. Orang yang bekerja mencapai 110,80 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga Agustus 2013 mencapai 6,25 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan TPT Februari 2013 sebesar 5,92 persen, dan dibandingkan TPT Agustus 2012 meningkat 6,14 persen. Tingginya angka pengangguran, dapat berdampak positif terhadap berbagai perilaku buruk dalam masyarakat, berupa kriminal, beragam perilaku menyimpang remaja, konflik antarkelompok, konflik masyarakat desa dengan perusahaan perkebunan, dan perilaku menyimpang lainnya.

Ketujuh, hutang luar negeri. Hingga Oktober 2013, dari Bank Indonesia, hutang luar negeri pemerintah dan Swasta Indonesia mencapai USD 262,4 miliar (setara Rp 3.204 Triliun), dengan rincian: hutang

pemerintah dan Bank Sentral USD 125,8 miliar dan hutang swasta USD 136,6 miliar. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan pada September 2013 yang berjumlah USD 259,9 miliar. Jumlah hutang ini Indonesia termasuk kategori tinggi, dan Bank Dunia telah mengingatkan agar hutang itu dapat dikurangi. Lembaga Swadaya *Indonesia Budget Center (IBC)* mengatakan Pemerintah saat ini terlalu senang berhutang baik hutang, baik bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Di awal era Reformasi Hutang Orde Baru pun hanya sekitar 900-an triliun rupiah. Dalam Teori Ketergantungan, apabila suatu negara berkembang (*developing country*) ingin 'naik kelas' menjadi negara maju (*developed country*) direkomendasikan harus mengurangi hutang pada level terendah.

Sejumlah persoalan dalam kehidupan berbangsa, dari sekian banyak persoalan berbangsa diatas, dipandang sebagai 'jalan terjal' langkah menuju kesejahteraan bangsa, seperti tujuan RPJPN 2005-2025. Berbagai persoalan berbangsa itu juga merupakan modal terpenting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2014. Patut dicatat bahwa tahun 2014 bersamaan dengan *momentum* pelaksanaan Pemilu untuk memilih para wakil rakyat dan presiden dan wakil presiden. Pemimpin bangsa yang baru (Presiden/Wakil Presiden, Kabinet, dan anggota Legeslatif) nantinya sangat berat dan sekaligus menantang dalam meningkatkan kinerja pemerintahan pada tahun 2013 yang belum optimal. Bertolak dari berbagai kenyataan diatas, setidaknya ada beberapa hal yang dimungkinkan dapat dipertimbangkan sebagai upaya perbaikan kinerja bangsa pada 2014 yang lebih baik, antara lain:

- (1) sejauhmana bangsa Indonesia memanfaatkan *momentum* Pemilu 2014 untuk memilih calon pemimpin yang betul-betul menjadi aspirasi rakyat. Semua pihak berharap tentunya Presiden/Wakil Presiden, para Menteri, dan anggota legeslatif (DPR/DPD/DPRD) yang terpilih pada Pemilu 2014 nantinya jauh lebih baik dari sebelumnya, baik dalam hal kompetensi, cerdas, integritas, *track-records*, dan moralitas. Hal ini penting, mengingat merekalah yang akan menentukan kemana arah bangsa ini ke depan, ditengah pergaulan global yang berpihak kepada daya saing bangsa. Visi dan Misi RPJPN 2005-2025 sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa hanya akan terwujud jika para pemimpin yang terpilih nantinya memang betul-betul dari aspirasi rakyat. Tidak mudah tentunya menjadi pemimpin kedepan. Misalnya,

diharapkan para calon Presiden/Wakil Presiden hendaknya dapat berkampanye mengurangi hutang dan bukan hanya bisa berhutang, demi masa depan generasi bangsa,

- (2) secara substansi, apapun bentuk persoalan berbangsa itu sesungguhnya berawal dari rendahnya moralitas, *akhlakul karimah*, dan mentalitas berbangsa, seperti yang telah teladani para *founding fathers*. Terjadinya banyak kasus korupsi yang prestisius pada era Reformasi (1998-kini) sesungguhnya menunjukkan bahwa nasionalisme bangsa Indonesia sangat rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah buruknya keteladanan pemimpin di era reformasi. Karenanya, kesejahteraan bangsa hanya akan membawa 'angin segar' jika dalam pemerintah baru (hasil Pemilu 2014) ke depan dapat memberantas 'virus' korupsi dengan akseleratif. Disini, pihak penegak hukum, terutama KPK, harus bekerja maksimal dan terutama perlu adanya *support moral* dari semua elemen bangsa,
- (3) perlu adanya upaya meningkatkan nasionalisme dan penguatan identitas nasional di tengah pergaulan dan peradaban dunia. Tujuan pembangunan nasional yakni menciptakan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berpengetahuan, berkepribadian, berbudi pekerti luhur—beriptek dan berimtaq—harus menjadi cita-cita dan komitmen setiap elemen bangsa. Pancasila dan UUD 1945, sudah memberi jalan dan pedoman bagi warga bangsa ini, dalam kehidupan berbangsa. Jika, masih banyak korupsi dan masih tingginya angka kemiskinan berarti nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 belum berjalan dalam rel-nya. Kemakmuran dan kesejahteraan bangsa hanya akan terwujud apabila dalam praktek berbangsa dan bernegara menempatkan rakyat menjadi tuan di negerinya. Dalam banyak hal, faktanya, posisi masyarakat berada pada pihak yang lemah (*sub-ordinate*) ditengah posisi negara yang *super ordinate*. Relasi hubungan yang tidak seimbang itu akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pemerintahan Baru nantinya, dari hasil Pemilu 2014, diharapkan mampu mencari *solusi* tepat terhadap kesenjangan relasi rakyat-negara, sebagai upaya menjadi tuan di negerinya dengan tetap terjaganya identitas sebagai bangsa Indonesia; dan

(4) perlunya prioritas pendidikan. Tanpa mengabaikan pentingnya pembangunan pada sektor lainnya, pembangunan sektor pendidikan paling penting menjadi prioritas. Anggaran pendidikan memang sudah mengalami peningkatan berarti, tetapi, ternyata belum cukup untuk menjadikan upaya penyiapan 'anak bangsa' dapat berkompetisi ke depan. Sudah banyak guru dan dosen yang sudah bersertifikasi sehingga akan berdampak positif terhadap penghasilan dalam mendukung kinerja yang lebih baik. Akan tetapi, terdapat masih banyak anak-anak usia sekolah yang belum sekolah atau putus sekolah. Peran pemerintah daerah ke depan perlu dioptimalkan dan mesti sinergis sebagai upaya menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa ini ke depan. Isu-isu transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran pada sektor pendidikan pada kementerian terkait pada 2014 patut menjadi perhatian. Dengan prioritas pembangunan pendidikan diharapkan akan berimplikasi positif terhadap penciptaan SDM berkualitas, kompetitif, sebagai langkah menuju bangsa yang sejahtera ke depan.

Idul fitri 1436 H dan Harkat Kemanusiaan

Sebagai sebuah bangsa majemuk (*plural society*), berketuhanan, dan menempatkan aspek spiritualitas-agama sebagai hal terpenting dalam pembangunan nasional, bangsa Indonesia sangat menghargai keberagaman beragama. Karenanya, setiap agama resmi di negeri ini memiliki hari libur nasional dalam upaya merayakan hari raya agama masing-masing. Bagi umat Islam di tanah air, Idulfitri 1 Syawal 1436 H tahun ini jatuh tepat pada 17 Juli 2015. Memperingati lebaran Idulfitri sesungguhnya bukanlah hanya sekedar rutinitas semata, lebih dari itu, Idul fitri memiliki seharusnya makna hakiki dan substantif bagi umat manusia sebagai hamba-Nya. Tulisan ini, karenanya, berfokus pada analisis tentang pentingnya memahami makna Idulfitri tersebut dalam meningkatkan harkat kemanusiaan umatnya.

Suasana lebaran Idul fitri tahun ini telah diperingati umat Islam seantero dunia, baik yang berada di desa-desa, kota-kota, maupun dimanapun berada. Mereka mengumandangkan kalimat *takbir*, *tahlil*, dan *tahmid*. Dengan *takbir* mengucapkan *Allahu Akbar* seakan menyadarkan umat Islam bahwa kekuasaan Allah SWT sangat besar dan tidak dapat ditandingi umat-Nya. Dengan *tahlil* mengucapkan *La ilaha Illa Allah* memperlihatkan bahwa hanya Allah SWT yang

patut disembah dan patut dimintai pertolongan. Dengan *tahmid* mengucapkan *Wa Lillah Alhamd* menunjukkan bahwa hanya kepada Allah SWT umat Islam memanjatkan puji dan puja.

Merayakan Idul fitri menandakan selesai sudah umat Islam menunaikan ibadah puasa sebulan penuh pada bulan Ramadhan 1436 H. Ibadah puasa Ramadhan merupakan suatu ibadah yang bertujuan agar umat Islam dapat menjadi umat yang bertakwa (*muttaqien*) dan menjadi umat yang sempurna (*al insan al kamil*). Jika seorang muslim menunaikan ibadah puasa yang didasarkan pada niat yang tulus dan ikhlas dan mematuhi peraturan berpuasa atau tentang pelaksanaannya, Insya Allah, umat Islam akan memperoleh predikat sebagai seorang muslim yang *muttaqien*. Seperti diketahui bahwa kewajiban berpuasa termaktub dalam firman Allah SWT dalam al-Quran pada surat al-Baqarah ayat 183 : "*Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa.*"

Dalam berpuasa terdapat kandungan nilai-nilai (puasa) yang patut dimiliki umat Islam dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT karena telah dianugerahi kekuatan, nikmat, dan kegembiraan. Kegembiraan itu dikarenakan: *Pertama*, karena umat Islam telah menyelesaikan ibadah puasa selama sebulan penuh. *Kedua*, karena umat Islam memiliki harapan besar akan adanya ampunan dosa-dosa dari Allah SWT, karena telah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh itu atas dasar iman dan takwa.

Setelah berpuasa, umat Islam akhirnya diikuti dengan merayakan Idulfitri yang selanjutnya memiliki dua dimensi penting. *Pertama*, dimensi *kesalehan spritual*, yang bertalian dengan aktivitas pribadi seorang muslim dalam meningkatkan hubungannya dengan Sang Khalik, Allah SWT (*hablum minallah*). Dalam konteks ini, selama bulan Ramadhan, umat Islam dianjurkan melakukan aktivitas spritual-keagamaan, seperti memperbanyak *shalat sunat*, *dzikir*, *tadarrus al-Qur'an*, *zakat*, *sadaqah* dan *infaq*. Hakekat puasa pada dasarnya merupakan *pendakian spritual* agar seorang muslim menjadi dekat dengan Allah SWT, yakni menjadi seorang muslim yang memiliki tingkat spritual yang memadai (*spritual man*), yang dalam khazanah keislaman menjadi seorang umat yang sempurna (*al-insan al-kamil*). Proses menuju *al-insan al-kamil* ini merupakan suatu

proses *pendakian spritual* yang dialami seorang muslim dari eksistensi biasa menuju eksistensi spritual.

Seorang muslim yang menunaikan ibadah puasa diharapkan dapat meningkatkan harkat kemanusiaannya dari tingkatan biasa (*aesthetic stage*), ke tingkatan religiusitas (*religious stage*) atau *nafsul muthma'innah*, yakni suatu jiwa yang damai dan tenang sesuai dengan khazanah al-Qur'an. Itulah sebabnya, dari aspek kebahasaan, puasa bermakna menahan diri dari nafsu makan dan minum, nafsu birahi-seksual, nafsu kuasa, nafsu jahat, fitnah, menggugjing, nafsu amarah, penyakit hati, dan prilaku serupa lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa "*berpuasa merupakan perjuangan melawan nafsu yang kadarnya lebih berat dari perang di medan perang sekalipun*".

Setelah menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan diikuti dengan kewajiban menunaikan zakat fitrah, kemudian merayakan/shalat Idulfitri, umat Islam diharapkan kembali menjadi suci, *fitriah*. Harapan akan kesucian tersebut dikarenakan selama bulan Ramadhan, umat Islam telah berlatih untuk menahan beragam nafsu negatif atau prilaku buruk yang bertujuan sebagai pendakian spritualnya. Aturan-aturan berpuasa yang dipatuhinya diharapkan dapat memahami mana yang benar (*haq*) dan mana yang salah (*bathil*) sebagai proses menuju umat yang *muttaqien*. Derajat *muttaqien* itu hanya dapat dicapai bila proses pelaksanaan puasa mengikuti aturan-aturan berpuasa yang sudah ada, yang dimulai dengan niat ikhlas karena iman, dan mematuhi aturan berpuasa sesungguhnya. Hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Siapa saja yang berpuasa dalam bulan Ramadhan dengan keimanan dan keikhlasan (kesadaran) yang penuh akan diampuni segala dosanya yang lalu (Al-Hadits).*"

Urgensi niat dan konsistensi kepatuhan terhadap aturan-aturan berpuasa pada bulan Ramadhan dengan menjauhi larangan-larangan berpuasa, merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Umat Islam, didorong untuk terus mengedepankan niat dalam setiap tindakan/amalannya terlebih ketika dalam masa menunaikan ibadah puasa, dan diharapkan adanya *follow-up* setelah Idulfitri, sebelas bulan menuju Ramadhan di tahun depan. Apapun yang akan dilakukan umat Islam senantiasa berupaya mengedepankan niat yang baik dan tulus, sehingga kualitas perbuatan (*'amal*), yang

dilakukannya menjadi bermakna dan lebih baik dari masa sebelumnya. Kesenjangan (*gap*) terjadi ketika antara niat dan aturan berpuasa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena, ibadah puasa diharapkan dapat menjadikan seorang muslim menjadi *muttaqien* dan mampu memelihara *ke-muttaqien-an* itu di tengah dinamika dan perubahan sosial bermasyarakat dan berbangsa.

Peran seorang muslim yang telah meraih pendakian *kesalehan spiritual* sangat dibutuhkan dalam proses peningkatan kehidupan pribadi, keluarga, dan berbangsa. Kualitas kesalehan spiritual individu seorang muslim hanya dapat diraih melalui proses belajar, yakni salah satunya melalui ibadah puasa Ramadhan. Dalam kegiatan spritual puasa yang diperkuat dengan aktivitas spiritual-keagamaan lainnya, seperti *wirid*, *sadaqoh*, *infaq*, *tadarrus* dan *tilawah al-Quran*, *i'tikaf*, dan lain-lain, merupakan suatu upaya proses pendakian spiritual yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup, harkat, dan martabat kemanusiaan umat-Nya.

Pada masanya nanti, ibadah puasa bagi seorang muslim diharapkan dapat memberi efek positif dalam proses perbaikan terhadap kehidupan seorang individu muslim, terutama tercemrin dalam relasi terhadap Sang Khalik, Allah SWT. Karena itu, harkat dan martabat kemanusiaan akan mengalami peningkatan sebagai 'proses' efek positif dari ibadah puasa apabila dirasakan adanya perubahan perilaku (*akhlak*) pada diri seorang muslim, dari perilaku yang tadinya negatif misalnya ke arah yang lebih positif: menjadi jujur, rajin bekerja, menghargai waktu, rendah hati, tidak sombong, toleran, sabar, dan lain sebagainya, sebagai adanya indikasi adanya proses pendakian spiritual itu.

Kedua, dimensi *kesalehan sosial*, yakni suatu dimensi yang berhubungan dengan *follow-up* dalam perilaku sehari-hari seorang muslim sebagai makhluk sosial. Pada dimensi pertama bersifat intrinsik-personal, pada dimensi kedua ini bersifat interaksi sosial seorang muslim dengan sesama manusia (*hablum-minan-nash*) atau makhluk ciptaan-Nya (*hablum-minal'alam*) dalam beragam bentuk kehidupan. Disini, pesan moral puasa Ramadhan sebenarnya adalah agar seorang individu muslim menjadi lebih peka terhadap realitas dan lingkungan sosialnya, baik sesama muslim dan non-muslim atas dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai toleransi. Karena itu, antara dimensi pertama dan kedua, tidak dapat dipisahkan, karena dimensi

pertama akan bermakna bila selaras dimensi kedua; sebaliknya, dimensi kedua dapat dikatakan sebagai penyempurna bagi dimensi pertama. Seorang muslim yang *muttaqien* terus berupaya mengulajar dan atkan kedua dimensi kesalehan itu, salah satunya, dengan berpuasa Ramadhan dan berbagai amalan sunat selama berpuasa. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Maidah Ayat 2: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksaan-Nya."

Jadi, secara normatif, dalam ibadah puasa Ramadhan, sesungguhnya, seorang muslim patut berupaya optimal dalam meningkatkan proses *pendakian spritual* dan *pendakian sosial*. Jika ibadah puasa Ramadhan dilaksanakan dengan ikhlas karena niat kepada Allah SWT semata, dan dilaksanakan dengan baik dan benar, didukung dengan beragam amalan sunat yang dianjurkan, diikuti dengan kewajiban menunaikan zakat fitrah dan zakat mal, dan lain-lain, dan selanjutnya menunaikan shalat Idulfitri, seorang muslim diharapkan akan dapat meningkatkan harkat kemanusiaannya, sebagai *khalifatu fil ardh*. Sehingga, keberadaan puasa Ramadhan semakin bermakna bagi seorang muslim dan umat sebagai tanda ketaatan terhadap perintah Sang Khalik, seperti diteladani para orang terdahulu, nabi-nabi, sahabat-sahabat, dan tabi'-tabi'an. Adanya proses menuju ketakwaan (*muttaqien*) itu selanjutnya dapat dilihat dalam dinamika prilaku sosial dan keagamaan sehari-hari pada pascapuasa Ramadhan.

Predikat *muttaqien* itu bukanlah berbentuk sertifikat atau piagam tetapi lebih bersifat perasaan internal-religiusitas pribadi seorang muslim yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Seorang muslim yang *muttaqien* dipastikan akan bermanfaat bagi orang lain (keluarga, masyarakat, dan bangsa). Dia dapat dijadikan inspirator, motivator, fasilitator, dan aktor yang diharapkan bagi perbaikan kehidupan orang lain atau umat sesuai dengan kedudukan dan status sosialnya. Dengan inspirasi *ke-muttaqien-an* yang disandang seorang muslim berupaya berkontribusi positif dan bermanfaat dalam kehidupan sosialnya dalam mencari 'solusi-solusi' atas beragam permasalahan sosial kehidupan dalam berbangsa. Jika para elit (*elites*) misalnya merupakan orang-orang yang terpilih dan amanah maka dipastikan berbagai penyakit sosial (*social-deviances*)

dalam berbangsa diharapkan dapat direduksi sedemikian rupa karena ke-amanah-an mereka dalam memimpin. Karenanya, implikasinya akan lebih luas pula, misalnya menjelang Pilkada serentak nantinya umat Islam perlu memilih pemimpin (*elites*) yang beriman dan bertakwa, seperti diinginkan dalam Sila ke-1 Pancasila.

Dalam sejarah peradaban manusia dimuka bumi, persoalan-persolan yang ada sesungguhnya bersumber dari manusia itu sendiri dan syetan hanya terus menggodanya (agar manusia tetap terjerumus/jatuh) agar dilaknat Allah SWT. Dalam hal ini, para ulama hikmah berkata bahwa sumber kesalahan atau malapetaka terdapat tiga macam, yakni sombong, rakus, dan hasud. Sifat *sombong* pertama kali dilakukan iblis ketika diperintahkan oleh Allah SWT agar memberi hormat kepada Adam, namun iblis menoaiknya sehingga dia dilaknat. Adapun sifat *rakus* pertama kali dilakukan oleh Adam, ketika dikatakan kepadanya, bahwa surga dan segala isinya boleh dia nikmati kecuali pohon (terlarang) ini. Tetapi, rupanya dia tidak tahan mencegah keinginannya memakan buah pohon tersebut, sehingga dia pun diturunkan dari surga. Sedangkan *hasud* pertama kali dilakukan oleh Qabil anak lelaki Adam ketika dia tega membunuh saudaranya Habil. Tiga sumber kesalahan itu, sekali dilakukan iblis dan dua kali dilakukan manusia. Tetapi, dalam perkembangan peradaban manusia, ketiganya sering kali dilakukan manusia. Padahal, manusia merupakan makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia kedudukannya dari malaikat bila ketiga sifat itu hilang pada dirinya.

Karenanya, secara umum, sumber malapetaka dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, hingga kini, lebih dikarenakan dua hal: maksiat fisik (*lahiriah*) dan maksiat hati (*bathiniah*). Tetapi, maksiat hati lebih berbahaya karena meliputi sifat sombong, hasud, dengki, syirik, dan penyakit hati lainnya. Hal ini berdasarkan penjelasan al-Qur'an tentang dua kesalahan yang terjadi setelah penciptaan Adam dan ketika itu bersama isterinya menempati surga, seperti terkandung artinya dalam Q.S. Thaha: 115 yang berbunyi: "*Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat*". Dari ayat ini, dikatakan bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh Adam dan isterinya ketika memakan buah terlarang (*qolbi*) merupakan bentuk kemaksiatan fisik. Iblis mendatangi keduanya dan mempengaruhi mereka. Dikatakan Iblis, jika mereka

mau memakan buah itu maka akan menjadi kekal disurga. Semula Adam dan Hawa menolak, tapi godaan iblis membuat mereka terlena, seperti dikatakan dalam Q.S. Thaha: 121-122:

"Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilihnya maka Dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk".

Dalam dinamika kehidupan berbangsa, agaknya tidak sulit mendeteksi bahwa ketiga sumber malapetaka itu sudah menjadi hal biasa dilakukan manusia, secara tampak dan tidak tampak. Sehingga, terkadang dirasakan adanya percampuran antara benar (*haq*) dan yang salah (*bathil*). Padahal, ketakwaan sesungguhnya tidak hanya diukur dari nilai-nilai simbolik semata, tetapi lebih dari itu, perlunya adanya relevansi dan konsistensi antara nilai-nilai simbolik dengan aktualisasi perilaku seorang individu muslim dimanapun berada dalam iman dan takwa. Memakai kopiah, serban, kerudung, hijab, dan jilbab merupakan bagian dari item-item simbolik yang religius, tetapi, akan lebih bermakna apabila tercermin dalam kesalehan spiritual dan kesalehan sosial, yang akan dapat dirasakan dalam konteks kemaslahatan dan hubungannya dengan sesama muslim dan umat lainnya, dalam masyarakat pluralistik, dengan beragam keyakinan agama, etnis, dan budaya.

Kita, umat Islam, berharap bangsa ini akan terus mengalami kemajuan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Karenanya, anjuran positif Presiden/Wapres Jokowi-JK, untuk 'kerja keras' agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam puasa Ramadhan. Karenanya, Idulfitri 1436 H merupakan rangkaian puncak dari proses edukatif bagi segenap umat Islam tentang betapa pentingnya upaya *pendakian spiritualitas* dan *pendakian sosial* dalam meningkatkan harkat kemanusiaannya (dalam kiprah individu dan sosialnya). Umat manusia sesungguhnya hanyalah sebagai seorang hamba (*'abdi*), yang lambat-laun tapi pasti dengan akan ada pertanggungjawaban dihadapan-Nya atas apa yang telah dilakukan, baik secara pribadi maupun kolektif-sosial di dunia.

Sebagai umat mayoritas di negeri ini, umat Islam, tentunya memiliki peran terdepan dalam membangun dan memajukan bangsa

ini sehingga sejajar dengan bangsa lain karena kualitas harkat kemanusiaannya. Akhirnya, melalui Idulfitri 1436 H, umat Islam diharapkan tidak hanya kembali suci (*fitriah*) tetapi juga adanya *pendakian spiritual* dan *pendakian sosial* yang diharapkan tercermin dalam perilaku sehari-hari setahun berikutnya, baik dalam konteks pribadi maupun kolektif berbangsa. Dengan bekal kualitas harkat kemanusiaan (iman dan takwa), segenap elemen bangsa, terlebih umat Islam, diharapkan berkontribusi dalam upaya memajukan negeri tercinta ini. Akhirnya, dengan mengucapkan selamat Idul fitri 1436 H, *minal 'aidin wal fa'idzin*, mohon ma'af lahir dan bathin.

Bab 3

PENDIDIKAN DAN NATIONAL CHARACTER-BUILDING

Para *founding fathers* telah menyadari urgensinya membangun *national character building* jauh sebelum berdirinya bangsa ini. Akhir-akhir ini, terutama sejak memasuki era-reformasi, isu penguatan karakter bangsa ini menjadi sering lagi dibicarakan di publik dalam upaya merekonstruksi nilai-nilai kebangsaan yang mulai mengalami proses degradasi akibat dari berbagai persoalan yang dialami bangsa ini. Dalam bahasan ini, diungkapkan tentang urgensi *national character building* dalam memperkuat integrasi sosial dan integrasi bangsa.

Membangun 'Kultur Akademik' PT: Sekelumit 'Pelajaran' dari Gottingen Universitas, Germany¹

Selama mengikuti *Professor-research fellowship* yang ditugaskan Kementerian Agama RI, ke Universitas Gottingen, Germany, pada 2012 (November-Desember 2012), saya tertarik untuk melakukan observasi 'sepintas' bertalian dengan *cross-cultural studies* di Gottingen, Germany, baik di kampus maupun di luar kampus, yakni di masyarakat Gottingen dan sekitarnya. Tulisan ini, merupakan hasil pengamatan atau observasi informal tentang etos kerja dan kultur akademik masyarakat Gottingen, baik di kampus Gottingen University dan masyarakat Gottingen umumnya.

Dapat dijelaskan bahwa 'kultur akademik' masyarakat Gottingen suatu hal yang 'unik' dan diluar dugaan saya sebelum berangkat atau

¹ Tulisan ini merupakan 'catatan akademik' penulis ketika mengikuti program *Professor-Research fellowship/ARFI*, Kementerian Agama RI, di Gottingen Universitas, Germany, pada 2012 (November-Desember 2012).

ketika masih di tanah air. Awalnya, saya berfikir bahwa Jerman pasti orangnya 'arogan', 'kejam', dan 'angkuh', karena barangkali adanya pengaruh bacaan/refensi tentang Hitler yang saya pernah saya dipelajari di bangku sekolah dulu. Walaupun, sesungguhnya Hitler sendiri tidak terlalu populer bagi sebagian masyarakat Jerman, tetapi sebagian lainnya, terutama sebagaimana kaula muda Jerman ada pula yang memujinya, sehingga memunculkan Neo-Nazi. Ternyata, ada banyak hal positif bagi saya dan kawan-kawan yang perlu dipelajari sebagai upaya pengembangan 'tradisi' atau 'kultur' akademik di perguruan tinggi di tanah air.

University Gottingen, yang berdiri sejak 1714 M, zaman Abad Pertengahan (*Middle Age*), memiliki 'nilai tambah' (*value-added*) tersendiri. Sejarah Gottingen Universitas, telah memiliki sejarah historis yang panjang. Ternyata, perguruan yang meraih 44 kali hadiah nobel dalam berbagai bidang disipin ilmu ini, berawal dari peran elit-birokrasi atau elit-penguasa Kota Gottingen ketika itu. Terbukti, gedung pertama universitas ini masih berdiri kokoh ditengah kota Gottingen; sama halnya, Auditorium Universitas Gottingen terjaga sempurna dan masih berfungsi sebagai salah satu kegiatan akademik universitas. Jika diprediksi, agaknya, dilihat secara fisik dan aset, diperkirakan separuh sarana fisik bangunan di Kota Gottingen merupakan aset Gottingen University. Karenanya, menceritakan sejarah Gottingen, tidak terlepas dari keberadaan Universitas Gottingen. Bahkan Rektor pertama Universitas Gottingen, berlatar belakang dari elit-penguasa kota Gottingen, yakni George August, sehingga universitas ini diberi nama lengkap Georg August Gottingen Universitas.

Seperti telah diungkapkan terdahulu, tulisan ini lebih difokuskan pada pertanyaan pada bagaimana 'kultur' akademik di Gottingen Universitas, Germany. Agaknya, dapat dijelaskan bahwa hampir semua komponen atau elemen sivitas akademika kampus (dosen, pegawai) memperlihatkan etos kerja profesional: kerja keras, disiplin, *on-time*, terampil, jujur, dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, antara teori yang pelajari selama ini tentang etos kerja, kinerja, dan profesionalisme terkesan terlihat dalam kenyataan dalam perilaku insan akademik dan masyarakat umumnya. Sama halnya dengan mahasiswa, memperlihatkan suatu keadaan yang etos belajar yang tinggi. Para mahasiswa terkesan terlatih dengan kehidupan dalam 'kesederhanaan', yakni *'life style'* di kampus. Untuk

ukuran negara Eropa dan Barat, agaknya perilaku mahasiswa masih dalam kategori wajar-wajar saja, karena diluar persepsi selama ini bahwa negara maju dan sejahtera seperti Jerman pasti mahasiswanya berperilaku konsumtif. Seperti, kebanyakan mahasiswa di Indonesia yang orang tuanya mampu umumnya membaawa kendaraan roda empat bila pergi kuliah. Tetapi, perlu dicatat bahwa pemerintah Jerman, tidak mudah memberi Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi warga negaranya, dimana seorang yang memperoleh SIM akan merasakan prestasi yang luar biasa. Usia muda dan mahasiswa sangat jarang memperoleh SIM. Bisa juga motif menekan angka kecelakaan, menjaga ekologi (polusi), atau lainnya, belum terlalu pasti tentunya bagi saya.

Karenanya, mayoritas mahasiswa di *Göttingen University* hanya memiliki 'sepeda' ataupun naik transportasi publik, bus, dimana hampir setiap lima menit sekali bus akan tersedia di halte-halte universitas. Tidak tampak kelihatan 'gengsi' atau sungkan dalam bersepeda atau naik bus atau transportasi publik. Tentunya, hal ini, bukanlah berarti orang tua mereka barangkali tidak bisa membeli mobil, tetapi kesederhanaan dalam berfikir dan berperilaku agaknya telah terlatih, mentradisi sejak usia sekolah hingga perguruan tinggi mereka telah terlatih dengan kesederhanaan. Anak-anak sekolah pun umumnya naik transportasi publik atau bus yang mendapat tiket bus dengan harga khusus yang jauh lebih murah. Lebih dari itu, kultur akademik mereka terlihat juga dengan kebiasaan dan tingkat membaca yang tinggi sebagaimana terlihat pada masyarakat pada negara maju umumnya. Misalnya, buku-buku novel juga tentunya sangat diminati orang dewasa dan usia lanjut.

'Sopan santun' pun agak tampak dalam kehidupan mereka baik di kampus *University Göttingen* ataupun di masyarakat *Göttingen*. Tidak terlihat banyak suara keras orang berbicara di perpustakaan, di bus kota, di jalan-jalan, dan di pusat perbelanjaan, tentu bukanlah berarti sunyi, tetapi, biasanya mereka berbicara seperlunya dan menjaga privasi orang lain. Jika naik kendaraan umum, seorang penumpang berusia muda, terbiasa memberi kesempatan atau tempat duduk kepada penumpang usia lanjut, apabila tempat duduknya terbatas. Antrean naik bus, kereta api, masuk mal, merupakan menjadi ciri perilaku sosial mereka.

Kebiasaan disiplin, tertib, dan menghargai waktu tampak pula dalam kehidupan mahasiswa. Bila waktu istirahat dan makan siang, sekitar pukul 12.00-14.00, kantin menjadi ramai dengan mahasiswa. Mereka mengambil makanan yang diinginkan sesuai dengan selera dan selanjutnya antrean dan tidak berdesak-desakan. Setelah makan siang selesai, mereka mengantarkan pring kotor ke tempat yang telah tersedia yang sudah siap dilayani oleh pegawai kantin. Setelah waktu makan siang selesai tidak ada lagi penjualan berbagai makanan di kantin mahasiswa. Kantin mahasiswa dikelola oleh universitas. Jadi, setelah makan siang, mahasiswa melanjutkan aktivitas belajar atau kuliah klasikal atau mandiri di perpustakaan. Hampir tidak ada mahasiswa yang berdiri lama-lama ngobrol dengan waktu yang tidak efektif.

Menghargai kebersihan dan keindahan juga menjadi tradisi, yang terlihat dalam lingkungan kampus yang bersih dan parkir tertata dengan baik. Kesadaran ekologi juga tinggi, dimana pohon-pohon dan kembang terjaga dengan baik. Bahkan 'pagar-pagar hidup' sangat mendominasi batas jalan, gang, kantor, fakultas di universitas. Bila naik kendaraan bus umum, tidak diperkenankan sengaja atau tidak sengaja menjatuhkan sampah sekalipun dalam ukuran kecil. Jika, hal itu terjadi, sopir akan memperingatkan penumpang yang membuang sampah baik sengaja maupun tidak sengaja.

Satu hal lagi yang paling menonjol di kehidupan mahasiswa di universitas bahwa mahasiswa terbiasa dalam kemandirian. Setelah tamat sekolah menengah (level: SMA), siswa di Jerman biasanya memperoleh pengalaman satu tahun praktek bekerja di masyarakat, dan sering sekali di luar negeri. Setelah itu, mereka (siswa) baru melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau universitas. Setelah menjadi mahasiswa, mereka terbiasa kuliah sambil bekerja, *part-time*, sesuai dengan minat, keahlian, pada bidang pekerjaan yang diinginkan. Selain itu, penegakan aturan akademik kampus sangat mengedepankan konsistensi dan sudah menjadi kesadaran semua elemen kampus: dosen, karyawan, dan mahasiswa. Atau, harus dipatuhi siapa saja yang terlibat dan berhubungan dengan manajemen kampus Göttingen Universitas. Peraturan tidak hanya tertulis tetapi betul-betul diimplementasikan dalam praktek manajemen pendidikan dan kehidupan sivitas akademika di kampus.

Di masyarakat, memperlihatkan bahwa situasi yang tidak jauh berbeda dengan kehidupan di kampus. Begitu tampak bahwa perilaku masyarakat yang mengedepankan nilai kejujuran, disiplin, tepat waktu, kerja keras, menjaga privasi orang lain, dan menghargai 'lansia' (lanjut usia). Dari aspek kebersihan, kerapian, dan keindahan sangat tampak pula dalam kehidupan masyarakat Gottingen dalam kesehariannya. Penataan kota dan lingkungannya tidak terlepas dari peran dan fungsi riset, dimana peran Universitas Gottingen terintegrasi dengan kebutuhan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan Kota Gottingen. Di luar kota Gottingen pun, *suburb area*, terkesan tidak berbeda nyata dengan kehidupan masyarakat, baik dilihat dari kesediaan fasilitas kehidupan (listrik, jalan, transportasi, mal, dll). Sejumlah mal, dan juga Mc-Donald, KFC, justru berada di luar kota Gottingen, atau di *suburb area*. *Linkage* riset dengan kebutuhan dan kehidupan masyarakat, menjadikan keberadaan universitas, di Gottingen University, terkesan mampu mengikuti perkembangan dinamika masyarakat dari masa ke masa. Karenanya, mal-mal di Gottingen, umumnya banyak berada di luar kota, atau suburban area, daerah perkampungan.

Mengingat sejarah berdirinya University of Gottingen sangat erat dengan pengaruh birokrasi elit-penguasa kota Gottingen, bahkan Rektor pertama merupakan Walikota Gottingen. Integrasi universitas dan masyarakat juga terlihat pada pertama universitas Gottingen berada ditengah pusat kota Gottingen, yang mana gedung dengan arsitek unik dan menarik tampak masih utuh, kokoh, dan terjaga dengan baik, serta tetap difungsikan untuk urusan tertentu universitas, seperti bagian promosi, alumni, dan seremonial tertentu.

Selama berada di Kota Gottingen tidak terlihat atau ditemukan adanya suatu tindakan kriminal, katakanlah pembunuhan, perampokan, pencurian, dan sejenisnya. Hal ini juga, yang terlihat jarang sekali tayangan berita televisi (TV) tentang kriminal tersebut, tetapi bukan tidak ada sama sekali. Akan tetapi, di Kota Gottingen, terdapat juga pengemis, pengamen, walaupun dalam jumlah dalam 'hitungan jari'. Suatu yang menarik bahwa pengemis, pengamen, tetap diberi tempat dan dihargai oleh pihak penguasa Gottingen dan keamanan (*security*). Mereka (pengemis dan pengamen) juga tetap patuh pada aturan, misalnya kapan waktu dimulai mengamen dan ditempat yang tidak mengganggu ketertiban umum. Suasana di Gottingen, Jerman, memiliki suatu perbedaan dengan di Paris,

dimana pemuda-pemuda berkulit hitam sebagai pedagang 'oleh-oleh' di Paris, Prancis, misalnya, dimana mereka terkesan 'memaksa' (tapi bukan kriminal) dan tempat operasi ilegal, yang sering dikejar-kejar polisi.

Suatu kasus yang menjadi penguatan saya, yang patut pula diungkapkan adalah keberadaan kota 'tua' bekas tambang perak, yakni Gosler, sekitar dua jam perjalanan dari kota Gottingen, dengan bus. Sebagai kota 'tua' bekas tambang perak, Gosler, sangat menarik karena bangunan-bangunan tua, seperti istana, gereja, dan rumah-rumah 'mewah' pada zaman keemasan tambang itu tetap terjaga dengan baik, dan sebagian rumah-rumah masih dihuni sanak-keturunannya. Rumah milik keluarga pemilik Siemen (produk HP) kelas dunia juga masih utuh dan dihuni keluarga Siemen. Tidak seperti banyak kasus daerah bekas tambang dibelahan dunia lainnya, kota bekas tambang perak, Gosler, justru memberi benefit ekonomi karena menjadi salah satu tujuan wisata domestik maupun luar negeri. Kota tua, Gosler, memberi 'magnet' ekonomi pariwisata bagi masyarakat lokal, Gosler. Gosler, justru tidak hanya menjadi peninggalan historis semata tetapi juga menjadi sampel pelajaran penting bagi pengunjung dari berbagai belahan dunia lainnya. Gosler seakan telah memberi pelajaran penting yakni menjaga ekologi dan berbagai atribut 'daerah' bekas kota tambang dan dengan kreativitas masyarakat lokal, pemerintah, dan peran riset universitas menjadi harapan bagi kehidupan. Sebagai kota bekas tambang, Gosler menjadi pusat riset bagi mahasiswa geologi dan pertambangan, terbukti terdapat suatu universitas yang khusus mempersiapkan para sarjana geologi (teknik tambang) melakukan riset bertalian dengan geologi.

Tiga kasus *cross-cultural studies* yang menjadi fokus pengamatan: kehidupan akademik kampus University of Gottingen, kehidupan masyarakat kota Gottingen dan sekitarnya, serta kota tua bekas tambang, Gosler, agaknya sudah cukuplah bagi penulis untuk menarik hipotesis bahwa konsep pembangunan yang diterapkan dalam masyarakat di Gottingen, dan Gosler memperlihatkan integrasi antara riset-universitas dan kebutuhan dan potensi yang terdapat pada suatu daerah. Dengan kata lain, 'kultur' akademik perguruan tinggi Universitas Gottingen, tampak terintegral antara teori di kampus dan di masyarakat, yang menjadikan perguruan tinggi tidak hanya menjadi 'menara gading'.

Lebih jauh lagi, dengan tantangan iklim Jerman yang ekstrim dengan berbagai musimnya: *summer, autumn, winter, dan spring*, justru merupakan tantangan tersendiri agaknya bagi masyarakat negeri ini agar tetap *survive* dan menyesuaikan dengan iklim dan kelestarian alam. Tentunya, adaptasi yang tepat adaah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses pematangan tradisi dan kultur akademik berabad-abad hingga menjadi kedewasaan. Hal ini pula, agaknya tesis Max Weber tentang *The Protestant Ethics* terkesan masih tergambar dan kuat pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, yang mempengaruhi etos kerja masyarakat Gottingen dan sekitarnya, baik akademisi, pelaku bisnis, profesional, dan lain sebagainya. Agaknya, hal ini masuk akal, mengingat pemikiran Weber sesungguhnya sangat berpengaruh kuat di Eropa Barat (termasuk Gottingen) dan Amerika. Seperti diketahui bahwa tesis Weber tentang peran agama (Etika Protestan) sangat penting sebagai penyebab kemajuan ekonomi di Eropa Barat dan Amerika. Agama dapat sebagai sumber motivasi, yakni 'siapa yang berhasil di dunia akan berhasil nanti di akherat (surga); kalau gagal didunia akan gagal di akherat (masuk neraka)'.

Dari sejumlah fenomena sosial pada *cross-cultural studies*, seperti dalam paparan diatas, agaknya ada sejumlah sejumlah hal yang perlu diungkapkan lebih jauh. *Pertama*, secara kultural, pengaruh etika (ajaran) agama Protestan terhadap berbagai dinamika kehidupan sosial keagamaan masyarakat Gottingen masih kuat. 'Kuat' disini diartikan bahwa agama sebagai tradisi. Semua bangunan gereja dalam usia ratusan tahun tetap terpelihara walaupun berada di pusat kota. Jika sudah perlu diperbaiki segera diperbaiki, dan tetap menjaga arsitek dan bentuk awal (asli). Hal ini mengingatkan bahwa bagaimana Weber lebih mementingkan etika agama, dalam hal ini ajaran agama Protestan, dalam melihat kemajuan masyarakat Eropa Barat pada waktu itu. Kemajuan peradaban Eropa Barat, kasus Gottingen, tentu secara sosiologis, memperkuat tesis Weber ini. Kerja keras, jujur, tepat waktu, dll., merupakan ajaran atau etika agama Protestan. Memang, Weber tidak terlepas dari kritik, karena pengaruh pemikirannya dikatakan karena pengaruh orang tuanya sebagai kapitalis, yang memiliki pabrik. Tetapi, setidaknya Weber telah menulis dengan teta konsisten menggunakan etika Protestan. Teori Weber selalu menjadi rujukan bagi para peneliti sosial-keagamaan, seperti dilakukan pengikutnya Robbert Bellah tentang Agama Tokogawa di Jepang. Nilai-nilai etika Protestan seakan terlihat pula

dalam realitas etos kehidupan masyarakat, yang mengedepankan kerja keras, disiplin, jujur, taat aturan menjaga privasi, mandiri, konfiden, dan sederhana. Hal ini, suatu implementasi nilai-nilai etik agama Protestan yang digambarkan Weber, dimana 'kalau berhasil di dunia akan berhasil diakherat atau imbalan 'surga'.

Etika al-Quran juga menekankan pentingnya *akhlaq karimah* dalam konteks luas, baik kontek hubungan dengan Allah SWT (*hablum minallah*), hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*), dan hubungan manusia dengan alam (*hablum minal'alam*). Dalam teori pendidikan, seperti dikatakan Benyamin Bloom, juga memfokuskan pada hal serupa, yakni pentingnya pengembangan anak didik baik domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Para ahli filsafat pendidikan lebih jauh juga menekankan pentingnya pengembangan akal (*'aql*), hati nurani (*qalbu*), dan jasmani (*fisik*). Sebagai *khalifatullah fil ardh*, sesungguhnya manusia didorong untuk mengembangkan ketiga potensi atau domain yang dimilikinya, dalam upaya memakmurkan kehidupan umat manusia.

Kedua, kuatnya tradisi masyarakat yang mencintai ilmu pengetahuan dan profesional. Jenis pekerjaan bukanlah suatu permasalahan, yang lebih penting adalah profesional. Karenanya, sistim pendidikan Jerman, lazim memberi kesempatan kepada anak didik atau mahasiswa 'belajar' dan 'bekerja'. Pengetahuan teori atau akademik di sekolah atau kampus berintegrasi dengan realitas kehidupan di masyarakat secara praktek. Jadi, disini, tentunya sekolah dan kampus diupayakan terintegral dengan realitas kebutuhan masyarakat, sehingga diupayakan menjadi 'solusi', bukan 'menara gading' tadi. Sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi anak didik/mahasiswa telah diajarkan kemandirian. Dalam hal atau level tertentu, agaknya sistem pembelajaran kita pun perlu memperhatikan kemandirian pula. Bukankah ajaran Islam atau etik al-Qur'an pun menekankan kemandirian.

Ketiga, membandingkan Universitas Gottingen dengan perguruan tinggi di tanah air, juga PTAI, memang tidak relevan sepenuhnya, karena universitas ini sudah berdiri sejak 1714 M dan menjadi salah satu universitas kelas dunia. Setidaknya 44 *nobel prizes* berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan yang telah diraih. Suatu hal yang patut diambil pelajaran adalah perlunya kita belajar membangun 'kultur akademik' terhadap pengalaman universitas-

universitas di Jerman dalam membangun dan mengelola universitas mereka, dari 'awal' hingga 'maju' secara konsisten, dalam proses waktu yang panjang, dengan konsisten dan berkesinambungan.

Seperti halnya sejarah berdirinya PTAI umumnya, yang berawal dari 'misi' keagamaan Islam atas peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga pemerintah Orde Lama, Ir. Soekarno, merasa penting memberi penghargaan kepada umat Islam Indonesia atas jasanya memperjuangkan kemerdekaan RI 1945. Karenanya, dibawah kekuasaan Presiden Soekarno didirikanlah Sekolah Persiapan Institut Agama Islam (SPAIN) pertama di Jogjakarta sekitar 1960-an, dan diikuti sejumlah SPAIN di tanah air pada tahun berikutnya, selain mendirikan Departemen Agama RI. Kebanyakan sejarah universitas di Eropa pun tidak terlepas dari peran gereja (agama) dan elit-penguasa-pemerintah atas pentingnya membangun universitas. Karenanya, dalam perkembangannya, universitas di Eropa, Amerika, dan Australia, selalu berdampingan dengan sejarah peran gereja atau agama Kristen, yang mana di kampus-kampus meeka biasanya selalu ada bekas gereja tua berumur ratusan tahun yang tetap terjaga baik fisik bangunannya.

Keempat, bahwa PTAI, tidak terkecuali IAIN Raden Fatah Palembang, sesungguhnya memiliki peluang besar untuk membangun suatu peradaban Islam Indonesia masa depan. IAIN Raden Fatah Palembang, sejak berdirinya 1960-an, terus menunjukkan banyak kemajuan dan terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) yang *rahmatan lil 'alamin*. Etika Islam sesungguhnya telah menjadi fokus utama dalam kajian keislaman di PTAI yang mana etika atau ajaran yang paling sempurna yang dapat memandu umat-Nya menjadi umat yang akan membawa *rahmatan lil 'alamin* itu. Hal ini sejala dengan tujuan pembangunan nasional yang mengedepankan kecerdasan ilmu pengetahuan dan kecerdasan spritual-keagamaan. Dari masa ke masa IAIN karenanya seakan terus ber'metamorfosis' dan berkembang secara alami sebagai konsekuensi dari perubahan sosial. Hadist Nabi mengatakan: '*Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup pada suatu zaman yang berbeda dengan mu*'. Jika, pada suatu saat IAIN berubah menjadi UIN Raden Fatah Palembang, maka hal itu '*sunnatullah*' pula, hal itu sebagai respons (etika al-Qur'an) terhadap perubahan sosial yang dinamis itu.

Kelima, menciptakan dan mendambakan suatu peradaban Indonesia yang diharapkan memerlukan suatu 'proses' pelayanan PTAI, katakanlah IAIN Raden Fatah Palembang, yang mengedepankan visi ke depan yang berpengharapan bagi masyarakat. Tantangan terberat adalah upaya memperbaiki 'etos kerja' menuju 'kultur' akademik yang diharapkan. Etos kerja yang baik akan menjadi 'kultur akademik' yang mengedepankan iklim pengembangan keilmuan. Hal ini, karena tantangan IAIN ke depan tidak ringan.

Sejarah perguruan tinggi yang maju, ternyata selalu menempatkan perguruan tinggi sebagai 'respons' atau jawaban terhadap berbagai persoalan masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang yang senantiasa dinamis. Karenanya, suatu perguruan tinggi, tidak terkecuali PTAI, seperti IAIN Raden Fatah Palembang, hendaklah mampu memberi respons terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat dengan kualitas pelayanan perkuliahan yang berkualitas. Kedepan, IAIN harus memosisikan diri sebagai solusi dari berbagai problem aktual masyarakat yang menjadi domainnya. Karena domain yang menjadi tanggung jawab IAIN itu terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, dan juga sangat ditentukan kinerja yang visioner, responsif, dan berupaya sebagai solutif terhadap berbagai dileman dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat.

Keenam, mengutip pendapat A. Qadry Azizy (alm), mantan Dirjen Ditperta Kemenag RI, bahwa iklim birokrasi pengelolaan manajemen PTAI umumnya masih terlalu mengedepankan '*political-byrocratic climate*' dan seakan mengalahkan pentingnya membangun '*academic culture*' itu sendiri. Kedepan, PTAI, haruslah dikelola oleh mereka yang punya perhatian serius dan komitmen dalam menjalankan program perguruan tinggi yang mumpuni. Agaknya, pemahaman *akhlaq karimah* akan lebih sempurna apabila diperkuat dengan perilaku aktual pengelolaan PTAI yang mengedepankan dan menjunjung pelayanan birokrasi-akademik yang bersih, *cleant-government*, dan birokrasi yang baik, *good-governance*. Karenanya, kedepan, IAIN Raden Fatah agaknya selain perlunya reformasi insitusional, membenahi kinerja dan komitmen akademik yang fokus dan jelas, perlu pula mengembangkan *linkage* dan *networkings* dengan pihak terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan mengutamakan prinsip mutual-simbiosis. Langkah responsif, terbuka, dan terbuka sangat diperlukan dari pihak

penambil kebijakan tanpa adanya upaya 'kreatif' dan 'ekstra-ordiner' yang positif agak sulit kiranya mencari peluang-peluang yang seharusnya bisa diraih.

Jika harapan diatas menjadi perhatian dan disepakati bersama dengan kekuatan 'energi' manajemen birokrasi yang kuat dan prospektif, maka etos kerja dan kinerja pun akan menjadi lebih baik, yang pada akhirnya akan membentuk suatu 'kultur' akademik sesungguhnya. Jika, 'kultur' akademik telah tercipta maka obsesi, cita-cita dan program apapun yang diinginkan bersama akan menjadi kenyataan. Cita-cita IAIN menjadi UIN yang dirancang sejak 2003 hingga kini menjadi obsesi dan cita-cita bersama. Lebih dari itu, perubahan mentalitas dan 'kultur' akademik agaknya masih mejadi persoalan serius bagi kita semua, dimana hal itu akan menentukan prestasi dan reputasi institusi ini di tengah masyarakat, sebagai *stakeholders*.

Gottingen Universitat, Germany, 18/12/2012.

Urgensi 'National Character Building'²

Kebijakan pemerintah untuk kembali memprioritaskan kebudayaan dalam proses pembangunan generasi muda merupakan bentuk *national character building*. Pembangunan karakter generasi muda ini diharapkan dapat menjadi identitas anak bangsa di era globalisasi dan akulturasi budaya dunia, serta dapat mendorong kemandirian dalam upaya peningkatan kemampuan daya saing generasi muda Indonesia.³ Dalam kaitannya dengan pembangunan masa depan bangsa, Bung Karno, kerap kali mengungkapkan slogan *nation and character building*. Suksesnya pembangunan suatu bangsa agar menjadi bangsa besar, dikatakan Bung Karno, mesti dimulai dengan pembangunan manusianya, yang diistilahkan beliau dengan *man behind the gun*. Selo Soemardjan menyebutnya dengan manusia pembangunan, yang diantara cirinya adalah memiliki watak yang bermoral tinggi.⁴

² Tulisan disampaikan penulis pada Seminar Pendidikan Karakter, Best Skip Hotel, Palembang, 17 Desember 2013.

³ Media Indonesia, 7 November 2011.

⁴ Desre Zuraidah dan Jufrina Rizal (eds.), *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan: Pokok-Pokok Pikiran Selo Soemardjan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 35.

Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia bertalian erat dengan peranan pembangunan sektor pendidikan. Dalam UU No. 20/2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan:

"Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya untuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".⁵

Karakter atau moral bangsa ialah bagaimana sikap, tingkah laku, dan perbuatan suatu bangsa. Moral bangsa Indonesia merupakan kristalisasi dari aneka ragam moral yang ada, baik yang berasal dari adat-istiadat secara turun-temurun maupun dari beragama agama yang silih berganti memasuki Indonesia, diantaranya yang lebih menonjol adalah unsur-unsur budaya Islam. Hal tersebut jelas dari bagian barat kepulauan Nusantara, sedangkan semakin ke timur makin berkurang hingga daerah-daerah di Papua, hampir tidak terlihat.⁶

Proses perkembangan moral bangsa, disamping dipengaruhi moral atau nilai-nilai Islam, juga oleh moral atau nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari pengembangan budaya kaum muslim di Indonesia dengan jalan mengisi keinginan masyarakat melalui penggalan secara mendalam atas jiwa yang terkandung dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadist*. Moral Islam, berfungsi sebagai *filter* yang memberikan seleksi terhadap moral yang ada, dalam arti moral yang bersesuaian atau tidak bertentangan dengan Islam dibiarkan terus berkembang, sementara yang bertentangan disisihkan, diganti dengan moral yang bersesuaian dengan Islam. Terhadap ilmu pengetahuan

⁵ "Undang-Undang RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 3" dalam *Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dilengkap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Buku Teks Pelajaran*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2008.

⁶ Dari lintasan sejarah dapat dikatakan bahwa proses pembinaan moral bangsa di Indonesia dimulai sejak timbulnya cita-cita kemerdekaan, yang terlihat dengan jelas dipengaruhi moral Islam baik pada masa permulaan maupun pada masa timbulnya pergerakan kemerdekaan yang kemudian terpadu dengan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat-saat bangsa Indonesia mengisi kemerdekaannya. Pada masa Orde Baru, moral bangsa Indonesia diidentifikasi sebagai moral Pancasila. Lihat: (M. Abdul Karim, *Islam Nusantara*, Pengantar Ahmad Syafiqi Ma'arif, Pustaka Book Publisher, Jogjakarta, 2007, hlm. 84).

dan teknologi, moral Islam sangat diperlukan untuk menyeleksi agar penggunaannya tidak menyimpang dari tujuan agama Islam, yakni memelihara jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama.⁷ Moral, dalam komunitas Islam, terkenal dengan *al-akhlak al-karimah*, memuat sekumpulan nilai yang hasus dijunjung tinggi.⁸ Para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah mempertimbangkan secara matang tentang urgensi moral atau *al-akhlak-al-karimah* dalam kehidupan bangsa Indonesia tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Meutia Hatta⁹ mengatakan berbagai sisi kehidupan manusia selama ini luput dari pembangunan karakter, jiwa dan raga manusia. Sering kali perhatian generasi muda terfokus pada pembangunan ekonomi dan orientasi fisik-material. Dengan karakter demikian, tidak mengherankan jika dikalangan generasi muda tumbuh subur sifat-sifat materialisme, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan perilaku kurang terpuji lainnya. Karakter sebagian generasi muda ini

⁷ Jika ilmu pengetahuan dan teknologi bertentangan dengan tujuan Islam, maka harus dicegah, tetapi apabila bersesuaian harus didukung dan dikembangkan. Perkembangan moral bangsa Indonesia adalah hasil dari proses percampuran budaya, bersifat *penetration pacifique*. Masing-masing moral keagamaan ikut mengisi dalam pembinaan moral bangsa di Indonesia. Karena Indonesia yang mayoritas Islam, maka pengaruh Islam terhadap pembinaan moral bangsa sangat dominan dimana moral Islam dapat menghablur dalam moral bangsa tanpa adanya penekanan dan kekerasan. Untuk memelihara kesatuan bangsa akibat pergolakan moral dari berbagai macam agama, dibentuk konsep yang disebut dengan kerukunan beragama. Dari struktur budaya seperti inilah bangsa Indonesia mendapatkan moral dasar dalam pembentukan kehidupan bermasyarakat yang memiliki ikatan yang kuat, buka saja dalam kehidupan sosial, akan tetapi sangat berguna bagi kehidupan ideologi negara, politik, sosial, budaya, ketahanan, dan kemananan nasional, suatu struktur kemasyarakatan yang memberikan modal dasar bagi terbinanya moral bangsa. Dasar pembinaan moral Islam ini sebagai manifestasi dari bimbingan wahyu, lahir dalam bentuk sikap, tingah laku, dan perbuatan. Sementara moral yang lain, jiwanya tidak bertentangan dengan bimbingan wahyu, tetap berkembang dan dibiarkan berkembang sesuai dengan sikap Islam yang terkenal dengan *mura'ah al-'urf*: mengendalikan 'urf, bahkan ada diantara beberapa moral yang merupakan akulturasi diantara Islam dengan budaya-budaya yang berkembang. Kebudayaan Islam telah meresap pada rakyat Indonesia yang jumlahnya sekitar 90% beragama Islam dipastikan mewarnai nilai-nilai moral bangsa, sehingga kebudayaan Islam yang merupakan faktor yang dominan dalam kehidupan masyarakat. Lihat: (M. Abdul Karim, "Islam Nusantara", *ibid.*, hlm. 85).

⁸ Dari beragam pendapat pemikir Islam, diketahui bahwa *al-akhlak-al-karimah* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist adalah kumpulan nilai yang pertama mendasari kehidupan manusia berasyarakat secara religius. Dalam perjalanan sejarah, *al-akhlak al-karimah*, telah menjadi payung memelihara keutuhan bangsa. Selama moral suatu bangsa masih terpelihara dan dijunjung tinggi, maka bangsa itu dapat berkembang. Sebaliknya, jika moral bangsa sudah diabaikan, maka bangsa itu akan segera hancur menemui kebinasaan. Lihat: (M. Abdul Karim, *ibid.*, hlm. 183-184).

⁹ <http://www.beritaIndonesia.co.id/humaniora/membangun-karakter-generasi-muda> (diakses: tanggal 22/10/2013).

sudah mengabaikan pembangunan kemanusiaan. Karakter sebagai gambaran mentalitas sebagian generasi muda saat ini, sejalan dengan pendapat seorang antropolog, Koentjaraningrat: *pertama*, mentalitas meremehkan mutu; *kedua*, mentalitas suka menerabas; *ketiga*, sifat tidak percaya kepada diri sendiri; *keempat*, sifat tidak berdisiplin murni; dan *kelima*, sifat tidak bertanggung jawab. Untuk itu, dikatakan Mutia Hatta, menghadapi globalisasi, karakter generasi muda harus lebih meningkatkan budi pekerti dan sikap menghargai dan menghormati dalam kehidupan sehari-hari.

E. Mulyasa menulis bahwa di Indonesia pendidikan karakter bangsa telah berlangsung lama, jauh sebelum Indonesia merdeka. Ki Hajar dewantara sebagai Pahlawan Pendidikan nasional berpandangan tentang pendidikan karakter sbagai asas Taman Siswa 1922, yang memiliki prinsip: 1) Hak seorang untuk mengatur diri sendiri dengan tujuan tertibnya persatuan dalam kehidupan umum; (2) Pengajaran berarti mendidik anak agar merdeka batinnya, pikirannya, dan tenaganya; 3) Pendidikan harus selaras dengan kehidupan; (4) Kultur sendiri yang selaras dengan kodrat harus dapat memberi kedamaian hidup; 5) Harus bekerja menurut kekuatan sendiri; 6) Perlu hidup dengan berdiri sendiri; dan 7) Dengan tidak terikat, lahir batin dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik.¹⁰

Diungkapkan H.E. Mulyasa, di Sumatera Barat, Lembaga Pendidikan Kayutanam (*INS Kayutanam*) yang didirikan Mohammad Syafe'i (1897-1969) memiliki hubungan pergerakan nasional. Syafe'i menolak model pendidikan Barat yang dinilai hanya

¹⁰ Taman Siswa memiliki Panca Dharma, yakni kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan dan kemanusiaan. Dewantara mengartikan pendidikan sebagai proses pembudayaan kodrat alam setiap individu dengan kemampuan untuk mempertahankan hidup, yang tertuju pada tercapainya kemerdekaan lahir batin sehingga memperoleh keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kebahagiaan lahir batin. Diungkapkan pula bahwa pendidikan meliputi tujuan personal dan tujuan sosial. Tujuan personal bertalian dengan kuatnya tiang-tiang kemerdekaan yang mewarnai kehidupan dalam diri setiap individu. Tujuan sosial adalah terciptanya kebersamaan untuk membangun masyarakat yang berbudaya dan berkebangsaan yang khas berdasarkan kemanusiaan, sehingga terwujud kehidupan yang tertib, damai, aman, nyaman, dan sejahtera. Dalam asas Pendidikan Taman Siswa, Dewantara ingin mendidik manusia Indonesia secara utuh (*kaffah*), yang dapat hidup mandiri, efektif, efisien, produktif, dan akuntabel. Untuk kepentingan tersebut, masyarakat khususnya peserta didik perlu dibekali dasar-dasar kehidupan agar memiliki kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen yang tinggi, menuju masyarakat aman, tertib, dan damai. Lihat: (H.E. Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 6-7).

mengedepankan aspek kognitif dan mendambakan anak didiknya agar menjadi seorang yang ideal, yakni tertanam cinta kebenaran dalam hatinya, dalam pengetahuan intelektualnya, dan dalam prilakunya sehari-hari.¹¹ Sebagaimana Mohammad Syafe'i, K.H. Hasim Asy'ari dalam kitabnya *Adab Al-'Alim Wa Al-Muta'Allim*, juga menekankan konsennya pada pendidikan karakter. Dalam konsep ini, *belajar* diartikan sebagai ibadah untuk memperoleh ridha Allah, agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan akherat, serta untuk melestarikan nilai-nilai budaya Islam, dan tidak sekedar menghilangkan kebodohan. Dalam sejarah Pendidikan Pesantren yang didikannya sejak awal bertujuan membentuk karakter dan kemandirian santri.¹²

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, dimana kehadirannya merupakan tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik dengan baik. Untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, salah satu caranya adalah dengan menciptakan anak-anak atau gernerasi muda sebagai aktor dan pionir masa depan. Cerdas dan pintar saja tentunya tidak cukup, tetapi juga diperlukan juga sifat yang pantang menyerah, sehat jasmani dan rohani, tanggung jawab, memiliki harapan dan motivasi tinggi, peka terhadap lingkungan sekitarnya, dan berkepribadian baik, *berakhlakul karmah*, agar anak-anak atau generasi muda menjadi tangguh dan mampu meraih impian masa depan yang lebih baik. Karakter anak ideal yang didambakan banyak orang tua antara lain adalah hormat dan berbakti kepada orang tua, guru, peka terhadap karya seni, terampil, mandiri, penuh semangat, disiplin, penuh inisiatif, sehat dan mencintai Tanah Air. Karakter ini senada dengan karakter anak Generasi Platinum.¹³

¹¹ Mohammad Syafe'i merupakan putra Marah Sultan, tokoh pergerakan politik NIP di Padang, yang melanjutkan cita-cita perjuangan orang tuanya daam bidang pendidikan. Pendidikan yang dibangunnya dapat menghasilkan manusia yang rajin dan ulet, serta memiliki kecakapan yang diperlukan sebagai bangsa yang berrmarabat, dan memiliki kecintaan terhadap tanah air dan sesama manusia. Lihat: (H.E. Mulyasa, "Manajemen Pendidikan Karakter", *ibid*, hlm.7).

¹² H. E.Mulyasa, *ibid.*, hm. 7.

¹³ *Generasi Platinum* yang kadang kala disebut juga *Generasi Z* memiliki karakter khusus, diantaranya: fisik yang sehat dan kuat, kecerdasan *multiple*, percaya diri, optimis, kreatif, inovatif, kompetitif, memiliki motivasi dan cita-cita yang tinggi, pantang putus asa, serta berakhlak mulia. Lihat : (Rubrik: "Karakter Anak Ideal untuk Masa Depan", *Kompas*, 4 Desember 2011).

Dalam buku *International Association of Character Cities (2006)*, karakter (*character*) adalah motivasi batiniah untuk melakukan yang benar berapapun "harga" yang harus dibayar. Pengertian ini, karakter dikaitkan dengan perbuatan yang mengandung nilai-nilai, moral, atau etika dalam kehidupan. Perbuatan dan nilai-nilai itu sedemikian pentingnya sehingga dirasa mutlak untuk dilakukan dan siap dibayar dengan "harga" berapapun. Karakter terkait dengan upaya mengembangkan kualitas, seperti: kejujuran, kesabaran, kesetiaan, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Hal ini, dapat dijelaskan bahwa karakter itu harus dimulai dari berbagai nilai-nilai moral yang ada dalam pikiran dan hati seorang, kemudian nilai-nilai itu kita wujudkan dalam tindakan atau perbuatan. Berikutnya, tindakan itu kita lakukan secara terus sehingga menjadi kebiasaan, serta dari kebiasaan itulah terbangun karakter. Hasilnya, karakter yang terbangun dapat mengarahkan upaya seorang dalam mencapai tujuan hidup.¹⁴

Alford dalam Supiana mengatakan, ada istilah yang pengertiannya hampir sama dengan karakter, yakni *personality characteristic* yang memiliki arti: bakat, kemampuan, sifat, dan lain sebagainya yang secara konsisten diperagakan seorang, seperti pola perilaku, sifat-sifat fisis dan ciri-ciri kepribadian. *Trait* merupakan kecenderungan untuk memberi respon kepada berbagai tipe stimulus dalam cara yang sama. *Personality* merupakan sifat dan perilaku khas seorang yang membedakannya dengan orang lain; integrasi karakteristik dan struktur-struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang; dan segala sesuatu tentang diri seorang seperti diketahui oleh orang lain. *Habit* merupakan perilaku yang diperoleh dan dimanifestasikan secara konsisten; tindakan yang telah dipelajari dan menjadi mapan serta relatif otomatis melalui pengulangan terus-menerus. Dalam Bahasa Arab, *character*, diartikan *khuluq, sajiyyah, thab'u* artinya budi pekerti, tabiat atau watak.¹⁵

¹⁴ <http://kawulamuda.ofees.net/budaya-membangun-karakter-bangsa-melalui-media-massa-televisi> (22/10/2011).

¹⁵ Seperti dikutip Supiana, "Pendidikan Karakter dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Islam", *Mozaik Pemikiran Islam, Bunga Rampai Pemikiran Islam Indonesia*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2011, hlm. 5.

Yusuf al-Qardawi mengkalifikasikan *akhlaq* menjadi tujuh kategori, sebagai tingkatan nilai-nilai moral (*moral values*) yang diharapkan dalam kehidupan muslim: *akhlaq* berhubungan dengan diri-sendiri (*self*); *akhlaq* berhubungan dengan keluarga (*family*); *akhlaq* berhubungan dengan masyarakat (*society*); *akhlaq* berhubungan dengan dunia hewani (*animal world*); *akhlaq* berhubungan dengan lingkungan fisik (*physical environment*); dan *akhlaq* berhubungan dengan Khalik (*Creator*).¹⁶ *Akhlaq* merupakan suatu dunia plural (*a plural world*) tetapi kadang kala digunakan dalam bentuk tunggal (*khuluk*) atau *singular form*, yang berarti karakter (*character*), *innate disposition*, atau "a state of the soul which causes it to perform its action without thought or deliberation". Banyak ilmuwan terkenal muslim, seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Miskawayh, Nizam al-Mulk, al-Ghazali, al-Razi, dan al-Tusi, telah mempelajari dan menulis tentang *akhlaq*. 'Ilm-al-*akhlaq* (*knowledge of moral values*) merupakan komponen mayor dari pada *Islamic Studies* pada semua level pendidikan Islam, disamping komponen lainnya, seperti 'Ilm al-Fiqh.¹⁷

Karakter, merupakan kumpulan dari beragam aspek kepribadian yang melambangkan kepribadian seorang. *Karakter* merupakan ciri-ciri tertentu yang sudah menyatu pada diri seorang yang ditampilkan dalam bentuk perilaku. Karena itu, dikatakan Farid Anjar, dalam Ensiklopedi Inggris-Arab, bahwa *character education* sebagai *pendidikan akhlak*.¹⁸ Sifat-sifat yang ada dalam diri seorang itu, terdapat sifat yang menonjol/dominan, yang kemudian menjadi karakteristik seorang atau sekelompok orang. Sifat-sifat yang dimiliki manusia sangat ditentukan pendidikan yang mempengaruhinya. Pendidikan, dalam hal ini, dapat mengembangkan potensi baik dan dapat menekan potensi buruk manusia.

Dengan demikian, *karakter* merupakan kualitas moral dan mental yang pembentukannya dipengaruhi oleh faktor bawaan (*fitrah* atau *nature*) dan lingkungan (sosialisasi atau lingkungan, *nurture*). Potensi karakter yang baik dimiliki seorang sebelum dilahirkan harus terus-menerus dikembangkan melalui sosialisasi dan pendidikan.

¹⁶ Yusuf al-Qardawi dalam kutipan J. Mark Halstead, "Islamic Values: a distinctive framework for moral education" *Journal of Moral Education*, Vol. 36, No. 3, September 2007, pp. 285.

¹⁷ *Ibid.*, p. 285.

¹⁸ Supiana, "Pendidikan Karakter dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Islam...", *ibid.*, hlm. 6.

Garbarino dan Brofenbrenner (Vasta, 1992) mengatakan jika suatu bangsa ingin bertahan hidup, perlu memiliki aturan-aturan yang menetapkan apa yang salah dan apa yang benar, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang adil dan tidak adil, dan apa yang patut dan tidak patut.

Memahami "aturan main" atau "aturan sosial" dalam kehidupan dan menginternalisasikannya dalam diri anak didik dengan baik patut menjadi perhatian orang tua (keluarga), pendidik (sekolah), dan masyarakat. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, *antre*, mematuhi aturan lalu-lintas, mandiri, jujur, toleran, disipin, tepat janji, dan sejenisnya, merupakan pemahaman yang baik anak didik terhadap "aturan sosial" sebagai hasil dari perkembangan kualitas moral dan mental seorang anak didik yang disebut *karakter (character)*.

Dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan, karakter, moral, atau *al-akhlak al-karimah*, pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan *keluarga/orang tua* pada anaknya. *Pola asuh* dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orangtua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang dan lain-lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Dengan kata lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam rangka pendidikan karakter anak. Baumrind mengkategorikan pola asuh menjadi tiga jenis: pola asuh : *democratic; authoritative; dan permissive*.¹⁹

¹⁹ *Pola asuh permisif* yang cenderung memberi kebebasan terhadap anak untuk berbuat apa saja sangat tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak. Bagaimana pun anak tetap memerlukan arahan dari orang tua untuk mengenal mana yang baik mana yang salah. Dengan memberi kebebasan yang berlebihan, apalagi terkesan membiarkan, akan membuat anak bingung dan berpotensi salah arah. *Pola asuh demokratis* tampaknya lebih kondusif dalam pendidikan karakter anak. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Baumrind yang menunjukkan bahwa orangtua yang demokratis lebih mendukung perkembangan anak terutama dalam kemandirian dan tanggungjawab. Orangtua yang otoriter merugikan, karena anak tidak mandiri, kurang tanggungjawab serta agresif, sedangkan orangtua yang permisif mengakibatkan anak kurang mampu dalam menyesuaikan diri di luar rumah. Arkoff dalam (Badingah, 1993), mengatakan bahwa anak yang dididik dengan cara demokratis umumnya cenderung mengungkapkan agresivitasnya dalam tindakan yang konstruktif atau dalam bentuk kebencian yang sifatnya sementara saja. Di sisi lain, anak yang dididik secara otoriter atau ditolak memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan agresivitasnya dalam bentuk tindakan merugikan. Anak yang dididik secara permisif cenderung mengembangkan tingkah laku agresif secara terbuka atau terang-terangan.

Djaka Datuk Sati mengungkapkan, psikologi kepribadian mengidentifikasi, bahwa unsur kepribadian meliputi temperamen dan watak (*character*). *Temperamen* terbentuk dari komposisi kimiawi (cairan) dalam tubuh, dan bersifat tetap. *Sebaliknya, watak* merupakan unsur bentukan.²⁰ Sama halnya dengan pandangan Gilbert Highest (1969), bahwa 90% dari kebiasaan anak dibentuk oleh keluarga, dimana proses pembentukannya berlangsung sejak dari bangun tidur hingga anak kembali ke tempat tidur.²¹

Keluarga mempunyai peran terdepan dan strategis dalam pembentukan watak dasar atau karakter anak. Oleh karena itu, Islam memposisikan keluarga sebagai lembaga pendidikan dasar atau pertama dan utama. Begitu besarnya pengaruh keluarga dalam pendidikan anak, sehingga Rasulullah SAW menghubungkannya dengan nilai-nilai akidah: *"Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan tanggungjawab kedua orangtuanyalah yang bakal menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi"*.²² Al-Ghazali, dalam hal ini, mengungkapkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab terdepan dalam pendidikan anak. Anak dipandang sebagai suatu *tabula rasa* (kertas putih), dimana orang tua bertanggung jawab mengembangkannya, baik bertalian perkembangan bahasa, tradisi kultur, dan keyakinan moral dan praktiknya. Orang tua lah yang berperan dalam mengembangkan karakter yang baik dalam kehidupan anak-anaknya kemudian hari.²³

Antara peran *keluarga* dan pengembangan karakter pribadi anak didik tidak dapat dipisahkan. Jika, anak-anak tumbuh dari keluarga yang lebih fokus terhadap perkembangan anak, akan menumbuhkan pribadi anak berkarakter yang berdampak positif terhadap kemajuan bangsa ini. Haryatmoko menulis bahwa integritas pribadi tumbuh di keluarga dan teruji dalam kehidupan profesional, terutama dalam dalam organisasi. Dalam tanggung jawab pelayanan publik, integritas pribadi (pribadi berkarakter) itu menjadi dasar integritas publik dengan dua modalitasnya: akuntabilitas dan transparansi. Kini, di

²⁰ Dikutip Jalaluddin, "Peran Lembaga Pendidikan dalam upaya Pemberantasan Korupsi", *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Editor: Suyitno dan Heri Junaidi, Gama Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 187.

²¹ Jalaluddin, "Peran Lembaga Pendidikan....", *ibid.*, hlm. 188.

²² *Ibid.*, hlm. 188.

²³ Hamid Reza Alavi, "Islamic Values: a distinctive framework for moral education", *Journal of Moral Education*, Vo. 36, No. 3, September 2007, pp. 283-296.

Indonesia, etika publik menjadi isu penting. Ada kesan etika publik disamakan dengan etika politik.

Ada yang menafsirkan hanya sekedar etiket bermasyarakat, dan ada juga berpandangan sebagai kewajiban publik untuk menghormati etika. Etika publik mulai serius dibahas setelah kasus *Watergate*. Kasus itu mendorong pengesahan *The Ethics in Government Act of 1978*. Sejak itu, orang mulai menggunakan istilah *etika publik* bukan *etika pemerintahan* karena fokus pada pelayanan publik. Etika publik menekankan tidak hanya kode etik atau norma, tetapi juga dimensi refleksinya. Etika publik membantu dalam mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan publik dan sekaligus alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etisnya. Maka, fokus ditujukan kepada modalitas etika, yakni bagaimana menjembatani jurang antara *norma moral* (apa yang semestinya dilakukan) dan *tindakan faktual*. Keprihatinan etika publik pada modalitas membedakan diri dengan ajaran-ajaran saleh atau moral yang lain.²⁴

Institusi pendidikan merupakan suatu institusi pendidikan yang bersifat artifisial. Keberadaannya, dilaksanakan karena kebutuhan, sebagai petunjuk peran pendidikan keluarga. Institusi pendidikan diharapkan dapat mengambil alih peran dan tanggung jawab keluarga dalam meneruskan watak anak didik. Fokus pembentukan watak atau karakter di institusi pendidikan (formal) adalah penanaman nilai-nilai fitri manusia, yakni menyadarkan anak didik terhadap nilai-nilai kesucian sebagai faktor bawaan manusia. Nilai tersebut mengacu kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Hal ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya manusia senang dengan yang benar dan benci yang salah, senang hal yang baik dan benci yang buruk, serta senang yang indah dan benci yang jelek.²⁵

Di Amerika Serikat dikenal dengan adanya sistem pendidikan untuk dua tahun pertama S1 dengan sistem yang dinamakan *Liberal Arts Education*. Sistem ini berusaha mendidik seorang memiliki kapasitas pribadi yang dapat dikembangkan secara dinamis untuk menghadapi situasi yang berbeda sejak dini. Tujuan akhir dari sistem ini adalah menjadikan mahasiswa terdidik atau "*educated*" dalam bahasa Arab disebut "*mutsaqqof*". Di Amerika Serikat sendiri mata

²⁴ Lihat: (Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. ix-x).

²⁵ Jalaluddin, *op.cit.*, hlm. 189.

finalnya adalah terbentuknya sifat disiplin, jujur, tanggung-jawab, adil, dan cinta kebenaran, yang tertanam dalam diri anak didik. Pendidikan formal pada level menengah, berada pada usia remaja (prepubertas). Periode perkembangan ini, dikatakan William Starbuck ditandai dengan karakteristik tertentu, yang meliputi: perkembangan berfikir rasional, etika, estetika, sosial, minat, dan agama. Peran institusi pendidikan pada level ini, adalah memberi bimbingan agar potensi mental spiritual anak didik dapat berkembang dengan optimal. Pada level perguruan tinggi, dimana mahasiswa berada pada tahap *adolescence*. Pada tahap perkembangan ini, mahasiswa akan mengalami masa krisis yang ditandai gejolak batin, dan kelihatan ragu dalam menyetujui sikap. Hal ini merupakan proses *natural* dalam perjalanan menuju ke pembentukan kepribadian yang mantap.²⁸

Al-Ghazali²⁹ mengatakan bahwa seorang pendidik berpengaruh sebagai *paramount*. Pendidik sebagai "*exemplar moral*" dan "*moral guide*", dimana seorang anak belajar dengan meniru apa yang "dilakukan guru" ketimbang apa yang "dikatakan guru". Guru tidak hanya melakukan transfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) tetapi juga bertanggung jawab terhadap perkembangan personalitas (*personality*), karakter (*character*), kapasitas mengambil keputusan (*decision making capacity*), dan perilaku yang baik (*good behaviors*). Al-Ghazali mengatakan bahwa pendidik memiliki pengaruh yang maksimal dalam pengembangan moral anak didik. Pada periode infansi (*infancy*), anak-anak ingin diasumsikan dan menyenangkan mainan dan aktivitas praktik. Pada periode anak-anak (*childhood*) mereka lebih tertarik oleh penampilan luar (*fascinated by external appearances*); sebagai remaja (*adolescents*) mereka mengembangkan pesatnya pertumbuhan, mereka mungkin memperoleh dominasi pikiran-pikiran (mereka) oleh imajinasi-imajinasi seksual. Sebagai orang dewasa muda (*young adults*) mereka menunjukkan untuk posisi tanggung jawab, kekuasaan (*power*) dan kepemimpinan (*leadership*). Tetapi, sebelum umur 40 tahun, mereka menjadi lebih spiritual, lebih menyadari terhadap dunia akan datang, dan lebih antusias untuk mengembangkan pengetahuan terhadap Tuhan. Pendidikan moral (*moral education*) membawa disiplin dan kontrol moral untuk kehidupan anak-anak dalam suatu "cara" atau "jalan" pengembangannya.

²⁸ Bandingkan dengan Jalaluddin: ("Peranan Lembaga Pendidikan....", *op.cit.*, hlm. 190).

Adi Sasono dalam Azhar Arsyad, dalam buku *Leading to Revolution*, mengatakan adanya kompetisi kekuatan yang sedang tumbuh, antara kekuatan birokrasi dan formalitas pengetahuan yang sedang tumbuh dengan kekuatan yang didasarkan pada kreativitas dan jaringan. Yang cepat mengalahkan yang lambat, bukan yang besar mengalahkan yang kecil. Dunia pendidikan umumnya kurang menyadari keadaan ini, dibandingkan dunia industri, sehingga banyak sarjana yang menganggur. Hanya beberapa pendidikan tinggi yang menyadari perubahan tersebut. Bukan karena kesempatan tidak ada tetapi cara mencari kesempatan yang berbeda. Alumni perguruan tinggi yang tidak kreatif dan imajinatif kadang tidak berdaya menghadapi kenyataan hidup, dibanding orang biasa yang kreatif dan imajinatif yang harus disadari karena ternyata *power* akan bergeser dari hirarki pengetahuan formal ke hirarki kreatifitas dan imajinasi.³⁰ Disinilah urgensinya alumni perguruan tinggi memiliki dan mengembangkan *akhlakul karimah*³¹ sebagai *power* dalam mengakselerasi terhadap pengembangan *soft-skills, inner-capacity, liberal art education, dan interpreneurship*.

Permasalahan pendidikan, sering kali hanya mengartikannya secara sempit, dan belum mengangkatnya ke dalam permasalahan yang lebih luas. Padahal, tanpa memperhatikan kondisi makro—seperti: kekuatan ekonomi, politik, dan birokrasi—yang berkembang, masalah besar yang sifatnya mendasar dalam proses pendidikan agaknya akan sulit tersentuh. Bertalian dengan tantangan perkembangan zaman pada masyarakat modern, sumber daya manusia (*man power*) sering diabaikan yang seharusnya dipersiapkan. Padahal, SDM unggul terbukti lebih menentukan kemajuan suatu bangsa.³²

³⁰ Hamid Reza Alavi, "Al-Ghazali on Moral Education", *Journal of Moral Education*, Vol. 36, No. 3, September 2007, pp. 309-319.

³¹ *Ibid.*, hlm. 8-9.

³² Dalam buku *Attarbiyah wa al-Ta'lim*, Mahmud Yunus mengatakan tiga alternatif tujuan pendidikan untuk: a) mempermudah mencari rezki (*kasbu al-rizqi*); b) memperoleh ilmu pengetahuan (*al-ilmu*); dan c) karakter serta akhlak mulia. Lihat: (Mahmud Yunus, *Attarbiyah wa al-Ta'lim*, Jilid 1, Al-Maktabah al-Sa'diyah, Padang Panjang, 1942, hlm. 12-15).

³² Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, *Memelihara Tradisi, Merayakan Inovasi, 25 Tahun Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Penyunting Mudjahid AK dan Achmad Syahid, Jakarta, 2003, hlm. 57-58.

Pendidikan Islam dan Karakter Bangsa³³

Salah satu indikator globalisasi adalah adanya perubahan nilai-nilai. Perubahan nilai-nilai suatu negara akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang mondial. Nilai-nilai moralitas pun bergeser sejalan dengan pengaruh iptek dan komunikasi. Alfin Toffler, dalam buku *Future Shock*, telah memprediksi akan terjadinya "keterkejutan budaya" (*cultural shock*). Globalisasi, sebagai suatu produk modernisasi, telah merubah cara hidup manusia, secara individual maupun warga negara dan dunia. Setiap individu, agaknya mesti berhadapan dengan dua pilihan: bertindak sebagai "pemain"; atau bertindak sebagai "korban" (*victims*).

Institusi "Pendidikan Islam" dimaksudkan adalah *Pesantren; Madrasah*, sejak *Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) hingga PTAI; dan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)* di sekolah umum, diyakini memiliki peranan strategis dalam merespon dampak globalisasi, dalam menciptakan anak didik atau generasi muda berkarakter yang dapat bertindak sebagai "pemain". Sama halnya dengan Pesantren, sejak lama memiliki peran strategis pula dalam menciptakan perubahan sosial, termasuk peran para elite pesantren dalam kiprah dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua bentuk institusi pendidikan Islam ini, madrasah dan pesantren, karenanya memiliki peran strategis dalam mempersiapkan generasi berkarakter sehingga mereka diharapkan mampu mengantisipasi kecenderungan berbagai fenomena sosial yang dalam kenyataannya bisa saja mengancam disintegrasi sosial dan bahkan disintegrasi bangsa. Sejumlah pihak berharap, bahwa sebagai "pemain", generasi muda Indonesia, khususnya lulusan *pesantren, madrasah dan sekolah (umum)* memiliki beragam "bekal", yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi (sains-tek) yang pragmatis dan juga sains-religius (sains-rel) yang diharapkan memiliki integritas dan karakter, sebagaimana diharapkan tujuan pembangunan nasional. Karena, tanpa mengedepan karakter, *akhlakul karimah*, suatu bangsa akan sulit menjadi maju seperti diharapkan, karena negara menjadi maju selalu berkorelasi dengan kekuatan basis karakter dimiliki generasi mudanya.

³³ Revisi seperlunya dari makalah penulis yang dipresentasikan pada *Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis dan Wisuda, Politeknik Sriwijaya, Kampus Bukit Besar, 15 September 2011.*

Fakta sosial memperlihatkan bahwa sebagian generasi muda bangsa ini cenderung menjadi "korban" globalisasi, yang mengedepankan: pragmatisme, hedonisme, materialisme, dan budaya cepat saji.³⁴ Pada konteks kenegaraan, kita dihadapkan tingginya angka kemiskinan, angka putus sekolah, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas, dan lain-lain. Sebagian generasi muda terlibat dalam aktivitas dan perilaku negatif, seperti: *konflik antaretnis, bebas, kriminal, kebutan-kebutan, hura-hura, dan hedonisme*. Jika kondisi-kondisi ini terus menerus terjadi menjadi kebiasaan selanjutnya akan menjadi karakter dan perilaku yang tidak mustahil dapat berdampak buruk bagi pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Beragam persoalan berbangsa saat ini, menurut hemat penulis hanya mungkin dapat diperbaiki oleh individu generasi muda masa depan Indonesia yang memiliki karakter: cerdas, berkualitas, beretika, disiplin, jujur, kerja keras, dan *akhlakul-karimah*. Karenanya, tulisan ini, bertujuan mendiskusikan tentang: "*Pendidikan dan Character-Building: Analisis Peranan Pendidikan Islam dalam Memperkuat Indonesian Character Building*".

Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan suatu negara dimana masyarakatnya memiliki keberagaman budaya (*cultural-pluralis*). Faisal Tamim (2004) mengatakan Indonesia merupakan negara demokratis terbesar ketiga setelah India dan Amerika yang hidup dalam masyarakat multikultural dalam beragam karakteristik dan memiliki lebih dari 300 kelompok etnis. Secara geografis, negara ini juga memiliki bentangan pada garis pantai 108.920 km², negara terluas ke delapan setelah Australia, Kanada, Brazil, Amerika Serikat, RRC, India dan Nigeria. Luas lautan sekitar 5,8 juta km² yang terdiri 17.506 pulau, dan pada tahun 2003 terdapat 11.506 pulau yang belum punya nama. Sumber daya alam (*natural resources*) melimpiah, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni dan belum berpenghuni.³⁵

J.S. Furnivall (1980) mengatakan, Indonesia, sebagai *plural society*, merupakan suatu tipe masyarakat daerah tropis dimana mereka yang berkuasa dan dikuasai memiliki perbedaan ras. Pada zaman Hindia Belanda, orang Belanda sebagai kelompok minoritas

³⁴ Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 235.

³⁵ Faisal Tamim, *Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, Penerbit Blantika, Jakarta, 2004, hlm. 41-42.

jumlahnya semakin bertambah pada akhir abad ke-19, sekaligus merupakan penguasa yang memerintah mayoritas orang pribumi, sebagai warga negara kelas tiga (*inlander*) di negerinya sendiri. Orang Timur Asing, terutama Cina, Arab, dan India memiliki hirarki vertikal kelas dua, diantara kelompok Eropa dan Pribumi. Dalam kehidupan politik, indikasi jelas dari masyarakat Indonesia yang pluralistik, yakni tidak adanya kehendak bersama (*common-will*) dimana masyarakat Indonesia secara totalitas terdiri dari elemen-elemen terpisah satu sama lain berdasarkan perbedaan ras, masing-masing merupakan kumpulan individu dari suatu totalitas organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidak utuh. Orang Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja tetapi mereka tidak tinggal menetap di Indonesia. Kehidupan mereka hanya berada di sekitar pekerjaan itu, dan mereka melihat permasalahan sosial, politik, ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak sebagai warga negara tetapi sebagai kapitalis atau majikan dari buruh-buruh mereka. Sama halnya, orang Timur Asing, seperti orang Cina, seperti orang Belanda, mereka datang ke Indonesia hanya untuk kepentingan ekonomi.³⁶

Seperti orang Belanda dan Cina, kehidupan orang pribumi (*inlander*) tidak utuh pula, yakni sebagai "pelayan" di negeri sendiri. Furnivall juga mengungkapkan bahwa Indonesia menampilkan suatu struktur yang memiliki dua ciri: (1) *secara horizontal*, ditandai suatu kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan etnis, agama, adat-istiadat dan daerah; dan (2) *secara vertikal*, ditandai suatu struktur masyarakat yang memiliki adanya perbedaan vertikal lapisan atas dan lapisan bawah begitu tajam. Karena adanya perbedaan itu, masyarakat Indonesia dinamakan *plural society*, suatu istilah yang pertama digunakan Furnivall untuk mendeskripsikan masyarakat Hindia Belanda, yakni suatu masyarakat yang memiliki dua atau lebih elemen yang hidup terpisah satu sama lain dalam satu kehidupan politik.³⁷

Seorang Antropolog, Clifford Geertz berpendapat serupa bahwa ketika Belanda "hengkang" meninggalkan negeri ini, sifat "majemuk"

³⁶ J.S. Furnivall, "Plural Societies", *Society as Southeast Asia: Readings on Social Change and Development*, Edited by Hans-Dieter Evers, Oxford University Press, Oxford, New York, Melbourne, 1980, hlm. 86.

³⁷ J.S. Furnivall dalam: (Abdullah Idi, "Masyarakat Plural dan Isu HAM di Indonesia, *Jurnal Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* Vol. 7, Nomor 2, Desember 2007, hlm. 151-153).

atau "pluralistik" masih tersisa. Hanya saja, menurut Geertz, sifat pluralistik itu tidak lagi vertikal melainkan pluralistik horizontal, yakni adanya pengelompokan-pengelompokan dalam masyarakat Indonesia yang didasari pada ikatan primordial (*primordial attachments*), seperti ikatan kekerabatan, ras, bahasa, daerah asal, agama, dan etnis (suku bangsa). Menurut Geertz, primordialisme inilah yang merupakan pengikat asli masyarakat Indonesia dan atas dasar itulah pengelompokan-pengelompokan masyarakat Indonesia tumbuh dan berkembang, seperti dalam organisasi sosial formal dan informal, asosiasi-asosiasi, organisasi massa, pemerintah, partai politik, dan organisasi-organisasi bertujuan ekonomi.³⁸

Pandangan J.S. Furnivall dan Clifford Geertz itu agaknya lebih bertalian dengan dimensi formal dan normatif dari diskursus masyarakat pluralistik. Diungkapkan Burhanuddin dan Kusnadi, bahwa konsep masyarakat pluralistik senantiasa berkembang sejalan dengan dinamika kehidupan umat manusia. Usman Pelly menuturkan pula, bahwa kompleksitas masyarakat pluralistik tidak hanya ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan secara vertikal, yakni capaian yang diperoleh melalui prestasi (*attachment*), yang ditandai dengan adanya perbedaan pendidikan, tingkat sosial-ekonomi, kedudukan politik, kualitas pekerjaan, dan kondisi pemukiman. Dari perspektif pandangan ini, pluralistik vertikal dapat saja terjadi dalam kelompok-kelompok masyarakat yang terkategori ke dalam pengelompokan secara horizontal. Dengan dimasukkannya aspek capaian/prestasi (aspek dinamis) dari unsur pembeda di dalam masyarakat plural/majemuk, dengan sendirinya, pada dasarnya karakter kemejemukan yang ada dalam masyarakat Indonesia sudah sejak lama dicirikan oleh pembeda-pembeda secara vertikal dan horizontal itu. Kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda secara ras, etnis/suku bangsa, bahasa, dan agama; melainkan juga, dapat dibedakan berdasarkan daya adaptasinya (sebagai hasil dari suatu proses pencapaian tertentu) atas perkembangan-perkembangan aktual yang ada disekitar mereka, baik yang terjadi di dalam kelompok-kelompok horizontal itu sendiri, dan lebih penting antarkelompok-kelompok horizontal tersebut.³⁹

³⁸ Lihat Clifford Geertz dalam: (Yando R. Zakaria, "Kemajemukan Masyarakat Bangsa Indonesia", dalam Noer Fauzi, dkk., *Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah: Pergeseran Politik dibawah Problem Agraria*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hlm. 32).

³⁹ Lihat: (Abdullah Idi, "Masyarakat Plural dan Isu HAM di Indonesia....", *op. cit.*, hlm. 156).

Hal ini dapat dijelaskan bahwa pluralistik Indonesia belum cukup hanya diartikan dari dimensi "horizontal" tetapi juga dimensi "vertikal", terutama vertikalisasi antara kelompok-kelompok yang dalam kategori horizontal. Karena, perbedaan daya adaptasi antarkelompok-kelompok yang berbeda secara ras, etnis/suku bangsa, agama, dan bahasa, dapat menjadikan kelompok-kelompok masyarakat yang masih hidup pada tingkatan perkembangan kebudayaan yang lebih rendah. Interaksi antarkelompok dalam perbedaan vertikal antaretnis (ataupun pengelompokan secara horizontal lainnya) lebih berdimensi "kalah-menang" yang berdampak pada munculnya suatu kekuatan yang cenderung mendominasi (*superordinate*) dan didominasi (*subordinate*). Proses kondisi seperti itu, tentunya sangat mungkin berdampak pada ketidakseimbangan dan kesenjangan yang bisa saja mengarah kearah "konflik sosial" antarras, antaretnis, dan antarkelompok agama, dan dengan isu SARA (Suku, Agama, dan Antargolongan), yang bila terus meluas, hal itu bisa mengancam "integrasi sosial" dan bahkan "integrasi bangsa". Lebih jauh, sebagaimana diungkapkan Zakaria (2000), bahwa dilihat dari tingkat perkembangan dan kemajuan sistem teknologi, sistem pengetahuan, pola-pola pengeksploitasian dan penguatan sumber-sumber daya ekonomi, dan jaringan hubungan dengan masyarakat yang lebih luas, kelompok-kelompok suku bangsa atau sub-suku bangsa di Indonesia setidaknya dapat dibagi ke dalam sejumlah kategori yang setiap kategori memiliki tingkat daya adaptasi yang berbeda.⁴⁰

⁴⁰ Yakni, dengan kategori: Pertama, kelompok masyarakat dalam kategori *tribal society*, yang biasanya hidup dalam persekutuan dan masing-masing persekutuan tidak terintegrasi dalam persekutuan politik yang lebih luas. Mata pencaharian mereka berburu dan meramu (*hunting and gathering*). Bertalian dengan sistem pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biasanya pola pemukiman kelompok masyarakat ini bersifat *nomadis* (berpindah-pindah tempat), meskipun batas-batas wilayah pengembaraan itu tetap dapat ditentukan secara pasti. Di Indonesia, *tribal society* atau masyarakat pemburu, peramu, dan berkebun (dengan teknologi sederhana) ini meliputi: Orang Kubu (Suku Anak Dalam) yang hidup di wilayah belantara Jambi, Sumatera Selatan, Irian Jaya, Kalimantan, dan Sulawesi Tengah. Koentjaraningrat menyebut masyarakat ini sebagai "masyarakat berkebun". Kedua, kelompok masyarakat perladangan berputar (*rotary-cultivation*) atau kelompok masyarakat perladangan berpindah (*shifting cultivation*). Karena dalam sistem teknologi pertanian yang dikembangkannya ada unsur pekerjaan menebas dan membaar, teknik ini juga dinamakan *slash and burn cultivation*. Demikian pula, karena kegiatan pertanian ini tidak diselenggarakan secara terus-menerus pada satu bidang tanah, kegiatan pertanian ini dinamakan pula *extensive agriculture*. Kelompok masyarakat ini merupakan kelompok yang telah dapat bercocok tanam untuk menghasilkan bahan makanan pokoknya (*food producing*) sendiri. Sebagian besar kelompok masyarakat ini berada di luar Jawa, dengan sedikit pengecualian di beberapa tempat tertentu saja, seperti pada masyarakat Badui. Komposisi demografis kelompok ini lebih besar dari kelompok pertama, yakni mencapai

Jadi, fakta sosial historis bangsa Indonesia sebagai bangsa yang masyarakatnya pluralistik merupakan suatu "keunikan" dan sekaligus "kekuatan" tersendiri. Tetapi, dalam perkembangannya, terutama ketika memasuki era-Reformasi (1998), kekayaan nilai-nilai pluralistik sering kali memperlihatkan "kurang bersahabat" terhadap satu sama lain. Konflik sosial bernuansa etnis, agama, sosial, ekonomi, dan politik yang terkesan tidak pernah berakhir, telah menghantarkan pada suatu kesimpulan bahwa bangsa ini memerlukan solusi mendasar apabila ingin menjadi diperhitungkan pada masa depan. Pendidikan Islam (dalam arti: pesantren, madrasah, dan mata pelajaran PAI), menurut hemat penulis, memiliki peranan strategis dalam membentuk individu anak didik (generasi muda) yang berkarakter dalam upaya memperkuat kembali *the national and character-building*.

Indonesia, sebagai negara berkarakter, sesungguhnya telah dikembangkan berdasarkan nasionalisme politik dari beragam suku bangsa yang masing-masing memiliki "keunikan" dan budaya sendiri. Kini, persoalan budaya mulai mengemuka ke permukaan. Hal ini terjadi karena suatu ikatan sosial hanya terjadi apabila para

angka ribuan jiwa. Hubungan masyarakat satu dengan lainnya masih menekankan pada sistem kekerabatan (*kinship system*).

Ketiga, kelompok masyarakat petani (*peasant society*). Kelompok masyarakat ini mengembangkan sistem pertanian menetap (*sedenter*) dengan cara produksi pertanian intensif (*intensive agriculture*), yang di Indonesia dikenal dengan sistem pertanian lahan basah atau pertanian persawahan. Sistem ini dikenal oleh kelompok-kelompok masyarakat di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, dan NTB. Karena sistem pertanian ini mampu menghasilkan surplus hasil yang cukup besar, kegiatan ekonomi kelompok ini telah terintegrasi ke dalam sistem sosio-ekonomi dan sosio-politik lebih besar dan lebih luas. Keterkaitan antaranggotanya tidak lagi berdasarkan sistem kekerabatan melainkan berdasarkan ikatan-ikatan sosio-politik dan sosio-ekonomi yang lebih formalistik, seperti organisasi-organisasi dan asosiasi-asosiasi. Keempat, kelompok masyarakat perkotaan. Kelompok ini merupakan suatu masyarakat yang tinggal di suatu lingkungan pemukiman tertentu dimana para penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar setempat. Biasanya barang-barang itu dihasilkan oleh penduduk yang tinggal di daerah pedalaman (pedesaan), yang biasa dinamakan sebagai daerah yang melindungi desa. Titik awal gejala kota adalah timbulnya kelompok literasi (intelektual, pujangga, dan agamawan) atau berbagai kelompok spesialis yang berpendidikan dan non-agraris, sehingga pembagian kerjanya sangat kompleks. Dilihat dari peran sosio-ekonomi dan sosio-politiknya dalam suatu jaringan kehidupan yang lebih luas, masyarakat perkotaan ini juga dinamakan kelompok elit ekonomi dan politik. Dibawah kelompok elit kota ini, terdapat suatu kelas menengah perkotaan yang jumlahnya lebih besar, yakni para pegawai pemerintah dan swasta, intelektual, dan pengusaha mandiri. Dilihat dari cara hidup kelas menengah ini tidak jauh berbeda dengan kelompok elit, sehingga dapat dikategorikan ke dalam super kultur metropolitan atau sudah masuk ke dalam peradaban global. Lebih jauh, lihat: (Yando R. Zakaria, "Kemajemukan Masyarakat Bangsa Indonesia", op. cit., hlm. 156-159).

anggotanya memandang bahwa ikatan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhannya. Jika harapan dan kebutuhan yang beragam itu tidak dapat dipenuhi oleh negara, akibatnya akan muncul tribalisme. Kini nasionalisme dipertentangkan dengan *tribalisme*. Tribalisme merupakan suatu kekuatan primordialisme yang justru memiliki andil kuat dalam mengikat para anggota dari suatu masyarakat. Aspek emosional yang muncul dari pertemuan tatap muka (*face to face*) begitu kuat dalam memadu rasa persatuan. Dapat diyakini, rasa persatuan yang berlebihan akan memunculkan rasa fanatisme kelompok dan akan menjadi penghalang terbentuknya rasa solidaritas dari suatu bangsa. Apalagi, jika negara-bangsa itu terdiri dari heterogenitas suku dan budaya berbeda-beda pula.⁴¹

Akankah *tribalisme* bertentangan dengan proses demokratisasi? Bila proses demokratisasi berjalan dengan baik, maka tribalisme akan menjadi arena penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan cara mengenal, menghargai, dan mengadopsi nilai-nilai budaya etnis yang lain, akan terjadi apa yang dinamakan *koalisi antarsubbudaya* di dalam membangun rangkaian sejarahnya sehingga kebudayaan tersebut terus berkembang. Ini merupakan Teori Levi-Staruss tentang kemajuan kebudayaan. Tetapi, sebaliknya, bila tribalisme berdasarkan primordialism akan berbahaya bagi kesatuan bangsa jika tidak diupayakan ke arah "kesamaan" dan menghindari "perbedaan". Dalam masyarakat demokrasi atau dalam proses demokratisasi, kelompok etnis berbeda dapat belajar banyak dari kelompok etnis lainnya. Dalam masyarakat majemuk atau pluralistik diperlukan toleransi.⁴²

Pentingnya generasi muda yang berkarakter dalam masyarakat pluralistik, bahwa karena dengan memiliki sikap "toleransi" dapat memperkuat integrasi sosial dan integrasi bangsa. Hamdi Muluk (2000) mengatakan bahwa "tanpa toleransi, beragam sentimen primordialisme akan muncul dan masyarakat akan berakibat terpecah-pecah".⁴³ Dalam konteks ini, UNESCO (1998) dalam H.A.R. Tilaar (2012) telah menetapkan lima prinsip toleransi: (1) toleransi sebagai proses pemahaman sejarah dan kebudayaan setiap kelompok,

⁴¹ H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Transformatif untuk Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 81.

⁴² Lihat: (H.A.R. Tilaar, "Perubahan Sosial dan Pendidikan...", *Ibid.*, hlm. 81.

⁴³ Hamdi Muluk, "Etno-Nasionalisme dan Disintegrasi", *Kompas*, 22 November 2000.

suku, agama, ras, lingkungan adat, dan bahasa; (2) toleransi merupakan sikap menghormati perbedaan ciri-ciri khusus yang terdapat pada masing-masing kelompok, seperti bentuk fisiknya, warna kulit, logat dan ucapan, sikap dan gaya pergaulan, adat-istiadat, cara beribadah dalam agama berbeda; (3) toleransi memanfaatkan perbedaan ciri khusus dalam upaya memperkokoh rasa kebangsaan karena akan saling memperkaya kebhinnekaan; (4) toleransi merupakan upaya membangun kepercayaan antarsesama anggota masyarakat dalam pemecahan masalah bersama secara damai, dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, politik, dan budaya; dan (5) toleransi adalah upaya untuk memantapkan keadilan sosial dalam menghadapi perubahan yang cepat akibat teknologi dan ekonomi karena gelombang globalisasi.⁴⁴

Suatu "negara-bangsa" memiliki identitas. Suatu generasi muda Indonesia masa depan yang berkarakter, akan menghargai beragam perbedaan, *kebhinnekaan*, yang berupa perbedaan: etnis, agama, budaya. Hal ini akan merupakan "potensi" kekuatan bangsa Indonesia, sebagai salah satu negara-bangsa. Kekuatan karakter juga merupakan identitas suatu negara-bangsa. Potensi kekuatan karakter yang mengarah kepada identitas suatu bangsa memiliki kekuatan dalam menghadapi dampak globalisasi, sebagai efek dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi informasi, akan mempercepat rasa persatuan dan sentimen primordialisme dari kelompok etnis berbeda. Membangun karakter generasi muda Indonesia melalui pendidikan, "Pendidikan Islam", diimpikan adanya suatu *out-put* pesantren, madrasah, dan sekolah umum, yang memiliki karakter atau identitas positif dalam membangun integrasi sosial dan memperkuat integrasi nasional.

Kebijakan pemerintah, dikatakan Arisetyanto Nugroho⁴⁵, untuk kembali memprioritaskan kebudayaan dalam proses pembangunan generasi muda merupakan bentuk *national character building* generasi muda Indonesia. Pembangunan karakter generasi muda Indonesia ini diharapkan dapat menjadi identitas anak bangsa di tengah era globalisasi dan akulturasi budaya dunia, serta dapat mendorong kemandirian dalam upaya peningkatan kemampuan daya saing generasi muda Indonesia.

⁴⁴ H.A.R. Tilaar, "Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Transformatif...", *op. cit.*, hlm. 81-82.

⁴⁵ *Media Indonesia*, 7 November 2011.

Dalam kaitannya dengan pembangunan masa depan bangsa, Bung Karno, kerap kali mengungkapkan slogan *national character-building*. Suksesnya pembangunan suatu bangsa agar menjadi bangsa besar, dikatakan Bung Karno, mesti dimulai dengan pembangunan manusianya, yang diistilahkan beliau dengan *man behind the gun*. Selo Soemardjan menyebutnya dengan manusia pembangunan, yang diantara cirinya adalah memiliki watak yang bermoral tinggi.⁴⁶

Parlin dalam M. Abdul karim (2007) mengungkapkan karakter atau moral bangsa ialah bagaimana sikap, tingkah laku, dan perbuatan suatu bangsa. Moral bangsa Indonesia merupakan kristalisasi dari aneka ragam moral yang ada, baik yang berasal dari adat-istiadat secara turun-temurun maupun dari berbagai macam agama yang silih berganti memasuki Indonesia, diantaranya yang lebih menonjol adalah unsur-unsur budaya Islam. Hal tersebut jelas dari bagian barat Kepulauan Nusantara, sedangkan semakin ke timur makin berkurang hingga daerah-daerah di Papua, hampir tidak terlihat.⁴⁷

Proses perkembangan moral bangsa, disamping dipengaruhi moral atau nilai-nilai Islam, juga oleh moral atau nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari pengembangan budaya kaum muslim di Indonesia dengan jalan mengisi keinginan masyarakat melalui penggalian secara mendalam atas jiwa yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Moral Islam, berfungsi sebagai *filter* yang memberikan seleksi terhadap moral yang ada, dalam arti moral yang bersesuaian atau tidak bertentangan dengan Islam dibiarkan terus berkembang, sementara yang bertentangan disisihkan, diganti dengan moral yang bersesuaian dengan Islam. Terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, moral Islam sangat diperlukan untuk menyeleksi agar penggunaannya tidak menyimpang dari tujuan agama Islam, yakni memelihara jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama.⁴⁸ *Moral*, dalam

⁴⁶ Desire Zuraidah dan Jufrina Rizal (eds.), *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan: Pokok-Pokok Pikiran Selo Soemardjan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 35.

⁴⁷ Dari lintasan sejarah dapat dikatakan bahwa proses pembinaan moral bangsa di Indonesia dimulai sejak timbulnya cita-cita kemerdekaan, yang terlihat dengan jelas dipengaruhi moral Islam baik pada masa permulaan maupun pada masa timbulnya pergerakan kemerdekaan yang kemudian terpadu dengan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat-saat bangsa Indonesia mengisi kemerdekaannya. Pada masa Orde Baru, moral bangsa Indonesia diidentifikasi sebagai moral Pancasila. Lihat: (M. Abdul Karim, *Islam Nusantara*, Pengantar Ahmad Syafi'i Ma'arif, Pustaka Book Publisher, Jogjakarta, 2007, hlm. 84).

⁴⁸ Jika ilmu pengetahuan dan teknologi bertentangan dengan tujuan Islam, maka harus dicegah, tetapi apabila bersesuaian harus didukung dan dikembangkan. Perkembangan

komunitas Islam, terkenal dengan *al-akhlaq al-karimah*, memuat sekumpulan nilai yang hasus dijunjung tinggi.⁴⁹ Para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah mempertimbangkan secara matang tentang urgensi moral atau *al-akhlaq-al-karimah* dalam kehidupan bangsa Indonesia tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Dalam suatu Diskusi tentang "Memelihara Keutuhan Pembangunan Karakter Bangsa: Generasi Muda Indonesia di Tengah Gelombang Globalisasi", di UI, Depok (2007), Meutia Hatta⁵⁰ mengatakan berbagai sisi kehidupan manusia selama ini luput dari pembangunan karakter, jiwa dan raga manusia. Sering kali perhatian generasi muda terfokus pada pembangunan ekonomi dan orientasi fisik-material. Dengan karakter demikian, tidak mengherankan jika dikalangan generasi muda tumbuh subur sifat-sifat materialisme, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan perilaku kurang terpuji lainnya. Karakter sebagian generasi muda ini sudah mengabaikan pembangunan kemanusiaan. Karakter sebagai gambaran mentalitas sebagian generasi muda saat ini, sejalan dengan

moral bangsa Indonesia adalah hasil dari proses percampuran budaya, bersifat *penetration pacifique*. Masing-masing moral keagamaan ikut mengisi dalam pembinaan moral bangsa di Indonesia. Karena Indonesia yang mayoritas Islam, maka pengaruh Islam terhadap pembinaan moral bangsa sangat dominan dimana moral Islam dapat menghablur dalam moral bangsa tanpa adanya penekanan dan kekerasan. Untuk memelihara kesatuan bangsa akibat pergolakan moral dari berbagai macam agama, dibentuk konsep yang disebut dengan kerukunan beragama. Dari struktur budaya seperti inilah bangsa Indonesia mendapatkan moral dasar dalam pembentukan kehidupan bermasyarakat yang memiliki ikatan yang kuat, buka saja dalam kehidupan sosial, akan tetapi sangat berguna bagi kehidupan ideologi negara, politik, sosial, budaya, ketahanan, dan kemananan nasional, suatu struktur kemasyarakatan yang memberikan modal dasar bagi terbinanya moral bangsa. Dasar pembinaan moral Islam ini sebagai manifestasi dari bimbingan wahyu, lahir dalam bentuk sikap, tingah laku, dan perbuatan. Sementara moral yang lain, jiwanya tidak beertentangan dengan bimbingan wahyu, tetap berkembang dan dibiarkan berkembang sesuai dengan sikap Islam yang terkenal dengan *mura'ah al-'urf*: mengendalikan 'urf, bahkan ada diantara beberapa moral yang merupakan akulturasi diantara Islam dengan budaya-budaya yang berkembang. Kebudayaan Islam telah meresap pada rakyat Indonesia yang jumlahnya sekitar 90% beragama Islam dipastikan mewarnai nilai-nilai moral bangsa, sehingga kebudayaan Islam yang merupakan faktor yang dominan dalam kehidupan masyarakat. Lihat: (M. Abdul Karim, "Islam Nusantara", *ibid.*, hlm. 85).

⁴⁹ Dari beragam pendapat pemikir Islam, diketahui bahwa *al-akhlaq-al-karimah* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist adalah kumpulan nilai yang pertama mendasari kehidupan manusia berasyarakat secara religius. Dalam perjalanan sejarah, *al-akhlaq al-karimah*, telah menjadi payung memelihara keutuhan bangsa. Selama moral suatu bangsa masih terpelihara dan dijunjung tinggi, maka bangsa itu dapat berkembang. Sebaliknya, jika moral bangsa sudah diabaikan, maka bangsa itu akan segera hancur menemui kebinasaan. Lihat: (M. Abdul Karim, *ibid.*, hlm. 183-184).

⁵⁰ <http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/membangun-karakter-generasi-muda> (diakses: tanggal 22/10/2011).

pendapat seorang antropolog terkemuka, Koentjaraningrat, yakni: *pertama*, mentalitas meremehkan mutu; *kedua*, mentalitas suka menerabas; *ketiga*, sifat tidak percaya kepada diri sendiri; *keempat*, sifat tidak berdisiplin murni; dan *kelima*, sifat tidak bertanggung jawab. Untuk itu, dikatakan Mutia Hatta, menghadapi globalisasi, karakter generasi muda harus lebih meningkatkan

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, dimana kehadirannya merupakan tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik dengan baik. Untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, salah satu caranya adalah dengan menciptakan anak-anak atau generasi muda sebagai aktor dan pionir masa depan. Cerdas dan pintar saja tentunya tidak cukup, tetapi juga diperlukan juga sifat yang pantang menyerah, sehat jasmani dan rohani, tanggung jawab, memiliki harapan dan motivasi tinggi, peka terhadap lingkungan sekitarnya, dan berkepribadian baik, *berakhlakul karimah*, agar anak-anak atau generasi muda menjadi tangguh dan mampu meraih impian masa depan yang lebih baik. Karakter anak ideal yang didambakan banyak orang tua antara lain adalah hormat dan berbakti kepada orang tua guru, peka terhadap karya seni, terampil, mandiri, penuh semangat, disiplin, penuh inisiatif, sehat dan mencintai Tanah Air. Karakter ini senada dengan karakter anak Generasi Platinum.⁵¹

Dalam sebuah buku terbitan *International Association of Character Cities (2006)*, karakter (*character*) adalah motivasi batiniah untuk melakukan yang benar berapapun "harga" yang harus dibayar. Pengertian ini, karakter dikaitkan dengan perbuatan yang mengandung nilai-nilai, moral, atau etika dalam kehidupan. Perbuatan dan nilai-nilai itu sedemikian pentingnya sehingga dirasa mutlak untuk dilakukan dan siap dibayar dengan "harga" berapapun. Karakter terkait dengan upaya mengembangkan kualitas, seperti: kejujuran, kesabaran, kesetiaan, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Hal ini, dapat dijelaskan bahwa karakter itu harus dimulai dari berbagai nilai-nilai moral yang ada dalam pikiran dan hati seorang, kemudian nilai-nilai itu kita wujudkan dalam tindakan atau

⁵¹ *Generasi Platinum* yang kadang kala disebut juga *Generasi Z* memiliki karakter khusus, diantaranya: fisik yang sehat dan kuat, kecerdasan *multiple*, percaya diri, optimis, kreatif, inovatif, kompetitif, memiliki motivasi dan cita-cita yang tinggi, pantang putus asa, serta berakhlak mulia. Lihat : (Rubrik: "Karakter Anak Ideal untuk Masa Depan", *Kompas*, 4 Desember 2011).

perbuatan. Berikutnya, tindakan itu kita lakukan secara terus sehingga menjadi kebiasaan, serta dari kebiasaan itulah terbangun karakter. Hasilnya, karakter yang terbangun dapat mengarahkan upaya seorang dalam mencapai tujuan hidup.⁵²

Alford dalam Supiana (2011), mengatakan, ada istilah yang pengertiannya hampir sama dengan karakter, yakni *personality characteristic* yang memiliki arti: bakat, kemampuan, sifat, dan lain sebagainya yang secara konsisten diperagakan oleh seorang, seperti pola perilaku, sifat-sifat fisis dan ciri-ciri kepribadian. *Trait* merupakan kecenderungan untuk memberi respon kepada berbagai tipe stimulus dalam cara yang sama. *Personality* merupakan sifat dan perilaku khas seorang yang membedakannya dengan orang lain; integrasi karakteristik dan struktur-struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang; dan segala sesuatu tentang diri seorang seperti diketahui oleh orang lain. *Habit* merupakan perilaku yang diperoleh dan dimanifestasikan secara konsisten; tindakan yang telah dipelajari dan menjadi mapan serta relatif otomatis melalui pengulangan terus-menerus. Dalam Bahasa Arab, *character*, diartikan *khuluq*, *sajiyah*, *thab'u* artinya budi pekerti, *tabiat* atau *watak*.⁵³

Yusuf al-Qardawi mengkategorikan *akhlaq* menjadi tujuh kategori, sebagai tingkatan nilai-nilai moral (*moral values*) yang diharapkan dalam kehidupan Muslim: *akhlaq* berhubungan dengan diri-sendiri (*self*); *akhlaq* berhubungan dengan keluarga (*family*); *akhlaq* berhubungan dengan masyarakat (*society*); *akhlaq* berhubungan dengan dunia hewani (*animal world*); *akhlaq* berhubungan dengan lingkungan fisik (*physical environment*); dan *akhlaq* berhubungan dengan Khalik (*Creator*).⁵⁴ *Akhlaq* merupakan suatu dunia plural (*a plural world*) tetapi kadang kala digunakan dalam bentuk tunggal (*khuluk*) atau *singular form*, yang berarti karakter (*character*), *innate disposition*, atau "a state of the soul

⁵² <http://kawulamuda.ufe.es.net/budaya-membangun-karakter-bangsa-melalui-media-massa-televisi> (22/10/2011).

⁵³ Seperti dikutip Supiana, "Pendidikan Karakter dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Islam", *Mozaik Pemikiran Islam, Bunga Rampai Pemikiran Islam Indonesia*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2011, hlm. 5.

⁵⁴ Yusuf al-Qardawi dalam kutipan J. Mark Halstead, "Islamic Values: a distinctive framework for moral education" *Journal of Moral Education*, Vol. 36, No. 3, September 2007, pp. 285.

which causes it to perform its action without thought or deliberation". Banyak ilmuan terkenal Muslim, seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Miskawayh, Nizam al-Mulk, al-Ghazali, al-Razi, dan al-Tusi, telah mempelajari dan menulis tentang *akhlaq*. *‘Ilm-al-akhlaq* (*knowledge of moral values*) merupakan komponen mayor dari pada *Islamic Studies* pada semua level pendidikan Islam, disamping komponen lainnya, seperti *‘Ilm al-Fiqh*.⁵⁵

Karakter, dengan demikian, merupakan kumpulan dari beragam aspek kepribadian yang melambangkan kepribadian seorang. *Karakter* merupakan ciri-ciri tertentu yang sudah menyatu pada diri seorang yang ditampilkan dalam bentuk perilaku. Karena itu, dikatakan Farid Anjar, dalam Ensiklopedi Inggris-Arab, bahwa *character education* sebagai *pendidikan akhlak*.⁵⁶ Sifat-sifat yang ada dalam diri seorang itu, terdapat sifat yang menonjol/dominan, yang kemudian menjadi karakteristik seorang atau sekelompok orang. Sifat-sifat yang dimiliki manusia sangat ditentukan pendidikan yang mempengaruhinya. Pendidikan, dalam hal ini, dapat mengembangkan potensi baik dan dapat menekan potensi buruk manusia.

Dengan demikian, *karakter* merupakan kualitas moral dan mental yang pembentukannya dipengaruhi oleh faktor bawaan (*fitrah* atau *nature*) dan lingkungan (sosialisasi atau lingkungan, *nurture*). Potensi karakter yang baik dimiliki seorang sebelum dilahirkan harus terus-menerus dikembangkan melalui sosialisasi dan pendidikan. Garbarino dan Brofenbrenner (Vasta, 1992) mengatakan jika suatu bangsa ingin bertahan hidup, perlu memiliki aturan-aturan yang menetapkan apa yang salah dan apa yang benar, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang adil dan tidak adil, dan apa yang patut dan tidak patut.

Memahami "aturan main" atau "aturan sosial" dalam kehidupan dan menginternalisasikannya dalam diri anak didik dengan baik patut menjadi perhatian orang tua (keluarga), pendidik (sekolah), dan masyarakat. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, *antre*, mematuhi aturan lalu-lintas, mandiri, jujur, toleran, disiplin, tepat janji, dan sejenisnya, merupakan pemahaman yang baik anak didik terhadap "aturan sosial" sebagai hasil dari perkembangan kualitas

⁵⁵ *Ibid.*, p. 285.

⁵⁶ Supiana, "Pendidikan Karakter dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Islam....", *ibid.*, hlm. 6.

moral dan mental seorang anak didik yang disebut *karakter* (*character*).

Tentu saja kebiasaan baik atau buruk pada diri seseorang anak didik dan generasi muda— yang mengindikasikan kualitas karakter ini – tidak terjadi dengan sendirinya. Selain faktor *nature*, faktor *nurture* juga berpengaruh. Lebih jauh, *proses sosialisasi atau pendidikan* dalam proses pembentukan karakter anak didik, setidaknya, terletak pada peranan: *orang tua/keluarga, institusi pendidikan, dan negara/pemerintah*.

Dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan (karakter) pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. *Pola asuh* dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orangtua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang dan lain-lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Dengan kata lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam rangka pendidikan karakter anak. Baumrind mengkategorikan pola asuh menjadi tiga jenis, yaitu pola asuh : *democratic; authoritative; dan permissive*.⁵⁷ Keluarga memiliki peranan terdepan dalam memberikan kebiasaan-kebiasaan, keteladanan, kejujuran, kedisiplinan, dan sejenisnya. Karena itu, keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama.

⁵⁷ *Pola asuh permisif* yang cenderung memberi kebebasan terhadap anak untuk berbuat apa saja sangat tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak. Bagaimana pun anak tetap memerlukan arahan dari orang tua untuk mengenal mana yang baik mana yang salah. Dengan memberi kebebasan yang berlebihan, apalagi terkesan membiarkan, akan membuat anak bingung dan berpotensi salah arah. *Pola asuh demokratis* tampaknya lebih kondusif dalam pendidikan karakter anak. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Baumrind yang menunjukkan bahwa orangtua yang demokratis lebih mendukung perkembangan anak terutama dalam kemandirian dan tanggungjawab. Orangtua yang otoriter merugikan, karena anak tidak mandiri, kurang tanggungjawab serta agresif, sedangkan orangtua yang permisif mengakibatkan anak kurang mampu dalam menyesuaikan diri di luar rumah. Arkoff dalam (Badingsah, 1993), mengatakan bahwa anak yang dididik dengan cara demokratis umumnya cenderung mengungkapkan agresivitasnya dalam tindakan yang konstruktif atau dalam bentuk kebencian yang sifatnya sementara saja. Di sisi lain, anak yang dididik secara otoriter atau ditolak memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan agresivitasnya dalam bentuk tindakan merugikan. Anak yang dididik secara permisif cenderung mengembangkan tingkah laku agresif secara terbuka atau terang-terangan.

Djaka Datuk Sati mengungkapkan, psikologi kepribadian mengidentifikasi, bahwa unsur kepribadian meliputi temperamen dan watak (*character*). Temperamen terbentuk dari komposisi kimiawi (cairan) dalam tubuh, dan bersifat tetap. Sebaliknya, watak merupakan unsur bentukan.⁵⁸ Sama halnya dengan pandangan Gilbert Highest (1969), bahwa 90% dari kebiasaan anak dibentuk oleh keluarga, dimana proses pembentukannya berlangsung sejak dari bangun tidur hingga anak kembali ke tempat tidur.⁵⁹

Keluarga mempunyai peran terdepan dan strategis dalam pembentukan watak dasar atau karakter anak. Oleh karena itu, Islam memosisikan keluarga sebagai lembaga pendidikan dasar atau pertama dan utama. Begitu besarnya pengaruh keluarga dalam pendidikan anak, sehingga Rasulullah SAW menghubungkannya dengan nilai-nilai akidah: *"Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan tanggungjawab kedua orangtuanyalah yang bakal menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi"*.⁶⁰ Al-Ghazali, dalam hal ini, mengungkapkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab terdepan dalam pendidikan anak. Anak dipandang sebagai suatu *tabula rasa* (kertas putih), dimana orang tua bertanggung jawab mengembangkannya, baik bertalian perkembangan bahasa, tradisi kultur, dan keyakinan moral dan praktiknya. Orang tua lah yang berperan dalam mengembangkan karakter yang baik dalam kehidupan anak-anaknya kemudian hari.⁶¹

Antara peran keluarga/orang tua dan pengembangan karakter pribadi anak didik tidak dapat dipisahkan. Jika, anak-anak tumbuh dari keluarga yang lebih fokus terhadap perkembangan anak, akan menumbuhkan pribadi anak berkarakter yang berdampak positif terhadap kemajuan bangsa ini. Haryatmoko (2010)⁶² menulis bahwa

⁵⁸ Dikutip Jalaluddin, "Peran Lembaga Pendidikan dalam upaya Pemberantasan Korupsi", *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Editor: Suyitno dan Heri Junaidi, Gama Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 187.

⁵⁹ Jalaluddin, "Peran Lembaga Pendidikan....", *ibid.*, hlm. 188.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 188.

⁶¹ Hamid Reza Alavi, "Islamic Values: a distinctive framework for moral education", *Journal of Moral Education*, Vo. 36, No. 3, September 2007, pp. 283-296.

⁶² Kini, di Indonesia, etika publik menjadi isu penting. Ada kesan etika publik disamakan dengan etika politik. Ada yang menafsirkan hanya sekedar etiket bermasyarakat, dan ada juga berpandangan sebagai kewajiban publik untuk menghormati etika. Etika publik mulai serius dibahas setelah kasus Watergate. Kasus itu mendorong pegesahan *The Ethics in Government Act of 1978*. Sejak itu, orang mulai menggunakan istilah etika publik bukan etika pemerintahan karena fokus pada pelayanan publik. Etika publik menekankan tidak

integritas pribadi tumbuh di keluarga dan teruji dalam kehidupan profesional, terutama dalam dalam organisasi. Dalam tanggung jawab pelayanan publik, integritas pribadi (pribadi berkarakter) itu menjadi dasar integritas publik dengan dua modalitasnya: akuntabilitas dan transparansi

Pendidikan Islam, merupakan suatu institusi pendidikan bersifat artifisial. Keberadaannya, dilaksanakan karena kebutuhan, sebagai petunjuk peran pendidikan keluarga. Institusi pendidikan diharapkan dapat mengambil alih peran dan tanggung jawab keluarga dalam meneruskan watak anak didik. Fokus pembentukan watak atau karakter di institusi pendidikan (formal) adalah penanaman nilai-nilai fitri manusia, yakni menyadarkan anak didik terhadap nilai-nilai kesucian sebagai faktor bawaan manusia. Nilai tersebut mengacu kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Hal ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya manusia senang dengan yang benar dan benci yang salah, senang hal yang baik dan benci yang buruk, serta senang yang indah dan benci yang jelek.⁶³

Di Amerika Serikat dikenal dengan adanya sistem pendidikan untuk dua tahun pertama S1 dengan sistem yang dinamakan *Liberal Arts Education*. Sistem ini berusaha mendidik seorang memiliki kapasitas pribadi yang dapat dikembangkan secara dinamis untuk menghadapi situasi yang berbeda sejak dini. Tujuan akhir dari sistem ini adalah menjadikan mahasiswa terdidik atau "educated" dalam bahasa Arab disebut "*mutsaqqof*". Di Amerika Serikat sendiri mata kuliah "*literature*" misalnya dirancang untuk membangkitkan "daya hidup", etos kerja, dan semangat belajar mahasiswa dengan menganalisis daya juang para tokoh serta ungkapan-ungkapan bijak dan "*literature*" mereka. Sayangnya, sistem tersebut cenderung menafikkan peranan pemilik sumber daya dan potensi yang maha

hanya kode etik atau norma, tetapi juga dimensi refleksinya. Etika publik membantu dalam mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan publik dan sekaligus alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etisnya. Maka, fokus ditujukan kepada modalitas etika, yakni bagaimana menjembatani jurang antara norma moral (apa yang semestinya dilakukan) dan tindakan faktual. Keprihatinan etika publik pada modalitas membedakan diri dengan ajaran-ajaran saleh atau moral yang lain. Lihat: (Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. ix-x).

⁶³ Jalaluddin, *op.cit.*, hlm. 189.

tinggi yang tidak kreatif dan imajinatif kadang tidak berdaya menghadapi kenyataan hidup, dibanding orang biasa yang kreatif dan imajinatif yang harus disadari karena ternyata *power* akan bergeser dari hirarki pengetahuan formal ke hirarki kreatifitas dan imajinasi.⁶⁸ Disinilah urgensinya alumni perguruan tinggi memiliki dan mengembangkan *akhlakul karimah*⁶⁹ sebagai *power* dalam mengakselerasi terhadap pengembangan *soft-skills*, *inner-capacity*, *liberal art education*, dan *intre- interpreneurship*.

Permasalahan pendidikan, dan juga “pendidikan Islam” (*pesantren, madrasah, dan Mata Pelajaran PAI* disekolah umum) sering kali hanya mengartikannya secara sempit, dan belum mengangkatnya ke dalam permasalahan lebih luas. Padahal, tanpa memperhatikan kondisi makro—seperti: kekuatan ekonomi, politik, dan birokrasi—yang berkembang, masalah besar yang sifatnya mendasar dalam proses pendidikan sulit tersentuh. Bertalian dengan tantangan perkembangan zaman pada masyarakat modern, sumber daya manusia (*man power*) sering diabaikan yang seharusnya dipersiapkan. Padahal, SDM unggul terbukti lebih menentukan kemajuan suatu bangsa.⁷⁰

John I. Goodlad (1984) mengatakan bahwa harapan masyarakat dan generasi muda (anak didik) di Amerika Serikat, diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang memadai:

Reduce inequality among individuals and groups by liminating illiteracy and cultural deprivation; Improve the economy and economic opportunity by raising the nation's supply of intelligence and skill; Spread capacity for personal fulfilment by developing talents, skills, and creating the fruits of liberal education; Prove to be unlifting influence in the nation's cultural life by broadly diffusing the fruits of liberal education; Reduce alienation and mistrust while building a new sense of community among people of similar education and similar values; reduce prejudice and misunderstandings

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 8-9.

⁶⁹ Dalam buku *Attarbiyah wa al-Ta'lim*, Mahmud Yunus mengatakan tiga alternatif tujuan pendidikan untuk: a) mempermudah mencari rezki (*kasbu al-rizqi*); b) memperoleh ilmu pengetahuan (*al-ilmu*); dan c) karakter serta akhlak mulia. Lihat: (Mahmud Yunus, *Attarbiyatu wa al-Ta'lim*, Jilid 1, Al-Maktabah al-Sa'diyah, Padang Panjang, 1942, hlm. 12-15).

⁷⁰ Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, *Memelihara Tradisi, Merayakan Inovasi, 25 Tahun Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Penyunting Mudjahid AK dan Achmad Syahid, Jakarta, 2003, hlm. 57-58.

by postering contact among diverse groups; and improve the quality of civic and political life.⁷¹

Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia bertalian erat dengan peranan sektor pendidikan. Dalam UU No. 20/2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembannya untuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁷²

Antara pendidikan dan peranan negara/pemerintah tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain itu, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan pembangunan sektor kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index/HDI* adalah alat untuk mengukur kualitas sumber daya manusia (*man power*) atau SDM satu negara, yang diukur yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. HDI itulah yang menjadi dasar klasifikasi sebuah negara menjadi negara maju (*developed country*), negara berkembang (*developing country*), dan negara terkebelakang (*under developing country*).

Pada 2011, Peringkat Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia melorot tajam, yakni berada pada peringkat 124 dari 187 negara yang disurvei. Peringkat Indonesia turun drastis, dimana sebelumnya, pada 2010, berada di posisi 108 dari 169 negara. Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation Development Program/UNDP*) merilis IPM tersebut, dimana dalam Laporan UNDP 2011, IPM Indonesia hanya 0,617 atau berada diperingkat kelima di ASEAN. Ironisnya, IPM Indonesia justeru melorot dibidang pendidikan, padahal dibidang itulah yang memperoleh alokasi dana terbesar dari APBN. Dalam APBN 2011,

⁷¹ John I. Goodlad, *A Place Called School, Prospects for the Future*, McGraw-Hill Paperbacks, New York, 1984, hlm. 61.

⁷² Lihat: ("Undang-Undang RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 3" dalam *Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Ciri dan Dosen, dilengkapi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Buku Teks Pelajaran*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2008).

tercatat Rp 246 triliun (20%) dari total belanja negara Rp 1.229,6 triliun dialokasikan untuk pendidikan.⁷³

Jepang dan Cina merupakan negara yang aktif dan agresif dalam pengembangan sumber daya manusia generasi mudanya. Bangsa Indonesia juga memiliki tantangan untuk unggul bersaing dengan negara tetangga, seperti Malaysia. IPM Indonesia pada 2010 menempatkan pada peringkat 108. Tetapi, peringkat itu masih jauh bila dibandingkan dengan Malaysia (peringkat 57), Thailand (peringkat 92), dan Filipina (peringkat 97).⁷⁴ Hal itu sungguh ironis karena Malaysia melakukan akselerasi dalam peningkatan kualitas pendidikan sejak era 1970-an dengan program *affirmative actions*, dimana mereka pernah berguru dengan Indonesia. Ketika itu mereka mengirimkan sumber daya manusia untuk belajar ke Indonesia. Sejumlah pendidik (guru dan dosen) juga mengajar di Malaysia. Hal inimerupakan upaya bangsa jiran itu untuk menciptakan daya saing generasi muda yang kompetitif pada masa depan.

Agung Laksono⁷⁵, Menkokesra, mengungkapkan bahwa UNDP mengukur peringkat pendidikan suatu negara berdasarkan lama waktu sekolah. Pada *Laporan IPM* kali ini, lembaga tersebut mencatat rata-rata lama sekolah di Indonesia masih rendah, yakni hanya 5,8 tahun (tidak lulus SD). Meski IPM Indonesia melorot, dikatakan Agung, penurunan tersebut hanya untuk bidang pendidikan, sementara untuk dua bidang lainnya: kesehatan dan kesejahteraan ekonomi/pendapatan perkapita, mengalami kemajuan. UNDP mencatat angka perkapita Indonesia pada 2011 mencapai USD 3.716 ayng dihitung dari 243,3 juta penduduk, atau pendapatan perkapita naik 180% dari IPM sebelumnya. Pemerintah akan melakukan sejumlah pembenahan kebijakan pendidikan, antara lain: penaikan cakupan biaya operasional sekolah lewat dana bantuan operasional (BOS), yang tadinya hanya mengover 70% kebutuhan menjadi 100%, pada tahun depan.

⁷³ IPM tertinggi dikawasan ASEAN dipegang Singapura yang berada pada peringkat 26 dari 187 negara dengan angka indeks 0,866. Brunei berada di urutan 33 (0,838), disusul Malaysia di urutan 61 (0,761), Thailand di urutan 103 (0,682), dan Filipina di urutan 112 (0,644). Posisi Indonesia sedikit lebih baik dibandingkan Vietnamyang berada di urutan 128(0,583), Laos di urutan 138 (0,524), Kamboja di urutan 139 (0, 523), dan Myanmar di urutan 149 (0,483). Lihat: (*Media Indonesia*, 4 November 2011).

⁷⁴ *Media Indonesia*, 7 November 2011.

⁷⁵ *Media Indonesia*, 4 November 2011.

Sementara itu, penduduk bekerja di Indonesia, masih didominasi mereka yang berpendidikan rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2011 mencapai 117,4 juta orang dengan jumlah penduduk bekerja 109,7 juta orang. Dari jumlah penduduk yang bekerja itu, pekerja dengan jenjang pendidikan SD ke bawah mendominasi dengan jumlah 54,2 juta orang (49,4%). Disisi lain, pekerja dengan pendidikan sarjana hanya 5,6 juta orang atau 5,15%. Hal ini, tampak bahwa hampir separuh pekerja berlatar belakang SD dan tidak tamat SD. Dalam hal pengangguran, pada Agustus 2011, mencapai 7,7 juta orang, atau turun 420 ribu dari jumlah pengangguran pada Februari 2011 sebesar 8,12 juta orang. Dilihat dari jenjang pendidikannya, penganggurn lebih banyak berlatar belakang SMA (10,66%), SMK (10,43%), SD/Tidak tamat SD (3,56%), SMP (8,37%), Diploma (8,37%), dan Sarjana (8,02%).⁷⁶

Banyak lulusan SMK yang menjadi penganggur, yang sebetulnya mereka memiliki keterampilan khusus tetapi tidak terserap dalam lapangan kerja. Suatu hal yang patut menjadi bahan introspeksi bagi dunia pendidikan, terutama bertalian dengan urgensi evaluasi, inovasi, dan aktualisasi kurikulum SMK.

Pertumbuhan dan pembinaan karakter generasi muda, dan justeru paling strategis, terletak pada kebijakan negara/pemerintah. IPM meningkat idealnya akan memperbaiki proses pembinaan karakter generasi muda suatu bangsa. Sama halnya, optimalisasi, keseriusan, dan konsistensi peran pemerintah dalam melaksanakan program kebijakan pembangunan, dengan merujuk dimensi IPM (pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi), akan sangat mungkin dapat meningkatkan IPM dan juga kualitas pembangunan karakter generasi muda Indonesia yang lebih baik. Karena, jika dimensi-dimensi IPM ini meningkat, proses pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda diharapkan akan lebih baik seperti diharapkan, dan pada akhirnya, diharapkan dapat mereduksi beragam permasalahan sosial berbangsa, dan juga dapat menguatkan *national character building*.

Bertolak dari berbagai krisis sosial berbangsa, sejak memasuki era-Reformasi 1998, Indonesia telah mendorong pentingnya

⁷⁶ Media Indonesia, 8 November 2011.

membangun karakter generasi muda, sebagai upaya membangun integrasi sosial dan memperkuat integrasi bangsa. Institusi pendidikan Islam (*baca: pesantren, madrasah, dan Mata Pelajaran PAI*), sebagai subsistem pendidikan nasional, memiliki peranan strategis dalam menciptakan generasi muda Indonesia yang mampu beradaptasi dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan-teknologi dan beradaptasi dalam perilaku sosial ditengah masyarakat yang majemuk atau *cultural-pluralism*. Berbagai upaya optimalisasi kagiatan akademik di madrasah/ sekolah; dan program perkuliahan di PTAI/ PTU sekolah/madrasah dan aktivitas perkuliahan di perguruan tinggi (PTU/PTAI), diharapkan dapat menciptakan anak didik yang tidak hanya unggul dalam bidang sains-teknologi (sains-tek) tetapi juga unggul dalam sains-religius (sains-rel), sebagai "cita-cita" tujuan pembangunan nasional. Proses pembelajaran dan perkuliahan yang berkualitas, karenanya, sudah saatnya dilakukan dan dioptimalkan. Dari *out-put* "pendidikan Islam" yang berkualitas itu akan menghasilkan para individu yang berkarakter yang menghargai perbedaan atau "toleran" terhadap masyarakat *cultural-pluralism*. Sehingga, "Pendidikan Islam", diharapkan dapat memperkuat integrasi sosial dan integrasi bangsa.

MBN dan Kebutuhan Guru Profesional⁷⁷

Keberhasilan proses pembelajaran pada Madrasah Berstandar Nasional (MBN) lebih ditentukan oleh sejauh mana pencapaian SKS yang diperoleh seorang siswa. Pencapaian SKS yang diharapkan lebih ditentukan oleh kualitas pembelajaran di kelas seperti telah ditentukan dalam MBN. Seorang guru, dalam hal ini, guru profesional tentunya paling menentukan dalam upaya menciptakan iklim pembelajaran yang mendukung spirit dan tujuan pembelajaran pada MBN. Tulisan ini menganalisis makna dan substansi MBN serta peranan guru profesional dalam proses pembelajaran pada MBN.

Dalam Penjelasan pada PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 11 Ayat 2 (*PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*) dijelaskan bahwa pemerintah mengategorikan sekolah/madrasah yang telah atau hampir memenuhi standar nasional ke dalam kategori mandiri. Penjelasan selanjutnya disebutkan bahwa sekolah kategori

⁷⁷ Tulisan dari *Contributor*, Safarina HD, 'Madrasah Berstandar Nasional dan Guru Profesional', yang pernah dimuat dalam *Jurnal Quantum* Nomor Vol 4 No. 2 Mei-Agustus 2009.

mandiri (SKM) harus menerapkan sistem kredit semester (SKS). SKS adalah salah satu sistem penerapan program pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu bagaimana peserta didik belajar. Peserta didik diberi kebebasan untuk merencanakan kegiatan belajarnya sesuai dengan minat, kemampuan, dan harapan masing-masing.

Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dinyatakan bahwa sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Mengacu pada konsep itu, SKS dapat diterapkan untuk menunjang realisasi konsep belajar tuntas yang digunakan dalam menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada Sistem Kredit Semester, setiap satu satuan kredit semester (1 SKS) berbobot 2 jam kegiatan pembelajaran per minggu selama 16 minggu per semester. Pada SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, satu jam kegiatan tatap muka berlangsung selama 45 menit, sedangkan 25 menit kegiatan terstruktur dan 25 menit kegiatan mandiri. Dengan demikian, penerapan SKS pada KTSP perlu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan pendekatan pembelajaran tuntas dimana satuan kegiatan belajar peserta didik tidak diukur berdasarkan lama waktu kegiatan per minggu-semester tetapi pada satuan kompetensi yang dicapai.

Selanjutnya, dalam Penjelasan PP No.19 Tahun 2005 Pasal 11 ayat 2 dan 3²⁸ dikatakan bahwa Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional adalah terpenuhinya standar nasional pendidikan dan mampu menjalankan sistem kredit semester. Dari ciri itu Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional memiliki profil sebagai persyaratan minimal yang meliputi:

1. memerlukan dukungan internal, yang antara lain: a. Kinerja sekolah/Madrasah indikator terakreditasi A, rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) tiga tahun terakhir minimal 7,00, persentase kelulusan UN lebih kurang 90% untuk tiga tahun terakhir, animo tiga tahun terakhir lebih besar dari daya tampung, prestasi

²⁸ Model Penyelenggaraan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional, Direktorat Sekolah Menengah Atas, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas, Jakarta, 2008.

akademik dan nonakademik yang diraih, melaksanakan manajemen berbasis sekolah, jumlah siswa per kelas maksimal 32 orang, ada pertemuan rutin pimpinan dengan guru, dan ada pertemuan rutin sekolah dengan orang tua; b. Kurikulum dengan indikator memiliki kurikulum SKM, beban studi dinyatakan dengan SKS, mata pelajaran yang ditawarkan ada yang wajib dan ada yang pilihan, panduan/dokumen penyelenggaraan, memiliki pedoman pembelajaran, memiliki pedoman pemilihan mata pelajaran sesuai dengan potensi dan minat, memiliki panduan menjajaki potensi peserta didik dan memiliki pedoman penilaian; c. Kesiapan sekolah dengan indikator sekolah/madrasah menyatakan bersedia melaksanakan SKS, persentase guru yang ingin melaksanakan SKS lebih kurang 90%, pernyataan dari staf administrasi akademik bersedia melaksanakan SKS, kemampuan staf administrasi akademik dalam menggunakan komputer; d. Sumber daya manusia dengan indikator persentase guru memenuhi kualifikasi akademik lebih kurang 75%, relevansi setiap guru mata pelajaran dengan latar belakang pendidikan lebih kurang 90%, rasio guru dan siswa, jumlah tenaga administrasi akademik memadai, tersedia guru BK/karier; dan e. Fasilitas di sekolah/madrasah dengan indikator memiliki ruang sekolah/madrasah, ruang wakil kepala sekolah/madrasah, ruang guru, ruang bimbingan, ruang unit kesehatan, tempat olah raga, tempat ibadah, lapangan bermain, komputer untuk administrasi, memiliki laboratorium (bahasa, teknologi informasi/komputer, Fisika, Kimia, dan Biologi), Multimedia, IPS, dan perpustakaan yang memiliki koleksi buku setiap mata pelajaran, dan memberikan layanan bimbingan karier.

2. memiliki dukungan eksternal yaitu dukungan komite sekolah, orang tua peserta didik, dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, dan dukungan dari tenaga pendamping pelaksanaan SKS.

Memperhatikan kategori-kategori di atas, baik berupa dukungan internal maupun eksternal, maka peranan proses pembelajaran yang berkualitas sangat diperlukan. Selain itu, perhatian terhadap kuantitas dan kualitas SDM guru dan siswa, serta fasilitas-infrastruktur madrasah diperlukan pula. Bila sejumlah persyaratan tersebut terpenuhi maka proses pembelajaran dalam MBN dapat berlangsung seperti yang diharapkan. Memang disadari betul bahwa

hanya baru sedikit madrasah di kota-kota terlebih di desa yang memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, upaya percepatan pencapaian kuantitas dan kualitas madrasah menjadi tugas utama dalam mendorong kesiapan menjadi MBN saat ini.

Peranan Guru Profesional

Eksistensi Undang-Undang No.14/2005, adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru. Seorang guru yang profesional akan menentukan kualitas pendidikan nasional. Menjadi guru profesional bukanlah mudah dan memerlukan proses waktu yang panjang. Sejak disahkannya UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, nasib guru, dan dosen diharapkan menjadi lebih baik. Selama ini, tidak sedikit guru harus mencari pendapatan tambahan selain yang diperoleh dari pendapatan sebagai guru. Oleh karena itu, demi memenuhi tuntutan kehidupan. Pendapatan atau gaji sebagai guru saja belum bisa dikategorikan sejahtera. Guru hanya memperoleh julukan "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa" tetapi nasibnya kurang diperhatikan.

Dengan disahkannya UU No.14/2005, profesi guru di masa yang akan datang diperkirakan akan diminati oleh beragam lapisan masyarakat. Kehadiran undang-undang ini dipandang pula sebagai salah satu bentuk reformasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan harkat, martabat, dedikasi, dan profesionalisme guru. Pada akhirnya, produk pendidikan diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia (*man power*) yang mampu berkompetisi dengan bangsa maju lain pada era global.

Profesi, dalam hal ini, seperti diungkapkan Abdullah Idi⁷⁹ dimaknai sebagai suatu pernyataan atau janji yang terbuka (*to profess* = menyatakan, menjabat) bahwa seorang akan mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena merasa terpanggil. Suatu hal pasti bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan-persyaratan dimaksudkan, yakni: *pertama*, profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan dan didasarkan pada persoalan yang mapan (berkedudukan baik) serta prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diterima masyarakat. *Kedua*, profesi harus

⁷⁹ Sumatera Ekspres, 21 Desember 2005.

menuntut suatu latihan profesional yang memadai dan membudaya. *Ketiga*, profesi menuntut suatu badan pengetahuan yang sistematis dan terspesialisasi. *Keempat*, profesi harus memberikan keterangan tentang keterampilan yang dibutuhkan dimana masyarakat umum tidak memilikinya, yakni sebagai keterampilan sebagian murni dan sebagian lagi diperoleh. *Kelima*, profesi harus sudah mengembangkan cara ilmiah yang merupakan hasil dari pengalaman yang terpuji.

Profesionalisme, dalam hal ini, merupakan suatu ide yang berkembang sejalan dengan perubahan dan dinamika masyarakat modern yang semakin kompleks. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan yang tepat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dalam hal ini, berbeda dengan pekerjaan lainnya karena fungsi sosialnya, yakni mengabdikan kepada masyarakat. Profesi guru adalah suatu profesi yang membutuhkan kualifikasi, kompetensi dalam tugas sebagai pendidik, dan memahami dan perkembangan anak dalam mendukung proses pembelajaran di kelas. Hal ini dapat dipahami bahwa kualitas seorang guru dapat menentukan proses keberhasilan pembelajaran. Guru yang terdidik dan terlatih harus juga menguasai berbagai teknik dan strategi di dalam kegiatan pembelajaran.⁸⁰

Guru merupakan pendidik profesional. Secara implisit seorang guru telah merelakan dirinya sebagai tanggung jawab pendidikan dan dari orang tua para anak didik. Para orang tua, dalam hal ini, mengharapkan *amanah* yang disampaikannya kepada sekolah/ para guru agar seoptimal mungkin dapat mengembangkan potensi, bakat, dan minat anak-anak mereka. Adanya pelimpahan amanah ini, dikarenakan tidak semua orang dapat menjadi guru, karena profesi tersebut membutuhkan profesionalisme dan mengedepankan kepentingan sosial dan keikhlasan dalam bertugas.

Seorang yang memilih profesi guru dalam kehidupannya idealnya harus mengembangkan beberapa kemampuan: *pribadi, profesional, dan sosial*. Dalam proses pembelajaran, keberhasilan seorang guru terletak pada: kepribadian, penguasaan metode, frekuensi dan intensitas aktivitas interaktif guru dan siswa, wawasan, penguasaan materi, dan penguasaan proses pembelajaran. Oleh karena itu, persyaratan menjadi guru tidak hanya memerlukan kecerdasan, terampil, pintar, kreatif, dan profesional, tetapi juga perlu

⁸⁰ Usman, Mohamad Uzer. 2002. *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung. 2002, hlm. 14.

memiliki keunggulan akhlak. Dengan akhlak yang baik dengan cara keteladanan, kesopanan, serta contoh yang baik lainnya, sehingga apa saja yang diajarkan dapat direalisasikan oleh anak didiknya.⁸¹

Al-Nahlawi⁸² mengungkapkan bahwa peran guru hendaklah mencontoh peran yang dilakukan Rasulullah yakni mengkaji dan mengembangkan ilmu ilahi. Allah SWT berfirman:

Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan padanya al-Kitab, al-hikmah, dan kenabian lalu berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi hamba-hambaku, bukan hamba-hamba Allah." Akan tetapi (hendaklah ia berkata), "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan al-Kitab dan disebabkan karena kamu tetap mempelajarinya." (Q.S. Ali Imran, 79).

Kata *rabbani* pada ayat di atas menunjukkan pengertian bahwa pada diri seorang kedalaman atau kesempurnaan ilmu atau takwa. Hal ini bertalian erat dengan fungsinya sebagai pendidik. Ia tidak akan dapat memberi pendidikan yang baik, jika ia sendiri tidak memperhatikan dirinya sendiri.

Selain itu, Allah SWT mengisyaratkan bahwa tugas pokok Rasulullah adalah mengajarkan al-Kitab dan al-Hikmah kepada manusia serta menyucikan mereka, yakni mengembangkan dan membersihkan jiwa mereka. Firman Allah SWT:

"Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. al-Baqarah:129).

Ayat ini menerangkan bahwa sebagai seorang pendidik yang agung, beliau tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi lebih dari itu, dimana ia juga mengemban tugas untuk memelihara kesucian manusia. Untuk itu guru sebagai pendidik juga harus memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kesucian atau fitrah peserta didiknya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

⁸¹ Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, hlm. 158.

⁸² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, 2008, hlm. 74.

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, al-Nahlawi⁸³ menyimpulkan bahwa tugas pokok (peran utama) guru dalam pendidikan Islam adalah: (1) tugas pensucian. Guru hendaknya mengembangkan dan membersihkan jiwa peserta didik agar dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, menjauhkannya dari keburukan, dan menjaganya agar tetap berada pada fitrahnya; (2) tugas pengajaran. Guru hendaknya menyampaikan berbagai pengetahuan dan pengalaman peserta didik untuk diterjemahkan dalam tingkah laku dan kehidupannya. Selanjutnya, fungsi pendidikan sebagai *warisah al-anbiya*; pada hakekatnya mengemban misi sebagai *rahmat al-'alamin*, yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan taat pada hukum-hukum Allah, guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian tugas ini dikembangkan kepada pembentukan manusia yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal saleh, serta bermoral yang tinggi.

Idealnya, seperti dikemukakan Abdullah Idi bahwa seorang guru perlu memiliki beberapa karakteristik, antara lain: (1) memiliki komitmen terhadap profesionalitas, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif; (2) menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoretis dan praktisnya, atau sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, dan *'amaliyah* (implementasi); (3) mendidik dan menyiapkan anak didik agar mampu berkreasi, serta mampu mengatur serta memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya; (4) mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri, atau menjadi pusat panutan atau teladan dan konsultan bagi peserta didinya; (5) memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta mempengaruhi pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didik; dan (6) bertanggung jawab dalam membangun peradaban bangsa yang berkualitas di masa depan.⁸⁴

Dalam UU No.14/2005 dikatakan bahwa profesi Guru dan Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (c) memiliki kualifikasi akedemik dan

⁸³ Ramayulis, 'Ilmu Pendidikan Islam', *Ibid.*, hlm. 75..

⁸⁴ Sumeks, 21 Desember 2005.

latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas keprofesionalan; dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.⁸⁵

Bila memperhatikan substansi UU No.14/2005 maka "masa depan" guru agaknya akan menjadi lebih baik. Terdapat 17 hal/item dalam UU Guru tersebut yang bertalian dengan "masa depan" (kesejahteraan) guru. Hal ini, profesionalisme guru akan lebih baik setelah dilindungi undang-undang. Karena itu, seorang guru harus memiliki persyaratan-persyaratan kualifikasi akademik D-IV atau S1, kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), dan serta sertifikasi pendidik. Seorang guru juga memiliki hak-hak dalam menjalankan profesinya sebagai guru. Akan tetapi, keinginan memperoleh sertifikat guru tersebut tidaklah mudah, tidak seperti membalik telapak tangan mengingat mereka (para guru) terlebih dahulu harus memiliki tanda lulus sertifikasi guru, setelah mengikuti uji kompetensi.

Hak-hak dimaksudkan bertalian dengan penghasilan adalah gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi (satu kali gaji pokok dari APBN/APBD), tunjangan fungsional (subsidi dari APBN/APBD), tunjangan khusus (satu kali gaji pokok, berhak atas rumah dinas pada daerah khusus), masalahat tambahan (tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan lain). Selain itu, terdapat pula hak lain guru di daerah khusus, yakni kenaikan pangkat rutin otomatis, naik pangkat istimewa satu kali, dan perlindungan khusus.⁸⁶

Perlu diungkapkan bahwa dalam UU Sisdiknas No.20/2003, dinyatakan bahwa seorang guru atau pendidik merupakan tenaga profesional (pasal 39) dan harus memiliki sertifikat (pasal 24)

⁸⁵ Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, 2006: 87.

⁸⁶ Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, 2006, hlm. 81-104.

dikeluarkan Perguruan Tinggi (pasal 43). Dalam UU No.14/2005, dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi, kompetensi (diperoleh melalui pendidikan profesi dan sertifikat pendidik (diberikan bagi yang memenuhi syarat (pasal 8–10); guru memperoleh penghasilan, penghargaan, perlindungan kesempatan, kebebasan; dan pemerintah memberikan tunjangan profesi bagi guru yang bersertifikat (Pasal 14–16). Dalam PP No.19/2005 dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik (tingkat pendidikan) yang relevan, minimal S1/D4; dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi: pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial (pasal 28–29). Selanjutnya tentang pentingnya sertifikasi guru ini, tercantum pula dalam Permendiknas No.16/2007 tentang standar kualifikasi akademik dan Kompetensi Pendidik; dan Permendiknas No.18/2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.⁸⁷

Dalam kenyataannya, tidak semua guru dengan mudah memperoleh sertifikasi tersebut dengan cepat karena harus memenuhi angka kredit tertentu (850). Dalam Permendiknas No.18/2007, dalam melakukan portofolio guru dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru (kumpulan dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi sebagai guru dalam interval waktu tertentu), yang terdiri dari 10 komponen (kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan relevan dengan bidang pendidikan).

Di Sumatera Selatan, sejak 2006 hingga 2009, sebagian besar guru telah mengikuti dan lulus sertifikasi. Bila angka kelulusan sertifikasi tersebut menjadi indikator, banyak guru di Sumsel telah profesional. Sertifikasi guru itu sendiri, memiliki korelasi kuat dengan proses peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas pembelajaran pada MBN. Kesejahteraan guru dalam hal ini, seperti diamanatkan UU Nomor 14/2005, berdampak positif terhadap peningkatan profesionalisme pada MBN sehingga diharapkan dapat melaksanakan tugas edukatif-pembelajaran dengan baik.

⁸⁷ Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, 2007, hlm. 1-7

Dalam pelaksanaan kurikulum guru pada MBN memiliki peranan paling penting. Dalam hal ini diperlukan kompetensi guru dalam implementasi, terutama dalam implementasi KTSP pada MBN, karena gurulah yang akan melaksanakan kurikulum di dalam kelas. Hasan⁸⁸ mengatakan "sebaik apapun kurikulum dan sistem pendidikan yang ada, tanpa didukung oleh kualitas guru yang memenuhi syarat maka akan sia-sia". Sejalan dengan pendapat itu, Abdullah Idi⁸⁹ menyatakan bahwa dengan kualitas guru yang memenuhi syarat (kompeten) mempunyai arti bahwa guru dituntut menjadi individu yang terdidik, menguasai sifat individu, ahli dalam bidangnya, mampu bekerjasama, dan mencintai anak didik untuk kepentingan mereka. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak cukup hanya dengan memperbaiki kurikulum saja, tetapi juga perlu diikuti dengan peningkatan kualitas guru dalam berbagai jenjangnya. Tanpa adanya upaya peningkatan kualitas guru, kualitas pendidikan yang diharapkan akan sulit dicapai.

Untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian, dikatakan Kunandar⁹⁰ dibutuhkan guru yang visioner dan mampu mengelola proses belajar-mengajar/pembelajaran secara efektif dan inovatif. Diperlukan perubahan strategi dan model pembelajaran sedemikian rupa memberikan nuansa yang menyenangkan bagi guru dan peserta didik. Apa yang dikenal dengan sebutan *Quantum Learning* dan *Quantum Teaching* pada dasarnya adalah mengembangkan suatu model dan strategi pembelajaran yang selektif mungkin dalam suasana yang menyenangkan dan penuh gairah serta bermakna. Iklim pembelajaran demikian hanya dapat tercipta dalam MBN bila didukung oleh guru profesional.

Di masa lalu, sering dikatakan bahwa suasana iklim belajar sering dipersepsikan sebagai suatu lingkungan yang menyiksa, membosankan, kurang merangsang dan berlangsung secara monoton atau satu arah, *one way communication*, sehingga anak didik terkesan belajar dengan terpaksa dan kurang bergairah. Di sisi lain, para guru

⁸⁸ Kompas, 21 April 2004.

⁸⁹ Idi, Abdullah, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 3.

⁹⁰ Kunandar. 2007. *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 41.

juga sering terjebak pada suasana lingkungan yang kurang menyenangkan dan terjebak pada rutinitas sehari-hari. Oleh karena itu, paradigma *one way communication* tersebut harus diubah menjadi *two ways communication*, suatu komunikasi timbal balik antara guru dan anak didik. Baik guru maupun anak didik terjadi komunikasi timbal balik yang berdampak positif terhadap proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna.⁹¹ Dalam hal ini, guru dituntut untuk lebih profesional dalam pembelajaran pada MBN.

E. Mulyasa⁹² mengatakan bahwa terdapat tujuh kesalahan yang sering dilakukan guru dalam pembelajaran. Yakni (1) mengambil jalan pintas dalam pembelajaran; (2) menunggu peserta didik berperilaku negatif; (3) menggunakan *destructive discipline*; (4) mengabaikan peserta anak didik; (5) merasa paling pandai dan tahu; (6) tidak adil (diskriminatif); dan (7) memaksa hak anak didik.

Ternyata, menjadi guru profesional bukanlah mudah, semudah "membalik telapak tangan". Banyak hal yang harus menjadi perhatian para guru yang bercita-cita ingin menjadi guru profesional. Dalam melaksanakan kurikulum (*actual curriculum*) pada MBN, guru sedapat mungkin tidak melakukan sejumlah kesalahan fatal, seperti dikatakan Mulyasa. Martinus⁹³ dan Abdullah Idi⁹⁴ mengatakan guru hendaklah seoptimal mungkin dapat mengaplikasikan kurikulum ideal (*ideal curriculum*) ke dalam kurikulum aktual (*actual curriculum*).

Persoalan profesionalisme dalam mengajar pada MBN sesungguhnya suatu hal komprehensif dan totalitas, baik bersifat internal maupun eksternal. *Internal*, maksudnya seorang guru harus berupaya keras agar pada suatu ketika bisa menjadi guru profesional dengan beragam kompetensi yang harus dikembangkan. Secara *ekternal*, upaya keras seorang guru harus didukung faktor eksternal, yakni perhatian pihak lain, pemerintah, terutama bertalian dengan

⁹¹ Safarina, Hd., "Urgensi Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran". Makalah disampaikan pada Wisuda Sarjana STKIP Sera Lahat, Sumatera-Selatan, 24 Mei 2008.

⁹² E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 19-32.

⁹³ Martinus, Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2006, hlm. 67.

⁹⁴ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum, Teori & Praktik*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 281-281.

perbaikan kesejahteraan, seperti diamanahkan oleh UU No. 14/2005 dan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2005 yang secara bertahap mulai dan sedang direalisasikan melalui program sertifikasi guru.

Jadi, dalam proses pembelajaran berkualitas sesuai dengan standar pembelajaran pada MBN, salah faktor yang menentukan adalah faktor guru. Guru merupakan pelaksana dan pengambil keputusan kurikulum (*curriculum decision making*). Pembelajaran yang didukung guru profesional berkorelasi positif terhadap kualitas proses pembelajaran pada MBN, yang pada akhirnya proses pembelajaran akan meningkatkan kualitas SDM anak didik/generasi muda bangsa. Mereka diharapkan menjadi SDM yang mampu berkompetisi dengan SDM bangsa lain di tengah derasnya arus globalisasi.

Krisis Spiritualitas & "Solusi" Pendidikan Islam⁹⁵

Suatu penghargaan berarti bagi saya, ketika diminta oleh sdr. Jamaludin LR, untuk memberi Kata Pengantar pada buku yang berjudul "Krisis Spiritual Manusia Modern". Meskipun proses penulisan pengantar ini sempat "molor" dari jadwal diminta, dikarenakan berbagai kesibukan rutin saya, *alhamdulillah*, akhirnya dapat diselesaikan juga. Ada rasa kebanggaan bagi saya ketika sdr. Jamaludin LR, *nota bene* pernah menjadi mahasiswa saya di Program S1, dan sekarang sedang studi S2 di Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, yang tekun, sabar, sehingga dapat merampungkan karya akademik ini.

Sains, teknologi, dan ekonomi, pada nilai-nilai dimilikinya akan mempengaruhi perubahan masyarakat dalam kebudayaan modern. Kemajuan teknologi akan berpengaruh terhadap terjadinya perubahan sosial (Kartodirjo, 1994: 144). Manusia dan budaya modern sangat sarat dengan budaya materialisme. Dikatakan C.A. Van Peursen (1995: 158), budaya materialisme merupakan bentuk kehidupan yang tersusun dari pandangan materialisme atau pandangan yang mengutamakan kebendaan. Pandangan materialisme, lahir dari filsafat materialisme sendiri yang diyakini oleh manusia memilik kekuatan hidup, kepuasan dan perlindungan. Nurcholis Madjid (1997: 68), mengatakan budaya materialisme yang

⁹⁵ Tulisan penulis untuk Kata Pengantar untuk buku 'Krisis Spiritual Manusia Modern', Karangan Jamaludin LR, 2009.

mengagung kebendaan ini, sekarang dapat juga terlihat dalam wujud teknologi, yang menimbulkan semakin akrabnya hubungan manusia dengan teknologi.

Jalaluddin dan Abdullah Idi (1997: 53) mengungkapkan bahwa materialisme sebelumnya hanya merupakan sebuah cabang ilmu filsafat, kemudian, setelah mengalami perkembangan yang didasari oleh faham materialisme ini yang menjadikan material (benda) sebagai satu-satunya, ontologi atau sistem ontologi. Pada abad ke-17, dengan menggunakan sistem ini, telah terbukti hasil yang dicapai oleh manusia, maka materialisme sebagai konsep pemikiran berubah posisi menjadi pandangan hidup. Proses kerja mekanis dan materialisme ini telah membuahkan kemajuan dibidang sains dan teknologi atau teknikalisasi, yang dimulai sejak masa Revolusi Industri di Inggris sampai sekarang.

Sejak perubahan posisi materialisme dari awalnya sebagai sebuah konsep, pola fikir manusia menjadi falsafah hidup yang merupakan fakta bahwa manusia telah percaya kepada kekuatan dan keistimewaan yang dimiliki material, yang dianggap sumber segalanya untuk mengangkat derajat manusia. Manusia pun terus mengagungkan budaya material, terlebih ekspresmen-ekpresmen yang semata-mata menggunakan rasional mutlak dengan menunjukkan bukti empiris yang gemilang. Pandangan materialisme terus berkembang di negara-negara industri maju (*developed industrial countries*), seperti Barat dan Eropa.

Dalam perkembangannya, teknologi dan industri telah berhasil memberikan nama sebuah zaman manusia, yang dikatakan Sutan Takdir Alisabana dengan kebudayaan industri atau peradaban industri (*industrial civilization*), dimana manusia sangat tergantung dengan industri (Sutan Takdir Alisabana, 1992: 9). Pada zaman ini, sikap dan perilaku manusia terkesan mengalami dua pilihan, yakni "memanfaatkan teknologi" atau "diperalat teknologi". Ketika, manusia modern memanfaatkan teknologi, tedapat banyak keuntungan yang dapat menopang kehidupan mereka. Sebaliknya, ketika manusia modern diperalat oleh teknologi, akan berdampak negatif bagi manusia, termasuk terjadinya proses degradasi nilai-nilai spiritualitas-keagamaan manusia.

Semakin memuncaknya kemajuan sains dan teknologi, yang tetap terus membudayakan materialisme, selanjutnya, manusia dunia

memasuki fase globalisasi. Globalisasi (dan Demokrasi) telah menarik perhatian banyak ilmuan abad ini. Globalisasi diyakini sebagai pendorong gelombang demokratisasi dunia. Huntington menyebutnya sebagai *the Third Wave* untuk menggambarkan gelombang demokratisasi dunia di Negara Dunia Ketiga (*the Third Developing Countries*). Data kuantitatif menunjukkan bahwa sekarang ini terdapat 117 negara dari 191 negara telah melakukan Pemilihan Umum multi-partai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi (dengan menggunakan ukuran ini) telah dianut banyak negara (Jan Art Scholte, 2000: 1).⁹⁶

Nurcholish Madjid (1989:217)⁹⁷ menuturkan modernisasi berarti rasionalisasi untuk memperoleh daya-guna yang maksimal dalam berpikir dan bekerja demi kebahagiaan umat. Lanjut Madjid, modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut *fitrah* atau *sunnatullah* (hukum ilahi) yang hak, sebab alam adalah hak. *Sunatullah* telah mengejawantahkan dirinya dalam alam, sehingga untuk mendapat menjadi modern, manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku di alam. Pemahaman manusia tentang hukum alam inilah yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan. Sering dikatakan bahwa modern berarti ilmiah. Oleh karena ilmu pengetahuan ilmiah diperoleh manusia melalui akal (rasio), modern dapat pula berarti rasional. Dapat dikatakan bahwa untuk disebut "modern", orang harus dapat berpikir dan bertindak secara ilmiah dan rasional.

Dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* disebutkan bahwa istilah "globalisasi" berasal dari kata "global" yang dalam bahasa Inggris berarti "*embracing the whole of a group of items*" (merangkul keseluruhan kelompok yang ada). Supriyoko, 1993: 103)⁹⁸ menunjukkan bahwa globalisasi memperlihatkan adanya saling ketergantungan (*interdependency*) dalam masalah sosial, kultural, dan politik suatu bangsa dengan bangsa lain. Contoh, hasil KTT Bumi (*Declaration of Rio: Principles of Forestry*) di Brazil berpengaruh pada kebijakan perhutangan di negara lain.

⁹⁶ Muslim Abdurrahman, "Bagaimana Indonesia Dibaca Pemikir Islam; Sebuah Resensi Pemikiran", dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'in Saleh (Eds.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Cet. I: Jakarta: P3M, 1989), hlm. 217.

⁹⁸ Supriyoko, "Pendidikan Politik di Era-Globalisasi", dalam M. Masyhur Amin dan Ismail S. Ahmad (Eds.), *Dialog Pemikiran Islam dan Realitas Empirik*, (Yogyakarta: LKPSMNU, 1993), hlm. 103.

Sama halnya, sikap Amerika Serikat terhadap negara-negara Arab, khususnya Irak dan Iran; dan sikap Eropa terhadap Bosnia pada masa lalu dapat saja mempengaruhi suatu kebijakan politik negara lain.

Globalisasi merupakan produk pembangunan yang dimotori Barat selaku pemegang konstelasi dunia dalam bidang iptek dan ekonomi. Namun perlu disadari bahwa keberhasilan Barat menjadi pihak paling berpengaruh di dunia sesungguhnya tidak terlepas dari keberadaan dan peranan lembaga pendidikan. Karenanya, keberadaan globalisasi tidak terlepas dari peran lembaga pendidikan selaku pencetak sumber daya manusia (*man power*). Munculnya kategori negara-negara berkembang (*developing countries*) dan negara-negara maju (*developed countries*), sebagai konsekuensi logis atas perbedaan tingkat kualitas SDM pada masing-masing negara di era modernisasi/era globalisasi.

Seiring dengan berkembangnya aktivitas manusia, era globalisasi pun mengandung sejumlah kecenderungan. Pengklasifikasian atas kecenderungan tergantung pada cara memahami dinamika dunia, dan sejauh mana kita merasa terlibat di dalam iklim global. Emil Salim (*Republika*, 4/9/2005) berpendapat globalisasi bertalian dengan ekonomi, perkembangan teknologi yang cepat, perubahan demografi, perubahan politik, dan perubahan sistem nilai (*Republika*, 4/9/2005). Menurut Supriyoko (1993: 103), konsep dasar globalisasi dapat ditinjau dari hadirnya beberapa aspek: (1) ketergantungan (*interdependency*) dalam masalah sosial, politik, dan budaya; (2) peran strategis informasi; dan (3) era industri sebagai kemajuan suatu bangsa.

Sebutan "era informasi" menggaris-bawahi peran strategis dan informasi, bahwa kendali atas dunia benar-benar ditentukan pihak yang menguasai informasi. Terlebih lagi, informasi telah menafikkan sekat-sekat geografis yang ada dunia. Beberapa bukti bisa diilustrasikan di sini: pernyataan politik para pemimpin dunia dapat dinikmati dalam waktu yang nyaris bersamaan oleh segala masyarakat di seantero dunia; peristiwa politik, seperti Pemilihan Umum di Amerika Serikat (AS) atau meninggalnya artis Michael Jackson (27/6/2009) dapat diketahui secara cepat oleh masyarakat dunia melalui internet dan TV. Pertandingan sepak bola Liga Italia atau Liga Inggris dapat ditonton oleh masyarakat Indonesia secara langsung melalui beragam saluran TV.

Perubahan dan perkembangan industri merupakan kemajuan bangsa-bangsa di dunia, dan ini tidak dapat dilepaskan dari pergeseran konsentrasi sumber investasi. Sumber investasi negara-negara pra-industri terkonsentrasi pada pertanian (*land*), negara-negara industri pada permesinan (*machinery*), dan negara-negara pasca-industri pada pengetahuan (*knowledge*). Kemajuan suatu negara sekaligus memberi peluang bagi negara tersebut untuk mengalami perubahan status. Misalnya, dari negara agraris menjadi negara industri, dari negara industri menjadi negara pasca-industri. Indonesia, hingga kini (2009), lebih tepat dikatakan dalam kategori sebagai negara agraris dan dapat juga dikatakan sebagai negara pra-industri (*pre-industrial country*).

Dapat diungkapkan, krisis spiritualitas manusia modern, lebih rinci dapat berbentuk. *Pertama*, "krisis kelaparan", merupakan sebagai salah satu krisis dari globalisasi. Kini, penduduk dunia terus mengalami pertumbuhan sekitar dua kali lipat dari jumlah penduduk tahun 1950 yang berjumlah lebih 2,5 milyar. Berbagai persoalan pun muncul akibat perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang cepat, seperti ancaman kelaparan/kemiskinan, ekologi, pengangguran, dan polusi. Diduga tidak kurang dari 1 milyar orang di dunia menderita kelaparan karena kekurangan makanan. Paul Kennedy (1993: 101) mengatakan bahwa "Agricultural and industrial development have also affected the quantity and quality of the earth's eater supplies. The larger cause, once again, is the increase in global population this century from 1.6 billion to more than 5 billion". Sudah barang tentu, perbandingan yang tidak seimbang antara suplai makanan dan pertumbuhan penduduk dunia yang terus bertambah, seperti dikatakan Kennedy, telah menciptakan meningkatnya ancaman atau krisis makanan atau kelaparan. Semakin banyak manusia harus meninggal dengan tidak wajar.

Selain itu, *kedua*, "krisis ekologi". Negara maju sering berpendapat bahwa negara berkembang sebagai biang kerusakan lingkungan karena tindakan penebangan hutan untuk sumber ekonomi atau devisa negara. Hal itu telah memunculkan reaksi keras dari negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang justru menuding sebaliknya bahwa polusi (*pollution*) di muka bumi sebagian besar justru dilakukan negara-negara maju (*developed countries*) melalui pabrik-pabriknya sebagai sumber pencemaran. Tuding-menuding antara negara berkembang dan negara maju

seperti di atas sebenarnya hanya menimbulkan kelelahan belaka. Permasalahan ekologi-nasional sudah menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat, karena permasalahan ekologi-nasional sesungguhnya adalah persolan ekologi-nasional dan dunia. Kini, pemerintah Reformasi SBY-Boediono, sedang menggalakkan program menanam pohon dengan sebutan "One Man One Tree", sebagai upaya jangka panjang untuk mereduksi dampak buruk ekologi.

Dalam kenyataannya, baik negara maju maupun negara berkembang, sebetulnya telah merusak lingkungan atau terjadinya, "krisis ekologi". Misalnya, di negara berkembang telah terjadi penebangan hutan secara besar-besaran, penggalian tambang yang tidak terkendali, dan pencemaran air laut merusak ekosistemnya. Penebangan hutan dan penambangan berlebihan dan tanpa kontrol telah menimbulkan tanah longsor yang berdampak pada kerugian harta benda dan nyawa manusia. Karena itu, dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana upaya mengatasi kerusakan ekologi. KTT Bumi dengan *Declaration of Rio* tentang *Principle of Forestry*, merupakan salah satu upaya dunia untuk mengatasi kerusakan ekologi.

Malapetaka akibat pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim mengancam semua makhluk tanpa kecuali. Sebagai salah satu menghindari petaka tersebut, pada 7 Desember 2009, utusan lebih dari 190 negara mulai berunding dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen, Denmark. Pada pertemuan Para Pihak Ke-15 (COP-15) Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNCCC) tersebut telah berlangsung negosiasi untuk mencapai kesepakatan baru sebagai pengganti skema Protokol Kyoto yang akan berakhir pada 2012. Sebanyak 145 negara meratifikasi Protokol Kyoto yang disetujui pada 1997. Fenomena pemanasan global, menurut sejumlah pakar agroklimatologi sudah terjadi di Indonesia. Pemanasan global tersebut, diantaranya dapat dilihat dari perubahan suhu permukaan di seluruh wilayah Indonesia. Pada 2080, dampak pemanasan global diperkirakan jutaan manusia terancam punah (*Kompas*, 7/2009). Perhatian terhadap *Global Warming*, sebagai bentuk nyata terhadap proses krisis ekologi. Oleh sebab itu, kepada generasi dunia yang akan hidup pada abad mendatang didorong dan dibekali dengan ilmu pengetahuan yang dapat memecahkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat dunia ke depan.

Di sisi lain, kemajuan sains dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar yang menghasilkan berbagai produk teknologi canggih, seperti mobil, pesawat terbang, elektronik, dan internet. Dilihat dari aspek pemanfaatan terhadap kemajuan sains-teknologi dunia ini, sering kali tidak merata dalam berbagai lapisan masyarakat, bahkan sebagian masyarakat dunia sudah menempuh fase pemanfaatan kemajuan teknologi yang begitu jauh. Sementara itu, bagi sebagian masyarakat dunia lainnya menunjukkan sebaliknya, yakni tampak mengalami keasingan akan produk teknologi atau "gap-tek". Kesenjangan yang dialami kedua jenis masyarakat dunia tersebut dalam responsnya terhadap teknologi, telah berdampak pada berbagai bentuk perilaku sosial masyarakat modern/global, baik positif maupun negatif.

Ketiga, kemajuan sains-teknologi juga bisa berdampak pada "krisis moral". Akibat pengaruh iptek dan globalisasi telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Di kalangan remaja sangat begitu terasa akan pengaruh ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi. Misalnya, pengaruh informasi pengetahuan, baik berasal dari media cetak maupun media elektronik yang dapat saja menjurus pada hal-hal pornografi, telah menjadikan remaja tergoda dalam suatu "pilihan" kehidupan yang menjurus pada pergaulan bebas, hedonisme, dan materialisme. Mereka sebenarnya hanya menjadi "korban" dari globalisasi yang selalu menuntut kepraktisan, kesenangan belaka, dan budaya *instant* dan "jalan pintas". Individu tidak malu-malu lagi melakukan perbuatan yang dilarang ajaran sakral-spiritual, seperti senang memfitnah, rakus kekuasaan, korupsi (uang dan waktu), dan lain-lain; dikarenakan materi dan kekuasaan sudah menjadi "tuhan" dan "kultur" dalam pilihan gaya hidup, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kekuasaan dan materi dipandang dan diyakini dapat mengatasi berbagai masalah kehidupan di dunia fana ini. Sekalipun, dalam faktanya, "gila materi" dan "kekuasaan" tidak jarang dapat menurunkan derajat manusia.

Keempat, "krisis sosial", seperti kriminalitas, konflik sosial dan kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan yang terjadi pada masyarakat dunia. Akibat perkembangan industri dan kapitalisme maka muncul masalah-masalah sosial pada masyarakat. Tidak semua lapisan masyarakat (*social stratifications*) bisa mengikuti dan menikmati dunia industri dan kapitalisme. Mereka yang lemah secara pendidikan, akses, politik dan ekonomi akan berpeluang besar

menjadi korban ganasnya industrialisasi dan kapitalisme. Masyarakat terkadang begitu mudah menjadi emosional yang berdampak berbagai bentuk konflik sosial pada degradasi derajat toleransi dan kohesi sosial, seperti masih terjadinya konflik antardesa, antarsuku, antaragama, antarpelajar/mahasiswa. Krisis sosial dan berbagai bentuknya, telah berdampak pada menurunnya derajat kohesi dan toleransi pada masyarakat plural seperti Indonesia.

Kelima, "krisis identitas" sebagai warga bangsa dan negara. Sebagai bangsa dan negara di tengah bangsa-bangsa di dunia membutuhkan identitas kebangsaan (nasionalisme) yang tinggi dari warga negara Indonesia. Semangat nasionalisme dibutuhkan tetap eksisnya bangsa dan negara Indonesia. Nasionalisme yang tinggi dari warga negara akan mendorong jiwa berkorban untuk bangsa dan negara sehingga akan membuat perilaku positif dan terbaik untuk bangsa dan negara. Dalam dekade terakhir, ada kecenderungan menipisnya jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda di negeri ini. Sebagian mereka, terasa kurang apresiasi terhadap "kebudayaan asli" bangsa mereka, pola dan gaya hidup remaja yang "kebarat-baratan" yang jauh dari nilai-nilai yang lazim sebagai "orang Timur", potensi dan gejala separatisme, dan lain-lain. Krisis identitas ini, lambat-laun dan berproses dapat mengancam integrasi bangsa.

Adanya perdagangan bebas, pada level ASEAN, Asia Pasifik, dan dunia. Kondisi ini membutuhkan kesiapan yang matang dari segi kualitas sumber daya manusia (SDM). Indonesia, ke depan, membutuhkan SDM yang handal dan unggul yang siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain. SDM yang handal dan prospektif hanya dapat diperoleh dari suatu lembaga pendidikan bermutu/berkualitas. Karenanya, pemerintah sedang menata kualitas pendidikan, seperti dengan memproduksi UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan dengan meningkatkan anggaran pendidikan hingga 20%.

Keenam, krisis moral. Kemajuan sains dan teknologi, sebagai produk rasio manusia modern; di satu sisi, akan mempermudah proses kehidupan manusia yang lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, kemajuan sains dan teknologi, akan memperjauh manusia dari nilai-nilai religius dan kemanusiaan, bahkan tidak jarang mereka kehilangan identitas diri. Di tengah persaingan hidup yang semakin ketat dan jumlah penduduk dunia semakin bertambah, manusia modern lebih mudah melakukan perilaku destruktif, seperti mereka

lebih mudah menjadi angkuh, jahat, pergaulan bebas, fitnah, korupsi, dan suka "jalan pintas" dalam berbagai aktivitas kehidupan. Berbagai jenis perilaku *a moral* tersebut, dapat saja terjadi pada berbagai sendi/ sektor kehidupan masyarakat modern. Krisis spiritualitas manusia modern, dapat dilihat nyata dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Bangsa kita, kini juga sedang mengalami krisis penegakan hukum, yang disinyalir karena terpisahnya hukum dengan spiritualitas/moralitas, bertalian dengan berbagai kasus, seperti kasus Bank Century. Sudjito, seorang Guru Besar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam *Seputar Indonesia* (2/12/2009), menuturkan bahwa diantara penegak hukum ada yang sampai mengangkat sumpah, menyebut nama Allah SWT, akan tetapi hal itu bukan sepenuhnya sebagai manifestasi sikap moral dan lebih dikarenakan alasan "terpaksa" dan "tersudut". Pada waktu mereka diangkat dalam berbagai jabatan juga sudah disumpah, lantas kenapa harus bersumpah berulang-ulang? Inilah, salah satu pertanda "krisis moral" mengancam anak bangsa ini.

Jelas, di sini, bahwa kemajuan sains dan teknologi sebagai produk akal manusia, yang terlihat prialku manusia pada era globalisasi ini, ternyata tidak berjalan simetris terhadap kemajuan spiritual manusia. Peran akal (*aql*) terkadang terlalu kuat, sehingga spiritualitas terabaikan atau mengalami krisis. Hingga tidak heran orang berpengetahuan dan pintar tetapi dapat saja perilakunya cenderung jauh dari nilai spiritualitas/moralitas yang diharapkan.

Hal ini, terkadang sangat nyata terjadi dalam berbagai interaksi sosial kehidupan manusia modern. Bagi manusia modern, kekuatan spiritualitas dapat dijadikan "penyeimbang" dan "terapi" terhadap dampak negatif dari kemajuan sains dan teknologi. Globalisasi telah mengubah cara hidup manusia sebagai individu, sebagai warga masyarakat dan sebagai warga bangsa. Tidak seorang pun yang dapat menghindari dari dampak globalisasi, baik positif maupun negatif. Setiap individu dihadapkan pada dua pilihan sulit, yakni *pertama*, menempatkan diri sebagai "pemain" dalam arus perubahan globalisasi; atau *kedua*, menempatkan diri menjadi "korban" dan terjerembab mengikuti deras nya arus globalisasi.

Berbagai permasalahan kehidupan manusia modern, yang berawal dari krisis spiritualitas-kemanusiaan. Krisis spiritualitas berdampak pada buruknya akhlak manusia, yang terlihat pada

interaksi sosial antarmereka. Krisis spiritualitas dapat juga dikatakan sebagai lemahnya "iman" umat beragama. Manusia sudah "gila materi" di luar etika berlaku, baik bertalian dengan proses memperoleh maupun menggunakannya. Krisis spiritualitas manusia modern itu hanya dapat direduksi dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermoral melalui proses pendidikan yang berkualitas sesuai dengan ajaran agama dianutnya. yakni, melalui proses pendidikan yang mampu mengimbangi sadanya perubahan sosial sesuai dengan zamannya.

Dalam buku Sdr. Jamaluddin, LR, ini patut diapresiasi, bahwa sebagai penulis pemula, beliau telah memberi kaya akan gagasan segar dan krusial bagi pembaca, yakni dengan merekonstruksi pentingnya konsep pendidikan Islam dalam upaya mereduksi permasalahan krisis spiritualitas manusia modern. Dalam buku ini, ditawarkan suatu solusi pendidikan Islam terhadap krsisis spiritualitas modern yang mengedepan materialisme dan humanisme modern. Penulis juga memaparkan solusi pendidikan Islam terhadap perkembangan sains dan teknologi, agar umat manusia tidak tergelincir jauh dari rel-petunjuk Sang Khalik. Menurut penulis, pemahaman terhadap konsep dan praktek pendidikan Islam yang benar, akan terjadi proses reduksi krisis spiritual dan humanis umat manusia modern. Pendidikan Islam merupakan alternatif terhadap solusi krisis sumber daya manusia (SDM) saat ini, karenanya, negara-negara yang penduduk mayoritas Islam, barangkalai dapat memperhatikan pentingnya keberadaan lembaga pendidikan dapat diberdayakan nilai-nilai religius-ke Islaman yang tercantum al-Qur'an dan al-Hadist, yang mengedepankan nilai-nilai universal, sebagaimana telah diaplikasikan pada zaman kejayaan Islam.

Prospek Profesi Guru³

Antara Undang-Undang No.14/2005 tentang Guru dan Dosen dan kualitas Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Pada prinsipnya, tidak dapat dipisahkan. Kualitas guru hanya dapat ditingkatkan, seperti harapan UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, jika perguruan tinggi/PTAI, dapat membenahi dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran

³ Tulisan penulis berjudul , "Prospek Profesi Guru" yang pernah dimuat dalam Sumatera Ekspres, 21 Desember 2005.

menjadi lebih baik. Karena itu, tulisan ini, lebih memfokuskan pada analisis tentang sertifikasi guru dan urgensi pemberdayaan PTAI.²

Profesi Guru, selama ini, identik dengan suatu pekerjaan yang kurang diminati dan cenderung terpinggirkan. Hanya orang tua dari kalangan menengah kebawah atau miskin yang bercita-cita agar anaknya menjadi guru. Tentang jelek dan buruknya nasib guru di Indonesia ini, tergambar dalam lirik lagu Iwan Fals, yakni "Guru Umar Bakri Pegawai Negeri." Lagu ini mengindikasikan betapa buruknya penghargaan bangsa kita terhadap profesi guru dan dosen. Mulai dari rendahnya kesejahteraan, lingkungan kerja yang buruk, keamanan kurang terjamin, dan lain-lain. Tapi, sejak disahkannya UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, nasib guru dan dosen ke depan diharapkan menjadi lebih baik. Selama ini, tidak sedikit guru harus mencari pendapatan tambahan selain yang diperoleh dari pendapatan sebagai guru. Dengan disahkannya UU No.14/2005, profesi ini ke depan diperkirakan mulai diminati oleh beragam kalangan dan lapisan masyarakat.

Profesi, dapat dimaknai dengan suatu pertanyaan atau janji yang terbuka (*to profess*= menyatakan, menjabat) bahwa seorang akan mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena merasa terpanggil. Suatu hal pasti bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan persyaratan tertentu. *Pertama*, profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan dan didasarkan pada persoalan yang mapan (berkedudukan baik) serta prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diterima masyarakat. *Kedua*, profesi harus menuntut suatu latihan professional yang memadai dan membudaya. *Ketiga*, profesi menuntut suatu badan pengetahuan yang sistematis dan terspesialisasi. *Keempat*, profesi harus memberikan keterangan tentang keterampilan yang dibutuhkan dimana masyarakat umum tidak memilikinya, yakni sebagai keterampilan sebagian murni dan sebagian lagi diperoleh. *Kelima*, profesi harus sudah mengembangkan cara ilmiah yang merupakan hasil dari pengalaman yang teruji.

² Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) meliputi UIN, IAIN, STAIN dan STAI.

Hal ini tampak bahwa profesionalisme merupakan ide yang berkembang sejalan dengan perubahan dan dinamika masyarakat modern yang semakin kompleks. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan yang tepat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang profesi, dalam hal ini, berbeda dengan pekerjaan lainnya karena fungsi sosialnya, yakni mengabdikan kepada masyarakat.

Profesi guru adalah suatu profesi yang membutuhkan kualifikasi, kompetensi dalam tugas sebagai pendidik, dan memahami pertumbuhan dan perkembangan anak dalam mendukung proses pembelajaran diharapkan. Guru merupakan pendidik profesional, karenanya secara implisit seorang guru telah merelakan dirinya sebagian tanggung jawab pendidikan dari orang tua para anak didik. Para orang tua sangat mengharapkan *amanah* yang disampaikan kepada sekoalh/guru agar seoptimal mungkin dapat mengembangkan potensi, bakat, dan minat anak-anaknya. Tidak semua orang dapat menjadi guru, karena profesi ini membutuhkan profesionalisme dan mengedepankan kepentingan sosial dan keikhlasan dalam bekerja. Seorang yang memilih profesi guru harus mengembangkan beberapa kemampuan; pribadi, sosial, dan professional.

Dalam proses pembelajaran, keberhasilan seorang guru terletak pada; kepribadian. Penguasaan metode, frekuensi dan intensitas aktivitas interaktif guru dan siswa, wawasan, penguasaan materi, dan penguasaan proses pembelajaran. Dalam hal ini, persyaratan menjadi guru tidak hanya memerlukan kecerdasan, trampil, pintar, kreatif, produktif dan professional, tetapi juga perlu memiliki keunggulan akhlak. Idealnya, seorang guru perlu memiliki beberapa karakteristik; (1) komitmen terhadap profesionalitas, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja. Serta sikap *continuous improvement*; (2) menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, atau sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, dan *'amaliyah* (implementasi); (3) mendidik dan menyiapkan anak didik agar mampu berkreasi, serta mampu mengatur serta memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya; (4) mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri, atau menjadi pusat panutan atau teladan dan konsultan bagi peserta didiknya; (5) memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbarui pengetahuan dan keahliannya

secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didik; dan (6) bertanggung jawab dalam membangun peradaban bangsa yang berkualitas di masa depan.⁴

Dalam UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, dikatakan bahwa profesi Guru dan Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip; (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealism; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas keprofesionalan; dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.⁵

Sejumlah kalangan meyakini bahwa terdapat beberapa permasalahan krusial yang didapat selama ini. *Pertama*, gaji guru yang rendah, bahkan lebih rendah dari pekerjaan yang lain dengan tingkat pendidikan yang sama atau bahkan dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Banyak guru yang mencari pendapatan tambahan yang sebetulnya dapat mengganggu tugasnya sebagai pendidik. *Kedua*, kenaikan pangkat yang merupakan hak guru seringkali tidak lancar karena terhambat tembok birokrasi yang panjang. Tidak jarang seorang guru harus berulang kali memperbaiki usulan kenaikan pangkat yang menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya. *Ketiga*, rasa aman dalam menjalankan tugas belum terjamin sepenuhnya karena berbagai perlakuan yang tidak adil terhadap guru yang dapat mengganggu konsentrasi dalam menjalankan tugasnya. *Keempat*, masih banyak keadaan guru yang buruk, sempit, kumuh, genteng bocor, dan banjir, sehingga guru tidak betah berada di sekolah. *Kelima*, di era otonomi daerah terkadang guru menghadapi perlakuan diskriminatif dalam hal insentif dan tunjangan kesejahteraan lainnya.

⁴ Lihat: (Abdullah Idi, "Prospek Profesi Guru", Sumatera Ekspres, 21 Desember 2005).

⁵ Lihat: (Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, Tahun 2006, hlm.87).

Keenam, banyak guru yang kurang kompetensi dan kurang belum profesional dalam menjalankan tugasnya.

Dengan disahkannya UU No.14/2005⁶ agaknya masa depan (kesejahteraan) guru dan dosen akan lebih baik. Karena, setidaknya terdapat 17 *item* dalam UU Guru itu yang bertalian dengan kesejahteraan guru. Hal ini, profesionalisme guru dan dosen kan lebih baik setelah dilindungi UU. Karena itu, seorang guru harus memiliki persyaratan-persyaratan kualifikasi akademik D-IV atau S1, kompetensi (pedagogic, kepribadian, sosial, dan professional), dan serta sertifikat pendidik. Disamping itu, seorang guru juga memiliki hak-hak dalam menjalankan profesinya sebagai guru⁷. Jika UU Guru dan Dosen itu dapat diaplikasikan dengan baik, kualitas pendidikan nasional, tidak terkecuali pendidikan Islam (madrasah) akan lebih pula. Hadirnya UU No.14/2005 itu diharapkan "mimpi-mimpi indah guru" akan kesejahteraan menjadi kenyataan. Jika hal ini benar adanya, maka nasib guru dan nasib pendidikan nasional akan lebih baik dan lebih berkualitas. Lebih dari itu, pilihan profesi guru akan menjadi lebih kompetitif karena profesi ini lebih menjanjikan masa depan anak bangsa.

Akan tetapi, semua "mimpi-mimpi indah guru" ini tidak mudah seperti membalik telapak tangan mengingat mereka terlebih dahulu harus memiliki tanda lulus sertifikat guru setelah uji kompetensi⁸.

⁶ UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen ini disahkan oleh DPR RI, 6 Desember 2005.

⁷ Hak-hak dimaksudkan bertalian dengan penghasilan: gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi (satu kali gaji pokok dari APBN/APBD), tunjangan fungsional (subsidi dari APBN/APBD), tunjangan khusus (satu kali gaji pokok, berhak atas rumah dinas pada daerah khusus), maslahat tambahan (tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan lain). Selain itu, terdapat pula hak lain guru di daerah khusus, yakni kenaikan pangkat rutin otomatis, naik pangkat istimewa satu kali, dan perlindungan khusus). Lihat: (*Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Departemen Agama RI Tahun 2006, hlm. 81-104).

⁸ Perlu diungkapkan bahwa dalam UU Sisdiknas No.20/2003, dinyatakan bahwa seorang guru atau pendidik merupakan tenaga profesional (pasal 39) dan harus memiliki sertifikat (pasal 42) dikeluarkan Perguruan Tinggi (pasal 43). Dalam UU No. 14/2005, dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi, kompetensi (diperoleh melalui pendidikan profesi dan sertifikat pendidik) (berikan bagi yang memenuhi syarat (pasal 8-10); guru memperoleh penghasilan, penghargaan, perlindungan, kesempatan, kebebasan; dan pemerintah memberikan tunjangan profesi bagi guru yang bersertifikat (pasal 14-16). Dalam PP No.19/2005 dinyatakan bahwa pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik (tingkat pendidikan) yang relevan, minimal S1/D4; dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi: pedagogic, kepribadian, profesional, dan sosial (pasal 28-29). Selanjutnya tentang pentingnya sertifikasi guru ini, tercantum pula dalam Permendiknas No. 16/2007

Tidak semua guru dapat dengan mudah memperoleh sertifikasi ini dengan cepat karena harus memenuhi angka kredit tertentu (850). Dalam Permendiknas No.18/2007, dalam melakukan portofolio guru dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru (kumpulan dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi sebagai guru dalam interval waktu tertentu), yang terdiri dari 10 komponen (kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan).

Jadi, harus diakui bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara cita-cita ideal UU Sisdiknas No.20/2003 dan UU No.14/2005 dengan kenyataan kompetensi guru selama ini, seperti harus memiliki persyaratan 10 komponen tersebut. Dalam konteks ini, agaknya, untuk menerapkan UU No.14/2005 diperlukan objektivitas dan kearifan dari berbagai pihak atas buruknya kondisi kualitas guru dan pendidikan selami ini. Jangan terjadi kiranya aplikasi UU No.14/2005 dapat menimbulkan masalah baru bagi guru dan dunia pendidikan di Indonesia. PTAI, terutama Fakultas Tarbiyah/STAI, sedapat meungkin lebih memperhatikan kaulitas perkuliahan dengan didukung elemen pendukungnya agar dapat menghasilkan lulusan/calon guru (madrasah) seperti yang diharapkan UU No.14/2005. Jangan terjadi penyalahgunaan wewenang dan pilih kasih dalam melaksanakan uji kompetensi sehingga akan merugikan sejumlah guru lain, karena UU ini bertujuan mulia, yakni mengangkat harkat dan martabat guru agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Urgensi Pemberdayaan PTAI

Mengingat suatu masyarakat bersifat suatu dinamis, dunia pendidikan idealnya mesti mengikuti perubahan sosial tersebut. Jika sebaliknya yang terjadi, dimana sekolah tertinggal dengan perubahan sosial maka keberadaan sekolah dan out-put-nya akan mengalami

tentang standar kualifikasi akademik dan Kompetensi Pendidik; dan Permendiknas No. 18/2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Lihat ("Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan", *Materi Pembekalan Untuk Calon Peserta*, Direktorat Pendidikan Madrasah, Departemen Agama RI 2007, terutama hlm. 1-3).

ketinggalan pula dalam banyak hal. Dari kenyataan demikian, keberadaan perguruan tinggi, seperti PTAI, senantiasa dapat memberdayakan diri agar kebutuhan masyarakat (*social needs*) dapat dipenuhi. Esensi pendidikan Islam sesungguhnya memiliki keterkaitan erat dengan pemahaman terhadap fungsi manusia di bumi, yakni sebagai *khalifah fil ardh*. Agar fungsi kekhalifahan tersebut dapat berlangsung dengan baik dan sempurna, ilmu pengetahuan sangat diperlukan dalam upaya menjaga hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya (*hablum minal'alam*). Dalam hal ini, institusi pendidikan Islam dan proses pembelajarannya hendaklah memiliki proteksi ke depan, bersifat inovatif (*innovative learning*), bukan melestarikan apa-apa yang sudah ada (*maintenance learning*, tidak pasif dan dogmatis). Ali bin Abi Thalib (sahabat Nabi) mengatakan: "Didiklah anak-anak kalian tidak seperti yang dididiknya kepada kalian sendiri, oleh karena itu, diciptakan untuk generasi zaman berbeda dengan generasi zaman kalian."⁹

Harapan Ali bin Abi Thalib R.A di atas menunjukkan antisipasi ajaran Islam untuk menyelamatkan generasi muda pada zamanya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia, akan berdampak pada semakin terbatasnya sumber-sumber makanan dan penghidupan, dan munculnya berbagai permasalahan sosial lainnya, secara konseptual, telah diantisipasi Islam dengan perlunya generasi muda Islam menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi dengan seoptimal mungkin berdasarkan zamannya. Dengan kata lain, untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan akherat, umat Islam perlu memiliki sains agama dan sains pengetahuan-teknologi.

Sementara itu, kemampuan intelektual terhadap pengembangan sains dan teknologi generasi muda muslim perlu didukung dengan diimbangi dengan kemampuan moral dan spiritual mumpuni. Seperti diungkapkan Siti Musdah Mulia¹⁰ bahwa era millennium hanya menjanjikan surga hanya bagi mereka yang betul-betul memiliki kompetensi moral, spiritual, dan intelektual. Kesadaran inilah yang perlumenjadi landasan pijak bagi semua pihak dalam melihat PTAI.

⁹ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, PT. Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999, hlm. 18.

¹⁰ Siti Musdah Mulia, "Harus Ada Pembelaan terhadap Masyarakat untuk Menghentikan Malpraktek di PTAI", *Jurnal Inovasi Pendidikan Tinggi Agama Islam*, Vol. VII/No.02/2004, hlm.6-8.

Dikatakan mulia bahwa terdapat dua kendala utama yang dihadapi PTAI, terutama keterkaitan dengan mutu lulusan. PTAI, dalam hal ini, umumnya memiliki masalah serius dalam hal itu, dimana masih hanya mengutamakan kuantitas kelulusan, dan seperti PTAI hanya menjadi "mesin produksi pengangguran". Hal ini dapat dipahami bahwa PTAI memiliki tanggung jawab terhadap upaya pengembangan sains-teknologi, spiritual, dan moralitas anak didik (mahasiswa) yang mampu berkiprah dengan baik dalam proses pembangunan nasional.

PTAI merupakan institusi keagamaan pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki andil signifikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Dalam kenyataannya, banyak PTAI masih berkutat dalam hal kuantitas tetapi masih terlalu rendah dalam hal kualitas. Sebagai bangsa yang besar dengan penduduk mayoritas beragama Islam, keadaan ini memerlukan upaya inovasi-inovasi bahkan reformasi mendasar terhadap PTAI. Bila kualitas PTAI rendah maka umat Islam Indonesia akan mengalami kerugian terhadap penyiapan intelektual muda/generasi muda bangsa ini. Bila kondisi ini terus berlanjut, maka bangsa besar ini juga akan mengalami kerugian mendasar pula terhadap sumber daya manusia (*human resources*) yang lemah. Pada akhirnya, bangsa besar ini sulit berkompetitif dengan bangsa lain, seperti dengan Singapura dan Malaysia.

Perlu diketahui bahwa sejak 1970-an, melalui kebijakan *affirmative action*, Malaysia telah memprioritas aspek pendidikan dalam proses pembangunannya, terutama dengan member kesempatan lebih banyak pada etnis pribumi Melayu untuk memperoleh pendidikan. Karena dengan pendidikan, etnis Melayu akan memiliki peluang lebih besar dalam memperoleh peluang kesejahteraan ekonomi, sehingga, ketimpangan sosial secara alamiah dapat ditekan dan potensi konflik sosial bernuansa etnis dan agama yang melemah integrasi bangsa dapat dikurangi pula.

Mengingat suatu masyarakat dalam suatu negara selalu dinamis, maka keberadaan PTAI pun diharapkan selalu merespons atas perubahan sosial tersebut. Sebagai contoh, perubahan beberapa PTAI, misalnya dari STAIN menjadi IAIN atau dari IAIN menjadi UIN berdampak pada meningkatnya jumlah mahasiswa baru ke PTAI dimaksudkan. Pada tahun 2007-2008, jumlah mahasiswa baru untuk

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mencapai 4.000-an dan UIN Bandung mencapai 2000-an. Dibanding dengan beberapa PTAI, seperti IAIN Raden fatah palembang hanya sekitar 700 orang yang cenderung stabil atau bahkan proses penurunan dari tahun sebelumnya (2003, 2004, 2005, 2006). Dari 700 orang mahasiswa baru yang masuk ke IAIN Raden Fatah Palembang itu, terdapat sekitar 70% yang memilih fakultas Syaria'ah dan Tarbiyah; dan 30% memilih Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.

Kenyataan sosial-PTAI demikian tidak dapat dibiarkan terus meneruskarena berimplikasi negative terhadap banyak hal. *Pertama*, dalam kenyataannya terdapat sejumlah fakultas/jurusan/program pada PTAI yang "laku di jual" dan "tidak laku dijual". Hal ini bermakna bahwa perubahan IAIN menjadi UIN, ternyata berimplikasi positif bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat muslim yang menghendaki anak-anaknya belajar/kuliah di kampus UIN, yang dapat belajar agama dan sains-teknologi. Di sisi lain, masih terlalu banyak PTAIS, yang kondisinya masih memprihatikan dan untuk memperoleh mahasiswa baru saja mengalami kesulitan kondisi ini, tentunya, tidak dapat dibiarkan, karena akan memperburuk *image* masyarakat terhadap PTAI.

Di negeri kita, dalam kenyataannya bagi sebagian besar masyarakat memasuki perguruan tinggi (PT), tidak terkecuali memasuki PTAIS, masih terlalu *elite* karena mahal biaya pendidikan. Apalagi sejak memasuki era reformasi pada 1998, dimana bangsa ini mengalami krisis multidimensional yang kini seakan masih dirasakan. Reformasi agaknya selalu berdampak positif dan negative. Di bidang sosial-ekonomi, banyak orang tua mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sejumlah perusahaan dan peluang lapangan kerja baru tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini akan meningkatkan angka pengangguran, termasuk pengangguran terdidik (intelektual), lulusan perguruan tinggi (PT). hal ini pula hanya akan menyulitkan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang PT. beban masyarakat akan semakin bertambah pula ketika harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan yang berdampak pada naiknya harga sejumlah barang kebutuhan primer dan sekunder.¹¹

¹¹ Abdullah Idi, "Peranan Negara Kepada Perguruan Tinggi", *Sumatera Ekspres*, 28 April 2006.

Kesulitan dan kesusahan masyarakat ini sering sekali tersalurkan melalui suara siswa. Kasus demonstrasi mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan PT yang menerapkan pola swastanisasi, terutama PT di Jawa, misalnya UGM, UI, ITB, dan IPB, merupakan suatu respons positif terhadap realitas aspirasi masyarakat umumnya. Aksi protes mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang tahun 2005 atas kenaikan spp mahasiswa baru merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat yang buruk. Sama halnya, aksi protes mahasiswa Unsri tahun 2006 atas kenaikan SPP mahasiswa baru pada prinsipnya perlu dilihat sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sama halnya, aksi-aksi mahasiswa di daerah lain, melalui media TV misalnya, pada umumnya sebagai bentuk perpanjangan tangan terhadap kesulitan-kesulitan sosial-ekonomi yang dialami masyarakat.

Di sisi lain, kita pun melihat bahwa sebagian masyarakat kita mampu menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah bonafit dan berkualitas dengan biaya pendidikan yang tinggi. Misalnya saja untuk biaya masuk Sekolah Dasar (SD) pada suatu sekolah swasta tertentu di Palembang, biaya uang pembangunan mencapai belasan juta dan biaya SPP perbulan sekitar satu juta rupiah. Bandingkan dengan biaya SPP seorang mahasiswa IAIN yang berkisar Rp. 650.000,- per semester, itu pun banyak orang tua merasa berat. Hal ini mendorong kita untuk berspekulasi dalam analisis bahwa *pertama*, ternyata sebagian masyarakat kita, merupakan kalangan yang mampu dalam sosial-ekonomi dan sebagian besar lainnya cenderung rendah sosial ekonominya. *Kedua*, bila SPP mahasiswa IAIN perbulan tersebut lebih rendah dari SPP anak-anak SD pada sekolah bonafit, hal ini bertanda bahwa mereka yang masuk ke IAIN atau PTAIS pada umumnya berlatar belakang sosial-ekonomi rendah dan miskin. *Ketiga*, mahasiswa baru (*in-put*) yang masuk ke IAIN atau PTAIS umumnya berlatar belakang orang tua yang sosial-ekonominya rendah dan sebagian besar mereka berasal dari pedesaan yang identik dengan ekonomi rendah pula. Hal ini berarti bahwa banyak mahasiswa yang kurang mampu yang belajar di perguruan tinggi umum (PTU), dengan prestasi/kemampuan akademik lebih baik.

Lulusan (*out-put*) Madrasah Aliyah (MA) yang berprestasi dalam bidang akademik dan orang tuanya mampu secara sosial-ekonomi cenderung pula memilih PTU sebagai pilihan pertama kuliah.

Kalaupun PTAI (IAIN, UIN, STAIN, PTAIS) menjadi pilihan pertama kuliah, hal ini dikarenakan mereka menyadari terhadap prestasi akademik mereka yang rendah. Sudah barang tentu, sebagian orang tua yang mampu secara sosial-ekonomi ada pula mengirimkan anak-anaknya ke PTAI lebih dimotivasikan agar anak-anaknya dapat memperdalam pengetahuan agama. Tetapi, pada umumnya, mereka yang studi ke PTAI lebih dikarenakan atas pertimbangan sosial-ekonomi dan latar belakang kemampuan akademik anak-anaknya. Hal ini dapat dikatakan bahwa anak-anak lulusan SLTA/MA yang masuk PTAI merupakan pilihan kedua, *second choice*, karena beragam alasan yang telah disebutkan di atas.

Kenyataan PTAI demikian tidak dapat terus-menerus dibiarkan karena hanya merugikan umat Islam dalam beberapa hal. *Pertama*, bila tidak diperbaiki kualitas PTAI, hanya akan menghasilkan banyak lulusan (*out-put*) sarjana tetapi cenderung kurang percaya diri terhadap keilmuannya. *Kedua*, lulusan (*out-put*) nya hanya menciptakan "ahli" agama tetapi kurang respons terhadap perubahan sosial pada masyarakat, sehingga mereka dalam banyak hal akan sulit berkompetensi. *Ketiga*, *image* buruk masyarakat umumnya terhadap PTAI akan merugikan umat Islam karena intitusi ini hanya cenderung sebagai pelengkap (*complementary/supplement*) dan *second choice*. *Keempat*, pemerintah daerah dengan kebijakan otonomi daerah, dalam kenyataan, cenderung memberi kontribusi seadanya yang belum membawa perubahan signifikan. Hal ini, dapat dimaklumi, karena masyarakat pada umunya masih melihat PTAI sebagai institusi pendidikan tinggi Islam yang hanya mengurus persoalan keagamaan, di sisi lain, masyarakat membutuhkan jaminan kehidupan di dunia Atas kenyataan demikian, tampak bahwa realitas sosiologis-PTAI kita menunjukkan pentingnya upaya pemberdayaan mendasar, baik dari segi internal maupun eksternal.

Jadi, kehadiran UU Sisdiknas No. 20/2003 dan UU No. 14/2005 merupakan suatu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional akan datang. Dalam UU ini, masa depan Guru dan Dosen diharapkan akan lebih baik, karena adanya harapan akan perbaikan kesejahteraan atas perbaikan angka penghasilan setelah memperoleh sertifikasi/setelah lulus uji kompetensi. Untuk memperoleh sertifikasi itu, PTAI, terutama Fak. Tarbiyah di UIN dan IAIN atau Jurusan tarbiyah di STAIN/STAI, diharapkan dapat memperbaiki kualitas pembelajaran/perkuliahannya

yang didukung berbagai elemen pendukungnya agar dapat menghasilkan lulusan/calon guru yang memiliki berbagai kompetensi yang ditentukan UU No. 14/2005. Jika semua ini menjadi perhatian dan kesadaran semua pihak, nasib guru/guru agama akan menjadi lebih baik dan kualitas pendidikan nasional dan pendidikan agama akan lebih baik pula.

UU No. 14/2005 tentang Guru/Dosen: Antara Cita dan Fakta⁹⁹

Adanya UU No.14/2005 tentang Guru/Dosen ini merupakan suatu tuntutan situasi perubahan sosial yang tidak dapat dihindarkan. Orientasi perhatian terhadap aspek sosiologis, memiliki peranan penting dalam mengembangkan kualitas pendidikan pada masyarakat dan bangsa apa saja dimuka bumi ini. Dalam hal ini, sudah sewajarnya jika dunia pendidikan memperhatikan aspirasi masyarakat karena pendidikan perlu memberikan jawaban terhadap beragam permasalahan sosial di masyarakat itu, seperti ekonomi, politik, budaya, dan agama pada saat tertentu. Hal ini semua, hanya dapat dijawab pada suatu tumpuan yakni jika kualitas pendidikan pada suatu bangsa tampak berkualitas.

Dalam konteks ini pendidikan merupakan suatu hal urgen bagi setiap bangsa, setiap masyarakat, keluarga, dan individu. Imam Suprayogo (2005: 5-6) mengatakan secara intrinsik pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dalam membentuk dirinya menjadi manusiawi dalam pengertian personal, sosial, cultural, dan relegius. Pendidikan dipandang pula sebagai aspek kehidupan universal yang berarti pendidikan diperlukan untuk memelihara dan membangun kehidupan dunia yang maju, aman, damai, dan sejahtera. UNESCO, merupakan badan dunia yang mengurus pendidikan, sejak awal telah memperhatikan akan pentingnya pendidikan untuk semua yang dikenal dalam program Program All.

Pentingnya pendidikan dalam memecahkan berbagai permasalahan bangsa pada suatu negara menuntut sejumlah pihak terutama pemerintah yang diberi wewenang dalam hal itu, untuk

⁹⁹ Artikel penulis pernah dimuat dalam *Jurnal Intizar: Jurnal Kajian Agama Islam dan Masyarakat*, Vol. 12/No.2/Desember 2006. Tulisan ini awalnya merupakan revisi seperlunya terhadap dua tulisan penulis yang dimuat dalam harian *Sumatera Ekspres*, yakni bertema: 'Prospek Profesi Guru' (21 Desember 2005) dan Peranan Negara kepada Perguruan Tinggi (28 April 2006).

senantiasa mengantisipasi setiap perubahan yang dapat mempengaruhi jalannya proses pendidikan. S. Nasution (1989: 23) mengatakan sistem pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan di dalamnya memiliki beragam fungsi dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, antara lain: melakukan revisi dan perubahan sosial; mempertahankan kebebasan akademis dan kebebasan melaksanakan penelitian ilmiah; menyampaikan kebudayaan dan nilai-nilai tradisional dan mempertahankan *status quo*; mengeksploitasi orang banyak demi kesejahteraan kalangan elite; mewujudkan revolusi sosial untuk melenyapkan pengaruh rezim-pemerintah terdahulu; mendukung kelompok tertentu (militer, industry atau politik); menyebarkan falsafah, politik atau kebudayaan tertentu; membimbing dan mendisiplin jalan fikir generasi muda; mempercepat laju kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; mendidik generasi muda agar menjadi warga negara nasional dan warga global; mengajarkan keterampilan pokok (membaca, menulis, dan berhitung); dan memberikan keterampilan yang bertalian dengan mata pencarian.

Masih banyak aspek lain sebagai wujud kebutuhan masyarakat (*the social needs*) terhadap pendidikan masyarakat. Seperti dikutip dalam (S. Nasution, 1989: 24), diantara lain: bagaimana keadaan kompleksitas interaksi antara kekuatan sosial, politik, ekonomi, militer, industry dan kultural dalam suatu masyarakat; kekuatan-kekuatan yang mana yang dominan di bagian dunia lainnya yang erat hubungannya dengan negara bersangkutan; dan bagaimana pribadi pimpinan dan tokoh-tokoh yang memegang kekuasaan formal dan informal di berbagai lapisan masyarakat.

Suatu hal yang ingin diungkapkan di sini-dari pandangan di atas-bahwa pendidikan merupakan elemen terdepan dalam menentukan kemajuan bangsa itu. Kemajuan peradaban suatu bangsa dalam konteks ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan agama, pada dasarnya, hanyalah *side-effects* dari keadaan pendidikan yang dikelola pada suatu negara itu. Sejarah kemajuan bangsa-bangsa didunia ternyata umumnya berawal perhatian terhadap perhatian serius terhadap pendidikan tidak hanya karena tuntutan masyarakat dalam konteks pengertian universal: pribadi, keluarga, komunitas, masyarakat, negara, dan global, tetapi juga lebih dari itu bangsa ini ditakdirkan sebagai bangsa muslim terbesar didunia, yang

penduduknya tidak kurang dari 85-90% beragama Islam dari total penduduknya pada tahun 2006 sekitar 224 juta jiwa.

Maju mundurnya bangsa besar mayoritas berpenduduk muslim ini sangat tergantung pada kualitas pendidikan nasional. Hadirnya UU Guru/dosen merupakan salah satu langkah maju dan positif dalam dunia pendidikan di tanah air yang diharapkan dapat berdampak positif pula terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional lebih baik di masa depan.

Profesi Guru/Dosen

Profesi, dapat diartikan: "suatu pernyataan atau janji yang terbuka (*to profess*-menyatakan, menjabat) bahwa seorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena merasa terpanggil" (Supeno, 1995:19)¹. Profesi juga merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan persyaratan tertentu. Frank Horton Blackington dan Robert S. Patterson, dalam bukunya *School Society and the Professional Educator*, terdapat sejumlah kriteria dalam menerapkan profesi:

Pertama, profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat dibutuhkan dan didasarkan pada persoalan yang mapan (berkedudukan yang baik) serta prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diterima masyarakat; *kedua*, profesi harus menuntut suatu latihan profesional yang memadai dan membudaya; *ketiga*, profesi menuntut suatu badan pengetahuan yang sistematis dan terspesialisasi; *keempat*, profesi harus memberikan keterangan tentang keterampilan yang dibutuhkan dimana masyarakat umum tidak memilikinya, yakni sebagai keterampilan sebagian murni dan sebagian lagi diperoleh; *kelima*, profesi harus sudah mengembangkan cara ilmiah yang merupakan hasil dari pengalaman yang teruji; *keenam*, profesi harus membutuhkan kelatihan kebijaksanaan dan keputusan mengenai waktu dan cara penampilan tugas; *ketujuh*, profesi harus merupakan tipe pekerjaan yang bermanfaat, dan yang merupakan hasil standarisasi dalam bentuk penampilan unit dan unsure waktu; *kedelapan*, profesi harus mempunyai kesadaran ikatan kelompok (*group/korp*) yang dibuat untuk memperluas iaktan ilmiah dalam bahasa yang lebih mudah; profesi harus mempunyai cukup kekuatan yang mendorong secara sistematis untuk membina anggotanya sepanjang hidup. Profesi harus tidak dijadikan batu loncatan menuju pekerjaan-pekerjaan lainnya; dan *kesembilan*;

profesi harus mengakui kewajiban-kewajibannya kepada masyarakat dengan meminta secara tegas bahwa anggota-anggotanya hidup dengan Kode Etik yang diterima dan dibangun (Supeno, 1995:20-21).

Hal ini tampak bahwa profesionalisme merupakan ide yang berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat modern, yang semakin kompleks. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, makin lama makin sulit, karena itu untuk mengambil keputusan yang tepat memerlukan informasi dan data yang memadai. Profesi, dalam hal ini, berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya karena fungsi sosialnya, yakni mengabdikan kepada masyarakat. Adanya kompetensi agar profesi tersebut dapat melaksanakan fungsinya; perlunya pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas; dan adanya cara atau alat untuk mengadakan verifikasi terhadap tuntutan pengetahuan khusus itu.

Profesi guru/dosen² dapat diartikan bahwa suatu profesi yang membutuhkan kualifikasi, kompetensi³ dalam tugas sebagai pendidik, dan memahami pertumbuhan dan perkembangan anak dalam mendukung proses pembelajaran diharapkan. Zakiyah Daradjat, dkk.(1996: 39), mengungkapkan bahwa guru/dosen merupakan pendidik profesional, karenanya secara implisit seorang guru telah merelakan dirinya menerima sebagian tanggungjawab pendidikan dari orang tua para anak didik.⁴ Para orang tua sangat mengharapkan amanah yang disampaikannya kepada sekolah/guru seoptimal mungkin dapat mengembangkan potensi, bakat, dan minat anak-anaknya. Untuk menjadi guru itu tidak semua orang dapat menjadi guru, karena profesi betul-betul membutuhkan profesionalisme dan mengedepankan kepentingan sosial dan keikhlasan. Seorang yang memilih profesi guru/dosen dalam pekerjaannya sedapat mungkin dapat mengembangkan beberapa kemampuan, antara lain: kemampuan pribadi; kemampuan sosial; dan kemampuan profesional.

Lalu, siapa Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) itu? Dikatakan oleh Muhairnin (2004: 213) bahwa dalam literatur kependidikan Islam, seorang guru disebut sebagai *ustadz*⁵, *mu'allim*⁶, *murabbiy*⁷, *mursyid*⁸, *mudarris*⁹, dan *mu'addib*¹⁰. Keberhasilan seorang guru GPAI terletak pada: kepribadiannya; penguasaan metode; frekuensi

dan intensitas aktivitas interaktif guru dan siswa; wawasan, penguasaan materi, dan penguasaan proses pembelajaran. Persyaratan menjadi guru GPAI tidak hanya memerlukan kecerdasan, terampil, pintar, kreatif, produktif dan profesional, tetapi juga perlu memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual (dengan berlatih terus menerus), serta keunggulan akhlak. Dari literatur kependidikan Islam di atas tampak bahwa guru GPAI dan dosen idealnya perlu memiliki karakteristik: (1) komitmen terhadap profesionalitas, yang melekat pada dirinya sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap *continuous improvement*; (2) menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoretis dan praktisnya, atau sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan internalisasi, serta *'amaliyah* (implementasi); (3) mendidik dan menyiapkan anak didik agar mampu berkreasi, serta mampu mengtur serta memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya; (4) mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri, atau menjadi pusat panutan atau teladan dan konsultan bagi peserta didiknya; (5) memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya; dan (6) bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan.

Berbagai persoalan berbangsa dengan beragam krisis sosial politik, ekonomi, hukum, budaya, konuk etnis, dan kemiskinan yang terjadi akhir-akhir ini, hanya dapat direduksi jika kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Beragam persoalan berbangsa tersebut pada prinsipnya bersumber dari rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dimiliki bangsa ini. Peranan pendidikan memiliki signiukansi yang tinggi terhadap perbaikan "nasib" dan kemajuan suatu bangsa tadi. Jepang, Singapura, dan Malaysia, misalnya, ternyata kemajuan bangsa itu berawal dari kebijakan pemerintah yang memihak pada pendidikan. Hampir tidak ada dalam sejarah bahwa kemajuan suatu bangsa tidak berawal dari kemajuan pendidikannya. Disinilah urgensi peningkatan kualitas guru/GPAI salah satu elemen pendidikan yang memiliki tanggung jawab paling besar terhadap kemajuan kualitas pendidikan dan tingginya rendahnya peradaban suatu bangsa.

Selama ini, beberapa permasalahan bertalian dengan profesi guru pada umumnya, antara lain: *pertama*, gaji guru yang sangat

rendah yang lebih rendah dari pekerjaan lain dengan tingkat pendidikan yang sama atau lebih rendah. Oleh sebab itu banyak guru/dosen mencari penghasilan sampingan yang pada akhirnya dapat mengganggu tugas pokoknya sebagai pendidik; *kedua*, kenaikan pangkat yang menjadi hak guru/dosen seringkali kurang lancar karena terhambat tembok birokrasi yang panjang. Bahkan tidak jarang seorang guru/dosen harus berulang kali memperbaiki usulan kenaikan pangkat yang menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya; *ketiga*, rasa aman dalam menjalankan tugas belum terjamin sepenuhnya karena berbagai perlakuan yang tidak adil terhadap guru yang dapat mengganggu konsentrasinya dalam menjalankan tugasnya; *keempat*, masih banyak keadaan lingkungan sekolah/kampus tampak buruk, kumuh, sempit, kumuh, genteng bocor, dan terkesan tak terurus, sehingga guru/dosen tidak betah dan tidak nyaman berada di sekolah/kampus; *kelima*, di era otonomi daerah terkadang guru/dosen menghadapi perlakuan berbeda dari pemerintah lokal karena belum menempatkan pencûdikan sebagai prioritas terdepan dalam proses kemajuan daerah/bangsa.

Meskipun begitu, beberapa daerah sudah memperhatikan nasib guru, misalnya DKI Jakarta memberi kesejahteraan kepada guru-guru, dan untuk guru madrasah mulai tahun 2006 dianggarkan sekitar 300% (Rp 400.000,-) setiap bulannya; *keenam*, prekuensi guru-guru madrasah (dibawah Depag) yang belum diangkat menjadi PNS sangat tinggi, yakni diperkirakan 10 % berstatus PNS dan 90% Non-PNS. Guru-guru di sekolah-sekolah (dibawah Depdiknas) frekuensinya sekitar 90% berstatus PNS dan 10% Non-PNS; dan *ketujuh*, banyak guru-guru/ GPAI belum memiliki kompetensi yang memadai dibidangnya sehingga terkesan kurang profesional, hal ini bertalian dengan kualitas proses pembelajaran/perkuliahahan dimana seorang guru/dosen memperoleh pendidikannya. Suatu hal yang patut dihargai bahwa dengan disyahkannya RUU menjadi UU Guru/Dosen) pada 6 Desember 2005, profesi guru/dosen agaknya akan menjadi pilihan bergengsi bagi para orang tua agar anak-anaknya dapat memilih profesi ini pada masa depan, karena profesi ini juga mulai memberikan prospek lebih baik, dimana setidaknya terdapat 17 item dalam UU Guru itu yang bertalian dengan kesejahteraan Guru. Hal ini, diharapkan profesionalisme guru/dosen semakin meningkat setelah dilindungi UU, karena profesi guru/dosen dimasukkan ke dalam kategori profesional.

Dalam UU Guru/Dosen itu, seorang guru juga harus memiliki persyaratan-persyaratan, yakni: kualifikasi akademik D-IV atau S1; kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), dan sertifikat pendidik (*Sumatera Ekspres, Sriwijaya Post, Republika, 7/12/2005*). Hal ini perlu disadari bahwa seorang yang ingin menjadi guru harus berlatar belakang kependidikan, misalnya FKIP dan Fakultas Tarbiyah dan STIT. Lembaga-lembaga ini ke depan diperkirakan akan menjadi pilihan penting bagi mereka yang memilih profesi guru. Disamping itu, seorang guru juga memiliki hak-hak bertalian dengan penghasilan, yakni: gaji pokok; tunjangan yang melekat pada gaji; tunjangan profesi (satu kali gaji pokok dari APBN/APBD); tunjangan fungsional (subsidi dari APBN/APBD); tunjangan khusus (satu kali gaji pokok, berhak atas rumah dinas-pada daerah pendidikan, beasiswa, penghargaan, pelayanan kesehatan, kemudahan bagi putera-puteri guru, dan, kesejahteraan lain). Selain itu, terdapat pula hak lain guru di daerah khusus, yakni: kenaikan pangkat rutin otomatis, naik pangkat istimewa satu kali, dan perlindungan khusus).

Hal ini menuntut para penyelenggara pendidikan (pemerintah dan PT) dapat mengemban tugasnya dengan optimal, terutama bertalian dengan pelayanan pendidikan atau proses perkuliahan yang optimal dan mumpuni. Para guru juga perlu memiliki sikap dan mental yang mulai mementingkan kualitas pengetahuan dimiliki ketimbang hanya sekedar memperoleh gelar (stratifikasi) menurut UU itu. Dengan demikian secara normatif, bahwa profesi guru ini agaknya mulai menjadi perhatian pihak pemerintah. Jika UU Guru/Dosen itu dapat dilaksanakan dengan baik, kualitas pendidikan nasional diharapkan lebih baik. Pada akhirnya, pada kemudian hari pendidikan nasional diharapkan dapat mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan dari negara tetangga (Singapura, Malaysia, Brunai Darussalam). Sejalan dengan kehadiran UU itu, peranan institusi PT yang memproduksi guru-guru, seperti Fakultas Tarbiyah, FKIP dan STIT memiliki andil dan tanggung jawab terdepan dalam menciptakan calon-calon guru GPAI yang handal.

PTAI & Dilema BHP

Perguruan Tinggi (PT) dan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) memiliki andil signifikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang menentukan maju dan mundurnya bangsa ini. Nasib PT, PTAI di selama ini masih jauh dari harapan. Kebijakan pemerintah tentang swastanisasi perguruan tinggi negeri (PTN) justru menimbulkan protes keras dari mahasiswa perguruan tinggi itu. Akan tetapi, pemerintah agaknya akan menerapkan kebijakan swastanisasi itu, melalui Badan Hukum Pendidikan (BHP), dimana nantinya perguruan tinggi lebih ditekankan menjadi mandiri (swasta).

Proses aplikasi BHP ini agaknya tidak selalu mulus bagi sejumlah PT dan sering kali justru menjadi sasaran protes mahasiswa karena menjadi BHP identik dengan mahalnya biaya pendidikan. Pihak mahasiswa memiliki argumen yang logis bahwa banyak orang tua/masyarakat kini masih sulit membayar SPP karena keadaan sosial dan ekonomi orang tua mereka yang buruk. Pihak PT juga memiliki argumen yang logis bahwa sangat sulit melaksanakan proses pembelajaran/ perkuliahan ketika anggaran operasional dimiliki PT sangat minimal. Anggaran operasional yang minimal ini akan menyulitkan mahasiswa untuk memperoleh pembelajaran yang layak dan justru akhirnya hanya akan menghasilkan SDM (sarjana) kurang berkualitas.

Dalam kenyataannya, bagi sebagian besar masyarakat memasuki PT masih terlalu elit karena mahalnya biaya masuk PT. Apalagi sejak memasuki era reformasi tahun 1998, dimana bangsa ini mengalami krisis yang multidimensional dimana hingga kini masih dirasakan. Reformasi agaknya selalu berdampak positif dan negatifnya. Di bidang sosial-ekonomi, banyak orang tua mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sejumlah perusahaan dan peluang lapangan kerja baru tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini akan menciptakan meningkatnya pengangguran, termasuk pengangguran terdidik (intelektual) lulusan PT. Hal ini pula hanya akan menyulitkan sebagian orang tua untuk mengirim anak-anaknya ke jenjang PT. Beban masyarakat sernakin bertambah pula ketika adanya kebijakan pemerintah tentang naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak buruk terhadap naiknya harga sejumlah barang kebutuhan primer dan sekunder.

Kesulitan dan kesusahan masyarakat ini sering kali tersalurkan melalui suara mahasiswa. Kasus unjuk rasa mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan PT yang menerapkan pola swastanisasi, terutama PT di Jawa, misalnya UGM, UI, ITB, dan IPB, merupakan respons positif mahasiswa terhadap realitas aspirasi masyarakat umumnya. Aksi protes mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang (2005) pada tahun lalu atas kenaikan SPP mahasiswa baru merupakan bentuk kepedulian masalah sosial dan ekonomi masyarakat yang buruk. Sama halnya, aksi protes mahasiswa UNSRI (2006) atas rencana kenaikan SPP mahasiswa baru pada prinsipnya perlu dilihat sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Kendatipun begitu, agaknya tidak ada yang salah dengan kebijakan PT untuk menaikkan SPP mahasiswa baru itu. Karena PT umumnya berargumen bahwa untuk menciptakan proses perkuliahan lebih baik dan berkualitas dibutuhkan anggaran operasional yang layak dan mumpuni. Tidaklah mungkin SDM berkualitas dapat dihasilkan jika proses perkuliahannya terhambat karena keterbatasan anggaran itu dimana fasilitas tampak buruk, mahasiswa sulit praktek, buku-buku terbatas, dan lain-lain.

Anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN belumlah memadai untuk membiayai sejumlah perguruan tinggi negeri. Memang anggaran sektor pendidikan tahun 2006 mencapai 20% akan tetapi agaknya dalam kenyataannya tidak banyak perubahan terhadap kinerja dan kualitas PT ke depan. Dari 600 triliun rupiah anggaran sektor pendidikan untuk tahun 2006 itu, diperkirakan 20% (120 triliun) untuk anggaran semua PTN. Jumlah mahasiswa PTN diperkirakan 4 juta orang dengan subsidi dana pemerintah itu berkisar 6 juta rupiah. Bandingkan subsidi pemerintah Malaysia yang berjumlah 114 juta rupiah pedan Singapura berjumlah 200-an juta rupiah " permahasiswa (Media Indonesia, 4 April 2006). Hal ini menunjukkan bahwa sesarna negara Asia, terdapat perbedaan signiûkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan PT. Pemerintah terlalu lemah perhatiannya terhadap nasib PT. Belajar dari negara-negara maju dan masih negara jiran itu, agaknya rnemang kita perlu mengevaluasi kebijakan terhadap PT. Anggaran yang belum wajar berdampak buruk terhadap kondisi sarana-prasarana perkuliahan, kesejahteraan dosen dan pegawai, proses perkuliahan asal jalan, dan lulusan (out put) yang kurang berkualitas.

Perhatian yang rendah itu terlihat juga pada belum jelasnya arah kebijakan terhadap PTAI. Sudah banyak hasil penelitian dan tulisan artikel sejak belasan tahun terakhir bahwa masalah PTAI sangat terletak pada banyak hal, terutama bertalian dengan kejelasan arah pembinaan kelembagaan. Departemen Agama RI C.q Dirjen Kelembagaan Agama Islam (Bagais) hanya melaksanakan kebijakan pembinaan kelembagaan yang cenderung parsial. Sebagai contoh, belum ada kebijakan yang jelas mengenai bagaimana sesungguhnya arah pembinaan dan pengembangan PTAI ke depan. Apakah usulan sejumlah IAIN menjadi UIN perlu mendapat perhatian serius? Sudah banyak IAIN yang mengusulkan menjadi UIN tetapi belum direspon dengan baik, bahkan beberapa IAIN sebelumnya sudah mendapat persetujuan Menteri Agama yang lalu, tetapi ketika terjadi pergantian menteri Idni terkesan aspirasi sejumlah IAIN itu diabaikan? Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya kebijakan Departemen Agama belum memiliki manajemen pembinaan PTAI di tanah air sebagaimana diharapkan.

Suatu contoh lain, suatu kebijakan Departemen Agama pada 2006 yang memang patut diapresiasi adalah pengiriman guru-guru madrasah untuk melanjutkan studi program master dalam berbagai bidang studi ke berbagai PTU, seperti UI, UGM, UPI, Unair, dan UIN. Tetapi, di sisi lain, untuk pembinaan SDM pada sejumlah PTAI dan PTAIS justeru belum optimal dan memadai. Hal ini merupakan suatu kebijakan parsial karena permasalahan Pendidikan Islam (PI) belum dilihat secara substantif, proporsional, dan prioritas atas kebutuhan sesungguhnya.

Karena itu, pihak pemerintah—Departemen Agama—seharusnya justeru lebih pro-aktif dalam upaya memberdayakan PT/PTAI dengan mernperbanyak subsidi atau kebijakan percepatan peningkatan kualitas (*affirmative policy*). Apa yang dilakukan pemerintah Jepang sejak 1945 dan pemerintah Malaysia sejak 1970, adalah memberikan perhatian penuh terhadap PT. Tidak mengherankan jika kini banyak putera-puteri Indonesia belajar di negara jiran (Malaysia) itu dimana sebelumnya mereka banyak belajar ke Indonesia. Ketika negara tidak member subsidi terhadap PT agaknya jangan terlalu banyak berharap bila PT dapat menghasilkan SDM yang berkualitas.

Desentralisasi pendidikan dalam bentuk Otonomi Daerah belum terlalu banyak diharapkan. Mengingat, para pemimpin (para

gubernur, bupati, walikota) di daerah umumnya belum memiliki perhatian serius terhadap kemajuan PT. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran yang disediakan pemerintah daerah untuk PT di lingkungan Wilayah kekuasaannya masih belum sepadan dengan kebutuhan riil PT itu. Mungkin, hal ini terjadi karena ketergantungan masih banyak pemimpin di daerah teragntung kebijakan terhadap pusat (Jakarta). Di Provinsi Sumatera Selatan, baru Kabupaten Muba yang menggratiskan biaya pendidikan untuk jenjang SLTA. Kebijakan pendidikan sekolah gratis ini masih jarang terjadi di daerah lain, dan Kabupaten Muba (Sumatera Selatan) mungkin salah satu SLTA gratis yang masih jarang diterapkan di Indonesia.

Perhatian pemerintah yang belum serius terhadap sektor pendidikan ini tentu menggelisahkan masyarakat PT, terutama kalangan mahasiswa. Aspirasi mahasiswa terhadap kebijakan kenaikan SPP di berbagai PT misalnya merupakan bentuk keprihatinan yang berdasarkan realitas masyarakat itu. Karena itu, kebijakan beberapa PT untuk menaikkan SPP merupakan suatu keputusan sulit dan harus dilakukan demi berjalannya proses perkuliahan di PT itu. Kenaikan SPP agaknya memang bukan solusi substantif, mengingat kendatipun SPP dinaikkan, hal itu hanyalah bersifat strategi bertahan (mobilizing) agar proses perkuliahan berjalan lancar dan normal tadi, tetapi belum berorientasi kepada kualitas. Apalagi, untuk perguruan tinggi swasta (PTS), proses perkuliahan masih banyak yang asal jalan dan karena keterbatasan dana operasional. Dampaknya PT di tanah air banyak yang hanya memproduksi sejumlah sarjana tetapi kering dengan ilmu pengetahuan dibidangnya.

Karena itu, ada korelasi positif antara peran negara dengan kualitas PT. Di negara negara maju, PTS pun mendapat subsidi, terutama dari perusahaan-perusahaan terkernuka. Jadi, subsidi tidak dapat ditinggalkan begitu saja jika suatu perguruan tinggi ingin maju. Memang selama ini PTS di tanah air banyak yang recap eksis sekalipun tanpa subsidi pernerintah, tetapi, agaknya lebih banyak pula PTS yang tidak berkualitas. Seburuk-buruk PTN, akan memiliki nilai lebih dibandingkan PTS karena proses perkuliahannya lebih baik sebagai efek dari mendapat subsidi anggaran dari pemerintah.

Suatu hal yang riskan jika perhatian dan tanggung jawab negara/ Pemerintah dikurangi dengan mengurangi subsidi atau dihilangkan

sama sekali, terutama melalui kebijakan BHP. Hal ini, setidaknya, disebabkan dua hal. *Pertama*, dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 pada intinya dapat dikatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak memperoleh pendidikan yang layak. Amanat UUD itu mengisyaratkan bahwa negara harus berupaya memberi kesempatan kepada warganya agar dapat memperoleh pendidikan (PT) yang layak. Pendidikan yang layak dan berkualitas merupakan harapan dan amanat masyarakat. Perhatian terhadap PT adalah juga amanat yang harus dilaksanakan demi pendidikan yang layak bagi masyarakat. Karena itu, dari pola pandangan demikian agaknya kebijakan BHP sesungguhnya perlu dievaluasi karena kontradiksi dengan makna dan semangat UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 itu. *Kedua*, realitas sosial dan ekonomi masyarakat saat ini sangat belum memungkinkan untuk menerapkan BHP. Adalah sangat sulit untuk memperoleh dana segar dari masyarakat (orang tua) melalui iuran SPP, bila dimaksudkan untuk membiayai operasional agar menjadi PT yang berkualitas. Jika kebijakan BHP terus diterapkan maka akan banyak anak-anak usia muda tidak dapat melanjutkan ke jenjang PT karena tidak mampu membiayainya.

Agak sulit membayangkan, ketika di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sedang sulit kebijakan BHP diterapkan. Pemerintah merupakan satu-satunya harapan agar mengambil peranan strategis dalam upaya membantu kesulitan masyarakat terhadap pembangunan PT/PTAI. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya perlu meningkatkan jumlah subsidi kepada sejumlah PT/PTAI demi mempersiapkan SDM berkualitas di era global. Bukan justru menghilangkan subsidi itu. Pengelolaan PT/PTAI, dalam hal ini, harus dilihat dan diberlakukan sebagai upaya investasi manusia (*human investment*) dan bukan investasi modal (*capital investment*) yang sarat dengan perhitungan untung-rugi.

Kita juga tidak menaûkan sejumlah usaha telah dilakukan Pemerintah/Departemen Agama dalam memajukan PTAI dalam sejumlah kebijakan dilakukannya, tetapi sejumlah kalangan memandang masih perlu optimalisasi arah pembinaan dan pengembangan PTAI yang jelas dalam tataran operasional. Makna jelas ini setiap aral, tujuan, dan operasionalisasi pembinaan dan pengembangan itu berpijak dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat muslim di negeri ini.

Keberadaan FKIP/Fakultas Tarbiyah pada PTAI memiliki andil terdepan dalam menciptakan calon guru yang berkompeten dan profesional. Oleh sebab itu, lembaga ini harus dikelola dengan baik dengan menggunakan manajemen PT yang lebih modern sebagai respons terhadap UU Guru/Dosen. Hadirnya UU No. 14/2005 itu sendiri sebenarnya menuntut kinerja PT/PTAI menjadi lebih baik dalam menciptakan calon-calon guru/GPAI yang kompeten dan profesional. Jika hal ini menjadi perhatian dan kenyataan, tidak mustahil profesi guru/GPAI ke depan akan menjadi salah satu profesi pekerjaan profesional yang memiliki prospek lebih baik, menjadi pilihan para orang tua dalam memilih karier anak-anaknya, karena profesi ini akan memberikan jaminan kesejahteraan lebih baik.

UU ini juga mengedepankan pentingnya peningkatan pelayanan terhadap PT/PTAI. Maju-mundurnya PT/PTAI tergantung pada sejauhmana peranan pemerintah dalam mencari solusi terhadap beragam masalah nyata pada PT/PTAI itu. Jika peranan ini diserahkan ke masyarakat, seperti arah kebijakan BHP, agaknya hal itu masih terlalu dini bagi masyarakat kita. Dalam satu hal, arah kebijakan BHP cenderung kontradiksi dengan kenyataan kondisi factual keadaan PT/PTAI di tanah air, dimana banyak PT/PTAI yang membutuhkan perhatian penting dari berbagai pihak, terutama dari pihak pemerintah yang diberi amanat terdepan dalam UUD 1945 untuk membangun pendidikan di bumi pertiwi ini.

¹ Dalam bahasa Inggris, jabatan disebut vocation (dari kata vox, yang berarti suara atau panggilan), dalam bahasa Belanda disebut beroep (kata dasar roep yang berarti panggilan). Lihat: (Hadi Supeno, Potret Guru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 19).

² Profesionalisme dibidang pendidikan mendapat pengakuan Karena alasan: (1) lapangan pekerjaan keguruan atau kependidikan bukan merupakan suatu lapangan kerja rutin yang dapat dilakukan Karena pengulangan-pengulangan atau pembiasaan. Lapangan pekerjaan inipun tidak dapat difaksanakan berdasarkan amatisme dan coba-coba (*trial and errors*), tetapi memerlukan perencanaan, manajemen yang mempertimbangkan komponen-komponen sistemnya (input, proses, output, pemakai); (2) lapangan pekerjaan ini memerlukan dukungan ilmu atau teori yang akan memberi konsepsi teoritis ilmu kependidikan dengan cabang-cabangnya; dan (3) lapangan pekerjaan ini memerlukan waktu pendidikan dan latihan yang lama, berupa pendidikan dasar (*basic education*) untuk taraf sarkana yang memiliki suatu pengetahuan atau ketrampilan tertentu Kadangkala memerlukan tambahan pendidikan professional.

³ Istilah kompetensi setidaknya perlu merujuk pada dua persoalan pokok: (1) indikasi kemampuan berupa perbuatan yang dapat diamati; (2) suatu konsep yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta tahap-tahap pelaksanaannya dengan utuh.

⁴ Di negara-negara Timur, sejak dahulu kala para gum itu dihormati masyarakat. Orang India dahulu, menganggap guru itu "orang suci dan sakti". Di Jepang, guru disebut sensei, artinya "yang lebih dahulu lahir", "yang lebih tua". Di Inggris, guru dikatakan teacher

dan di Jerman dikatakan der Lehler, keduanya berarti pengajar. Akan tetapi, kata guru sebenarnya bukan hanya diartikan "pengajar" tetapi juga "pendidik", baik di sekolah maupun di luar sekolah/masyarakat.

Sejumlah istilah di atas dikutip dari: (Zakiah Daradjat, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, Jakarta, 1996, hlm. 39).

3. Kata *ustadz* biasa digunakan untuk memanggil seorang *profesor*, yang bermakna bahwa seorang guru dituntut untuk komilmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Seorang dikatakan *professional*, bila pada dirinya terdapat sikap *dedikatif* yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap senantiasa memperbaharui cara cara kerja sesuai dengan tuntutan zaman dalam mempersiapkan generasi muda yang akan hidup pada zamannya nanti.
6. Kata *mu'allim* berasal dan kata dasar *'ilm* yang berarti yang berarti menangkap hakekat sesuatu. Dalam setiap *'ilm* temandung dimensi teoretis dan dimensi *amaliah*, yang bermakna bahwa seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan hakekat ilmu pengelahuan yang diajarkannya, serta menjelaskan dimensi teoretis dan praktisnya, dan berusaha membangkitkan siswa untuk mengamalkannya.
7. Kata *murabby* berasal dan kala dasar *Rabb*. Tuhan adalah sebagai *Rabb al-'alamin* dan *Rab al-nas*, yakni yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam seisinya termasuk manusia. Manusia sebagai khalifahNya diberi tugas untuk menumbuh kembangkan kreativitasnya agar mampu mengkreasi, mengatur dan memelihara alam sekitarnya. Maka, tugas guru adalah mendidik dan menyiapkan pesera didik agar mampu berkreasi, sekaligus mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak meinmbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya.
8. Kata *mursyid* biasa digunakan untuk guru dalam *Thariqah (Tasawuf)*. Seorang guru (*mursyid*) berusaha menularkan penghayatan (*transinlemalisasi*) akhlak dan kepribadiannya kepada peserta didiknya, baik yang berupa elos ibadahnya, etos kerjanya, etos belajarnya, maupun dedikasinya yang serba *Lillahi Ta'ala* (mengharapkan ridla Allah semata).
9. Kata *mudarris* berasal dari akar kata *darasa-yadrusu-darsan wa dumsan wa dirasatan*, yang berarti terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih, dan mempelajari. Dalam hal ini, seorang guru dituntut untuk memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, agar tetap *up to date* dan tidak cepat usang.
10. Kata *mu'addib* berasal dan kata *adab*, yang berarti moral, etika, dan adab atau kemajuan kecerdasan, kebudayaan lahir dan batin. Kata *peradaban* (Indonesia) juga berasal dari kata dasar *adab*, karena itu guru adalah orang yang beradab sekaligus memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban (*civilization*) yang berkualitas di masa depan. Sejumlah kutipan istilah di atas dikutip dan': (Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Pusat Studi Agama, Publik dan Masyarakat (PSAPM) Surabaya, 2004, hlm. 213).

PTAI:

Antara Mandiri dan Subsidi¹⁰⁰

Wacana pendidikan gratis di tanah air, di Sumatera Selatan khususnya, menjadi menarik ketika dihubungkan dengan proses Pemilukada di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini. Terlepas

¹⁰⁰Tulisan penulis berjudul: 'Dilema Pembiayaan Pendidikan di PTAI: Antara Kemandirian dan Subsidi Pemerintah', pernah dimuat dalam buku: *Pendidikan Tinggi Islam Dalam Sorotan*, diterbitkan Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, 2007.

dari adanya kepentingan politik dari para kandidat/calon (gubernur, bupati, walikota) yang akan berkompetisi pada pesta demokrasi tersebut, faktanya, sebagian masyarakat pada umumnya memang sangat membutuhkan adanya pendidikan gratis, tetapi tentu saja yang berkualitas.

Di sisi lain, sebagian besar masyarakat juga mengalami kesulitan dan keterbatasan kemampuan ekonomi untuk mengirimkan anaknya ke institusi pendidikan bermutu, baik jenjang pendidikan rendah, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Wacana pendidikan gratis yang sedang marak akhir-akhir ini ternyata ditanggapi secara positif bagi sebagian besar masyarakat. Mungkinkah pendidikan gratis dapat diwujudkan di bumi pertiwi ini? Wacana pendidikan gratis menjadi menarik ketika dihubungkan dengan persoalan pembiayaan pendidikan di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Indonesia, baik negeri (PTAIN) maupun swasta (PTAIS). Sebagaimana dimaklumi bahwa biaya pendidikan di PTAIN (STAIN, IAIN, UIN) di Indonesia sepenuhnya disubsidi oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama Republik Indonesia. Sedangkan PTAIS sebagian besar dibiayai oleh masyarakat secara mandiri. Dengan kata lain PTAIS jauh lebih mandiri ketimbang PTAIN. Pertanyaannya mungkinkah PTAIN didorong pula untuk mandiri sebagaimana sebagian universitas negeri di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang menerapkan kebijakan swastanisasi Badan Hukum Pendidikan (BHP)?

Tulisan ini memfokuskan analisis tentang dilemma pembiayaan pendidikan PTAI. Apakah harus tetap disubsidi oleh pemerintah ataukah berpeluang untuk menjadi mandiri? Pada bagian lain tulisan ini juga akan menyinggung tentang urgensi pendidikan gratis sebagai upaya pemberdayaan pendidikan nasional.

Dilema Pendidikan Tinggi: BHP

Perguruan Tinggi Umum (PTU) dan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) memiliki andil signifikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang menentukan maju dan mundurnya bangsa ini. Nasib PTU/PTAI di selama ini masih jauh dari harapan. Kebijakan pemerintah tentang swastanisasi perguruan tinggi negeri (PTN) justru menimbulkan protes keras dari mahasiswa perguruan tinggi itu. Akan tetapi pemerintah agaknya akan menerapkan kebijakan swastanisasi itu, melalui Badan Hukum

Pendidikan (BHP), ke depan nantinya perguruan tinggi ditekankan menjadi mandiri (swasta).

Proses aplikasi BHP agaknya tidak selalu rnulus bagi dan sering kali justru menjadi sasaran protes mahasiswa karena menjadi BHP identik dengan mahalny biaya pendidikan. Pihak mahasiswa memiliki argument yang logis bahwa banyak orang tua/masyarakat kini masih sulit membayar SPP karena keadaan sosial dan ekonorni orang tua mereka yang buruk. Pihak PT juga rnemiliki argument yang logis bahwa sangat sulit untuk melaksanakan proses Pembelajaran/perkuliahan ketika anggaran operasional dimiliki PT sangat minimal. Anggaran operasional yang minimal ini akan menyulitkan mahasiswa untuk memperoleh pembelajaran yang layak justru akhirnya hanya akan menghasilkan SDM (sarjana) kurang berkualitas.

Dalam kenyataannya, bagi sebagian masyarakat memasuki PT masih terlalu elit karena mahalny biaya rmasuk PT. Apabila sejak memasuki era reformasi tahun 1998, dimana bangsa ini mengalami krisis multidimensional dimana hingga kini masih dirasakan. Reformasi agaknya selalu berdampak positif dan negatifnya. Di bidang sosial-ekonomi, banyaknya orang tua mengalarni pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sejumlah perusahaan dan peluang lapangan kerja baru tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini akan menciptakan meningkatnya pengangguran, termasuk pengangguran terdidik (intelektual) lulusan PT. hal ini pula akan, menyulitkan sebagian orang tua untuk mengirimkan anak-anaknya ke jenjang PT. Beban rnasyarakat semakin bertambah pula ketika adanya kebijakan pemerintah tentang, naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak buruk terhadap naiknya harga sejumlah barang kebutuhan primer dan sekunder.

Kesulitan dan kesusahan masyarakat sering kali tersalurkan melalui suara mahasiswa. Kasus unjuk rasa mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan PT yang menerapkan swastanisasi, terutama PT di Jawa, misalnya UGM, UI, ITB, dan IPB, merupakan respon balik mahasiswa terhadap keinginan lebih besarnya peran pemerintah dalam mengalokasikan dana bagi PT. Aksi protes mahasiswa IAN Raden Fatah Palembang tiga tahun lalu (2005) atas kenaikan SPP mahasiswa baru merupakan bentuk tuntutan yang sama, yakni indikasi ketidak berdayaan sosial-ekonomi orang tua. Sama halnya, aksi protes mahasiswa UNSRI (2006) atas kenaikan SPP mahasiswa

Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial
baru dapat sebagai bentuk keprihatinan terhadap buruknya kondisi sosial-ekonomi orang tua. Kendatipun begitu, agaknya tidak ada pihak yang patut dipersalahkan atas kebijakan PT/PTAI untuk menaikkan SPP mahasiswa baru itu. Karena PT pada umumnya berargumen bahwa untuk menciptakan proses perkuliahan yang bermutu dibutuhkan tambahan anggaran operasional. (Abdullah 2006, hlm. 133-148). Tidaklah mungkin SDM berkualitas dapat dihasilkan jika proses perkuliahannya terhambat karena keterbatasan anggaran itu, dimana fasilitas tampak buruk, gaji dosen memprihatinkan, mahasiswa sulit praktek, buku-buku terbatas, dan lain-lain.

Anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN belumlah memadai untuk membiayai sejumlah PTN. Anggaran pendidikan tahun 2006 mencapai 20% akan tetapi agaknya dalam kenyataan tidak banyak perubahan terhadap kinerja dan kualitas PT ke depan. Dari 600 triliun rupiah anggara sektor pendidikan untuk tahun 2006 itu, diperkirakan 20% (120 triliun rupiah) untuk anggaran semua PTN. Jumlah mahasiswa PTN diperkirakan 4 juta orang dengan subsidi dana pemerintah itu berkisar 6 juta rupiah. Bandingkan dengan subsidi pemerintah Malaysia yang berjumlah 114 juta rupiah permahasiswa. (*Media Indonesia*, 4/4/2006). Anggaran pendidikan nasional 2007 dan 2008 tidak jauh berbeda., yakni hanya sekitar 10-11% dari yang seharusnya 20% menurut UU. Hal ini menunjukkan bahwa sesama negara Asia, terdapat perbedaan signifikan perhatian pemerintah terhadap pembangunan PT. Pemerintah terlalu lemah perhatiannya terhadap nasib PT. Anggaran yang belum wajar berdampak buruk hadap kondisi sarana-prasarana perkuliahan, kesejahteraan dosen pegawai, proses perkuliahan asal jalan, dan lulusan (*out put*) yang kurang berkualitas.

Sementara itu, perhatian pemerintah (Departemen Agama) yang lemah itu terlihat juga pada belum jelasnya arah kebijakan terhadap PTAI. Sudah banyak hasil penelitian dan penulisan artikel sejak belasan tahun terakhir bahwa masalah PTAI sangat terletak pada banyak hal, terutama bertalian dengan kejelasan arah pembinaan kelembagaan. Departemen Agama RI C.q Dirjen Kelembagaan Agama Islam (Bagais) hanya melaksanakan kebijakan pembinaan kelembagaan yang cenderung parsial. Sebagai contoh, belum ada kebijakan yang jelas mengenai bagaimana sesungguhnya arah pembinaan dengan pengembangan PTAI ke depan. Apakah usulan sejumlah IAIN menjadi UIN perlu mendapat perhatian serius? Sudah

banyak IAIN yang mengusulkan menjadi tetapi belum direspon baik, bahkan beberapa IAIN sebelumnya sudah mendapat Persetujuan Menteri Agama yang lalu, tetapi ketika terjadi perganti menteri kini terkesan aspirasi sejumlah IAIN itu diabaikan? Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Departemen Agama belum memiliki manajemen pembinaan PTAI seperti diharapkan.

Suatu contoh salah satu kebijakan Departemen Agama pada tahun 2006 yang memang patut diapresiasi adalah pengiriman guru-guru madrasah untuk melanjutkan studi program master dalam berbagai bidang studi ke berbagai PTU, seperti UI, UGM, UPI, Unair, dan UIN. Tetapi, disisi lain, untuk pembinaan sumber daya manusia pada sejumlah PTAI dan PTAIS. Justru belum optimal dan memadai. Hal ini merupakan suatu kebijakan parsial karena permasalahan pendidikan Islam belum dilihat substantif dan komprehensif, proporsional, dan prioritas kebutuhan berdasarkan institusi sesungguhnya.

Karena itu, pihak pemerintah Departemen Agama diharapkan proaktif dalam upaya memperdayakan PT/PTAI dengan memperbanyak subsidi atau kebijakan percepatan peningkatan kualitas (*affirmative policy*). Apa yang dilakukan pemerintah Jepang sejak 1945 dan pemerintah Malaysia 1970, adalah memberikan perhatian penuh terhadap PT. Tidak mengherankan jika kini banyak putra-putri Indonesia belajar di negara jiran (Malaysia) itu di mana sebelumnya mereka banyak belajar ke Indonesia. Ketika negara tidak memberi subsidi terhadap PT agaknya jangan terlalu banyak berharap bila PT dapat menghasilkan SDM yang berkualitas.

Desentralisasi pendidikan dalam bentuk Otonomi Daerah belum terlalu banyak diharapkan. Para pemimpin (para gubernur; bupati, walikota) di daerah umumnya belum memiliki perhatian serius terhadap kemajuan PT. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran yang disediakan pemerintah daerah untuk PT di lingkungan wilayah kekuasaannya masih belum sepadan dengan kebutuhan riil PT itu. Mungkin, hal ini terjadi karena ketergantungan masih banyak pemimpin di daerah tergantung kebijakan terhadap pusat (Jakarta). Di provinsi Sumatera Selatan, baru kabupaten Muba yang menggratiskan biaya pendidikan untuk jenjang SLTA. Kebijakan pemerintah tentang sekolah gratis ini masih jarang terjadi tanah air.

Perhatian pemerintah yang belum serius terhadap sektor pendidikan (PT) dapat menggelisahkan masyarakat PT, terutama kalangan mahasiswa. Aspirasi mahasiswa terhadap kebijakan kenaikan SPP di berbagai PT misalnya merupakan bentuk keprihatinan yang berdasarkan realitas masyarakat itu. Karena itu, kebijakan beberapa PT untuk menaikkan SPP merupakan suatu keputusan sulit dan harus dilakukan demi berjalannya proses perkuliahan di PT itu. Kenaikan SPP agaknya memang bukan solusi substantive, mengingat kendatipun SPP dinaikkan, hal itu hanya bersifat strategis bertahan (*mobilizing*) agar proses perkuliahan berjalan dan normal tadi, tetapi belum berorientasi pada kualitas. Apabila, untuk perguruan tinggi swasta (PTS), proses perkuliahan masih banyak yang asal jalan karena keterbatasan dana operasional, maka dampaknya PT di tanah air banyak yang hanya memproduksi sejumlah sarjana tetapi kering dengan ilmu pengetahuan di bidangnya.

Karena itu, korelasi positif antara peran negara dengan kualitas PT/PTAI. Di negara-negara maju, PTS pun mendapat subsidi, terutama dari perusahaan-perusahaan terkemuka, Jadi, subsidi tidak dapat ditinggalkan begitu saja jika suatu perguruan tinggi ingin maju. Memang selama ini PTS di tanah air banyak yang tetap eksis sekalipun tanpa subsidi pemerintah. Tetapi, agaknya lebih banyak pula PS yang tidak berkualitas. Seburuk-buruk PTN, akan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan PTS karena proses perkuliahaannya lebih baik sebagai efek dari mendapat subsidi anggaran dari pemerintah,

Suatu hal yang riskan jika perhatian dan tanggung jawab negara/pemerintah di kurangi dengan mengurangi subsidi atau dihilangkan sama sekali, terutama melalui kebijakan BHP. Hal ini, setidaknya disebabkan dua hal. *Pertama*, dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 pada intinya dapat dikatakan bahwa setiap warga Negara memiliki hak memperoleh pendidikan yang layak. Amanat UUD itu mengisyaratkan bahwa Negara harus berupaya memberi kesempatan kepada warganya agar dapat memperoleh pendidikan (PT) yang layak. Pendidikan yang layak dan berkualitas merupakan harapan dan amanat masyarakat. Perhatian terhadap PT adalah juga amanat yang harus dilaksanakan demi pendidikan yang layak bagi masyarakat. Karena itu, dari pola pandang demikian agaknya kebijakan BHP sesungguhnya perlu di evaluasi karena kontra diksi dengan makna dan semangat UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 itu. *Kedua*, realitas sosial dan ekonomi masyarakat saat ini sangat belum memungkinkan

untuk menerapkan BHP. Adalah sangat sulit untuk memperoleh dana segar dari masyarakat (orang tua) melalui iuran spp, bila dimasukkan untuk membiayai operasional agar menjadi PT yang berkualitas. Jika kebijakan BHP terus diterapkan maka akan banyak anak-anak usia muda tidak dapat melanjutkan ke jenjang PT karena tidak mampu membiayainya.

Agaknya sulit membayangkan, ketika ditengah kondisi sosial ekonomi masyarakat kita yang sedang sulit, lalu kebijakan BHP diterapkan. Pemerintah merupakan satu-satunya harapan agar mengambil peranan strategis dalam upaya membantu kesulitan masyarakat terhadap pembangunan PT/PTAI. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya perlu meningkatkan jumlah subsidi kepada sejumlah PT/PTAI demi mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas di era global. Bukan justeru menghilangkan subsidi itu. Pengelolaan PT/PTAI, dalam hal ini, harus dilihat dan diberlakukan sebagai upaya investasi manusia (*human investment*) dan bukan investasi modal (*capital investment*) yang sarat dengan perhitungan untung rugi.

Kita juga tidak menafikan sejumlah usaha telah dilakukan pemerintah/Departemen Agama dalam memajukan PTAI dalam sejumlah kebijakan dilakukannya, tetapi sejumlah kalangan memandang masih perlu adanya ketajaman visi, misi, tujuan dan optimalisasi arah pembinaan dan pengembangan PTAI yang jelas dalam tataran operasional. Makna jelas di sini berarti bahwa setiap arah, tujuan, kebijakan dari operasional pembinaan dan pengembangan itu berpijak dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat muslim di negeri ini.

Kongres Porto-Brasil 2003

Empat tahun lalu, tepatnya pada 7-13 Jun 2003, telah dilaksanakan Kongres Guru se-Dunia di Porto, Alegre, Brazil. Seperti diungkapkan Lijan Poltak Sinambela, dkk. (Sinambela, dkk. hlm. 109) bahwa Kongres guru ini telah menghasilkan berbagai rumusan yang, sangat bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan di dunia, kemajuan global hanya dapat dicapai melalui pendidikan yang efektif, bermutu dan merata. Kongres menyampaikan resolusi pertama dalam kaitan dengan dikotomi antara pendidikan dengan pelayanan publik dan komoditas, menolak kecenderungan privatisasi pendidikan sebagai komoditas-bisnis, dan mendesak agar semua

negara agar pendidikan dijadikan sebagai pelayan public (*public service*) yang merupakan hak asasi manusia dan harus bebas dari segala pungutan biaya terutama untuk pendidikan dasar.

Hak asasi manusia (HAM) dan pendidikan, sebagaimana di bicarakan dalam kongres tersebut, telah memposisikan administrasi pendidikan sebagai suatu hal yang sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, semua negara didesak agar dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan sarana-prasarana yang memadai sehingga guru dapat melaksanakan tugas pembelajaran secara efisien, efektif, kondusif dan berkualitas. Bagi negara-negara berkembang (*developing countries*), seperti Indonesia, dukungan global tersebut sangat diperlukan sebagai pendidikan nasional yang, lebih bermutu. Mutu sesungguhnya memiliki makna yang beragam, seperti diucapkan Nomi Pfeffer dan Anna Cook, bahwa mutu merupakan konsep yang Hein. Mutu mengimplikasikan hal-hal yang berbeda pada masing-masing orang. (Edward Sallis 2006, hlm. 61-62), Dapat dipastikan pula, setiap orang memiliki pandangan yang relative berbeda tentang mutu pendidikan. Mutu pendidikan dapat dilihat dari produk pendidikan.

Lalu, apa maksud dari produk pendidikan? Menurut Edward Salles(2006, hlm. 62), ada perbedaan pendapat tentang ini. Pelajar serigkali dianggap sebagai produk pendidikan. Dalam pendidikan kita kadang kala dikatakan pula bahwa pelajaran seolah-olah hasil dari cara bersikap di institusi-institusi tertentu. Pendidikan seolah-olah sebuah jalur produksi. Masalahnya, memang diakui bahwa sulitnya menerapkan definisi tersebut dalam dunia pendidikan yang bersifat praktis. Karena produk adalah sebuah subyek dari proses jaminan mutu, maka hal pertama yang harus dilakukan produsen adalah menentukan dan mengontrol sumber persediaan. Selanjutnya, bahan mentah harus melewati sebuah atau beberapa proses standar yang telah ditetapkan, dan hasil produksi harus dapat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan didefinisikan sebelumnya.

Model semacam ini tidak mudah diterapkan dalam pendidikan. Model seperti ini menuntut adanya seleksi awal bagi pelajar yang hendak diproses. Beberapa sektor pendidikan memang mempraktekkan hal ini, tapi tidak banyak juga yang menerapkan prinsip komprehensif yang terbuka untuk semua kalangan. Kendatipun begitu, dari sinilah kemudian analogi tersebut mulai gugur. Saat

proses pendidikan, semisal kurikulum nasional serta spesifikasi standar dan kompetensi telah berhasil mengembangkan standar proses, maka pendidikan akan berubah menjadi apa-apa kecuali keseragaman, padahal menurut berbagai kalangan ahli, menghasilkan pelajar dengan standar jaminan tertentu adalah suatu hal yang mustahil karena latar belakang kondisi pelajar yang berbeda. (Edward Sallis 2006, hlm. 62). Terlepas dari perbedaan pandangan tentang konsep mutu, bahwa mutu pendidikan memang selalu menjadi perhatian setiap negara dalam membenahi mutu/kualitas pendidikan nasional negara tersebut ditengah kompetisi global, seperti direkomendasikan dari Kongres Guru di Porto, Brasil.

Mutu pendidikan, tentunya berkolerasi signifikan terhadap tuntutan dunia global. Seperti diketahui, bahwa perkembangan dunia global telah membawa pengaruh sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia diseluruh dunia termasuk pendidikan. Dalam proses ini, dunia pendidikan dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Pertama, tantangan sebagai upaya dalam perjuangan melawan kemiskinan; kedua, kecenderungan berkembangnya privatisasi, komersialisasi, dan perdagangan bebas yang digagas oleh WTO (*World Trade Organization*); ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan; keempat, tuntutan pola-pola pembelajaran sepanjang hayat sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Konsekuensi dari perkembangan perdangan bebas dunia, salah satu tantangan dihadapi oleh dunia pendidikan adalah adanya kecenderungan privatisasi, yaitu mengalihkan pelayanan pendidikan kepada sector swasta dan komersial, yaitu mnereapkan pola-pola pendekatan pasar dalam intitusi public. Dalam pandangan pendidikan sebagai komoditas, akan menimbulkan pergeseran yang menjadikan pendidikan bersifat elastis. Artinya, hanya akan dinikmati oleh kalangan tertentu saja, yaitu yang mampu membayar. Padahal seharusnya pendidikan itu bersifat populis, yaitu harus dinikmati oleh semua orang sesuai dengan haknya masing-masing.

Situasi seperti ini sudah mulai terasa dalam dunia pendidikan kita sekarang, dimana pendidikan dirasakan sangat mahal karena sebagian besar warga masyarakat dalam kondisi kurang mampu dijangkau oleh kalangan atas dan tidak dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat yang kurang mampu, maka besar kemungkinan akan

terjadi kesenjangan yang besar diantara warga Negara dan pada gilirannya akan menimbulkan kepincangan sosial yang dapat membawa kehancuran bangsa.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 meggariskan: (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya dan (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ungkapan di atas, sangatlah tidak tepat apabila pendidikan dijadikan sebagai komoditas atau barang dagang dengan pelyanan pola-pola pasar. Pendidikan merupakan pelayanan publik bagi semua warga negara dalam memperoleh hak asasinya secara adil. Ini berarti bahwa lembaga pelayan sebaik-baiknya dengan menyediakan segala penunjang yang diperlukan seperti biaya, sarana, SDM, manajemen dan sebagainya.

Mekanisme pasar yang dimotori oleh WTO (*World Trade Organization*), pada dasarnya tidak layak untuk diterapkan dalam sector pendidikan, karena pendidikan bukanlah merupakan komuditas. Andangan seperti tentunya sangat berbahaya bagi dunia pendidikan, dimana akan berdampak pada terbentuknya sistem kapitalisme di dalam runag lingkup pendidikan. Dampak lainnya adalah akan memperbesar kesenjangan sosial, dimana nantinya hanyalah orang-orang yang mempunyai uang (modal) saja yang dapat bersekolah di sekolah yang berkualitas, sedangkan orang-orang yang tidak mampu tentunya akan sulit untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, kondisi seperti ini tampaknya tidak jauh berbeda dengan zaman colonial, dimana hanya bangsawan (orang-orang kaya) saja yang bias bersekolah. Tentunya kita semua tidak menginginkan hal tersebut terulang lagi.

Pendidikan mutlak menjadi tanggung jawab pemegang kewenangan public yaitu pemerintah. Pelayanan pendidikan yang sekarnng berlangsung harus mengalami perubahan yang lebih mengutamakan kepentingan seluruh warga masyarakat. Sesuai dengan amanat undang-undang, pemerintah harus secara konsekuen menyediakan anggaran pendidikan secara signifikan agar tidak terlalu memberatkan orang tua dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam hal itu ada satu upaya meningkatkan sumber dan dari masyarakat melalui kebijakan yang berhubungan dengan pendapatan negara, seperti pajak. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masuknya pajak dari semua wajib pajak dan ketentuan penggunaan dana pajak untuk kepentingan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan mendapat dukungan dana secara signifikan sehingga pendidikan dapat terlaksana dengan baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tentunya hal tersebut, harus diikuti dengan upaya pemberantasan korupsi dalam makna sebenarnya, yang memang berkolerasi positif dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). (Abdullah Idi dan Toto Suharto 2006, hlm. 142). Hal ini, diharapkan berdampak positif, *side effects*, pula terhadap upaya pembenahan berbagai sector kehidupan berbangsa, tidak terkecuali sector pendidikan.

Dengan mekanisme ini pemerintah dapat memenuhi dana kebutuhan bagi pendidikan sehingga diharapkan akan terwujud pendidikan gratis. Pendidikan gratis tentunya bukan hanya orang-orang yang tidak mampu tetapi termasuk mereka yang mampu, karena orang-orang mampu juga telah membayar pajak yang lebih besar dari pada orang-orang yang tidak mampu sehingga mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan gratis. Pada hakikatnya, pendidikan adalah untuk seluruh warga Negara, bukan hanya segelintir kelompok saja.

Untuk mewujudkan pendidikan sebagai hak asasi manusia dari seluruh warga Negara, pendidikan harus berupaya pelayanan public sebagai wujud pengabdian pemerintah terhadap seluruh rakyat yang telah memilih secara demokratis. Harus dihindari kecenderungan untuk menjadikan pendidikan sebagai komoditas dengan komersialisasi yang menggunakan pendekatan pasar dalam pelayanannya. Pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh warga Negara dan pemerintah harus menyediakan dana pendidikan secara signifikan agar tidak memberatkan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah bersama dengan DPR dan DPRD agar menindaklanjuti UU No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional disertai dengan pengembangan berbagai produk hukum yang dapat memberikan jaminan konstitusional bagi implementasi pendidikan nasional dalam bentuk tersedianya sarana dan dana pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN dan APBD di luar gaji tenaga kependidikan dan pendidikan kedinasan.

Sekolah Gratis dan Bermutu¹⁰¹

Pendidikan, merupakan salah satu dari lima institusi pokok dalam masyarakat (*one offive institutions in society*). Yakni, *pertama*, keluarga yang menjaga dan membimbing generasi muda/anak didik agar menjadi mandiri. *Kedua*, ekonomi yang berfungsi menghasilkan dan mendistribusikan barang-barang. *Ketiga*, pemerintah yang berfungsi memberi, mengatur dan melindungi masyarakat. *Keempat*, agama yang bertugas menjawab permasalahan spiritualitas atau Permasalahan *unknownable*. *Kelima*, pendidikan yang berfungsi mendidik masyarakat. (Abdullah Idi, 2005, hlm. 23-43). Pendidikan, dalam hal ini, memiliki peranan strategis dalam mencerdaskan masyarakat dan mewujudkan peradaban suatu bangsa. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab terdepan dalam proses memajukan Pendidikan, sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan masyarakat (*the needs of society*).

Wacana pendidikan gratis yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan ditanah air sesungguhnya sangat relevan dengan semangat dan keinginan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (*man-power*) seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), 2005-2025, dimana aspek pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Lahirnya UU Sisdiknas No. 14/2005 dipandang sebagai bukti adanya keseriusan pemerintah terhadap pembenahan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga generasi ke depan dapat bersaing dengan bangsa maju lain. Hanya saja, karena UU itu barangkali memang masih baru dan minimnya anggaran yang dialokasikan pada sector pendidikan, maka dalam aplikasinya UU tersebut tampak belum optimal, dimana anggaran pendidikan tahun 2008 belum mencapai 20 persen, tetapi hanya sekitar 12 persen.

Anggaran pendidikan yang minim tentunya akan berdampak pada stagnasi terhadap pelaksanaan pendidikan nasional, seperti diharapkan UU Sisdiknas tersebut. Untuk sertifikasi guru saja pelaksanaannya tidak terlalu mulus, terbukti hanya sekitar 30 guru yang dipanggil ikut sertifikasi pada tahun 2007 yang dinyatakan lulus. Sebelumnya, pada tahun 2006, mereka yang lulus hanya sekitar 40 persen. Angka tersebut tidak terlalu jauh berbeda dengan tingkat

¹⁰¹Tulisan penulis yang berjudul: 'Sekolah Gratis dan Bermutu', pernah dimuat di Berita Pagi, 7 Januari 2008.

kelulusan sertifikasi guru di provinsi lain. Apakah ketidaklulusan ini berkorelasi dengan minimnya kesiapan anggaran? Bukankah pola sertifikasi sebetulnya berbeda dengan pola tes? Dengan kata lain, masih terjadi kontradiksi antara amanat UU dengan realitas pelaksanaan di lapangan secara nasional, yang dibuktikan dengan minimnya alokasi anggaran pendidikan tersebut.

Memang pantas diapresiasi bahwa ada beberapa kepala daerah yang memiliki perhatian serius terhadap kemajuan pendidikan di daerahnya masing-masing. Setidaknya terdapat tiga gubernur (DKI Jakarta, Riau, dan Gorontalo) dan beberapa Bupati/Walikota yang memiliki perhatian dan perlakuan khusus terhadap pendidikan. Karena itu, mereka menerima penghargaan pendidikan dari Presiden RI, ketika memperingati Hari Ulang Tahun PGRI di Riau, Pekanbaru. Dari Sumsel yang menerima penghargaan Presiden SBY adalah Bupati Muba, H. Alex Noerdin (*Berita Pagi*, 30/11/2007) yang telah menggratiskan pendidikan sejak 2002. Gubernur Sumsel, Syahril Oesman, juga menerima penghargaan dari Ketua PGRI, Muhammad Surya. (*Sumatera Ekspres*, 28/11/2007). Suatu hal yang patut disayangkan, bahwa ternyata, hanya sedikit dari total pemimpin (gubernur/bupati/walikota) se Indonesia memiliki perhatian terhadap pendidikan. Tidak lebih dari 10 persen. Hal ini memprihatinkan bagi masa depan generasi muda dan generasi bangsa.

Karena itu, patut diapresiasi bila ada kandidat kepala daerah di Sumsel, yang akan berkompetisi pada Pemilu 2008, mengusungkan wacana pendidikan gratis dalam programnya. Hal ini terlihat dari semaraknya tulisan pendidikan gratis, seperti spanduk, stiker dan iklan. Terlepas apakah pendidikan gratis masih bersifat wacana atau sudah dilakukan, hal itu merupakan substansi program yang dibutuhkan masyarakat dan patut diangkat ke permukaan. Memang sebagian masyarakat masih menyangsikan kemampuan kandidat untuk menggratiskan sekolah di Sumsel. Dikatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin bila menggratiskan anak didik dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. Dalam hal ini, sesungguhnya, wacana pendidikan gratis tersebut diperlukan upaya sosialisasi, terutama berkaitan dengan konsep, sumber dana, dan langkah-langkah strategis proses pencapaiannya.

Pentingnya sekolah gratis di Sumatera Selatan, setidaknya dilatarbelakangi beberapa pertimbangan. *Pertama*, kualitas pendidikan nasional yang masih rendah dalam hal kualitas bila dibandingkan kualitas pendidikan dinegara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. *Kedua*, sejarah kemajuan bangsa maju, kualitas pendidikan berkorelasi positif dengan kemajuan bangsa tersebut. *Ketiga*, data BPS (1997) menunjukkan masih terdapat kekurangan 1,3 juta penduduk miskin di Sumatera Selatan. Dalam hal ini, kemiskinan selalu berkorelasi dengan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. *Keempat*, perlunya menciptakan sumber daya manusia (*man power*) Sumsel yang mampu berkompetisi di era global dalam konteks pentingnya menjaga keutuhan dan identitas bangsa.

Karena itu, suatu hal yang wajar dan perlu diapresiasi bila ada para kandidat kepala daerah di Sumsel yang berani mewacanakan pendidikan gratis. Spirit otonomi daerah berdampak pada otonomi pendidikan dimana seorang kepala daerah sangat mungkin mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai, seperti dimanakan UU Sisdiknas. Bila peran pemerintah pusat dan daerah berjalan dalam mitra yang sejajar dalam mengemban tanggung jawab pendidikan, pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) nasional yang akan menentukan kemajuan daerah dan kemajuan bangsa. Ke depan, masalah pendidikan dan sumber daya manusia tersebut merupakan kebutuhan semua bangsa di dunia. Karena itu, wacana pendidikan gratis diusungkan para kandidat adalah suatu hal rasional dan wajar karena menjadi kebutuhan dan harapan publik Sumsel.

Inggris saja yang *notabene* negara maju (*developed country*) tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Ratu Elizabeth II dalam pidatonya di depan parlemen Inggris, 14 Mei 1977, mengatakan: "prioritas utama pemerintah Inggris berusaha keras meningkatkan standar pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi dan menggalakkan program belajar terus-menerus di tempat kerja". Dalam kampanye Perdana Menteri Inggris, Toni Blair, dengan tegas mengampanyekan program politiknya dalam bidang pendidikan. Negara *super-power* Amerika Serikat juga tetap mengedepankan pembangunan pendidikan. Ketika berkuasa, pemerintahan Bill Clinton memfokuskan program politiknya pada sistem pendidikan yang diteruskan oleh pemerintahan George W. Bush, seperti yang

tertuang dalam *blue print* program pendidikan dalam pemerintahannya. Perdana Menteri Australia terpilih, Rudd, juga menempatkan pendidikan sebagai prioritas kampanye yang akan dilaksanakan dalam periode kepemimpinannya.

Mengingat wacana pendidikan gratis masih merupakan konsep relatif baru bagi masyarakat Sumsel, sementara itu, mereka sangat mengharapkan sekali agar para kandidat dapat menjelaskan apa makna dan substansi serta langkah strategis mencapainya, maka dibutuhkan sosialisasi secara luas. Sosialisasi, dalam hal ini, tidak cukup hanya bersifat janji-janji, penyebaran stiker-stiker, iklan, tulisan, tetapi juga memerlukan mutual-dialog, antara kandidat dan masyarakat, seperti teknik silaturahmi, diskusi, debat, tidak kalah pentingnya bila dibandingkan pemberian bentuk bantuan untuk kebutuhan publik. Cara-cara itu juga merupakan proses pencerdasan politik menuju iklim terciptanya demokrasi, dimana pada akhirnya masyarakat pemilih akan lebih cerdas, tanpa ragu-ragu, dan suka rela akan memilih calon terbaik sebagai kepala daerah.

Untuk saat ini kebijakan BHP, sebagai upaya mendorong kemandirian pembiayaan pendidikan tinggi, tampaknya agak sulit diterapkan di lingkungan PTAI yang kebanyakan mahasiswanya berasal dari kelas menengah ke bawah. Bahkan bukan hanya PTAI, ratusan PTU negeri dibawah Depdiknas pun belum siap menjalankan kebijakan BHP. Paradigma bahwa pemerintah wajib, sebagaimana amanat undang-undang, memberikan layanan pendidikan kepada warga negara, dan warga Negara memiliki hak memperoleh pendidikan yang layak, tampaknya masih relevan. Partisipasi public dalam bentuk dana pendidikan memang harus didorong terus-menerus sehingga PT semakin mandiri, tetapi melihat tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini partisipasi masyarakat yang secara ekonomi sudah baik.

Mengingat hal di atas, maka pemerintah masih sangat dibutuhkan peranya dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Dalam kasus PTAI di bawah Departemen Agama, pemerintah bahkan seharusnya lebih meningkatkan jumlah subsidi kepada sejumlah PT/PTAI demi mempersiapkan sumber daya manusia Muslim yang berkualitas di era global. Bukan justru menghilangkan subsidi itu. Pengelolaan PT/PTAI, dalam hal ini, harus dilihat dan diberlakukan sebagai upaya investasi manusia (*human investment*) dan bukan

Agama dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial
investasi modal (*capital investement*) yang sarat dengan perhitungan untung rugi.

Dalam konteks otonomi daerah, peran pemerintah daerah perlu didorong terus-menerus untuk membantu pembiayaan pendidikan baik ditingkat dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Kasus kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin provinsi Sumatera Selatan, misalnya, dapat dijadikan model bahwa pemerintah daerah yang APBD-nya memadai dapat berperan lebih besar dalam membiayai pendidikan demi kesejahteraan masyarakatnya.

Wacana pendidikan gratis memang masih memiliki multitafsir. Ada yang menafsirkan pendidikan gratis berhubungan dengan bebasnya biaya SPP. Ada pula yang menafsirkan pendidikan gratis dengan bebas SPP, bebas buku-buku pelajaran, tas, pensil, polpen, dan pakaian. Semua tafsiran tentang pendidikan gratis tersebut masih bersifat relative, adanya unsur kebenarannya, karena makna, substansi, sumber dana, dan langkah strategis yang akan dilakukan sebagai upaya meralisasikannya belum dijelaskan kepada masyarakat. Bila kita merujuk substansi sekolah gratis yang diterapkan di tanah air misalnya di Musi Banyu Asin (MUBA), Sumatera Selatan, sejak 2002, pendidikan gratis agaknya lebih mengarah kepada bebasnya kebutuhan pokok anak didik, seperti SPP, buku-buku, pensil, polpen, baju, dan lain-lain. Wacana, makna dan tafsiran tentang pendidikan gratis ada baiknya disosialisasikan kepada public dengan beragam teknik, seperti stiker, iklan, silaturahmi, dialog, dan debat kepada semua elemen masyarakat, termasuk sekolah dan perguruan tinggi. Wacana dan dorongan pentingnya pendidikan gratis pada negara berkembang, seperti Indonesia, yang juga merupakan pesan moral Kongres Porto-Brasil 2003, perlu menjadi perhatian semua pihak demi menyelamatkan generasi muda dan memperkuat kemampuan kompetisi bangsa di era global.

Minat Baca Siswa Madrasah Aliyah¹⁰²

Masyarakat kita pada umumnya sudah memiliki minat baca tetapi bahan apa yang dibaca masih perlu dipertanyakan. Akhadiyah (1990:78) menyatakan bahwa mengenai bahan bacaan ini, tampaknya

¹⁰²Tulisan berjudul: 'Minat Baca Siswa Madrasah Aliyah (MAN) 2 Palembang' ini merupakan Hasil Penelitian yang dilakukan Ibu Safarina HD, Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Palembang, Sumatera-Selatan (Contributor).

media massa cetak, seperti surat kabar dan majalah sudah merupakan bacaan sehari-hari, setelah itu baru karya sastra seperti novel dan komik. Ini menunjukkan bahwa masalah minat baca sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, tinggal bagaimana mengarahkan minat itu dari membaca bahan-bahan yang "ringan" ke bacaan ilmu pengetahuan.

Pada saat ini untuk menciptakan manusia yang pandai membaca bukan merupakan hal yang penting. Yang lebih penting adalah manusia yang pandai membaca dan menulis. Itulah sebabnya diperlukan motivator-motivator yang pandai memotivasi generasi bangsa sejak dini. Salah satu motivatornya yaitu dari pihak keluarga (Fansyuri, 2007:2).

Pengembangan minat baca seharusnya dimulai dalam lingkungan keluarga. Orang tua yang membiasakan diri membaca akan menjadi contoh pembaca yang baik bagi anak-anaknya. Namun, mereka juga perlu berhati-hati dalam mengarahkan minat baca pada anak-anaknya, agar pada saatnya anak-anak dapat memanfaatkan informasi ilmiah dengan baik. Hal ini dapat terjadi sebaliknya, jika pada masa kanak-kanaknya mereka dipaksa membaca buku-buku yang "berat", mereka memandang atau menganggap buku-buku ilmiah adalah buku-buku yang sulit dimengerti.

Sehubungan dengan hal itu, Supraptiningsih (2005:3) menyatakan bahwa dalam kenyataan kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat disetiap anggota masyarakat biasanya akan membaca bahan-bahan yang sesuai dengan selera/pilihannya masing-masing tanpa paksaan dari pihak lain. Kenyataan ini menuntut peningkatan pembelajaran membaca yang harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional serta kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Dalam kenyataannya, kegiatan membaca kurang diminati para siswa. Khususnya membaca buku-buku yang bersifat ilmiah. Menurut Sobari (*Kompas*, 18 November 1990) bahwa kita masih prihatin karena di zaman yang serba canggih ini masih banyak remaja yang kurang menyadari akan pentingnya membaca. Mereka tidak sadar betapa banyak pengetahuan yang diperoleh lewat kegiatan yang disebut membaca.

Pada umumnya kenyataan yang dapat dilihat, pengajaran bahasa di sekolah dianggap kurang menekankan pada aspek pengajaran

... dan Pendidikan dalam Perubahan Sosial

keterampilan berbahasa. Pengajaran bahasa di sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMU/Madarasah Aliyah kurang menekankan pada aspek pengajaran keterampilan berbahasa. Seringkali anak tidak mampu untuk menulis. Entah itu berupa karangan biasa atau karya ilmiah (Tarigan, 1989:56). Dengan demikian, membaca sebagai salah satu modus komunikasi, erat kaitannya dengan kegiatan berbahasa tulis karena aktualisasi membaca pada hakikatnya merupakan usaha untuk memahami maksud orang lain yang dituangkan dalam tulisan.

Kesenjangan antara minat membaca dan menulis yang seharusnya dapat meningkatkan keterampilan meneliti dan menulis karangan ilmiah itu membawa pengaruh pada minat remaja dalam mengikuti perlombaan penelitian ilmiah. Pernah terjadi penurunan 50 persen jumlah naskah yang masuk ke Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR). Kenyataan ini sangat memprihatinkan (*Republika*, 10 Agustus 1993). Dalam berbagai perlombaan karya ilmiah remaja pun saat ini hanya diminati oleh beberapa siswa/remaja saja. Mereka yang mengikuti kegiatan itu hanyalah siswa atau remaja yang memiliki minat baca yang tinggi.

Bertolak dari kenyataan itu, perlu sumbang pikiran demi meningkatkan minat baca siswa madrasah aliyah khususnya dalam hal menumbuhkan keterampilan menulis karangan ilmiah. Sumbang pikiran ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemecahan masalah dalam mempelajari bahasa Indonesia pada umumnya, sehingga minat baca siswa madrasah aliyah dapat direalisasikan dalam meningkatkan keterampilan menulis.

Membaca merupakan proses yang dilakukan serta dipergunakan pembaca pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Menurut Hudson (1960:43-44) bahwa membaca adalah suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas dan agar makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Kalau hal ini tidak terpenuhi, pesan yang termuat dan yang tersirat tidak akan tertangkap atau dipahami, dan proses membaca itu tidak terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, Tarigan (1989:7) menyatakan bahwa membaca merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kesan-kesan yang dikehendaki, yang disampaikan penulis melalui

media kata-kata atau bahasa tulis. Dengan kata lain, membaca adalah meneliti serta memahami serti atau makna yang terkandung di dalam bahan tertulis. Sejalan dengan pendapat itu, Finochiaro dan Bonomo (dalam Supraptiningsih, 2005:5) mendefinisikan membaca sebagai proses memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis (*reading is bringing meaning to and getting meaning from printed or written material*). Dengan demikian, tujuan utama membaca adalah untuk memperoleh informasi dan memahami isi dan makna bacaan.

Minat merupakan factor yang sangat penting yang ada dalam diri manusia. Minat adalah "kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat dapat diartikan juga dengan kegairahan atau keinginan" (Depdikbud, 1990:583). Minat dapat ditimbulkan oleh faktor kebutuhan, perasaan, dan lingkungan. Dengan adanya ketiga faktor di atas, minat tidak saja dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang tetapi juga dapat memberi motivasi atau dorongan kepada seseorang untuk berusaha terus-menerus dalam mencapai tujuan. Selain ketiga faktor itu minat juga dapat tumbuh melalui faktor motivasi dan pengalaman (Tarigan, 1989:104).

Minat siswa sering timbul karena ada keinginan siswa memahami bacaan atau menerima informasi dari lingkungannya. Pengembangan minat baca siswa hendaknya dilakukan pada saat pendidikan berlangsung supaya tujuan membaca atau keterampilan membaca tercapai. Dalam meningkatkan minat baca siswa tentu saja sangat membutuhkan peranan guru. Dengan memahami minat baca siswa, memudahkan guru dalam memberikan bahan bacaan yang sesuai dengan minatnya. Selain itu, guru dituntut untuk senantiasa membimbing siswanya dalam keterampilan berbahasa (dalam hal ini membaca) agar siswa-siswanya mampu memahami berbagai karangan yang bisa menambah pengetahuan dan memperdalam pengalaman agar mampu berkomunikasi dengan baik dan benar (Damono, 1992:186).

Dengan adanya minat untuk membaca, siswa akan memperoleh informasi berupa ilmu pengetahuan. Informasi yang diperoleh melalui membaca secara tidak langsung dapat mempengaruhi keterampilan menulis. Sebab dengan adanya kebiasaan membaca paling tidak siswa mempunyai sumber informasi yang banyak untuk diterapkan dalam menulis.

Hubungan Membaca dan Menulis

Buku merupakan sumber informasi bagi siswa untuk menghasilkan tulisan. Siswa yang aktif membaca akan mendapatkan informasi yang luas terutama informasi yang berhubungan dengan pengetahuan bahasa, yang meliputi kosakata, gaya bahasa, dan kaidah-kaidah gramatikal. Semakin banyak dia membaca, semakin banyak pula ilmu pengetahuan yang diperoleh. Siswa yang aktif membaca tentu dapat memilih mana buku-buku yang bermutu atau tidak bermutu.

Pada dasarnya keterampilan menulis bermula dari kebiasaan membaca. Pada tahap ini siswa mempunyai rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap buku yang dibacanya. Sebab dalam bacaan itu sudah tersirat ide-ide dan kemampuan penalaran si penulis. Bahkan sering sekali dalam kegiatan menulis, siswa mencoba meniru kebiasaan atau kekhasan dari si penulis.

Sehubungan dengan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa antara membaca dan menulis terdapat hubungan yang sangat erat. Berkaitan dengan hal itu, Tarigan (1982:4) mengungkapkan bahwa bila kita menuliskan sesuatu, pada prinsipnya kita ingin agar tulisan itu dibaca orang lain; paling sedikit dapat kita baca sendiri pada saat lain. Hal ini jelaslah hubungan antara menulis dan membaca pada dasarnya adalah hubungan penulis dan pembaca.

Agar terampil menulis, sebaiknya siswa perlu mengetahui penyajian tulisan yang baik. Menurut Syarif (2005:1) bahwa keterampilan menulis tidak diperoleh serta-merta. Seseorang yang ingin terampil menulis haruslah berlatih terus-menerus dengan sistematis, misalnya berlatih mulai dari yang mudah ke yang sukar, secara produktif, disiplin, terampil, dan terkontrol. Makin banyak seseorang menulis, makin tinggi keterampilan menulis.

Selain pendapat di atas, Hardjodipuro (1987:3) menjelaskan bahwa proses pencapaian keterampilan menulis haruslah menurut aturan-aturan baku akademis yang (*existing academic conventions*). Selanjutnya, agar terampil menulis, Tarigan (1982:6) menyatakan bahwa ciri-ciri tulisan yang baik itu antara lain, sebagai berikut: (1) tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang penulis mempergunakan nada yang serasi; (2) tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang penulis menyusun bahan-bahan yang tersedia menjadi suatu keseluruhan yang utuh; (3) tulisan yang

baik mencerminkan kemampuan sang penulis untuk menulis dengan jelas dan tidak samar-samar: memanfaatkan struktur kalimat, bahasa, dan contoh-contoh sehingga maknanya sesuai dengan yang diinginkan oleh sang penulis; (4) tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang penulis untuk menulisi secara meyakinkan; (5) tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang penulis untuk mengedit naskah tulisannya yang pertama serta memperbaikinya; dan (6) tulisan yang baik mencerminkan kebanggaan sang penulis dalam naskah: kemudian mempergunakan ejaan dan tanda baca secara seksama, memeriksa makna kata, dan hubungan ketata bahasaan dalam kalimat-kalimat sebelum menyajikannya kepada para pembaca.

Factor-Faktor yang Melatarbelakangi Minat Baca Siswa

Salah satu indikasi kemajuan di bidang pendidikan dapat dilihat dari meningkatnya minat baca terutama minat baca buku-buku ilmu pengetahuan. Untuk mewujudkan minat baca siswa madrasah aliyah, banyak kendala yang saling mempengaruhi. Sebab, dengan kurangnya buku-buku ilmu pengetahuan, hal ini akan mempengaruhi keterampilan menulis karangan yang bersifat ilmiah.

Ada beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kurangnya minat menulis. Menurut (Simatupang, 1979:26) tiga faktor yang dianggap mempengaruhi kurangnya minat baca siswa madrasah aliyah dalam menumbuhkan keterampilan menulis, yaitu cara mengajarkan membaca yang tidak tepat, penyediaan bahan bacaan yang tidak memadai baik dari segi jumlah maupun mutu, dan kurangnya kebiasaan membaca.

Cara Mengajarkan Membaca

Bila dikaji kembali GBPP mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, dapat disimpulkan tujuan pengajaran bahasa Indonesia mengarah kepada keterampilan bahasa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pengajaran itu lebih mengarah kepada pengetahuan atau teori tentang bahasa. Di sekolah-sekolah di negara kita pada siswa biasanya hanya diajari tentang bahasa dan bukan kemampuan bahasa. Kita pun melihat kenyataan bahwa pengajaran membaca kurang mampu menarik minat baca siswa. Para siswa lebih senang menghabiskan waktu beristirahatnya dengan bermain daripada membaca di perpustakaan. Oleh karena itu, tidak jarang perpustakaan sekolah hanya diisi oleh beberapa siswa saja. Guru belum mampu

menumbuhkan minat baca siswa, apalagi menjadikan membaca sebagai kebutuhan pokok siswa (Tarigan, dkk., 1989:119).

Cara membaca dan menulis yang tidak tepat, dapat juga disebabkan oleh metode yang digunakan oleh para guru yang membosankan siswa. Guru kurang mampu secara tepat memilih bahan yang akan diajarkan. Bahan yang akan diajarkan tidak ditentukan secara berurutan, dan menyajikannya kepada siswa tidak sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Beberapa pengamat dan para ahli serta pengajar bahasa Indonesia angkat bicara. Umumnya mereka sejalan dalam menyatakan sebab kemerosotan hasil pengajaran keterampilan menulis ini, yakni berpusat pada pengajaran keterampilan menulis yang dilaksanakan di sekolah selama ini belum terlaksana dengan baik. Guru juga belum berhasil membuat pengajaran mengarang atau menulis menjadi pelajaran yang menyenangkan.

Teknik yang digunakan para guru untuk menarik siswa melakukan kegiatan membaca dan menulis kurang mendapat pertimbangan. Misalnya, guru kurang dapat menerapkan teknik mengajar yang sesuai salah satu teknik misalnya CBSA. Dalam pendekatan ini siswa dituntut memegang peranan dan lebih aktif dalam proses belajar-mengajar, di mana guru dapat menyediakan atau menciptakan status kondisi pembelajaran siswa secara terencana dan baik (Usman, 2002:23). Kalau tidak demikian, kondisi seperti ini akan membawa pengaruh besar terhadap motivasi siswa. Sebab, secara tidak langsung siswa tidak merasa ditantang untuk aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Mutu Bahan Bacaan

Masih menjadi kenyataan bahwa buku-buku terbitan di perpustakaan-perpustakaan madrasah sekolah masih biasa-biasa saja. Tetapi bagi siswa yang masih "belajar" hal ini patut disyukuri. Bukan berarti kita tidak peduli dengan mutunya. Namun yang terpenting dikemukakan melalui media tulis, sehingga masyarakat akan menilainya. Cara ini penting untuk meningkatkan mutu buku-buku, terutama buku-buku yang di perpustakaan madrasah. Diem (1990:76) mengemukakan bahwa keadaan yang dapat terus mempertahankan kecenderungan minat baca itu Semarang ini memang kurang memadai. Kebutuhan akan adanya informasi yang terpercaya seperti buku-buku atau sumber-sumber ilmiah lainnya,

kurang terlihat. Malah sebagian kita ada yang masih belum tahu cara menggunakan perpustakaan, sehingga dorongan untuk membaca semakin menurun.

Kebiasaan Membaca yang Baik

Kebiasaan adalah pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seseorang individu dan yang dilakukannya secara berulang-ulang untuk hal yang sama Moeliono (1990:112). Dengan demikian, status kebiasaan adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat.

Membaca adalah kegiatan fisik dan mental yang dapat berkembang menjadi status kebiasaan. Sebagaimana halnya dengan kebiasaan-kebiasaan lainnya, membentuk kebiasaan membaca juga memerlukan waktu yang relatif lama. Dalam usaha pembentukan kebiasaan membaca, dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu minat dan keterampilan membaca. Antara minat dan keterampilan harus seimbang sebab kedua faktor itu akan mempengaruhi membaca yang tidak atau kurang efisien.

Yang perlu dicapai dalam kebiasaan membaca adalah kebiasaan membaca yang efisien. Untuk mencapai tujuan ini sebaiknya siswa harus mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang tidak efisien. Tampubolon (1987:11) menyatakan hal-hal berikut: (1) Membaca dengan suara terdengar; (2) Membaca dengan suara seperti berbisik; (3) Membaca dengan bibir bergerak; (4) Membaca dengan kepala bergerak mengikuti baris bacaan; (5) Membaca dengan menunjuk baris bacaan dengan jari, pensil, atau alat lainnya; (6) Membaca kata demi kata; (7) susah mengadakan konsentrasi pada waktu membaca; (8) Cepat lupa isi bagian-bagian bacaan yang telah dibaca; (9) Tidak dapat dengan tepat menemukan pikiran pokok dalam bacaan; (10) Tidak dapat dengan cepat menemukan informasi tertentu yang diperlukan dalam bacaan; (11) Jarang sekali (sedikit sekali) waktu untuk membaca".

Peranan Keluarga, Masyarakat, dan Guru

Pengembangan minat baca sebaiknya dimulai dalam lingkungan internal yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Anak dapat didorong untuk mencintai buku dan mengenal informasi ilmiah. Pada tingkat yang sesuai dengan usianya anak dapat dirangsang untuk

mengenal ilmu pengetahuan. Hal ini dilakukan secara kontinyu dan berangsur-angsur, sehingga anak tidak merasa dipaksa membaca buku-buku yang "berat" karena buku-buku ilmiah cenderung sulit dimengerti.

Keluarga juga seharusnya beranggapan bahwa buku merupakan media perantara yang mendorong anak untuk melakukan sesuatu. Buku berfungsi sebagai sumber untuk memperkaya pengetahuan dan kreativitas. Buku juga berfungsi sebagai harta milik yang berarti keluarga harus mengajarkan anak untuk menghargai buku dan mengajarkan bagaimana cara memelihara buku-buku pinjaman. Selain itu, buku juga berfungsi sebagai pencipta suasana yang berarti buku dapat menciptakan suasana yang akrab sehingga mampu mengembangkan sikap membaca yang baik.

Selanjutnya, kegiatan membaca seharusnya menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Menurut Fansyuri (*Berita Pagi*, 2 November 2007) kebutuhan membaca dan menulis saat ini masih merupakan suatu hal yang sulit bagi masyarakat kita. Akan tetapi, Kegiatan membaca ini dapat diperoleh dari pendidikan di madrasah dan di perpustakaan, baik itu di perpustakaan madrasah maupun perpustakaan wilayah. Perpustakaan menjadi sarana yang penting dalam memacu minat baca masyarakat.

Sebenarnya minat baca masyarakat itu sudah ada, tetapi bahan bacaan yang menarik seperti cerpen, novel, komik, dan karya sastra lainnya sangat diminati masyarakat. Jadi, perlu dipikirkan adalah bagaimana mengarahkan minat baca terhadap bacaan yang "ringan" itu ke bacaan yang berisi ilmu pengetahuan.

Untuk itu, diperlukan kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah untuk menumbuhkan minat baca itu. Penyediaan buku-buku dan bacaan yang berisi ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan. Masyarakat akan sadar dengan sendirinya jika pemerintah mengarahkannya.

Selanjutnya, peranan guru dalam meningkatkan minat baca siswa sangat penting. Guru dan siswa merupakan jalinan interaksi yang erat satu sama lain. Oleh karena itu, dalam hal meningkatkan minat baca, peranan guru sangat menentukan. Di Sekolah/madrasah, guru dapat membuat program kegiatan yang dapat meningkatkan minat baca secara terus-menerus, misalnya dengan memberikan

motivasi, memberikan tugas, dan menyediakan bahan bacaan bagi siswa.

Bagi siswa bahan bacaan digunakan sebagai pedoman untuk menambah kreativitasnya. Tarigan dkk. (1989:181) menyatakan bahwa siswa dapat terus-menerus memanfaatkan bacaan untuk belajar. Anak SMA/Madrasah Aliyah dituntut untuk mampu menggunakan bacaan sebagai pedoman dan alat bantu terhadap usaha yang kreatif, sehingga ia dapat menempuh suatu kehidupan yang baik dan aktif. Ia harus mampu membaca secara mendalam dan membuat pertimbangan-pertimbangan yang kritis tentang apa yang dibaca sehingga ia dapat menilai kebenaran titik pandang pengarang dan ketetapan pernyataan-pernyataan pengarang.

Berkaitan dengan hal itu, kegiatan menulis erat hubungannya dengan minat baca siswa. Semakin siswa memiliki minat baca yang tinggi terhadap bacaan ilmiah, maka siswa akan semakin memiliki peluang yang banyak untuk mengembangkan ide-idenya ke dalam tulisan yang sifatnya ilmiah atau karangan ilmiah.

Dari uraian sebelumnya dinyatakan bahwa usaha menumbuhkan minat baca siswa dimulai sejak dini di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Kegiatan menulis pun dapat dimulai pula sejak dini. Apa saja yang didapatkan anak dalam bahan yang dibaca hendaknya dapat pula diarahkan untuk dituangkannya ke dalam suatu tulisan. Kegiatan ini pun dapat dilakukan secara berangsur-angsur dan terus-menerus, sehingga dapat dijadikan suatu kebiasaan. Anak yang sering membaca informasi-informasi ilmiah memiliki kemungkinan yang besar untuk berpikir ilmiah.

Di madrasah, guru dapat menggunakan bermacam-macam teknik, misalnya guru dapat menggunakan teknik menyusun struktur, mengembangkan kalimat topik, menemukan kata kunci, dan sebagainya. Latihan dan bimbingan yang diberikan guru terhadap siswanya bertujuan untuk menantang siswa supaya lebih aktif dan kreatif.

Upaya Meningkatkan Minat Baca Siswa:

Cara Mengajar Membaca yang Baik

Banyak metode yang dapat digunakan para guru untuk menarik minat siswa untuk melakukan kegiatan membaca. Guru harus mampu secara tepat memilih bahan yang akan diajarkan, menentukan urutan

bahan yang akan diajarkan, dan menyajikannya kepada siswa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Metode yang digunakan hendaklah sesuai dengan tujuan pengajaran yang hendak dicapai. Penentuan bahan serta urutan penyajiannya memang sudah tercantum dalam kurikulum dan garis besar pembelajaran. Akan tetapi, masih perlu dijabarkan secara khusus dan operasional dalam teknik mengajar.

Di samping metode dan pemilihan bahan ajar, guru juga perlu memilih teknik yang tepat dan bergantung pada pertimbangan guru masing-masing. Menurut Tarigan dkk. (1989:119) bahwa guru dapat menggunakan teknik menyusun struktur, mengembangkan kalimat topik, menemukan kata kunci, membaca sepintas, membaca sekilas, telaah tugas, dan pengajaran perorangan...dengan teknik yang dipakai itu, siswa ditantang untuk aktif, kreatif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Selain teknik yang dipakai oleh guru untuk pengajaran membaca yang baik, dibutuhkan pula pemahaman-pemahaman. Menurut Smith dan Baret (dalam Syarif, 2005:19-21). Pemahaman itu diantaranya, pemahaman harfiah dan mengorganisasi. Dalam pemahaman harfiah guru harus dapat membimbing siswa untuk menentukan informasi yang secara gamblang diungkapkan dalam bacaan. Rancangan pertanyaan ditujukan untuk melatih siswa untuk mengenal dan mengingat kembali suatu fakta atau kejadian, tujuan dan pertanyaan dalam tingkat ini mempunyai ciri-ciri diantaranya yaitu (1) melokasikan atau mengidentifikasi pokok-pokok pikiran atau informasi yang diungkapkan secara eksplisit di dalam wacana itu sendiri atau di dalam latihan-latihan yang menggunakan pokok pikiran yang eksplisit dan implisit dalam wacana dan (2) mengingat kembali yaitu menghendaki siswa memproduksi secara eksplisit dikemukakan dalam wacana. Secara mengorganisasi siswa diharapkan dapat menganalisis, mensintesis, dan/atau mengorganisasi buah pikiran atau informasi yang dikemukakan secara eksplisit dalam wacana.

Selanjutnya, wawasan berpikir siswa akan bertambah apabila guru menyadari akan pentingnya sarana sebagai alat bantu dalam pengajaran bahasa. Menurut Tarigan dkk. (1989:189) bahwa guru dan siswa harus memanfaatkan teks-teks dasar sebagai titik fokus dalam memulai belajar masalah. Banyak sekolah yang memiliki au-

dio visual yang digunakan sebagai alat bantu pengajaran dalam membaca bukan pengganti pengajaran dalam membaca. Karena siswa SMA/Madrasah Aliyah harus menggunakan lingkup materi yang luas.

Bahan Bacaan

Dalam upaya meningkatkan minat baca ini, sebagai alternatif yang diberikan bahwa perpustakaan merupakan sarana penting yang dapat memicu minat baca siswa ataupun masyarakat. Koleksi buku yang memadai, pelayanan yang baik dan suasana tenang adalah hal yang mendorong minat baca. Dengan adanya perpustakaan, baik perpustakaan sekolah maupun perpustakaan wilayah yang memenuhi syarat sebagai tempat untuk memperoleh informasi ilmu pengetahuan dan teknologi memang merupakan suatu keharusan. Semua hal ini harus dipahami sebagaimana dari usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan secara keseluruhan.

Untuk menunjang minat baca, tampaknya ketersediaan bahan bacaan sangat menentukan. Hal ini diperkuat oleh Martini (dalam Diem, 1990:79) yang menyatakan bahwa ketersediaan bahan bacaan erat pula kaitannya dengan animo masyarakat (siswa atau mahasiswa) terhadap buku-buku teks maupun buku bacaan. Sehubungan dengan hal itu, peranan perpustakaan sekolah sangat diharapkan dalam menyediakan bahan bacaan, terutama bagi yang tergolong tidak mampu.

Membina Kebiasaan yang Baik

Membentuk kebiasaan membaca efisien pada usia dewasa, tentu lebih sukar, tetapi bukan tidak mungkin yang dikembangkan ialah minat membaca. Pada usia dewasa, pengembangan minat dapat dilakukan dengan disiplin diri. Dapat dimulai dengan membaca materi bacaan yang mudah dan menarik setiap hari, misalnya, selama setengah jam. Kemudian waktu membaca itu semakin ditingkatkan dan selanjutnya bahan-bahan bacaan dapat diganti dengan bahan-bahan nonfiksi. Yang terpenting ialah mendisiplinkan diri agar setiap hari harus membaca bahan-bahan tertentu, bukan hanya surat kabar, tetapi juga buku-buku yang bersifat ilmiah.

Oleh karena itu, peranan minat membawa pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan minat baca siswa dalam menumbuhkan keterampilan menulis karangan ilmiah. Keterampilan menulis

bermula dari kebiasaan membaca, sebab pada tahap ini siswa mempunyai rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap buku yang dibacanya. Selain itu, kedisiplinan diri siswa juga merupakan hal penting. Apabila disiplin ini telah berjalan, minat membaca akan terbentuk, dan akhirnya kebiasaan membaca akan tercapai. Dengan kebiasaan membaca yang baik akan membawa pengaruh yang positif dalam keterampilan menulis. Oleh karena itu, peranan keluarga, masyarakat, dan guru sangat diutamakan dalam membentuk kebiasaan membaca yang aktif dan kreatif.

Guru dan Masa Depan Bangsa¹⁰³

Profesi guru selalu berkaitan dengan suatu pekerjaan yang terpinggirkan. Fenomena yang ada selama ini banyak orang yang merasa miskin lahir batin berprofesi sebagai guru karena banyak dari mereka yang berasal dari tingkat sosial ekonomi yang rendah, dengan budaya hidup yang mungkin tidak sesuai dengan visi dan aspirasi pendidikan bangsa. Banyak orang yang tidak berminat dan berkemampuan intelektual yang telah memasuki dunia guru semata-mata sebagai buruh, dengan motif oportunistik, tanpa aspirasi kemajuan dan tanpa kepedulian pada kehidupan masa depan bangsa (Depag, 2005: 6).

Hal di atas berhubungan juga dengan rendahnya penghargaan terhadap profesi guru, mulai dari penghargaan kesejahteraan, jaminan masa depan, lingkungan kerja yang kurang kondusif dan lain-lain. Oleh karena itu, masih banyak guru yang harus mencari penghasilan tambahan di luar profesi utamanya sebagai guru. Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Guru (dan Dosen) pada 6 Desember 2005 oleh DPR RI, maka profesi guru pada masa depan akan memiliki profesi yang lebih baik, bahkan tidak mustahil akan menjadi profesi yang menjanjikan dan sekaligus sebagai penentu masa depan bangsa.

Profesi guru dapat diartikan sebagai profesi yang membutuhkan kualifikasi dan kompetensi dalam tugas sebagai pendidik, memahami pertumbuhan dan perkembangan anak dalam mendukung proses pembelajaran yang diharapkan. Daradjat dkk (1996: 39) menyatakan bahwa guru merupakan pendidik profesional karena secara implisit

¹⁰³Tulisan artikel yang berjudul: *Guru dan Masa Depan Bangsa*, ditulis ibu Safarina HD, Guru MAN 2 Palembang, Sumatera-Selatan (Contributor).

seorang guru telah merelakan dirinya menerima sebagian tanggung jawab pendidikan dari orang tua para peserta didik. Semua orang tua pasti sangat mengharapkan amanah yang disampaikannya kepada sekolah atau guru semaksimal mungkin sehingga dapat mengembangkan potensi, bakat dan minat anak-anaknya.

Tidak semua orang dapat menjadi guru karena profesi ini betul-betul membutuhkan profesionalisme dan mengedepankan kepentingan sosial dan keikhlasan. Oleh karena itu, seorang yang memilih profesi guru sebagai pekerjaannya sedapat mungkin dapat mengembangkan beberapa kemampuan, di antaranya: kemampuan pribadi, kemampuan sosial dan kemampuan profesional.

Menjadi guru tidak hanya memerlukan kecerdasan, keterampilan, kepintaran, kreativitas, produktif dan profesional, melainkan juga perlu memiliki kekuatan akidah dan keunggulan akhlak. Selain itu, keberhasilan seorang guru terletak pada kepribadiannya, penguasaan metode, frekuensi, intensitas aktivitas interaktif guru dan anak didik, wawasan, penguasaan materi dan penguasaan proses pembelajaran.

Beragam persoalan bangsa dengan beragam krisis sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, konflik etnis, kemiskinan dan lain-lain yang terjadi saat ini, hanya dapat dikurangi bahkan diatasi jika kualitas pendidikan lebih baik. Semua persoalan itu pada prinsipnya bersumber dari rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dialami bangsa ini. Dalam hal ini, peranan pendidikan memiliki signifikansi yang tinggi terhadap perbaikan masalah dan kemajuan bangsa ini. Jepang, Malaysia dan Singapura yang mengalami kemajuan bangsa berawal dari kebijakan pemerintah yang memihak pada pendidikan.

Hampir tidak ada dalam sejarah bahwa kemajuan suatu bangsa tidak diawali dari kemajuan pendidikannya. Hal inilah pentingnya kualitas guru sebagai salah satu elemen pendidikan yang memiliki tanggung jawab paling besar terhadap kemajuan kualitas pendidikan dan tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa. Dengan guru yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya dapat menciptakan sumber daya manusia (anak-anak didik yang berkualitas). Dengan sumber daya manusia yang berkualitas tentu dapat menjadikan masa depan bangsa lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa guru sebagai salah satu penentu masa depan bangsa.

Selama ini dijumpai beberapa permasalahan yang berkaitan dengan profesi guru antara lain sebagai berikut.

1. Gaji Guru

Dengan gaji guru yang sangat rendah, banyak guru yang mencari penghasilan sampingan yang pada akhirnya dapat mengganggu tugas pokoknya sebagai pendidik. Hal ini juga dapat disebabkan oleh perlakuan yang berbeda dari pemerintah yang tidak menempatkan pendidikan sebagai prioritas terdepan dalam proses kemajuan daerah / bangsa. Hal ini terbukti di suatu daerah yang telah memberi kesejahteraan kepada guru-guru dengan anggaran yang cukup memadai.

2. Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat yang menjadi hak guru seringkali kurang lancar karena terhambat birokrasi yang merepotkan. Bahkan tidak jarang seorang guru harus berkali-kali memperbaiki usulan kenaikan pangkat yang dapat menghabiskan tenaga, waktu dan biaya. Bahkan, ada guru yang "frustasi" karena karya ilmiah (sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat) yang sudah dibuat dengan susah payah dikembalikan dengan alasan tidak memenuhi kriteria karya tulis yang sebenarnya. Tidak jarang pula ada sebagian guru terpaksa "mengupah" atau membeli karya ilmiah orang lain dengan harapan karya itu memenuhi syarat yang telah ditentukan.

3. Rasa Aman dan Nyaman

Seringkali guru mengalami rasa kurang aman dalam menjalankan tugas karena mengalami perlakuan kurang adil (hanya guru-guru "yang menarik/disenangi" oleh kepala dan wakil saja yang diperhatikan) sehingga dapat mengganggu konsentrasinya dalam menjalankan tugas. Hal lain misalnya keadaan sekolah tampak buruk, sempit, genteng bocor, dan banjir seringkali membuat guru tidak betah dan tidak nyaman berada di sekolah.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sekolah yang sangat minim misalnya ruang perpustakaan (tidak dilengkapi dengan buku-buku yang bermutu dan bacaan-bacaan lain), laboratorium (hanya ada alat-alat peraga dan alat-alat praktikum "ala kadarnya"), dan tempat ibadah

(hanya disediakan ruangan yang kecil/sempit) sering membuat guru hanya dapat mengajar modal seadanya. Walaupun ada guru yang berinisiatif membuat atau menyediakan sendiri sumber dan alat pembelajaran, tetap saja itu hanya sebagian kecil dalam dunia pendidikan. Hanya guru yang benar-benar ikhlas yang mau melakukan hal itu.

5. Kurang Profesional

Masih banyak dijumpai guru-guru yang belum memiliki kompetensi yang memadai di bidangnya bahkan ada guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya alias "salah kamar". Hal ini berkaitan dengan kualitas proses pembelajaran saat seorang guru memperoleh pendidikannya.

Berkaitan dengan kelihat hal di atas, adalah suatu hal yang patut kita hargai dengan hadirnya Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang Guru (dan Dosen) pada tanggal 6 Desember 2005. Dengan disahkannya Undang-Undang itu maka prospek guru akan menjadi pilihan bergengsi bagi orang tua pada masa depan karena profesi ini akan memberikan prospek yang lebih baik. Setidaknya ada 17 hal pokok dalam Undang-Undang itu yang bertalian dengan kesejahteraan guru. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme guru semakin meningkat.

Berkaitan dengan Undang-Undang Guru itu, seorang guru juga harus memiliki persyaratan-persyaratan di antaranya : kualifikasi akademik D IV atau S1, kompetensi baik pedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesional) dan sertifikasi pendidik. Hal ini berimplikasi bahwa seorang yang ingin menjadi guru harus berlatar belakang kependidikan misalnya FKIP atau STKIP. Lembaga-lembaga inilah yang akan menjadi pilihan penting bagi mereka yang memilih profesi guru karena profesi guru akan lebih baik dari sebelumnya.

Selanjutnya, seorang guru juga mempunyai hak-hak dengan menjalankan tugasnya. Hak-hak itu berhubungan erat dengan penghasilan, yaitu gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, dan tunjangan profesi (satu kali gaji pokok dari APBN/APBD), tunjangan fungsional (subsidi dari APBN/APBD), tunjangan khusus (satu kali gaji pokok, berhak atas rumah dinas pada daerah khusus), kesejahteraan tambahan (tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan, pelayanan kesehatan,

kemudahan bagi anak-anak guru, dan lain-lain). Selain itu, terdapat pula hak lain guru di daerah khusus, yakni kenaikan pangkat rutin secara otomatis, naik pangkat istimewa satu kali, dan perlindungan khusus.

Dari uraian di atas tampak bahwa profesi guru ini telah menjadi perhatian pemerintah. Apabila Undang-Undang Guru (dan Dosen) itu dapat dilaksanakan dengan baik, kualitas pendidikan nasional diharapkan akan lebih baik pula, sehingga dapat mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunai Darussalam. Pada tahun 2001 misalnya, Indonesia menempati posisi ke-109 dari 173 negara di dunia. Kehadiran Undang-Undang Guru (dan Dosen) itu dapat menciptakan lembaga-lembaga yang memproduksi guru-guru, seperti FKIP dan STKIP memiliki andil terdepan.

Lembaga-lembaga itu diharapkan dapat dikelola dengan baik dengan memprioritaskan manajemen modern sebagai respon terhadap disahkannya Undang-Undang Guru. Hadirnya Undang-Undang itu juga menuntut kinerja lembaga-lembaga pendidikan menjadi lebih baik dalam menciptakan calon-calon guru yang kompeten dan profesional. Pada akhirnya, tidak mustahil profesi guru ke depan akan menjadi salah satu profesi pekerjaan yang memiliki prospek lebih baik dan menjadi dambaan orang tua karena adanya jaminan kesejahteraan dan kemuliaan dalam tugasnya.

UN:

Problem Standar Kelulusan¹⁰⁴

Tujuan ideal-filosofis dilaksanakan Ujian Nasional (UN) di sekolah/madrasah, barangkali, adalah untuk mengevaluasi kualitas pendidikan nasional setiap tahun, dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pendidikan di depan. UN juga dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat kualitas pendidikan nasional sebagai bahan perbandingan dengan kualitas pendidikan negara lain, seperti dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara dan ASEAN.

Ujian Nasional (UN) dapat pula digunakan untuk melihat pada level apa prediksi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia

¹⁰⁴Tulisan penulis yang berjudul: *Ujian Nasional dan Standar Kelulusan*, pernah dimuat dalam *Majalah Rukun Umat*, Edisi 11/Tahun II/April 2009.

terkini dan ke depan. Tujuan ideal-filosofis UN tersebut sangat bagus karena memang untuk mengevaluasi kualitas pendidikan nasional. Hanya saja, permasalahannya adalah proses pelaksanaan UN belum menunjukkan indikator yang memungkinkan tercapainya tujuan ideal-filosofis UN, dimana dalam tataran praktis masih terdapat sejumlah kelemahan mendasar. Menurut hemat penulis, persoalan-persoalan ini disebabkan standar kelulusan UN (Standar Kelulusan UN 2009=5,5) tidak berjalan simetris dengan kualitas pendidikan rata-rata nasional yang diperoleh dari proses pembelajaran.

Pelaksanaan UN 2009 di Kota Palembang misalnya, dimulai pada 20 April 2009 dan berakhir satu minggu kedepan, telah dicerai oleh buruknya system manajemen UN. Dari informasi media massa lokal, *Sumatera Ekspres* (20/4/2009), dari ratusan koli kotak berisi soal UN SMA, MA dan SMK untuk wilayah Kota Palembang, ditemukan bahwa kebanyakan koli sudah dibuka. Koli atau kotak berisi soal asli, soal susulan, lembar jawaban ujian (LJU), amplop kosong, dan kaset soal bahasa Inggris (*listening*) ada yang sudah dibuka. Sub-rayon tingkat MA, melakukan hal serupa. Hampir semua sub-rayon tingkat SMA berjumlah 19 dan 3 sub-rayon tingkat MA melakukan hal serupa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Tim Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas UN belum terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, dari informasi yang terdapat indikasi bahwa "kunci jawaban banyak yang telah beredar beberapa jam sebelum ujian dimulai".

Mengingat adanya respons negatif dan sinis dari sejumlah kalangan masyarakat terhadap pelaksanaan UN 2009 yang begitu santer dan hamper terjadi tiap tahun, sejak UN dilaksanakan empat tahun lalu. Seharusnya, pihak yang berwenang dan berkompeten terhadap perbaikan kualitas pendidikan nasional menuju peningkatan kualitas generasi muda bangsa sehingga bias mereka berkompetitif di era global, segera melakukan introspeksi atau evaluasi mendasar terhadap buruknya pelaksanaan kualitas UN, agar kesalahan yang sama betul-betul tidak terulang lagi pada masa datang.

Namun, dari kasus pelaksanaan UN 2009, dapat diambil beberapa pelajaran penting dalam upaya menuju perbaikan kualitas pendidikan nasional ke depan. *Pertama*, pelaksanaan UN 2009 dan tahun-tahun sebelumnya masih sarat dengan kelemahan serius, bahkan kecurangan yang terkesan adanya unsur kesengajaan.

Terdapat fakta primer dan data sekunder yang memperkuat argument ini. Pihak eksekutif pendidikan nasional terkesan "tutup mata atas kecurangan-kecurangan yang ada. Di lapangan memperlihatkan bahwa banyak sekolah/madrasah sebetulnya merasa "dipaksakan untuk mengikuti UN, karena UN dengan standar kelulusan yang masih terlalu tinggi (UN 2009 standar kelulusan 5,3 naik menjadi 5.5)".

Bagi banyak sekolah/madrasah di kota-kota besar di Indonesia pun mungkin sulit mencapai angka standar kelulusan UN sebesar 5.5. Herannya, berkaca dari pelaksanaan UN pada tahun lalu, banyak siswa memperoleh hasil ujian UN diluar dugaan, padahal mereka berasal dari sekolah/madrasah pada kualitas rata-rata atau dibawahnya. Hasil UN mereka ada yang memperoleh 9 bahkan ada 10. Adapula, seorang anak paling pintar dikelas ternyata tidak lulus UN. Ketika mereka mengikuti seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri/Universitas/Institut, ternyata mayoritas dari mereka pun mayoritas tidak lulus alias tidak masuk seleksi. Seharusnya, ada korelasi positif antara hasil UN dengan tingkat kelulusan masuk perguruan tinggi negeri. Fakta menunjukkan sebaliknya, ada apa dengan UN?

Kedua, berbagai kasus kelemahan dalam pelaksanaan UN, berindikasi bahwa proses pembelajaran disekolah/madrasah pada umumnya belum mampu mengikuti standar kelulusan UN sebesar 5.5 tersebut. Hal ini disebabkan, proses pembelajaran di banyak sekolah/madrasah memang masih belum memadai, baik dilihat dari aspek *human resources*, fasilitas, infrastruktur dan kualitas pembelajaran. APBN 20% untuk sektor pendidikan (Depdiknas dan Dep. Agama) memang telah tersedia dan disetujui pemerintah. Tetapi, hal itu baru dimulai tahun lalu (2008) dan tentunya tidak serta-merta dapat meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan merata. Proses pelaksanaan program sertifikasi guru pun misalnya terkesan sangat lamban dan mekanisme serta kinerja birokrasi yang terkesan berbelit-belit.

Ketiga, sistem UN yang tidak memihak pada kebanyakan sekolah/madrasah/siswa karena tidak realistis. Disadari atau tidak, hal ini telah memberi dorongan terhadap tumbuhnya tindakan *a moral* dalam dunia pendidikan, berupa perilaku kecurangan tersengaja dan terkondisi yang dilakukan para pelaksana UN, termasuk dilakukan guru

dengan membantu menjawab item-item pertanyaan pada soal. Guru yang sibuk anak didik yang santai. Ini proses pembodohan dan mendidik anak-didik menjadi malas. Padahal, kualitas pendidikan nasional bukan selalu diukur dengan angka-angka tetapi dikedepankan dengan pentingnya kualitas kepribadian, moral, budi-pekerti dan akhlak-bertakwa, atau menciptakan insan beriptek dan berimtak, sebagai cita-cita luhur pembangunan pendidikan nasional. UN diharapkan dapat mendorong berbagai elemen, seperti: pemerintah, para guru, staf-administrasi, orang tua/masyarakat, dan anak didik untuk menjunjung tinggi dan menjaga nilai-nilai dan cita-cita luhur tersebut. Bukan justru sebaliknya, pelaksanaan UN cenderung dan berpotensi melakukan "pembobongan publik, dengan melakukan kecurangan-kecurangan terencana padahal sangat berbahaya bagi generasi masa depan bangsa". Anak didik akan jadi cerdas, berkepribadian, mandiri, berketrampilan, dan bermoral-berakhlak bila totalitas iklim pendidikan mendorong mereka ke arah pengetahuan, perilaku dan sikap yang mengedepankan kejujuran dan transparansi dalam berbagai pergaulan dan iklim edukatif lainnya.

Dampaknya pelaksanaan UN, dengan sengaja atau tidak sengaja, telah dilakukan dengan cenderung mengedepankan formalitas. Angka tertinggi menjadi ukuran keberhasilan UN, bukannya bagaimana proses memperoleh angka-angka dan makna terkandung. Sekedar ilustrasi, bila seorang anak didik memperoleh hasil UN rata-rata 9-10 tetapi ketika ikut ujian masuk universitas negeri tidak lulus, maka nilai 9 maknanya kurang berarti baginya; bahkan nilai 9 telah menjadi beban dan dapat saja berdampak pada "frustasi". Ternyata nilai 9 juga tidak bermakna apa-apa dalam merancang cita-cita dan masa depan. Atau, seorang anak tamatan SMA/MA ikut tes kerja di perusahaan atau instansi pemerintah karena lulus nilai bahasa Inggris 9, tetapi ketika diwawancara dalam bahasa Inggris oleh pihak perusahaan ternyata tidak bisa apa-apa alias tidak lulus, karena nilai 9 UN diperoleh dari kunci jawaban. Nilai 9 bahasa Inggris bagi dia tidak bermakna apa-apa. Lalu, apa makna UN bagi mayoritas anak-didik sesungguhnya, untuk melanjutkan studi ke PT, untuk cari kerja demi masa depan?

Keempat, pelaksanaan UN, disatu sisi, dipastikan membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat besar; disisi lain, kualitas UN diragukan, yakni perlu adanya evaluasi serius terhadap proses pelaksanaan dan standar pelaksanaan UN. Kelemahan yang

menonjol dalam pelaksanaan UN adalah terlalu tingginya standar UN (5,5) bagi kebanyakan sekolah/madrasah. Padahal, kualitas sekolah/madrasah di kota-kota dengan daerah pedesaan dan terpencil tidaklah sama. Hal ini disebabkan proses pembelajaran di sekolah/madrasah di kota-kota dengan daerah pedesaan dan terpencil tidaklah sama. Hal ini disebabkan proses pembelajaran di sekolah/madrasah belum memadai. Bila kenyataannya memang demikian, pemerintah tidak ada salahnya memikirkan dan mengevaluasi kembali tentang akurasi aplikasi sistem standar kelulusan UN yang terlalu tinggi (5,5) dan cenderung tidak realistis dengan kualitas proses pembelajaran. Beberapa sesungguhnya standar UN yang tepat berdasarkan hasil riset dilapangan tentang proses dan hasil UN tahun sebelumnya. Bila standar UN terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan standar kualitas pembelajaran, maka kecurangan-kecurangan dalam proses pelaksanaan UN akan tinggi. Tetapi, bila sebaliknya standar UN yang realistis dan sejajar dengan kualitas proses pembelajaran maka kecurangan-kecurangan pelaksanaan UN akan rendah. Jadi, sangat mungkin kelemahan, kecurangan dan adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan UN bersumber dari Standar Kelulusan UN tersebut yang tidak realistis.

Mengingat tantangan ke depan bagi generasi/anak-anak bangsa salah satunya adalah globalisasi yang ditandai dengan derasnya kemajuan sains-teknologi dan transparansi hampir tanpa batas. Maka, SDM anak bangsapun harus dipersiapkan seoptimal mungkin untuk merespons dan menjawab kebutuhan bangsa Indonesia ke depan, agar bisa kompetitif dalam segala bidang menuju bangsa yang maju (*developed country*). Salah satu, nilai identitas yang selalu diperjuangkan dan dijaga oleh *founding fathers* adalah pentingnya menegakkan nilai kejujuran dan kegigihan/kerja keras dalam berjuang (menuntut ilmu) yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan. Sistem UN seharusnya tidak hanya menargetkan standar angka-angka yang realistis tetapi juga harus mampu menumbuhkan dan mentransfer benih-benih dan nilai-nilai kejujuran pada generasi bangsa, sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia yang tetap terus berlanjut dan terjaga. Sistem UN tidak statis tetapi dinamis mengikuti dinamika realitas sosial, karenanya, sistem UN-pun dapat saja dievaluasi dan diperbaiki demi penyempurnaannya ke depan.

Pemberdayaan Pendidikan Multikultural¹⁰⁵

Terjadinya krisis sejak 1998 dan masih berlanjut hingga kini, tidak hanya telah menyenesngarakan masyarakat kebanyakan tetapi juga telah mengancam disintegrasi bangsa. Berbagai pihak terus mencari alternative solusi dengan perlunya menawarkan sejumlah pendekatan dari berbagai latar belakang disiplin keilmuan. Salah satu pendekatan itu adalah pentingnya mengembangkan dan memberdayakan pendidikan multikultural sebagai alternatif solusi jangka panjang terhadap multikrisis dalam bangsa. Tulisan ini mendiskusikan tentang pentingnya pemberdayaan pendidikan multicultural dalam masyarakat religious pada kasus Indonesia.

Pada prinsipnya, multikulturalisme mengakui dan melindungi keragaman budaya. Terkandung juga pengertian tentang pentingnya penyeteraan derajat dari kebudayaan berbeda-beda. Penekanan terletak pada pemahaman dan upaya untuk menggumuli, mempertanyakan, dan belajar dari pihak berbeda, serta hidup dalam konteks perbedaan sosial-budaya, baik secara individu maupun kolektif (*IJSCA*, 2002:85). Bangsa Indonesia, pada dasarnya, telah memperhatikan kulturalisme sejak berdirinya bangsa ini oleh founding fathers, bahkan jauh sebelum kemerdekaan.

Ketika itu, sebagai respons positif terhadap realitas kehidupan berbangsa, founding fathers merumuskan suatu dasar negara, yakni Pancasila, dengan lima sila kandungannya dan memiliki substansinya dalam upaya mengakomodir keragaman dalam suatu masyarakat multicultural. Dalam sila ke-1 Pancasila misalnya, agama ditempatkan sebagai pedoman penting dalam kehidupan masyarakat multicultural. Pada 28 Oktober 1928, sekitar 17 tahun sebelum kemerdekaan, Bung Tomo dan kawan-kawan, memproklamasikan Sumpah Pemuda yang substansinya mengandung pula respons terhadap pentingnya menjaga semangat multikulturalisme dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa dan tanah air.

Furnivall (1980:1-7) menggambarkan bangsa Indonesia sebagai suatu masyarakat majemuk atau multicultural. Ia mengatakan bahwa pada kehidupan politik, indikasinya jelas dari bangsa majemuk itu pada masyarakat Hidia Belanda, yakni tidak adanya kehendak bersama (*common will*). Orang-orang Belanda datang ke Indonesia

¹⁰⁵Tulisan penulis yang berjudul: "Pemberdayaan Pendidikan Multikultural di Indonesia", *Jurnal Conciencia*, Nomor 1 Volume III, Juni 2003, hlm. 26-35.

(Hindia Belanda) untuk bekerja tetapi mereka tidak tinggal menetap di Indonesia. Mereka melihat persoalan kemasyarakatan, politik, ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak sebagai warga negara melainkan sebagai kapitalis. Sama halnya dengan orang Timur Asiang, seperti halnya orang Cina sebagaimana halnya orang Belanda datang ke Indonesia hanya untuk kepentingan ekonomi. Kehidupan orang pribumi (indigenous) tidak utuh pula, yakni hanya sebagai pelayan di negerinya sendiri. Terpilahnya masyarakat Hindia Belanda menjadi kelas-kelas, berdampak buruk terhadap penataan kehidupan berbangsa di kemudian hari, ketika bangsa mengalami kemerdekaan.

Pemahaman multikulturalisme haruslah diletakkan dalam konteks dan pada proporsinya sebenarnya. Jangan sampai ada salah satu pihak atau kelompok merasa dirugikan atau paling terdapat kelompok tertentu diprioritaskan tetapi sesungguhnya penuh diskriminatif. Misalnya, hubungan mayoritas-minoritas dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia mesti ditempatkan pada posisi yang proporsional dan berkeadilan dalam berbagai hal. Kasus RUU Sisdiknas 2003 patut menjadi perhatian, betapa multikulturalisme belum dipahami sepenuhnya oleh berbagai totalitas elemen masyarakat. Terlepas dari reformasi pihak legislatif sarat dengan kepentingan politik, pihak atau kelompok umat Islam-mayoritas telah sangat dirugikan selama proses persidangan DPR menuju pengesahannya. Padahal, dilihat dari perspektif hitoris, politik, sosiologis dan politis, umat Islam memiliki andil signifikan terhadap berdirinya bangsa ini. Madjid (1995:69-88) mengungkapkan, karena jumlah penduduk umat Islam begitu besar (90 persen), umat Islam Indonesia dengan abash dapat disebutkan sebagai bangsa muslim walaupun bukan negara Islam (Islamic State). Kemanapun bangsa Indonesia akan berdampak positif bagi umat Islam Indonesia dan kemunduran bangsa Indonesia akan berdampak negatif kepada umat Islam Indonesia.

Pentingnya multikulturalisme bagi suatu bangsa keterkaitan erat dengan pembinaan nasionalisme. Berbagai kondisi actual kehidupan berbangsa terkinimerupakan indikasi penting tentang proses kerapuhan nasionalisme. Nasionalisme dapat dikatakan sebagai formalisasi ide-ide besar tentang identitas sebuah komunitas, bukan sebuah ideology memiliki perangkat tetap. Amalik (2002: 164-177) mengungkapkan, betapapun nasionalisme tampil faktual karena menempel menurut kontraposisi pada berbagai bentuk eksploitasi

antar manusia dan kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity). Nasionalisme sesungguhnya peristiwa lahir atau dekat dengan konteks. Konteks dimaksudkan disini, yakni suatu tindakan penjajahan atau tindakan kejahatan terhadap kelompok atau bangsa lain, atau oleh suatu pemerintahan terhadap rakyatnya dalam kasus multibangsa, misalnya pada eks negara Yugoslavia, Filipina, Indonesia, dan lain-lain. Hal ini merupakan isu strategis yang dapat memberikan tempat berkembang biaknya ide-ide tentang nasionalisme.

Pengembangan Pendidikan Multikultural

Diungkapkan Wahono (2002: 91), pendidikan dipandang sebagai proses transfer nilai-nilai dan pengetahuan dari pendidik ke anak didik. Pendidik dipandang lebih luas dari sekedar pengajaran, apalagi pengajaran dilakukan melalui sistem kelas. Reddy (1985: 32-33) mengungkapkan, pendidikan merupakan belajar (*learning*), pengajaran (*instruction*), dan komunikasi (*communication*). Pendidikan, dalam implikasinya, dapat dikatakan sebagai perubahan, transformasi, realisasi dan melengkapi. Pendidikan, dalam analisis formal, bermakna menjadi (*becoming*) dan tumbuh (*growth*), perubahan kesadaran dan subordinasi dari senses ke psyche. Dikatakan Reddy, segala sesuatu (*everything*) dari aktivitas kehidupan manusia dapat dikatakan sebagai pendidikan.

Al-Munawar (2002: 6) mengungkapkan, secara mikro, peranan pendidikan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah sebagai proses belajar mengajar yang meliputi transfer of knowledge, transfer of methodology, transfer of value. Fungsi pendidikan sebagai transfer of knowledge dapat dilihat dari teori human capital bahwa pendidik dipandang sebagai barang investasi berupa penyiapan tenaga kerja dan sekaligus pembinaan sains pengetahuan dan sains teknologi. Fungsi pendidik sebagai transfer of methodology bahwa pendidikan senantiasa penting menghasilkan metode-metode baru dalam mendukung human capital yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zamannya. Fungsi pendidikan sebagai transfer of value bahwa tujuan pendidikan mementingkan keseimbangan penguasaan kognitif, efektif, dan psikomotor di dalamnya termasuk nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia serta transformasi tata nilai yang mendukung proses industrialisasi dan aplikasi teknologi, misalnya menghargai waktu, disiplin, etos kerja, kemandirian, kewirausahaan, dan lain-lain.

Fungsi pendidikan sebagai human capital, pada dasarnya, sebagai upaya jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan manusia dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan kehidupannya. Maju mundurnya suatu bangsa tergantung sumber daya manusia dari proses human capital melalui pendidikan. Krisis bangsa, dalam berbagai dimensinya, tidak terlepas pula dari buruknya kondisi sumber daya manusia bangsa ini. Penelitian World Economic Forum (1995) terhadap 48 negara dalam upaya mengukur SDM dari tiga aspek. Dari aspek kualitas SDM, Indonesia menempati ranking: ke 37 (kualitas hidup), ke 37 (kualitas pendidikan), ke 35 (kualitas Kerja), dan ke 32 (kualitas etos kerja). Dari aspek kualitas manajemen, Indonesia menempati ranking: ke 40 (produktivitas), ke 44 (entrepreneurship), ke 35 (efisien), dan ke 31 (pemerintahan). Dari aspek kualitas penguasaan IPTEK, Indonesia menempati ranking: ke 39 (penelitian dan pengembangan), ke 47 (SDM), dan ke 33 (manajemen teknologi) (Mastuhu, 2001: 1-10).

Selanjutnya, dilihat dari produktivitas pada 1985-1995 yakni: Indonesia (\$ 1.751), Malaysia (\$ 4.905), Thailand (\$ 3.527), Singapura (\$ 10.960), dan Philipina (\$ 2.326). Dilihat dari komposisi ketenaga kerjaan yakni: Lulusan SD (60 persen), lulusan SLTP (20 persen), lulusan SLTA (15 persen), lulusan Perguruan Tinggi (5 persen). Dilihat dari struktur lapangan kerja, yakni Pertanian (47,3 persen), perdagangan (16,6 persen), jasa (14,5 persen), dan industry (10,7 persen). Dilihat dari struktur penguasaan perusahaan, Indonesia menguasai modal sebesar 66,68 persen, sedangkan 98 persen perusahaan lainnya hanya menguasai modal 33,32 persen. Karena itu, kebanyakan usaha menengah kebawah adalah gurem. Hasil studi bank dunia menunjukkan sebanyak 40 persen tenaga kerja Indonesia tidak memiliki keahlian (Mastuhu, 2002: 1-100). Buruknya tingkat sumber daya manusia suatu bangsa dapat melemahkan daya kompetisi terhadap bangsa lain dalam berbagai aspeknya. Karena itu, pembenahan orientasi, dan kualitas pendidikan nasional merupakan langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM diharapkan. Lebih jauh, lemahnya SDM bangsa ini berimplikasi lemah pula SDM umat Islam sebagai mayoritas, yang seharusnya berperan terdepan dalam membangun bangsanya.

Secara filosofis, pengembangan pendidikan multicultural diharapkan tidak bertentangan dengan dasar filosofis berbangsa, Pancasila. Pancasila merupakan produk founding fathers yang

menghargai ke-bhinneka-an atau multikulturalistik dalam bingkai negara berketuhanan (sila ke-1), kemanusiaan (sila ke-2), persatuan (sila ke-3), musyawarah (sila ke-4), pentingnya keadilan (sila ke-5). Implikasi pentingnya nilai-nilai Pancasila bahwa bangsa ini akan menjadi kuat dan diperhitungkan bangsa lain apabila orientasi dan aplikasi pembangunannya merespons kebhinnekaan atau multikulturalistik. Multikulturalistik dapat berupa etnis, agama, adat-istiadat, bahasa, geografis, ras, dan lain-lain.

Secara substansi, tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan tentang Pancasila dan UUD 1945. Suatu hal menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 itu dalam aktualisasi pembangunan. Misalnya, perilaku KKN membawa keterpurukan dalam kehidupan berbangsa selama ini sebetulnya tidak dibenarkan oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diharapkan founding fathers. Terjadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu lebih dikarenakan kualitas SDM yang rendah dan tidak merata dalam proses pembangunan nasional. Terjadinya kesenjangan signifikan pembangunan di berbagai wilayah, baik antara Indonesia Barat, Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. Padahal, semangat multikulturalistik menghendaki adanya kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Kenyataannya menunjukkan sebaliknya, dimana banyak anak-anak didik di Jakarta ke sekolah diantar dengan mobil, anak didik di Irian Jaya (Papua) masih banyak pergi ke sekolah berjalan kaki ke sekolah tanpa bersepatu. Hal ini memperlihatkan kebijakan pembangunan kita belum terlalu memihak masyarakat multikulturalistik dalam arti sebenarnya, karena para pengambil kebijakan (policy makers) dan aparat pembangunan banyak belum berkualitas atau belum menyebar ke berbagai wilayah itu dalam proporsionalitasnya.

Selama ini, kenyataan memperlihatkan bahwa pendidikan berkualitas pada umumnya didapatkan di pulau Jawa, dengan kata lain banyak dinikmati oleh etnis Jawa. Disisi lain, kenyataan penguasaan ekonomi pada umumnya dikuasai oleh etnis Cina, yang dalam sejarahnya berasal dari daratan Cina, sementara itu, etnis pribumi cenderung menjadi penonton. Dilihat dari multikulturalisme, kenyataan demikian tidak dapat dibenarkan karena terdapat pihak (etnis pribumi) dirugikan. Spirit multikulturalisme mengiginkan tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan, terlebih etnis pribumi. Karena itu, multikulturalisme dapat ditafsirkan dengan luas berdasarkan

kebijakan pembangunan dalam berbagai sektornya. Multikulturalisme dapat tumbuh dan berkembang dengan subur dan sempurna sejalan dengan kebijakan pembangunan yang memihak masyarakat multikulturalistik diindikasikan dengan adanya clean governance, tegaknya supremasi hukum, dan lain-lain, sebagaimana dipesankan dalam amanat reformasi lima tahun lalu.

Kelemahan kebijakan pembangunan pada rezim sebelumnya mengindikasikan bahwa spirit multikulturalisme perlu dilakukan pembenahan. Pembenahan ditunjukkan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat multikulturalisme yang kuat dan terjaganya integrasi bangsa dikemudian hari. Belajar dari pengalaman masa lalu itu, adalah suatu tuntunan terhadap pentingnya pengembangan dan pemberdayaan pendidikan multikulturalisme dalam sistem pendidikan nasional. Akan tetapi, pendidikan multicultural akan dapat berlangsung dengan sempurna apabila tidak terdapat kesenjangan antara ideal curriculum dan actual curriculum. Ketika kenyataan kehidupan berbangsa terus tidak peduli dengan permasalahan multikulturalisme, berbagai permasalahan sosial dalam berbangsa dimensinya dapat muncul dengan sendirinya. Disinilah pentingnya pendidikan multicultural dikembangkan dalam pelaksanaan pendidikan nasional dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan, yakni sebagai kontribusi sosial jangka panjang terhadap perbaikan kehidupan berbangsa.

Seperti telah dikemukakan, pendekatan pendidikan multicultural merupakan upaya jangka panjang sebagai alternative solusi terhadap buruknya kondisi kehidupan berbangsa, yang kini sedang mengalami ancaman disintegrasi bangsa. Sejarah telah membuktikan bahwa pendidikan dapat mengubah nasib suatu negara menjadi negara maju dan terhormat. Jepang misalnya, pada tahun 1945 mengalami kehancuran akibat pemboman kota Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika. Tetapi, sejak itu, Jepang memfokuskan pembangunan SDM dengan mengirim putera-puterinya ke berbagai negara Eropa. Kini kita dapat melihat Jepang telah menjadi sebagai salah satu negara super-power dunia. Malaysia pun demikian, pada tahun 1970-1980-an banyak putera-puterinya belajar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia, kini negara jiran ini semakin mengalami kemajuan dalam berbagai bidang dengan menakjubkan, bahkan tidak sedikit putera-puteri bangsa kita kini menuntut ilmu ke sana.

Dalam upaya pengembangan pendidikan multikulturalisme, terhadap beberapa hal yang patut menjadi konsideran. Pertama, dari perspektif filosofi pemberdayaan pendidikan multicultural dalam konteks ke-Indonesiaan haruslah berdasarkan upaya pengembangan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional bertujuan meningkatkan kemampuan Iptek dan Imtak harus menjadi referensi pokok dalam meletakkan dasar filosofi pendidikan multikulturalisme. Pancasila dan UUD 1945 juga menghargai perbedaan, baik perbedaan etnis, budaya, bahasa, adat istiadat dan agama. Menghargai tidak hanya sebatas lisan tetapi dibuktikan dengan aktualisasi pembangunan nasional berdampak pembelaan terhadap keberbedaan itu. Keberadaan umat Islam Sebagai mayoritas misalnya merupakan kenyataan historis-sosiologis yang harus dihargai berdasarkan proporsinya sebagai mana perlunya menghargai eksistensi minoritas umat lainya. Kasus RUU Sisdiknas merupakan indikasi penting betapa permasalahan multikulturalisme belum belum memperoleh posisi secara wajar.

Kedua, dari perspektif substansi kurikulum, upaya pengembangan pendidikan multikulturalisme hendaklah dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat multikulturalistik. Berbagai potensi lokal (*local genius*) perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum lokal maupun nasional. Hal ini berpeluang dapat dilakukan mengingat berdasarkan UU No. 22/1999 suatu daerah dapat saja mengembangkan pendidikan di daerah-daerah dengan optimal dan penuh kreativitas. Namun, suatu hal menjadi catatan penting bahwa kualitas pihak legislatif, eksekutif, dan masyarakat merupakan hal yang paling menentukan terhadap pelaksanaan pendidikan multikulturalisme dalam tataran realitas.

Ketiga, keberhasilan pendidikan multikulturalisme terletak pada keadaan proses pembelajaran. Seorang pendidik, guru atau dosen tidak hanya dituntut memiliki tingkat penguasaan materi pelajaran dengan baik tetapi juga perlu memiliki kompetensi dalam mengaplikasikan teknik-teknik penyampaian materi pelajaran dengan tepat dalam proses pembelajaran. Mereka sedapat mungkin dapat menciptakan suasana demokratis melalui pendekatan *two ways communication* dengan menempatkan anak didik sebagai objek. Mereka dituntut pula dapat mengembangkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, keteladanan, berwawasan luas dan berkompentensi terhadap tugasnya.

Keempat, pemberdayaan lektur pelajaran agama. Bagi guru agama, perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas lektur pelajaran agama. Lektur pelajaran agama dimaksudkan yakni lektur bertalian dengan substansi-materi pelajaran agama disampaikan dalam proses pembelajaran agama di kelas. Mereka dipandang berkualitas hendaklah berwawasan luas dan senantiasa pentingnya meningkatkan penguasaan lektur keagamaannya. Mengingat perkembangan dunia pendidikan diharapkan sejalan dengan perkembangan masyarakat, meskipun dalam kenyataannya dunia pendidikan tidak dapat mengerjakannya seorang pendidik, termasuk guru agama, dituntut dapat meningkatkan lektur pelajaran agama yang inklusif.

Kelima, perlu meningkatkan keaktifan dan kreatifitas anak didik dalam proses pembelajarannya. Sebagaimana diungkapkan Brophy (Hamid, 2001:148-158) bahwa rendahnya penguasaan anak didik terhadap materi pelajaran dan daya nalar mereka merupakan dua hal penting yang patut menjadi perhatian. Mengingat, pada kenyataannya, banyak anak didik hanya menjadi Surface Learning Processor, di mana mereka hanya mampu menghafal, yang seharusnya tidak perlu menghafal, tetapi mereka diharapkan dapat memahami dan mengerti substansi materi diajarkan. Bila anak didik memahami dan mengerti, materi pelajaran agama, diperkirakan anak didik itu mampu merumuskan suatu pemahaman dan pengertian dengan bahasa mereka sendiri. Hal itu hanya mungkin terjadi apabila anak didik memiliki keaktifan dan kreativitas yang memadai karena proses pembelajaran berkualitas.

Dengan demikian, pendidikan multikulturalisme merupakan salah satu alternative solusi terhadap kehidupan berbangsa pada jangka panjang. Pendidikan multikulturalisme menghargai perbedaan dalam realitas kehidupan masyarakat multikultural seperti Indonesia. Pengembangan Pendidikan multikulturalisme perlu memperhatikan kenyataan historis-sosiologis bangsa Indonesia sebagai religious society. Hal ini berimplikasi bahwa pengembangan pendidikan multikulturalisme ke depan harus digali dari referensi pada bumi pertiwi bukan dari bangsa lain yang secara filosofis, sosiologis, dan historis kontradiktif. Rethinking terhadap nilai-nilai luhur Pancasila dipandang urgen dalam upaya menjadikannya nilai-nilai itu sebagai petunjuk dalam berperilaku bagi masyarakat multikulturalistik, karena, secara konseptual, Pancasila telah mengakomodir kepentingan bernegara bagi masyarakatnya.

Belajar dari pengalaman buruk dialami bangsa terkini, pendidikan multikulturalisme sepatutnya dapat dikembangkan dengan optimal sebagai upaya menuju pemberdayaan masyarakat multikulturalistik yang dapat menjamin keutuhan dan integrasi bangsa. Obsesi itu hanya dapat menjadi kenyataan apabila semua elemen masyarakat dari bangsa ini dalam perbedaannya menyadari status, peranan dan fungsinya masing-masing. Tanpa adanya kesadaran kolektif terhadap pemberdayaan masyarakat multicultural itu, dalam bentuk pengetahuan, sikap dan aplikatif, cita-cita dan tujuan pendidikan multikulturalisme akan kurang membekas dalam perilaku kehidupan berbangsa, bahkan tidak mustahil hanya menjadi utopia belaka. Hal ini berimplikasi bahwa pengembangan pendidikan multikulturalisme akan menjadi sukses apabila setiap elemen masyarakat multikulturalistik memperoleh perlakuan seharusnya dalam kebijakan pembangunan bangsa, baik dari aspek politis, cultural, ekonomi dan pendidikan.

Restrukturisasi 'IAIN' menjadi 'UIN'¹⁰⁶

Jika ditelaah seksama, perkembangan pendidikan tinggi Islam di tanah air, semisal IAIN, dari waktu ke waktu tampaknya telah mengalami kemajuan berarti. Disatu sisi, IAIN telah dipandang mapan oleh sebagian kalangan umat Islam. Disisi lain, keberadaan IAIN tampak belum berkembang secara optimal seperti diharapkan oleh tujuan pendidikan Islam. Dari perspektif sosiologis, suatu masyarakat sebagai *stakeholders* pendidikan senantiasa dinamis atau tidak statis di dalam memahami perkembangan sebuah lembaga pendidikan. IAIN sebagai suatu elemen masyarakat dituntut untuk mereformasi diri, agar konsep pendidikan Islam yang rahmatan lil-'alamain diharapkan dapat diaktualisasi, sebagai respons terhadap pemenuhan masyarakat (*social needs*) masyarakat muslim di tanah air. Dalam bab ini, didiskusikan tentang sekitar kemajuan IAIN selama ini masih dalam kategori 'parsial' yang perlu disempurnakan melalui kebijakan reformasi pendidikan tinggi Islam, berupa suatu

¹⁰⁶ Tulisan ini merupakan revisi tulisan penulis berjudul: 'Restrukturisasi IAIN Menjadi UIN', dimuat dalam *Sriwijaya Post* dalam dua edisi berturut-turut pada tahun 1993. Selanjutnya, penyempurnaan tulisan tersebut dilakukan dan dimuat dalam tulisan penulis: 'Reformasi Pendidikan Tinggi Islam: Urgensi Perubahan IAIN menjadi UIN bagi Masyarakat Sumatera Selatan', *Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam*. Editors: Toto Suharto, Munir, dan diterbitkan atas Kerjasama CORPUS (Circe of Raden Fatah Postgraduate Students dan Penerbit Global Pustaka Utama Jogjakarta, 2005, hlm. 23-43.

upaya perubahan kelembagaan, dari IAIN menjadi UIN, serta konsekuensi pentingnya perubahan kurikulumnya.

Restrukturisasi 'IAIN' menjadi 'UIN'

Pendidikan merupakan salah satu dari lima institusi pokok (*one of five basic institutions*) dalam suatu masyarakat. Kelima institusi ini adalah (1) keluarga, yang berfungsi menjaga dan membimbing generasi muda/anak didik agar menjadi mandiri; (2) ekonomi, yang berfungsi menghasilkan dan mendistribusikan barang-barang; (3) pemerintah, yang berfungsi memberi, mengatur, dan melindungi masyarakat; (4) agama yang bertugas menjawab permasalahan spiritualitas atau persoalan yang *unknownable*; dan (5) pendidikan yang berfungsi mendidik masyarakat.¹⁰⁷ Institusi pendidikan, karenanya, memiliki peranan strategis dan menentukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Dalam konteks ini, pendidikan dan prosesnya senantiasa dituntut up to date dengan perkembangan masyarakat yang dinamis. Ketika proses pendidikan kurang atau tidak paralel dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sering kali pendidikan memerlukan pembenahan atau kebijakan reformasi atau restrukturisasi kelembagaan.

Reformasi merupakan refleksi pemikiran untuk melakukan pembaruan dengan perubahan komprehensif suatu institusi pendidikan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang senantiasa dinamis. Reformasi pendidikan dapat berupa perubahan parsial maupun totalitas dari aktivitas pendidikan. Francis Wahono mengatakan bahwa pendidikan difahami sebagai proses pengalihan nilai-nilai dan pengetahuan dari pendidik ke peserta didik.¹⁰⁸

Ide tentang reformasi pendidikan di Indonesia telah terjadi sejak lama. Reformasi pendidikan dipandang sebagai suatu gerakan yang memiliki konteks sosio-historis –politik momental, sehubungan dengan lahirnya era reformasi yang menghendaki pemerintahan baru yang menggantikan pemerintahan orde baru. Karena itu, reformasi pendidikan merupakan suatu momentum mendasar dan berbeda dengan ide yang sama dengan era sebelumnya. Salah satu perbahan mendasar dari reformasi pendidikan dalam era reformasi ini adalah

¹⁰⁷ Dengan demikian tujuan institusi pendidikan adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (*social needs*).

¹⁰⁸ Francis Wahono, "Kekerasan dalam Pendidikan: Suatu Tinjauan Sosio-Ekonomi Didaktika", *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 9 Tahun III, 2002, hlm. 91-104.

lahirnya UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Reformasi pendidikan di Indonesia sebetulnya dimulai sejak lama, yaitu semenjak munculnya UU No. 2/1999 tentang Sisdiknas.

Kedua UU Sisdiknas itu telah memberikan perspektif baru yang revolusioner bagi perbaikan atau pembenahan sektor pendidikan, dimana pendidikan telah menjadi urusan public secara umum dengan mengurangi otoritas pemerintah, baik yang bertalian dengan kebijakan kurikulum, manajemen, dan berbagai kebijakan pengembangan institusi pendidikan itu sendiri.¹⁰⁹ Suatu hal yang krusial dalam reformasi pendidikan ini adalah bahwa dari pihak pimpinan institusi pendidikan, kolektif dan visi yang sama dalam proses reformasi pendidikan. Dengan ini reformasi pendidikan diharapkan dapat menghasilkan institusi dan lulusan (*out-puts*) yang potensial dan kompetitif.

Reformasi pendidikan pada dasarnya tidak terpisahkan dari keberadaan suatu masyarakat yang sifatnya dinamis. Pendidikan sebagai salah satu elemen masyarakat sedapat mungkin mengikuti perubahan dinamis pada masyarakat itu. Jika tidak, berarti pendidikan telah mengalami ketertinggalan dalam menjalankan fungsinya sebagai *the agent of social change*. Karena itu, suatu pembaharuan pendidikan atau reformasi pendidikan merupakan suatu hal yang wajar dalam kebijakan pendidikan suatu Negara. Pengalaman bangsa-bangsa Asia yang maju, seperti Jepang, Malaysia, dan Singapura lebih berhasil dikarenakan adanya reformasi pendidikan yang dilakukan bangsa itu. Disini jelas bahwa terdapat korelasi atau dampak yang kuat antara kemajuan pendidikan dengan kualitas SDM serta kemajuan suatu bangsa.

Kemajuan dunia saat ini tidak terlepas dari kemajuan pendidikan pada umumnya, terutama dalam sains dan teknologi dapat bermanfaat dan sekaligus mudharat bagi kehidupan manusia. Dikatakan bermanfaat, apabila produk sains dan teknologi dapat mempermudah kehidupan manusia, misalnya, penggunaan teknologi elektronik seperti radio, internet, *handphone*, *computer*, dan *tele-conference*. Dikatakan mudharat misalnya apabila produk sains dan

¹⁰⁹Peran publik dalam pendidikan ini dapat dilihat dalam Undang-Undang RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yakni pada Pasal 54 ayat 1,2, dan 3; dan Pasal 55 ayat 1,2,3,4,5 dan 6. Selanjutnya, lihat: (Undang-Undang No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Beserta Penjelasanannya, Citra Umbara, Bandung, 2003).

teknologi tersebut dimanfaatkan untuk berpihak kepada yang kuat, katakanlah untuk peperangan yang tidak hanya memusnahkan fisik-material, tetapi juga mengancam jiwa manusia, seperti di Irak dan Afganistan. Kendatipun demikian, negara mana saja di dunia ini akan maju apabila elemen pendidikan dapat dikedepankan dalam kebijakan pembangunannya, yang diharuskan dilakukan melalui sebuah reformasi pendidikan. Munculnya UU No. 2/1999 dan UU No. 20/2003 merupakan upaya reformasi pendidikan di tanah air dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, agar dapat berkompetisi dengan SDM bangsa lainnya.

Rendahnya kualitas SDM di Indonesia sebagai produk pendidikan berpengaruh terhadap lambannya bangsa kita keluar dari multi-krisis, terutama krisis sosial-ekonomi, yang terjadi sejak tahun 1998. Indikatornya rendahnya kualitas pendidikan nasional dapat dilihat pada tingkat prestasi siswa. Dalam skala internasional, berdasarkan Laporan Bank Dunia tahun 1992, studi *International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)* di Asia Timur telah memperlihatkan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD berada pada tingkat rendah. Rata-rata skor tes membaca untuk siswa SD, yakni 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia).

Anak-anak Indonesia kenyataannya hanya mampu menguasai 30 persen dari materi bacaan. Mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda. Hal yang sama, hasil studi *The Third International Mathematic and Science Study Repeat (TIMSS R)* tahun 1999 menunjukkan bahwa di antara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA dan ke-34 untuk Matematika. Majalah Asia Week menyampaikan, dari 77 universitas yang disurvei di Asia Pasifik, ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke 61, ke 68, dan ke 75.

Indikator selanjutnya, yang memperlihatkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, dapat dilihat dari data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*), yakni komposisi dari peringkat pencapaian

lahirnya UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Reformasi pendidikan di Indonesia sebetulnya dimulai sejak lama, yaitu semenjak munculnya UU No. 2/1999 tentang Sisdiknas.

Kedua UU Sisdiknas itu telah memberikan perspektif baru yang revolusioner bagi perbaikan atau pembenahan sektor pendidikan, dimana pendidikan telah menjadi urusan public secara umum dengan mengurangi otoritas pemerintah, baik yang bertalian dengan kebijakan kurikulum, manajemen, dan berbagai kebijakan pengembangan institusi pendidikan itu sendiri.¹⁰⁹ Suatu hal yang krusial dalam reformasi pendidikan ini adalah bahwa dari pihak pimpinan institusi pendidikan, kolektif dan visi yang sama dalam proses reformasi pendidikan. Dengan ini reformasi pendidikan diharapkan dapat menghasilkan institusi dan lulusan (*out-puts*) yang potensial dan kompetitif.

Reformasi pendidikan pada dasarnya tidak terpisahkan dari keberadaan suatu masyarakat yang sifatnya dinamis. Pendidikan sebagai salah satu elemen masyarakat sedapat mungkin mengikuti perubahan dinamis pada masyarakat itu. Jika tidak, berarti pendidikan telah mengalami ketertinggalan dalam menjalankan fungsinya sebagai *the agent of social change*. Karena itu, suatu pembaharuan pendidikan atau reformasi pendidikan merupakan suatu hal yang wajar dalam kebijakan pendidikan suatu Negara. Pengalaman bangsa-bangsa Asia yang maju, seperti Jepang, Malaysia, dan Singapura lebih berhasil dikarenakan adanya reformasi pendidikan yang dilakukan bangsa itu. Disini jelas bahwa terdapat korelasi atau dampak yang kuat antara kemajuan pendidikan dengan kualitas SDM serta kemajuan suatu bangsa.

Kemajuan dunia saat ini tidak terlepas dari kemajuan pendidikan pada umumnya, terutama dalam sains dan teknologi dapat bermanfaat dan sekaligus mudharat bagi kehidupan manusia. Dikatakan bermanfaat, apabila produk sains dan teknologi dapat mempermudah kehidupan manusia, misalnya, penggunaan teknologi elektronik seperti radio, internet, *handphone*, *computer*, dan *tele-conference*. Dikatakan mudharat misalnya apabila produk sains dan

¹⁰⁹Peran publik dalam pendidikan ini dapat dilihat dalam Undang-Undang RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yakni pada Pasal 54 ayat 1,2, dan 3; dan Pasal 55 ayat 1,2,3,4,5 dan 6. Selanjutnya, lihat: (*Undang-Undang No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Beserta Penjelasan*nya, Citra Umbara, Bandung, 2003).

1998, akan lambat diperbaiki (*recovery*), yang pada gilirannya akan berpengaruh negative terhadap daya kompetitif bangsa ditengah pergaulan internasional. Karena itu, pembenahan atau reformasi kualitas pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam, merupakan suatu jawaban yang harus dilakukan.

Reformasi pendidikan di Indonesia merupakan suatu kebutuhan masyarakat (*social needs*). Hal ini lebih disebabkan karena perlunya menyiapkan SDM berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa. Suatu bangsa yang akan mengalami kemajuan dan adapt kompetitif dengan bangsa lainnya apabila perhatian terhadap pendidikan merupakan salah satu prioritas. Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah menunjukkan bangsa ini belum menempatkan pendidikan sebagai salah satu perioritas dalam kebijakan pembangunannya. Hal ini juga terlihat dari masih rendahnya anggaran pendidikan nasional, buruknya infrastruktur, rendahnya kualitas pendidikan, kurangnya akses pendidikan dalam masyarakat, dan lain-lain. Suatu bangsa tidak dapat berdiam diri dengan membiarkan kualitas pendidikannya terpuruk. Bila hal ini terjadi, berarti bangsa itu akan mengalami ketergantungan dengan bangsa-bangsa lain yang tidak jarang menimbulkan suatu hubungan yang tidak berimbang antara negara-negara maju sebagai superordinate dan negara-negara berkembang atau keterbelakang, sebagai subordinate, baik dalam bidang sosial-politik, ekonomi, keamanan, dan budaya.

Bertitik tolak dari kenyataan diatas, dengan melihat kecenderungan-kecenderungan intensnya perubahan masyarakat dunia, setuju atau tidak setuju, hal itu harus direspons dengan arief dan bijaksana oleh IAIN. Atas dasar itu pula reformasi pendidikan tinggi Islam (seperti IAIN) agaknya mesti dilakukan. Berbagai elemen masyarakat, pemerintah, pimpinan perguruan tinggi, dan lain-lain, sedapat mungkin memiliki kesamaan tujuan, visi, misi, dan langkah-langkah strategis dalam menuju suatu reformasi pendidikan yang menjadi kebutuhan masyarakat secara totalitas, baik dalam konteks sosial-ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dilihat dari berbagai aspek, IAIN Raden Fatah Palembang patut menjadi perhatian bersama, untuk maju melangkah melakukan reformasi kelembagaan menjadi UIN, agar menjadi perguruan tinggi Islam negeri yang relevan dengan zamannya.

Perubahan IAIN menjadi UIN diharapkan dapat merespon beragam problematika sosial dan keagamaan pada masyarakat Muslim. Seperti diungkapkan Papadopoulos¹¹² bahwa terdapat sejumlah pemikiran tentang pengembangan konteks pendidikan ke depan yang berdampak pada sosial, ekonomi, dan politik, sebagai-berikut:

Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi membuat bahan-bahan ajar yang harus disampaikan dalam proses pendidikan menjadi lebih banyak, dikhawatirkan berdampak bagi stagnasi pengembangan ilmu dan peradaban, terutama pada perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus mampu memberikan jaminan pemberian penghargaan dan insentif yang memadai dalam pengembangan ilmu dan teknologi, yang diharapkan temuan-temuan baru dalam bidang sains dan teknologi terus bertambah agar peradaban terus meningkat.

Kedua, perkembangan teknologi akan terjadi secara terus-menerus dalam percepatan yang tinggi pada negara-negara berbeda, yang dapat berdampak pada perkembangan ekonomi melalui industri dan jasa. Pendidikan harus mampu menjembatani antar sektor kerja dengan kemajuan ilmu dan teknologi tersebut, melalui updating skill dan keterampilan serta berbagai temuan baru yang harus dikuasai oleh pekerja yang bertalian dengan perkembangan sains dan teknologi.

Ketiga, perubahan demografis diberbagai negara berdampak pada distribusi penduduk berdasarkan usia. Negara-negara terbelakang akan memiliki indeks kelahiran yang tinggi, karena itu, angka usia sekolah dasar akan tinggi. Di negara-negara maju, angka kelahiran cenderung menurun karena di negara-negara maju akan mengalami kekurangan usia angkatan kerja, dan angka pensiun konstan atau meningkat serta membutuhkan jaminan sosial dan kesehatan. Negara-negara maju akan terus meningkatkan pendapatan negaranya melalui sektor pajak dari sektor usaha jasa, agar tetap dapat memberikan jaminan bagi mereka. Pada saat yang sama, negara maju akan tergantung pada negara berkembang atau negara terbelakang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Karena itu, negara-negara berkembang harus mendesain out-puts pendidikannya agar memasuki pasar kerja di era global¹¹³, dengan memiliki *skill* dan

¹¹² Seperti dikutip Dede Rosyada, 'Paradigma Pendidikan Demokrasi...', *op. cit.*, hlm. 6-8.

¹¹³ Dalam mendefinisikan globalisasi, terdapat dua pendekatan, yakni pendekatan kapitalisme

keterampilan, bahasa komunikasi global, dan memahami kultur negara-negara yang menjadi tujuannya.

Keempat, negara-negara menunjukkan saling tergantung satu sama lainnya, baik dalam bidang ekonomi, politik, sains dan teknologi, dan lain-lain. Pendidikan harus mampu merespons kecenderungan global tersebut, mampu mengarahkan sikap dan perilaku multikulturalisme dalam mempersiapkan pasar tenaga kerja pada negara-negara tujuannya.

Kelima, perkembangan sains dan teknologi yang berdampak pada kemajuan sektor ekonomi dengan keterbukaan secara global, akan berdampak terhadap terbentuknya masyarakat dunia baru. Pendidikan harus mampu mendesain masyarakat tersebut sebagai masyarakat humanis, akrab dengan lingkungan, menjaga stabilitas ekosistem, anti obat terlarang, dan senantiasa hidup sehat.

Berdasarkan kenyataan diatas, pada prinsipnya, keterakitan bangsa ini dengan pendidikan nasional, menghadapi dua hal mendasar. Secara internal, pendidikan nasional sedang melakukan penataan berarti, seperti makna terkandung dalam UU Sisdiknas No. 2/1999 dan UU Sisdiknas No. 20/2003. Secara eksternal, bangsa ini juga ketinggalan jauh dalam prestasi pendidikan, terlebih prestasi pendidikan tinggi Islam¹⁴ pada umumnya dibandingkan dengan negara-negara tetangga, yang pada akhirnya mempengaruhi SDM dan daya kompetitif bangsa ini. Disinilah, esensi reformasi pendidikan perlu dilakukan, termasuk perlunya reformasi pendidikan tinggi Islam, seperti IAIN. Perubahan IAIN menjadi UIN merupakan reformasi pendidikan tinggi Islam yang telah menemui momentumnya patut

global dan pendekatan keterhubungan internasional. Dalam yang pertama, keterhubungan atau relasi sosialnya tidak lagi didasarkan atas sistem negara-bangsa. Sementara itu, dalam yang kedua, keterhubungan sosialnya masih didasarkan pada sistem negara-bangsa. Baca: Muhammad Zaki Hussein, "Globalisasi dan Nasib Negara-Bangsa", *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 10, Tahun II, 2002, hlm. 103-117.

¹⁴Patut disyukuri bahwa hingga kini jumlah perguruan tinggi Islam sudah banyak mengalami kemajuan-kemajuan. Perguruan tinggi Islam negeri misalnya sudah menjadi 47. Sebanayak 12 diantaranya berbentuk insitut, 33 berbentuk sekolah tinggi dan 3 berbentuk universitas. Jurusan yang diselenggarakan perguruan tinggi Islam pun semakin bertambah jumlahnya. Berdasarkan data statistik tahun 2002, tercatat sebanayak 99 jurusan diseluruh IAIN dan UIN. Jumlah mahasiswa pada tahun akademik 2001/2002 diseluruh PTAIN sebanayak 80.694 orang dan dosen sejumlah 6.778 orang. Hampir seluruh IAIN dan UIN telah memiliki Program Strata 2 dan beberapa diantaranya memiliki Program Strata 3. Terdapat 1 STAIN memiliki program Strata 2 dan beberapa diantaranya sedang mempersiapkan Program Strata 2. Lihat: (Swara: Media Informasi DitpertaIs, Nomor 12 Tahun II, 31 Juli 2004).

menjadi perhatian semua elemen masyarakat. Hal ini dapat dipandang pula sebagai suatu simbol kemajuan perguruan tinggi Islam di tanah air yang selama ini dipandang belum dikelola dengan optimal.

Ide/Gagasan Perubahan IAIN ke UIN

Patut diungkapkan bahwa IAIN Raden Fatah Palembang yang didirikan pada awal tahun 1960-an, tertua ke-4, telah memberi kontribusi positif terhadap proses pencerdasan masyarakat Sumatera-Selatan khususnya, bangsa Indonesia pada umumnya, yakni dari segi pendidikan Islam dan dakwah. Sejak berdirinya hingga pertengahan 2004, IAIN Raden Fatah Palembang telah meluluskan sekitar 12.000-an orang sarjana keagamaan¹¹⁵ yang berkiprah di berbagai institusi, baik instansi pemerintah maupun swasta.

Meskipun demikian, IAIN Raden Fatah Palembang dituntut untuk terus dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan zaman yang senantiasa dinamis. Dalam perjalanannya, selain prestasi yang telah dicapai, tidak sedikit pula kritik yang harus diterima IAIN dengan lapang dada sebagai landasan menuju kemajuannya di masa depan. Kritik-kritik yang dilontarkan berbagai kalangan tersebut merupakan *entry-points* yang perlu menjadi bahan pertimbangan, terutama dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan masa depan, bertalian dengan gagasan perubahan IAIN menjadi UIN Raden Fatah Palembang.

Kritik pada dasarnya sangat identik dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi IAIN dalam merespon dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, IAIN setidaknya mendapat kritik dalam sejumlah hal :

Pertama, permasalahan berhubungan dengan kesulitan IAIN untuk mengembangkan fakultas yang diinginkan masyarakat. Orientasi akademis di IAIN masih perlu diperjelas. Disatu sisi, IAIN dituntut untuk merespons perkembangan keinginan masyarakat yang tercermin dalam tawaran fakultas (program/jurusan); di sisi lain, IAIN juga harus menghadapi sulitnya mengembangkan fakultas-fakultas.

¹¹⁵Laporan Bagian Administrasi Kemahasiswaan (BAK) IAIN Raden Fatah Palembang, 2004.

Sulitnya mengembangkan fakultas-fakultas tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari *historical background* berdirinya IAIN. Berdirinya IAIN lebih dikarenakan politis. Jika berdirinya UGM sebagai penghargaan bagi kalangan nasionalis, IAIN Jogjakarta merupakan penghargaan bagi kalangan Islam politik atau santri. Wujud kelembagaan IAIN itu sendiri lebih berorientasi ke Timur Tengah, terutama ke Mesir dan pusat keilmuannya Universitas Al-Azhar, dan tidak ke Barat. Oleh karena itu, fakultas dan gaya kerjanya juga berorientasi ke Al-Azhar, adanya fakultas Syari'ah, Ushuluddin, Dakwah, Tarbiyah, dan Adab.¹¹⁶ Hal ini menunjukkan masihnya orientasi akademik dan orientasi manajemen, yang terlalu menjadikan agama sebagai obyek akal semata.¹¹⁷ Orientasi pengembangan akademik IAIN selama ini lebih mempelajari sains agama (*al-'ulum al-naqliyah*). Ke depan, UIN diharapkan mampu mengembangkan keduanya, baik sains agama maupun sains pengetahuan dan teknologi (*al-'ulum al-aqliyah*) secara integral.

Kedua, kemandegan perkembangan fakultas itu identik dengan kemandegan tradisi keilmuan di IAIN. Tidak berkembangnya fakultas tersebut menunjukkan adanya stagnasi IAIN, suatu kenyataan bukan tradisi identitas perguruan tinggi di negara maju. Hal ini, di satu sisi, berhubungan erat dengan kemandegan tradisi keilmuan di IAIN; dan di sisi lain, bertalian dengan kekakuan aturan yang telah menjadi dogma.¹¹⁸

Aturan-aturan formal selama ini hanya masih kemungkinan IAIN untuk mengembangkan tradisi keilmuan Islam klasik yang parsial, seperti diungkapkan dalam banyak analisis, dan belum memungkinkan memberi kesempatan luas untuk mengembangkan tradisi keilmuan Islam secara utuh, seperti pernah diterapkan pada periode klasik, yang menghasilkan para ilmuan Islam yang handal-totalitas. Padahal, baik sains agama maupun sains pengetahuan dan teknologi merupakan persyaratan utama dalam memasuki kehidupan modern.

¹¹⁶A. Qodry Azizy, "Mengembangkan Struktur Kefakultasan IAIN", dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (Eds.), *Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Departemen Agama RI, 2000, hlm. 61-85.

¹¹⁷M. Athol Mudzar, "Kedudukan IAIN sebagai Perguruan Tinggi", dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (Eds.), *Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hlm. 61-85.

¹¹⁸A. Qodry Azizy, "Mengembangkan Struktur...", *loc. cit.*, hlm. 19.

Ketiga, pendidikan Islam, termasuk IAIN, masih diselenggarakan dengan menggunakan paradigma klasik yang belum menggunakan paradigma baru.¹¹⁹ Proses pembelajaran belum menawarkan materi dan metode pendekatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pada zamannya.

Keempat, dalam konteks politik pendidikan nasional, keberadaan pendidikan tinggi Islam selama ini dipandang kurang prospektif. Anggaran pendidikan Islam misalnya, tampak kurang memadai untuk mengembangkan insitusi pendidikan Islam yang diharapkan masyarakat sesungguhnya. Anggaran pendidikan Islam, termasuk dengan anggaran IAIN selama ini kabarnya masuk dalam alokasi anggaran Departemen Agama, pada pos pembinaan keagamaan.

Uraian diatas merupakan sebagian dari banyak masalah yang dihadapi IAIN, pada umumnya berkaitan erat dengan sulitnya memformulasi pendidikan Islam secara filosofis yang memiliki dimensi komprehensif, tanpa dikotomi dengan pendidikan umum. Sains pengetahuan apa saja yang dimiliki umat manusia selagi membawa kemaslahatan bersama, dapat dikatakan sebagai tujuan (umum) pendidikan Islam.¹²⁰ Hasan Langgulung¹²¹ mengatakan, dalam al-Qur'an disebutkan empat tujuan akhir yang ingin dicapai, yakni: pembentukan insan kamil yang saleh (*perfect-man*), pembentukan keluarga yang saleh, pembentukan masyarakat yang saleh, dan penciptaan persaudaraan manusia sejagat. Keempat tujuan ini secara sistematis harus dibangun dari pribadi yang paling mandiri, yakni pembentukan manusia yang saleh secara individu untuk selanjutnya akan membentuk masyarakat yang saleh.¹²² Pembentukan persaudaraan manusia sejagat merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan Islam.

¹¹⁹Mastuhu, "Pendidikan Islam di Indonesia Masih Berkutat pada Nalar Klasik", *Jurnal Taswirul Afkar*, LAKPESDAM NU Jakarta, 2001, hlm. 78-83.

¹²⁰M. Arlien, *Pendidikan Islam dalam Arus Dinamika Masyarakat*, Golden Trayon Press, Jakarta, It, hlm. 183-188.

¹²¹Hasan Langgulung, "Pendidikan Islam dalam Masyarakat Demokrasi", *Concencia: Jurnal Pendidikan Islam*, No. 1, Volume III, Juni 2003, hlm. 2-10.

¹²²Istilah saleh berasal dari insan saleh yang berarti manusia yang beramal saleh. Dari amal saleh itulah yang menjadi sebab penciptaan dan sebagai materi percobaan di dunia dan sebagai keriteria keselamatan di ahri akherat. Seperti disinyalir dalam al-Qur'an bahwa

Konsep pendidikan Islam universal diatas yang mementingkan kesejahteraan *duniawi* dan *ukhrawi* bagi umat sejagat raya kiranya belum mampu diaplikasikan IAIN selama ini. Hal ini berbeda tentunya dengan apa yang diaplikasikan tentang pendidikan Islam pada masa klasik. Pada masa ini ditemukan ilmuan Muslim yang tidak hanya ahli dalam bidang sains agama, tetapi juga sains pengetahuan dan teknologi, sebagai tujuan akhir pendidikan Islam. Dalam berbagai krisis yang dialami masyarakat dunia, pendidikan tinggi Islam, khususnya IAIN, dituntut merespons perkembangan sains agama dan sains pengetahuan demi kesejahteraan masyarakat sejagat dunia. Amin Abdullah¹²³ mengatakan, selama ini masih kuat anggapan masyarakat bahwa agama dan ilmu adalah dua entitas yang tidak dapat dipertemukan. Ilmu tidak mempedulikan agama dan agama tidak mempedulikan ilmu.

Jika ada sebagian masyarakat beranggapan bahwa lulusan PTAI, termasuk IAIN, kurang berkualitas, hal ini sebenarnya sebagai akibat dari proses perkuliahan dan pembinaan IAIN itu sendiri. Arief Furqon¹²⁴ mengungkapkan bahwa kekurangberhasilan PTAI dalam menjalankan tugas utamanya dalam menciptakan SDM berkualitas, dapat disebabkan oleh faktor *internal* maupun *eksternal*. *Faktor internal* meliputi: (1) bergesernya aspirasi pendidikan masyarakat (umat Islam) yang dulu lebih mementingkan pendidikan agama ke ilmu umum seiring dengan perkembangan pembangunan bangsa; (2) semakin sempitnya lulusan PTAI untuk bekerja sebagai pegawai negeri akibat kebijakan *zero-growth*; (3) banyaknya lulusan PTAI yang tidak segera mendapatkan pekerjaan yang diinginkan berpengaruh terhadap rendahnya minat calon mahasiswa kurang berminat untuk menjadi ahli agama; (5) kurangnya minat lulusan

Allahlah yang menciptakan hidup dan mati agar dia menguji siapa diantara kamu yang paling baik amalannya (Q.5. Al-Mulk: 2). Dalam perjalanan sejarah, pengertian amal saleh dipersempit oleh orang-orang di era kejumudan Islam sehingga menjadi terbatas hanya pada hal-hal ibadah dan akhlak seorang semata. Sesungguhnya, pemahaman tentang amal saleh ini memerlukan interpretasi dan pemahaman lebih luas dalam ruang lingkup garapan amal tak terhingga. Lihat: (Hasan Langgugung, "Pendidikan Islam dalam Masyarakat...", *ibid.*, hlm. 3).

¹²³M. Amin Abdullah, "Etika Tauhidik sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama: Dari Paradigma Positivistik-Sekuleristik ke Arah Teo-Antroposentristik-Integralistik", dalam *Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Jogjakarta, hlm. 3-20.

¹²⁴Dikutip dari: (Svara: Media Informasi DitpertaIs, Nomor 12 Tahun II, 31 Juli 2004).

SLTA yang memiliki potensi akademik tinggi untuk kuliah di PTAI berpengaruh terhadap kualitas mahasiswa kurang ideal; dan (6) *in-put* mahasiswa yang kurang idael berdampak pada rendahnya kualitas *out-put* seperti yang diharapkan masyarakat.

Sementara itu, *faktor eksternal*, meliputi: (1) manajemen dan kepemimpinan yang belum mampu mengelola PTAI secara modern; (2) kurikulum saat ini kurang komunikatif terhadap semua pihak terkait; (3) kualitas dosen belum memadai; (4) proses perkuliahan di PTAI masih tradisional dan formalistik; (5) *in-put* mahasiswa dari SLTA kurang berkualitas di PTAI mengakibatkan kualitas *in-put* menjadi rendah; (6) fasilitas belajar di PTAI yang kurang memadai; (7) lingkungan kampus yang kurang kondusif dalam mendukung perkuliahan; (8) dana operasional belum memadai; (9) rendahnya kemampuan dosen PTAI dalam penelitian ilmiah; (10) rendahnya kemampuan dosen PTAI dalam menulis laporan penelitian atau artikel ilmiah; (11) rendahnya perhatian pimpinan PTAI dalam menyebarluaskan hasil penelitian para dosen dan mahasiswa; dan (12) kurang sejalanannya program pengabdian masyarakat dengan hasil penelitian.

Lebih jauh lagi, kenyataan diatas sebenarnya menunjukkan bahwa proses perkuliahan dan orientasi pembinaan serta pengembangan PTAI belum menyentuh sains pengetahuan dan teknologi dan sains agama secara integral. Bahkan, kenyataan ini tidak hanya terjadi ditanah air, tetapi terjadi pada kebanyakan pada negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim lainnya. Hafid Abbas¹²⁵ mengatakan, pendidikan nasional dalam operasionalnya tampak masih mengalami dikotomi, hal ini lebih disebabkan oleh kecelakaan historis perjalanan bangsa dimana umat Islam berada.

Uraian diatas menunjukkan bahwa PTAI perlu membenahi diri atau mereformasikan diri agar lebih fungsional dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pada zamannya. Upaya pembenahan pendidikan Islam berpijak dari kajian mendalam terhadap konseptual teoritis tentang tujuan, visi, misi, dan substantifnya yang merujuk pada sumber utamanya al-Qur'an dan al-Hadist yang ditafsirkan tidak hanya normatif-tekstual tetapi secara sosio-historis-kontekstual.

¹²⁵Hafid Abbas, "Agenda Strategis Pengembangan Pendidikan Menuju Masyarakat Madani", *Makalah* disampaikan pada Kullah Umum Program Master Studi Islam Ull Jogjakarta, 2000, hlm. 4.

Kesenjangan antara pesan al-Qur'an dan al-Hadist dalam pendidikan Islam pada negara-negara Islam, merupakan argumen pentingnya menelaah konsep pendidikan Islam yang universal, *rahmatan lil'alamin*.

Pada akhirnya rencana perubahan IAIN menjadi UIN Raden Fatah Palembang merujuk kepada pentingnya menelaah kembali tentang pesan inti sumber-sumber ajaran Islam tentang pendidikan yang ditafsirkan secara kontekstual tadi. Selain itu, perubahan IAIN menjadi UIN ini lebih disebabkan pula oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat Muslim di tanah air umumnya, dan di Sumatera Selatan khususnya sebagai *religious-society*. Hal ini dilakukan dalam rangka pembentukan generasi Muslim masa depan yang mampu berkiprah dalam kehidupan global yang membutuhkan sains agama dan sains pengetahuan dan teknologi. Secara tekstual dan konseptual, disinilah letak urgensi perubahan IAIN menjadi UIN Raden Fatah Palembang yang telah menjadi wacana akademisi dan obsesi masyarakat Islam Sumatera-Selatan.

UIN dan Masa Depan Sumatera Selatan

Rencana perubahan IAIN menjadi UIN Raden Fatah Palembang kiranya akan berdampak positif bagi pembangunan Sumatera Selatan. Bagi wilayah ini, keberadaan UIN diharapkan memiliki sejumlah implikasi penting dalam upaya memajukan pembangunan, sehingga dapat berkompetitif dengan provinsi lainnya dan dapat berkiprah dalam pergaulan komunitas global. Sebagai upaya mewujudkan obsesi ini, terdapat sejumlah indikator yang patut dikemukakan:

Pertama, perubahan visi, dan misi IAIN menjadi UIN merupakan kemajuan luar biasa dalam perkembangan pendidikan tinggi Islam di tanah air. Jika pada awalnya tujuan, visi dan misi IAIN lebih banyak berfokus dalam kajian dan pengembangan keilmuan Islam klasik, dan kurang merespons pengembangan sains dan teknologi, maka kini tujuan, visi, dan misi UIN diharapkan dapat merespons kebutuhan masyarakat Sumatera-Selatan ditengah pergaulan regional, nasional dan internasional, sesuai dengan keberadaan ajaran Islam yang universal.

Kedua, substansi kurikulum UIN nantinya akan lebih universal dan akomodatif terhadap perubahan masyarakat. Jika tadinya kurikulum IAIN telah mampu menciptakan SDM berkualitas dan kompeten dalam bidang ilmu keagamaan umumnya, maka ke depan, UIN diharapkan dapat menciptakan SDM yang berkualitas, yang tidak hanya mampu menjadi sarjana agama/ilmuan agama, tetapi juga dilengkapi dengan kompetensi ilmu-ilmu umum yang bernuansa dan berlandaskan religius. Sesuai dengan tujuan, visi, dan misinya, UIN diharapkan dapat menjembatani kesenjangan (*gap*) antara konsep/teori dan praktek dalam kehidupan umat Islam.

Ketiga, jumlah penduduk Sumatera Selatan yang jumlahnya relatif besar berkisar 6,7 juta jiwa, merupakan 'aset' utama bagi dukungan perubahan IAIN menjadi UIN. Lebih dari itu, dilihat dari agama yang dianut masyarakat, mereka yang beragama Islam merupakan mayoritas, lebih dari 90 persen. Sudah barang tentu, UIN sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri Islam di Sumatera Selatan merupakan suatu kebanggaan masyarakat Muslim Sumatera Selatan. Dilihat dari kuantitas penduduk ini, perguruan tinggi umum (PTU), baik negeri atau swasta, di Sumatera Selatan berjumlah 33 buah. UIN nantinya merupakan satu-satunya perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN) di provinsi ini yang patut diperhitungkan. Hal ini karena mayoritas penduduk Sumatera Selatan yang beragama Islam itu dipastikan kebanyakan orang tua mereka menginginkan anak-anaknya sukses dalam kehidupan, tanpa kehilangan identitasnya sebagai Muslim.

Keempat, sejak lama Sumatera Selatan merupakan masyarakat pluralistik (*pluralistic society*) yang terdiri dari beragam agama, ras, etnis dan budaya. Sejak kedatangannya, Islam sangat menghargai heterogenitas atau pluralitas. Hal ini merupakan sebagai motivator dan inspirator bagi kemajuan pembangunan di daerah ini. UIN diharapkan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas sesuai dengan misinya, yang diharapkan dapat memajukan pembangunan masyarakat Sumatera Selatan, tanpa kehilangan identitas sebagai masyarakat pluralistiknya. SDM berkualitas yang dihasilkan UIN merupakan SDM yang berwawasan dan menghargai heterogenitas/pluralistik. Pengalaman sosio-historis masyarakat yang telah terbiasa dengan kehidupan pluralistik merupakan nilai yang sangat berharga dalam mendorong perubahan IAIN menjadi UIN.

Kelima, dalam konteks politik pendidikan nasional, IAIN Raden Fatah yang merupakan tertua ke-4, patut dipertimbangkan dalam kebijakan pendidikan, terutama perubahan IAIN menjadi UIN. Sejumlah IAIN yang sejarah berdirinya lebih muda dari IAIN Raden Fatah Palembang, telah banyak melakukan kemajuan berarti, bahkan IAIN Suthan Thaha Jambi berencana menjadi UIN pula. Dengan modal pengalaman yang memadai ini, dengan suka dan duka dialaminya, IAIN Raden Fatah Palembang dipandang sudah matang dan berpengalaman menentukan sikap dan melangkah ke depan untuk menjadi UIN, sesuai tuntutan implementasi tujuan, visi, dan misinya. Dengan modal pengalaman ini, berbagai kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi diharapkan dapat dikelola dengan sempurna menuju cita-cita besar itu.

Keenam, kenyataan menunjukkan bahwa Sumatera Selatan memiliki basis industri, perdagangan dan jasa. Kondisi ini merupakan suatu faktor pendukung dalam upaya perubahan IAIN menjadi UIN. SDM berkualitas yang dihasilkan UIN nantinya diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Jika selama ini lapangan kerja alumni IAIN hanya terbatas pada sektor-sektor tertentu saja, diharapkan alumni UIN nantinya memiliki peluang dan kesempatan memperoleh pekerjaan lebih luas.

Selanjutnya, *ketujuh*, secara geografis, letak Sumatera Selatan yang strategis patut menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan UIN. Letak Sumatera Selatan yang dekat dengan Jakarta, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Malaysia, serta, terletak antara lalu-lintas dua benua Australia dan Asia, seperti letak Indonesia, merupakan hal lain yang patut menjadi konsideran perubahan IAIN menjadi UIN di masa depan. Usaha pengembangan UIN sedapat mungkin harus merujuk kepada kebutuhan dan kondisi aktual geografis yang strategis itu.

Secara singkat, gagasan perubahan IAIN menjadi UIN Raden Fatah Palembang merupakan suatu wujud perkembangan kajian Islam (*Islamic studies*), merupakan kajian tektual dan kontekstual kemasyarakatan Islam yang dinamis. Perubahan IAIN menjadi UIN dapat dipandang pula sebagai salah satu bentuk reformasi pendidikan tinggi Islam di tanah air. Hal ini dapat dikatakan bahwa reformasi pendidikan tinggi Islam merupakan inspirasi dan upaya aktualisasi dari UU No. 2/1999 dan UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, dimana

kedua UU tersebut lebih memberi peluang kepada masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Reformasi IAIN menjadi UIN Raden Fatah Palembang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat Muslim Sumatera Selatan yang mendambakan PTAIN yang berkualitas, yang dapat menjawab tantangan zaman.

Reformasi Kurikulum PTAI: Konsep, Tujuan dan Kurikulum UIN¹²⁶

Rumusan tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri dan mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU No.2 /1989). Rumusan tujuan pendidikan Islam sangat relevan dengan rumusan tujuan pendidikan nasional.

Kurikulum pendidikan Islam bersumber dari tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam memiliki perbedaan dengan tujuan pendidikan lain, misalnya tujuan pendidikan menurut paham pragmatisme yang menitikberatkan pemanfaatan hidup manusia di dunia. Yang menjadi standar ukurannya pun sangat relatif, tergantung pada kebudayaan atau peradaban manusia. M. Arifin (1993 : 237) menyatakan bahwa rumusan tujuan pendidikan Islam adalah merealisasikan manusia muslim yang beriman, bertakwa dan berilmu pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada Sang Khalik dengan sikap dan kepribadian bulat menyerahkan diri kepada-Nya dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan-Nya.

Bertitik tolak dari empat komponen telah dikemukakan, jika dihubungkan dengan filsafat pendidikan Islam, kurikulumnya tentu harus menyatu (*integral*) dengan ajaran Islam itu sendiri. Tujuan yang akan dicapai dari kurikulum pendidikan Islam adalah membentuk anak didik berakhlak mulia, dalam hubungannya dengan hakikat penciptaan manusia. Sehubungan dengan kurikulum pendidikan Islam, dalam penafsiran luas, kurikulumnya berisi materi untuk pendidikan seumur hidup (*long life education*), sesuai dengan hadits Rasulullah : "*Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang kubur*" (*al-Hadits*).

¹²⁶Tulisan ini merupakan pengembangan atas tulisan penulis yang dimuat dalam *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, diterbitkan oleh RajaGrafindo, Jakarta, 2014.

Kemudian yang menjadi pokok dari materi kurikulum pendidikan Islam ialah bahan-bahan, aktivitas dan pengalaman yang mengandung unsur ketauhidan. Kalimat tauhid melalui suara azan yang diperdengarkan ke telinga bayi yang baru lahir merupakan materi kurikulum Pendidikan Islam pertama yang diberikan kepada anak (bayi). Fungsi azan yang berintikan ketauhidan, dalam pandangan pendidikan Islam, sangat penting untuk ditanamkan ke dalam pribadi anak Muslim sedini mungkin, dengan harapan mereka senantiasa terbimbing ke suasana dan kondisi yang sejalan dengan hakikat penciptaannya, sebagai pengabd Allah SWT (Jalaludin, 1994 : 45).

Islam sebagai agama wahyu yang sangat mementingkan hidup masa depan yang berorientasi duniawi-ukhrawi telah menempatkan dasar teoretis dalam ayat-ayat al-Qur'an, antara lain tercantum dalam Surat al-Hasyr 59 : 18

"Hai orang-orang Mukmin, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri manusia memerhatikan hal-hal apa yang hendak dilakukan bagi hari esoknya, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan".

Dari ayat al-Qur'an di atas, dapat diakui bahwa sumber ilmu pengetahuan itu sangatlah luas. Ilmu pengetahuan yang diharapkan Allah SWT menjadi penopang kemantapan keimanan (umat manusia sebagai khalifah Allah SWT) menurut Arifin (1991 : 113), dapat disederhanakan ke dalam tiga sumber orientasi teoritis ilmiah yaitu : a) pengembangan pada Allah SWT, Yang Maha Mengetahui sebagai sumber pokok ilmu pengetahuan, b) pengembangan ke arah kehidupan sosial manusia, yang semakin kompleks dan menekankan ilmu pengetahuan dan teknologi, c) pengembangan ke arah alam sekitar yang diciptakan-Nya sebagai penopang kehidupan manusia.

Dapat dipahami bahwa orientasi pendidikan Islam memiliki keterkaitan dengan pemahaman akan fungsi keberadaan manusia di muka bumi, yakni sebagai khalifah. Agar fungsi kekhalifahan ini berjalan sempurna, peran ilmu pengetahuan sangat diperlukan guna menjaga hubungan manusia dengan Khaliknya (*hablumminallah*), hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*) dan hubungan dengan alam sekitar (*hablumminalalam*). Orientasi kurikulum pendidikan Islam pada dasarnya perlu pengembangan ketiga aspek itu, yang mempunyai proyeksi yang bersifat inovatif (*inovatif learning*), bukan semata-mata melestarikan apa yang ada

(*maintenance learning*), tidak pasif serta dogmatis. Hal ini relevan dengan harapan Aliran bin Abi Thalib R.A, yakni :

"Didiklah anak-anak kalian tidak seperti yang dididikkan kepada kalian sendiri, oleh karena ia diciptakan untuk generasi zaman yang berbeda dengan generasi zaman kalian".

Harapan tersebut menunjukkan bahwa konsep kurikulum pendidikan Islam mempunyai jangkauan ke masa depan bagi anak didik, yakni berupaya menciptakan suatu sosok kepribadian yang mendukung melalui pendidikan. Pengembangan sosok pribadi yang dikehendaki tersebut bisa dicapai melalui kurikulum Pendidikan Islam, yakni menyangkut bahan atau jenis mata pelajaran yang diberikan kepada anak didik yang terhimpun dalam kurikulum Pendidikan Islam (Mulkan, 1993 : 247).

Sumber bahan dan materi kurikulum Pendidikan Islam dapat dikembangkan melalui bahan yang terdapat dalam nash dan realitas kehidupan. Kutipan beberapa nash al-Qur'an dan al-Hadits berikut diharapkan dapat memberi gambaran sumber bahan (materi) kurikulum Pendidikan Islam atau yang menjadi isi (*content*) dari suatu kegiatan Pendidikan Islam.

- a. *"Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa" (Q.S 2 : 129).*
"Sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul di antara kamu dan mengajarkan kepada kami al-Kitab (al-Qur'an) dan hikmah" (Q.S 2 : 151).
"Dialah yang mengutus kepada kamu yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat-Nya dan mensucikan mereka serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah" (Q.S 62 : 2).
- b. *"Dan kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar kamu menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka"(Q.S 16 : 44).*
- c. *"Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya di kala ia memberi pelajaran kepadanya : Hai anakku janganlah kamu*

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu kezaliman yang besar"(Q.S 31 : 13).

- d. "Hai Anakku, dirikanlah shalat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah perbuatan munkar dan bersabarlah terhadap yang menimpa kamu"(Q.S 31 : 17).

"Perintahkanlah anak-anakmu untuk menunaikan shalat di kala ia berumur tujuh tahun dan pukullah mereka jika bandel mematuhi shalat dan pisahlah tidur mereka di kala berumur sepuluh tahun" (H.R Abu Daud).

- e. "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun" (Q.S 31 : 14).

- f. "Dan janganlah kamu sekalian memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh".

- g. "Dan bersabarlah kamu dari apa yang menimpa kamu, sesungguhnya hal yang demikian itu termasuk yang diwajibkan" (Q.S 31 : 17).

- h. "Lalu keduanya bertemu dengan hamba di antara hamba-hamba Kami yang telah Kami berikan rahmat dari sisi kami dan telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami"(Q.S 18 : 65).

- i. "Mengapa tidak pergi dari tiap golongan di antara kamu kepada mereka untuk memperdalam pengetahuan agama"(Q.S 9 : 22).

- j. "Dan Allah mengajarkan Adam tentang nama-nama benda (asma') seluruhnya kemudian mengemukakan kepada para Malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepada-Ku nama-nama benda itu jika kamu orang yang benar"(Q.S 2 : 31).

- k. "Maka hendaklah manusia memerhatikan dari apa yang dia diciptakan"(Q.S 86 : 5).

- l. "Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana dia ditegakkan, dan bagaimana bumi dihamparkan" (Q.S 88 : 17, 18, 19).

Dengan demikian, semua jenis ilmu yang dikembangkan ahli pikir Islam dari kandungan al-Qur'an adalah ilmu Islam. Hanya saja dalam hal pengklasifikasian materi ilmu dari al-Qur'an tersebut, mereka (para ahli pikir Islam) memiliki perbedaan dalam bentuk dan istilah yang digunakan. Al-Farabi mengklasifikasikan ilmu-ilmu yang bersumber dari al-Qur'an yang disebut *science* (ilmu pengetahuan) meliputi : 1) Ilmu Bahasa, 2) Logika, 3) Sains Persiapan, Berhitung, Geometri, Optika, Astronomi, Musik (praktis dan teoretis), Ilmu Pengukuran (timbangan), ilmu pembuatan instrumen-instrumen (yang dipakai dalam seni, sains, astronomi, dan lain-lain), 4) Fisika (ilmu alam) dan Metafisika, 5) Ilmu Kemasyarakatan (hukum atau syariah) dan Ilmu Retorika (ilmu berpidato).

Sedangkan Ibnu Khaldun mengklasifikasikan ilmu pengetahuan Islam yang bermula dari al-Qur'an : 1) *Ilmu Pengetahuan (sains), filsafat, dan intelektual*. Ilmu-ilmu ini terdiri dari : logika, ilmu alam atau Fisika (tentang ilmu medis dan pertanian), metafisika (tentang ilmu tenung, sihir, dan jimat-jimat yang tertulis dalam huruf alfabetis, alkemi), ilmu yang berkaitan dengan kuantitas : geometri, aritmatika (yang berkaitan dengan sifat bilangan, cara menghitung, aljabar, akunting dan *faraidh* atau pembagian warisan); dan juga ilmu musik, astronomi dan astrologi. Khusus untuk ilmu sihir, astrologi untuk meramal nasib, jimat-jimat, tidak diperkenankan untuk dipelajari dan, 2) *Ilmu pengetahuan (sains) yang disampaikan (transmitted sciences)* : al-Qur'an (tafsir dan cara membacanya atau tajwid), Ilmu Hadits, Qaul Nabi SAW, sanad-sanadnya (terdapat dalam Ulumul Hadits), Ilmu Fiqih (yurisprudensi), Teologi, Tasawuf, Ilmu Bahasa, termasuk Gramatika, Leksikologi, dan Sastra (M.Arifin, 1991 : 183-188).

Dalam kaitannya dengan kurikulum, para pemikir (pendidik) Islam juga mempunyai perbedaan dalam hal istilah dan bentuk dari ilmu yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Ibnu Khaldun (732 H atau 1332 M) menetapkan tiga kategori ilmu pengetahuan Islam yang harus dijadikan materi kurikulum sekolah :

- a. *Ilmu lisan (bahasa)* yang terdiri dari ilmu lughah, nahwu, sharaf, balaghah, maani, bayan, adab (sastra) atau syair-syair.
- b. *Ilmu naqly*, yakni ilmu-ilmu yang dinukilkan dari al-Qur'an dan Hadits, yang terdiri dari : *Qiraah al-Qur'an* dan Ilmu Tafsir, sanad-

sanad hadits dan pentashihannya, serta istinbath tentang *qanun-qanun fiqhiyah*-nya.

- c. *Ilmu 'Aqly*, yakni ilmu untuk mengembangkan daya pikir manusia kepada filsafat dan semua ilmu pengetahuan lainnya. Kelompok ilmu ini antara lain : Logika (Ilmu Mantiq), Ilmu Alam, Teknologi, Ilmu Teknik, Ilmu Bintang, dan lain sebagainya (Ibid, 189).

Sedangkan Al-Ghazali menempatkan ilmu pengetahuan berikut agar dijadikan bahan kurikulum lembaga pendidikan, yakni :

- a. *Ilmu Fardlu 'Ain* (wajib dipelajari), yakni ilmu agama yang dipelajari dari al-Qur'an : Fiqih, Hadits dan Tafsir.
- b. *Ilmu Fardlu Kifayah* (untuk menyokong kehidupan di dunia), yakni Metafisika, Ilmu Kedokteran, Ilmu Teknik, Ilmu Pertanian dan Industri (Ibid, 190).

Pada dasarnya, para ahli pemikir Islam (terutama dalam hal kurikulum pendidikan Islam) mempunyai pendapat bahwa ilmu pengetahuan yang mereka kategorikan dan dijadikan mata pelajaran (*subject matter*) di sekolah / madrasah secara esensial tidak ditemukan perbedaan yang prinsipil, baik Ibnu Khaldun, al-Ghazali, Ibnu Sina dan lain-lainnya secara eksplisit sepakat bahwa pengklasifikasian ilmu pengetahuan dalam kurikulum Pendidikan Islam tetap merujuk pada nash al-Qur'an dan al-Hadits.

Materi ilmu pengetahuan yang mereka (para ahli pikir Islam) gunakan untuk kurikulum Pendidikan Islam itu nilainya diukur dari salah satu firman Allah SWT dalam al-Qur'an, surat al-Mujadilah 58 : 11:

**Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*.*

Dengan sederhana, dapat dikatakan bahwa secara konseptual, kurikulum Pendidikan Islam dirancang berdasarkan nash al-Qur'an dan al-Hadits, yang bertujuan agar manusia mendapat kesejahteraan di dunia dan tetap dekat dengan Khaliknya. Kurikulum Pendidikan Islam dirancang agar kehidupan duniawi dan ukhrawi menjadi milik umat-Nya dengan modal iman, amal dan takwa kepada-Nya. Di sinilah letak perbedaan prinsipil kurikulum Pendidikan Islam dengan

kurikulum pendidikan lain yang mempunyai kecenderungan mengutamakan aspek material dengan nilai pragmatisme semata.

Proses aktualisasi kurikulum pendidikan Islam dapat ditelusuri terhadap sejarah perkembangan pendidikan Islam. Munir Murni dalam Abdullah Idi dan Toto Suharto (2006: 3-18) membagi periode sejarah pendidikan Islam menjadi empat periode: (1) *periode pembinaan*, dimulai sejak kelahiran Islam yang ditandai dengan turunnya wahyu pertama sampai akhir masa kekuasaan Bani Umayyah (610-750M); (2) *periode keemasan*, dimulai dari lahirnya Bani Abbasiyyah sampai jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol (750-1258M); (3) *periode kejatuhan dan kemunduran*, dimulai dengan Imperium Turki Usmani hingga kemerdekaan Negara-negara Islam (1258-1800M); dan (4) *periode pembaruan dan pembinaan kembali*, dimulai dari kemerdekaan negara-negara Islam dari Imperium Turki Usmani hingga sekarang (1800-sekarang).

Tiap periode diatas memiliki ciri-ciri sendiri. Salah satu ciri yang dominan adalah kelahiran madrasah pada periode keemasan. Kemunculan madrasah pada periode tersebut secara historis menjadi bukti awal kemapanan sistem pendidikan Islam. Ketika mengkaji lembaga-lembaga pendidikan Islam, sebagian besar peneliti sejarah pendidikan Islam menggunakan dua batasan periodisasi, yakni periode pra-madrasah dan pasca-madrasah.

Periode pra-madrasah merupakan periode permulaan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pada periode ini, ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang dijadikan tempat belajar oleh kaum Muslim. Pada tahap yang paling awal, pendidikan Islam dilaksanakan di rumah-rumah. Rasulullah SAW telah menjadikan rumah al-Arqam Ibn Abi al-Arqam sebagai tempat belajar dan tempat pertemuan pertama dengan para sahabatnya. Di rumah tersebut beliau menyampaikan dasar-dasar agama dan mengajarkan al-Qur'an. Rasulullah juga menjadikan rumah beliau sebagai tempat berkumpul untuk belajar. Proses pendidikan Islam yang berlangsung secara informal tersebut masih berkaitan dengan *syiar da'wah Islamiyyah* dan materinya bertalian dengan akidah Islam. Pada perkembangannya, pendidikan Islam mengalami transformasi. Selain di rumah-rumah, pendidikan Islam juga dilaksanakan di *kuttab* dan masjid. *Kuttab* adalah tempat belajar di rumah guru. Para murid berkumpul di rumah tersebut untuk menerima pelajaran. *Kuttab* juga berarti

tempat terbuka di luar rumah-bisa berupa lapangan di sekitar masjid atau taman umum. Kuttab merupakan lembaga pendidikan dasar tertua yang pernah ada. Peralnya, sebelum Islam datang, lembaga ini juga telah digunakan untuk belajar tulis-baca. Ketika Islam datang, kuttab mengalami perluasan fungsi, bukan hanya tempat baca-tulis tetapi juga untuk belajar al-Qur'an khususnya bagi anak-anak (Ibid: 6-7).

Kurikulum *kuttab* masih bersifat sederhana yang berupa tulis-baca, hafalan al-Qur'an, dan pokok-pokok ajaran Islam. Pada masa pemerintahan Umar Ibn al-Khattab, muncul ide pembaruan *kuttab*. Umar menginstruksikan agar anak-anak di *khuttab* diberikan mata pelajaran berenang, mengendarai kuda, memanah, dan tata bahasa Arab. Instruksi Umar, akan tetapi, tidak semuanya dapat dilaksanakan pada tiap *khuttab* karena pada tiap *khuttab* situasinya berbeda. Berenang misalnya, hanya dapat dilaksanakan pada *khuttab* yang tempatnya berada di tepi sungai, seperti *khuttab* di Irak dan Mesir (Ibid.,: 7-8).

Adapun lembaga pendidikan berupa masjid merupakan tempat pendidikan tingkat lanjutan dan pendidikan tinggi untuk mempelajari ilmu-ilmu agama bagi murid remaja dan dewasa. Semula, masjid digunakan juga untuk pendidikan dasar bagi anak-anak. Karena anak-anak belum bisa menjaga kebersihan masjid, maka selanjutnya pendidikan anak-anak tidak dilakukan di masjid. Sejarah Islam menunjukkan bahwa masjid merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada tahun-tahun awal perkembangan Islam, penyampaian materi dasar agama tidak terlepas dari peranan masjid. Pada sebelum era-madrasah, selain *khuttab*, *halaqah*, terdapat lembaga pendidikan Islam lain yang digunakan kaum Muslim untuk tempat belajar, seperti istana, rumah ulama, toko kitab, majelis sastra, perpustakaan, observatorium, dan rumah sakit tertentu.

Mehdi Nakosteen dalam Abdullah Idi dan Toto Suharto (Ibid.: 15) mengatakan bahwa madrasah terlahir karena dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, proses pendidikan yang dilaksanakan di *khuttab*, *halaqah* (masjid) dan *masjid-khan*¹²⁷ memiliki sejumlah kelemahan. Kurikulum dan fasilitas

¹²⁷ Masjid-Khan merupakan perkembangan lebih lanjut dari *halaqah* (masjid). Berbeda dengan masjid, masjid-khan dilengkapi dengan sarana akomodasi bagi pihak yang belajar. Istilah *khan* didefinisikan sebagai pemondokan atau penginapan musafir atau asrama untuk pelajar yang datang dari tempat yang jauh. Lembaga pendidikan Islam model *masjid-*

pada lembaga-lembaga itu dipandang belum mampu mendukung terciptanya proses pendidikan yang optimal. Selain itu, perbedaan cara pandang tentang terhadap tujuan pendidikan dan tujuan agama pada lembaga itu (*khuttab, halaqah, dan masjid khan*) memiliki sejumlah kelemahan. Tujuan pendidikan, disatu sisi, memiliki konsekuensi pada aktivitas (pendidikan) yang tentu cenderung menimbulkan suasana hidruk-pikuk; sementara itu, kegiatan ibadah sebagai tujuan agama di masjid menghendaki suasana tenang dan khusyu'. Atas latar perbedaan cara pandang terhadap lembaga pra-madrasah (*khuttab, halaqah, dan masjid-khan*) telah melatar belakangi munculnya pendirian madrasah secara wajar.¹²⁸

Secara eksternal, kemajuan ilmu pengetahuan menuntut adanya sistem penggajian bagi mereka yang mencari penghidupan melalui dunia pendidikan. Hal itu hanya terjadi pada lembaga seperti madrasah. Muhammad Yunus (1990: 69-71) menuturkan bahwa setidaknya ada empat faktor eksternal penyebab kelahiran madrasah: (1) faktor politik, dimana para penguasa berusaha menarik hati rakyat dengan jalan memajukan agama dan mementingkan pendidikan. Untuk tujuan politis tersebut, penguasa tidak segan-segan mengeluarkan sejumlah besar dana membangun madrasah; (2) faktor religius, dimana para penguasa yang hidup dengan kemewahan bermaksud beramal dan menyiarkan agama Islam dengan jalan mendirikan madrasah untuk memperoleh ridho Allah SWT; (3) faktor

khan ini diperkirakan muncul dan berkembang pada sekitar awal abad ke-4 Hijrah (abad ke-10 M). Akan tetapi dalam sejarah pendidikan Islam, *masjid-khan* baru benar-benar menjadi fenomena pada penghujung abad yang sama. Hal itu dibuktikan diantaranya dengan pembangunan *masjid-khan* secara besar-besaran oleh Badr Ibn Hasanawaih al-Kurdi (sekitar 1014 M), seorang gubernur dari Dinasti Buwaihi pada masa kekuasaan 'Adud al-Daulah (978-983M). Selama 32 tahun berkuasa, Badr telah membangun sekitar 3000 *masjid-khan* diberbagai wilayah kekuasaannya. Pada pertengahan pertama dan kedua abad ke-5 Hijrah (abad ke-11 M) di Baghdad ditemukan banyak *masjid-khan*, misalnya *masjid-khan* bagi pelajar mazhab Hanafi di bagian Barat Baghdad, dan *masjid-khan* bagi pelajar mazhab Syafi'i di alun-alun Bab al-Maratib, wilayah Timur Baghdad. Sebagian besar materi kurikulum yang diajarkan di *masjid-khan* adalah fiqh (hukum Islam) dengan mazhab yang berbeda. Lihat: (Abdullah Idi dan Toto Suharto, "Revitalisasi....", *ibid.*: 13).

¹²⁸ Sistem pendidikan yang dilakukan di masjid dinamakan *halaqah*. Suatu *halaqah* berbentuk lingkaran, mengelilingi seorang Syaikh. Dengan keasihan bicara dan kedalaman ilmunya, Syaikh diangkat menjadi guru secara alami/statusnya ditentukan para pengikutnya. Selanjutnya, oleh Pemerintah, Syaikh secara formal diangkat untuk menjadi guru agama tetap. *Halaqah* masjid pada awalnya mengajarkan al-Qur'an dan al-Hadist. Selanjutnya, *halaqah* juga mengajarkan Tafsir, Bahasa Arab, Sastra, Astronomi, dan Ilmu Kedokteran. Selain itu (*khuttab, halaqah/masjid dan masjid-khan*) ada pula lembaga pendidikan Islam lainnya yang bersifat kesufian, seperti *ribat, zawiyyah* dan *khanaqah*. (Abdullah Idi dan Toto Suharto, "Revitalisasi....", *ibid.*: 10-15).

ekonomi, dimana para penguasa dan orang-orang kaya mewakafkan harta mereka untuk pembangunan madrasah, dengan syarat pengelolanya adalah putera-putera mereka secara turun-temurun, dengan harapan tujuan ekonomi keturunannya akan terjamin; dan (4) *faktor fanatisme*, dimana terjadinya pertentangan antara kaum Sunni dan Syi'i menjadikan masing-masing pihak berlomba mendirikan madrasah sebagai alat untuk memperkuat aliran keagamaan masing-masing.

Kurikulum yang dikembangkan madrasah pada awalnya, seperti ditulis Fazlur Rahman dalam Abdullah Idi dan Toto Suharto (*op.cit*: 16), hanya meliputi ilmu-ilmu agama, dengan hukum Islam (fiqih) dan teologi Islam (kalam) sebagai studi pokoknya. Seiring dengan kemajuan peradaban Islam, di madrasah kemudian dikembangkan pula kajian tentang ilmu-ilmu rasional, seperti berhitung, sejarah, sastra, dan lain-lain. Selanjutnya, kurikulum madrasah dapat dikategorikan menjadi *ilmu-ilmu agama*, seperti fiqih, kalam, sastra Arab, dan lain-lain; dan *ilmu-ilmu rasional* seperti ilmu-ilmu kealaman yang meliputi filsafat, matematika, dan kedokteran.

Madrasah, dalam hal ini, merupakan titik awal dari era kebangkitan bagi keamanan sistem pendidikan Islam. Tetapi, karena lembaga-lembaga pendidikan Islam pendahulunya (*kuttab*, masjid, dan *masjid-khan*) dinilai tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan umat Muslim, maka kelahiran madrasah agaknya menjadi keharusan historis demi terwujudnya sistem kelembagaan pendidikan Islam yang professional. Kurikulum dan metode¹²⁹ pendidikan Islam yang ada di dalamnya dikembangkan dan disesuaikan agar dapat ikut berperan bagi kemajuan peradaban Islam.

Madrasah abad pertengahan sesungguhnya merupakan sistem kelembagaan pendidikan Islam yang lengkap (*fulfill education system*). Dari madrasah pula kemudian berkembang konsep *al-jami'ah* seperti yang sekarang dikenal dengan universitas (Hasan Asari, 1994: 45). Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam abad pertengahan, seperti *Jami'al-Azhar* di Mesir, *Jami'al-Zaitun* di Tunis, *Jami'al-Qarawiyyin* di Fez, dan *Jami'al al-Cordova* di Andalusia¹³⁰ kemudian

¹²⁹ Tentang metode yang digunakan dalam pembelajaran, Charles Stanton menyebutkan bahwa terdapat dua metode pengajaran di madrasah, yakni debat tertulis (*ta'liqah*) dan debat lisan.

¹³⁰ Universitas Cordoba di Andalusia adalah peninggalan paling cemerlang diantara warisan Daulah Umayyah di Andalusia adalah Masjid Jami' Cordova. Masjid itu dibangun 786

dianggap universitas Islam (*al-jami'ah al-islamiyyah*). Menulah suatu universitas, menurut sejumlah peneliti, madrasah abad pertengahan secara idealis adalah suatu universitas, baik dengan menyebutnya sebagai *college* maupun *university*.

Aplikasi pendidikan Islam pada universitas Islam abad pertengahan tersebut bertalian erat dengan tujuan filosofis pendidikan Islam. Tujuan universitas Islam (*al-Jami'ah*) dirumuskan sesuai dengan tujuan filosofis pendidikan Islam, yakni membentuk manusia Muslim yang taat beribadah kepada Allah SWT secara total, sekaligus dapat memakmurkan serta mendayagunakan sumber daya alam yang dilimpahkan Allah SWT bagi kemaslahatan kehidupan manusia. Dari tujuan ideal tampak bahwa dalam tujuan pendidikan universitas Islam berupaya mengintegrasikan aspek moral-spiritual dan fisik-material. Unsur integral tersebut menjadi karakteristik pokok pendirian universitas Islam.

Dalam upaya merealisasikan tujuan filosofis pendidikan Islam, universitas (*al-Jami'ah*) diatas, kurikulum universitas Islam disusun dalam dua bentuk, yakni kurikulum keagamaan dan kurikulum keilmuan. Klasifikasi kurikulum ke dalam dua bidang pokok ini merupakan pengaruh dari pola klasifikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan Ibnu Khaldun seperti tertera dalam bukunya *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Kurikulum yang bersifat keagamaan terdiri dari: Ilmu Nahwu, Ilmu Fiqih, Ilmu Kalam, *Kitabah*, *'Arudh*, dan ilmu Sejarah. Sedangkan kurikulum yang bersifat keilmuan terdiri dari: Metafisika, Filsafat, Kedokteran, Musik, dan lain-lain. Dengan kurikulum seperti itu, sejumlah metode pembelajaran yang digunakan di universitas Islam untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan, antara lain: metode ceramah (*muahadarah*), disputasi (*munazarah*), korespondensi (*murasalah*), dan *licentia educando (al-ijazah)* (*Ibid.*: 40).

Diantara peninggalan universitas Islam pada abad pertengahan, beberapa kontribusi yang dapat disebutkan, antara lain: universitas Islam selalu memberi peluang bagi kompetisi dalam dunia pendidikan; pendidik mampu berkomunikasi secara pro-aktif dengan lingkungan pendidikan; kurikulum pendidikan bersifat fungsional

M/170 H oleh 'Abd al-Rahman al-Dhakil. Selanjutnya, secara bertahap masjid tersebut berkembang menjadi universitas yang megah. Namun kemegahan itu lenyap setelah Raja Fernando III mengubahnya menjadi gereja pada 1236 M. Lihat kembali: (Abdullah Idi dan Toto Suharto, "Revitalisasi...", op.cit., hlm. 39).

yang dapat menyentuh aspek-aspek mendasar manusia; metode-metode pengajarannya dapat diterapkan secara teoritik dan praktik; pemikiran-pemikiran mengenai pendidikan menjadi pionir bagi pemikiran yang lain; sistem pendidikannya sudah menggunakan organisasi dan tradisi akademik.¹³¹

Sejumlah negara di Eropa telah mendasarkan pemikirannya pada universitas-universitas Islam abad pertengahan, seperti bidang kedokteran, farmasi, fisika, metafisika, geografi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain-lain. Banyak cendekiawan Muslim yang telah memberikan andil bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Antara lain: *Ibn Sina, al-Bairuni, Ibn al-Haisam, Jabir Ibn Hayyan, al-Razi, al-Tabari, Ibn Khaldun, Ibn Rusyd, al-Ghazzali*, dan lain-lain. Kini, karya-karya mereka banyak dijadikan referensi utama oleh dunia intelektual Eropa. Besarnya kontribusi ilmuan Islam tersebut terhadap kemajuan peradaban Eropa tak terbantahkan, kendatipun kemudian, hal itu tidak jarang diklaim pula sebagai karya orisinil bangsa Eropa sendiri.

Kasus Perubahan "IAIN" menjadi "UIN"

Jika ditelaah dengan seksama, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, semisal IAIN, dari ke waktu telah mengalami kemajuan berarti. Seiring dengan kemajuan masyarakat yang sennatiasa dinamis, kemajuan ini bukanlah tanpa kritik. Di satu sisi, IAIN (termasuk STAIN) telah dipandang "mapan" oleh sebagian kalangan umat Islam. Di sisi lain, keberadaan IAIN tampak dipandang belum berkembang optimal, seperti diharapkan oleh konsep tujuan pendidikan Islam. Dari perspektif sosiologis, suatu masyarakat sebagai *stakeholders* pendidikan senantiasa dinamis atau tidak statis di dalam memandang sebuah lembaga pendidikan. IAIN sebagai sebuah institusi sosial dalam masyarakat dituntut untuk mereformasi diri, agar konsep pendidikan Islam yang rahmatan *li al-'alamin*

¹³¹ Beberapa diantara kontribusi tersebut telah ditransformasikan ke sistem pendidikan Eropa dewasa ini, mislanya sistem guru besar dan asistensi, sistem mata kuliah terprogram, tradisi *rihlah*, sistem sertifikasi ijazah, dan sistem wisuda dengan memakai toga. Transformasi tersebut dilakukan melalui tiga jalur, yakni melalui jalur Andalusia, Sicilia, dan negara-negara Timur, yang selanjutnya berpengaruh besar terhadap pengembangan dunia intelektual Eropa. Transformasi ilmu pengetahuan Islam ke Barat tersebut bukan melalui lembaga formal seperti universitas Islam, tetapi melalui lembaga-lembaga informal dan pribadi-pribadi berkualitas yang berkembang di dalam masyarakat Muslim. Lihat: (Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, Alih Bahasa Afandi dan Hasan Asari, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994, hlm. 210).

diharapkan dapat diaktualisasika, sebagai respons terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat Muslim di tanah air.

Bila dilihat dari konsep pendidikan Islam yang universal, maka implementasi (termasuk kurikulum) IAIN selama ini masih dalam kategori "parsial" yang senantiasa dituntut oleh masyarakat untuk disempurnakan melalui kebijakan reformasi pendidikan tinggi Islam, berupa upaya perubahan kelembagaan IAIN menjadi UIN. Hal ini, telah terjadi sejak Indonesia memasuki era-Reformasi (sejak 1998), sehingga sejumlah IAIN telah mereformasi diri menjadi UIN, misalnya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Syekh Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Kalijaga Jogjakrta, UIN Gunung Jati Bandung, UIN Alauddin Makassar, UIN Pekanbaru, Riau. Kini, sejumlah IAIN terus berupaya mentransformasi lembaganya menjadi UIN. Di sini, pendidikan dan prosesnya senantiasa dituntut up to date dengan perkembangan masyarakat yang dinamis. Ketika proses pendidikan, dikatakan Francis Wahono (2002: 91-104), kurang atau tidak paralel dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sering kali pendidikan memerlukan pembenahan atau kebijakan reformasi. Pendidikan difahami sebagai proses pengalihan nilai-nilai dan pengetahuan dari pendidik ke peserta didik.

Reformasi merupakan refleksi pemikiran untuk melakukan pembaruan dengan perubahan-perubahan komprehensif sebagai respons terhadap perubahan masyarakat. Reformasi pendidikan dapat berupa parsial maupun totalitas dari aktivitas pendidikan (Dede Rosyada, 2004: 3). Ide reformasi pendidikan di Indonesia misalnya telah terjadi sejak relatif lama. Reformasi pendidikan dipandang sebagai suatu gerakan yang memiliki konteks historis-politik momentas, sehubungan lahirnya era reformasi yang menghendaki pemerintahan baru yang menggantikan pemerintahan orde baru. Karena itu, reformasi pendidikan merupakan suatu momentum mendasar dan berbeda dengan ide yang sama dengan era sebelumnya. Salah satu perubahan mendasar dari reformasi pendidikan dalam era reformasi adalah lahirnya UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Reformasi pendidikan di Indonesia pada era reformasi sebenarnya telah terjadi sejak munculnya UU No. 2/1999 tentang Sisdiknas (Abdullah Idi, 2005: 24-25).

Kedua UU Sisdiknas itu telah memberikan perspektif atau paradigma baru yang revolusioner bagi perbaikan sektor pendidikan,

dimana pendidikan telah menjadi urusan publik. Otoritas pemerintah mulai dikurangi, baik bertalian dengan kebijakan pendidikan kurikulum, manajemen, dan berbagai kebijakan pengembangan institusi/lembaga pendidikan (*UU RI No. 20/2003, Pasal 54 ayat 1, 2, dan 3, dan Pasal 55 ayat 1,2,3,4,5 dan 6*). Suatu hal yang krusial dalam reformais pendidikan ini adalah bahwa, baik dari pimpinan institusi pendidikan, institusi politik, masyarakat sebagai *stakeholders* maupun pemerintah (pusat atau daerah), cendekiawan, tampak telah memiliki visi, misi, pandangan kreatif, dan kolektif dalam proses reformasi pendidikan. Dengan ini, reformasi pendidikan diharapkan dapat menghasilkan institusi dan lulusan (*out-put*) yang potensial dan kompetitif.

Reformasi pendidikan pada dasarnya tidak terpisahkan dari keberadaan suatu masyarakat yang sifatnya dinamis. Pendidikan, sebagai salah satu elemen institusi sosial sedapat mungkin mengikuti perubahan dinamis pada masyarakat itu. Jika tidak, berarti pendidikan telah mengalami ketertinggalan dan kegagalan dalam menjalankan fungsinya sebagai agen perubahan sosial (*the agent of social change*). Karena itu, suatu reformasi pendidikan merupakan suatu hal wajar dalam kebijakan pendidikan suatu negara.¹³²

Perubahan IAIN menjadi UIN merupakan respons positif terhadap beragam problematika sosial pada masyarakat (Muslim). Seperti diungkapkan Papadopoulos dalam Dede Rosyada (*op.cit.*: 6-8), terdapat sejumlah pemikiran tentang pengembangan pendidikan ke depan yang berdampak pada problematika ekonomi, sosial dan politik, antara lain:

Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi membuat bahan-bahan ajar yang harus disampaikan dalam proses pendidikan menjadi lebih banyak, yang dikhawatirkan berdampak bagi stagnasi pengembangan ilmu dan peradaban, terutama pada perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus mampu memberikan jaminan pemberian penghargaan dan insentif yang memadai dalam pengembangan sains dan teknologi, yang diharapkan

¹³²Pengalaman bangsa-bangsa Asia yang mengalami kemajuan, seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia, lebih dikarenakan adanya reformasi pendidikan yang dilakukan secara sadar dan terprogram. Disini, jelas nyata bahwa terdapat korelasi signifikan antara kemajuan pendidikan dengan kualitas SDM dan kemajuan suatu bangsa. Investasi pendidikan dijadikan terdepan dalam kebijakan pembangunan.

temuan-temuan baru dalam bidang tersebut terus bertambah agar peradaban terus meningkat.

Kedua, perkembangan teknologi akan terjadi terus-menerus dalam percepatan yang tinggi pada negara-negara berbeda, yang dapat berdampak pada perkembangan ekonomi melalui industri dan jasa. Pendidikan harus mampu menjembatani antara sektor kerja dengan kemajuan sains pengetahuan teknologi tersebut, melalui *updating skill* dan keterampilan serta beragam temuan baru yang harus dikuasai oleh pekerja yang bertalian dengan perkembangan sains dan teknologi.

Ketiga, perubahan demografis di berbagai negara berdampak pada distribusi penduduk berdasarkan usia. Negara-negara terbelakang akan memiliki indeks kelahiran yang tinggi, karena itu, angka usia sekolah dasar akan tinggi. Di negara-negara maju, angka kelahiran cenderung menurun karena di negara-negara maju akan cenderung kekurangan usia angkatan kerja dan angka pensiun konstan atau meningkat dan membutuhkan jaminan sosial dan kesehatan. Negara-negara maju akan terus meningkatkan pendapatan negaranya melalui sektor pajak dari sektor usaha jasa, agar tetap dapat memberikan jaminan bagi mereka. Pada saat yang sama, negara-negara maju akan tergantung pada negara berkembang atau negara tertinggal untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Karena itu, negara-negara berkembang harus mendesain lulusan (*out-puts*) pendidikannya agar masuk pasar kerja di era-global¹³³, dengan memiliki *skill* dan keterampilan, bahasa komunikasi global, dan memahami kultur negara-negara yang menjadi tujuannya.

Keempat, negara-negara menunjukkan saling tergantung satu sama lainnya, baik dalam bidang ekonomi, politik, sains dan teknologi, dan lain-lain. Pendidikan harus mampu merespons kecenderungan global tersebut, mampu mengarahkan sikap dan perilaku multi-kulturalisme dalam mempersiapkan pasar tenaga kerja pada negara tujuannya.

¹³³Dalam mendefinisikan globalisasi, terdapat dua pendekatan, yakni pendekatan kapitalisme global atau keterhubungan global, dan pendekatan keterhubungan internasional. Dalam yang pertama, keterhubungan atau relasi sosialnya tidak lagi didasarkan atas sistem negara bangsa. Sementara itu, dalam yang kedua, keterhubungan sosialnya masih didasarkan pada sistem negara bangsa. Lihat: (Muhammad Zaki Hussein, "Globalisasi dan Nasib Negara Bangsa", *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 10, Tahun III 2002, hlm. 103-117).

Kelima, kemajuan sains dan teknologi yang berdampak pada kemajuan sektor ekonomi dengan keterbukaan secara global, akan berdampak terhadap terbentuknya masyarakat "dunia baru". Pendidikan diharapkan mampu mendesain masyarakat tersebut sebagai masyarakat humanis, akrab dengan lingkungan, menjaga stabilitas ekosistem, anti obat terlarang, dan senantiasa hidup sehat.

Bertitik tolak dari kenyataan diatas, pada prinsipnya, keterkaitan bangsa ini dengan pendidikan nasional, menghadapi dua hal mendasar. Secara internal, pendidikan nasional sedang melakukan penataan berarti, seperti makna yang terkandung dalam UU Sisdiknas No. 2/1999 dan UU Sisdiknas No. 20/2003. Secara eksternal, bangsa ini masih ketinggalan jauh dalam hal prestasi pendidikan, terlebih prestasi pendidikan tinggi Islam pada umumnya—dibandingkan dengan prestasi pendidikan negara-negara tetangga, yang pada akhirnya mempengaruhi SDM dan daya kompetitif bangsa ke depan. Disinilah, barang kali, urgensi dan esensi reformasi pendidikan tinggi Islam, seperti telah terjadinya perubahan pada beberapa IAIN menjadi UIN.

Perubahan IAIN menjadi UIN, sebenarnya sebagai respons positif terhadap kritik tentang beragam dinamika masyarakat Muslim di Indonesia yang mendambakan suatu perguruan tinggi Islam ideal (berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits) dan yang pernah dipraktikkan pada masa kejayaan Islam terutama pada masa pertengahan. Beberapa universitas Islam peninggalan abad pertengahan dan terkemuka yang masih eksis hingga kini, terutama sering kali merujuk pada kurikulum pada Al-Azhar University, Mesir. Perubahan IAIN menjadi UIN bukan sekedar merubah kurikulum yang merujuk ke konsep pendidikan Islam, tetapi juga sebagai upaya merespons kritik konstruktif terhadap IAIN selama ini. Dalam hal ini, IAIN setidaknya mendapat kritik-konstruktif dan akademik pada beberapa hal:

Pertama, permasalahan bertalian dengan kesulitan IAIN untuk mengembangkan fakultas yang diinginkan masyarakat. Orientasi akademis di IAIN dipandang masih perlu diperjelas. Disatu sisi, IAIN dituntut untuk merespons keinginan masyarakat yang tercermin tawaran fakultas (program/jurusan); disisi lain, IAIN juga harus menghadapi sulitnya mengembangkan fakultas-fakultas.

Sulitnya mengembangkan fakultas-fakultas pada dasarnya tidak terlepas dari *historical background* berdirinya IAIN. Berdirinya IAIN lebih dikarenakan kepentingan politis. Jika berdirinya Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai penghargaan bagi kalangan nasionalis, berdirinya IAIN Jogjakarta merupakan bagi kalangan Islam politik atau santri. Wujud kelembagaan dan kurikulum IAIN itu sendiri lebih berorientasi ke Timur Tengah, terutama Mesir dengan pusat keilmuannya Universitas Al-Azhar, dan tidak ke Barat. Oleh karena itu, fakultas dan gaya kerjanya juga berorientasi ke Universitas Al-Azhar, yakni adanya fakultas Syari'ah, Ushulludin, Dakwah, Tarbiyah dan Adab (A.Qodry Azizy, 2000:19). Hal ini menunjukkan masih rendahnya orientasi akademik dan orientais manajemen, yang terlalu menjadikan agama sebagai objek akal semata (M. Atho' Mudzar, 2000: 61-85). Orientasi pengembangan IAIN selama ini lebih diutamakan mempelajari sains agama (*al'ulum al naqliyah*). Ke depan, UIN diharapkan mampu mengembangkan keduanya, baik sains agama maupun sains pengetahuan dan teknologi (*al'ulum aqliyah*) secara integral.

Kedua, kemandegan perkembangan fakultas itu identik dengan kemandegan tradisi keilmuan di IAIN. Tidak berkembangnya fakultas tersebut menunjukkan adanya stagnasi IAIN, suatu kenyataan yang bukan tradisi identitas perguruan tinggi di negara maju. Hal ini, di satu sisi, bertalian erat dengan kemandegan tradisi keilmuan di IAIN; di sisi lain, bertalian dengan kekakuan aturan yang telah menjadi dogma (A. Qodry Azizy, *op.cit.*: 19). Aturan-aturan formal selama ini hanya memungkinkan untuk mengembangkan tradisi keilmuan Islam di IAIN klasikal yang parsial, seperti kebanyakan analisis, dan belum terlalu memungkinkan memberi kesempatan luas untuk mengembangkan tradisi keilmuan Islam secara utuh, seperti pernah diterapkan pada periode klasik, yang juga menghasilkan sejumlah ilmuwan Islam terkenal. Padahal, baik sains agama maupun sains teknologi-pengetahuan merupakan persyaratan utama dalam memasuki kehidupan modern.

Ketiga, pendidikan Islam, termasuk IAIN, masih disleleenggarakan dengan menggunakan paradigma klasik yang belum menggunakan paradigma baru (Mastuhu, 2001: 78-83). Proses pembelajarannya belum menawarkan materi dan metode pendekatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pada zamannya.

Keempat, dalam konteks politik pendidikan nasional, keberadaan pendidikan nasional, keberadaan pendidikan tinggi Islam sebelumnya kurang dipandang prospektif. Visi, misi, program, kebijakan, dan komitmen dalam mengembangkan pendidikan Islam dari pihak terkait belum optimal. Sudah dapat dipastikan, kualitas pendidikan Islam belum seperti diharapkan.

Apa yang diungkapkan diatas merupakan sebagian dari banyak masalah yang bertalian dengan pengembangan PTAI, termasuk IAIN, umumnya bertalian dengan sulitnya memformulasikan pendidikan Islam secara filosofis yang memiliki dimensi komprehensif, tanpa dikotomi dengan pendidikan umum. Sains pengetahuan apa saja yang dimiliki umat asalkan membawa kemaslahatan bersama, dapat dikatakan sebagai tujuan pendidikan Islam (M. Arifien, 1994: 183-188). Hasan Langgulung (2003: 2-10) mengatakan, dalam al-Qur'an disebutkan empat tujuan akhir dari pendidikan Islam yang ingin dicapai, yakni pembentukan *insan kamil* yang sleh (*perfect man*), pembentukan keluarga yang saleh, pembentukan masyarakat yang saleh, dan penciptaan persaudaraan manusia yang sejagat. Keempat tujuan tersebut secara sistematis harus dibangun dari pribadi yang mandiri, yakni pembentukan manusia yang saleh secara individu untuk selanjutnya untuk membentuk masyarakat yang saleh.¹³⁴ Pembentukan persaudaraan manusia sejagat merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan Islam.

Konsep pendidikan Islam yang universal di atas yang mementingkan kesejahteraan umat baik *duniawi* dan *ukhrawi* bagi umat sejagat raya agaknya belum diaplikasikan IAIN secara konkrit selama ini. Hal ini berbeda tentunya dengan apa yang diaplikasikan pendidikan pada periode klasik atau pada Abad Pertengahan. Pada masa tersebut telah dihasilkan sejumlah ilmuan Muslim terkenal yang tidak hanya ahli dalam bidang sains agama tetapi juga sains pengetahuan dan teknologi—sebagai tujuan “final” pendidikan Islam.

¹³⁴ Istilah saleh berasal dari insan saleh yang berarti manusia yang beramal saleh. Dari amal saleh itulah yang menjadi sebab penciptaan dan sebagai materi percobaan di dunia dan sebagai kriteria keselamatan di hari akherat. Seperti disinyalir dalam al-Qur'an bahwa Allahlah yang menciptakan hidup dan mati agar ia menguji siapa diantara kamu yang paling baik amalnya (Q.S. Al-Mulk:2). Dalam perjalanan sejarah, pengertian amal saleh dippersempit oleh orang-orang di era kejumudan Islam sehingga menjadi terbatas hanya pada hal-hal ibadah dan akhlak seorang semata. Sesungguhnya, pemahaman tentang amal saleh ini memerlukan interpretasi dan pemahaman lebih luas dalam ruang lingkup garapan amal tak terhingga, lihat: (Hasan Langgulung, *ibid.*:3).

Menghadapi kebutuhan umat di abad ke-21 atau era global, pendidikan tinggi Islam, khususnya IAIN, dituntut menatap masa depan yang lebih cerah, dengan merespons pentingnya perkembangan sains agama dan sains pengetahuan-teknologi demi kesejahteraan masyarakat sejagat dunia. M. Amin Abdullah (2003: 3-20) menuturkan, selama ini masih kuat anggapan masyarakat bahwa agama dan ilmu adalah dua entitas yang tidak dapat dipertemukan. Ilmu tidak mempedulikan agama dan agama tidak mempedulikan ilmu.

Jika ada sebagian masyarakat beranggapan bahwa lulusan PTAI, termasuk IAIN, kurang berkualitas, hal ini sebenarnya "berkat" proses perkuliahan dan pembinaan itu sendiri. Arif Furqon dalam (*Media Informasi Ditperta's, No. 12 Tahun II, 31 Juli 2004*) mengungkapkan bahwa kurang berhasil PTAI dalam menjalankan tugasnya, utamanya dalam menciptakan SDM berkualitas (*capable people*), dapat disebabkan faktor internal dan eksternal:

Faktor internal meliputi: a) bergesernya aspirasi pendidikan masyarakat (umat Islam) yang dulu lebih mementingkan pendidikan agama ke ilmu umum seiring dengan perkembangan pembangunan bangsa; b) semakin sempitnya lulusan PTAI untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) akibat kebijakan *zero growth*; c) banyaknya lulusan PTAI yang tidak segera mendapatkan pekerjaan yang diinginkan berpengaruh terhadap rendahnya minat mahasiswa untuk masuk PTAI; d) beratnya tantangan yang harus dihadapi ahli agama dalam profesinya dapat berpengaruh terhadap calon mahasiswa, dimana mereka kurang berminat menjadi ahli agama; e) kurangnya minat lulusan SLTA yang memiliki potensi akademik tinggi untuk kuliah di PTAI berpengaruh terhadap kualitas mahasiswa PTAI; dan f) *in-input* mahasiswa yang kurang ideal berdampak terhadap kualitas lulusan (*out-put*) seperti diharapkan masyarakat.

Faktor eksternal, meliputi: a) manajemen dan kepemimpinan yang belum mampu mengelola PTAI secara modern; b) kurikulum PTAI kurang komunikatif terhadap semua pihak terkait; c) kualitas dosen belum memadai; d) proses perkuliahan di PTAI masih tradisional dan formalistik; e) *in-input* mahasiswa dari SLTA kurang berkualitas di PTAI yang berdampak pada rendahnya kualitas *in-input*; f) fasilitas perkuliahan di PTAI belum memadai; g) lingkungan kampus PTAI kurang kondusif dalam mendukung perkuliahan; h) dana operasional belum memadai; i) rendahnya kemampuan dosen

PTAI dalam penelitian ilmiah; j) rendahnya kemampuan dosen PTAI dalam menulis laporan penelitian ilmiah atau menulis artikel ilmiah; k) rendahnya perhatian pimpinan PTAI dalam menyebarkan hasil penelitian para dosen dan mahasiswanya; dan l) kurang sejalan program pengabdian masyarakat dengan hasil penelitian.

Dilihat dari substansi kurikulum di PTAI, berdasarkan kenyataan diatas, menunjukkan bahwa kurikulum PTAI masih mengalami "ketimpangan", seperti tertuang dalam konsep tujuan pendidikan Islam yang universal. Orientasi pembinaan dan pengembangan kurikulum di PTAI belum menyentuh sepenuhnya sains pengetahuan dan teknologi serta sains agama secara berimbang dan integral. Bahkan, kenyataan ini, sesungguhnya tidak hanya terjadi di tanah air, tetapi terjadi pada kebanyakan negara-negara lainnya yang penduduknya mayoritas Muslim. Seperti diungkapkan Abbas (2000: 4), pendidikan nasional, dalam operasionalnya, tampak masih mengalami dikotomi, hal ini lebih disebabkan "kecelakaan historis"¹³⁵ perjalanan bangsa dimana umat Islam berada.

Reformasi kurikulum pendidikan Islam, dalam kasus perubahan IAIN menjadi UIN, tidak terlepas dari motivasi umat Islam dan bangsa Indonesia dalam memajukan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional, seperti telah diketahui, bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yakni menciptakan manusia Indonesia "seutuhnya" yang idealnya memiliki kemampuan sains-teknologi dan sains agama sebagaimana tertuang pada Sila ke-1 dari Pancasila.

Upaya reformasi kurikulum pendidikan tinggi Islam, seperti kasus perubahan IAIN menjadi UIN, sesungguhnya, sebagai upaya aplikasi konsep pendidikan Islam, setelah melalui suatu kajian mendalam dan "melelahkan" terhadap konseptual-teoritik-normatif

¹³⁵Istilah "kecelakaan historis" dimaksudkan Abbas, barangkali, dikotomi pendidikan nasional di banyak negara Muslim terjadi lebih dikarenakan pengaruh sejarah penjajahan, dimana pihak kolonial di banyak negara Muslim memprioritaskan dan mengembangkan pendidikan "sekuler" ketimbang memperhatikan pendidikan Islam. Hal ini, suatu hal yang wajar mengingat setiap bangsa penjajah selalu memiliki visi, misi, dan tujuan berdasarkan tafsir dan kepentingan bangsa kolonial. Sejarah pendidikan Indonesia pun demikian, dimana pendidikan "sekuler" bangsa Belanda lebih dominan diaplikasikan pada masa penjajahan, sehingga dalam perkembangannya hingga masa kemerdekaan, dikotomi pendidikan nasional (Islam dan Nasionalis) masih dirasakan dalam kontes praksis. Setelah memasuki era Reformasi (sejak 1998), pendidikan Islam di Indonesia, terutama madrasah dan PTAI, menjadi perhatian khusus dari pemerintah dalam tataran normatif dan "mulai" ke arah aplikatif-operasional, seperti terlihat dalam substansi UU Sisdiknas No. 20/2003.

tentang tujuan, visi, misi dan substantif (materi-kurikulum) berdasarkan sumber utamanya al-Qur'an dan al-Hadist. Kajian akademisi tentang konsep pendidikan Islam itu bertalian dengan tafsir normatif-tekstual, historis, dan juga sosiologis-kontekstual. Kesenjangan antara pesan al-Qur'an dan al-Hadist dalam praktek pendidikan Islam di negara-negara Islam selama ini, merupakan suatu argumen pentingnya menelaah kembali konsep pendidikan Islam yang universal atau *rahmatan li al-'alamin*. Perubahan IAIN menjadi UIN memperlihatkan terjadinya perubahan mendasar terhadap orientasi dan praktik kurikulum pendidikan Islam di tanah air pada pascareformasi (sejak 1998), yang juga dapat dikatakan sebagai upaya menyelaraskan konsep pendidikan Islam (berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist) dalam konteks praksis. Lebih jauh, hal tersebut merupakan sebagai upaya memenuhi aspirasi umat Islam dan kebutuhan generasi muda Islam menuju abad ke-21 atau era-global yang membutuhkan keunggulan kompetitif, baik kompetensi sains agama maupun sains-teknologi.

Good Bye SBI-RSBI¹³⁶

Tulisan ini lebih fokus pada analisis pascakeputusan MK tentang Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Bagi penulis, Keputusan MK pada 8 Januari 2013 tentang penghapusan SBI-RSBI agaknya masih menyisakan 'duka' bagi sebagian kalangan. Di satu sisi, keputusan MK tersebut patut diapresiasi dan harus diterima, karena lembaga otoritas hukum tertinggi ini telah menafsirkan bahwa Undang-Undang Dasar Dasar telah menyatakan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945, sehingga SBI-RSBI mesti dihapuskan. Tentunya keputusan ini sebagai respon positif terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan 'keadilan' dan 'pemerataan' kesempatan memperoleh pendidikan.

Disisi lain, keputusan MK ini juga tentunya menyisakan sejumlah pertanyaan kritis, yang membuat keputusan ini tidak terlalu prestisius dan bahkan terkesan ambivalen. Dimana, sebagai tindak lanjut dari keputusan MK ini, masih diperbolehkannya sekolah (eks) SBI-RSBI untuk memungut sumbangan dari orang tua hingga Mei 2013, seperti

¹³⁶ Artikel tulisan penulis berjudul: "Good Bye SBI-RSBI" pernah dimuat dalam *Sriwijaya Post*, 5 Februari 2013.

dihasilkan dari pertemuan Mendiknas RI, Muh. Nuh, dengan seluruh Kepala Kemendiknas Provinsi se-Indonesia. Kemendiknas, yang memiliki otoritas tertinggi sebetulnya agak keberatan atas keputusan ini, tetapi harus patuh terhadap keputusan legalitas MK.

Sejumlah argumen dalam konteks yuridis juga tampak berbeda antara hakim, terutama bertalian dengan tidak adanya konteks 'liberalisasi, diskriminasi, dan bahasa Indonesia' (*Tempo*, Edisi 14-20 Januari 2013) yang menjadi alasan MK memutuskannya. RSBI dipandang terlalu 'elitis' dan 'diskriminatif' selama ini, sehingga membuat MK mengambil keputusan 'ambivalen' yang menyisakan 'duka' bagi Kemendiknas dan sejumlah kalangan, yang terpola menjadi dua: ada yang mendukung dan banyak pula sebaliknya, kurang mendukung. Hal ini berimplikasi pada bagaimana efektivitas pascakeputusan MK ini terhadap arah perubahan signifikan yang lebih baik terhadap proses pembangunan pendidikan di negeri ini.

Suatu argumen MK yang meninggalkan *debatable*, ialah alasan keputusan didasarkan pada pentingnya rasa 'keadilan' dan 'pemerataan' pendidikan. Spirit otonomi pendidikan sesungguhnya sebagai upaya proses pemerataan dan keadilan pendidikan. Patut diapresiasi kepada sejumlah pemprov/pemkot/pemkab, kebijakan pendidikan pada otonomi daerah ini telah menyentuh ke berabagi wilayah terpencil dan pelosok desa sekalipun. Inilah salah satu upaya keadilan dan pemerataan pendidikan yang dilakukan pemerintah (pusat dan daerah). Begitu juga halnya, upaya sejumlah pemerintah daerah memberi 'sekolah gratis', dengan kelemahan dan kelebihanannya, harus diakui sebagai upaya mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan ini. Jadi, tidak terlalu jelas pula, keadilan dan pemerataan yang dimaksudkan MK itu.

Dari perspektif kualitas pendidikan, suatu hal berbeda tentunya. Di sinilah spirit dan filosofis pentingnya SBI-RSBI ketika dimasukkan dalam UU Sisdiknas. SBI-RSBI agaknya merupakan 'jalan tengah' atas persoalan pendidikan di tanah air sesungguhnya bersifat heterogen, kompleks, dan rendah dalam hal kualitas, yang tidak kalah krusialnya dari pada hanya sekedar persoalan pemerataan pendidikan. Merubah keputusan MK memang tidak mungkin, karena sudah final dan melalui konsideran tidak sembarangan tentunya, berdasarkan analisis fakta hukum yang argumentatif. Akan tetapi, keputusan MK ini masih terbuka untuk kritik atas kelemahan argumentatif-sosiologis, antara lain:

Pertama, kesan yang tampak terhadap keputusan MK dalam menghapus SBI-RSBI lebih dikarenakan alasan mengakomodir aspirasi masyarakat yang menginginkan 'keadilan' dan 'pemerataan'. Keputusan MK ini belum mengakomodir masyarakat umumnya yang heterogen dan berkelas, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah, yang banyak menyekolahkan anaknya ke sekolah SBI-RSBI. Tentu jumlah penduduk Indonesia kelas menengah pascareformasi cenderung meningkat, yang tentunya sangat mendambakan anak-anaknya ke sekolah yang lebih baik kualitasnya. Bagi orang tua yang berlatar belakang sosial-ekonomi menengah ke-atas, *milioner*, keputusan MK ini tidak teralalu berpengaruh karena mereka bisa menyekolahkan anaknya kemana saja, termasuk ke luar negeri. Hanya saja yang barang kali yang rugi tetap pemerintah, karena devisa akan 'pergi' ke luar negeri.

Untuk orang tua yang berlatar belakang sosial-ekonomi kurang mampu tetapi anaknya berprestasi, agaknya merupakan tanggung jawab pemerintah. Akhir-akhir ini, kebijakan pemerintah pun sudah mulai jalan sebetulnya, yakni pemerintah (Kemendikbud dan Kemenag) telah memberi berbagai bantuan dan beasiswa bagi anak-anak sekolah dan juga mahasiswa yang orang tua kurang mampu. Hanya saja, kedepan yang diperlukan adalah persentase dan kuantitas bantuannya perlu ditingkatkan mengingat masih terlalu banyak mereka yang membutuhkan. Jadi, pemerintah sebetulnya telah melakukan berbagai upaya kebijakan pendidikan sebagai wujud langkah 'keadilan' dan 'pemerataan' pendidikan di era-reformasi dan otonomi daerah.

Disinilah, keputusan MK dengan argumen 'keadilan' dan 'pemerataan' menjadi lemah dalam konteks realitas-sosiologis. Sama halnya, argumen pentingnya menjaga nasionalisme dan kelestarian bahasa Indonesia, semakin kurang berarti ketika dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat global, dimana sekolah memang harus mempersiapkan segala sesuatunya dalam kurikulum agar anak didik siap hidup pada zamannya di era global yang kompetitif. Dalam sejarah, banyak pemimpin besar di negeri ini pun, misalnya Soekarno dan Hatta, tetap memiliki nasionalisme yang tidak terbantahkan meskipun lulusan luar negeri berbahasa asing. Mereka justeru mengatur strategi perjuangan ketika masih menimba ilmu di luar negeri.

Kedua, keberadaan (eks) SBI-RSBI selama ini harus diakui telah mendongkrak sekolah 'berplat merah' ini menjadi lebih bermartabat karena kualitasnya yang tidak hanya berkiprah pada level nasional tetapi juga internasional. Kita juga faham bahwa banyak anak-anak dari sekolah dari jenis sekolah ini yang menjuarai berbagai olimpiade sains. Pada masa Orde Baru, sekolah negeri identik dengan 'pemerataan' yang secara umum hanya sedikit yang berkualitas di atas rata-rata. Kehadiran SBI-RSBI pada era-Reformasi selanjutnya secara berproses dan perlahan telah mendongkrak martabat dan kualitas sekolah negeri yang dulu sering dipandang sebelah mata alias 'second'.

Hal ini, selanjutnya, telah memotivasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah ini. Sebenarnya, tidak semua orang tua yang mampu secara ekonomi tetapi banyak pula yang 'pas-pasan' menyekolahkan anaknya ke sekolah ini, demi adanya 'investasi' pendidikan bagi anak-anaknya. Karenanya sumbangan pun beragam tingkatannya sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua, setelah dipertimbangkan dan diputuskan Komite Sekolah. Pengurus Komite Sekolah biasanya pun berlatar belakang dari tokoh masyarakat dalam berbagai profesi yang meluangkan waktu membantu sekolah ini agar lebih menjadi lebih baik kinerja dan berkualitas. Memang tidak semua SBI-RSBI sudah bagus dalam kinerjanya, sebagaimana diakui Menteri Kemendikbud, M. Nuh yang mengatakan bahwa 'banyak juga sekolah SBI-RSBI yang telah memberikan bantuan atau subsidi biaya bagi anak-anak yang kurang mampu, yang berkisar 25 persen. Meskipun masih ada pula yang 'nakal', tetapi hal itu wajar karena baru merangkak dan berproses'.

Ketiga, persoalan sesungguhnya pendidikan nasional bertalian dengan rendahnya anggaran pendidikan. Karenanya, keputusan MK ini belum tentu sebagai solusi jangka panjang yang efektif bagi kemajuan pendidikan nasional. Anggaran pendidikan nasional yang bersumber dari APBN masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan operasional pendidikan yang didealkan, yakni hanya sekitar 20 persen (termasuk gaji guru/karyawan), tentunya jauh dari cukup untuk biaya operasional pendidikan. Di sisi lain, masih sedikit daerah (pemprov/pemkot/pemkab) yang menganggarkan pendidikan sekitar 20 persen atau di atasnya.

Kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam UU Sisdiknas merupakan suatu hal yang diharapkan dalam memajukan pendidikan.

Bila sebagian biaya operasional merupakan kontribusi masyarakat dalam bentuk sumbangan dalam operasional SBI-RSBI, sesungguhnya itulah bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi orang tua murid dalam bentuk sumbangan resmi melalui legalitas Komite Sekolah merupakan bentuk partisipasi masyarakat ditengah keterbatasan anggaran pendidikan nasional yang bersumber dari pemerintah (APBN-APBD) selama ini. Orang tua bersedia mematuhi dan membayar uang sumbangan karena harapan adanya kualitas pendidikan yang diperoleh anaknya di SBI-RSBI. Jadi, agaknya keputusan MK ini, tidak hanya kontraproduktif terhadap UUSPN tetapi juga telah mengabaikan partisipasi orang tua/masyarakat, yang telah bersusah payah mempersiapkan biaya demi anak-anaknya untuk bisa sekolah di SBI-RSBI.

Partisipasi orang tua/masyarakat seperti terlihat dalam UUSPN sesungguhnya telah terjadi di SBI-RSBI selama ini, tetapi dengan dihapuskannya sekolah ini justru bisa saja menjadikan sebaliknya, dimana partisipasi masyarakat abisa saja menjadi menurun. Padahal, pendidikan menjadi maju banyak ditentukan oleh berbagai elemen penting, salah satunya bila dukungan masyarakat lebih kuat. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam banyak hal, termasuk anggaran. Tentu, keputusan MK sudah final, tidak bisa diganggu gugat, dan tidak perlu diratapi lagi. Semoga saja ada solusi yang lebih baik dari penyelenggara pendidikan di negeri ini demi masa depan 'tunas-tunas bangsa' dan peradaban bangsa. "Selamat Jalan" SBI-RSBI.

Negara dan Perguruan Tinggi¹³⁷

Perguruan Tinggi (PT) merupakan institusi sosial yang memiliki andil signifikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Tetapi, nasib PT di tanah air agaknya masih jauh dari harapan demikian. Kebijakan pemerintah tentang swastanisasi perguruan tinggi (PTN) justru menimbulkan protes keras dari mahasiswa. Akan tetapi, pemerintah agaknya akan terus menerapkan kebijakan swastanisasi itu, melalui Badan Hukum Pendidikan (BHP), dimana nantinya perguruan tinggi lebih ditekankan menjadi mandiri (swasta).

¹³⁷Tulisan penulis yang berjudul: 'Negara dan Perguruan Tinggi', pernah dimuat dalam *Sumatera Ekspres*, 28 April 2006

Proses aplikasi BHP ini agaknya tidak selalu mulus bagi sejumlah PT dan sering kali justru menjadi sasaran protes mahasiswa karena menjadi BHP identik dengan mahalanya biaya pendidikan. Pihak mahasiswa memiliki argumen yang logis bahwa banyak orang tua kini masih sulit membayar SPP karena keadaan sosial dan ekonomi yang buruk. Pihak PT juga memiliki argumen bahwa sangat sulit melaksanakan proses perkuliahan ketika anggaran operasional sangat minimal. Ini akan menyulitkan mahasiswa untuk memperoleh pembelajaran yang layak dan justru akhirnya hanya akan menghasilkan SDM (sarjana) kurang berkualitas.

Dalam kenyataannya, bagi sebagian besar masyarakat memasuki PT masih terlalu elit karena mahalanya biaya masuk. Apalagi sejak memasuki era reformasi pada 1998, dimana bangsa ini mengalami krisis yang multidimensional yang kini masih dirasakan. Reformasi agaknya selalu berdampak positif dan negatifnya. Di bidang sosial – ekonomi, banyak orang tua mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sejumlah perusahaan dan peluang lapangan kerja baru tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini akan menciptakan meningkatnya pengangguran, termasuk pengangguran terdidik (intelektual), lulusan PT. Hal ini pula hanya akan menyulitkan sebagian orang tua untuk mengirimkan anaknya ke jenjang PT. Beban masyarakat semakin bertambah pula ketika adanya kebijakan pemerintah tentang naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak buruk terhadap naiknya harga sejumlah barang kebutuhan primer dan sekunder.

Kesulitan dan kesusahan masyarakat ini sering kali tersalurkan melalui suara mahasiswa. Kasus demo mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan PT yang menerapkan pola swastanisasi, terutama PT di Jawa, misalnya UGM, UI, ITB, dan IPB, merupakan respons positif mahasiswa terhadap realitas aspirasi masyarakat umumnya. Aksi protes mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang pada tahun lalu atas kenaikan SPP mahasiswa baru merupakan bentuk kepedulian masalah sosial dan ekonomi masyarakat yang buruk. Sama halnya, baru-baru ini, aksi protes mahasiswa UNSRI atas rencana kenaikan SPP mahasiswa baru pada prinsipnya perlu dilihat sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kendatipun begitu, tidak ada yang salah dengan kebijakan PT untuk menaikkan SPP mahasiswa baru itu.

Dalam kenyataannya, memang anggaran yang bersumber dari APBN belumlah memadai untuk membiayai sejumlah PT. Memang anggaran sektor pendidikan tahun 2006 mencapai 20% akan tetapi agaknya dalam kenyataannya tidak banyak perubahan terhadap kinerja dan kualitas PT ke depan. Dari 600 triliun rupiah anggaran sektor pendidikan untuk tahun 2006 itu, diperkirakan 20% (120 triliun) untuk anggaran semua PTN. Jumlah mahasiswa PTN diperkirakan 4 juta orang dengan subsidi dana pemerintah itu berkisar 6 juta rupiah. Bandingkan subsidi pemerintah Malaysia yang berjumlah 114 juta rupiah per mahasiswa dan Singapura berjumlah 200-an juta per mahasiswa (Media Indonesia, 4 April 2006). Hal ini menunjukkan bahwa sesama negara Asia, terdapat perbedaan signifikan perhatian pemerintah terhadap pembangunan PT. Pemerintah Indonesia terlalu lemah perhatiannya terhadap PT. Belajar dari negara-negara maju dan masih negara jiran itu, agaknya memang kita perlu mengevaluasi kebijakan terhadap PT. Anggaran yang belum wajar berdampak buruk terhadap kondisi sarana-prasarana perkuliahan, kesejahteraan dosen dan pegawai, proses perkuliahan asal jalan, dan lulusan (output) yang kurang berkualitas.

Karena itu, pihak pemerintah seharusnya justru lebih proaktif dalam upaya memberdayakan PT dengan memperbanyak subsidi. Apa yang dilakukan pemerintah Jepang sejak 1945 dan pemerintah Malaysia sejak 1970 adalah memberikan perhatian penuh terhadap PT. Tidak mengherankan jika kini banyak putera-puteri Indonesia belajar di negara jiran (Malaysia) itu dimana sebelumnya mereka banyak belajar ke Indonesia. Ketika negara tidak memberi subsidi terhadap PT agaknya jangan terlalu banyak berharap bila PT dapat menghasilkan SDM yang berkualitas.

Desentralisasi pendidikan dalam bentuk Otonomi Daerah belum terlalu banyak diharapkan. Mengingat, para pemimpin (para gubernur, bupati, walikota) di daerah umumnya belum memiliki perhatian serius terhadap kemajuan PT. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran yang disediakan pemerintah daerah untuk PT di lingkungan wilayah kekuasaannya masih belum sepadan dengan kebutuhan riil PT itu. Mungkin, hal ini terjadi karena ketergantungan masih banyak pemimpin di daerah tergantung kebijakan terhadap pusat (Jakarta). Di Provinsi Sumatera Selatan, baru Kabupaten Muba yang menggratiskan biaya pendidikan untuk jenjang SLTA. Bahkan, kebijakan

gratis ini mungkin satu-satunya jenjang SLTA gratis di Indonesia, mengingat DKI Jakarta baru akan menerapkannya.

Perhatian pemerintah yang belum serius terhadap sektor pendidikan (PT) ini tentu menggelisahkan masyarakat PT, terutama kalangan mahasiswa. Aspirasi mahasiswa terhadap kebijakan kenaikan SPP di berbagai PT misalnya merupakan bentuk keprihatinan yang berdasarkan realitas masyarakat itu. Karena itu, kebijakan beberapa PT untuk menaikkan SPP merupakan suatu keputusan sulit dan harus dilakukan demi berjalannya proses perkuliahan di PT itu. Kenaikan SPP agaknya memang bukan solusi sub-stantif, mengingat kendatipun SPP dinaikkan, hal itu hanyalah bersifat strategi bertahan (mobilizing) agar proses perkuliahan berjalan lancar dan normal tadi, tetapi belum berorientasi kepada kualitas. Apalagi, untuk perguruan tinggi swasta (PTS), proses perkuliahan masih banyak yang "asal jalan" dan karena keterbatasan dana operasional. Dampaknya PT di tanah air banyak yang hanya memproduksi sejumlah sarjana tapi kering dengan ilmu pengetahuan dibidangnya.

Karena itu, ada korelasi positif antara peran negara dengan kualitas PT. Di negara-negara maju, PTS pun mendapat subsidi, terutama dari perusahaan-perusahaan terkemuka. Jadi, subsidi tidak dapat ditinggalkan begitu saja jika suatu perguruan tinggi ingin maju. Memang selama ini PTS di tanah air banyak yang tetap eksis sekalipun tanpa subsidi pemerintah tetapi agaknya lebih banyak pula PTS yang tidak berkualitas. Seburuk-buruk PTN, akan memiliki nilai lebih dibandingkan PTS karena proses perkuliahannya lebih baik sebagai efek dari mendapat subsidi anggaran dari pemerintah.

Suatu hal yang riskan jika perhatian dan tanggung jawab negara/pemerintah dikurangi dengan mengurangi subsidi atau dihilangkan sama sekali, terutama melalui kebijakan BHP. Hal ini, setidaknya, disebabkan dua hal. Pertama, dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 pada intinya dapat dikatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak memperoleh pendidikan yang layak. Amanat UUD itu mengisyaratkan bahwa negara harus berupaya memberi kesempatan kepada warganya agar dapat memperoleh pendidikan (PT) yang layak. Pendidikan yang layak dan berkualitas merupakan harapan dan amanat masyarakat. Perhatian terhadap PT adalah juga amanat yang harus dilaksanakan demi pendidikan yang layak bagi masyarakat.

Karena itu, dari pola pandangan demikian agaknya kebijakan BHP sesungguhnya perlu dievaluasi karena kontradiksi dengan makna dan semangat UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 itu. Kedua, realitas sosial dan ekonomi masyarakat saat ini sangat belum memungkinkan untuk menerapkan BHP. Adalah sangat sulit untuk memperoleh dana segar dari masyarakat (orang tua) melalui iuran SPP, bila dimaksudkan untuk membiayai operasional agar menjadi PT yang berkualitas. Jika kebijakan BHP terus diterapkan maka akan banyak anak-anak usia muda tidak dapat melanjutkan ke jenjang PT karena tidak mampu membiayainya.

Agak sulit membayangkannya, ketika ditengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sulit kebijakan BHP diterapkan. Pemerintah merupakan satu-satunya harapan agar mengambil peranan strategis dalam upaya membantu kesulitan masyarakat terhadap pembangunan PT ini. Pemerintah seharusnya perlu meningkatkan jumlah subsidi kepada sejumlah PTN dan PTS demi mempersiapkan SDM berkualitas memasuki era global. Bukan justru menghilangkan subsidi itu. Pengelolaan PT, dalam hal ini, harus dilihat dan diberlakukan sebagai upaya investasi manusia (human investment) yang sarat dengan perhitungan untung-rugi.

Jika, alur logika demikian mendapat tempat, maka agaknya maju dan mundurnya PT di tanah air sangat tergantung pada sejauhmana peran pemerintah/negara. Jika peranan ini diserahkan ke masyarakat, agaknya hal itu masih terlalu dini dan awam bagi masyarakat kita.

Epilog :

GLOBALISASI ISLAM DAN PERTANYAAN KRITIS TENTANG KRISIS PENDIDIKAN UMAT

**Oleh: Prof. Dr. Irwan Abdullah
(Guru Besar Antropologi UGM)**

Perubahan yang dibawa oleh globalisasi berimplikasi luas pada aspek-aspek material dan nonmaterial umat Islam. Komersialisasi yang meluas akibat masuknya kekuatan global telah melahirkan suatu proses dislokasi agama di mana selain batas-batas agama mengabur, nilai-nilai dan ajaran agama berbaur dengan berbagai nilai dan ajaran, juga kepatuhan pada agama melemah. Akibat nyata ditemukan pada lahirnya individualisasi keagamaan yang di satu sisi mengikis kekuatan-kekuatan kolektif dan di sisi lain terjadinya privatisasi dalam praktik keagamaan secara meluas. Sub-sub komunitas keagamaan lahir dengan diferensiasi makna dengan spektrum yang luas hingga mengubah citra dan realitas aktual kehidupan umat. Islam, misalnya, sebagai akibat dari proses integrasi ke tatanan global, telah ditempatkan sebagai bagian dari kekerasan global dan bagian dari jaringan terorisme internasional. Pada saat persoalan lokal (kultural) dan nasional (struktural) umat Islam belum selesai, kita dihadapkan pada persoalan internasional sebagai akibat perubahan ruang fisik dan simbolik yang terjadi secara meluas.

Pertanyaan pokok yang penting untuk dijawab setiap ilmuan yang terlibat dalam Studi Agama: apakah model pendidikan agama yang diterapkan pada berbagai tingkatan sudah cukup responsif terhadap perubahan ruang dan konteks masyarakat tersebut? Pertanyaan ini tampaknya telah menjiwai kumpulan karangan Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed., *Dinamika Sosiologis Indonesia*, yang mempertanyakan kemampuan kontekstualisasi pendidikan agama dalam kehidupan empiris. Kurikulum pendidikan Islam merupakan basis yang sangat fundamental dalam membekali setiap Muslim dalam memandang, bersikap dan bertindak atas perubahan-

perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan konteks telah menjadi tekanan penting tentang kemampuan kurikulum pendidikan Islam membekali peserta didik menghadapi apa yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat dengan tantangan yang berubah. Kurikulum pada umumnya terlambat merespons perubahan tuntutan yang muncul dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya disorientasi yang meluas dalam menjalani kehidupan nyata yang menegaskan prinsip-prinsip hidup yang dipelajari secara tekstual. Kehidupan umat Islam tidak dapat dipisahkan dari tekanan-tekanan baru yang dibawa dari berbagai pusat perkembangan dunia sehingga dibutuhkan sejumlah skenario untuk merespon persoalan nyata dalam rangka menciptakan kehidupan umat yang lebih maju dan damai.

Proses globalisasi, yang merupakan sumber realitas objektif baru, tidak jarang mendapatkan perlawanan yang melahirkan suatu bentuk disintegrasi. Kecenderungan ini terlihat juga dari adaptasi-adaptasi yang dilakukan masyarakat Muslim terhadap berbagai pengaruhnya. Di Malaysia terjadi proses Islamisasi secara meluas dalam rangka melawan nilai-nilai dari luar, termasuk gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan. Di Indonesia pernah muncul pribumisasi ilmu. Gerakan ini tidak cukup kuat membendung pengaruh globalisasi yang semakin kuat sejalan dengan perbaikan transportasi dan teknologi komunikasi. Semakin banyak orang yang keluar masuk di negeri ini dan mendapat pendidikan luar negeri, semakin banyak informasi dengan nilai yang terdiferensiasi yang masuk melalui berbagai saluran, demikian pula banyak gerakan sosial yang masuk sebagai bagian dari integrasi ke tatanan dunia. Pemerintah pun, yang berperan dalam menyaring jenis informasi yang masuk ke suatu negara, tidak pernah mampu meredam arus informasi yang membanjir baik dari sudut jenis maupun intensitasnya.

Informasi yang disalurkan melalui berbagai media (yang merupakan kekuatan paling nyata dari masyarakat modern) telah membentuk ideologi yang paling mendasar, yakni penegasan perbedaan dan kebebasan karena keragaman pilihan informasi memberi kemungkinan yang hampir tak terbatas untuk membangun perbedaan-perbedaan (Bourdieu, 1984; Ritzer, 2007). Berbagai institusi terbentuk untuk mensyahkan perbedaan-perbedaan ini, seperti media (cetak dan elektronik) dan pasar yang menyediakan

pilihan barang yang tak terbatas dari sudut jenis dan kualitas. Publik semakin menyadari adanya ruang "freedom" yang dalam praktiknya cenderung digunakan secara salah kaprah.

Globalisasi sesungguhnya telah melahirkan suatu jenis ideologi yang menjadi dasar dari pembentukan, pelestarian, dan perubahan masyarakat yang bertumpu pada proses identifikasi diri dan pembentukan perbedaan antar orang (Abdullah, 1994; Bennet, 2005). Kapitalisme karenanya telah menjadi kekuatan yang paling penting dewasa ini, yang tidak hanya mampu menata dunia menjadi satu tatanan global, tetapi mengubah tatanan masyarakat menjadi sistem yang bertumpu pada perbedaan-perbedaan yang mengarah pada pembentukan status dan kelas dengan orientasi tertentu. Setiap praktik sosial kemudian menjadi bagian dari politik identitas dalam rangka pemosisian sosial individu dalam suatu ukuran nilai dengan prinsip-prinsip yang baru yang mengarah kepada konsep nilai lebih (*value-added*).

Pengaruh dari kecenderungan pembentukan perbedaan ini dapat dilihat pada tiga dimensi yang berbeda. *Pertama*, perbedaan tampak dari perkembangan jenis (kuantitas) pengetahuan yang beragam dan kualitas yang bertingkat-tingkat. Berbagai agen terlibat dalam usaha peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat, seperti kursus-kursus dan berbagai lembaga pendidikan yang berperan di dalam peningkatan mutu dan kualitas pengetahuan. Yang penting di sini bahwa orang dapat hidup dengan perbedaan-perbedaan tingkat penguasaan dan keragaman pengetahuan yang dimiliki masing-masing orang. Perbedaan ini pun telah menyebabkan stratifikasi masyarakat semakin rumit. Perkembangan masyarakat pun telah memperlihatkan kemampuan di dalam mengkaitkan satu penguasaan kemampuan dengan yang lain sehingga membentuk hubungan fungsional di dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat modern. Sifat-sifat khusus dari pengetahuan dengan kecenderungannya masing-masing telah menjadi alat pembeda yang sangat penting dalam transaksi sosial, termasuk dalam penguasaan ilmu agama.

Kedua, perbedaan dalam hal nilai yang terjadi secara meluas di mana perbedaan alat ukur dan penilaian terhadap berbagai dimensi kehidupan dapat terjadi dalam ruang dan waktu yang sama karena setiap kelompok memiliki relativitas nilainya sendiri-sendiri. Penerimaan dan pengesahan terhadap nilai yang berbeda tidak hanya

mengubah tata nilai, tetapi juga memiliki dampak yang luas dalam pemaknaan sosial. Norma-norma yang terbentuk kemudian lebih bersifat melayani kepentingan kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam banyak hal, nilai guna/fungsi menjadi jauh lebih penting dan menjadi alat ukur di dalam praktik sosial secara umum. Keterbukaan terjadi secara meluas dan batas-batas budaya mulai mencair sehingga mendorong terjadinya redefinisi identitas individu dan kelompok. Nilai agama dinegasikan oleh nilai-nilai lain yang tentu saja untuk kepentingan yang belum tentu sejalan. Muncul pula cara beragama secara bervariasi dengan lahirnya sekte-sekte keagamaan dalam berbagai bentuk yang acapkali menuai protes dan bahkan konflik.

Ketiga, praktik sosial memperlihatkan tidak hanya perbedaan yang muncul tetapi juga pertentangan yang muncul secara bersamaan. Sejalan dengan ini setiap kelompok orang semakin bebas mengekspresikan bentuk-bentuk praktik yang berbeda dengan kelompok lain sehingga totalitas menjadi tidak penting lagi di dalam kehidupan aktual. Hal ini sejalan dengan melemahnya tata nilai dominan yang menyebabkan perbedaan-perbedaan praktik merupakan kekuatan baru dalam proses pemaknaan kehidupan itu sendiri (Featherstone, 1991). Perbedaan ini tidak hanya melemahkan batas-batas tradisi, tetapi juga telah menciptakan pola-pola hubungan baru yang lebih egaliter dalam berbagai ukuran. Hubungan antarpemeluk agama yang berubah, termasuk intraagama, sejalan dengan munculnya sekte-sekte atau aliran keagamaan, mengalami perubahan mendasar. Kebenaran agama perlahan-lahan menjadi relatif akibat kontradiksi-kontradiksi yang muncul dalam berbagai bentuk praktik agama.

Perubahan yang terjadi telah menunjukkan pergeseran pendefinisian agama pada tingkatan yang berbeda-beda. Agama dalam konteks sosial di atas tidak hanya merupakan definisi yang terlihat pada struktur simbolisnya, tetapi juga dituntut pemahaman struktur sosial. Orientasi nilai yang berubah dalam masyarakat pada dasarnya menjadi basis munculnya perbedaan sosial yang kemudian menjadi basis struktural dalam pendefinisian agama. Agama menjadi lain artinya pada kalangan menengah, pada kaum muda, atau pada kelompok profesional. Dalam konteks ini, agama pun kemudian membutuhkan legitimasi simbolik yang sangat berbeda berdasarkan kelompok. Persoalan semacam ini menjadi keprihatinan yang tidak hanya ingin dibagi tetapi juga dipahami dalam buku yang ada di

tangan pembaca. Prof. Abdullah Idi, misalnya, tidak hanya menyoroti kaum muda dalam hubungannya dengan identitas atau karakter bangsa, tetapi dengan gaya hidup yang menjadi bagian dari konstruksi modernitas global. Banyak pertanyaan mendasar yang dibicarakan di dalam menyiapkan masyarakat yang lebih multikultural dan bermartabat.

Konsen pokok penulis tidak lain pada pembentukan yang oleh Goldsmith (1988) dikatakan sebagai persoalan pembentukan pikiran global (*global mind*) yang bekerja sama mengembangkan kehidupan ke tingkat yang lebih baik berdasarkan apa yang dipelajari dari berbagai belahan dunia. Jika dulu sumber-sumber lokal menjadi ilham dalam berbagai tindakan sosial, kemudian bergeser ke sumber-sumber global yang dienkulturasikan dan disosialisasikan dalam suatu seting sosial yang terus berubah. *Long-term values* yang diperoleh dari berbagai sumber informasi menjadi suatu kerangka acuan yang memperlihatkan nilai kolektif dalam skala besar. Kemungkinan semacam ini didukung oleh lahirnya berbagai media, TV, film, games, atau pengalaman realitas virtual, yang dapat diakses dengan biaya yang relatif murah. Nilai jangka panjang merupakan investasi yang diperoleh melalui suatu visi, kreativitas, inovasi, dan kerja keras. Praktik sosial dalam hal ini berorientasi pada tatanan global yang dapat diakses oleh penduduk dalam skala yang lebih luas dan bersifat lintas ruang (melampaui batas etnis dan agama). Agama bukan lagi pusat dari sumber kehidupan, tetapi menjadi pelengkap dari berbagai instrumen modernisasi. Humanisme pun menjadi kurang penting karena kehidupan telah dilengkapi dengan infrastruktur yang dominatif.

Persoalan humanitas menjadi penting dalam konteks global bukan saja akibat proses teknologisasi yang terjadi secara besar-besaran, tetapi juga akibat interaksi tatap muka yang cenderung menghilang dari waktu ke waktu. Realitas media, misalnya, akan menjadi suatu dunia yang tanpa sadar mengasah kemanusiaan kita (Delanty, 2003; Ahmed, 2007). Media ini melahirkan jarak baru dengan realitas sosial yang sesungguhnya sehingga proses empati menjadi persoalan besar dalam konteks semacam ini. Ruang-ruang sosial juga semakin sempit sejalan dengan dibentuknya berbagai ruang elektronik (*electronic space*) yang lebih efisien. Penduduk kehilangan intensitas sosial akibat pola alokasi waktu yang berubah

dan cenderung berhadapan dengan barang-barang elektronik ketimbang kelompok atau komunitasnya. Individu di sini semakin terpisah dari kelompok keagamaannya yang menyebabkan nilai dan pemaknaan menjadi bersifat relatif dan terdiferensiasi. Hubungan personal menjadi kurang penting sejalan dengan menghilangnya empati emosional dalam diri individu.

Perkembangan ciri masyarakat itu, seperti dijelaskan di atas, mengandung bahaya, yang diakibatkan oleh transisi ke suatu bentuk baru masyarakat, seperti konformitas, stimulasi jangka pendek, dan isolasi. Bagaimana ketiga ciri masyarakat ini dapat direspon menjadi suatu isu penting karena proses sosial tersebut memiliki implikasi yang luas bagi kehidupan masyarakat Indonesia sekarang dan masa mendatang? Usaha penyatuan masyarakat bukan lagi bertumpu pada penyatuan etnis dan agama, tetapi penyatuan pikiran-pikiran, nilai-nilai dan praktik sosial yang beragam, yang dimiliki oleh individu-individu bukan oleh kelompok. Disintegrasi dalam hal ini merupakan potensi yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya ketika nilai yang dicita-citakan bersama tidak dapat terbentuk. Pemeluk agama tidak lagi terdiri dari satu kelompok yang relatif homogen, tetapi bertingkat dan terdiferensiasi. Batas-batas kelompok Islam menjadi tidak jelas karena proses polarisasi yang juga menyebabkan identitas keislaman menjadi rancu dan kabur.

Simbol keislaman bukan lagi satu-satunya yang memonopoli, tetapi hadir di antara simbol-simbol lain yang dikenakan oleh individu atau kelompok. Simbol-simbol tersebut tidak jarang bertentangan satu sama lain. Keadaan ini menyebabkan kesulitan mendeteksi kehadiran Islam, khususnya pada saat simbol-simbol keislaman tercampur dengan simbol-simbol lain. Batas-batas kelompok mengabur dan jaringan yang meluas menciptakan kerancuan keanggotaan individu. Islam yang tidak lagi hadir dalam bentuk yang tradisional-konvensional, menjadi bagian dari perangkat modernitas dan posmodernitas: menjadi bagian dari *fashion show* karena jilbab dan pakaian Muslim telah menjadi komoditi. Jilbab, misalnya, kemudian bukan lagi sekadar pakaian kaum Muslim yang terkait dengan moral dan kesantunan, tetapi juga menyangkut dengan nilai, mode, fashion, estetika, hingga pasar dan uang.

Pada saat batas-agama menjadi tidak jelas, sistem referensi individu di dalam menilai dan melakukan sesuatu menjadi berbeda.

Meskipun kebudayaan global tidak secara langsung memberikan basis nilai di dalam pengukuran sosial, tetapi jelas bahwa ukuran yang dipakai dalam menilai dan mempraktikkan sesuatu menjadi berbeda dan, sekali lagi, bersifat individual. Kuswanjono mengatakan bahwa ketika manusia sadar bahwa dirinya menjadi bagian dari komunitas dunia, pada saat yang sama manusia kehilangan identitas, merasa menjadi sekelompok masyarakat inferior yang terpinggirkan. Perasaan itu membangkitkan semangat romantisme untuk kembali ke masa lalu. Identitas primordial menjadi suatu kebanggaan (Kuswanjono, 2001: xvi). Proses globalisasi yang membawa kesadaran lokal dan primordial terutama disebabkan oleh mengaburnya batas-batas identitas personal dalam kerangka Islam yang kolektif. Agama mengalami pendefinisian ulang yang menyangkut fungsinya dalam membingkai kehidupan individu ke dalam suatu sistem keagamaan.

Konfigurasi agama dalam berbagai praktik mengalami perubahan karena ruang sosial budaya sedang mengalami deterritorialisasi. Kontekstualisasi dalam hal ini tidak berlangsung karena pergeseran basis agama yang terjadi terus menerus. Kecenderungan individualisasi atau privatisasi kehidupan, karenanya, akan semakin jelas jika agama dan pemimpin agama masih berfungsi dengan baik. Sejalan dengan ini, Peter Beyer mengatakan:

"...religion will have a comparatively difficult time in gaining public influence at the level of global society as a whole; but such influence will be easier to attain if religious leader apply traditional religious modalities for the purpose of sub-societal...." (Beyer, 1991: 374).

Bagaimanapun sistem referensi tradisional, yang berasal dari agama, harus diperkuat bukan sekadar untuk meredam pengaruh kebudayaan global, tetapi lebih untuk memanfaatkan sebaik mungkin pertemuan dengan kebudayaan luar sebagai modal di dalam pengembangan keagamaan. Agama yang menyangkut substansi doktrin, nilai-nilai, dan pola tingkah laku dalam keberagamaan merupakan "*religious modalities*" yang menentukan bagaimana dunia dengan perubahan-perubahannya dikonsepsikan dan ditata. Pada saat pasar mengambil alih kekuasaan maka agama beralih dari sesuatu yang bersifat etis menjadi estetis. Pasar telah mengubah agama menjadi komoditi yang menggeser prinsip-prinsip etika yang semula berlaku.

Pergeseran dari etika ke estetika selain memperlihatkan tanda adanya pergeseran yang mendasar dalam masyarakat, juga merupakan tanda dari pembentukan etos kehidupan yang berbeda di mana etos konsumtif/symbolis menjadi jauh lebih penting dari daripada etos produktif/teknologis. Sejalan dengan komodifikasi yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, agama di sini menjadi "produk" yang dikonsumsi. Praktik agama dengan segala segala nilai dan normanya kemudian tidak lagi merupakan proses etis, tetapi telah menjadi proses estetis karena praktik agama dalam berbagai bentuk, seperti umrah atau menunaikan haji, mengalami pergeseran menjadi suatu bentuk turisme akibat bentukan kapitalisme. Dengan demikian terjadi proses konsumsi citra oleh umat Islam, yang menjauhkan umat dari esensi praktik keagamaan yang asas. Simbol-simbol keagamaan mengalami reproduksi sosial dalam berbagai bentuk yang hadir di bawah tekanan struktural dan relasional.

Pada saat agama menjadi estetika akibat kekuatan kapitalisme yang begitu ekspansif, pada saat yang sama individu dan kelompok tercerabut dari akar-akar sosial keagamaan. Perubahan ini terjadi oleh proses-proses yang sistematis yang terjadi sebagai konsekuensi dari adanya globalisasi, termasuk perubahan ruang keagamaan dalam berbagai bentuk. "Gerakan nonkeagamaan" yang terjadi secara meluas yang dapat dikatakan sebagai proses desakralisasi yang muncul pada saat agama dicampuri atau bahkan digugat oleh banyak logika dan penjelasan ilmu pengetahuan yang rasional empirik. Agama tidak selamanya menjadi pusat orientasi nilai dan dalam banyak kasus justru menjadi objek yang dipengaruhi oleh berbagai pilihan nilai. Keberadaan agama di sini menjadi objek dari berbagai kepentingan. Degradasi keagamaan terjadi pada saat ajaran agama telah terkontaminasi oleh ajaran-ajaran lain yang berorientasi pada pemberian otoritas yang besar pada individu. Purifikasi agama yang terjadi dalam berbagai bentuk tidak cukup kuat untuk membendung ekspansi kekuatan lain yang sarat dengan nilai-nilai ideal yang dikonsepsikan secara kolektif.

Tantangan yang begitu besar yang dihadapi umat menyangkut dislokasi agama dan disorientasi umat dalam berbagai hal. Ruang-ruang agama semakin menyempit akibat tekanan ekonomi dan gaya hidup yang menyebabkan disorientasi hingga mengkondisikan umat mencari ruang-ruang ekspresi keagamaan yang baru yang dapat melemahkan ikatan-ikatan keagamaan. Perubahan internal

kemudian terjadi menyangkut redefinisi kedirian dan identitas yang terjadi secara meluas yang juga direspons dalam buku ini dengan cara seksama, terutama ketika pembangunan karakter mengalami kegagalan yang menjauhkan usaha-usaha pembentukan jatidiri dalam masyarakat. Disintegrasi, konflik, kekerasan, radikalisme, kesesatan, primordialisme, dan krisis moral yang dibicarakan dalam buku *Dinamika Sosiologis Indonesia* ini, tidak lain merupakan sebuah konsekuensi logis atas ketidakmampuan kita membaca dan memahami situasi yang berkembang secara kontekstual dalam suatu dunia yang menjadi satu.

Dengan melihat pada tekanan-tekanan keruangan dan historis yang dihadapi umat Islam tampak beberapa persoalan yang mendasar yang sedang terjadi yang memerlukan observasi yang tajam atas hakekat gejala yang membawa dampak luas. Umat Islam tampaknya belum mengalami perkembangan yang berarti dalam hal kesiapan dan kedewasaan menghadapi tekanan dan tantangan baik dari dalam sebagai bagian dari dinamika internal maupun dari luar sebagai bagian dari tekanan global. Spiritualitas umat berhadapan langsung dengan materialitas yang telah mengancam posisi agama sebagai aura yang menjiwai dan sebagai sumber penataan kehidupan umat. Untuk itulah kebijakan dan pendidikan agama yang responsif dan kontekstual mendesak dibutuhkan. Pertanyaan penting di sini menyangkut: sejauh mana kurikulum pendidikan agama (Islam) telah disesuaikan dengan perkembangan jaman; sejauh mana sumber daya manusia pemangku agama memiliki kapasitas yang cukup untuk membendung arus besar globalisasi; dan sejauh mana kelembagaan agama dikembangkan untuk mencapai kinerja yang unggul dalam menciptakan kemaslahatan bagi orang banyak.

Agama diharapkan menjawab tantangan-tantangan kemanusiaan demi menegakkan kredibilitasnya di mata umat. Dan itu harus dimulai dari banyak pertanyaan tentang seberapa agama mengenal siapa saja pemeluknya dan apa saja persoalan nyata yang dihadapi umatnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan inilah buku yang ditulis oleh seorang intelektual Muslim ini perlu dibaca karena buku ini memperkaya identifikasi kita terhadap begitu banyak agenda yang harus direnungkan. Kalau pun buku ini tidak membantu kita menjawab pertanyaan tentang krisis kehidupan kita, saya yakin buku Prof. Abdullah Idi ini mampu membantu kita merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis.

DAFTAR BACAAN

- Abdillah, Masykuri. 2003. "Toleransi Beragam Dalam Masyarakat Demokrasi dan Multikultural". *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, INIS dan PBB. Leiden-Jakarta.
- Abdullah, Husnial Hussein. 1993. *Sejarah Perjuangan RI Kemerdekaan RI di Bangka- Belitung*. Editor: Abdul Samad dan Ali Asgar. PT. Karya Unipress. Jakarta.
- Abdullah, Irwan. 1994. "Market, Consumption, and Lifestyle Management," makalah yang disampaikan dalam *International Seminar on Social and Cultural Dimension of Market Expansion*. Batam, 3-5 Oktober.
- . 2007. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, M. Amin. 2012. "Etika Tauhidik sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama: Dari Paradigma Positivistik-Sekuleristik ke Arah Teo-Antroposentristik-Integralistik" dalam *Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum*. IAIN Sunan Kalijaga Press, Jogjakarta.
- Abdullah, Taufik. 1999. "Apakah Muncul Pola Kepemimpinan Baru Umat?", *Mencari Pemimpin Umat: Polemik tentang Kepemimpinan Islami di Tenga Pluralitas Masyarakat*. Mizan. Bandung.
- Abdul Fatah, R. 2004. *Sosiologi Agama*. Kencana Mas. Ciputat. Jakarta Selatan.

- Abdul Munir Mulkhan. 1989. *Perubahan Pola Perilaku dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987*. Rajawali Press. Jakarta.
- Abd. Rahman Assegaf. 2004. "Membangun Format Pendidikan Islam di Era Globalisasi".b Mahalli dan Mustofa (Eds.), *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*. Ar-ruzz, Yogyakarta.
- Abdurrahman, Muslim. 1989. "Bagaimana Indonesia Dibaca Pemikir Islam; Sebuah Resensi Pemikiran", dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'in Saleh (Eds.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Cet. I, P3M, Jakarta.
- Ahmed, Akbar. 2007. *Journey into Islam: The Crisis of Globalization*. Washington DC: Brookings Institution Press.
- Alavi, Hamid Reza. 2007. "Al-Ghazali on Moral Education", *Journal of Moral Education*, Vo. 36, No. 3, September 2007. Pp. 309-319.
- _____. 2007. "Islamic Values: a distinctive framework for moral education", *Journal of Moral Education*, Vo. 36, No. 3, September 2007. Pp. 283-296.
- Alfauzan Amin. 2013. "Globalisasi dan Pendidikan Pesantren", *Makalah Mata Kuliah Sosiologi Pendidikan*. Program Doktor, Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang.
- Alisjahbana, S. Takdir. 1983. *Socio-Cultural Creativity: In the Converging and Restructuring Process of the New Emerging World*. Penerbit Dian Rakyat. Jakarta.
- Alison Atwell. 2013. *Peningkatan Sekolah Efektif (Modul)*. Jakarta.
- Aminah, Siti. 2014. *Kuasa Negara pada ranah Politik Lokal*. Frenadamedia Group. Jakarta.
- Amirurrasyid, Harun. 196. *Kajian Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu*, Pustaka Melayu, Singapura, 1966, hlm. 4-5 (diakses via internet, 27/9/2014).
- Appadurai, Arjun. 1994. "Global Ethnoscapes: Notes and Queries for Transnational Anthropology", dalam R.G. Fox (ed), *Recapturing Anthropology: Working in the Present*. Santa Fe, NM: School of American Research Press.

- Harun Amirrasyid, *Kajian Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu*, Pustaka Melayu, Singapura, 1966, hlm. 4-5 (diakses via internet, 27/9/2014).
- AlMudra, Mahyudin. 2014. 'Redefinisi Melayu: Upaya Menjembatani Perbedaan Kemelayuan Dua Bangsa Serumpun', *Melayu Online.com* (diakses, 27/9/2014).
- Al-Munawar, Sayid Agil H. 2002. "Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dan Sistem Pendidikan Islam". *Jurnal Concie'ncia*, Nomor 2 Volume II Desember 2002.
- Almalik, M.J. 2002. "Memahami Nasionalisme: Dari Konteks dan Isu strategis untuk Melawan Kejahatan Manusia". *Jurnal Wacana*, Edisi 10 2002.
- Arsyad, Azhar. 2011. Strategi dan Implementasi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi", *Makalah the Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)*, Pangkal Pinang, Bangka-Belitung, 10-13 Oktober 2011.
- Azizy, A. Qodry. 2000. "Mengembangkan Struktur Kefakultasan IAIN", dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (Eds.), *Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Departemen Agama RI.
- Anita Lie, "Pendidikan Berkualitas Masih Sekedar harapan". *Kompas*, 7 Mei 2012.
- Anwar, D.F., 2007, "Hubungan Islam dan Barat". *Makalah Annual Conference Islamic Studies (ACIS)*, ke-VII, 21-24 UIN Riau Pekanbaru.
- Arbi, Armawati. 2012. *Psikologi Komunikasi dan Tabligh*. Amzah. Jakarta.
- Arsyad, Azhar. 2011. Strategi dan Implementasi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi", *Makalah the Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)*. Pangkal Pinang, Bangka-Belitung, 10-13 Oktober 2011.
- A. Steenbrink, Karel. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. LP3ES. Jakarta.
- Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI. 2003. *Memelihara Tradisi, Merayakan Inovasi, 25 Tahun*

- Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Penyunting*
Mudjahid AK dan Achmad Syahid. Jakarta.
- Balitbang Diklat Departemen Agama RI. 2008. *Buku Sosialisasi Surat Keputusan Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Perintah kepada penganut, anggota, dana/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat*. Departemen Agama RI, 2008.
- Barbari. 1984. "Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pembauran Bangsa". *Analisis*. September 1984. Hlm. 690.
- Basyuni, M.M. 2006. *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*. Badan Litbang dan Diklat. Departemen Agama RI.
- Bagong Suyanto. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Barnadib, Imam. 1994. *Filsafat Pendidikan, Sistem dan Metode*. Penerbit Andi Offset, Jogjakarta.
- Basyuni, M.M. 2006. *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*. Badan Litbang dan Diklat. Departemen Agama RI.
- Bell, D. 1996. "Ethnicity and Social Change". *Ethnicity*. Edited by John Hutchinson and Anthony D. Smith. Oxford University Press. Oxford. New York.
- Bennet, Clinton. 2005. *Muslims and Modernity: An Introduction to the Issues and Debate*. London: Continuum.
- Berger, Peter. 1990. *The Sacred Canopy: Elements of Social Theory of Religion*. New York: Double Day.
- Beyer, Peter. F. 1991. "Privatization and the Public Influence of Religion in Global Society," dalam Mike Featherstone (ed.), *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity*. London: Sage Publications.
- . 1994. *Religion and Globalization*. London: Sage Publications.
- Bourdieu, Pierre. 1984. *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Budisetyagraha. 2000. "Dakwah Islam dikalangan Etnis Tionghoa untuk Mengokohkan Integrasi Bangsa". *Makalah Seminar*

- Nasional*. Tanggal 12 September 2000. IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Budi Wahuni. 2012. "Pembangunan Remaja Masih Terpinggirkan", *Kompas*, 7 Mei 2012.
- Brent, M. Low. 2005. "Self Esteem is related to Aggression, Anti Social Behavior, and Delinquency. Research Article". *Journal of American Psychological Society* 2005. Pages 328-335.
- Coser, L.A. 1985. *The Functions of Social Conflict*. A Free Press Paperbak. MacMillan Publishing Co., Inc.
- Craig A. Anderson dan Brad J. Bushman, "Effect Of Violent Video Games On Aggressive Behavior, Aggressive Cognitiom, Aggressive Affect, Physiological Arousal, And Prosocial Behavior". *American Psychological Society* 2001. Pp. 353-359.
- Dahana. 1999. "Cina Perantauan, Linkage Ekonomi dan Upaya Pembauran". *Pribumi-Nonpribumi, Mencari Format baru Pembauran*. Editor: Moh. Sa'dun. Cidesindo. Jakarta.
- Daradjat, Zakiah. 1971. *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*. Bulan-Bintang. Jakarta.
- Daulay, M. Richard. 2003. *Mewaspada Fanatisme Kesulatan, Ancaman Disintegrasi Bangsa*. Departemen Agama RI.
- Daya, B. 2000. "Etnis Tionghoa dan Perkembangan Islam di Indonesia". *Makalah Seminar Nasional*. Tanggal 12 September 2000. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Delany, Gerard. 2003. *Community: Key Ideas*. London: Routledge.
- Departemen Agama RI. 2003. *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2008. *Buku Sosialisasi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*. Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2003. *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2008. *Buku Sosialisasi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*. Jakarta.

Daradjat, Z. dkk. 1996. *Pendidikan Islam*. Bumi Aksara bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Departemen Agama RI. Jakarta.

Departemen Agama RI. 2003. *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta.

Departemen Agama RI. 2007. "Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan", *Materi Pembekalan Untuk Calon Peserta*, Direktorat Pendidikan Madrasah, Departemen Agama RI. Jakarta.

Departemen Agama RI, 2008. *Buku Sosialisasi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*. Jakarta.

Damono, Sapardi Djoko. 1992. *Keterampilan Berbahasa dan Menulis dalam Berbagai Pendekatan dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra*, Muljanto Sumadi. Editor. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2004. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Depdikbud. 1984. *Kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Atas: Garis-Garis Besar Program Pengajaran*. Jakarta: Balitbang.

Diem, Chuzaimah Dahlan. 1990. *Minat Baca Kita: Kenyataan, Kendala, dan Upaya*.

Djojonegoro, Wardiman. 1993. "Remaja, Penelitian, dan Bintang" dalam *Republika*, 10 Agustus 1993.

DP, Tampubolon. 1990. *Kemampuan Membaca dan Teknik Membaca Efektif dan Efisien*. Bandung: Angkasa.

Departemen Agama RI. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah*. Jakarta.

_____. 2006. *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006*. Sekretaris Badan Litbang dan Diklat.

_____. 2007. "Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan", *Materi Pembekalan Untuk Calon Peserta*. Jakarta.

_____. 2003. *Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Memelihara Tradisi*.

Merayakan Inovasi, 25 Tahun Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Penyunting Mudjahid AK dan Achmad Syahid. Jakarta.

Depdiknas. 2008. *Model Penyelenggaraan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional*. Direktorat Sekolah Menengah Atas. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.

Depdiknas. 2008. *Model Penyelenggaraan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional*, Direktorat Sekolah Menengah Atas. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.

Diekmann, Andreas. 1996. "Social Status and Aggression". *The Journal of Social Psychology*, 1996, 136(6). Pages 761-768.

Dimitriadis, Greg and Kamberelis, Greg. 2006. *Theory for Education*. Routledge. New York. London.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2004. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Darwis, M. 2013. "Demokrasi Berlabel Amuk Massa". *Kompas*, 4 April 2013.

Daniel U. Livine and Robert J. Havighurst. 1989. *Society and Education*, Seven Edition, Allyn and Bacon, Boston, London, Sydney, and Toronto.

Ellis, Arthur K., Cogan, John J., and Howey Kenneth R. 1986. *Introduction to the Foundations of Education*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Ekosusilo, Madyo dkk. 1990. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Semarang: Dahara Prize.

Ella Yulaelawati. 2004. *Kurikulum dan Pembelajaran: Filosofi, Teori, dan Aplikasi*. Pakar Raya. Bandung.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana Prenada Media Group.

E. Mulyasa. 2012. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Bumi Aksara. Jakarta.

- _____. 2008. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Penerbit Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Fahri Hamzah. 2012. *Demokrasi, Transisi, Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik, Faham Indonesia*. Jakarta.
- Feagin, J.R. & Feagin, C.B. 1993. *Racial and Ethnic Relations*. Prentice Hall. Englewood Cliffs. New Jersey.
- Featherstone, Mike. 1991. *Global Culture: Nationalism, Globalization, and Modernity*. London: Sage Publications.
- Freedman, A.L. 2001. "The Effect of Government Policy and Institutions on Chinese Overseas Acculturation: The Case of Malaysia". *Journal of Modern Asian Studies*. Volume 35 Number (2001). Hlm 411-440.
- Furnivall, J.S. 1980. "Plural Societies", *Sociology as Southeast Asia: Readings on Social Change and Development*. Edited by Hans-Dieter Evers. Oxford University Press. Oxford. New York.
- Fajar, A.M. 2013. 'Paradigma Kajian Islam di tengah Dinamika Pendidikan di Indonesia', *Paper pada Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)*, IAIN Mataram, Lombok, 18-21 November 2013.
- Freedman, A.L. 2001. "The Effect of Government Policy and Institutions on Chinese Overseas Acculturation : The Case of Malaysia." *Journal of Modern Asian Studies*. Volume 35 Number (2001). Hlm. 411-440.
- Furnivall, J.S. 1980. "Plural Societies", *Sociology as Southeast Asia: Readings on Social Change and Development*. Edited by Hans-Dieter Evers. Oxford University Press. Oxford. New York.
- Gary Graig, Tania Burchardt, and David Gordon (Editors). 2008. *Social Justice and Public Policy: Seeking fairness in diverse societies*. The Policy Press. University of Bristol. UK.
- Goldsmith, Marshall. 1998. "Global Communication and Communities of Choice", dalam F. Hesselbein et al. (ed.), *Community of the Future*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Goodlad, John I. 1984. *A Place Called School, Prospects for the Future*. McGraw-Hill Paperbacks. New York.

- G. William Skinner, 1996. : Creolized Chinese Societies in Southeast Asia ", in Anthony Reid (Ed.), *Sojourners and Settlers, Histories of South east Asia and Chinese*, South East Asia Publication Series. Australia.
- Gordon, M.M. 1964. *Assimilation in American Life: The Role Of Race, Religion, and National Origins*. Free Press, New York.
- Hamid, F. 2001. "Urgen Penerapan Belajar Aktif (*Active Learning*) dalam Proses Pembelajaran". *Jurnal Ta'dib*, No. 04 Maret 2001.
- Handayani, W. 1992. "Asimilasi di Pontianak". *Tesis S2. Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Harun, Amran 1967. "Pengaruh Agama Islam dalam Hukum Adat di Bangka", *Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. ix-x.
- H.A.R. Tilaar. 2012. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Transformatif untuk Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Heidhues, Merry F. Sommers 1996. "Chinese Settlements in Rural South-East Asia: Unwritten Histories" in Anthony Reid (Ed.), *Sojourners and Settlers, Histories of South-East Asia and the Chinese*, South-Asia Publications Series. Australia.
- Hidayah, Z. 1996. *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Hidayat, D. 2000. "Pluralisme an Inklusivisme Agama dalam menuju Indonesia Baru: Perspektif Agama Buddha". *Dialog Peningkatan Kerjasama Sosial Kemasyarakatan Antarumat Beragama di Sumatera Selatan*. Tanggal 14 Oktober 2000. IAIN Raden Fatah Palembang. Sumatera Selatan.
- Hidayat, Rahmad. 2014. *Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Hadjodipuro, Siswojo. 1987. *Karya Ilmiah*. Jakarta: Erlangga.

- Halstead, J. Mark. 2007. "Islamic Values: a distinctive framework for moral education" *Journal of Moral Education*, Vol. 36, No. 3, September 2007. Pp. 285.
- Hatamar. 2005. "Islam dan Demokrasi", *Disertasi (Unpublish)*, Jakartal UIN Syarif Hidayatullah.
- Hudson, R.A. 1960. *Learning language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hussein, Muhammad Zaki. 2002. "Globalisasi dan Nasib Negara Bangsa". *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 10, Tahun III 2002.
- Hafid Abbas. 2000. "Agenda Strategis Pengembangan Pendidikan Menuju Masyarakat Madani", *Makalah disampaikan pada Kuliah Umum Program Master Studi Islam*. UII Jogjakarta.
- Handoko, T Hani. 1996. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, BPFE-UGM, Jogjakarta.
- H.A.R. Tilaar. 2012. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- _____. 2004. *Multikulturalisme: Tantangan-tantagan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Grasindo. Jakarta.
- Hasan Shadily. 1984. *Ensiklopedi Pendidikan*, Penerbit Ikhtiar. Jakarta.
- Hasbullah Bakry. 1992. *Sistematika Filsafat*, Penerbit Wijaya. Jakarta.
- Harmadhi, Sonny Harry B. 2012. "Pembangunan Remaja Masih Terpinggirkan", *Kompas*, 7 Mei 2012.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik, untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Halstead, J. Mark, "Islamic Values: a distinctive framework for moral education", *Journal Education*, Vol. 36, No. 3, September 2007. Pp. 283-296.
- Hamid, F. 2001. "Urgen Penerapan Belajar Aktif (*Active Learning*) dalam Proses Pembelajaran". *Jurnal Ta'dib*, No. 04 Maret 2001.

Haryatmoko, 2011. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Fansyuri, Mirza. 2007. "Membudayakan Membaca dan Menulis". *Berita Pagi*. 2 November 2007.

Idi, Abdullah dan Jalaluddin. 2012. *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan*. Cetakan ke-2. Rajawali Pers. Jakarta.

Idi, Abdullah dan Toto Suharto. 2006. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Tiara Wacana. Yogyakarta.

Idi, Abdullah. 2003. "Pemberdaayaan Pendidikan Multikultural di Indonesia", *Jurnal Conciencia*, Nomor 1 Volume III, Juni 2003, hlm. 26-35.

_____. 2005. "Reformasi Pendidikan Tinggi Islam: Urgensi Perubahan IAIN menjadi UIN bagi Masyarakat Sumatera Selatan". *Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam*, Editor: Toto Suharto, et al. Kerjasama Penerbit Circle of Raden Fatah Postgraduate Students (CORPUS) dengan Global Pustaka Utama. Jogjakarta.

_____. 2007. "Islam dan Pluralisme: Analisis Sosiologis-Keagamaan terhadap Peranan Umat Islam Indonesia dalam Memperkuat Integrasi Sosial". *Makalah disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar bidang Sosiologi pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang*. Academic Centre IAIN Raden Fatah Palembang, 9 Agustus 2007.

_____. 2011. "The Challenges and Requirements of Teachers of Madrasah in Indonesia". *Mozaik Pemikiran: Bunga Rampai Pemikiran Islam Indonesia*. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kementerian Agama RI. Jakarta.

_____. 2011. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Kerjasama The Centre of Inter-Ethnics, Religious and Educational Studies (CIERes) dan Ar-Ruzz Media. Jogjakarta.

_____. 2013. *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, Edisi ke-3. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.

_____. 2012. "Materi Kuliah Sosiologi Korupsi". *Etika dan Perilaku Organisasi*, Program Magister Administrasi Publik

(MAP). Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL)
Candradimuka Palembang.

_____. 2009. *Asimilasi Cina dan Melayu di Bangka*, Editor: Norhuda, Penerbit Tiara Wacana. Yogyakarta.

_____ (Pengantar). 2011. *Kegelisahan Spiritual Masyarakat Modern dan Pendidikan Islam*. Ditulis Jamalaluddin Umar I.R. Tunas Gemilang Press. Sumatera Selatan.

_____. 2004. "Asimilasi Orang Cina di Bangka". *Jurnal Intizar: Jurnal Kajian Agama Islam dan Masyarakat* Vol. 10/ No. 1/Juni 2004. Terakreditasi SK. No. 49/DIKTI/Kep. 2003 Tanggal 9 Desember 2003. Pusat Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang. Hlm. 1-19.

_____. 2014. "Orang Melayu: Istilah, Jati Diri, dan Globalisasi". Disampaikan pada *Seminar Nasional Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang*. Tanggal 23 September 2014.

_____. 2010. "Aliran Sesat: Perspektif Sosiologis". *Diskusi Litbang Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang*. Tanggal 17 Oktober 2010.

_____ (Translator). 2003. *Sejarah Islam Spanyol (A History of Islamic Spain, Montgomery Watt, 1992)*. Pustaka Raja. Yogyakarta.

_____. 2006. "RUU PDRE dan Masalah Mayoritas-Minoritas". *Sumatera Ekspres*, 17 Maret 2006.

_____. 2006. *Bangka: Sejarah Sosial Cina & Melayu*. Ar-Ruzz. Yogyakarta.

_____. 2009. "Asimilasi Cina dan Melayu di Bangka". *Publikasi Disertasi*, Penerbit Tiara Wacana, Jogjakarta, .

_____. 2010. "Mereduksi Konflik Negara: Malaysia-Indonesia". *Berita Pagi*, 2/9/2010.

_____. 2011. *Bangka, Sejarah Sosial Cina-Melayu*. Tiara Wacana. Jogjakarta.

_____. 2006. "Etnisitas, Agama dan Integrasi Bangsa : Analisis Sosiologi Terhadap PBM No. 9 & No. 8/2006". *Orasi*

Ilmiah Dalam Rangka Wisuda Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang. Tanggal 29 Nopember 2006. Hlm. 3.

_____. 2010. *Konvensi Kekeragaman Sosial: Kemajemukan dan Pluralisme sebagai Kekuatan Bangsa*. Dinas Sosial Pemrov. Sumatera Selatan. Hotel Carrissima. Tanggal 22 Mei 2010.

_____. 2006. "Etnisitas, Agama dan Integrasi Bangsa: Analisis Sosiologis terhadap PBM No. 9 & No. 8/2006". *Makalah Orasi Ilmiah dalam rangka Wisuda Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang. Tanggal 29 Nopember 2006. Hlm. 3.*

_____. 2007. "Islam dan Pluralisme: Analisis Sosiologis-Keagamaan terhadap Peranan Umat Islam Indonesia dalam Memperkuat Integrasi Sosial", *Makalah disampaikan pada Acara Pengukuhan Guru Besar bidang Sosiologi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang, 9 Agustus 2007, di Academic Centre IAIN Raden Fatah Palembang.*

_____. 2010. "Dari 'Collies' ke Politisi: Pergeseran Peran Ekonomi ke Politik Etnis Cina/Tionghoa Bangka Belitung pada PascaReformasi" pernah dimuat dalam *Jurnal Administrasi Publik Vol. 05 No. 01 Januari 2010*, Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Pascasarjana STISIPOL Candradimuka Palembang. Sumatera Selatan. Hlm. 1-10.

_____. 2007. 'Pendidikan Gratis, Why Not'. *Berita Pagi*, 18 Desember 2007.

_____. 2010. "Pluralisme dan Integrasi Sosial". *Konvensi Kekeragaman Sosial: Kemajemukan dan Pluralisme sebagai Kekuatan Bangsa*. Dinas Sosial Pemrov. Sumatera Selatan, Hotel Carrissima. Tanggal 22 Mei 2010.

_____. 2009. "Idul Fitri 1430 H. dan Ketakwaan Umat". *Khotbah Idul Fitri*. di Masjid Darul Aqobah, PT. Pupuk Sriwijaya. Palembang.

_____. 2008. 'Peranan TV Lokal'. *Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) terhadap Lembaga Penyiaran Lokal (Palembang TV dan Sriwijaya TV), 3 Nopember 2008. Sekretariat KPI Sumatera Selatan.*

- _____. 2014. "Istilah Cina, Tionghoa dan Politik". *Sriwijaya Post*, 2 April 2014.
- _____. 2011. 'Refleksi Buku: Bangka, Sejarah Sosial Cina-Melayu'. *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)*. Novotel Hotel, Pangkalpinang, Bangka-Belitung Tanggal 10-13 Oktober 2011.
- _____. 2010. "Islam dan Pluralisme: Analisis Sosiologis-Keagamaan terhadap Peran Umat Islam Indonesia dalam Memperkuat Integrasi Sosial", dalam *Wajah Islam Indonesia: Perspektif Sosial, Kultural, Hukum, dan Pendidikan*. Idea Press dan Corpus Jogakarta. Jogakarta.
- _____. 2013. "Pilgub Sumsel: Antara Etika Politik & Agenda Reformasi". *Sriwijaya Post*, 27 Mei 2013.
- _____. 2010. "Mereduksi Konflik Negara: Malaysia-Indonesia". *Berita Pagi*. Tanggal 2 September 2010.
- _____. 2012. "Konflik SARA di Asia: Belajar dari Indonesia". *Sriwijaya Post*. Tanggal 13 Nopember 2012.
- _____. 2008. "The Kingdom of Sriwijaya and Social Integrated Values" was presented in *the International Seminar on Sriwijaya Civilisation*. LIPI-Balai Arkelologi South-Sumatra, Novotel Hotel, Palembang, Indonesia, 16-19th July, 2008.
- _____. 2008. "Primordialisme pada Pemilu 2008". *Sumatera Ekspres*. Tanggal 15 Maret 2008.
- _____. 2010. "Aliran Sesat: Perspektif Sosiologis". *Diskusi Litbang Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang*. 17 Oktober 2010.
- _____. 2008. 'Antisipasi Konflik Sosial Bernuansa Agama'. *Berita Pagi*. Tanggal 13 Maret 2008.
- _____. 2005. *Workshops Peningkatan Wawasan Keagamaan Guru-Guru SMP di Palembang*, tanggal 15-17 September 2005, di Kanwil Depag Sumatera-Selatan.
- _____. 2007. "Islam dan Pluralisme: Analisis Sosiologis-Keagamaan terhadap Peranan Umat Islam Indonesia dalam Memperkuat Integrasi Sosial", *Makalah disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Sosiologi*

pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang.
Tanggal 9 Agustus 2007.

_____. 2003. "Imlek, Idul Adha, dan Krisis". *Sumatera Ekspres*, 1 Februari 2003.

_____. 2003. "Hikmah Ramadhan: Puasa dan Pemberdayaan Umat". *Media Sumatera*. Tanggal 30 Oktober 2003.

_____. 2000. "Otonomi Daerah dan Pembangunan Terkendali". *Sumatera Ekspres*. Tanggal 12 Agustus 2000.

_____. 2000. "Umat Islam, Otonomi Daerah dan Pendidikan". *Sumatera Ekspres*. Tanggal 22 September 2000.

_____. 2000. 'Umat Islam, Otonomi Daerah, dan Pendidikan'. Edisi terakhir dari dua tulisan. *Sumatera Ekspres*. Tanggal 29 September 2000.

_____. 2013. "Mencari Calon Presiden yang Amanah". *Sumatera Ekspres*. Tanggal 27 September 2013.

_____. 2003. 'Hikmah Ramadhan: Puasa dan Pemberdayaan Umat'. *Media Sumatera*. Tanggal 30 Oktober 2003.

_____. 2006. "Peranan Negara Kepada Perguruan Tinggi". *Sumatera Ekspres*, 28 April 2006.

_____. 2009. 'Menyikapi Nilai Kebangkitan Nasional'. *Dialog-Interaktif Dalam Rangka Memperingati Hari Kebangkitan Nasional*, di TVRI Palembang. Tanggal 20 Mei 2009.

_____. 2006. 'Memaknai Idul Fitri dlm Kehidupan Berbangsa'. *Sumatera Ekspres*. Tanggal 21 Oktober 2006

_____. 2008. 'Antisipasi Konflik Sosial Bernuansa Agama'. *Berita Pagi*. Tanggal 13 Maret 2008.

_____. 2009. 'Krisis Spiritual Manusia Modern'. *Kata Pengantar* untuk Buku Jamaludin LR, 2009.

_____. 2013. *Materi Khutbah* disampaikan pada Idul Adha 1434 H di Lapangan Rumah Dinas Bupati Banyu Asin. Sekayu. Tanggal 15 Oktober 2013.

- _____. 2009. 'Ujian Nasional dan Standar Kelulusan'. *Majalah Rukun Umat*. Edisi 11/Tahun II/April 2009.
- _____. 2003. "Pemberdayaan Pendidikan Multikultural di Indonesia", *Jurnal Conciencia*, Nomor 1 Volume III, Juni 2003. Hlm. 26-35.
- _____. 2006. "Peranan Negara Kepada Perguruan Tinggi". *Sumatera Ekspres*, 28 April 2006.
- _____. 2013. "Pilgub Sumsel 2013: Antara Etika Politik & Agenda Reformasi", *Sriwijaya Post*. Tanggal 27 Mei 2013.
- _____. 2011. "Masyarakat Pluralistik: Menumbuhkan Sikap Arief, Rukun, dan Berkepribadian pada Generasi Muda". Disampaikan dalam *Kegiatan Peningkatan Wawasan Multikultural bagi Lembaga Pendidikan Plural, Litbang Kementerian Agama RI & Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan*. di Hotel Jayakarta Dayra, Palembang. Tanggal 6 April 2011,
- _____. 2006. 'Prospek Profesi Guru'. *Sumatera Ekspres*. Tanggal 21 Desember 2005.
- _____. 2007. 'Dilema Pembiayaan Pendidikan di PTAI: Antara Kemandirian dan Subsidi Pemerintah'. *Pendidikan Tinggi Islam Dalam Sorotan*. Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang.
- _____. 2003. "Pemberdayaan Pendidikan Multikultural di Indonesia". *Conciencia: Jurnal Pendidikan Islam*, Nomor 1 Volume III, Juni 2003. Hlm. 26-35.
- _____. 2013. *Materi Khutbah* disampaikan pada Idul Adha 1434 H di Lapangan Rumah Dinas Bupati Banyu Asin. Sekayu. Tanggal 15 Oktober 2013.
- _____. 2011. "Pendidikan Karakter dan Generasi Muda". *Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis dan Wisuda*, Politeknik Sriwijaya, Kampus Bukit Besar. Palembang. Tanggal 15 September 2011.
- _____. 2007. "Masyarakat Plural dan Isu HAM di Indonesia". *Jurnal Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat Vol. 7, Nomor 2, Desember 2007*. Hlm. 151-153.

- _____. 2004. "Natural Asimilation: Cina dan Melayu-Bangka". *Jurnal Intizar* Vol. 10/No.1/Juni 2004.
- _____. 2014. "The Ethnic Minority Conflicts: Cases of Ethnic Minority Muslim in Myanmar, Thailand, Philipine, China, and Indonesia", *Proceeding International Seminar on Malay Islamic Civilization: Tradition and Contribution to The Development of Islam at Southeast Asia*. Academic Centre, Islamic State University (UIN) Raden Patah Palembang, South Sumatra. Indonesia, 10-11 November 2014.
- Idi, Abdullah dan Muhammad Fauzi. 2003. "Islam dan Etika Kerja". *Sumatera Ekspres*. Tanggal 13 Juni 2003.
- Idiyanto, Agus dan Kuswanjono, Arqom. 2012. *Agama, Budaya, dan Bencana: Kajian Integratif Ilmu, Agama, dan Budaya*. Kerjasama Penerbit Mizan dan CRCS-UGM. Jogjakarta.
- Iman, Muis Sad. 2004. *Pendidikan Partisipatif*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Indonesia Journal of Social and Cultural Anthropology*, Th. XXVI, No. 69 sept-Des 2002.
- Ishomudin. 2002. *Pengantar Sosiologi Agama*. Kerjasama Penerbit Ghalia Indonesia dan UMM Press. Malang. Jawa Timur.
- Jalal, Faisal dan Supriadi, Dedi (ed.). 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita Karya Nusa. Yogyakarta.
- Jalaluddin dan Usman Said. 1994. *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Pengembangan Pemikirannya*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Jalaluddin. 2006. "Peran Lembaga Pendidikan dalam upaya Pemberantasan Korupsi", *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Editor: Suyitno dan Heri Junaidi. Penerbit Gama Media. Yogyakarta.
- _____. 2006. "Peran Lembaga Pendidikan dalam upaya Pemberantasan Korupsi", *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Editor: Suyitno dan Heri Junaidi, Gama Media. Yogyakarta.
- Jamal Ma'mur. 2009. *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional*. Diva Press. Jogjakarta.

- J.S. Furnivall, 1980. "Plural Societies", dalam *Sociology of Southeast Asia: Readings on Social Change and Development*. Edited by Hans-Dieter Evers. Oxford University Press. New York.
- J.S. Nasikun, 2005. *Sistem Sosial Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Jujun Srisumantri. 2000. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Penerbit Sinar Harapan. Jakarta.
- Jurdi, Syarifudin. 2010. *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Aksi Sosial*. Kencana. Prenada Media Group. Jakarta.
- K. Berten. 2011. *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Kenedy, P. 1993. *Preparing for Twenty-first Century*, Harper Collin, Australia.
- Khairul A. Mastro, Putai Jin dan Martin Cooper, 2000. "Malay Culture and Personality". *Journal of American Behavioral Scientist*, Vo. 44, No. 1, September 2000. Page. 96.
- Khaeron, Herman. 2013. *Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam*, Penerbit Nuansa Cendekia. Bandung.
- Karel A. Steenbrink. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. LPjES: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta.
- Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, Rajawali Press. Jakarta.
- Kivimaki, T. 2005. "The Study of Ethnic Conflicts in Multicultural Societies", dalam Dewi Fortina Anwar, Helene Bouvier, Glenn Smith, Roger Tol, R. (Eds.). *Violent Internal Conflicts in Asia Pasific, Histories, Political Economies and Policies*, Yayasan Obor Indonesia, LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV-Jakarta. Jakarta.
- Kelly, A.V. 2006. *The Curriculum: Theory and Practice*. Fifth Edition. Sage Publication Limited. London.
- Kenedy, P. 1993. *Preparing for Twenty-first Century*. Harper Collin. Australia.
- Koentjaraningrat. 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. UI-Press. Jakarta.

- Kumandar. 2007. *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuntowijoyo. 1994. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*. Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kuswanjono, Arqom et al. (ed.). 2001. *Revitalisasi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & UGM.
- Kwartanada, D. 2000. "Minoritas Cina dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942-1945", *Penguasa Ekonomi dan Sosial Pengusaha Tionghoa*. Leknas-LIPI-YOI-Gramedia. Jakarta.
- Koehn, Daryl. 2000. *Landasan Etika Profesi*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Kurokawa, M. (Ed.). 1972. *Minority Respons: Comparative Views of Reactions of Subordination*. Randam House. New York.
- Langgulang, Hasan "Pendidikan Islam dalam Masyarakat Demokrasi". *Concencia: Jurnal Pendidikan Islam, No. 1, Volume III, Juni 2003*.
- Leo Suryadinata, 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. LP3ES. Jakarta.
- Lombard, Dennys, 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian II Jaringan Asia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Lubis, Idrus. 1986. *Pengajaran Bahasa Indonesia (Tinjauan Pelaksanaan Aspek Pengajaran Membaca dan Menulis)*. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2008. "Kepemimpinan dalam Keragaman Budaya". *Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III*. Edisi Tahun 2008. Jakarta.
- Levine, D.U and Havighurst, R.j. 1989. *Society and Education*. Seventh Edition. USA.
- Luthans, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi Kesepuluh. (Original English Edition: *Organization a Behavior 10th Edition, Copyright The MacGrew-Hill Companies, Inc., 2005*) Penerjemah; Vivin Andhika Yuwono, Shekar Purwanti, Th. Arie P, dan Winong Rosari. Penerbit Andi. Yogyakarta.

- Liddle, R.W. 1997. "Coercion, Co-optation and the Management of Ethnic Relations in Indonesia", *Government Policies and Ethnic Relations in Asia and the Pasific*. Editors: Michael E. Brown and Sumit Ganguly. CSIA Studies in International Security. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts, London, England.
- Lombard, Dennys, 1996. *Java Nusa: Cross-Cultural*. Part II Network Asia. Scholastic Press. Jakarta.
- Mackie, J.A.C. 1991. "Peran Ekonomi dan Identitas Etnis Cina Indonesia dan Muangthai", dalam Jennifer Cushman dan Wang Gung Wu (Eds.). *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Madjid, Nurcholish. 2013. "Peranan Islam dalam Proses Politik di Indonesia", *Islam Kemodernan dan keindonesiaan*, Pengantar: Anies Baswedan dan Dawam Raharjo. Penerbit Mizan. Bandung.
- _____. 1985. *Islam, Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Paramadina. Jakarta.
- Mastuhu .2003. "Mencari Paradigma Baru Pendidikan yang Lebih Baik Islami Millenium III", *Jurnal Ta'dib*, Nomor 04, Maret 2002, hlm. 10.
- _____. 2001. "Mencari Paradigma Baru Pendidikan yang Lebih Baik - Islami - Melinium ke III". *Jurnal Ta'dib*, No. 04 Maret 2001.
- _____. 2001. "Pendidikan Islam di Indonesia Masih Berkutat pada Nalar Klasik". *Jurnal Taswirul Afkar*. LAKPESDAM NU. Jakarta.
- _____. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. INIS. Jakarta.
- Manfred Ziemek. 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. P3M: Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Jakarta.
- Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Pengantar: Kamanto Sunanto. Rajawali Pers. Jakarta.

- . 2012. *Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Editor: Santi Pratiwi Tri Utami. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Martin Van Bruinessen. 1992. 'Pesantren dan Kitab Kuning, Pemeliharaan dan Kesenambungan tradisi Pesantren'. *Ulumul Qur'an II*. Jakarta.
- Maya H. 2012. *Kesalahan-Kesalahan Umum Kepala Sekolah dalam Mengelola Pendidikan*. Penerbit Buku Biru. Jogjakarta.
- Munir Amin, Syamsul. 2010. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Amzah. Jakarta.
- Muhaimin. 2004. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Pusat Studi Agama, Publik dan Masyarakat (PSAPM) Surabaya.
- Merton, Robert K. 1949. *Social Theories and Social Structure*. The Free Press. Illionis,
- M.N.J. Court, 1821. *An Exposition of the Relations of the British Government with the Sultan and State of Palembang and the Design of the Netherlands Government upon that Country*, Prabury & Allen, London.
- Murphy, Daniel. 2007. *Professional School Leadership-Dealing with Dilemmas*. Dunedin Academic Press. Scotland.
- M. Ziemek, 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Diterjemahkan oleh Butche B. Soendjojo. P3M. Jakarta.
- Madiana dan Hasnah. 2014. *Pengkajian Malaysia*, Penerbitan Fajar Bakti, Shah Alam, Malaysia, hlm. 140 (diakses, 27/9/2014).
- Maya H. 2012. *Kesalahan-Kesalahan Umum Kepala Sekolah dalam Mengelola Pendidikan*. Penerbit Buku Biru. Jogjakarta.
- Munir Amin, Syamsul. 2010. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Amzah. Jakarta.
- Murphy, Daniel. 2007. *Professional School Leadership-Dealing with Dilemmas*. Dunedin Academic Press. Scotland.
- Merton, Robert K. , 1949. *Social Theories and Social Structure*. The Free Press. Illinois,

- M.N.J. Court, 1821. *An Exposition of the Relations of the British Government with the Sultan and State of Palembang and the Design of the Netherlands Government upon that Country*. Prabury & Allen, London.
- Mulyana, S. 2006. *Sriwijaya*. PT. LKiS Pelangi Aksara. Yogyakarta.
- M. Zen., A.P. 2005, "Komentar Hukumi Hak-hak Kelompok Minoritas dalam Norma dan Standar Hukum Internasional Hak Asasi Manusia". *Hak minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, Editor Hikmat Budiman. The Interseksi Foundation. Jakarta.
- M. Arfie. TT. *Pendidikan Islam dalam Arus Dinamika Masyarakat*. Golden Trayon Press. Jakarta.
- Mauludi, Sahrul. 2012. *Ibnu Khaldun: Perintis Ilmu Sosial Modern*. Dian Rakyat. Jakarta.
- Martinus, Yamin. 2006. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. Gaung Persada Press. Jakarta.
- Miftah Thoha. 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moleong, L. J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT. RemajaRosdakarya. Bandung.
- Muchtar Buchori. 2005. *Indonesia Mencari Demokrasi*. Penerbit INSIST Press. Jogjakarta.
- Muhaimin. 2011. *Manajemen Pendidikan, Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Kencana. Jakarta.
- Muhammad Mufid. 2009. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Muhammad Rohman. 2012. *Manajemen Pendidikan Analisis dan Solusi Terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran yang Efektif*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta.
- Mohamad Uzer Usman. 2002. *Menjadi Guru Profesional*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhadar. 1993. "Integrasi dan Adaptasi WNI Keturunan Cina di Kelurahan Betung Kodya Ujung Pandang". Tesis S2. Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

- Mulayasa, E. 2008. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulkhan, Abdul Munir. 1989. *Perubahan Pola Perilaku dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987*, Rajawali Press. Jakarta
- Musdah Mulia, Siti . 2004. "Harus Ada Pembelaan terhadap Masyarakat untuk Menghentikan Malpraktek di PTAI". *Jurnal Inovasi Pendidikan Tinggi Agama Islam*, Vol. VII/No.02/2004. Hlm.6-8.
- Musthafa al-'Adawy, Syaikh. 2009. *Fiqih Pendidikan Anak*. Qisthi Press. Jakarta.
- M. Atho Mudzar. 2000. "Kedudukan IAIN sebagai Perguruan Tinggi", dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (Eds.). *Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam*. Departemen Agama RI. Jakarta.
- Nasution, A.H. 1997. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jilid 1. Kerjasama DISJARA-AD dan Penerbit Angkasa. Bandung.
- Nasution, S. 1989. *Kurikulum dan Pengajaran*. Bina Aksara. Jakarta.
- Nordholt, Henk Schulte dan Samuel, Hanneman (Eds.). 2004. "Introduction: Indonesia After Soeharto: Rethinking Analytical Categories". *Indonesia in transition: Rethinking Civil Society, Region, and Crisis*. Pustaka Pelajar. Jogjakarta.
- Parson, Talcott. 1966. "A Paradigm for the Analysis of Social System and Change", dalam N.J. Demerath and A. Richard Peterson (Ed.), *Sistem of Change and Conflict*. The Free Press. New York.
- Parson, Talcott. 1966. "A Paradigm for the Analysis of Social System and Change", dalam N.J. Demerath and A. Richard Peterson (Ed.), *Sistem of Change and Conflict*. The Free Press. New York.
- Parekh, Bhikhu. 2002. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Harvard University Press. Cambridge. Massachusetts.
- Paul J. Baker, Louise E. Anderson, dan Dean S. Dorn. 1992. *Social Problems: A Critical Thinking Approach*, Second Edition, Wadsworth Publishing Company. California.

- Paul Suparno dan Daed Joesoef. 2012. "Pendidikan Indonesia: Harapan dan Kenyataan". *Kompas*. Tanggal 7 Mei 2012.
- Pelly, U. 1994. "Masalah Asimilasi Keturunan: Sebuah Gugatan Sosio-Kultural". *Analisis CSIS, Tahun XXIII, No. 1 Januari-Februari*. Hlm.55-63.
- Poerwanto. 1990. "Orang Khek di Singkawang: Suatu Kajian Mengenai Masalah Asimilasi Orang Cina Dalam Rangka Integrasi Nasional di Indonesia". *Disertasi (Tidak Publikasi)*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Reddy, V.N.K. 1985. *Problems of futurology*. Starling Publishers Private Limited. New York.
- Rozi, Safuan. 2003. "Mendorong Laju Gerakan Multikultural di Indonesia". *Jurnal Masyarakat Indonesia, Jilid XXIX No. 1/2003*. Hlm. 91-92.
- Rizanto, A. 2008. *Mereka Menodai Islam, Menyibak Peran Gelap Yahudi di Balik Aliran Sesat dalam Islam*. Mihrab. Jakarta.
- Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Prenada Media. Jakarta.
- Parson, Talcot 1966. "A Paradigm for the Analysis of Social Systems and Change", in NJ Demerath and A. Richard Peterson (Ed.). *Systems of Change and Conflict*. The Free Press, New York.
- Ramayulis. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Kalam Mulia. Jakarta.
- Reksohadiprojo, M.S. 1976. "Pertahankan Keanekaragaman Kebudayaan". *Prisma, Nomor 8 (Agustus 1976)*. LP3ES. Jakarta. Hlm.55-56.
- Riznanto, Ahmad. 2008. *Mereka Menodai Islam, Menyibak Peran Gelap Yahudi di Balik Aliran Sesat dalam Islam*. Mihrab. Jakarta.
- Reza Alavi, Hamid. 2007. "Islamic Values: a distinctive framework for moral education", *Journal of Moral Education, Vo. 36, No. 3, September 2007* Pages. 283-296.
- Richard M. Steers, 1985. *Efektivitas Organisasi*, Penerbit Erlangga. Jakarta.

- Ritzer, George (ed.). 2007. *The Blackwell Companion to Globalization*. London: Blackwell Publishing.
- Rozi, S. 2003. "Mendorong Laju Gerakan Multikultural di Indonesia". *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Jilid XXIX, No.1 / 2003. Hlm. 91-108.
- Sallis, E. 2006. *Total Quality Management in Education, Management Mutu Pendidikan*. Ahli Bahasa: Ahmad Ali Riyadi, et al. IRCiSoD. Jogjakarta.
- Sri Edi Swasono. 2012. "Reformasi Pendidikan Kehilangan Roh". *Media Indonesia*. Tanggal 8 Mei 2012.
- Sri Sultan Hamengku Buwono X. 2012. "Reformasi Pendidikan Kehilangan Roh". *Media Indonesia*. Tanggal 8 Mei 2012.
- Schroeder, Ralph. 1992. *Max Weber and the Sociology of Culture*. Sage Publications. London, Newbury Park. New Delhi.
- Sutari Imam Barnadib. 1994. *Filsafat Pendidikan, Sistem dan Metode*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Simpson, G.E dan Yinger, J.M. 1972. *Racial and Cultural Minorities: An Analysis of Prejudice and Discrimination*. Harper and Row Publication. New York.
- Supeno. 1995. *Potret Guru*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Suseno, Frans Magniz, 2003. "Factors Underlying the Occurrence of Conflicts Between Ethnic Group and Religion in Indonesia: Prevention and Resolution", in *Communal Conflict in Indonesia Current*. Indonesia-Netherland Coperation in Islamic Studies (INIS) and The Center for Languages and Cultures. State Islamic University Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Siahaan, M. 1989. "Pembauran di Kalimantan Barat: Prospek dan Perspektif Sejarahnya". *Interaksi Antarsuku Bangsa dalam Masyarakat Majemuk*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Smith, A.D. 1971. *The Theories of Nazionalism*. Harper & Row Publisher. New York.
- Susiatiningsih, H.R. 1995. "Proses dan Prospek Integrasi WNI Keturunan Cina di Singkawang". *Tesis S2*. Program Studi Ilmu

- Politik Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial. Fakultas Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Sairin, Sjafrin. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Sihombing, Albet Barita Marulam. 2012. "Pendidikan dan Budaya Hukum, Belajar dari Pengalaman Taiwan". *Media Indonesia*. Tanggal 30 April 2012.
- Simatupang, Maurits. 1986. "Penerjemahan Karya Tulis Ilmiah" dalam *Majalah Bahasa dan Sastra, Tahun V No. 3*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta.
- G.E. Simpson dan J.M. Yinger. 1972. *Racial and Cultural Minorities: An Analysis of Prejudice and Discrimination*, Harper and Row Publication. New York.
- Safarina, HD. 2010. 'Upaya Meningkatkan Minat Baca Siswa Madrasah Aliyah (MAN) 2 Palembang'. *Hasil Penelitian Sumatera-Selatan (Contributor)*.
- _____. 2009. 'Madrasah Berstandar Nasional dan Guru Profesional', yang pernah dimuat dalam *Jurnal Quantum Nomor Vol 4 No. 2 Mei-Agustus 2009*.
- _____. 2008. "Urgensi Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran". *Makalah* disampaikan pada Wisuda Sarjana STKIP Sera Lahat. Sumatera-Selatan. Tanggal 24 Mei 2008.
- Sinambela, L.P. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Simpson, G.E. dan Yinger, J.M. 1972. *Racial and Cultural Minorities : An Analysis of Prejudice and Discrimination*. Harper and Row Publication. New York.
- Suparlan, S. 2003. "Etnisitas dan Potensinya Terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia." *Konflik Komunal di Indonesia Saat ini*. Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) dan The Center for Languages and Cultures. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Hlm. 79-90.

- Skinner, G. William. 1996. "Creolized Chinese Societies in Southeast Asia", dalam Anthony Reid (Ed.), *Sojourners and Settlers, Histories of South East Asia and Chinese*, South East Asia Publication Series. Australia.
- Stanton, Charles Michael. 1994. *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, Alih Bahasa Afandi dan Hasan Asari. Logos Wacana Ilmu. Jakarta.
- Suseno, Franz Magnes. 2003. "Faktor-Faktor yang Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia: Pencegahan dan Pemecahan". *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) dan The Center of Languages and Cultures. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Suprayogo, Imam. 2005. "Madrasah dan Masala jati Diri Pendidikan Islam". *Jurnal Edukasi: Jurnal Penelitian Agama dan Keagamaan*, Volume 3, Nomor 1, Januari-Maret 2005. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. Departmen Agama RI. Hlm. 5-22.
- Supraptiningsih. 2005. "Keterampilan Membaca". *Makalah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal pendidikan dasar dan menengah. Pusat Pengembangan dan Penataran Guru Bahasa.
- Supriyoko. 1993. "Pendidikan Politik di Era-Globalisasi", M. Masyhur Amin & Ismail S. Ahmad (Eds.), *Dialog Pemikiran Islam dan Realitas Empirik*, (Yogyakarta: LKPSMNU).
- Stephen P. Robbins. 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Prenhallindo. Jakarta.
- Sjarkawi. 2011. *Pembentukan Kepribadian Anak*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suharto, Toto. 2006. *Filsafat Pendidikan Islam*. Ar-Ruzz Media. Jogjakarta.
- Supiana, 2006. "Peran Lembaga Pendidikan dalam upaya Pemberantasan Korupsi", *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Editor: Suyitno dan Heri Junaidi. Gama Media. Yogyakarta.
- Sutarto. 1991. *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*, Gadjah Mada University Press. Jakarta.

- Sunyoto. 1986. 'Ajaran Tasawuf dan Pembinaan Sikap Hidup Santri Pesantren Nurul Haq Surabaya: Studi Kasus'. *Tesis (Tidak Dipublikasikan)*. FPS IKIP Malang, Jawa Timur.
- Suprayogo, Imam. 2005. "Madrasah dan Masala jati Diri Pendidikan Islam". *Jurnal Edukasi: Jurnal Penelitian Agama dan Keagamaan, Volume 3, Nomor 1, Januari-Maret 2005*. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. Departmen Agama RI. Hlm. 5-22.
- Tafsir, Ahmad. 1994. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tamim, F . 2004. *Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, Jakarta: Blantika.
- Takdir Ilahi, Muhammad. 2012. *Nasionalisme: Dalam Bingkai Pluralitas Bangsa*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*. Penerbit Asa Mandiri. Jakarta, 2008.
- Usman, Mohamad Uzer. 2002. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Usman, Sunyoto. 2005. 'Elite dan Masyarakat'. *Materi Kuliah Sosiologi Program Doktor Sosiologi*. FISIPOL. Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta.
- Wahono, Francis. 2012. "Kekerasan Pendidikan: Suatu Tinjauan Sosio-Ekonomi Didaktika", *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 9 Tahun III, 2002*. Hlm. 91-104.
- Weber, Max. 1996. "The Origins of Ethnic Groups". *Ethnicity*. Edited by John Hutchinson and Anthony D. Smith. Oxford University Press.
- _____. 1958. *The Protestant Ethics and teh Sipirit of Capitalism*. Diterjemahkan oleh Talcott Parsons. Charles Scribner's Son. New York.
- Winarno, Budi. 2007. *Globalisasi & Krisis Demokrasi*. Media Pressindo. Jakarta.

- Yang, T.P. 2000. "The Chinese Business elite in Indonesia and the transition to independence, 1940-1950". *The Economic Review*, February, 2000. Hlm. 38-40.
- Yulk, Gary. 1994. *Leadership in Organization*, Prentice-Hall International Inc. New York.
- Zaini, Syahminan dan Alwi, Murini. 2004. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Kalam Mulia. XJakarta.
- Zakaria, Y.R., 2000, "Kemajemukan Masyarakat Bangsa Indonesia", dalam Noer Fauzi, *Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah: Pergeseran Politik Dibawah Problem Agraria*. Laperia Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Zamroni. 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Gavin Kalam Utama. Yogyakarta.
- Zuraidah, Desire dan Jufrina Rizal (Eds.). 1993. *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan: Pokok-Pokok Pikiran Selo Soemardjan*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Yamin, Martinus. 2006. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, Gaung Persada Press. Jakarta.
- Yunus, Mahmud. 1942. *Attarbiyatu wa al-Ta'lim*, Jilid 1. Al-Maktabah al-Sa'diyah, Padang Panjang.
- Zakaria, Yando R. 2000. "Kemajemukan Masyarakat Bangsa Indonesia", dalam Noer Fauzi, dkk. *Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah: Pergeseran Politik dibawah Problem Agraria*, Laperia Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Zamakhsari Dhofier. 1994. *Tradisi Pesantren: Studi Kasus tentang Kehidupan Kyai*. LP3ES. Jakarta.
- Zamroni. 2012. *Pendidikan Demokrasi dalam Masyarakat Multikultural*. Gavin Kalam Utama, Yogyakarta.

Bacaan Lain:

Kompas, 7/12/2009.

_____, 17/10/ 1997.

_____, 18/9/ 1990.

_____, 7/1/2003.

_____, 21/4/2004.

_____, 22/11/2000.

_____, 3/10/2010.

_____, 2 /3/2013.

_____, 14/12/2013.

Kabar Sumatera, 18/7/ 2012.

Media Indonesia, 7/11/ 2011.

_____, 4/11/ 2011.

_____, 8 /11/ 2011.

_____, 4/4/2006.

Republika, 4/9/1995.

_____, 4/8/2007.

_____, 25/3/2005.

_____, 5/9/2005.

_____, 23/03/2003

_____, 14/10/2000.

_____, 19/11/2000.

Reuters, 3/10/2010.

Sumatera Ekspres, 21/12/2005.

_____, 7/12/ 2005..

_____, 21/12/2005..

_____, 28/4/2006.

_____, 25/6/2007.

_____, 28/11/2007.

_____, 31/7/2007

_____, 17/3/2008.

_____, 6/4/2015.

Swara: Media Informasi Ditpertaiss, Nomor 12 Tahun II, 31 Juli 2004

Stannia, Edisi Juli/1998.

Tempo, 18-24 Mei 2015.

_____, 11/9/2005

_____, 11-17/2013.

<http://rantaunet.org>

<http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/membangun-karakter-generasi-muda> (diakses: tanggal 22/10).

[http://kawulamuda.ofees.net/budaya-membangun-karakter-bangsa-melalui media massa televisi](http://kawulamuda.ofees.net/budaya-membangun-karakter-bangsa-melalui-media-massa-televisi) (diakses 22/10/2011).

<http://civicara.com/penelitian-toleransi-antar-agama-di-indonesia-rendah/> (diakses, 4/4/2013).

www.id.wikipedia.org (diakses, 7/12/2013).

TENTANG PENULIS



Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed. (idi_abdullah@yahoo.com), lahir di Bangka pada 27/09/1965 adalah Guru Besar/Profesor Sosiologi (SK Mendiknas RI sejak 1/12/2006). Sejumlah riset telah dilakukan bertalian dengan: sosiologi, agama dan pendidikan. Penulis artikel di jurnal, media massa, dan berpartisipasi pada berbagai forum ilmiah pada level nasional dan international. Salah satu dari '100 Tokoh Inspirasi Sumatera Selatan' versi *Koran Radar Palembang* (2014). Berpartisipasi pada: *Short-Course on Social Welfare, McGill University, Montreal-Canada (2007)*; pendamping: *Research Fellowships Program bagi Dosen PTAI se-Indonesia, Program Academic Recharging for Islamic Studies (ARFI), The University of Melbourne, Victoria, Australia (2010)*; dan *Professor Fellowships, Gottingen Universitat, German, Program ARFI, Kementerian Agama RI, 2012*.

Pendidikan:

Sekolah Dasar (SD)/*Diniyah* (1979), SLTP (1982), SLTA (1985) di Bangka; S1 (Drs.) Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Fak. Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang (1990); Program Pembibitan Dosen IAIN se-Indonesia di IAIN (kini UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (1991); *Master of Education (M.Ed.), School of Education, University of Tasmania, Australia (1994)* atas beasiswa *The Australian International Assisten Burreau (AIDAB)*; dan S3 (Dr) Sosiologi, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2006).

Pengalaman Profesional:

Sejak 1991-sekarang, menjadi dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang. Memberi kuliah: di Program Pascasarjana IAIN (UIN) Raden Fatah Palembang (2006-sekarang);

Program Magister Administrasi Publik (MAP) STISIPOL Candra dimuka (2006-sekarang); Program Pascasarjana (S2 Sosiologi) Universitas Sriwijaya (2011-sekarang). Menjadi Pembantu Rektor III IAIN Raden Fatah Palembang (2003-2007), Direktur Program Magister Administrasi Publik (MAP) STISIPOL Candra dimuka Palembang (2008-2011), Wakil Ketua Ikatan Sarjana Sosiologi Indonesia (ISI) Sumatera-Selatan (2013-sekarang); Wakil Ketua Forum Intelektual Sumatera Selatan (2015-sekarang); dan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang (2012-sekarang).

Publikasi Ilmiah:

Filsafat Pendidikan, Edisi ke-1, 2002, Penerbit PT. Gaya Media Pratama Jakarta (bersama: Prof. Dr. H. Jalaludin); Edisi ke-2, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2007; Edisi ke-3, 2011, Edisi ke-4, 2014, PT. Rajawali Grafindo, Jakarta; *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Penerbit PT. Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999; Edisi ke-2 diterbit Ar-Ruzz Media Jogjakarta, 2007; Edisi ke-3/2011, Ar-Ruzz Media Jogjakarta; Edisi ke-4, PT. Rajawali Grafindo, Jakarta, 2014; *The Conditions for Learning at University: A Comparison Between Indonesia and Tasmania, Australia: A Cross Socio-Cultural Studies (Tesis S2)*, Unsri Press, 2001; *Islam: Dalam Sejarah dan Budaya Sumatera Selatan*, Unsri Press (2001, Co-Author/Contributor); *Sejarah Perkembangan Islam di Eropa (A History of Islamic Spain)*, Montegomerry Watt, Edinburgh University, 1992, Pustaka Raja Jogjakarta, 2003 (Translator); *Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam, et al*, Global Pustaka Jogjakarta (2005), Co-Author/Contributor); *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Tiara Wacana Jogjakarta (bersama: Dr. Toto Suharto, 2006); *Sejarah Sosial Cina dan Melayu Bangka*, Ar-Ruzz Media Jogjakarta (2006), Edisi ke-1 dan Edisi ke-2, 2011, Tiara Wacana, Jogjakarta; *Asimilasi Melayu dan Cina di Bangka*, Penerbit Tiara Wacana Jogjakarta (2009); *Wajah Islam Indonesia: Perspektif Sosial, Kultural, Hukum, dan Pendidikan*, Penerbit Idea Press Yogyakarta dan Corpus Yogyakarta, 2010 (Co-Author/Contributor); *Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat dan Pendidikan*, Penerbit PT. Rajawali Grafindo, Jakarta, Edisi 1 (2011), Edisi ke-2 (2011), Edisi ke-3 (2013), dan Edisi ke-4 (2014); *Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, PT. Rajawali Grafindo, Jakarta, Edisi-1, 2015 (bersama Safarina Hd, M.Pd., M.Si.).